



TRANSFORMASI
EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA
TINJAUAN EMPIRIS PERUBAHAN
MASYARAKAT DI DAERAH
LINGKAR TAMBANG BATU HIJAU



.....

TRANSFORMASI
EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA
TINJAUAN EMPIRIS PERUBAHAN
MASYARAKAT DI DAERAH
LINGKAR TAMBANG BATU HIJAU

.....

LALU WIRESAPTA KARYADI
MUHAMMAD SIDDIK
SADIKIN AMIR



Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)

Judul : Transformasi Ekonomi dan Sosial Budaya Tinjauan
Empiris Perubahan Masyarakat di Daerah Lingkar
Tambang Batu Hijau
Penulis : Lalu Wiresapta Karyadi
Muhamad Siddik
Sadikin Amir
Editor : Sarkawi, SH., MH.
Layout : Albadawi
Design Sampul : Usman Ali
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa
Jumlah Halaman : 650 + xxxiv hlm.
Dimensi Buku : 15 cm x 23 cm

Penerbit:

Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)
e-mail : pustakabangsa05@gmail.com
website : <https://pustakabangsa.com/>

Alamat:

- I. Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Gerisak, Mataram-NTB
Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281999271122
- II. Jalan Udayana Mataram-NTB
(Jln. Gili Gde No.12, Komplek Pertokoan Nusantara)
Telp. (0370) 7508536 / Mobile Phone; +628111444499

Cetakan Pertama: November 2022

ISBN: Proses

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan. Kehidupan dan perkembangan kehidupan manusia dan masyarakatnya senantiasa bergerak mengikuti keinginan perubahan itu sendiri. Pernyataan “ sesungguhnya yang tetap ada dalam kehidupan manusia adalah perubahan itu sendiri” adalah benar adanya. Perubahan adalah tujuan dari kehidupan itu sendiri. Salah satu fenomena perubahan sosial yang terjadi adalah dengan beroperasinya perusahaan tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Eksplorasi tambang emas dan tembaga Batu Hijau dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dan memulai tahap persiapan dan konstruksi tambang di akhir dekade tahun sembilanpuluhan. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT), di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa termasuk katagori penambangan skala besar. Dengan demikian, berbagai aktivitas yang terkait dengan penambangan tersebut, mulai dari tahap persiapan dan konstruksi, terlebih lebih tahap produksi menimbulkan

transformasi yang berimplikasi pada terjadinya perubahan sosial. Secara teoritis, perubahan sosial dapat bermuatan positif (konstruktif) dan negatif (destruktif). Kecenderungan perubahan sosial, baik yang konstruktif maupun destruktif anantara lain timbul karena terjadinya transformasi usaha dan tenaga kerja, serta transformasi sosial budaya lainnya.

Tulisan di dalam buku ini menyajikan senarai konsepsi dan teori serta hasil penelitian panjang (*longitudinal study*) tentang perubahan sosial ekonomi dan budaya yang terjadi di daerah lingkaran tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian tersebut dilakukan mulai sejak selesainya tahap persiapan dan konstruksi tambang tahun 2000 dan dilakukan setiap tahun sampai berakhirnya operasi PT. NNT tahun 2017. Untuk memberikan gambaran empiris perubahan sosial yang terjadi sebagai dampak beroperasinya perusahaan tambang maka tulisan ini menyajikan hasil studi empiris pada 3 (tiga) momen, yaitu : akhir masa konstruksi / awal masa produksi (tahun 2000), masa setelah satu dekade masa produksi (tahun 2010) dan masa di akhir produksi tambang PT. NNT (tahun 2016). Penyajian tiga masa tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran perubahan sosial secara cepat yang terjadi di pedesaan daerah lingkaran

Pada tahap persiapan kegiatan penambangan telah terjadi pembebasan tanah masyarakat dan tanah negara. Kegiatan pembebasan lahan tersebut

menimbulkan perubahan orientasi, pola pekerjaan, dan perilaku masyarakat secara umum. Pada tahap konstruksi yang ditunjukkan dengan berkembangnya aktivitas pembangunan fisik prasarana jelas akan membuka kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi sebagian masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat dari daerah lain. Peluang berusaha tentu menjadi daya tarik datangnya pekerja dari luar dan tinggal berdomisili di lokasi sekitar kawasan penambangan. Hal ini jelas akan menimbulkan proses asimilasi, akulturasi dan sejenisnya yang berdampak juga pada perubahan sosial masyarakat. Dari pengalaman yang ada, diketahui bahwa pada tahap konstruksi, jumlah serapan tenaga kerja paling banyak, baik tenaga kerja luar daerah maupun tenaga kerja lokal. Dengan demikian, arus perubahan sosial sesungguhnya dimulai dan meningkat pesat pada tahapan konstruksi tersebut. Pada tahapan produksi, jumlah tenaga kerja secara kumulatif menurun sejalan dengan berkurangnya peluang kerja yang tersedia. Namun demikian, kegiatan produksi tersebut tetap membawa dampak terhadap perubahan sosial masyarakat.

PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) sebagai pelaksana proyek penambangan di Kabupaten Sumbawa sejak awal telah mengantisipasi terjadinya perubahan sosial, terutama yang dinilai negatif khususnya oleh masyarakat lokal. Antisipasi tersebut antara lain dilakukan dengan jalan pembinaan kepada

masyarakat setempat dengan melibatkan berbagai pihak seperti : Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah Daerah. Pembinaan tersebut diharapkan agar masyarakat setempat dapat menikmati dan memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang di kawasan penambangan tersebut.

Namun demikian, tidak semua kegiatan pembinaan tersebut dinilai berhasil atau menghasilkan perubahan sosial yang dinilai positif. Persoalan yang terkait dengan perubahan kultural dinilai sebagai aspek perubahan yang sulit diprediksi dan dikendalikan secara baik. Hal ini antara lain disebabkan karena aspek kultural terkait dengan aspek perilaku masyarakat secara umum.

Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi bahan kajian perubahan sosial khususnya di daerah pedesaan atau setidaknya memberi gambaran proses transformasi ekonomi dan sosial budaya yang terjadi dengan hadirnya intervensi pembangunan diberbagai bidang.

Mataram, 28 Oktober 2022

ttd

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	ix
DAFTAR TABEL -----	xv
DAFTAR GAMBAR -----	xxix
BAB I. PEMBANGUNAN, MOBILITAS PENDUDUK DAN PERUBAHAN SOSIAL : <i>PERSFEKTIF TEORITIS</i> -----	1
A. Tinjauan tentang Perubahan Sosial Budaya.-----	1
1. Bentuk/Pola Perubahan Sosial.-----	3
2. Faktor Penyebab Perubahan Sosial.-----	5
3. Dampak Perubahan Sosial -----	6
B. Konsep dan Teori Perubahan Sosial.-----	7
1. Teori Evolusioner-----	8

2.	Teori Sistem-----	12
3.	Fenomenologi dan Teori Sosial----	16
4.	Implikasi terhadap teori sosial----	20
5.	Teori Pertukaran .-----	23
6.	Teori Pilihan Rasional -----	31
7.	Teori Psikologi Sosial -----	34
C.	Konsep dan Teori Pembangunan -----	35
D.	Konsep dan Teori Mobilitas -----	42
1.	Teori Struktural, Individu, dan Sistem Jaringan (<i>Network System</i>) -----	44
2.	Teori Pendekatan Sistem (<i>System Approach</i>) -----	46
3.	Teori Transisi Mobilitas -----	47
4.	Teori Ravenstein (Teori Hukum Mobilitas)-----	49
5.	Model Gravitasi dan Teori Peluang -----	51
6.	Model Nilai - Harapan -----	52
7.	Teori Keputusan Migrasi-----	57
BAB II.	KONTEKS, METODOLOGI DAN LINGKUP STUDI -----	59
A.	Konteks Kajian -----	59
B.	Metodologi-----	62
C.	Gambaran Umum Daerah Lingkar Tambang Sebelum Operasi Tambang Batu Hijau -----	69
1.	Kondisi Tofografi dan Iklim -----	70
2.	Kondisi Penduduk -----	71
3.	Kondisi Sarana Pendidikan-----	75

4.	Kondisi Kesehatan -----	75
5.	Kondisi Pertanian -----	77
6.	Kondisi Sarana Perhubungan dan Komunikasi-----	78
7.	Sumber Keuangan -----	79
BAB III.	TRANSFORMASI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA MASA AWAL PRODUKSI TAMBANG BATU HIJAU-----	81
A.	Perkembangan Daerah Lingkar Tambang Awal Masa Produksi-----	82
1.	Administrasi Pemerintahan -----	82
2.	Tata Guna dan Nilai Lahan-----	84
3.	Keadaan Irigasi-----	90
4.	Prasarana dan Sarana Transportasi -----	93
5.	Prasarana dan Sarana Perekonomian.-----	95
6.	Penduduk -----	97
B.	Transformasi Ekonomi pada Awal Masa Produksi-----	100
1.	Ketenagakerjaan.-----	101
2.	Usaha Ekonomi Masyarakat -----	120
3.	Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga-----	152
4.	Dasar Perekonomian Lokal -----	164
5.	Perbankan dan Jasa Kredit -----	174
6.	Pariwisata dan Rekreasi -----	176
7.	Pembayaran PT.NNT Kepada Pemerintah-----	177
C.	Transformasi Sosial Budaya pada Awal Masa Produksi-----	179

1.	Perubahan pada aspek gaya hidup-----	179
2.	Nilai Sosial -----	211
3.	Pembauran Sosial-----	218
4.	Tatanan Sosial Budaya -----	225
5.	Keamanan dan Ketertiban Sosial-----	235
6.	Infrastruktur Sosial Budaya ----	247
D.	Perkembangan Kesehatan Masyarakat pada Awal Masa Produksi-----	252
1.	Sarana dan Prasarana Kesehatan -----	253
2.	Perkembangan Penyakit -----	258
3.	Standar Kualitas Hidup -----	264
4.	Air Bersih-----	270
5.	Kondisi Perumahan dan Listrik--	272
BAB IV.	TRANSFORMASI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA AKHIR DEKADE PERTAMA PRODUKSI TAMBANG BATU HIJAU-----	283
A.	Perkembangan Ekonomi Masyarakat -----	283
1.	Perkembangan Ketenagakerjaan-----	284
2.	Perkembangan Usaha Masyarakat Lokal -----	297
3.	Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga-----	341
B.	Perkembangan Sosial Budaya -----	352
1.	Perubahan gaya hidup -----	353
2.	Sistem Norma dan Nilai Sosial---	370

3.	Keamanan dan Ketertiban Sosial-----	409
4.	Infrastruktur Sosial Budaya ----	425
5.	Perkembangan Pendidikan -----	430
C.	Perkembangan Aspek Kesehatan Masyarakat -----	437
1.	Layanan Kesehatan Masyarakat-----	437
2.	Perkembangan Penyakit -----	441
3.	Jumlah Tenaga Medis di Puskesmas -----	445
4.	Sarana dan Prasarana Kesehatan -----	449
5.	Program Kesehatan -----	454
6.	Air Bersih-----	455
BAB V.	TRANSFORMASI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAERAH LINGKAR TAMBANG MENJELANG AKHIR BEROPERASINYA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA -----	463
A.	Transformasi Ekonomi Masyarakat--	463
1.	Perubahan Struktur Ketenagakerjaan -----	464
2.	Perkembangan Usaha Masyarakat Lokal -----	475
3.	Pendapatan dan Pengeluaran Rumah tangga -----	532
B.	Transformasi Sosial Budaya -----	543
1.	Perubahan Gaya Hidup -----	543
2.	Perubahan Sistem Norma dan Nilai Sosial -----	548

3. Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Lokal -----	570
4. Keamanan dan Ketertiban Sosial-----	577
5. Pembauran Sosial-----	584
6. Infrastruktur Sosial Budaya -----	588
7. Perkembangan Pendidikan -----	592
C. Perkembangan Kondisi Kesehatan Masyarakat -----	599
1. Angka Kematian Bayi (AKB) -----	601
2. Angka Kematian Ibu (AKI) -----	602
3. Jumlah Kunjungan -----	603
4. Kondisi Kesehatan Masyarakat --	606
5. Perkembangan Penyakit -----	606
6. Tenaga Kesehatan -----	616
7. Sarana dan Prasarana Kesehatan -----	622
DAFTAR PUSTAKA -----	641

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran jumlah responden untuk studi perubahan sosial daerah lingkaran tambang Batu Hijau Sumbawa Barat.	68
Tabel 2.	Kepadatan Penduduk Kecamatan Jereweh Dirinci per Desa Tahun 1999.....	72
Tabel. 3	Jumlah Penduduk di Kecamatan Jereweh Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Tahun 1999.....	74
Tabel. 4	Penerimaan Dana Bantuan Desa Menurut Jenisnya di Kecamatan Jereweh Tahun 1999.....	80
Tabel 5.	Perubahan Tata Guna Lahan Sebelum dan Setelah Tambang, 1996 -2001 (dalam hektar)	86
Tabel 6.	Perubahan Nilai Lahan Pada Masa Sebelum dan Setelah Tambang, 1996-2002 (dalam Rp.000/are).....	89

Tabel 7.	Komposisi Anggota Rumahtangga, Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Pekerja dan Pencari Kerja Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 –2002..	105
Tabel 8.	Perkembangan Tingkat dan Frekuensi Mobilitas Tenaga Kerja Rumahtangga Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 -2002.....	109
Tabel 9.	Perubahan Pekerjaan Pokok Anggota Rumahtangga Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 –2002.....	113
Tabel 10.	Perubahan Pekerjaan Sampingan Anggota Rumahtangga Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 –2002.....	118
Tabel 11.	Perubahan Luas Pemilikan/Penguasaan Lahan Pertanian Oleh Rumahtangga selama Periode 1995-2002.	123
Tabel 12.	Perubahan Jumlah Pemilikan Khewan Ternak Oleh Rumahtangga Sampel Sebelum dan Setelah Tambang, 1995-2002.....	135
Tabel 13.	Perubahan Jumlah Pemilikan/Penguasaan Alat Tangkap Perikanan Laut Oleh Rumahtangga Sampel Sebelum dan Setelah Tambang, 1995-2002.....	140
Tabel 14.	Perubahan Rata-Rata Pendapatan Rumahtangga Berdasarkan Harga Berlaku Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 –2002.....	158
Tabel 15.	Rata-Rata Pengeluaran Rumah tangga Sebelum Tambang (1995) dan SetelahTambang (2002) Berdasarkan Harga Berlaku.	162

Tabel 16.	Sebaran Responden Berdasarkan Pemilikan Barang Prestisius Sebelum dan Sesudah tambang, 1995- 2002.....	189
Tabel 17.	Proporsi Responden Berdasarkan Penilaiannya Terhadap Prilaku dan Hal-Hal yang Terkait Dengan Moral/Etika Sosial Setelah Tambang, Tahun 2002.....	208
Tabel 18.	Sebaran Responden Berdasarkan Sikapnya Terhadap Masyarakat Pendatang Menurut Daerah Asalnya, 2002.....	224
Tabel 19.	Keberadaan Lembaga Sosial Budaya Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.....	232
Tabel 20.	Jenis dan Intensitas Kriminalitas Sebelum dan Sesudah Tambang, 1995 - 2002.....	237
Tabel 17.	Jenis dan Jumlah Prasarana Sosial Budaya di Desa Lingkar Tambang Sebelum dan Sesudah Tambang, 1995 - 2002.....	249
Tabel 22.	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan dengan Penduduk di Puskesmas Jereweh dan Puskesmas Maluku Tahun 2001.	256
Tabel 23.	Sepuluh Jenis Penyakit Utama Yang Sering Diderita Oleh Masyarakat Sekitar Lingkar Tambang, Tahun 2001.....	260
Tabel 24.	Tempat Berobat Masyarakat Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.	261

Tabel 25.	Jumlah Kunjungan Pasien Puskesmas Sebelum dan Setelah Tambang, 1996 - 2001.....	262
Tabel 26.	Sumber Air Bersih Masyarakat Sebelum dan Setelah Tambang Berproduksi, 1995 - 2002.	271
Tabel 27.	Luas Bangunan Rumah Sebelum dan Setelah Tambang Berproduksi, 1995 - 2002.....	273
Tabel 28.	Jenis Atap Rumah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang Berproduksi, 1995 - 2002.	275
Tabel 29.	Jenis Dinding Rumah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.....	276
Tabel 30.	Jenis Lantai Rumah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.....	277
Tabel 31.	Jenis Penerangan Rumah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.....	280
Tabel 32.	Tempat Pembuangan Sampah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.....	281
Tabel 33.	Struktur Anggota 405 Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.....	285
Tabel 34.	Daerah Tujuan dan Tipe Mobilitas Ekonomi Angkatan Kerja Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.....	292
Tabel 35.	Struktur Pekerjaan Pokok dan Pekerjaan Sampingan Anggota Rumah-tangga Masyarakat Lokal	

	Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.....	294
Tabel 36.	Luas dan Intensitas Tanam Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Tahun 2010.....	301
Tabel 37.	Luas Tanam, Produksi dan Nilai Produksi Beberapa Tanaman Semusim yang Diusahakan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.....	304
Tabel 38.	Luas Tanam, Produksi dan Nilai Produksi Beberapa Tanaman Tahunan yang Diusahakan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.....	305
Tabel 39.	Jumlah Ternak Yang Dimiliki dan Dijual oleh Rumahtangga Masyarakat Lokal di Kawasan Lingkar Tambang Tahun 2010.....	307
Tabel 40.	Aktivitas dan Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Laut, Tahun 2010	312
Tabel 41.	Aktivitas dan Rata-Rata Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Budidaya Rumput Laut, Tahun 2010.....	315
Tabel 42.	Aktivitas dan Rata-Rata Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Darat, Tahun 2010.....	316

Tabel 43.	Aktivitas dan Rata-Rata Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Air Payau, Tahun 2010.....	317
Tabel 44.	Jenis, Nilai Investasi dan Omset Usaha Industri Kerajinan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.....	319
Tabel 45	Jenis, Investasi dan Omset Usaha Dagang Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.....	322
Tabel 46.	Jenis, Nilai Investasi dan Omzet Usaha Jasa Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.....	327
Tabel 47.	Jenis dan Omset Usaha Pencarian Hasil Hutan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.....	331
Tabel 48.	Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Berburuh Harian, Tahun 2010.....	332
Tabel 49.	Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Sebagai Karyawan Swasta, Tahun 2010.....	337
Tabel 50.	Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Sebagai Pegawai Pemerintah, Tahun 2010.....	339
Tabel 51.	Sumber dan Pendapatan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Luar	

	Pencurahan Tenaga Kerja, Tahun 2010.....	341
Tabel 52.	Struktur dan Rata-Rata Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Setiap Bulan, Tahun 2010.....	343
Tabel 53.	Struktur dan Rata-Rata Pengeluaran Konsumtif Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Setiap Bulan, Tahun 2010.....	349
Tabel 54	Sebaran Responden (Rumah Tangga Masyarakat Lokal) di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT Berdasarkan Pola Konsumsi Makanan Tahun 2010.....	356
Tabel 55	Sebaran Responden (Rumah Tangga Masyarakat Lokal) Berdasarkan Kisaran Nilai Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan dan Non Makanan Tahun 2010.....	360
Tabel.56	Sebaran Responden berdasarkan Alokasi dan Prioritas Pengeluaran untuk Kebutuhan Non Makanan Menurut Kelompok Pekerjaan Masyarakat Lokal di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT tahun 2010.....	363
Tabel.57.	Sebaran Responden Berdasarkan Pemilikan Barang Prestisius Sebelum Tambang dan Setelah Produksi tambang (2009 dan 2010).	368
Tabel 58	Sebaran Rersponden Masyarakat Lokal Berdasarkan Sikap (Keterikatannya) terhadap Norma Sosial Tahun 2010.....	375

Tabel 59.	Sebaran Responden Berdasarkan Penilaiannya terhadap Aspek Moral dan Etika Masyarakat Lokal di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT Tahun 2010.....	411
Tabel 60.	Keberadaan Lembaga Sosial Budaya sebelum tambang (1995) dan setelah masa produksi tambang (2007 – 2010) pada 15 Desa Lingkar Tambang PT. NNT.	426
Tabel.61	Ketersediaan inprastruktur sosial budaya di tiga Kecamatan Lingkar tambang tahun 2010	428
Tabel 62.	Perkembangan Pendidikan Formal di Tiga Kecamatan Lingkar Tambang Tahun 2010	432
Tabel 63.	Keadaan Sarana dan Perlengkapan Kegiatan Belajar Mengajar pada SLTP/MTs dan SMA/MA di tiga Kecamatan dalam Lingkar Tambang PT. NNT Tahun 2009.....	436
Tabel 64	Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan masyarakat di daerah lingkar tambang, Tahun 2004,2007, dan 2009 (unit).	440
Tabel 65	Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan masyarakat di Daerah Lingkar Tambang tahun 2005-2009.	440
Tabel 66.	Sepuluh Jenis Penyakit Utama Yang Sering Diderita Oleh Masyarakat Sekitar Lingkar Tambang, Tahun 2010.....	444
Tabel 67.	Sebaran Responden Menurut Tempat Berobat Di Daerah Lingkar Tambang Tahun 2010.	451

Tabel 68.	Sebaran Responden Berdasarkan Sumber Air Bersih Penduduk Daerah Lingkar Tambang Tahun 2010.....	457
Tabel 69.	Struktur Anggota Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	465
Tabel 70.	Daerah Tujuan dan Tipe Mobilitas Ekonomi Angkatan Kerja Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2016.....	469
Tabel 71.	Struktur Pekerjaan Pokok dan Pekerjaan Sampingan Anggota Rumah-tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2016.....	472
Tabel 72.	Luas dan Intensitas Tanam Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Tahun 2015.....	478
Tabel 72.	Luas Tanam. Produksi dan Nilai Produksi Beberapa Tanaman Semusim yang Diusahakan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	482
Tabel 73.	Luas Tanam. Produksi dan Nilai Produksi Beberapa Tanaman Tahunan yang Diusahakan Masyarakat Lokal KawasanTambang PT.NNT, Tahun 2015.....	485
Tabel 74.	Jumlah Ternak Yang Dimiliki dan Dijual oleh Rumah Tangga Masyarakat Lokal di Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	488

Tabel 75.	Aktivitas dan Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Laut. Tahun 2015	493
Tabel 76.	Aktivitas dan Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Air Payau, Tahun 2015.....	494
Tabel 77.	Aktivitas dan Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Air Tawar, Tahun 2015.....	495
Tabel 78.	Jenis, Nilai Investasi dan Omset Usaha Industri Kerajinan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	497
Tabel 79.	Jenis. Investasi dan Omset Usaha Dagang Masyarakat Lokal Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	499
Tabel 80.	Jenis, Nilai Investasi dan Omzet Usaha Jasa Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	502
Tabel 81.	Jenis dan Omset Usaha Pencarian Hasil Hutan Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	504
Tabel 82.	Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Berburuh Harian, Tahun 2015.....	507
Tabel 83.	Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT	

	dari Kegiatan Sebagai Karyawan Swasta, Tahun 2015.	510
Tabel 84.	Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Sebagai Pegawai Pemerintah, Tahun 2015.....	512
Tabel 85.	Perkembangan Jenis, Nilai Investasi dan Omset Usaha Agroindustri Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2013-2015.....	519
Tabel 86.	Sumber dan Total Pendapatan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Luar Pencerahan Tenaga Kerja, Tahun 2015.....	531
Tabel 87.	Struktur dan Rata-Rata Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Setiap Bulan, Tahun 2015.....	533
Tabel 88.	Struktur dan Rata-Rata Pengeluaran Konsumtif Rumah Tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Setiap Bulan. Tahun 2015.....	539
Tabel 89.	Sebaran Responden (Rumah Tangga Masyarakat Lokal) Berdasarkan Pola Konsumsi Makanan Tahun 2015.....	544
Tabel 90	Sebaran Responden Berdasarkan Kisaran Nilai Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan dan Non Makanan Tahun 2015.....	546

Tabel 91	Alokasi dan Prioritas Pengeluaran untuk Kebutuhan Non Makanan Menurut Kelompok Pekerjaan Masyarakat Lokal di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT tahun 2015.....	548
Tabel 92	Tingkat Keterikatan dan Kepatuhan Masyarakat Lokal terhadap Norma Sosial di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT Tahun 2015.....	549
Tabel 93.	Tingkat Keterikatan dan Kepatuhan Masyarakat Lokal terhadap Norma Agama di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT Tahun 2015.....	558
Tabel 94.	Sebaran Responden Berdasarkan Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Lokal di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT Tahun 2015.....	571
Tabel 95	Sebaran Responden Berdasarkan Penilaiannya terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Lokal di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT tahun 2015.....	578
Tabel.96	Ketersediaan infrastruktur sosial budaya di tiga Kecamatan Lingkar tambang tahun 2015	590
Tabel 97.	Perkembangan Pendidikan Formal di Tiga Kecamatan Lingkar Tambang Tahun 2015.....	593
Tabel 98.	Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan masyarakat di daerah lingkar tambang, Tahun 2012, 2013, dan 2014 (unit)	605
Tabel 99.	Jumlah dan sebaran Tenaga Kesehatan di Daerah Lingkar Tambang tahun 2014.....	620

Tabel 100.	Sebaran responden menurut tempat berobat di daerah lingkaran tambang tahun 2014.....	627
Tabel 101.	Sebaran responden berdasarkan sumber air bersih penduduk daerah lingkaran tambang tahun 2014.....	639

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Nilai dan Tujuan yang Berhubungan dengan Migrasi (Chamer's et al, 1977 dalam De Jong dan Fawcett, 1981)..... 56
- Gambar 2. Peta lokasi studi (Kecamatan Jereweh, Maluku, Sekongkang) 66
- Gambar 2b. Perkembangan AHH Penduduk Kabupaten Sumbawa dan NTB, Tahun 1996 - 2001 265
- Gambar 3. Perkembangan Angka Kematian Bayi Penduduk di Kabupaten Sumbawa dan NTB, tahun 1996 - 2001..... 267
- Gambar 4. Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk di Kabupaten Sumbawa dan NTB, tahun 1996 - 2001..... 269
- Gambar 4. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995, 2003-2010..... 288

Gambar 5.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995 dan Tahun 2003-2010.	290
Gambar 6.	Perkembangan Mobilitas Angkatan Kerja Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2003-2010.....	291
Gambar 7.	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Masyarakat Lokal Yang Memiliki Pekerjaan Pokok Sebagai Petani di Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995 dan Tahun 2003-2010.....	296
Gambar 8.	Perkembangan Intensitas Tanam Tahunan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT. Tahun 1995, 2002-2010	302
Gambar 9.	Perkembangan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) dan Ternak Kecil (Kambing) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995, 2002-2010	310
Gambar 10.	Perkembangan Pendapatan Rumahtangga Nelayan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Laut, Tahun 2005-2010.....	314
Gambar 11.	Perkembangan Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/Bln), Tahun 1995, 2000-2010.....	345
Gambar 12.	Perkembangan Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal	

	Kawasan Tambang PT.NNT dari Berbagai Sumber (Rp.000/Bln), Tahun 1995, 2000-2010.....	347
Gambar 13.	Perkembangan Pengeluaran Komsumtif Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/bln), Tahun 1995, 2000-2010.....	351
Gambar 14.	Perkembangan Pendapatan, Pengeluaran Konsumtif dan Pengeluaran Produktif Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/bln), Tahun 1995, 2000-2010.....	352
Gambar 15 :	Sumur Pompa tenaga kincir angin sebagai sumber air bersih masyarakat.....	458
Gambar 16.	TPAK Rumah tangga Masyarakat Lokal di Setiap Desa Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	466
Gambar 17.	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995, 2003-2015.....	466
Gambar 18.	Tingkat Pengangguran Masyarakat Lokal di Setiap Desa Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	467
Gambar 19.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995 dan Tahun 2003-2015.	468

- Gambar 20. Tipe Mobilitas Ekonomi Tenaga Kerja Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2016..... 469
- Gambar 21. Daerah Tujuan Mobilitas Ekonomi Tenaga Kerja Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2016..... 470
- Gambar 22. Perkembangan Mobilitas Angkatan Kerja Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2003-2016..... 470
- Gambar 23. Jenis Pekerjaan Pokok dan Pekerjaan Sampingan Angkatan Kerja Masyarakat Lokal di Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015..... 473
- Gambar 24. Perkembangan Angkatan Kerja Masyarakat Lokal Yang Memiliki Pekerjaan Pokok Sebagai Petani di Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995 dan Tahun 2003-2015..... 475
- Gambar 25. Intensitas Tanam Musiman di Setiap Desa Kawasan Tambang PT.NNT. Tahun 2015..... 479
- Gambar 26. Perkembangan Intensitas Tanam Musiman di Kawasan Tambang PT.NNT. Tahun 2007-2015..... 480
- Gambar 27. Perkembangan Intensitas Tanam Tahunan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995. 2002-2015 481
- Gambar 28. Perkembangan Jumlah Ternak Yang Dimilik Oleh Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995, 2002-2015..... 489

Gambar 29.	Perkembangan Pendapatan Rumah tangga Nelayan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Laut, Tahun 2005-2015.....	493
Gambar 30.	Perkembangan Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/Bln). Tahun 1995. 2000-2015.....	534
Gambar 31.	Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga dari Berbagai Sumber Perbulan, Tahun 1995, Tahun 2000-2015.....	535
Gambar 32.	Perkembangan Pengeluaran Komsumtif Rumah Tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/bln), Tahun 1995, 2000-2015.....	540
Gambar 33.	Rata-Rata Pendapatan, Pengeluaran Konsumtif dan Produktif Setiap Bulan Rumah tangga Di Tiap Desa Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.....	540
Gambar 34.	Perkembangan Pendapatan, Pengeluaran Konsumtif dan Pengeluaran Produktif Rumah tangga Masyarakat Lokal, Tahun 1995, Tahun 2000-2015.....	541
Gambar 35.	Peta Sebaran dan Situasi Infrastruktur Sosial Wilayah Lingkar Tambang PT. NNT.	557

BAB I

PEMBANGUNAN, MOBILITAS PENDUDUK DAN PERUBAHAN SOSIAL :

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Tinjauan tentang Perubahan Sosial Budaya.

Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial masyarakat dapat disebut sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan budaya (kultural). Perubahan kultural mengarah pada perubahan dalam kebudayaan masyarakat, sedangkan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (Cohen, 1992). Gillin dan Gillin *dalam* Soekanto (1990), mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dan cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi,

maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Perubahan sosial menyangkut dua dimensi, yaitu dimensi struktural dan dimensi kultural. Perubahan dimensi struktural menyangkut hubungan antara individu dan pola hubungannya, termasuk di dalamnya mengenai : status dan peranan, kekuasaan, otoritas, hubungan antar status, integrasi dan sebagainya. Perubahan dimensi kultural (budaya) menyangkut nilai-nilai dan norma sosial. Perubahan sosial juga dapat dilihat dalam kurun waktu tertentu, namun perubahan itu ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat dan lama (Ibrahim, 2003).

Selain itu, Vago (1974) mengembangkan konsep perubahan sosial sebagai perubahan kualitatif atau kuantitatif yang direncanakan atau tidak direncanakan dalam fenomena sosial yang mencakup enam aspek yang senantiasa berhubungan dalam suatu kontinum, yaitu : identitas, level, lama waktu (durasi), arah perubahan, cakupan dan tingkatan perubahan. Horton dan Hunt dalam Garcia (1985) melihat bahwa perubahan sosial merupakan suatu transformasi struktur sosial dan hubungan-hubungan sosial dalam suatu masyarakat. Ponapio, Cordero, dan Raymundo (1978) sebagaimana yang disitasi oleh Garcia (1985) menspesifikasi apa yang dikatakan oleh Kingsley Davis bahwa elemen perubahan sosial budaya mencakup : (1) perkembangan bahasa, baik

yang oral maupun tertulis, dan pengertian lain dari komunikasi, (2) modifikasi teknologi, (3) penggunaan prinsip-prinsip ekonomi, (4) evolusi sejarah pada bidang keagamaan dan ideologi politik, (5) variasi dalam gaya musik dan bentuk seni lainnya, (6) transisi dalam teori-teori ilmiah, dan (7) perubahan bentuk dan peran stratifikasi sosial.

1. Bentuk/Pola Perubahan Sosial.

Secara umum, bentuk perubahan sosial terdiri dari : (1) perubahan lambat dan perubahan cepat, (2) perubahan kecil dan perubahan besar, (3) perubahan yang dikehendaki/direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki/tidak direncanakan (Soekanto, 1990). Vago (1974) lebih tertarik menggunakan konsep pola-pola perubahan (*patterns of change*) dari pada bentuk perubahan sosial. Pola perubahan menurut Vago meliputi : evolusi, difusi, akulturasi, revolusi, modernisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan birokratisasi. Loomis (1960) menyatakan bahwa perubahan sosial dimulai dari bagian-bagian yang terkait dengan sistem sosial, yakni melalui perubahan sistem di luar kelompok, perubahan lingkungan fisik, organisasi teknis, atau kejadian-kejadian pada sistem di dalam kelompok itu sendiri.

Pola perubahan yang evolutif merupakan perubahan yang berlangsung lambat menyangkut aspek-aspek materiil maupun immateriil dalam sistem sosial. Difusi terkait dengan penyebarluasan hal-hal baru, terutama teknologi baru pada berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Perubahan dengan pola revolusi menunjukkan adanya suatu gerakan yang secara cepat masuk kepada masyarakat dan mampu merubah elemen sosial dalam suatu masyarakat. Modernisasi juga terkait dengan perubahan yang direncanakan menyangkut pembaharuan disegala bidang kehidupan, sedangkan industrialisasi merupakan perubahan pada kegiatan kegiatan proses produksi, yakni menggunakan teknologi industri pada tingkatan yang beragam, sedangkan birokratisasi terkait dengan perubahan sosial dalam hal sistem pengaturan organisasi, pemerintahan dan struktur kekuasaan yang ada.

Vago (1974), Ibrahim (2003), Grusky dan Miller (1981) menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : kecepatan perubahan, tingkatan pengaruh perubahan, dan perencanaan perubahan. Dari segi kecepatannya dikenal adanya perubahan sosial yang cepat dan perubahan yang lambat. Perubahan sosial yang cepat dikenal dengan revolusi, sedangkan perubahan yang berlangsung lama dan lambat dikenal dengan perubahan evolutif. Dari segi tingkat pengaruhnya dikenal dua bentuk perubahan, yaitu perubahan sosial yang tingkat pengaruhnya besar dan perubahan sosial dengan tingkat pengaruh yang terbatas. Sedangkan dari segi perencanaannya juga terdapat dua bentuk perubahan, yaitu perubahan yang direncanakan (*Planned change*) dan yang tidak direncanakan (*Unplanned change*). Perubahan yang

tidak direncanakan ini sering merupakan perubahan yang bersifat alami (Ibrahim, 2003).

2. Faktor Penyebab Perubahan Sosial.

Secara umum, perubahan sosial disebabkan karena adanya faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Secara terperinci, Soekanto (1990) menyebutkan beberapa faktor penyebab perubahan sosial yaitu : perubahan jumlah penduduk yang cukup signifikan, penemuan-penemuan baru, pertentangan (konflik), terjadinya pemberontakan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan terjadinya peperangan. Abraham (1982) menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial secara lebih terperinci. Faktor internal menurut Abraham terdiri dari faktor manifes (disengaja), faktor internal laten, dan perubahan penduduk. Faktor internal manifes dibagi dua, yaitu : faktor kolektif dan faktor individu. Adapun faktor internal manifes yang bersifat kolektif yang menimbulkan perubahan sosial adalah penemuan baru (inovasi dan invensi), dan gerakan sosial (*social movement*). Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penyebab perubahan sosial antara lain : perubahan lingkungan alam, kekuatan kelompok dari luar masyarakat, dan kekuatan asing.

Micklin (1973) dalam Garcia (1985) menjelaskan adanya perubahan sosial yang disebabkan karena perubahan lingkungan fisik atau lingkungan biotik, seperti variasi musim, serangan atau invasi oleh berbagai parasit dan sebagainya. Cordero, *et al* (1978)

memandang perubahan sosial sebagai hasil dari interplasi berbagai faktor sosial maupun non sosial seperti : lokasi geografis, topografi lahan, iklim, jenis tanah, kehidupan tanaman dan hewan serta sumberdaya alam lainnya, keterampilan dan keahlian, teknologi, falsafah, agama, etika dan moral, kepercayaan, organisasi sosial, dan norma-norma sosial lainnya.

3. Dampak Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat berlangsung secara cepat atau lambat. Ke dua cara perubahan sosial tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan ditinjau dari perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan. Cohen (1992) mengungkapkan bahwa apabila perubahan sosial terjadi dengan sangat cepat maka efek-efek negatifnya juga akan sangat besar. Individu dalam masyarakat yang berubah cepat bisa menjadi merasa asing, kesepian, dan putus asa. Apalagi bila perubahan tersebut terjadi secara mendadak dapat mengacaukan dan menggoyahkan perasaan individu. Jika terdapat kesenjangan kultural (ketidakmampuan suatu bagian kebudayaan menyesuaikan dengan bagian-bagian lain), maka mungkin sekali akan terjadi disorganisasi umum di dalam masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, biasanya perubahan sosial selalu disertai dengan problema-problema sosial.

Abraham (1982) menjelaskan bahwa dalam kondisi perubahan tertentu kemungkinan ada

individu dalam masyarakat yang mengalami anomie dan alienasi dari lingkungan sosialnya yang berubah. Lebih lanjut, Malvin Seeman (Abraham, 1982) mengemukakan seseorang yang berada dalam lingkungan yang berubah dapat saja mengalami alienasi yang ditunjukkan dengan : (1) ketidakberdayaan (*powerlessness*), (2) tidak ada makna diri (*meaninglessness*), (3) ketiadaan norma (*normlessness*), (4) terisolasi, dan (5) pengasingan diri sendiri (*self extrangement*).

Dalam kaitannya dengan sistem sosial, suatu perubahan sosial dapat menyebabkan sekelompok orang telah meninggalkan nilai-nilai lama, tetapi nilai-nilai baru belum mampu diakomodir. Kejadian ini disebut dengan anomie, yakni semacam alienasi namun dalam skala sistem sosial. Individu yang mengalami alienasi atau sekelompok masyarakat yang mengalami anomie umumnya akan melakukan proses adaptasi terhadap perubahan yang sedang terjadi. Merton dalam Abraham (1982) menyebutkan lima model proses adaptasi individu atas terjadinya perubahan, yaitu : konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan rebellion (pemberontakan).

B. Konsep dan Teori Perubahan Sosial.

Banyak sekali teori yang berkaitan dengan perubahan sosial, baik dalam perspektif klasik maupun kontemporer. Untuk memahami konsep masyarakat sebagai sistem dan menelaah perubahan sosial yang terjadi terutama dalam perspektif

naturalistik (fenomenologis), maka dikemukakan beberapa teori yang dipandang terkait dengan persoalan perubahan sosial, yaitu :

1. Teori Evolusioner

Evolusionisme klasik berasumsi bahwa perubahan dan perkembangan masyarakat mengikuti pola unilinier atau lintasan tunggal. Para teoritis sosiologi yang dianggap sebagai tokoh teori evolusi klasik antara lain : August Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies (Kanto, S., 2007). Sztompka (2005) dalam Kanto, S (2007) menegemukakan bahwa kendatipun ada perbedaan pandangan diantara para tokohnya, mereka sepakat untuk menerima sejumlah asumsi umum yang menjadi inti teori evolusi, yaitu :

- a. Keseluruhan kehidupan masyarakat disebut dengan konsep organik. Dengan analogi organik, suatu sistem sosial merupakan kumpulan dari unsur-unsur atau sub sistem yang terintegrasi yang menyumbang terhadap pemeliharaan dan kelangsungan hidup sistem yang bersangkutan.
- b. Perhatian dipusatkan pada perubahan sistem sosial sebagai kesatuan organik. Kajian perubahan pada unsur-unsurnya atau sub sistem difahami sebagai kontribusinya terhadap evolusi masyarakat secara keseluruhan.
- c. Perubahan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang alamiah dan merupakan ciri realitas sosial.

- d. Perubahan masyarakat dipandang mengarah dan bergerak dari bentuk primitif ke bentuk yang berkembang, dari keadaan yang sederhana ke keadaan yang kompleks, dari homogen ke heterogen.
- e. Perubahan dalam evolusi digambarkan sebagai perubahan berpola unilinier, mengikuti pola atau lintasan tunggal.
- f. Lintasan evolusi secara umum terbagi dalam tahapan-tahapan atau fase secara berurutan dan tidak ada tahapan yang dilewati.
- g. Perubahan evolusioner diartikan sama dengan kemajuan, yakni menghasilkan perbaikan kehidupan masyarakat.

Teori evolusi yang membahas perkembangan kehidupan masyarakat, banyak dipengaruhi oleh teori evolusi biologis dari seorang ahli biologi Inggris yaitu Charles Darwin (1809-1882). Dalam bukunya “*On Origin of Species*” Darwin membahas tentang evolusi organisme-organisme fisik. Banyak teoritis evolusi sosial menganalogikan teori evolusi darwin ini untuk menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Darwin (Veeger, 1990 *dalam* Kanto, 2007), proses evolusi biologis berlangsung melalui empat tahap, yaitu : (1) *Struggle for life*, (2) *Survival of the fittes*, (3) *Natural selection*, dan (4) *Progress*. Semua organisme membutuhkan tempat, iklim dan zat makanan tertentu agar dapat

hidup. Ketersediaan kebutuhan ini ternyata semakin langka dan terbatas sehingga menimbulkan persaingan dan perebutan. Inilah yang disebut dengan *struggle for life*. Hanya organisme yang kuat dan memiliki peralatan yang paling baik yang mampu bertahan hidup (*survival of the fittes*). Kemudian, alam akan melakukan seleksi (*natural selection*) dimana organisme yang lemah atau tidak mampu beradaptasi dengan alam akan mati atau menghilang sebelum sempat berkembang biak. Selanjutnya organisme yang berhasil melalui seleksi alam akan akan berkembang biak, baik kuantitas maupun kualitasnya (*progress*). Aliran teori evolusi manusia atau masyarakat yang diilhami oleh teori evolusi biologis Darwin ini disebut Darwinisme Sosial. Sebagian teori evolusi klasik juga tergolong aliran Darwinisme Sosial.

Strategi teoritis evolusioner merupakan salah satu strategi yang berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan rangkaian perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Evolusionis umumnya berpendapat bahwa banyak masyarakat yang telah mengalami perubahan yang umumnya serupa dari zaman dahulu sampai sekarang, dan mereka berusaha keras mengidentifikasi sifat-sifat perubahan ini dan menjelaskan mengapa perubahan tersebut terjadi (Sanderson, 2003).

Appelbaum (1970) ; Cohen (1992) memberikan uraian : teoritis evolusioner pada umumnya memandang suatu masyarakat mengalami

perkembangan dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Para teoritis evolusioner percaya bahwa masyarakat yang berada pada tahapan-tahapan pembangunan yang telah maju akan lebih progresif dari pada masyarakat lainnya. Teori evolusioner cenderung bersifat etnosentris karena mereka menganggap masyarakat moderen lebih hebat daripada masyarakat sebelumnya (Cohen, 1992). Sementara itu, Vago (1989) menyatakan bahwa pendekatan evolusioner memandang perubahan sosial merupakan proses perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen sekuler. Perubahan yang sifatnya evolusi disebabkan oleh tambahan gradual dari ilmu baru.

Erik Olin Wright (1983) sebagaimana yang disitasi oleh Sanderson (2003) telah memberi konsepsi mengenai teori evolusioner yang lebih tepat. Dalam uraiannya dikatakan bahwa semua teori evolusioner mengandung beberapa karakteristik, yaitu :

- (1) Teori evolusioner mengorganisasikan sejarah ke dalam suatu tipologi tahap-tahap.
- (2) Diasumsikan bahwa penyusunan tahap-tahap tersebut menunjukkan kecenderungan arah perkembangan yang dialami suatu masyarakat.
- (3) Teori evolusioner mempostulatkan bahwa probabilitas terjadinya perubahan ke tahap lebih lanjut (lebih maju) melebihi probabilitas terjadinya perubahan ke tahap sebelumnya (lebih rendah).

- (4) Teori evolusioner dapat mengidentifikasi adanya mekanisme atau serangkaian mekanisme yang konon dapat menjelaskan perubahan dari suatu tahap ke tahap lainnya.

Strategi evolusioner fungsionalis mencakup penerapan pendekatan fungsional dalam menjelaskan evolusi sosial (A.D. Smith, 1973). Dalam pendekatan ini, evolusi sosial dipandang sebagai suatu proses diferensiasi sosial, proses meningkatnya kompleksitas masyarakat. Ketika masyarakat bergerak maju, mereka mengembangkan keanekaragaman (deversitas) bagian-bagian yang semakin bertambah, dan bagian tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya secara rumit. Meningkatnya diferensiasi yang terjadi akan mengakibatkan semakin besarnya kapasitas adaptif masyarakat. Dengan adanya deversitas internal yang semakin meningkat, masyarakat menjadi semakin mampu melakukan adaptasi secara baik dengan lingkungan mereka (Sanderson, 2003). Teori-teori evolusioner materialis menekankan evolusi sosial merupakan respon terhadap kondisi-kondisi material yang berubah (lingkungan hidup, teknologi, kelembagaan dan sebagainya), dan bersikap skeptis terhadap penyamaan evolusi dan kemajuan.

2. Teori Sistem

Berdasarkan perspektif umum teori sistem, suatu masyarakat dipandang sebagai suatu pengorganisasian semua elemen yang meliputi interaksi dari elemen yang saling bergantung dan

berhubungan dalam suatu lingkungan sosial (Bucley 1967 dalam Vago, 1974). Teori sistem merinci berbagai tingkatan sistem dari yang sangat sederhana ke yang sangat kompleks dan relatif. Sebagai contoh, Keneth E. Boulding (1956) dalam Vago (1974) memilahkannya menjadi sembilan tingkatan, yaitu : (1) struktur yang statis, (2) sistem dinamik sederhana (seperti arloji), (3) sistem yang bekerja sendiri (sibernetik), (4) sistem pemeliharaan diri terbuka, (5) sistem sosial genetik, seperti pembagian kerja antara cell dalam tanaman, demikian juga dengan pembagian dalam masyarakat yang berdasarkan cetak biru yang ada. (6) sistem hewan, ditandai dengan adanya mobiltas, kepentingan terhadap informasi, memandang tujuan, dan memiliki kesadaran diri, (7) sistem manusiawi, yang ditentukan berdasarkan kesadaran diri sendiri dan bahasa simbolik, (8) sistem-sistem sosial, dan (9) sistem transendental, dikarenakan pengetahuan yang sangat sedikit.

Parson dalam Abraham (1982) memperkenalkan teori sistem dalam empat aspek yang berbeda, yaotu : (1) *sistem sosial*, yaitu kumpulan dari individu yang saling berinteraksi dalam satu situasi secara fisik, dimana para pelakunya termotivasi dan berkecenderungan mengoptimalkan kepuasan dari situasi hubungan yang dibangun. (2) *Sistem budaya*, yakni aspek yang terorganisir dengan karakteristiknya adalah simbol-simbol, sistem stabilitas yang dibentuk oleh sistem sosial. Adapun yang termasuk sistem budaya antara lain: sistem pengetahuan, sistem

kepercayaan, sistem aturan, simbol-simbol ekspresif, sistem integrasi, dan orientasi nilai. (3) *Sistem individu*, merupakan aspek kehidupan individual sebagai pelaku dalam aktivitas sosial. Termasuk dalam sistem ini antara lain: belajar, pengembangan dan pemeliharaan melalui siklus kehidupan, partisipasi dalam nilai sosial dan kontrol terhadap aktivitas. (4) *Sistem biologi*, merupakan semua hubungan antara sistem sosial dengan lingkungan fisik yang dimediasi melalui perilaku organisme. Sistem ini meliputi : motivasi, persepsi, penampilan dan respon, mekanisme integrasi.

Parsons juga memperkenalkan dua macam mekanisme yang dapat mengintegrasikan sistem-sistem personal ke dalam sistem sosial, yakni mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial. Melalui operasi kedua mekanisme tersebut, sistem personal akan menjadi terstruktur dan secara harmonis terlihat di dalam struktur sistem sosial. Dalam pengertiannya yang abstrak mekanisme sosial dipandang sebagai cara dimana pola-pola kultural, seperti nilai-nilai (*values*), kepercayaan (*beliefs*), bahasa (*language*), serta simbol-simbol lain diinternalisasikan ke dalam sistem personal. Sedangkan mekanisme kontrol sosial melibatkan cara-cara dimana tindakan sosial diorganisasikan di dalam sistem sosial untuk mengurangi ketegangan dan penyimpangan. Ada beberapa mekanisme spesifik dari kontrol sosial, yaitu : (1) institusionalisasi, yang membuat pengharapan di dalam masyarakat menjadi

jelas dan terkontrol, (2) adanya sanksi, dimana anggota masyarakat terikat kepadanya, (3) aktivitas-aktivitas keagamaan, dimana penyimpangan dapat diredam dan dikurangi, (4) struktur kutub pengaman, dimana kecenderungan penyimpangan dapat diarahkan ke kondisi normal kembali, (5) struktur-struktur reintegrasi yang berfungsi membawa penyimpangan kembali ke integrasi, (6) adanya faktor-faktor lain dari sistem sosial yang memiliki kemampuan dalam menggunakan kekuasaan dan tekanan (Rahman dan Yuswadi, 2004).

Dorongan untuk berubah yang disebabkan oleh perubahan jumlah penduduk sebagai akibat adanya migrasi dapat menyebabkan perubahan solidaritas masyarakat dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik sebagaimana digambarkan oleh Emile Durkheim *dalam* Roucek (1987). Menurut Durkheim masyarakat dengan solidaritas mekanik memiliki ciri : pembagian kerja rendah, kesadaran kolektif kuat, hukum refresif dominan, individualitas rendah, konsensus terhadap pola-pola normatif dianggap penting, keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang, secara relatif saling ketergantungan rendah dan masyarakatnya bersifat primitif atau pedesaan (Appelbaum R.P., 1970).

Masyarakat dengan solidaritas mekanik bisa berkembang menjadi masyarakat dengan solidaritas organik disebabkan karena faktor demografis, yaitu

pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk berarti perjuangan untuk hidup semakin meningkat dan menyebabkan munculnya gagasan baru. Masyarakat dengan solidaritas organik menurut Durkheim memiliki ciri : pembagian kerja tinggi, kesadaran kolektif lemah, hukum restitutif dominan, individualitas tinggi, konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum dipandang penting, badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang menyimpang, saling ketergantungan tinggi dan masyarakat bersifat industrial perkotaan.

3. Fenomenologi dan Teori Sosial

Fenomenologi merupakan perspektif moderen yang sangat penting bagi manusia dan merupakan salah satu aliran filsafat ilmu yang banyak dikaitkan dengan perkembangan abad ke 20. Penulis atau teoritis fenomenologi umumnya mengambil pandangan dari tulisan-tulisan Edmun Husserl yang banyak memakai ide-denyanya Rene Descartes yang telah membuat langkah besar dalam filsafat dengan memunculkan perspektif fenomenologi secara meyakinkan. Husserl mengikuti penolakan Descartes terhadap otoritas awal filsafat sebagai awal dari fenomenologi moderen. Husserl mengakui implikasi metode Descartes tentang sistematika keraguan dan mengesampingkan aspek pengalaman sebagai pokok bahasan yang penting. Sesungguhnya filsafat modernitas yang sederhana dapat diartikan sebagai suatu kekuatan pengalaman. Terkait dengan

pengertian ini, maka semua alur filsafat moderen disebut fenomenologis (Ferguson, 2001).

Dalam pandangan moderen, pengalaman dapat dilihat sebagai pengetahuan, dan karena pengalaman bersifat tidak cepat hilang, maka setiap kejadian dapat dijadikan sebagai suatu pengetahuan. Pengalaman sebagaimana yang banyak kita temui tidak selalu dapat merefleksikan kejadian sebagai petunjuk yang pasti bagi dunia, termasuk bagi diri kita. Dalam bentuk umum, fenomenologi merupakan bentuk sederhana dari peralihan subyektif dengan karakteristik pemikiran moderen yang membawanya kepada kesadaran yang utuh sebagai bentuk kesadaran manusiawi. Jadi, kesadaran adalah suatu sistem dari tanda-tanda.

Dalam ulasan yang dikemukakan oleh Ferguson (2001) diungkapkan bahwa dua tradisi besar dalam pemikiran moderen mencoba melihat pengalaman sebagai suatu alternatif untuk melihat sesuatu dari sisi obyek dan subyek. Tradisi *empirik subyektif* ingin menjelaskan kesadaran sebagai alat pencerminan yang dapat merefleksikan struktur nyata dunia obyek yang berada secara independen di luar kesadaran kita. Kesadaran dipandang sebagai bayangan sebuah dunia yang terpisah dan bertentangan dengan dunianya sendiri. Sebaliknya tradisi *idealis subyektif* menafsirkan sebuah dunia itu berdasarkan keterungkapannya dalam kesadaran itu sendiri. Perbedaan atau perpecahan dari kedua hal ini

merupakan pusat dari pengalaman moderen. Tapi yang penting dari keduanya, bahwa baik tradisi empiris maupun idealis memandang realitas sebagai bagian yang terpenting, yaitu manusia yang ditempatkan pada dirinya sendiri diluar aspek jasmani atau fisiknya. Realitas dunia moderen sebagaimana konsep “*point mass*” yang diformulasikan dari teori mekanika Newton dan teori psikologi Rosseau memandang manusia sebagai individu yang paling utama, dan dapat membangun realitas keteraturan yang tinggi sebagai hasil interaksi yang kompleks. Tradisi empirik memandang hakikat manusia seperti garis lurus yang membentang, sementara tradisi idealis memandang bahwa kondisi alamiah jiwa manusia sebagai bagian dari teologi (ketuhanan) yang tumbuh dan berkembang pada dirinya sendiri.

Fenomenologi menolak refrensi yang “nyata” seperti yang umum digunakan dalam keilmuan dan kehidupan sehari-hari. Penolakan tersebut disebabkan karena tidak transparannya dalam menjelaskan pengalaman, termasuk menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Mereka memasukkan unsur penjelasan dan interpretatif yang berasal dari fikiran mereka sendiri (*ethic perspectives*). Fenomenologi sebenarnya hanya menjelaskan apa yang sesungguhnya telah terjadi (given) dan apa yang muncul dari kesadaran, tanpa perlu menjelaskan bagaimana terjadinya, dan tanpa perlu penjelasan yang mendalam berkaitan dengan kejadian yang sesungguhnya. “*jika sesuatu telah diberikan kepada*

kita, mestinya kita telah mengetahuinya, dan apabila kita telah ketahui tentunya hal tersebut telah diberikan kepada kita”. Fenomenologi mengangkat akar permasalahan yang timbul secara kontradiktif melalui esensi penjelasan yang konsisten dan terbentuk dari suatu perbedaan orientasi yang murni terhadap suatu kenyataan (Ferguson, 2001).

Aliran fenomenologi lahir sebagai reaksi terhadap metodologi positivistik yang diperkenalkan oleh Comte (Waters, 1994 dalam Hidayat, 2006). Konsep fenomenologi berangkat dari pola pikir subyektivisme yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna dibalik gejala itu sendiri (Faisal, 2003). Terkait dengan konsepsi ini, Collin (1977) sebagaimana disitasi oleh Hidayat (2006) menyebutnya sebagai proses penelitian yang menekankan “*meaningfulness*”.

Dalam konsepsi fenomenologi, sesungguhnya suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak itu adalah obyek yang penuh dengan makna yang transendental (hadiwiyono, 1985). Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hakikat kebenaran, maka harus mampu menerobos melampaui fenomena yang tampak tersebut hingga mendapatkan “*meaningfulness*” (Collin, 1997 dalam Hidayat, 2006).

Dalam perspeftif yang sama, Faesal (2003) mengemukakan bahwa fenomenologi pada dasarnya memandang segala sesuatu yang tampak

dipermukaan, termasuk poila perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku. Perilaku apapun yang tampak dipermukaan baru bisa difahami atau dijelaskan manakala bisa mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi di dunia kesadaran atau dunia pengetahuan si manusia pelaku. Sebab realitas itu sesungguhnya bersifat subyektif dan maknawi. Ia bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian dan anggapan-anggapan seseorang. Hal itu semua terbenam sebagai suatu kompleks gramatika kesadaran di dalam diri manusia. Disitulah letak kunci jawaban terhadap apa yang terekspresi atau menggejala di tingkat perilaku. Oleh sebab itu, dunia konseptual para pelaku, stok pengetahuan atau pemahaman para pelaku ditempatkan sebagai kata kunci untuk bisa memahami tindakan manusia, kapanpun dan dimanapun. Tanpa memahami dunia konseptual para pelaku dipandang mustahil bisa memahami berbagai gejala yang muncul di tingkat permukaan. Karenanya, proses penghayatan (*verstehen*) sangat diperlukan untuk bisa memahami berbagai rupa fenomena sosial sehari-hari.

4. Implikasi terhadap teori sosial

Sosiolog dan para pengguna teori sosial telah menemukan implikasi fenomenologi bagi teori sosial dengan lebih mudah daripada dengan mengkritisi atau mengasimilasikan fenomenologi. Posisi yang berkaitan

dengan sosiologi memiliki tanggung jawab khusus untuk mencari aspek-aspek hukum. Lebih masuk akal lagi bahwa fenomenologi dalam aspek pengalaman mendapat perhatian para ahli teori sosial. *Epoche* yang mempertimbangkan pengalaman dapat dilihat sebagai sesuatu yang berasal dari interaksi atau jaringan masyarakat. Namun semua itu merupakan presentasi awal untuk menjadikannya lebih jelas terkait dengan fenomenologi dan tema-tema substantif dari teori sosial dan sosiologi sejarah (Fergusson, 2003).

Lebih lanjut, Fergusson mengemukakan tiga hal utama yang menentukan fenomenologi sebagai disiplin ilmu yang relevan. *Pertama*, fenomenologi mempunyai pendekatan dan metode yang berbeda-beda. *Kedua*, fenomenologi mempunyai pemahaman dan wawasan yang valid. *Ketiga*, fenomenologi menyediakan penjelasan yang berguna bagi pengembangan sosiologi moderen. Dapat dikemukakan disini suatu karya dari Alferd Schultz yang menunjukkan adanya kontribusi fenomenologi terhadap teori sosial, terutama terkait dengan alasan pertama dan kedua di atas.

Pendekatan fenomenologis Schhultz terhadap perkembangan ilmu sosial berbeda dengan Husserl yang memfokuskan pada reduksi transenden. Bagi Schultz, yang ada dalam masyarakat adalah kebutuhan praktis yang mudah digunakan. Jadi, sesungguhnya kita memberikan respon terhadap kehidupan dunia yang sudah dibentuk menjadi suatu masyarakat. Adapun tugas utama yang dilakukan

oleh sosiolog fenomenologis adalah mendapatkan pengertian yang diinterpretasikan secara konvensional dalam pengalaman kehidupan sosial. Konsep ilmiah pengalaman sehari-hari membentuk suatu pengalaman yang disebut fakta yang kongkrit. Sosiologi senantiasa berkaitan dengan abstraksi kedua yakni interpretasi mengenai kehidupan sosial tersebut.

Schultz sendiri mengatakan bahwa, realitas sosial dibangun melalui tindakan dan hubungan sosial, dan semua itu termasuk kategori subyektif. Sedangkan dalam kategori obyektif, realitas sosial diinterpretasikan melalui perilaku. Pada tingkat substansi, fenomenologi sebagai suatu kehidupan sosial dipandang sebagai kesatuan fungsional, persepsi yang runtut mengenai realitas, dan saling percaya dalam interaksinya. Kesepakatan yang ada dalam kehidupan sosial tergantung pada nilai yang merupakan ciri realitas sosial. Dalam kaitannya dengan hubungan sosial, perbedaan yang mendasar antara hubungan satu dengan lainnya terletak pada nilai budaya, dan budaya yang timbal balik itulah merupakan hubungan sosial yang sesungguhnya.

Dalam konteks sosial, pola perilaku yang sesuai dalam bermasyarakat telah banyak digunakan dalam interaksi sosial, seperti hukum, kelompok-kelompok dan sebagainya yang telah terbiasa menggunakan pengertian umum dan kerangka berfikir ilmiah dalam interpretasi manusia secara skematik. Dunia

kehidupan yang menjadi realitas sehari-hari sesungguhnya dapat diinterpretasikan dari struktur maknanya yang tergambar dalam perilaku alami manusia ketika bersosialisasi dengan masyarakatnya (Schultz, 1962 *dalam* Fergusson, 2001).

5. Teori Pertukaran .

Akar pemikiran teori pertukaran sesungguhnya terarah kepada kekuasaan utilitarian (ekonomi) dengan pandangannya bahwa manusia senantiasa berfikir memaksimalkan keuntungan material melalui transaksinya dengan orang lain dalam pasar yang bersifat bebas dan kompetitif. Kuatnya pengetahuan tentang pasar ini, menyebabkan orang secara rasional akan memilih di antara alternatif yang tersedia berdasarkan perhitungan biaya dan keuntungan. Bagaimanapun, para sosiologis moderen selalu mencoba untuk memikirkan alternatif bagi pemikiran utilitarian. Kadangkala teori-teori pertukaran telah mempertimbangkan bahwa manusia tidak selalu rasional, mereka tidak selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pada setiap proses pertukaran dan interaksi yang berlangsung terus menerus dengan berbagai faktor pembatas eksternal (Abraham, 1982).

Malinowski adalah orang yang pertama kali menggambarkan secara jelas jauhnya perbedaan antara konsep pertukaran ekonomis dan pertukaran social. Malinowski lebih menekankan pentingnya mempertimbangkan dasar kebutuhan psikologis

dalam menjelaskan perilaku sosial, dan menolak asumsi motif-motif ekonomis dalam menjelaskan pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer. Seseorang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya. Ahli teori pertukaran mempunyai asumsi yang sederhana yakni bahwa interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi diakui bahwa pertukaran sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial sering dipertukarkan juga hal-hal yang nyata dan tidak nyata (Poloma, 2004).

Levi-Strauss sebagai seorang strukturalis justru menolak interpretasi utilitarian Frazer's dan konsepsi psikologis dari Malinowski. Strauss menegaskan bahwa reaksi yang tajam terhadap asumsi utilitarian adalah karena asumsinya yang menyatakan bahwa perilaku sosial dimotivasi oleh pertimbangan perhitungan ekonomis. Strauss juga menolak interpretasi psikologis dari perilaku pertukaran sosial berdasarkan 4 asumsi teoritis, yaitu : 1) pertukaran sosial sesungguhnya merupakan suatu proses simbolik. 2) pertukaran sosial adalah perilaku normatif yang ditentukan oleh aturan dan norma-norma. 3) perilaku dalam pertukaran adalah sesuatu yang dinamis dan kreatif, 4) perilaku pertukaran terdapat dalam kerangka kerja kelembagaan.

Terkait dengan dengan kerangka kerja kelembagaan dalam sistem pertukaran, Ekeh sebagaimana yang dikutip oleh Abraham (1982) mengajukan tiga proposisi yang menggambarkan basis kelembagaan dalam perilaku pertukaran :

a. Prinsip kelangkaan sosial dan intervensi masyarakat

Jika suatu produk nilai secara simbolik terbatas jumlahnya maka masyarakat akan mengintervensi distribusinya, dan juga melakukan perumusan peraturan pertukaran. Jika produk jumlahnya melimpah masyarakat akan membiarkan distribusinya berlangsung sesuai dengan hukum kesempatan dan hukum alami.

b. Prinsip beaya pertukaran sosial

Beaya pertukaran sosial ditimbulkan oleh individu dan dibebankan ke masyarakat, tapi di luar situasi pertukaran. Prinsip ini membebaskan transaksi pertukaran sosial khusus atas adanya konsekuensi dikenakannya beaya terhadap aktivitas pertukaran sosial ke mereka yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

c. Prinsip timbal balik

Prinsip ini mengartikan pola timbal balik dimana individu merasa wajib untuk membayar kembali hadiah yang diterima. Tetapi dalam skema Levi-Strauss prinsip ini melibatkan tidak hanya individu yang memberi penghargaan karena kedermawannya

secara langsung, tetapi dengan memberi penghargaan pelaku lain dalam situasi pertukaran yang di hubungkan dengan norma hubungan timbal balik.

Ritzer dan J. Goodman (2003), Abraham (1982) mengungkapkan bahwa salah seorang tokoh teori pertukaran kontemporer adalah George C. Homans (1967) yang mencoba memperluas cakupan konsep pertukaran sosial untuk menanampung berbagai aktivitas. Dengan label sebagai teori kepentingan individu, Homans mencoba mengkombinasikan elemen ekonomi dengan perilaku psikologis. Homans beranggapan bahwa perilaku manusia dan organisasi sosial dapat dijelaskan secara efektif dengan mengedepankan prinsip psikologi. Dalam kajian teoritisnya, Homans membatasi diri pada interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jelas ia yakin bahwa sosiologi yang dibangun berdasarkan prinsip yang dikembangkannya akhirnya akan mampu menerangkan semua perilaku sosial.

Dengan memusatkan perhatian pada jenis situasi sosial tersebut, Homans mengembangkan beberapa proposisi pertukaran, yaitu (Ritzer dan J. Goodman, 2003 ; Abraham, 1982) :

- a. **Proposisi sukses:** untuk semua tindakan yang diambil oleh seseorang, semakin sering tindakan seseorang dihargai, maka semakin sering orang tersebut akan melakukan tindakan tersebut. Proposisi ini tidak mengatakan mengapa seseorang

melakukan tindakan tersebut pertama kali. Akan tetapi, setelah mengerjakan sesuatu, jika seseorang mendapati bahwa tindakan tersebut berhasil dalam arti membangkitkan nilai positif kepadanya, maka dia nampaknya akan mengulangi tindakan yang sama yang mengharapkan penghargaan tambahan. Frekuensi tindakan tergantung pada frekuensi penghargaan tetapi ada batas yang ada yang dikenakan dengan adanya kejenuhan. Frekuensi tindakan juga tergantung pada pola dimana tindakan tersebut diberi penghargaan. Homans percaya bahwa:

- b. *Proposisi stimulus.* Jika pada masa lalu, adanya rangsangan atau kumpulan stimuli, dimana tindakan seseorang dihargai, dan rangsangan sekarang sama dengan yang lalu, maka nampaknya seseorang akan semakin melakukan tindakan tersebut, atau tindakan yang serupa. Variabel yang sangat penting di dalam proposisi stimuli adalah tingkat kesamaan antara stimuli sekarang dengan stimuli dimana tindakan tersebut dihargai dimasa lalu. Dan munculnya kembali keadaan dimana tindakan tersebut dihargai di masa lalu akan menyebabkan pengulangan tindakan tersebut. Dengan demikian nelayan yang mencari ikan ke perairan gelap dan dapat menangkap ikan di sana, maka mereka akan lebih suka untuk pergi nelayan ke perairan yang gelap.
- c. *Proposisi nilai.* Semakin berarti hasil tindakan bagi seseorang, semakin tertarik dia akan melakukan

tindakan tersebut. Penghargaan adalah hasil tindakan seseorang yang memiliki nilai positif dan hukuman adalah tindakan yang memiliki nilai negatif. Menurut proposisi nilai, peningkatan nilai positif dari penghargaan membuat seseorang akan lebih melakukan tindakan tertentu, dan peningkatan nilai negatif / hukuman akan membuat seseorang akan mengurangi tindakan tersebut. Hal-hal dimana manusia memungkinkan untuk mendapatkan penghargaan adalah banyak sekali dan beragam. Homans menambahkan bahwa penghargaan yang dia fokuskan bukan nilai materialistis tetapi nilai yang mungkin altruistis (mementingkan orang banyak) juga.

- d. Proposisi deprivation-satiation (kejenuhan). Semakin sering seseorang menerima penghargaan tertentu pada masa lalu, maka semakin kurang berarti penghargaan selanjutnya bagi dia. Jika seseorang telah sering menerima penghargaan, dia akan menjadi jenuh dengan penghargaan tersebut. Dengan demikian nilainya bagi dia menurun dan dia akan kurang melakukan tindakan yang mendatangkan penghargaan yang sama.
- e. Proposisi agresi-persetujuan. Proposisi ini dibagi menjadi dua bagian:
 - 1) ketika tindakan seseorang tidak menerima penghargaan yang dia harapkan, atau menerima hukuman yang tidak dia harapkan, maka dia akan marah; dia lebih banyak

melakukan tingkah laku yang agresif, dan hasil tingkah laku ini menjadi lebih berarti bagi dia.

- 2) Ketika tindakan seseorang menerima penghargaan yang dia harapkan, khususnya penghargaan yang lebih besar dari yang dia harapkan, atau tidak menerima hukuman yang tidak dia harapkan, maka dia akan senang; dan dia akan lebih banyak melakukan tingkah laku tersebut, dan hasil-hasil dari tingkah laku tersebut menjadi lebih berarti bagi dia.

Homans menekankan sejarah yang dinyatakan dari proposisi ini, yaitu, pentingnya pengalaman masa lalu seseorang di dalam membentuk tingkah laku sekarang. Sejarah keberhasilan, stimulasi, akuisisi nilai-nilai seseorang semuanya mempengaruhi cara seseorang bertingkah laku di masa sekarang. Pilihan yang dia buat di masa lalu mungkin masih membatasi kesempatan yang ada sekarang, atau mungkin merasa hal itu sebagai pembatas. Selanjutnya ada perhatian yang besar terhadap pengalaman awal seseorang.

- f. *Proposisi rasionalitas.* Dalam memilih diantara alternatif tindakan-tindakannya, seseorang akan memilih tindakan-tindakan dimana nilai hasil (*value*) dikalikan dengan peluang, hasilnya adalah lebih besar. *Proposisi ini meliputi dua unsur yang berkaitan, yaitu :* 1) nilai dari suatu satuan orang yang terlihat pada hasil yang diperoleh dari kegiatannya, 2) peluang kesuksesan ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Homans mengesampingkan pengetahuan tentang budaya termasuk hakekat simbolik dari perilaku manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh White : simbol adalah keseluruhan dari kemanusiaan. Orang tidak selamanya rasional, mereka tidak selalu pernah memaksimalkan keuntungan materianya. Fikiran baginya memiliki nilai simbolik, bukan nilai-nilai intrinsik yang sederhana. Pada akhirnya teori pertukaran Homans dapat diringkas menjadi pandangan tentang aktor (pelaku) sebagai pencari keuntungan yang rasional. Ia menyatakan, struktur yang berskala besar hanya dapat difahami jika kita memahami perilaku sosial mendasar secara memadai.

Selain Homans (1967), salah seorang pakar yang juga mengemukakan teori pertukaran adalah Peter Blau (1964). Pengembangan teori pertukaran Blau bertujuan untuk memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses sosial yang mempengaruhi hubungan antar individu dan kelompok. Pertanyaan mendasarnya adalah : bagaimana cara kehidupan sosial tersusun menjadi struktur asosiasi yang makin kompleks. Jadi Blau bermaksud menganalisis struktur sosial yang lebih kompleks melebihi konsepsi Homans yang hanya memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk kehidupan sosial mendasar. Dengan demikian pusat perhatian teori pertukaran Blau adalah proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Terkait dengan

pandangan ini, Blau mengemukakan empat langkah berurutan dari mulai proses pertukaran hingga terjadinya perubahan yaitu sebagaimana yang diungkapkan kembali oleh Ritzer dan J. Goodman (1982) sebagai berikut :

Langkah pertama : Pertukaran atau transaksi antar individu.

Langkah kedua : Difrensiasi status dan kekuasaan mengarah kepada individu.

Langkah ketiga : Legitimasi dan pengorganisasian.

Langkah ke empat : Oposisi dan perubahan secara lebih luas.

6. Teori Pilihan Rasional

Pada dasarnya, teori pilihan rasional yang pertama kali dikemukakan oleh Coleman, menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau pilihan atau preferensi (Ritzer G dan Douglas J. Goodman, 2003). Teori pilihan rasional tersebut menitik beratkan kajian pada pelaku tindakan (aktor) dan sumberdaya. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu yang terhimpun di dalam benaknya. Dengan kata lain, aktor mempunyai tujuan sehingga tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, aktor dinilai mempunyai pilihan tertentu yang penetapan

atas pilihan itu didasarkan pertimbangan yang rasional.

Sumberdaya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dengan sumberdaya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial :

“Basis minimal untuk berlangsungnya tindakan dalam sistem sosial adalah adanya dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumberdaya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumberdaya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan... terlibat dalam sistem tindakan...Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik dalam tindakan mereka (Coleman, 1990 dalam Ritzer G dan Douglas J Goodman, 2003).”

Teori pilihan rasional tidak menghiraukan aspek apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi dasar pemilihan tindakan dari para aktor. Aspek yang paling penting adalah adanya kenyataan bahwa tindakan dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan pilihan aktor itu sendiri. Meskipun teori ini menekankan pada tujuan dan maksud aktor,

namun teori ini senantiasa memperhitungkan dua faktor utama penentu tindakan, yaitu :

- a. Keterbatasan sumber, dimana setiap aktor mempunyai sumberdaya dan akses yang berbeda terhadap sumberdaya yang tersedia. Bagi aktor yang mempunyai sumberdaya besar, pencapaian tujuan yang dipilih kemungkinan akan relatif lebih mudah. Sebaliknya, bagi aktor yang mempunyai sumberdaya terbatas, maka pencapaian tujuan akan lebih sulit dan hasil yang dicapai akan lebih sedikit (Friedman dan Hechter, 1988).

Keterbatasan sumberdaya yang dikuasai aktor sebagaimana dimaksud di atas, sangat terkait dengan biaya terluang (*opportunity cost*) atau biaya yang berkaitan dengan rentetan tindakan lainnya yang juga cukup menarik akan tetapi tidak jadi dilakukan. Seorang aktor mungkin tidak akan mengejar atau melakukan suatu tindakan yang nilainya sangat tinggi apabila sumberdaya yang dimiliki kurang memadai atau apabila untuk mencapai tujuan tersebut akan menghilangkan peluangnya untuk mencapai tujuan lain yang juga sangat bernilai.

- b. Lembaga sosial. Friedman dan Hechter (1988) mengungkapkan bahwa, aktor individual biasanya akan “ merasa bahwa tindakannya senantiasa diawasi oleh aturan – aturan yang bersifat melembaga. Aspek kelembagaan tersebut memberikan sangsi positif maupun negatif yang

kesemuanya mampu mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindari tindakan yang lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kelembagaan sosial budaya sangat menentukan pilihan tindakan yang dilakukan oleh setiap aktor.

Lebih lanjut Freidman dan Hechter mengemukakan dua gagasan lain yang menjadi dasar teori pilihan rasional. Pertama, adalah yang berkaitan dengan mekanisme atau proses yang menggabungkan tindakan aktor individual yang sifatnya terpisah untuk menghasilkan akibat sosial. Kedua, bertambahnya pengertian menyangkut arti pentingnya informasi dalam membuat pilihan rasional. Konsep ini mengasumsikan bahwa selalu tersedia berbagai peluang tindakan pada setiap aktor. Namun demikian, aktor lebih mengenal bahwa kuantitas atau kualitas informasi yang tersedia selalu berubah-ubah, sehingga perubahan tersebut sangat mempengaruhi pilihan aktor (Heckathorn, 2001).

7. Teori Psikologi Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh motivasi pribadi anggota-anggota masyarakat. Hegen's (1962) dalam Vago (1974) dan Ibrahim (2003) mengatakan bahwa perubahan sosial dari tradisional ke moderen tidak bisa terjadi tanpa perubahan dalam personalitas. Lebih jauh Hegen's menyatakan masyarakat tradisional dan moderen merupakan produk

keperibadian yang berbeda. Selain itu Clelland (Vago, 1974) menyatakan sesungguhnya perubahan sosial yang menyebabkan kemajuan masyarakat didasari oleh adanya kebutuhan dorongan untuk berprestasi (*the need for achievement*).

Prestasi yang dimaksud lebih ditunjukkan dengan prestasi ekonomi individu dalam rangka menghasilkan peningkatan ekonomi. Terjadinya peningkatan ekonomi cenderung akan memuaskan individu yang melakukannya. Terjadinya perubahan sosial, terlebih-lebih yang berorientasi ekonomi dan modernisasi sesungguhnya banyak ditentukan oleh faktor kebutuhan individu, persepsinya terhadap perubahan sebagai stimuli, motivasi dalam memenuhi kebutuhan dan faktor-faktor psikologis lainnya.

C. Konsep dan Teori Pembangunan

Pembangunan merupakan salah satu bentuk perubahan sosial (dan kebudayaan) yang direncanakan. Biasanya merupakan perubahan yang terarah (*direct change*) yang didasarkan atas perencanaan (*social planning*) sehingga pembangunan dapat dipandang sebagai perubahan yang berencana (Lippit, 1958; Zaltman and Robert Duncan, 1977 ; Soekanto, 1985). Modernisasi meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, keamanan, kesehatan dan juga bidang-bidang sosial budaya (Lea and Choudury, 1983 ; Sajogyo, 1985).

Perubahan sosial dan pembangunan mengandung pengertian bahwa segala sesuatu harus digerakkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Di negara-negara berkembang, proses pembangunan tersebut besar sekali pengaruhnya karena secara relatif justru di negara-negara tersebut jauh lebih pesat dari pada di negara-negara maju. Secara umum, proses pembangunan berpengaruh terhadap keluarga, struktur sosial, struktur pribadi/individu (Simanjuntak dan Pasaribu, 1986).

Untuk menjelaskan konsepsi teoritik pembangunan yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan proses migrasi internasional dan dampak sosial budaya yang ditimbulkannya, maka berikut disarikan beberapa teori pembangunan atau teori modernisasi yang dinilai cukup relevan (Susanto, 1984; Sajogjo, 1985; Pasarabu dan Simanjutak, 1986 dan Long, 1987). Teori-teori tersebut adalah : Teori Harold-Dommar, Teori David Mc Clealand, Teori Rostow, Teori Max Weber, teori Neil Smelser, Teori Hrilbroner, Teori Ogburn, Teori Ferdinand Toennies, dan teori Lewis.

Menurut teori *Harodl-Dommar*, dikatakan bahwa pembangunan hanya dipandang merupakan masalah penyediaan modal dan investasi. Dengan modal dan investasi, maka pembangunan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. *Teori David Mc Clelland* (Staatz and Carl K. Eicher, 1990 ; Ibrahim, 2002) lebih menekankan pada aspek-aspek psikologis individu.

Proses pembangunan diartikan sebagai upaya dalam membentuk manusia wiraswasta; dengan itu maka pembangunan atau modernisasi dalam suatu masyarakat akan terwujud. Clelland menjelaskan bahwa perubahan sosial yang menyebabkan kemajuan masyarakat didasari oleh adanya kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi (*the need for achievement*). Sementara *Teori Rostow*, menekankan pentingnya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan. Rostow dalam teorinya mengelompokkan tahap-tahap perkembangan masyarakat menjadi 5 (lima) yaitu : (1) tahap masyarakat tradisional, (2) tahap masyarakat peralihan, (3) masyarakat tinggal landas, (4) masyarakat berdiri sendiri dan (5) tahap konsumsi masa tingkat tinggi.

Teori etika protestan yang dikemukakan oleh *Max Weber* (Parson, 1985) mengatakan bahwa perubahan sosial langsung maupun tidak langsung terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai-nilai budaya. Bidang keagamaan dianggap sebagai sumber nilai-nilai dan cita-cita yang berkembang ke seluruh aspek kehidupan manusia. Weber mendukung tradisi dan menentang perubahan-perubahan. Karena itu bila dikehendaki terjadi perubahan sosial atau pembangunan, nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat harus dirubah.

Tentang Etika Protestan, Weber tidak menganggapnya sebagai penyebab kapitalisme karena

menurutnya bisa jadi para pedagang dan orang-orang lain sudah berorientasi kapitalisme sebelum timbulnya reformasi protestan. Namun Etika Protestan di pandang sebagai legitimasi penting bagi kapitalisme yang memungkinkan terjadinya pembangunan dan modernisasi dalam suatu masyarakat.

Teori pembangunan yang mengkaitkan antara pembangunan ekonomi dengan struktur sosial adalah *Teori Neil Smelser* (dalam Susanto, 1984). Dikatakan bahwa, suatu sistem ekonomi tertentu memerlukan dan dilandasi oleh suatu struktur masyarakat tertentu pula. Secara rasional, suatu sistem ekonomi dapat saja diadakan, namun bila tidak ditunjang oleh suatu struktur sosial yang cocok, maka tidak akan mencapai tujuannya. Dengan kata lain, setiap struktur sosial merupakan ekologi dari setiap bentuk sistem ekonomi. Oleh karena proses pembangunan ekonomi haruslah ditunjang oleh pengadaan suatu struktur sosial yang baru.

Teori lainnya, yakni *Teori Heilbroner* (Susanto, 1984) melihat pembangunan ekonomi sebagai faktor utama terjadinya perubahan sosial. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu usaha untuk menjamin taraf hidup layak bagi masyarakat; dan agar sistem ekonomi dapat berfungsi dengan baik, maka harus ditunjang oleh struktur sosial yang sesuai dari suatu masyarakat.

Berdasarkan analisis sejarah pembangunan ekonomi di berbagai negara, Heilbroner memberikan

masuk dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut: (1) Memanfaatkan tradisi dan lembaga yang ada untuk meningkatkan kemampuan produksi. Jalan ini akan menjamin stabilitas sosial, tetapi tidak menjamin pemerataan untuk semua pihak yang berpartisipasi dalam proses pembangunan; (2) Penggunaan kekuasaan, yaitu dengan memaksakan perubahan ekonomi dengan cara memaksa di mana partisipasi masyarakat dapat saja tersebar, tetapi tidak terjadi dengan sukarela. Teknik peningkatan partisipasi seperti ini telah dikenal sejak jaman Mesir Kuno. Yunani Kuno dan Jaman Romawi; dan (3) Pengadaan suatu masyarakat yang menunjang sistem pasar (*Market system*) bersamaan dengan pelaksanaan perubahan masyarakat.

Sedangkan *Teori Ogburn* tentang teknologi dan kebudayaan (Susanto, 1984) mempermasalahkan hakekat dari perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Dia mengkritik tentang sebab tunggal terjadinya perubahan. Ogburn dalam mengemukakan teorinya bertitik tolak pada peranan kebudayaan immaterial yang mencakup lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Dia berpendapat bahwa perubahan pada kebudayaan material cenderung terjadi terlebih dahulu, namun dalam proses penyesuaian kebudayaan cenderung terjadi kesenjangan kebudayaan (*Cultural lag*).

Dalam menerapkan konsep *cultural lag* dari Ogburn, maka pertama-tama harus ditunjukkan adanya dua variabel yang dikaitkan dengan kebudayaan material dan immaterial. Misalnya buta huruf sebagai salah satu aspek kebudayaan immaterial dengan pertanian subsistem sebagai aspek kebudayaan material. Secara perlahan salah satu aspek kebudayaan tersebut mengalami perubahan, misalnya keadaan buta huruf tetap, sedangkan pertanian subsistem berubah seiring dengan terjadinya industrialisasi atau masuknya kegiatan pertambangan. Dengan demikian terjadi *cultural lag* antara kebudayaan dengan kebudayaan material dengan kebudayaan immaterial.

Ferdinand Tonnies dalam teorinya mengatakan bahwa suatu masyarakat mengalami *fase gemeinschaft*. Sifat khas dari masyarakat *gemeinschaft* adalah adanya keterikatan yang bersifat emosional dibandingkan masyarakat *gesellschaft* yang lebih bersifat rasional lugas. Hal ini antara lain disebabkan makin meluasnya radius sosial, sehingga hubungan antara individu makin renggang. Dalam kenyataannya manusia jarang hanya hidup dalam masyarakat *gemeinschaft* dan *gesellschaft* saja, biasanya selalu hidup dalam situasi *gemeinschaft* dan *gesellschaft*. Seperti dalam lingkungan kerja mengalami ikatan *gesellschaft*, tapi dalam lingkungan keluarga tetap mengalami ikatan *gemeinschaft*. Namun demikian berkembangnya sebagian hidup manusia dari *gemeinschaft* ke *gesellschaft* akan cukup menyebab-

kan terjadinya perubahan sosial sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan situasi objektif (di luar diri). Bell dan Mau lebih mempertajam teori Ferdinand Toennies dengan mengatakan bahwa masyarakat *gemeinschaft* lebih berorientasi ke masa silam, bersikap fantastik dan dogmatik. Sebaliknya masyarakat *gesellschaft* lebih melihat ke masa depan dan menggunakan hukum objektif sebagai pengarahnya.

Berpijak dari fakta dan berbagai teori di atas, maka jelas proses pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan migrasi terjadi karena adanya remitan yang diinvestasikan pada sektor ekonomi dan sosial di daerah asal. Oleh karena itu bisa jadi kekhawatiran Ogburn tentang *cultural lag* dapat terjadi di daerah asal migran, di mana kebudayaan-kebudayaan yang bersifat material lebih dulu berkembang dibandingkan kebudayaan-kebudayaan yang bersifat immaterial, seperti nilai-nilai budaya yang memang lebih lamban menerima respon dibandingkan wujud kebudayaan yang lain.

Teori pembangunan yang terkait dengan perkembangan pertanian adalah yang dikemukakan oleh Lewis dan AT. Mosher. Menurut Lewis (Ibrahim, 2002) pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui beberapa tahap yang mentransformasikan masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat pertanian yang komersial moderen dan akhirnya menjadi

masyarakat industri. Tahap-tahap yang dimaksud Lewis adalah :

- (1) Modernisasi teknologi dalam suatu masyarakat akan membawa perubahan dari teknik tradisional ke aplikasi ilmu pengetahuan.
- (2) Pertanian komersial yang bercirikan pergeseran dari pertanian subsisten menuju pertanian untuk keperluan ekspor.
- (3) Proses industrialisasi yang menggambarkan transisi dari penggunaan kekuatan hewan dan manusia menuju penggunaan mesin, dan akhirnya :
- (4) Terjadi urbanisasi yang meliputi perubahan-perubahan dimensi ekologi dan pergerakan pertanian serta perkampungan ke pusat-pusat kota.

D. Konsep dan Teori Mobilitas

Mobilitas, sebagaimana digunakan dalam studi demografi, biasanya mengacu kepada semua bentuk gerakan individu atau kelompok secara spasial, fisik atau geografi untuk menetap secara permanen maupun sementara (Shryock and Siegel, 1976 *dalam* Raharto, 1997). Gerakan penduduk yang mencakup perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen secara khusus di definisikan sebagai migrasi. Selain itu, migrasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internasional mengacu pada migrasi lintas batas negara (Pressat, 1985, *dalam* Ananta, 1997).

Masalah migrasi merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan dari persoalan kependudukan suatu negara. Oleh karena itu, proses migrasi, termasuk migrasi internasional dapat dipandang sebagai suatu fenomena yang hampir selalu terjadi di setiap negara. Hugo (1993 ; Spaan, 1994) menjelaskan bahwa migrasi internasional juga telah menjadi fenomena penting di Indonesia tahun-tahun terakhir ini. Hal ini secara khusus ditunjukkan oleh kenaikan secara substansial arus migrasi tenaga kerja internasional keluar dari Indonesia.

George's (1970) mengklasifikasikan migrasi internasional ke dalam dua bentuk, yakni : 1) perpindahan yang disebabkan karena keharusan atau kewajiban, dan 2) perpindahan yang disebabkan karena faktor kebutuhan. Kondisi yang pertama terkait dengan kondisi di daerah asal yang tidak memungkinkan bagi penduduknya untuk tetap bertahan, seperti karena terjadi perang, daerah potensi bencana alam, karena penggusuran dan sejenisnya. Sedangkan bentuk kedua lebih disebabkan karena faktor kesulitan hidup terutama kesulitan ekonomi di daerah asal, sehingga memerlukan perpindahan untuk memperbaiki kehidupan tersebut.

Teori-teori konvensional yang terdapat dalam sebagian besar buku teks mengenai perubahan struktural sosial-ekonomi (terutama perubahan yang bersifat kapitalistik) memandang gejala migrasi

sebagai suatu proses yang wajar dan alamiah. Sejalan dengan makin berkembangnya kapitalisme dalam masyarakat di dunia, maka perkembangan dan persoalan migrasi semakin meluas. Implikasinya adalah banyaknya bermunculan teori-teori yang menjelaskan tentang migrasi dalam berbagai sudut pandangnya.

1. Teori Struktural, Individu, dan Sistem Jaringan (*Network System*)

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Stalker. Menurut Stalker (2004), terdapat tiga teori yang dapat menjelaskan fenomena migrasi internasional tenaga kerja, yaitu : teori struktural, teori keluarga dan individu, dan teori sistem jaringan (*network system*).

Perspektif struktural melihat nasib penduduk sangat ditentukan oleh struktur politik, sosial dan ekonomi yang membentuk kehidupan mereka. Faktor-faktor struktural, seperti tekanan penduduk, pengangguran, atau pengaruh media internasional dapat mendorong penduduk untuk meninggalkan negara asalnya, dan kondisi negara tujuan yang lebih baik akan menarik penduduk suatu negara. Salah satu penjelasan struktural yang dikemukakan oleh Stalker adalah teori "*dual labour market*". Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan versi kapitalis menyebabkan dua jenis pekerjaan. Pertama adalah jenis pekerjaan berupah tinggi, dikerjakan oleh tenaga kerja berpendidikan tinggi dan aman (*scure*). Kedua, adalah jenis pekerjaan yang tidak menyenangkan,

berat dan jangka waktunya tidak menentu (temporer). Jenis pekerjaan ini sering disebut dengan istilah 3 D (*dirty, dangerous, and difficult*).

Pendekatan individual memandang bahwa setiap migran merupakan makhluk rasional yang mampu menilai kondisi negara tujuan dan memilih kombinasi yang optimal antara : tingkat upah, keamanan pekerjaan dan biaya perjalanan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan modal manusia (*human capital*) karena setiap orang dapat dianggap sebagai “produk” dari investasi pendidikan, keterampilan atau kesehatan. Produk investasi tersebut mencari tempat yang paling baik agar produk itu dapat digunakan secara optimal.

Menurut Grieco dan Monica Boyd (2005), perluasan dari pendekatan individual ini menganggap migrasi sebagai pilihan kelompok atau keluarga sebagai salah satu cara mengurangi resiko. Dalam pendekatan ini, kepala keluarga akan membiayai perjalanan migran (yang merupakan anggota keluarga) dan biaya hidup selama migran mencari pekerjaan. Disisi lain, migran mempunyai komitmen untuk mengirim uang kepada keluarganya (remitan) apalagi pada saat keluarga mengalami kesulitan seperti terjadi kegagalan panen. Pendekatan migrasi ini sering disebut “*new economics of migration*”.

Individu dan keluarga seringkali tidak dapat membuat keputusan yang terpisah dari struktur dimana keluarga tersebut tinggal. Mereka akan terikat

pada struktur yang membentuknya. Salah satu contoh yang jelas dari pendekatan ini adalah berkembangnya jaringan migran (*migrant network*). Migran yang pertama kali merintis usaha di tempat tujuan akan membantu migran yang baru datang dan mencarikan pekerjaan yang sesuai. Munculnya jaringan migran ini menunjukkan bahwa teori migrasi berkaitan dengan masalah seperti mengalirnya modal dan barang serta pengaruh budaya, sosial dan politik.

2. Teori Pendekatan Sistem (*System Approach*)

Teori migrasi lain yang cukup terkenal adalah pendekatan sistem (*system approach*) yang dikemukakan oleh Mobogunje (1970). Sebagai suatu sistem, proses migrasi mencakup unsur-unsur yang kompleks dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, sedangkan kondisi lingkungan dimaksud senantiasa berpengaruh terhadap mekanisme migrasi. Kondisi lingkungan yang dianggap berpengaruh terhadap proses migrasi adalah : (1) kondisi ekonomi, seperti tingkat upah tenaga kerja, perkembangan harga, preferensi konsumen, tingkat komersialisasi, dan perkembangan industri ; (2) kondisi sosial, seperti : perkembangan kesejahteraan sosial, pendidikan dan derajat kesehatan ; (3) perkembangan teknologi termasuk kondisi komunikasi, mekanisasi, dan transportasi ; (4) kebijakan pemerintah, seperti : kebijakan pembangunan pertanian, kependudukan dan pemasaran.

Lebih lanjut Mobogunje mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan yang ada dapat berfungsi sebagai pendorong migran potensial untuk melakukan migrasi internasional. Sebagai suatu sistem, pengaruh nilai budaya dan institusi sebagai sub sistem serta mekanisme penyesuaian diri migran di daerah asal merupakan bagian tak terpisahkan dalam transformasi migrasi. Proses penyesuaian migran di tempat tujuan, mencakup penyesuaian terhadap pekerjaan, bahasa sebagai alat komunikasi, dan penyesuaian budaya. Semua aspek tersebut pada gilirannya akan menimbulkan umpan balik (*feed back*) yang dapat bernilai positif atau negatif. Umpan balik positif, akan memperkuat rangsangan bermigrasi, sedangkan umpan balik negatif akan memperkuat mekanisme kontrol sub sistem nilai budaya dan institusi terhadap calon migran potensial di daerah asal.

3. Teori Transisi Mobilitas

Teori migrasi yang juga banyak dijadikan acuan dalam telaah migrasi adalah hipotesis transisi mobilitas dari Zelinsky (1971). Proses migrasi dimulai dari individu dan anggota rumah tangga dalam konteks budaya dan masyarakat yang umumnya ditunjukkan oleh masyarakat dimana mereka tinggal. Keputusan menyangkut siapa yang akan migrasi, kapan dan kemana mereka migrasi sering merupakan bagian dari strategi rumah tangga dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keluarganya (Weeks

JR., 2005). Selanjutnya, teori ini menjelaskan bahwa terdapat kepastian, pola-pola keteraturan pada proses mobilitas personal dalam konteks ruang-waktu selama ini. Keteraturan tersebut merupakan suatu komponen esensial dalam proses modernisasi. Elemen dinamis dalam transisi mobilitas adalah perubahan sosial ekonomi yang tidak bisa dipisahkan (inheren) dari proses modernisasi. Secara implisit diketahui bahwa meningkatnya kebebasan individu menjadi dasar bagi tumbuhnya mobilitas personal, namun dalam dimensi spesifik, peningkatan kebebasan individual tersebut tidak teridentifikasi (De Jong dan James Fawcett, 1981).

Dalam model transisi mobilitas yang dikemukakan Zelinsky (1971) terdapat lima tahapan dalam pola migrasi terkait dengan perubahan demografi. Ke lima tahapan tersebut meliputi (Osili, 2004) : (1) pada masyarakat pre industri terjadi sedikit sekali migrasi sekitar daerah tempat tinggal dan perpindahan antar kawasan sangat terbatas, (2) pada tahap awal transisi yang terjadi adalah migrasi desa – kota, dan terjadinya kolonisasi pada kawasan yang baru, (3) pada tahapan selanjutnya, migrasi desa-kota terus berlangsung dan terjadi pertumbuhan cepat migrasi antar kota, (4) migrasi desa-kota terus berlangsung akan tetapi cenderung berkurang, sementara migrasi residensial cenderung meningkat. Namun sebagai bentuk migrasi di dalam dan antar perkotaan lebih kurang dibandingkan dengan emigrasi, (5) pada masyarakat yang telah maju, akan

selalu terjadi migrasi yang eksklusif di dalam dan antar kota walaupun teknologi baru banyak mengurangi peran tenaga kerja.

Menurut teori transisi mobilitas internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh Wiyono (1997), pengiriman tenaga kerja yang tidak terampil (*unskilled labor*) dari negara berkembang ke negara lain merupakan sesuatu yang wajar. Karena di dalam negeri para tenaga kerja tersebut tidak mendapatkan pekerjaan yang memadai, maka mobilitas ke luar negeri menjadi salah satu pilihan.

4. Teori Ravenstein (*Teori Hukum Mobilitas*)

Ravenstein mengemukakan sejumlah proposisi mengenai migrasi tertuang dalam kesimpulan dari sebuah karyanya yang berjudul “ *The Laws of Migration*”. Dari hasil penelitiannya yang sangat luas Ravenstein menyimpulkan hal-hal sebagai berikut (Lee, 1966) :

- Banyak migran hanya menempuh jarak dekat, dan jumlah migran disuatu pusat yang dapat menampung migran tersebut makin menurun karena makin jauhnya jarak yang ditempuh.
- Migran yang menempuh jarak yang jauh, umumnya lebih suka menuju ke pusat-pusat industri dan perdagangan yang penting.
- Umumnya terjadi suatu perpindahan penduduk berupa “ arus migrasi” yang terarah ke pusat-pusat industri dan perdagangan yang penting yang dapat menyerap para migran tersebut.

- Penduduk pedesaan yang langsung berbatasan dengan kota yang tumbuh cepat, cenderung pindah ke kota tersebut. Turunnya jumlah penduduk pedesaan sebagai akibat migrasi, akan diganti oleh migran dari daerah yang lebih terpencil. Hal ini akan terus berlangsung hingga daya tarik perkotaan yang tumbuh pesat itu secara bertahap terasa pengaruhnya di daerah yang terpencil tersebut.
- Proses penyebaran adalah kebalikan dari penyerapan namun memperlihatkan gejala-gejala yang sama.
- Setiap arus utama migrasi akan menimbulkan arus balik sebagai penggantinya.
- Terdapat perbedaan antara desa dengan kota mengenai kecenderungan penduduknya untuk bermigrasi (minat penduduk kota lebih kurang dari pada penduduk desa).
- Kebanyakan kaum wanita lebih tertarik bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat dengan daerah asalnya.
- Dengan meningkatnya sarana perhubungan, perkembangan industri dan perdagangan, menyebabkan makin meningkatnya arus migrasi.
- Motif ekonomi merupakan dorongan utama untuk bermigrasi. Dalam konteks ini, Ravenstein mengatakan : Undang-undang yang tidak baik atau menindas, pajak yang tinggi, iklim yang kurang menarik, lingkungan yang tidak menyenangkan, dan paksaan-paksaan, semua itu

selalu menimbulkan arus migrasi. Tetapi tidak satupun dari arus tersebut volumenya dapat dibandingkan dengan volume arus migrasi yang didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kehidupan dalam bidang materiil (ekonomi).

5. Model Gravitasi dan Teori Peluang

Salah satu teori migrasi yang memusatkan perhatiannya pada kajian menyangkut volume, arah dan jarak spasial perpindahan antar daerah adalah konsep model gravitasi. De Jong dan James T. Fawcett (1981) mengemukakan, secara mendasar, model ini menghipotesiskan bahwa migrasi berhubungan langsung dengan ukuran populasi daerah asal dengan daerah tujuan dan seantiasa berhubungan dengan jaraknya. Dalam kaitannya dengan pengaturan ruang / tempat, model ini mengacu pada konsep teori pusat ruang. Harapan perilaku secara umum adalah bahwa migran potensial mengikuti prinsip pilihan lokasi yaitu lokasi yang terbaik dan terdekat menurut mereka. Bertentangan dengan model gravitasi, Stouffer (1940, 1960) menegaskan bahwa perpindahan penduduk dalam suatu ruang disebabkan oleh sejumlah peluang yang tersedia. Faktor-faktor seperti : jumlah kesempatan kerja dan kenyamanan tempat tinggal menjadi kunci penting dalam sistem ini.

Stouffer (www.com/migration/mg_theories_2.htm) menjelaskan bahwa tingkat perpindahan antar dua lokasi tergantung pada banyaknya peluang atau kesempatan percampuran di antara keduanya.

Peluang tersebut menggambarkan keadaan dan alternatif kemungkinan migrasi yang dibatasi oleh jarak antara daerah asal migrasi dengan daerah tujuannya. Esensi dari model ini adalah bahwa kondisi tempat, termasuk jarak tempuh merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kemana para migran akan pergi (migrasi). Orang biasanya akan berpindah dari suatu tempat asal ke daerah tujuan tertentu berdasarkan kepastian menyangkut berbagai peluang di daerah tujuan.

6. Model Nilai - Harapan

Model yang bersifat psikologis yang dapat diterapkan dalam perilaku migrasi adalah model nilai harapan (*value expectancy*). Menurut Crowford (1973) sebagaimana disitasi oleh De Jong dan James T. Fawcett (1981), komponen dasar dari model nilai harapan adalah : sasaran (nilai, tujuan) dan harapan-harapan / keinginan (peluang subyektif). Model tersebut dapat diterapkan pada migrasi dengan rumusan sebagai berikut : $M I = V_i E_i$. Dimana V adalah nilai yang diterima, E adalah harapan penerimaan dari migrasi, sedangkan MI adalah intensitas migrasi. Jadi MI adalah fungsi jumlah dari nilai - harapan produk. Berdasarkan banyak kajian terkait dengan penerapan model V E dalam migrasi secara luas, termasuk pendekatan untuk kajian nilai harapan pada masalah-masalah psikologis, ternyata ditemukan berbagai masalah. Barangkali hal penting

yang kurang diperhitungkan adalah spesifikasi dari nilai dan tujuan yang relevan.

Melalui review empiris dan teoritis dari berbagai literatur dapat teridentifikasi sejumlah aspek yang berkaitan dengan nilai atau tujuan-tujuan potensial. Tetapi dari semua itu dapat dipilah sebanyak 7 (tujuh) katagori konseptual yang mencerminkan kegunaan yang bersifat psikologis. Ke tujuh katagori tersebut adalah (Chamer's *et al*, 1977) : (1) Kekayaan (Kemakmuran), (2) status, (3) Kesenangan hidup, (4) rangsangan, (5) otonomi, (6) afiliasi (penggabungan), dan (7) moralitas. Penjelasan masing-masing katagori tersebut adalah sebagai berikut :

- Kekayaan (kemakmuran). Menyangkut sejumlah faktor yang berhubungan dengan penghargaan ekonomis secara individual. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekayaan / kemakmuran tersebut paling tidak meliputi : upah yang tinggi, pendapatan yang baik, biaya hidup rendah, pajak yang rendah, keuntungan yang memadai, stabilitas kesejahteraan baik, kesempatan kerja stabil, pekerjaan tersedia, pengakuan hak milik (*property*).
- Status. Menyangkut sejumlah faktor yang berhubungan dengan keberadaan atau prestise sosial. Pekerjaan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam status. Aspek tersebut juga berhubungan dengan pendapatan. Dengan demikian, status nilai dan kekayaan memiliki

hubungan yang bersifat tertutup. Perpindahan dari daerah pedesaan ke perkotaan sering dipandang sebagai suatu bentuk mobilitas sosial, dan kurang perhatian pada konsekuensi ekonomis.

- Kesenangan hidup. Dapat dilihat sebagai tujuan yakni mendapatkan hidup atau kondisi kerja yang baik. Aspek ini termasuk peningkatan kondisi perumahan, lingkungan tempat tinggal yang memadai, kemudahan kerja, waktu kerja yang pendek dan teratur, sehat dan tidak tertekan, dan lain-lain. Kesenangan disini berarti kesenangan fisik dan psikologis yang esensial.
- Perangsang, yang dimaksud adalah pendorong untuk dapat beraktivitas secara baik (bertentangan dengan situasi yang tidak menyenangkan). Termasuk dalam hal ini adalah seperti aktivitas kerja yang dinilai sebagai hiburan dan rekreasi. Hal-hal yang relevan dalam konteks ini antara lain : keragaman, perubahan, kesenangan, kegembiraan, petualangan, atau pengalaman baru yang sederhana (termasuk perubahan peran). Rangsangan dapat juga dilihat sebagai pembebasan dari kebosanan.
- Otonomi (Kebebasan individu). Otonomi mempunyai banyak dimensi, tetapi mengacu secara umum kepada kebebasan personal (pribadi), kemampuan untuk tinggal adalah satu-satunya milik dalam kehidupan. Dalam berbagai setting, otonomi tersebut banyak diterapkan

dalam kaitannya dengan kebebasan yang bersifat politis.

- Penggabungan (afiliasi). Mengacu pada nilai-nilai kehidupan bersama dengan orang lain dalam hubungannya dengan atau sebagai hasil dari migrasi. Secara luas, hal tersebut dapat mengacu kepada penggabungan kerabat / teman atau keluarga sebagai suatu alasan untuk bermigrasi. Dalam banyak kasus, alasan tersebut dapat menutupi nilai-nilai lainnya, seperti : penggabungan dengan orang lain dapat menjadi faktor yang memfasilitasi migran untuk memuaskan tujuan pribadi yang berbeda. Dalam beberapa kasus, afiliasi merupakan motif utama untuk migrasi seperti : kawin, berkumpul dengan pasangan, bergabung dengan teman-teman lama yang telah bermigrasi lebih awal.
- Moralitas. Hal ini berkaitan dengan kedalaman nilai dan sistem kepercayaan yang menyangkut baik atau buruknya pandangan hidup, seperti sistem kepercayaan agama. Nilai moral memiliki kekuatan yang berpengaruh pada perilaku, tergantung pada tingkat komitmen pribadinya. Dimensi moralitas dalam hubungannya dengan migrasi sering diekspresikan secara negatif, seperti dalam hal korupsi, atau pengaruh kehidupan kota besar yang penuh dosa. Secara terperinci uraian tersebut disajikan pada gambar 1. berikut ini :

Kemakmuran	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan tinggi dan stabil • Keamanan ekonomi pada masa tua • Pemenuhan kebutuhan dasar • Mendapat akses untuk mendapat upah dan keuntungan ekonomi lain
Status	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat pekerjaan yang prestisius • Menjadi terpandang dalam masyarakat • Menerima pendidikan yang baik • Mempunyai kekuatan dan pengaruh
Kesenangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat pekerjaan dengan mudah • Tinggal dalam masyarakat yang tenang • Memiliki waktu luang • Memiliki rumah yang memadai
Rangsangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat kesenangan / kegembiraan • Melakukan sesuatu yang baru • Dapat bertemu dengan beragam orang • Mendapat aktivitas dan kesibukan
Otonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh kebebasan secara ekonomi • Mendapat kebebasan mengatakan dan melakukan apa yang diinginkan • Mendapatkan privasi / hak-hak pribadi
Afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggal dekat keluarga atau kerabat • Menjadi bagian dari kelompok / masyarakat • Mempunyai banyak teman • Memiliki pasangan / bersama dengan pasangan
Moralitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan yang berbudi luhur • Melaksanakan kegiatan agama • memiliki pengaruh baik pada anak • Tinggal dalam masyarakat dengan iklim moral yang baik

Gambar 1. Nilai dan Tujuan yang Berhubungan dengan Migrasi (Chamer's *et al*, 1977 dalam De Jong dan Fawcett, 1981)

Beberapa catatan khusus mengenai isu-isu yang perlu diperhatikan dalam rangka kerja dikemudian hari, antara lain : (1). Nilai-nilai, dapat diukur dalam dimensi lain, seperti : sentralitas sistem nilai personal, (2) Harapan, dapat diukur dengan dimensi tambahan seperti : apakah penerimaan mengecewakan diri sendiri dan orang lain, apakah hasil yang diharapkan berlaku untuk waktu yang lama, dan (3) faktor motivasional yang positif dan negatif harus dipertimbangkan, tidak dalam pengertian faktor

pendorong dan penarik secara sederhana, tetapi sebagai suatu faktor konstelasi yang diperlukan pada tiap-tiap lokasi atau perpindahan yang potensial.

7. Teori Keputusan Migrasi

Teori migrasi dari Evert S. Lee (1966) mencoba menjelaskan faktor-faktor yang menentukan keputusan bermigrasi berdasarkan karakteristik positif dan negatif antara daerah asal dengan daerah tujuan. Para migran selalu mengharapkan untuk mendapat keuntungan yang lebih dari migrasinya ke daerah lain. Selain itu, migrasi potensial dari daerah asal (seperti pedesaan) ke daerah tujuan (seperti perkotaan) dipengaruhi juga oleh adanya hambatan di daerah asal, daerah tujuan, dan di perjalanannya. Hambatan tersebut meliputi : tekanan dari keluarga, mis informasi, kebijakan pemerintah setempat, biaya perjalanan, kurangnya modal, rendahnya pendidikan, pelayanan keamanan, dan hambatan bahasa. Menurut Lee, hambatan yang terjadi bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.

Teori migrasi Lee seperti dijelaskan di atas sering dipakai menganalisis kecenderungan migrasi internasional selama ini. Teori Lee tersebut lebih dikenal dengan teori dorong-tarik (*Push-Pull Theory*). Secara ringkas, teori dorong-tarik menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk migrasi ditentukan oleh : (1) faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal, (2) faktor yang berhubungan dengan daerah tujuan, (3) faktor hambatan, (4) faktor-faktor pribadi

migran (De Jong dan Gardner, 1981, Hanafie, 2004, Hani, 2005).

BAB II

KONTEKS, METODOLOGI DAN LINGKUP STUDI

A. Konteks Kajian

Kawasan penambangan berskala besar sebagaimana biasanya akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Suatu kawasan yang merupakan pusat pertumbuhan seringkali menjadi pusat aksi perubahan sosial terhadap kawasan disekitarnya. Perubahan sosial pada umumnya disebabkan karena terjadinya transformasi berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Proses transformasi yang tidak terkendali akan dapat menimbulkan kesenjangan sosial, yang pada akhirnya dapat berdampak pada instabilitas kawasan. Timbulnya instabilitas dalam kawasan atau di sekitar kawasan pusat pertumbuhan akan berdampak terhadap terganggunya aktivitas pertumbuhan (penambangan) itu sendiri

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT), di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa termasuk katagori penambangan skala besar. Dengan demikian, berbagai aktivitas yang terkait dengan penambangan tersebut, mulai dari tahap persiapan dan konstruksi, terlebih lebih tahap produksi dapat menimbulkan transformasi yang berimplikasi pada terjadinya perubahan sosial. Secara teoritis, perubahan sosial dapat bermuatan positif (konstruktif) dan negatif (destruktif). Kecenderungan perubahan sosial, baik yang konstruktif maupun destruktif anatara lain timbul karena terjadinya transformasi usaha dan tenaga kerja, serta transformasi sosial budaya lainnya.

Pada tahap persiapan kegiatan penambangan telah terjadi pembebasan tanah masyarakat dan tanah negara. Kegiatan pembebasan lahan tersebut menimbulkan perubahan orientasi, pola pekerjaan, dan perilaku masyarakat secara umum. Pada tahap konstruksi yang ditunjukkan dengan berkembangnya aktivitas pembangunan fisik prasarana jelas akan membuka kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi sebagian masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat dari daerah lain. Peluang berusaha tentu menjadi daya tarik datangnya pekerja dari luar dan tinggal berdomisili di lokasi sekitar kawasan penambangan. Hal ini jelas akan menimbulkan proses asimilasi, akulturasi dan sejenisnya yang berdampak juga pada perubahan sosial masyarakat. Dari pengalaman yang ada,

diketahui bahwa pada tahap konstruksi, jumlah serapan tenaga kerja paling banyak, baik tenaga kerja luar daerah maupun tenaga kerja lokal. Dengan demikian, arus perubahan sosial sesungguhnya dimulai dan meningkat pesat pada tahapan konstruksi tersebut. Pada tahapan produksi, jumlah tenaga kerja secara kumulatif menurun sejalan dengan berkurangnya peluang kerja yang tersedia. Namun demikian, kegiatan produksi tersebut tetap membawa dampak terhadap perubahan sosial masyarakat.

PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) sebagai pelaksana proyek penambangan di Kabupaten Sumbawa sejak awal telah mengantisipasi terjadinya perubahan sosial, terutama yang dinilai negatif khususnya oleh masyarakat lokal. Antisipasi tersebut antara lain dilakukan dengan jalan pembinaan kepada masyarakat setempat dengan melibatkan berbagai pihak seperti : Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah Daerah. Pembinaan tersebut diharapkan agar masyarakat setempat dapat menikmati dan memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang di kawasan penambangan tersebut.

Namun demikian, tidak semua kegiatan pembinaan tersebut dinilai berhasil atau menghasilkan perubahan sosial yang dinilai positif. Persoalan yang terkait dengan perubahan kultural dinilai sebagai aspek perubahan yang sulit diprediksi

dan dikendalikan secara baik. Hal ini antara lain disebabkan karena aspek kultural terkait dengan aspek perilaku masyarakat secara umum.

Agar perubahan sosial yang bersifat negatif pada masa sekarang dan akan datang dapat ditekan seminimal mungkin, maka perlu diketahui secara detail pola perubahan sosial yang terjadi akibat kegiatan penambangan. Untuk memperoleh gambaran detail tentang perubahan sosial akibat kegiatan penambangan tersebut, maka perlu dilakukan studi secara seksama. Hasil studi tersebut akan dapat memberikan gambaran tentang kondisi perubahan sosial yang terjadi. Selanjutnya dari gambaran tersebut dapat dirumuskan rekomendasi menyangkut pola pengembangan masyarakat (*Community Development*) yang arif dan selaras. Harapan lebih lanjut adalah terjadinya sinergi pembangunan masyarakat dengan adanya kegiatan penambangan.

B. Metodologi

Untuk memperoleh data dan informasi maka penelitian ini dirancang dengan model penelitian penjelasan (*explanatory research*)(Nazir, 1980). Keuntungan dari model ini adalah mampu menggali dan sekaligus menjelaskan masalah secara rinci serta mengkaitkan berbagai variabel antar variabel penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan beberapa pendekatan/teknik yaitu :

- (1) Pengumpulan data sekunder yang bersumber dari berbagai Kantor Dinas Badan atau lembaga lainnya;
- (2) Wawancara (*interview*), dimaksudkan untuk memperoleh data asli (*primer*) dari masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran penelitian (*responden*). Untuk pelaksanaan wawancara digunakan instrumen berupa daftar pertanyaan (*questionnaire*);
- (3) Observasi langsung (*direct observation*), dimaksudkan untuk mengetahui berbagai gejala yang terjadi pada sasaran penelitian dan lingkungan sekitarnya. Hasil observasi ini digunakan sebagai dasar klarifikasi dan cek silang (*cross check*) berbagai informasi dan fenomena yang terungkap. Selain itu, hasil observasi langsung digunakan sebagai dasar pemetaan permasalahan yang dijumpai;
- (4) Wawancara mendalam (*indepth interview*), dimaksudkan untuk mengetahui aspek-aspek yang terkait dengan variabel penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif. Untuk itu sasaran *interview* mendalam ini adalah informan kunci (*key informant*) yakni anggota masyarakat yang dinilai mengetahui secara luas hal-hal yang terkait dengan perubahan sosial dalam lingkungan sosialnya. Instrumen yang digunakan berupa daftar penelusuran informasi berbentuk

- pertanyaan dengan model essay;
- (5) Studi Pustaka (*desk study*), dimaksudkan untuk memperluas dan melengkapi khasanah hasil penelitian, di samping sebagai pembanding atas hasil yang ditemukan. Studi pustaka juga dapat digunakan untuk mengarahkan analisis beserta penjelasan hasil analisis; dan
 - (6) *Focus group discussion* (FGD) yang pesertanya unsur stakeholder tingkat desa dan kecamatan dalam rangka melakukan konfirmasi terhadap data dan permasalahan yang teridentifikasi dalam studi sebelum melakukan analisis dan mendisain rekomendasi.

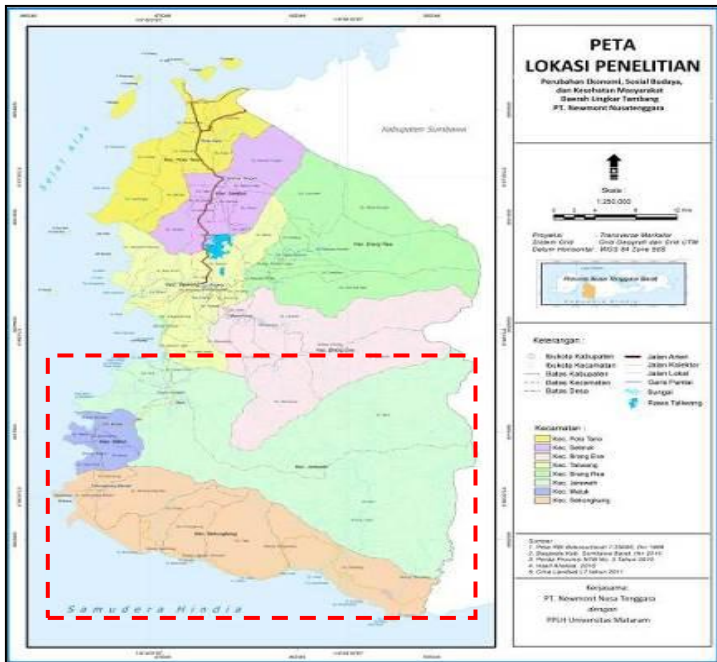
Penelitian ini dilaksanakan di daerah sekitar lingkaran tambang PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) yang mencakup 3 kecamatan dan 15 desa yang lokasinya mendapatkan dampak langsung dari kegiatan penambangan. Agar diperoleh data yang lebih obyektif, maka penentuan lokasi penelitian dilakukan secara bertingkat, yakni:

- (1) Penetapan wilayah penelitian, yakni daerah/kawasan yang secara umum diperkirakan memiliki dampak dari kegiatan penambangan. Berdasarkan pendekatan ini ditetapkan 3 (tiga) wilayah kecamatan sebagai lokasi penelitian, yaitu, (1) Kecamatan Jereweh, (2) Kecamatan Maluk, dan (3) Kecamatan Sekongkang
- (2) Menetapkan lokasi penelitian, yakni desa dalam wilayah penelitian yang memenuhi karakteristik

pembatas, yaitu :

- a) Desa yang paling dekat dari aktivitas penambangan, yang diperkirakan mendapatkan dampak paling besar, yakni :
 - Desa Sekongkang Atas
 - Desa Kemuning
 - Desa Sekongkang Bawah
 - Desa Tongo Sejong
 - Desa Aik Kangkung (SP-1 Tongo)
 - Desa Tatar (SP-2 Tongo)
 - Desa Benete
 - Desa Maluk Loka
 - Desa Bukit Damai
 - Desa Pasir Putih
 - Desa Mantun
- b) Desa yang berada agak jauh dari kawasan penambangan namun diperkirakan memperoleh dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan penambangan. Berdasarkan pendekatan ini ditetapkan beberapa desa lokasi penelitian, yakni:
 - Desa Goa (di Kecamatan Jereweh)
 - Desa Belo (di Kecamatan Jereweh)
 - Desa Beru (di Kecamatan Jereweh)
 - Desa Dasan Anyar (di Kecamatan Jereweh)
 - Desa Telonang Baru (di Kecamatan Sekongkang)
- c) Menetapkan spot penelitian (dusun dengan pertimbangan bahwa spot tersebut memiliki dua karakteristik pembatas, yaitu: (1) dusun

yang diperkirakan memperoleh dampak langsung dengan kegiatan penambangan dan (2) adanya ekspresi perubahan sosial secara umum.



Gambar 2. Peta lokasi studi (Kecamatan Jereweh, Maluk, Sekongkang)

Populasi penelitian adalah masyarakat yang berada di tiga wilayah studi (Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Jereweh). Teknik penentuan responden menggunakan purposive sampling berdasarkan kelompok mata pencaharian masyarakat, atau ragam pekerjaan pokok yang dominan di wilayah studi. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan quota sampling, yaitu dengan memberikan jatah pada setiap kluster dan

strata (kelompok masyarakat berdasarkan lokasi desa penelitian) sehingga ditetapkan jumlah responden sebagai berikut :

- (a) Pada kluster I (wilayah terdekat dengan kegiatan penambangan) dengan jumlah responden tiap stratifikasi kelompok masyarakat rata-rata sebanyak 3-5 orang tiap desa, sehingga jumlah responden pada kluster ini sebanyak 8 (kelompok) x 11 (desa) x 3-5 orang (responden) = 290 orang
- (b) Pada kluster II (wilayah yang agak jauh dari kegiatan penambangan) dengan jumlah responden tiap strata diambil rata-rata antara 3-5 orang tiap desa, sehingga jumlah responden pada kluster ini sebanyak 8 (kelompok) x 5 (desa) x 3-5 orang (responden) = 115 orang.

Dengan perhitungan tersebut diperoleh jumlah responden seluruhnya sebanyak = $290 + 115 = 405$ orang. Selain itu pada masing-masing desa terpilih ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang informan kunci (*Key informant*). Dengan demikian jumlah informan kunci kluster I sebanyak : $11 \text{ (desa)} \times 5 \text{ (Informan)} = 55$ informan. Untuk kluster II : $5 \text{ (desa)} \times 5 \text{ (Informan)} = 25$ informan. Informan kunci juga akan diambil dari tokoh formal khusus yakni kepala Dinas Instansi yang terkait di sekitar wilayah studi, yakni sebanyak 10 orang. Dari perhitungan tersebut diperoleh informan kunci sebanyak : $55 + 20 + 10 = 85$ orang. Rincian di setiap desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Sebaran jumlah responden untuk studi perubahan sosial daerah lingkaran tambang Batu Hijau Sumbawa Barat.

Desa	Jumlah Responden Tiap Rumah Tangga (Orang)								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Kluster I :									
1. Sek. Atas	3	-	3	4	3	4	3	3	23
2. Sek. Bawah		-	5	3	5	5	5	5	33
3. Benete	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4. Maluk Loka	3	3	3	3	3	3	3	3	24
5. Bukit Damai	3	3	3	3	3	3	3	3	24
6. Pasir Putih	3	3	3	3	3	3	3	3	24
7. Mantun	3	3	3	3	3	3	3	3	24
8. Tongo	5	3	3	3	3	3	3	3	26
9. Aik Kangk.	5	3	3	3	3	3	3	3	26
10. Tatar	5	3	3	3	3	3	3	3	26
11. Telonang	3	3	3	3	3	3	3	3	24
12. Kemuning	2	-	2	1	2	1	2	2	12
Kluster II :									
13. Goa	5	3	5	3	3	5	3	5	32
14. Belo	3	-	5	3	3	5	5	5	29
15. Beru	3	5	3	3	3	3	3	5	30
16. Dasan Anyar	3	3	3	3	3	3	3	3	24
a. Total	5	3	5	4	4	5	5	5	40
	7	8	5	7	9	3	1	5	5
Key Informan									85
Jumlah Responden									49
									0

Keterangan :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 = Petani/Peternak | 5 = Jasa |
| 2 = Nelayan | 6 = PNS |
| 3 = Pedagang | 7 = Karyawan Non PNS |
| 4 = Perajin/Industri RT | 8 = Key Informan |

Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif, baik dari sumber primer maupun sekunder. Data dari lapangan merupakan gugus data mentah (*raw data*) yang selanjutnya diolah dengan menggunakan program computer. Sebelum proses

tabulasi, akan dilakukan pengkodean (*coding*) dan pengeditan (*editing*).

Setelah data ditabulasi, dilanjutkan dengan analisis data dengan model kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan sistem komputerasi. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan berdasarkan kerangka logis (*logframe*) dengan model interpretasi yang ditunjang oleh hasil validasi masyarakat (*community validation*) yang diperoleh melalui diskusi kelompok terarah (FGD).

C. Gambaran Umum Daerah Lingkar Tambang Sebelum Operasi Tambang Batu Hijau

Kawasan penambangan Batu Hijau terletak di Kabupaten Sumbawa bagian barat (Sumbawa Barat) dengan jarak sekitar 224 km dari kota Pripinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram) atau sekitar 129 km dari kota Kabupaten Sumbawa (Sumbawa Besar). Pada awalnya, kawasan penambangan Batu Hijau termasuk dalam wilayah Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Pemekaran Sekongakang. Sebelum ada pemekaran, Kecamatan Sekongkang termasuk dalam wilayah Kecamatan Jereweh yang meliputi 7 desa, yaitu desa Goa, Beru, Belo, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, SPI Tongo dan SPII Tongo. Setelah ada kebijaksanaan pemekaran tahun 1999, jumlah desa berkembang menjadi 10 desa dengan tambahan 3 desa persiapan, yaitu Desa Persiapan Benete, Desa Persiapan Maluk dan Desa Persiapan Tongo Sejong.

Desa-Desa yang termasuk wilayah Kecamatan Jereweh adalah: Goa, Beru, Belo, Desa Persiapan Benete dan Desa Persiapan Maluk; sedangkan yang termasuk wilayah Kecamatan Sekongkang adalah Desa Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, SPI Tongo, SPII Tongo; dan Desa Persiapan Tongo Sejong. Mengingat data statististik kedua wilayah kecamatan tersebut banyak yang belum terpisah, maka pembahasan profil daerah studi mengacu pada data dan kondisi Kecamatan Jereweh sebelum ada kegiatan pemekaran.

1. Kondisi Tofografi dan Iklim

Tofografi Kecamatan Jereweh (termasuk Sekongkang) bervariasi dari yang datar, berombak, berbukit sampai bergunung. Bentuk tofografi yang dominan adalah berbukit sampai bergelombang, yaitu sekitar 60 %; kemudian datar sampai berombak 34%; dan berombak sampai berbukit sekitar 6 %.

Tipe iklim di wilayah kecamatan Jereweh menurut pengelompokan Scmidt dan Ferguson, termasuk tipe iklim D dengan curah hujan rata-rata 153 mm dengan 125 hari hujan pada tahun 1999. Curah hujan tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 1998 yang mencapai rata-rata 158.42 mm dengan hari hujan sebanyak 169 hari. Bulan basah (>100 mm) biasanya berlangsung selama 2 bulan (Desember-Januari); bulan lembab (60-100 mm) berlangsung selama 4 bulan (Pebruari-Mei) dan bulan kering berlangsung selama 6 bulan (Juni-Nopember).

Suhu maksimum biasanya mencapai 38°C dan suhu minimum 25° C.

Bentuk tofografi dan tipe iklim sebagaimana diuraikan di atas, akan menentukan pola penggunaan lahan dan sistem usahatani yang dikembangkan oleh masyarakat . Dari 87.980 hektar luas Kecamatan Jereweh, 74.876 hekar atau 85 % merupakan lahan hutan; sisanya sekitar 15 % diperuntukkan untuk penggunaan lainnya, seperti sawah, lahan kering, perumahan dan lainnya. Untuk pertanian lahan kering yang berupa ladang/tegalan/kebun menempati urutan kedua terluas setelah lahan hutan, yaitu sekitar 2631 hetar, kemudian lahan sawah 940 hektar, pekarangan 569 hektar, padang rumput 225 hektar, tambak 62 hektar dan penggunaan lainnya sekitar 8677 hektar. Untuk lahan sawah, 637 hektar berpengairan setengah teknis, 127 hektar irigasi non PU dan 176 hektar merupakan sawah tadah hujan.

2. Kondisi Penduduk

Penduduk Kecamatan Jereweh pada tahun 1999 tercatat berjumlah 11.740 jiwa; terdiri dari 6.087 jiwa laki-laki dan 5.653 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk pada tahun 1999 rata-rata sebanyak 13 jiwa per km². Distribusi penduduk tidak terlalu merata ditiap-tiap desa. Desa yang relatif padat penduduknya adalah Goa, SP-1 dan SP2 (lihat Tabel 2). Rumahtangga di Kecamatan Jereweh berjumlah 3446 KK dengan anggota rata-rata 4 orang setiap KK. Jumlah KK terbanyak terdapat di Desa Goa yaitu

1225 KK, kemudian Belo 652 KK, Beru 585 KK, Desa Sekongkang Atas 460 KK, Desa SPI Tonggo 230 KK dan paling sedikit di Desa Sekongkang Bawah (132 KK).

Tabel 2. Kepadatan Penduduk Kecamatan Jereweh Dirinci per Desa Tahun 1999.

No	Nama Desa	Luas Desa (km ²)	Penduduk (Jiwa)		Kepada tan (Jiwa/k m ²)
			Laki-laki	Perempuan	
1	Goa	55,05	1.425	1.448	52
2	Beru	211,84	1.146	1.127	10
3	Belo	307,78	1.247	1.219	8
4	Sekongkang Atas	121,95	918	847	14
5	Sekongkang Bawah	142,68	332	269	4
6	SP I Tonggo	15,00	602	364	64
7	SP II Tonggo	25,50	417	377	30
	Kecamatan Jereweh	879,80	6.087	5.653	13

Sumber. Kecamatan Jereweh Dalam Angka Tahun 1999.

Berdasarkan pengelompokan umur, sebagian besar penduduk Kecamatan Jereweh masih tergolong berusia muda atau belum produktif (0-14 tahun), yaitu sebanyak 2026 jiwa, kemudian berusia produktif (15-64 tahun) 3754 jiwa; dan berusia tidak produktif (di atas 64 tahun) 307 jiwa. Berdasarkan pengelompokan usia tersebut, maka dapat diketahui rasio ketergantungan (*depedency ratio*) penduduk Kecamatan Jereweh adalah sebesar 0,62. Artinya, setiap 100 orang penduduk berusia produktif menanggung penduduk yang berusia tidak dan belum produktif sebanyak 62 orang.

Di daerah pedesaan, sebagaimana di Kecamatan Jereweh seringkali dilihat anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dan orang tua yang berusia di atas 64 tahun juga aktif melakukan pekerjaan produktif baik bekerja sendiri maupun bekerja bersama anggota rumahtangga lainnya. Karena itu, dalam kenyataannya jumlah anggota rumahtangga yang tergantung penuh pada anggota rumahtangga lainnya masih lebih kecil dari angka di atas.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, ternyata sebagian besar penduduk Kecamatan Jereweh mempunyai pendidikan yang masih relatif rendah. Pada tahun 1999 tercatat jumlah penduduk yang sampai tamat dan tidak tamat Sekolah Dasar menempati urutan pertama dan kedua, yaitu 59% dan 16%; kemudian yang belum dan tidak sekolah 10%. Urutan berikutnya adalah penduduk yang tamat SLTP 9% dan Tamat SLTA 6%. Penduduk yang sampai jenjang pendidikan sarjana muda dan sarjana masing-masing hanya 0.02% dari 11740 orang penduduk Kecamatan Jereweh (*lihat Tabel 3*). Berdasarkan data tersebut berarti sumberdaya manusia penduduk Kecamatan Jereweh selain kurang dari segi kuantitas (kepadatannya rendah); juga rendah dari segi kualitas.

Tabel. 3 Jumlah Penduduk di Kecamatan Jereweh Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Tahun 1999.

No	Nama Desa	Luas Desa (km ²)	Penduduk (Jiwal)		Kepadatan (Jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan	
1	Goa	55.05	1.425	1.448	52
2	Beru	211.84	1.146	1.127	10
3	Belo	307.78	1.247	1.219	8
4	Sekonekang Atas	121.95	918	847	14
5	Sekonekang Bawah	142.68	332	269	4
6	SP I Tonggo	15.00	602	364	64
7	SP II Tonggo	25.50	417	377	30
	Kecamatan Jereweh	879.80	6.087	5.653	13

Sumber. Kecamatan Jereweh Dalam Angka Tahun 1999.

Kondisi perumahan penduduk ditinjau dari dinding, atap dan lantainya masih relatif sederhana. Proporsi rumahtangga yang mempunyai rumah dengan dinding bedek dan/atau papan paling banyak, yaitu 51% (1742 KK), kemudian dari tembok 29% (970 KK), dan setengah tembok 20% (683 KK). Rumahtangga yang punya rumah dengan dinding tembok sebagian besar terdapat di Desa Goa. Rumah yang berdinding bedek atau papan pada umumnya merupakan rumah panggung.

Atap rumah sebagian besar dari genteng (2630 KK), kemudian dari asbes/seng (170 KK) dan sisanya (170 KK) terbuat dari alang-alang dan lainnya. Lantai rumah sebagian besar dari semen/plester (11523 KK), kemudian papan (1377 KK) dan sisanya (496 KK) dari tanah atau lainnya.

Air minum penduduk sebagian besar bersumber dari air ledeng dan sumur pompa (1951 KK), kemudian dari sumur/perigi (1034 KK) dan ada juga yang bersumber dari sungai (147 KK), terutama penduduk yang tinggal di SP1 dan SP2.

3. Kondisi Sarana Pendidikan

Jumlah bangunan sekolah di Kecamatan Jereweh masih sangat terbatas dan hanya sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Bangunan sekolah yang ada tidak tersebar merata di semua desa. Bangunan sekolah (TK sampai SD) tidak tersebar merata pada semua desa, terbanyak terdapat di Desa Goa (6 unit), kemudian Beru (5 unit), Sekongkang Atas (4 unit), SPI Tongo (2 unit), SP-2 Tongo (1 unit) dan Sekongkang Bawah (1 unit). Khusus bangunan SLTP hanya terdapat di Desa Beru dan SPI Tongo, yaitu masing-masing berjumlah dua unit dan 3 unit.

Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka terpaksa harus ke luar wilayah Kecamatan Jereweh; dan yang paling dekat adalah Kecamatan Taliwang. Penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan SLTP berjumlah 101 jiwa, berasal dari Desa Goa, Beru dan Sekongkang Atas. Penduduk yang sedang melanjutkan pendidikan pada jenjang SLTA jumlahnya cukup banyak, yaitu pada SLTA kejuruan sebanyak 1886 orang dan SLTA umum 526 orang. Sementara yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi jumlahnya tidak tercatat.

4. Kondisi Kesehatan

Fasilitas kesehatan berupa bangunan di Kecamatan Jereweh jumlahnya juga sangat terbatas yaitu hanya 16 unit; terdiri dari 1 unit Puskesmas

Induk, 6 unit Puskesmas Pembantu, 2 unit tempat praktek dokter dan 7 unit PPKBD. Puskesmas Induk hanya terdapat di Desa Beru, sedangkan Puskesmas Pembantu terdapat di semua desa kecuali Desa Sekongkang Bawah karena dekat dengan Desa Sekongkang Atas. Tempat praktek dokter hanya terdapat di Desa Goa dan Beru, sedangkan PPKBD terdapat di semua desa, yaitu masing-masing satu unit.

Tenaga kesehatan juga jumlahnya terbatas dan tidak semua desa ada. Tenaga Dokter hanya terdapat di Desa Goa dan Beru masing-masing satu orang.. Tenaga Perawat berjumlah 11 orang, tersebar di semua desa, kecuali Desa Sekongkang Atas. Bidan desa tersebar disetiap Puskesmas Pembantu masing-masing satu orang, kecuali Desa Goa dan Beru memiliki tenaga bidan masing-masing 2 orang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan tersebut, biasanya dibantu oleh Dukun Bersalin yang sudah dilatih, yaitu sebanyak 49 orang. Tersebar di semua desa, yaitu di Desa Goa 13 orang, Belo dan Sekongkang Atas masing-masing berjumlah 10 orang; Belo 9 orang; Sekongkang Bawah 3 orang, Sp-1 Tongo 2 orang dan SP-2 Tongo 1 orang.

Penyakit yang diderita penduduk Kecamatan Jereweh diidentifikasi sebanyak 10 jenis dan merata di semua desa. Jenis-jenis penyakit tersebut adalah: ISPA, Malaria, Penyakit Lainnya, Rheumatik, Inpeksi Kulit, Diare, Penyakit Mata, Alergi, Accident dan

Disentri. Jenis penyakit yang paling banyak diderita penduduk adalah ISPA dan malaria.

5. Kondisi Pertanian

Kegiatan di sektor pertanian yang dilakukan penduduk Kecamatan Jereweh adalah pertanian tanaman pangan (padi dan palawija), sayuran/hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan laut (nelayan). Diantara ragam kegiatan pertanian tersebut, yang dominan adalah pertanian pangan, hortikultura dan peternakan.

Areal tanaman padi pada tahun 1999 tercatat seluas 1370 hektar, tanaman palawija 272 hektar. Jenis tanaman palawija yang diusahakan adalah : kedelai dan kacang hijau. Untuk tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran adalah bawang merah 2 ha, sawi 8 ha, tomat 6 ha, lombok 13 ha, terung 3 ha, mentimun 4 ha dan paling luas adalah kacang panjang 23 ha.

Tanaman buah-buahan yang paling menonjol yaitu pisang dengan luas tanam 64 ha, mangga 25 ha dan nangka seluas 12 ha. Tanaman perkebunan yang paling menonjol adalah kelapa seluas 200 ha, kemudian kopi dan kapuk masing-masing luas panen 2,5 ha. Kebun bambu seluas 4 hektar dengan produksi 6268 batang pertahun. Bambu hutan mencapai luas 1450 hektar dengan produksi sampai 726000 batang setiap tahun.

Pengusahaan ternak besar menyebar di seluruh desa dengan sistem pemeliharaan umbar tanpa dikandangan. Jenis ternak yang diusahakan adalah sapi 1976 ekor, kerbau 1824 ekor, kuda 679 ekor, kambing 3589 ekor dan domba berjumlah 672 ekor. Selain ternak besar, juga diusahakan ternak unggas, yaitu ayam buras 8462 ekor, ayam ras 250 ekor, itik 684 ekor dan bebek 47 ekor.

6. Kondisi Sarana Perhubungan dan Komunikasi

Salah satu jenis prasarana yang paling vital dalam menunjang perekonomian suatu wilayah yaitu sarana perhubungan berupa jalan. Panjang jalan di Kecamatan Jereweh yaitu 83 km, dengan perincian 43 km berupa jalan kabupaten, 34 jalan desa dan 6 km merupakan jalan negara. Sarana jalan dilengkapi pula oleh jembatan dengan rangka besi, beton dan kayu. Rangka jembatan yang paling dominan adalah beton dan kayu.

Sarana transportasi darat di Kecamatan Jereweh pada tahun 1999 berjumlah 555 unit, sedangkan pada tahun 1998 hanya 434 unit. Berarti selama satu tahun tersebut, jumlah kendaraan meningkat sebesar 29% (121 unit). Kendaraan yang meningkat tersebut adalah kendaraan roda dua, berupa sepeda motor. Kendaraan jenis lain juga meningkat sebanyak 70 unit dari 404 unit pada tahun 1998 menjadi 474 unit pada tahun 1999. Sarana transportasi laut pada tahun 1999 berjumlah 24 unit, terdiri dari 7 unit perahu motor dan 17 unit berupa perahu dayung.

Prasarana dan sarana komunikasi di Kecamatan Jereweh cukup tersedia dengan jenis yang cukup beragam yaitu Kantor Pos, radio, televisi dan telepon. Kantor Pos berjumlah satu unit, terdapat di kota kecamatan Jereweh. Radio dan Televisi berjumlah 1089 unit dan parabola berjumlah 337 unit. Sarana komunikasi tersebut tersebar di seluruh desa Kecamatan Jereweh. Sarana komunikasi berupa telpon pada tahun 1999 berjumlah 50 sambungan; dan pada waktu itu hanya terdapat di Desa Goa sebanyak 18 sambungan dan Desa Beru sebanyak 18 unit. Dengan semakin berkembangnya kawasan Kecamatan Jereweh sebagai dampak dari adanya kegiatan penambangan, maka dapat dipastikan sarana komunikasi khususnya telpon akan berkembang pesat jumlah sambungannya.

7. Sumber Keuangan

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tingkat dua, maka sumber dan jumlah dana pembangunan di tingkat kecamatan dan desa akan ikut terpengaruh. Pada tahun 1999 penerimaan dana di Kecamatan Jereweh terbesar berasal dari subsidi, yaitu sebesar Rp. 50.000.000. Dana dari APBD II hanya Rp. 5.500.000,- sementara dari APBD I dan APBN tidak ada.

Tabel. 4 Penerimaan Dana Bantuan Desa Menurut Jenisnya di Kecamatan Jereweh Tahun 1999.

No	Desa	Inpres/Subsidi	APBD II	Swadaya
1	Goa	10.000.000	4.500.000	75.000.000
2	Beru	10.000.000	500.000	80.000.000
3	Belo	10.000.000	200.000	90.000.000
4	Sekongkang Atas	10.000.000	200.000	65.000.000
5	Sekongkang Bwh	10.000.000	100.000	50.000.000
6	SPI Tongo	0	0	0
7	SPII Tongo	0	0	0
	Total	50.000.000	550.000	292.500.000

Sumber. Kecamatan Jereweh Dalam Angka Tahun 1999.

Sumber pendanaan lain adalah dari pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan oleh masyarakat, yaitu sebesar Rp. 79.340.715,-. Sumber pendanaan terbesar untuk menunjang pembangunan berasal dari swadaya masyarakat, yaitu sebesar Rp.292.500.000,-Dana-dana tersebut didistribusi pada masing-masing desa, kecuali Sp-1 dan SP-2 karena masih menjadi tanggungan Departemen Transmigrasi (*lihat Tabel 4*).

BAB III

TRANFORMASI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA MASA AWAL PRODUKSI TAMBANG BATU HIJAU

Kajian transformasi ekonomi dan sosial budaya di daerah lingkaran tambang Batu Hijau Sunbawa Barat dipilahkan menjadi 4 bagian, yaitu (1) Perubahan kondisi umum wilayah penambangan, (2) Perubahan aspek ekonomi, (3) Perubahan aspek sosial budaya, dan (4) Perubahan aspek kesehatan masyarakat. Variabel-variabel yang ditelaah dibatasi dan disesuaikan dengan variabel yang terdapat dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang harus dilakukan oleh PT. NNT selaku perusahaan pelaksana kegiatan penambangan. Berikut disajikan secara rinci setiap variabel dari aspek-aspek tersebut :

A. Perkembangan Daerah Lingkar Tambang Awal Masa Produksi

Hal-hal yang ditelaah meliputi perkembangan administrasi pemerintahan, tataguna dan nilai lahan, kondisi irigasi, perkembangan prasarana dan sarana transportasi, dan perkembangan penduduk. Berikut diuraikan satu persatu perkembangan yang terjadi dengan membandingkan kondisi sebelum tambang (1996) dan setelah ada tambang (2001) dengan mengacu pada data statistik Kecamatan Dalam Angka dan Sumbawa Dalam Angka.

1. Administrasi Pemerintahan

Kawasan penambangan Batu Hijau terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa bagian barat. Wilayah administratif Kecamatan Jereweh ini berbatasan dengan Kecamatan Taliwang di bagian utara, Samudra Hindia di selatan, Kecamatan Lunnyuk di timur dan Selat Alas di bagian barat (lihat *Gambar 1*). Pusat kota kecamatan Jereweh berjarak sekitar 224 km dari ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram) atau sekitar 129 km dari ibu kota Kabupaten Sumbawa (Sumbawa Besar).

Wilayah Kecamatan Jereweh mempunyai tofografi yang bervariasi dari yang datar, berombak, berbukit sampai bergunung. Bentuk tofografi yang dominan adalah berbukit sampai bergelombang, yaitu sekitar 60 %; kemudian datar sampai berombak 34%; dan berombak sampai berbukit sekitar 6 %. Pusat

desa dan pemukiman penduduk mengambil tempat di daerah-daerah yang mempunyai tofografi datar dan di lembah atau di lereng perbukitan.

Kecamatan Jereweh pada mulanya terdiri dari lima desa, yaitu Desa Goa, Beru, Belo, Sekongkang Atas dan Sekongkang Bawah. Sekitar tahun 1994 dan 1995, Kecamatan Jereweh dijadikan salah satu wilayah penempatan transmigran yang berasal dari Lombok dan Bali, yaitu di SP-I Tongo dan SP-II Tongo. Pada awalnya wilayah penempatan transmigrasi ini di bawah pengawanan dan tanggung jawab Departemen Transmigrasi, kemudian pada tahun 1999/2000 diserahkan pada Pemerintah Daerah.

Dengan berkembangnya daerah ini sebagai kawasan penambangan yang diikuti oleh adanya kebijakan pemerintah untuk memekarkan daerah administratif, maka sejak tahun 2000 wilayah SP-I Tongo diresmikan jadi Desa Aik Kangkung dan wilayah SP-II Tongo diresmikan jadi Desa Tatar.

Bersamaan dengan itu, wilayah Kecamatan Jereweh dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang. Kecamatan Jereweh terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Goa, Beru dan Desa Belo. Sedangkan Kecamatan Sekongkang terdiri dari empat desa, yaitu Desa Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Aik Kangkung, dan Desa Tatar.

Dalam perkembangan yang terakhir, Dusun Tongo/Sejorong yang termasuk dalam wilayah Desa

Sekongkang Atas dipersiapkan untuk jadi Desa Tongo; Dusun Maluk yang termasuk Desa Goa dipersiapkan jadi Desa Maluk; dan Dusun Benete yang termasuk wilayah Desa Belo dipersiapkan jadi Desa Benete. Ketiga desa tersebut, meskipun masih berstatus Desa Persiapan namun sudah memiliki Kepala Desa, kecuali Desa Maluk yang masih di bawah Camat Jereweh; sehingga secara operasional ketiga desa persiapan tersebut sudah menjalankan fungsinya sebagai desa. Karena itu, kawasan penambangan yang semula hanya masuk daerah administratif Kecamatan Jereweh, sejak tahun 2000 sudah resmi masuk dalam dua daerah administratif Kecamatan, yaitu Kecamatan Jereweh dengan 5 desa; dan Kecamatan Sekongkang dengan 5 desa pula.

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat, maka kepala desa dibantu oleh sejumlah perangkat desa yang terdiri dari pamong desa, kepala dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT)). Selain itu, kepala desa juga dibantu oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) yang mengganti fungsi dari LKMD dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Desa.

2. Tata Guna dan Nilai Lahan

Kawasan penambangan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang sebagian besar didominasi oleh hutan negara dan lahan kering berupa ladang dan tegalan, kemudian lahan sawah, tempat pemukiman penduduk

dan penggunaan lainnya. Selama periode 1996-2001, telah terjadi perubahan penggunaan lahan. Lahan pertanian yang banyak mengalami perubahan adalah lahan kering. Di wilayah Kecamatan Jereweh lahan kering yang beralih fungsi seluas 315 ha dan dalam wilayah kecamatan Sekongkang seluas 75 ha atau secara totalitas lahan kering yang beralih fungsi sekitar 390 ha. Sementara untuk lahan sawah beralih fungsi sekitar 41 ha; di Kecamatan Jereweh seluas 26 ha dan di Kecamatan Sekongkang seluas 15 ha. Sedangkan untuk pekarangan/pemukiman dan pembangunan fisik mengalami peningkatan yang juga sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian seluas 323 ha; dan untuk penggunaan lain meningkat seluas 200 ha. Hutan negara yang mendominasi wilayah penambangan hanya berkurang 92 ha (lihat *Tabel 5*).

Berdasarkan data tersebut berarti selama proses penambangan telah terjadi berbagai alih fungsi lahan, dari lahan pertanian ke lahan non pertanian. Proporsi lahan pertanian yang paling banyak beralih fungsi adalah lahan kering, yaitu sebanyak 12,62%, kemudian lahan sawah 4,13% dan lahan hutan sebanyak 0,001%. Alih fungsi lahan pertanian tersebut terutama dimanfaatkan untuk pekarangan, pemukiman dan pembangunan fisik, sehingga luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut meningkat 105,21% dan untuk penggunaan lain meningkat 2,68% dari luas semula.

Tabel 5. Perubahan Tata Guna Lahan Sebelum dan Setelah Tambang, 1996 -2001 (dalam hektar)

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)		Perubahan	
		1996	2001	Ha	%
1	Lahan Sawah	993	952	-41	-4,13
2	Lahan Kering	3.091	2.701	-390	-12,62
3	Pemukiman/Bangunan	307	630	323	105.21
4	Hutan Negara	76.121	76.029	-92	-0.001
5	Lainnya	7.468	7.668	200	2,68
	Total	87.980	87.980	0	0.00

Sumber: Rekapitulasi Data Kecamatan Dalam Angka, 1996, 2001 Lampiran 2.

Bersamaan dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tersebut, maka pihak PT.NNT selaku perusahaan tambang melakukan berbagai aktivitas melalui Departemen Pengembangan Masyarakat (*Community Development = Comdev*) dan melalui Yayasan Olat Parigi (YOP) mengembangkan lahan pertanian dari lahan yang kurang atau tidak produktif menjadi lahan produktif. Luas lahan pertanian yang dikembangkan oleh PT.NNT melalui Comdev sampai tahun 2002 tercatat seluas 650,57 hektar dan melalui YOP seluas 327 hektar.

Data tentang luas pemilikan/penguasaan lahan pertanian oleh masyarakat sulit ditemukan, namun bila luas lahan pertanian yang ada dihadapkan dengan jumlah rumahtangga yang bekerja pada sektor pertanian, maka dapat diperkirakan rata-rata luas lahan pertanian yang dimiliki oleh setiap keluarga. Pada tahun 1996, tercatat sebanyak 1.546 keluarga

yang bekerja sebagai petani dan lahan pertanian yang ada adalah seluas 4229 ha (993 ha sawah dan 3093 ha lahan kering). Berarti pada tahun 1996 rata-rata setiap keluarga memiliki atau menguasai lahan pertanian seluas 2,64 ha. Pada tahun 2001, lahan pertanian tercatat seluas 3.654 ha (952 ha lahan sawah dan 2.701 ha lahan kering) dan jumlah keluarga yang bekerja pada sektor pertanian diasumsikan tetap. Berarti setelah tambang rata-rata pemilikan atau perusahaan lahan pertanian setiap keluarga menurun dari 2,64 ha menjadi 2,36 hektar. Penurunan luas pemilikan/penguasaan lahan pertanian tersebut tentu bukan hanya disebabkan oleh adanya kegiatan tambang, tapi juga oleh perkembangan jumlah penduduk secara alamiah.

Di pihak lain, kehadiran proyek penambangan di wilayah Kecamatan Jereweh dan Sekongkang telah menyebabkan semakin meningkatnya nilai atau harga lahan. Berdasarkan hasil wasancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dan responden yang melakukan transaksi jual beli lahan menuturkan bahwa sebelum tambang (sebelum tahun 1996), harga lahan di kawasan tersebut relatif rendah. Lahan pertanian dengan mudah diperoleh melalui tukar menukar dengan ternak atau barang-barang kebutuhan rumahtangga. Bahkan dalam sistem pertanian ladang dikenal konsepsi "*tumpang aeng-aeng tu tumpang nan batu beng*", yaitu seseorang yang kebetulan menemukannya, ia memilikinya. Konsepsi ini selain menggambarkan tentang mudahnya

penduduk memperoleh tanah, juga menggambarkan status formal pemilikan dan/atau penguasaan lahan tidak terlalu dipentingkan.

Setelah diketahui adanya kegiatan tambang, nilai lahan langsung meningkat. Orang-orang dari luar kawasan mulai berdatangan mencari lahan di tempat-tempat yang dinilai strategis. Kegiatan pemburuan lahan yang strategis ini dimulai tahun 1994 dan mencapai puncaknya pada tahun 1997-1999, yaitu pada saat persiapan dan konstruksi pertambangan dilaksanakan. Pada saat itu, variasi harga lahan tidak lagi didasarkan pada jenis dan kemiringan, tapi lebih didasarkan pada lokasi lahan dengan jalan raya dan dengan pusat aktivitas pertambangan, yaitu Maluk, Benete, Sekongkang dan Tongo/Sejorong.

Setelah masa persiapan dan konstruksi berakhir atau setelah memasuki masa produksi (2001-2002), transaksi jual beli dan harga lahan cenderung semakin menurun bersamaan dengan semakin berkurangnya perusahaan konstruksi dan tenaga kerja di kawasan tersebut. Pada saat ini, variasi harga lahan, selain ditentukan oleh lokasi juga kembali ditentukan oleh jenisnya.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan harga lahan pada masa sebelum tambang (1995-1996), pada masa persiapan dan konstruksi (1997-1999) dan pada masa produksi (2001-2002) berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan responden yang

melakukan transaksi jual beli lahan pada kurun waktu tersebut, dapat dilihat pada *Tabel 6*.

Tabel 6. Perubahan Nilai Lahan Pada Masa Sebelum dan Setelah Tambang, 1996-2002 (dalam Rp.000/are)

Jenis Lahan	Sebelum Tambang (1995-1996)		Masa Konstruksi (1997-1999)		Masa Produksi (2001-2002)	
	Basis	Luar B.	Basis	Luar B.	Basis	Luar B.
Lahan Sawah	100	100	3.500	800	2.500	750
Lahan Kering	60	60	3.500	1.000	2.000	750
Pekarangan	100	100	5.000	1.500	3.000	1.500
Lahan Miring	50	50	3.000	500	2.500	250
Modus	60	60	3.500	1.500	2.000	750

Sumber : Informasi Tokoh Masyarakat dan Rumahtangga (2002)

Tabel 6 memperlihatkan bahwa harga lahan sebelum tambang (1995-1996) di daerah basis maupun yang jauh dari daerah basis penambangan adalah sama, yaitu paling umum (modusnya) sekitar Rp. 60.000 per are. Kemudian setelah masuk masa persiapan dan konstruksi penambangan harga lahan meningkat tajam, yaitu di daerah basis (Benete, Maluku) harga lahan paling umum adalah sebesar Rp. 3.500.000 per are dan di luar basis adalah Rp. 1.500.000 per are. Setelah memasuki masa produksi (2001-2002) harga lahan mengalami penurunan, yaitu di daerah basis sebesar Rp 2.000.000 dan di luar basis Rp. 750.000 per are.

Perkembangan harga lahan tersebut adalah berdasarkan harga yang umum berlaku, tidak termasuk harga lahan untuk kasus jual beli khusus.

Studi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Unram (1997) dalam laporannya menyebutkan bahwa harga pembebasan lahan pada masa persiapan tersebut sebesar Rp. 7.000.000 per hektar (Rp. 70.000 per are). Setelah masuk masa produksi (tahun 2001) diperoleh informasi dari masyarakat Sekongkang, bahwa harga pembebasan lahan pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 100.000.000 per hektar atau Rp. 1.000.000 per are. Berarti terjadi peningkatan harga pembebasan lahan sebesar 1429 % selama periode 1997-2001

3. Keadaan Irigasi

Kondisi pengairan dan curah hujan di wilayah penambangan menjadi faktor pembatas dan faktor penentu pola penggunaan lahan dan sistem usahatani yang diterapkan masyarakat. Meskipun wilayah ini sebagian besar merupakan lahan hutan yang secara teoritis dapat mempengaruhi iklim, namun dalam kenyataannya iklim di daerah ini termasuk beriklim tropis dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan. Menurut *katagori Schmidt dan Ferguson*, kawasan ini termasuk bertipe iklim D dengan curah hujan rata-rata 153 mm dengan hari hujan sebanyak 125 hari selama setahun. Bulan basah (>100 mm) biasanya berlangsung selama 2 bulan (sekitar Desember-Januari); bulan lembab (60-100 mm) berlangsung selama 4 bulan (Pebruari-Mei) dan bulan kering berlangsung selama 6 bulan (Juni-Nopember).

Tofografi wilayah yang berbukit dan bergelombang juga menjadi kendala pembangunan saluran irigasi, sehingga sebagian besar dari lahan pertanian yang ada merupakan lahan kering; dan lahan sawah yang ada juga sebagian merupakan lahan tadah hujan. Sebagai gambaran, sebelum tambang dilaksanakan (1996), lahan sawah yang beririgasi teknis tidak ditemukan, beririgasi setengah teknis seluas 477 hektar; beririgasi sederhana (non PU) seluas 103 ha dan tadah hujan seluas 413 ha. Dari total lahan sawah yang ada, yakni seluas 993 ha proporsi lahan yang beririgasi sebanyak 58,41 %. Bila dibandingkan dengan total lahan pertanian secara keseluruhan termasuk lahan kering, yaitu seluas 4.229 ha, maka proporsi lahan pertanian yang beririgasi hanya 11,09 %. Selain itu, dari luas lahan sawah yang beririgasi tersebut, yang dapat ditanam dua kali setahun hanya seluas 30 ha; selebihnya seluas 447 ha hanya dapat ditanam sekali dalam setahun. Dengan demikian, meskipun sawah mempunyai sistem irigasi, namun karena keterbatasan air menyebabkan sawah yang mempunyai sistem irigasi tersebut tidak jauh berbeda dengan sawah tadah hujan atau lahan kering yang pengusahaannya hanya dapat dilakukan sekali setahun, yaitu pada musim penghujan saja.

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan pertanian di kawasan tambang, maka PT.NNT selain meningkatkan pemanfaatan lahan yang ada juga melakukan perbaikan dan pembangunan

berbagai prasarana dan sarana irigasi, seperti: peningkatan pemanfaatan saluran irigasi dan drainase di Sekongkang Atas yang dilakukan sekitar tahun 1998 pembangunan jaringan irigasi di Desa Tatar (SP-2) tahun 2002 yang dibarengi dengan pencetaan sawah baru seluas 15 ha, peningkatan pemanfaatan Dam Kecil di Desa Goa yang dapat mengairi sawah seluas 80 ha. Selain itu dilakukan pengembangan irigasi sumur bor di beberapa desa yang dapat mengairi lahan pertanian masyarakat. Dengan adanya berbagai aktivitas yang dilakukan oleh PT.NNT ini, berarti meskipun terjadi alih fungsi lahan sawah ke non pertanian selama kegiatan tambang berlangsung, namun pada dasarnya luas lahan sawah atau lahan produktif yang ada tidaklah berkurang bahkan semakin meningkat bila dibandingkan dengan kondisi sebelum tambang.

Kelangkaan air irigasi merupakan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengembangkan usahatani di daerah lingkaran tambang. Oleh karena itu, air irigasi yang ada perlu dikelola dengan baik agar masyarakat dapat menikmatinya secara merata. Lembaga yang diberi tugas untuk membantu pemerintah mengelola pendistribusian air di kalangan petani adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Lembaga P3A ini selain bertugas membantu pendistribusian air, juga berugas membantu pemerintah dalam melakukan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan saluran irigasi di tingkat usahatani.

Lembaga P3A tersebut terdapat di setiap desa dan sudah ada sejak tambang belum beroperasi, namun di kalangan masyarakat, organisasi perkumpulan petani ini tidak begitu populer; yang lebih populer adalah “malar”, yaitu petugas lokal yang ditunjuk oleh masyarakat untuk membantu pendistribusian air. Oleh karena itu pendistribusian air sangat tergantung pada “siapa malarnya” bukan pada organisasinya.

4. Prasarana dan Sarana Transportasi

Salah satu jenis prasarana yang vital dalam menunjang perekonomian suatu wilayah yaitu sarana perhubungan, baik sarana perhubungan darat, laut maupun udara. Di kawasan penambangan, prasarana dan sarana perhubungan yang umum dimanfaatkan oleh masyarakat adalah yang berkaitan dengan perhubungan darat.

Menurut data statistik Kecamatan Dalam Angka, selama periode 1996-2001 jenis dan panjang jalan umum yang ada di kawasan penambangan tidak mengalami perubahan, yaitu jalan negara sepanjang 6 km, jalan kabupaten 43 km dan jalan desa 34 km; sedangkan jalan propinsi tidak ada. Namun bila dibandingkan kondisi sebelum tambang (1996) dengan setelah tambang (2002), terjadi peningkatan yang cukup berarti. Kualitas jalan negara meningkat dari beraspal menjadi berhotmix; jalan kabupaten meningkat dari jalan berbatu menjadi jalan beraspal. Jalan desa dan kampung di beberapa tempat diaspal, diperlebar atau diperkeras.

Prasarana transportasi yang mengalami peningkatan kuantitasnya adalah jembatan. Dalam tenggang waktu 1996-2001, jembatan dengan kerangka beton meningkat dari 16 unit menjadi 17 unit, berkerangka besi jumlahnya tetap sebanyak 10 unit, jembatan kayu meningkat dari 4 unit menjadi 12 unit; dan dalam bentuk deker meningkat dari 122 unit menjadi 152 unit.

Mengenai sarana transportasi darat, khususnya jenis kendaraan bermotor yang dimiliki penduduk, mengalami peningkatan yang cukup berarti, khususnya kendaraan roda dua (sepeda motor); yaitu dari 187 unit tahun sebelum tambang (1996) menjadi 452 unit setelah tambang (2001). Kendaraan roda empat juga mengalami peningkatan, yaitu dari 7 unit menjadi 29 unit. Sementara kendaraan tak bermotor, berupa cikar dan sepeda; selama periode 1996-1999 mengalami perkembangan yang berbeda. Cikar meningkat dari 55 unit menjadi 95 unit; sedangkan sepeda menurun dari 612 unit menjadi 474 unit.

Prasarana dan sarana perhubungan laut dan udara yang dimiliki dan atau dikuasai oleh masyarakat atau pemerintah boleh dikatakan tidak ada. Menurut informasi dari tokoh masyarakat Desa Maluk, Benete dan Kecamatan Sekongkang, sebelum jalan yang menghubungkan desa-desa dan kecamatan tersebut dengan pusat Kecamatan Jereweh, masyarakat di lokasi ini seringkali menggunakan perahu sampan dan perahu motor penangkap ikan

sebagai sarana transportasinya ke Pulau Lombok. Tetapi setelah jalan cukup memadai, masyarakat jarang bahkan tidak pernah menggunakan sarana angkutan tersebut. Dalam tahun-tahun terakhir ini sedang dirintis pelabuhan untuk kapal Ferry di Benete dan di Keruak yang menghubungkan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa bagian barat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dengan demikian berarti sampai penelitian ini dilakukan, prasarana dan sarana perhubungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan penambangan masih terbatas pada perhubungan darat. Kendaraan-kendaraan yang beroperasi di daerah ini berasal dari berbagai daerah; tidak hanya berasal dari Sumbawa, juga dari Lombok, Bali dan Jawa. Kendaraan-kendaraan proyek penambangan juga banyak yang memanfaatkan prasarana umum ini. Oleh karena itu arus lalu lintas setelah penambangan secara drastis meningkat pesat.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dikemukakan bahwa pada hari kerja, arus lalu lintas pagi hari relatif lebih padat dibandingkan siang dan sore hari. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada hari libur (minggu), kecuali di Desa Maluk pada sore hari arus lalu lintas sangat dipadati oleh kendaraan roda dua (sepeda motor).

5. Prasarana dan Sarana Perekonomian.

Sebagaimana diketahui bahwa keadaan prasarana dan sarana perekonomian dalam suatu

wilayah akan menentukan perkembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Di kawasan penambangan, sebelum kegiatan tambang dimulai (1996), jenis dan jumlah prasarana dan sarana ekonomi sangat terbatas. Pasar umum hanya 1 buah yang terdapat di pusat kota kecamatan Jereweh (Desa Beru); dan toko hanya 4 buah. Kios, warung dan kedai-kedai kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, tersebar di beberapa tempat terutama di pusat-pusat desa, yaitu di Desa Beru 26 buah, Goa 22 buah, Belo 16 buah, Sekongkang Atas 9 buah dan di Sekongkang Bawah 4 buah (Kecamatan Jereweh Dalam Angka, 1996).

Dibandingkan dengan kondisi setelah tambang (2002), jenis dan jumlah prasarana dan sarana ekonomi tersebut meningkat sangat tajam. Pasar umum meningkat menjadi 3 buah, yaitu di Desa Beru, Maluk dan Sekongkang Atas. Prasarana dan sarana perekonomian lain juga meningkat sangat cepat. Toko/kios meningkat menjadi 237 unit dan warung//kedai meningkat menjadi 67 unit. Selain itu muncul prasarana ekonomi lain, seperti restoran, pedagang kaki lima, salon kecantikan, wartel, bengkel, losmen/hotel, serta lembaga perbankan yang dapat melayani masyarakat bila membutuhkan atau menyimpan uangnya pada lembaga keuangan tersebut.

Peningkatan prasarana dan sarana ekonomi ini menunjukkan bahwa kawasan penambangan telah

berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Daerah yang paling berkembang adalah Maluku. Di daerah ini, selain jumlah dan jenis sarana ekonominya banyak, aktivitas ekonominya juga berjalan sepanjang hari, bahkan sampai malam hari. Sementara di tempat lain, seperti pasar Jereweh di Desa Beru dan Pasar Sekongkang di Sekongkang Atas aktivitasnya relatif sepi, hanya berlangsung pagi hari, yaitu sampai sekitar jam 10.00 pagi. Fungsi pasar ini selanjutnya diganti oleh beberapa pedagang kaki lima, kios dan warung-warung kecil yang ada di dalam kampung atau di pinggir-pinggir jalan.

6. Penduduk

Kawasan penambangan pada mulanya mempunyai penduduk yang sangat jarang. Sebelum tambang pada tahun 1996 mempunyai kepadatan rata-rata 12 jiwa/km². Dengan adanya kegiatan tambang, kepadatan penduduknya meningkat pesat, yaitu dalam jangka lima tahun (2000) berikutnya kepadatannya meningkat hampir dua kali lipat, yaitu rata-rata 21 jiwa/km². Kepadatan ini belum termasuk karyawan PT.NNT atau tenaga kerja atau keluarga lain yang tidak mendaftarkan diri atau “disensus” sebagai penduduk kawasan pada tahun 2000.

Desa yang paling padat dan paling cepat peningkatannya adalah Desa Goa, yaitu dari 49 jiwa/km pada tahun 1996 meningkat menjadi 141 jiwa/km² pada tahun 2000. Sedangkan desa yang paling jarang penduduknya adalah desa Sekongkang

Bawah, yaitu pada tahun 1996 mempunyai kepadatan 3 jiwa/km² dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 6 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk antar sensus, menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Pada Sensus periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk kawasan penambangan adalah sebesar 2,28% pertahun; kemudian pada periode 1990-2000 meningkat menjadi 9,49% pertahun. Dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa, pada periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduknya adalah sebesar 2,06%, kemudian pada periode 1990-2000 justru menurun menjadi 1,74% pertahun. Data ini menunjukkan banyaknya arus penduduk yang datang dan menetap di kawasan penambangan selama periode 1990-2000.

Bila penduduk kawasan dipilahkan berdasarkan usia belum produktif (0-14 th), usia produktif (15-64 th) dan usia tidak produktif (>64 th), maka penduduk yang berusia produktif proporsinya semakin besar setelah ada pertambangan. Sebelum tambang pada tahun 1996, proporsi penduduk berusia produktif adalah sebesar 62,02% dan setelah tambang pada tahun 2001, proporsinya meningkat menjadi 70,46%. Sebaliknya penduduk yang berusia belum dan tidak produktif lagi, proporsinya semakin menurun, yaitu masing-masing dari 33,92% dan 4,06% menjadi 27,20% dan 2,34%. Dengan semakin rendahnya proporsi penduduk berusia muda dan tua tersebut

menyebabkan angka ketergantungan (*dependency ratio*) setelah tambang menjadi semakin rendah, yaitu dari 61,23% menjadi 41,93%. Peningkatan penduduk usia kerja atau penurunan angka ketergantungan di atas mengindikasikan bahwa selama kegiatan tambang berlangsung terjadi penambahan angkatan kerja yang datang dari luar kawasan.

Menurut jenis kelaminnya, penduduk pria cenderung lebih banyak daripada penduduk wanita; dan rasionya semakin meningkat setelah ada tambang. Sebelum tambang pada tahun 1996, sex ratio penduduk kawasan penambangan adalah sebesar rata-rata 103 meningkat menjadi 126 setelah tambang pada tahun 2000. Di Kecamatan Jereweh, sebelum tambang pernah wanita lebih banyak daripada pria, yaitu di Desa Goa dengan ratio 95, tapi setelah tambang tahun 2000 justru terjadi sebaliknya, angka sex rasionya paling tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya, yaitu 141. Hal ini berarti di Desa Goa terjadi peningkatan penduduk pria yang sangat pesat. Peningkatan angka sex ratio tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa penduduk yang datang ke kawasan tambang selama kegiatan tambang berlangsung sebagian besar adalah tenaga kerja pria.

Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar masih rendah; dan cenderung semakin membaik setelah masa pertambangan berlangsung. Sebelum tambang, proporsi penduduk yang menamatkan SLTA adalah sebanyak 4,55% dan menamatkan Perguruan

Tinggi hanya 0,25%. Setelah memasuki masa pertambangan (1999), proporsi penduduk yang menamatkan SLTA meningkat menjadi 7,70% dan menamatkan Perguruan Tinggi meningkat menjadi 0,45%. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya penduduk tersebut, PT. NNT selaku pelaksana proyek penambangan melakukan berbagai program, seperti pemberian beasiswa, pelatihan-pelatihan, kursus-kursus pemagangan; program pemberantasan buta huruf dan aksara; serta program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk lokal.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan penambangan, pekerjaan penduduk juga banyak mengalami perubahan, dari sektor pertanian ke sektor-sektor di luar pertanian. Sebelum tambang tahun 1996, proporsi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian masih sebanyak 72,73%, kemudian setelah tambang (2001) menurun menjadi 33,47%. Bersamaan dengan itu, penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan mengalami peningkatan dari 6,33% menjadi 7,70%. Pada sektor jasa meningkat dari 5,34% menjadi 21,1%; pada sektor industri meningkat dari 5,59% menjadi 16,82% dan pada sektor lain termasuk sektor pertambangan meningkat dari 10,01% menjadi 16,82%.

B. Transformasi Ekonomi pada Awal Masa Produksi

Keberadaan perusahaan penambangan sampai tahun 2002 telah menunjukkan pengaruh yang cukup

besar terhadap dinamika perekonomian masyarakat di kawasan penambangan. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh kegiatan penambangan terhadap perubahan ekonomi masyarakat, dilakukan pengukuran terhadap beberapa indikator, yaitu: ketenagakerjaan, perkembangan usaha-usaha ekonomi masyarakat, perubahan penghasilan dan pengeluaran masyarakat, perkembangan dasar perekonomian lokal, perkembangan perbankan dan jasa kredit, perkembangan pariwisata dan rekreasi; dan perkembangan pembayaran PT.NNT kepada pemerintah.

1. Ketenagakerjaan.

Mengingat konsep yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam rumah-tangga sangat bervariasi, maka perlu diberikan batasan terhadap konsep: rumahtangga, tenaga kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat pencari kerja atau tingkat pengangguran.

Rumahtangga mempunyai pengertian ekonomi, yaitu kumpulan orang-orang yang mempunyai satu fungsi produksi dan satu fungsi konsumsi (Simanjuntak, 1995). Dengan kata lain rumahtangga adalah kumpulan orang-orang yang mempengaruhi atau mempunyai kontribusi terhadap pendapatan dan/atau pengeluaran rumahtangga. Dengan demikian berarti anggota rumahtangga adalah semua orang yang ada dalam rumahtangga tersebut. Tenaga kerja diberikan batasan sesuai dengan batasan

Sensus tahun 2000, yaitu penduduk (baca: anggota rumahtangga) yang berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau bagian tenaga kerja yang masuk pasar kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja atau menganggur.

Dalam Sensus tahun 2000, pencari kerja atau penganggur diberikan batasan sebagai angkatan kerja yang bekerja kurang 1 jam dalam seminggu sebelum pencacahan dilakukan. Dalam studi ini pencari kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang rata-rata bekerja kurang 1 jam dalam seminggu atau kurang 48 jam dalam setahun pada pekerjaan produktif atau pekerjaan yang menghasilkan uang. Bila bekerja satu jam atau lebih dalam seminggu atau 48 jam atau lebih dalam setahun, maka termasuk angkatan kerja yang bekerja.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut, selanjutnya anggota rumahtangga dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja, angkatan kerja dan juga pencari kerja atau penganggur.

a. Komposisi Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Kajajian ini memaparkan secara rinci komposisi anggota rumahtangga di setiap desa berdasarkan jenis kelamin dan statusnya dalam rumahtangga. Dari 350 rumahtangga yang diteliti ditemukan bahwa sebelum tambang (1996) keseluruhan rumahtangga tersebut memiliki anggota sebanyak 1.497 orang, dengan komposisi pria 51,3% (767 orang) dan wanita 48,7%

(728 orang). Setelah tambang (2002) jumlah anggota rumahtangganya semakin meningkat menjadi 1.651 orang dengan komposisi 49,9% (824 orang) pria dan 50,1% (827 orang) wanita. Berarti selama periode 1995-2002, terjadi peningkatan jumlah anggota rumahtangga sebesar 10,43% atau meningkat rata-rata sebesar 1,78% pertahun. Pada tahun 1995, setiap rumahtangga memiliki anggota rata-rata sebanyak 4,27 orang; dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 4,72 orang.

Peningkatan jumlah anggota rumahtangga tersebut diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja serta angkatan kerja yang bekerja dalam rumahtangga tersebut. Bersamaan dengan itu, juga terjadi peningkatan jumlah pencari kerja yang lebih cepat, sehingga menyebabkan angka pencari kerja atau pengangguran setelah tambang lebih tinggi dibandingkan sebelum tambang (lihat *Tabel 7*).

Menurut jenis kelaminnya, penduduk pria cenderung lebih banyak daripada penduduk wanita; dan rasionya semakin meningkat setelah ada tambang. Sebelum tambang pada tahun 1996, sex ratio penduduk kawasan penambangan adalah sebesar rata-rata 103 meningkat menjadi 126 setelah tambang pada tahun 2000. Di Kecamatan Jereweh, sebelum tambang pernah wanita lebih banyak daripada pria, yaitu di Desa Goa dengan ratio 95, tapi setelah tambang tahun 2000 justru terjadi sebaliknya, angka sex rasionya paling tinggi dibandingkan dengan

desa-desa lainnya, yaitu 141. Hal ini berarti di Desa Goa terjadi peningkatan penduduk pria yang sangat pesat. Peningkatan angka sex ratio tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa penduduk yang datang ke kawasan tambang selama kegiatan tambang berlangsung sebagian besar adalah tenaga kerja pria.

Sebelum tambang, tingkat pencari kerja atau pengangguran rata-rata sebesar 8,22%. Tingkat pencari kerja untuk wanita adalah sebesar 8,55% lebih tinggi dibandingkan pria 7,91%. Setelah tambang, tingkat pencari kerja meningkat menjadi 10,55%. Pada angkatan kerja wanita sebesar 11,90% dan pria sebesar 9,54%. Bila dibandingkan dengan kondisi umum kawasan penambangan pada tahun 2000, maka angka tingkat pencari kerja pada tahun 2002 masih lebih rendah, karena tingkat pencari kerja atau pengangguran pada tahun 2000 adalah sebesar 16,18%. Sebagai pembanding di Kabupaten Sumbawa, pada tahun yang sama tingkat penganggurannya adalah sebesar 6,50% (Sumbawa Dalam Angka, 2001).

Masih relatif tingginya tingkat pengangguran setelah tambang tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kondisi yang terjadi pada masa konstruksi dan pada awal masa produksi penambangan yang masih berlangsung sampai saat ini (2002). Sebagaimana hasil studi PPLH Unram (2001) bahwa pada masa konstruksi yang berlangsung pada tahun 1997-1999, peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi

masyarakat lokal sangat banyak. Hampir semua angkatan kerja yang ada pada waktu itu terserap pada berbagai pekerjaan yang sedang berkembang, sehingga pada masa itu sulit ditemukan angkatan kerja yang berstatus penganggur terbuka. Penghasilan masyarakat meningkat tajam, selain berasal dari hasil kerja juga banyak yang berasal dari penyewaan kamar, rumah atau tanah yang cukup laris dan sangat mahal pada saat itu.

Setelah masa konstruksi berakhir, kesempatan kerja yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi berkurang tajam. PT.NNT yang diharapkan dapat menampung tenaga kerja mereka mempunyai daya tampung yang terbatas, dan mempunyai persyaratan tertentu yang tidak atau jarang dimiliki oleh tenaga kerja lokal.

Tabel 7. Komposisi Anggota Rumahtangga, Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Pekerja dan Pencari Kerja Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 -2002.

No	Komposisi Anggota Rumahtangga	Sebelum Tambang	Setelah Tambang	Perubahan	
				Org	%
1.	Jumlah Anggota RT	1.495	1651	156	10,43
	<i>Pria</i>	767	824	61	8,00
	<i>Wanita</i>	728	827	99	13,60
2.	Jumlah Tenaga Kerja	1.142	1247	105	9,19
	<i>Pria</i>	597	642	45	7,54
	<i>Wanita</i>	545	605	60	11,01
3.	Jumlah Angkatan Kerja	961	1.022	61	6,35
	<i>Pria</i>	493	526	33	6,69

	<i>Wanita</i>	468	496	28	5,98
4.	Jumlah AK Bekerja	882	913	31	3,51
	<i>Pria</i>	454	476	22	4,85
	<i>Wanita</i>	428	437	9	2,10
5.	Jumlah Pencari Kerja	79	109	30	37,97
	<i>Pria</i>	39	50	11	28,21
	<i>Wanita</i>	40	59	19	47,50
6.	Tingkat Pencari Kerja (%)*	8,22	10,67	-	2,45
	<i>Pria</i>	7,91	9,51	-	1,6
	<i>Wanita</i>	8,55	11,90	-	3,35

Keterangan : * = persentase pencari kerja terhadap angkatan kerja
 Sumber : Rekapitulasi Data Rumahtangga.

Di lain pihak tenaga kerja yang sudah berhenti dari perusahaan kontruksi banyak yang tidak siap kembali bekerja pada pekerjaan semula sebagai petani, peternak atau sejenisnya, karena sudah terbiasa menerima penghasilan yang tinggi dan cepat pada masa kontruksi. Setiap pekerjaan yang akan dilakukan selalu berstandar pada penghasilan yang diperoleh pada masa itu. Kecenderungan seperti ini terutama terjadi pada angkatan kerja muda. Akibatnya pada awal masa produksi (2000), tingkat pengangguran di wilayah penambangan sangat tinggi (16,18%). Hal ini kemudian berangsur-angsur semakin baik dengan kembalinya angkatan kerja tua yang diikuti oleh angkatan kerja muda pada pekerjaan awal sebagai petani, peternak atau membuka usaha baru yang berkembang di wilayah penambangan. Hal

ini terlihat dari angka tingkat pengangguran pada pada tahun 2002 sudah sebesar 10,55%.

Tingkat pencari kerja atau pengangguran tersebut diperkirakan akan semakin menurun bilamana perusahaan penambangan mengeluarkan kebijakan membiarkan karyawannya tinggal berdomisili atau “makan” di lingkungan masyarakat sebagaimana pada masa konstruksi. Karena hal tersebut akan menggairahkan kembali perekonomian lokal sebagaimana yang terjadi pada masa konstruksi masih berlangsung.

b. Mobilitas Tenaga Kerja

Mobiltas diartikan sebagai kegiatan melakukan suatu aktivitas di luar daerah kecamatan tempat tinggalnya tanpa bermaksud untuk “menetap” di daerah tersebut.. Dengan adanya kegiatan tambang, telah menyebabkan semakin meningkatnya mobilitas penduduk, baik dengan motif atau alasan ekonomi maupun dengan alasan non ekonomi. Penduduk yang melakukan mobilitas non ekonomi pada umumnya beralasan untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti keluarga atau alasan pribadi, suka bepergian.

Mobilitas ekonomi yang paling pesat peningkatannya setelah tambang adalah yang terjadi di dalam kawasan, yaitu antara Kecamatan Jereweh dengan Kecamatan Sekongkang. Sebelum tambang (1995), tingkat mobilitas tenaga kerja di dalam kawasan adalah sebesar 17,57% meningkat menjadi 35,60% setelah tambang. Frekuensi mobilitasnya juga

semakin meningkat, dari rata-rata sebanyak 3,6 kali sebelum tambang menjadi 6,1 kali setiap bulan setelah tambang. Perkembangan tingkat dan frekuensi mobilitas tenaga kerja ini sangat dimungkinkan karena aksesibilitas antara desa-desa di dalam kawasan sudah semakin baik dan semakin lancar. Sebaliknya mobilitas ke luar kawasan menurun secara drastis. Sebelum tambang (1996), tingkat mobilitas tenaga kerja ke luar kawasan adalah sebesar 14,06%, menurun menjadi 2,63% setelah tambang. Frekuensi dalam melakukan mobilitas semakin meningkat dari rata-rata 2,68 kali menjadi 5,25 kali setiap bulan (*lihat Tabel 8*). Penurunan tingkat mobilitas ke luar kawasan ini menandakan semakin banyaknya peluang kerja dan kesempatan berusaha didalam kawasan, sehingga tenaga kerja lokal tidak perlu mencari pekerjaan ke luar kawasan sebagaimana sebelum tambang. Tenaga kerja lokal yang masih melakukan mobilitas ke luar kawasan pada umumnya adalah yang mempunyai pekerjaan tetap di luar kawasan, yaitu seperti Pegawai Negeri, Guru dan pekerja tetap lainnya.

Tabel 8. Perkembangan Tingkat dan Frekuensi Mobilitas Tenaga Kerja Rumahtangga Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 -2002.

Daerah Tujuan	1996			2002		
	Jumlah		Frekuensi	Jumlah		Frekuensi
	Jiwa	%*	(kali/org)	Jiwa	%*	(kali/org)
Dalam Kawasan	155	17,57	3.60	325	35,60	6,08
Luar Kawasan	124	14,06	2,68	24	2,63	5,25
Luar Negeri	13	1.47	1,23	14	1,53	1,62

Catatan: * = Persentase dari jumlah Angkatan kerja pada tahun bersangkutan

Sumber : Rekapitulasi Data Rumahtangga.

Sementara penduduk yang melakukan mobilitas ke luar negeri cenderung semakin meningkat. Sebelum tambang, tingkat mobilitas ke luar negeri adalah sebanyak 1,47% dan setelah tambang meningkat menjadi 1,53% dari jumlah angkatan kerja. Frekuensi mobilitas ke luar negeri bervariasi dari 1 kali sampai maksimum 3 kali setiap tenaga kerja; atau rata-rata 1,23 kali sebelum tambang menjadi 1,62 kali setelah tambang. Menurut data Statistik Sumbawa Dalam Angka (1996, 2001), jumlah penduduk kawasan yang bekerja di luar negeri sebelum tambang (1996) adalah sebanyak 184 orang (176 orang wanita dan 8 orang pria); dan setelah tambang (2001) meningkat menjadi 350 orang (semuanya angkatan kerja wanita).

Mobilitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduk kawasan ada yang bersifat sirkuler (ulang alik), semi permanen dan ada yang permanen. Tenaga kerja yang melakukan mobilitas di dalam

kawasan semuanya bersifat sirkuler (ulang-alik), karena arus lalu lintas di dalam kawasan sudah cukup lancar, sehingga tidak ada yang sampai menginap di tempat kerja. Sedangkan yang melakukan mobilitas di luar kawasan ada yang bersifat ulang alik dan ada yang semi permanen, tergantung jauh dekatnya tempat kerja. Bagi tenaga kerja yang bekerja di daerah yang berdekatan dengan kawasan, seperti wilayah Kecamatan Taliwang dan Seteluk, mobilitas masih dilakukan secara sirkuler; sedangkan yang bekerja di daerah yang jauh, seperti Sumbawa Besar dan Mataram, sifat mobilitasnya semi permanen, karena mereka harus menginap atau tinggal di tempat kerja beberapa hari (satu minggu sampai satu bulan), baru kembali ke daerah asalnya. Sementara angkatan kerja yang melakukan mobilitas ke luar negeri (Arab Saudi dan Malaysia), semuanya melakukan mobilitas secara permanen; karena mereka tinggal di luar negeri lebih dari setengah tahun; yaitu minimal satu tahun baru kembali ke daerah asal.

Dengan memperhatikan, tingkat, frekuensi dan sifat mobilitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduk kawasan di atas, maka jelas bahwa setelah ada tambang mobilitas penduduk kawasan semakin meningkat, meskipun sebagian besar masih dalam kawasan. Berarti keberadaan perusahaan penambangan di kawasan tersebut menyebabkan penduduk semakin dinamis dalam mencari penghasilan.

c. Peluang Kerja dan Kesempatan Berusaha

Pada umumnya masyarakat mempunyai pekerjaan yang beraneka ragam untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumahtangganya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan ada yang menyerap tenaga kerja banyak dan memberikan penghasilan besar; dan ada pula pekerjaan yang menyerap tenaga kerja banyak, tapi memberikan penghasilan sedikit; atau sebaliknya. Karena itu, dalam suatu rumahtangga ada pekerjaan yang dianggap pekerjaan pokok, dan ada yang dianggap pekerjaan sampingan.

Untuk melihat peluang kerja dan kesempatan berusaha masyarakat di kawasan penambangan akan menggunakan dua konsep tersebut, yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Pekerjaan pokok diberikan batasan sebagai pekerjaan yang menyerap waktu kerja paling banyak dan/atau memberikan penghasilan paling besar. Pekerjaan-pekerjaan lain di luar batasan tersebut dimasukkan sebagai pekerjaan sampingan.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dari hasil analisis terhadap data primer dan data sekunder menunjukkan bahwa peluang kerja dan kesempatan berusaha pada pekerjaan pokok pada awalnya (sebelum tambang) sangat didominasi oleh kegiatan dalam bidang pertanian, dalam arti melakukan kegiatan usahatani pada lahan kering dan lahan sawah. Setelah tambang, terjadi pergeseran, dimana

pekerjaan pokok pada bidang pertanian semakin berkurang. Ada sebagian rumahtangga yang langsung pindah ke luar sektor pertanian dan sebagian besar diantaranya masim mempertahankannya sebagai pekerjaan sampingan. enis pekerjaan yang semakin meningkat perannya sebagai pekerjaan pokok adalah usaha dagang dan jasa; karyawan swasta; dan usaha di bidang industri dan kerajinan rumahtangga (lihat *Tabel 9*).

Pada *Tabel 9* ditunjukkan bahwa jenis pekerjaan pokok kepala rumahtangga pada awalnya (sebelum tambang) masih dominan pada kegiatan usahatani dan usaha ternak (57,1%). Setelah tambang, jenis pekerjaan ini semakin ditinggalkan. Kepala rumahtangga yang masih menekuni pekerjaan ini sebagai pekerjaan pokok masih tinggal 32,0%. Pekerjaan-pekerjaan yang cenderung mengganti peran bidang pertanian adalah usaha di bidang perdagangan, bidang jasa, dan karyawan swasta. Sedangkan usaha yang berkaitan dengan pencarian dan pemanfaatan hasil hutan semakin ditinggalkan, sama seperti bidang pertanian; yaitu sebelum tambang kepala rumahtangga yang menekuni pekerjaan ini sebagai pekerjaan pokok adalah sebanyak 4,6 %, kemudian setelah tambang tinggal 2,3%. Bidang pekerjaan yang cenderung bertahan sebagai pekerjaan pokok adalah bidang usaha perikanan (nelayan) dan pegawai pemerintah, baik yang berstatus pegawai negeri, maupun yang berstatus pegawai honorer.

Tabel 9. Perubahan Pekerjaan Pokok Anggota Rumahtangga Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 –2002.

No.	Jenis Pekerjaan	Sebelum Tambang		Setelah Tambang	
		Jiwa	%*	Jiwa	%*
A.	Kepala RT				
1	Petani/Peternak	200	57,1	110	32,0
2	Nelayan	24	6,9	27	7,7
3	Pedagang	24	6,9	56	16,0
4	Perajin	5	1,4	17	4,9
5	Penjaja Jasa	13	3,7	37	10,6
6	Pegawai Pemerintah	51	14,6	47	13,4
7	Pegawai Swata	17	4,9	48	13,7
8	Pencari Hsl Hutan dll	16	4,6	8	2,3
	Total	350	100	350	100
B.	Ibu RT.				
1	Petani/Peternak	176	64,4	117	42,1
2	Nelayan	22	8,0	22	7,9
3	Pedagang	34	12,4	69	24,8
4	Perajin	5	1,8	21	7,6
5	Penjaja Jasa	11	4,0	26	9,4
6	Pegawai Pemerintah	8	2,9	5	1,8
7	Pegawai Swata	0	0,0	3	1,1
8	Pencari Hsl Hutan dll	19	6,9	15	5,4
	Total	275	100,0	278	100,0
C.	Anggota Lain				
1	Petani/Peternak	186	72,4	64	22,5
2	Nelayan	13	5,1	13	4,6
3	Pedagang	14	5,4	44	15,4
4	Perajin	3	1,2	12	4,2
5	Penjaja Jasa	9	3,5	58	20,4
6	Pegawai Pemerintah	1	0,4	27	9,5
7	Pegawai Swata	4	1,6	60	21,1
8	Pencari Hsl Hutan dll	27	10,5	7	2,5
	Total	257	100,0	285	100,0

Sumber : Rekapitulasi Data Rumahtangga.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada ibu dan anggota rumahtangga yang lain. Proporsi ibu rumahtangga yang melakukan kegiatan usahatani sebagai pekerjaan pokok sebelum tambang adalah sebanyak 64,4%, kemudian menurun menjadi 42,1% setelah tambang. Jenis pekerjaan yang paling menonjol menggantikan peran usaha tani/ternak pada ibu rumahtangga adalah usaha perdagangan, yaitu dari 12,4% sebelum tambang menjadi 24,8% setelah tambang. Kemudian usaha di bidang jasa, industri/kerajinan rumahtangga, dan sebagai karyawan swasta (*lihat Tabel 9*). Pergeseran yang sama juga terjadi pada anggota rumahtangga lain, yang terdiri dari para kaum muda. Kegiatan pada usaha pertanian semakin ditinggalkan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan pada usaha dagang, kerajinan, usaha jasa dan yang paling menonjol adalah sebagai karyawan swasta, terutama sebagai karyawan PT.NNT. Proporsi angkatan kerja muda yang menjadi karyawan swasta meningkat dari 1,6% sebelum tambang menjadi 21,1% setelah tambang (*lihat Tabel 9*).

Sementara bila dilihat dari pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh anggota rumahtangga menunjukkan kecenderungan yang berbeda dengan pekerjaan pokok. Peranan kegiatan usahatani dan usaha ternak sebagai pekerjaan sampingan semakin meningkat setelah tambang. Kalau sebelum tambang, proporsi kepala rumahtangga yang menjadikan usahatani dan usaha ternak sebagai pekerjaan sampingan adalah sebanyak 41,7%, kemudian setelah

tambang meningkat menjadi 56,0%. Bersamaan dengan itu, peranan usaha dagang, jasa dan kerajinan sebagai usaha sampingan juga semakin meningkat. Pekerjaan-pekerjaan yang semakin menurun peranannya sebagai pekerjaan sampingan kepala rumahtangga adalah usaha dalam bidang perikanan dan usaha dalam bidang pemanfaatan hasil hutan (*lihat Tabel 10*).

Kondisi yang sama juga terjadi pada ibu rumahtangga. Peranan usaha tani dan ternak sebagai usaha sampingan setelah tambang juga semakin meningkat, yaitu dari 30,6% sebelum tambang menjadi 46,0% setelah tambang. Pekerjaan lain yang semakin meningkat perannya sebagai pekerjaan sampingan bagi ibu rumahtangga adalah usaha bidang perdagangan, jasa dan kerajinan. Dalam bidang perikanan dan pemanfaatan hasil hutan peranannya juga semakin menurun (*lihat Tabel 10*).

Bagi anggota rumahtangga lain yang umumnya terdiri dari angkatan kerja muda, keterlibatan mereka dalam melakukan pekerjaan sampingan relatif kecil dibandingkan kepala dan ibu rumahtangga. Tapi ada kecenderungan proporsinya semakin meningkat setelah tambang, yaitu dari 44,0% menjadi 79,3%. Jenis pekerjaan sampingan yang meningkat perannya sebagai pekerjaan sampingan bagi angkatan kerja muda, tidak berbeda jauh dengan kepala dan ibu rumahtangga, yaitu pada kegiatan usaha tani dan ternak dari 21,0% menjadi 33,7%, kemudian usaha

jasa dari 2,7% menjadi 22,1%, usaha dagang dari 1,9% menjadi 13,0%. dan sedikit usaha industri/kerajinan rumahtangga dari 0,8% menjadi 2,5%. Usaha yang semakin ditinggalkan sebagai pekerjaan sampingan adalah usaha dalam bidang perikanan dari 5,4% menjadi 1,1% dan usaha pemanfaatan hasil hutan dari 12,1% menjadi 1,8% (*Lihat Tabel 10*).

Berdasarkan perkembangan jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh anggota rumahtangga di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peluang kerja dan kesempatan berusaha yang berkembang baik sebagai pekerjaan pokok maupun sebagai pekerjaan sampingan setelah tambang adalah usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan industri kecil atau kerajinan rumahtangga. Usaha dalam bidang pertanian dan ternak, meskipun cenderung ditinggalkan sebagai pekerjaan pokok, namun tetap dipertahankan sebagai pekerjaan sampingan. Usaha sebagai karyawan swasta, setelah tambang tidak ada yang menempatkannya sebagai pekerjaan sampingan. Ini menandakan bahwa pekerjaan sebagai karyawan swasta dipandang atau menempati posisi paling tinggi sebagai sumber pencaharian anggota rumahtangga. Sebaliknya pekerjaan sebagai nelayan dan pemanfaatan hasil hutan, cenderung semakin menurun perannya sebagai pekerjaan sampingan; termasuk juga sebagai pekerjaan pokok pada kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan.

Menurut seorang ahli ekonomi klasik, Schultz (1969) bahwa anggota rumahtangga dalam melakukan suatu kegiatan didasarkan atas pertimbangan rasional sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang mereka miliki pada saat itu, meskipun rumahtangga tersebut berasal dari masyarakat terbelakang sekalipun.

Tabel 10. Perubahan Pekerjaan Sampingan Anggota Rumahtangga Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 –2002.

No	Jenis Pekerjaan	Sebelum Tambang		Setelah Tambang	
		Jiwa	%*	Jiwa	%*
A.	Kepala RT	n=350		n=350	
1	Petani/Peternak	146	41,7	196	56,0
2	Nelayan	30	8,6	15	4,3
3	Pedagang	15	4,3	23	6,6
4	Perajin	9	2,6	12	3,4
5	Penjaja Jasa	13	3,7	24	6,9
6	Pegawai Pemerintah	21	6,0	15	4,3
7	Pegawai Swata	4	1,1	0	0
8	Pencari Hsl Hutan dll	60	17,1	25	7,1
	Total	298	85,1	310	88,6
B.	Ibu RT.	n=275		n=278	
1	Petani/Peternak	85	30,6	128	46,0
2	Nelayan	26	9,4	12	4,3
3	Pedagang	18	6,5	37	13,3
4	Perajin	7	2,5	12	4,3
5	Penjaja Jasa	7	2,5	20	7,2
6	Pegawai Pemerintah	0	0	0	0
7	Pegawai Swata	0	0	0	0
8	Pencari Hsl Hutan dll	24	8,6	22	7,9
	Total	167	60,1	231	83,1
C.	Anggota Lain	n=257		n=285	
1	Petani/Peternak	54	21,0	96	33,7
2	Nelayan	14	5,4	3	1,1
3	Pedagang	5	1,9	37	13,0
4	Perajin	2	0,8	7	2,5
5	Penjaja Jasa	7	2,7	63	22,1
6	Pegawai Pemerintah	0	0	15	6,3
7	Pegawai Swata	0	0	0	0
8	Pencari Hsl Hutan dll	31	12,1	5	1,8
	Total	113	44,0	226	79,3

Keterangan : * Persentase dari jumlah angkatan kerja yang bekerja (n)

Sumber : Rekapitulasi Data Rumahtangga.

Berangkat dari pendapat tersebut, berarti pilihan setiap anggota rumahtangga dalam melakukan pekerjaan yang ada baik sebelum maupun setelah tambang, tentu di dasarkan atas pertimbangan rasional sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada pada pada waktu tersebut. Hal ini juga

terlihat dari penilaian anggota rumahtangga terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dinilai potensial untuk mendukung kehidupan anggota rumahtangganya. Sebelum tambang, jenis pekerjaan yang dinilai potensial untuk dikembangkan masih terbatas pada usaha-usaha dalam bidang pertanian dan peternakan, karena pada saat itu peluang dan kesempatan yang bisa dilihat masih terbatas pada kegiatan tersebut. Tetapi setelah peluang kerja dan kesempatan berusaha semakin meningkat, penialainnya terhadap usaha potensial semakin berkembang; bahkan cenderung berubah pada kegiatan-kegiatan di luar pertanian.

Sementara bila dilihat dari aspek minat atau keinginan anggota rumahtangga terhadap peluang kerja dan kesempatan berusaha setelah tambang, maka yang paling menonjol adalah menjadi karyawan perusahaan penambangan (PT.NNT) atau paling tidak menjadi pedagang atau penjaja jasa. Minat yang besar untuk menjadi karyawan penambangan ini terkesan kurang rasional, karena sebagian dari mereka sudah menyadari bahwa peluang kerja pada perusahaan tersebut terbatas dan membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang mereka tidak miliki. Minat yang besar ini, tidak hanya dimiliki oleh kalangan muda tapi juga kalangan tua atau kepala rumahtangga. Anggota rumahtangga, yang kurang meminati pekerjaan ini hanya ditemukan pada ibu rumahtangga atau kaum perempuan lokal. Mereka lebih memilih pekerjaan yang dapat dilakukan di

dalam rumahtangganya, seperti usaha bidang perdagangan (kios/toko/warung) dan bidang usaha jasa (seperti bidang konveksi). Informasi ini terungkap tidak hanya berasal dari kepala keluarga sebagai responden, tapi juga dari kalangan ibu rumahtangga, kaum muda dan tokoh-tokoh masyarakat yang dijadikan informan kunci.

Minat masyarakat yang besar untuk menjadi karyawan PT.NNT ini, salah satu penyebabnya adalah karena ada perbedaan “kenampakan” dan “penilaian” yang cukup signifikan dikalangan masyarakat. Kenampakan yang paling menonjol adalah pada “gaya hidup”, terutama pada kepemilikan barang-barang berharga dalam rumahtangga. Adanya anggota rumahtangga yang bekerja pada perusahaan penambangan juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga yang bersangkutan. Karena itu, bila dihadapkan pada pilihan lain sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang sedang berkembang, justru beberapa diantara mereka lebih memilih menjadi pekerja luar negeri (TKI) atau paling tidak menjadi pedagang atau penaja jasa.

2. Usaha Ekonomi Masyarakat

Kehadiran perusahaan penambangan telah banyak mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan aktivitas ekonomi yang dilakukan sebelum dan setelah

tambang, di bawah ini akan diuraikan satu persatu berdasarkan jenis dan aktivitas yang dilakukan:

a. Usaha Pertanian

Menurut informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat Desa Benete dan Sekongkang Bawah, bahwa kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian sebelum tahun 1992 masih bertumpu pada pertanian lahan kering (tegal dan ladang) dan sedikit pertanian sawah tadah hujan. Kegiatan usahatani pada masa itu hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada musim penghujan yang berlangsung sekitar 3-4 bulan. Setelah itu lahan dibiarkan “bero” atau dijadikan sebagai ladang pengembalaan ternak.. Selama tenggang waktu antara musim tanam satu dengan musim tanam berikutnya, biasanya masyarakat mencari penghidupan dari hasil-hasil hutan dan hasil perikanan dengan cara “madak”. Sawah dengan sistem irigasi yang memungkinkan masyarakat dapat menanam padi dua kali, baru dikenal sekitar tahun 1992.

Dalam Rona Awal (1996) juga disebutkan bahwa sistem penanaman padi dan palawija di sawah baru dikenal oleh penduduk setempat dalam tahun 1990-an, yaitu setelah datang transmigran dari Lombok, Bali dan Jawa. Sebelumnya penduduk lokal menanam padi dengan sistem rotasi yang berlangsung selama tujuh daur, baru lahan tersebut dipersiapkan kembali sebagai lahan pertanian. Selama tenggang waktu itu lahan ditinggalkan dan diganti dengan lahan baru.

Pemilikan atau penguasaan lahan dalam sistem rotasi, ditentukan oleh kemampuan sebuah keluarga untuk membersihkannya. Disinilah konsepsi “*tumpun aeng-aeng tu tampan nan batu beng*” diterapkan, yaitu “seseorang yang kebetulan menemukannya ia memilikinya”

Pertanian dengan sistem rotasi kemudian ditinggalkan oleh masyarakat setelah ada pelarangan dari pemerintah, karena dianggap cara bertani seperti itu sama dengan pertanian berpindah dan digolongkan sebagai pembukaan hutan secara tidak sah. Pertanian dengan sistem rotasi lebih disukai dibandingkan pertanian sawah yang menetap, karena dinilai hasilnya lebih bagus dan tidak memerlukan sarana produksi, seperti obat-obatan (pestisida).

Masuknya aktivitas penambangan di kawasan tersebut telah banyak merubah aktivitas masyarakat dalam bidang pertanian. Lahan pertanian yang semula gampang diperoleh dengan sistem rotasi dan pembukaan lahan baru semakin sulit diperoleh, karena masyarakat sudah mulai menentukan hak-hak atas lahan yang dikuasai sebagai hak milik berdasarkan pengakuan setempat. Dengan demikian, adanya kegiatan penambangan telah menempatkan lahan pertanian sebagai modal utama dalam kegiatan pertanian.

Sejak mulai kegiatan penambangan sampai masuk masa produksi, berbagai alih pemilikan dan fungsi lahan telah terjadi dalam masyarakat. Selain

lahan yang ada dijual untuk menunjang kegiatan penambangan, juga dialihkan untuk kepentingan-kepentingan di luar pertanian. Selama periode 1996-2002, total luas lahan pertanian yang dimiliki oleh rumahtangga sampel berkurang seluas 19,62 ha atau sekitar 4,28% dari total luas lahan pertanian yang dimiliki oleh seluruh rumahtangga. Jenis lahan yang beralih fungsi keluar sektor pertanian ini pada umumnya adalah lahan kering yang kurang produktif seperti ladang dan tegalan. Sedangkan lahan kering yang lain, seperti lahan pekarangan dan lahan kebun cenderung semakin meningkat luasnya, karena ada sebagian lahan tegalan dan perladangan yang dikembangkan menjadi lahan pekarangan dan perkebunan. Sementara lahan sawah, luasnya relatif tetap hanya berkurang seluas 81 are atau sekitar 0,01 % dari total luas lahan sawah yang ada (lihat Tabel 11).

Tabel 11. Perubahan Luas Pemilikan/Penguasaan Lahan Pertanian Oleh Rumahtangga selama Periode 1995-2002.

No.	Jenis Lahan Pertanian	Luas Lahan (Ha)		Perubahan	
		1995	2002	Ha	%
1.	Lahan sawah	134,48	133.67	-0,81	0,01
2.	Pekarangan	28,28	29.47	1,19	4,20
3.	Kebun	64,56	66.59	2,03	3,14
4.	Tegalan	79,87	70.13	-9,74	-12,19
5.	Ladang	151,25	138.96	-12,29	-8,13
	Total	458,44	438.82	-19.62	-4,28

Sumber : Rekapitulasi Data Rumahtangga.

Di pihak lain, alat-alat pertanian seperti mesin air, hand traktor dan hand sprayer yang dapat menunjang kegiatan usahatani semakin meningkat

jumlahnya. Sebelum tambang, jumlah mesin air yang dimiliki oleh rumahtangga secara individu adalah sebanyak 7 unit, *hand-tractor* 2 unit dan *hand-sprayer* 32 unit. Setelah tambang (2002), jumlah mesin air yang dimiliki meningkat menjadi 16 unit, *hand-tractor* 4 unit dan *hand-sprayer* meningkat menjadi 40 unit. Peningkatan ini belum termasuk peralatan pertanian yang diberikan secara berkelompok oleh PT.NNT melalui proyek pembinaan petani sayur dan buah, proyek mekanisasi dan proyek P4T yang jumlahnya cukup banyak. Bantuan peralatan dan pembinaan kepada petani tersebut tentu dimaksudkan agar masyarakat dapat meningkatkan intensitas dan produktivitas usahatannya agar penghasilannya semakin meningkat.

Dengan semakin berkembangnya kawasan penambangan yang diikuti oleh semakin meningkatnya pemilikan dan penguasaan alat-alat mekanisasi pertanian tersebut telah mendorong masyarakat untuk mengembangkan jenis dan pola usahatannya. Sebelum tambang, jenis tanaman yang umum diusahakan oleh masyarakat di kawasan penambangan masih terbatas pada tanaman padi, kacang hijau, kedele, jagung dan kacang tanah. Tanaman lain seperti ubi kayu, ubi jalar dan beberapa jenis tanaman sayur dan bumbu-bumbuan masih dipandang sebagai tanaman selingan, sehingga tidak diusahakan secara intensif. Kegiatan usahatani yang dilakukan berpola tradisional, tanpa banyak melakukan pemeliharaan dan upaya peningkatan

produksi melalui pemupukan, pengendalian hama/penyakit, penyiangan dan upaya-upaya intensifikasi lainnya. Orientasi produksi untuk tanaman padi dan sayur-sayuran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri. Tanaman yang diarahkan untuk dijual ke pasar masih terbatas pada tanaman palawija, seperti kacang hijau, kedele, jagung dan kacang tanah.

Setelah kegiatan tambang dimulai yang diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk dari luar kawasan telah mendorong muncul dan berkembangnya aktivitas perdagangan, termasuk aktivitas perdagangan hasil-hasil pertanian. Usahatani sayur-sayuran yang semula diarahkan untuk tujuan konsumsi sendiri berubah untuk tujuan dijual ke pasar. Pola tanam dan intensitas tanam semakin berkembang, yang semula dilakukan pada musim penghujan dengan jenis tanaman konvensional, seperti padi dan palawija meningkat semakin intensif menjadi sepanjang tahun dengan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jenis tanaman sayur dan buah yang diusahakan sangat beragam, mulai dari bayam, sawi hijau, sawi putih, kubis, cabe kecil, cabe besar, terung, tomat, kacang panjang, buncis, gambas, mentimun semangka berbiji, semangka non biji, melon dan beberapa jenis tanaman sayur lain yang laku dijual di pasar. Sistem usahatani yang dikembangkan sangat padat modal dan padat tenaga kerja, sehingga skala usaha yang mapu dilakukan oleh setiap

rumahtangga masih sangat sempit, yaitu sekitar 20 are. Lokasi pengembangan tanaman sayuran dan buah dengan pola seperti ini dapat diamati di Desa Goa, Belo, Benete dan Sekongkang Bawah.

Perkembangan kegiatan dalam usahatani ini selain didorong oleh adanya perkembangan pasar, juga terjadi karena adanya pembinaan dan bantuan peralatan mekanisasi oleh PT.NNT. Pembinaan usahatani sayur dan buah yang dilakukan sejak akhir tahun 1997 telah mampu merubah perilaku beberapa keluarga petani dan masyarakat sekitar dari pertanian yang bersifat tradisional dan berorientasi konsumsi sendiri (subsisten) ke pertanian modern yang berorientasi pasar. Adanya peralatan mekanisasi, berupa mesin air, sumur bor dan hand-tractor baik yang berasal dari bantuan PT.NNT maupun yang dimiliki secara individu oleh masyarakat, telah mulai menunjukkan kemampuannya memecahkan masalah ketergantungan kegiatan usahatani dari air hujan dan kelangkaan tenaga kerja pada saat pengolahan tanah. Oleh karena itu bila dibandingkan antara sebelum tambang dengan setelah tambang, sebenarnya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, baik dilihat dari jenis tanaman yang diusahakan, intensitas tanam, produktivitas lahan maupun dilihat dari penghasilan masyarakat yang bekerja sebagai petani. Karena itu, meskipun luas lahan yang dimiliki semakin berkurang, namun karena intensitas dan produktivitas tahunan dari lahan yang dikuasai semakin meningkat,

menyebabkan penghasilan rumahtangga yang bekerja sebagai petani juga meningkat.

Bila dilihat secara umum mengenai pemanfaatan lahan secara keseluruhan di kawasan penambangan, tampak dengan jelas dari hasil pengamatan maupun dari hasil analisis luasnya lahan yang belum dimanfaatkan sebagai lahan usahatani atau masih dibiarkan berstatus “lahan tidur”. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah berlangsung sejak sebelum ada kegiatan tambang. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum tambang, intensitas pemanfaatan lahan pada musim penghujan (MT-I) adalah sebesar 64,82 % dan setelah tambang menurun menjadi 59,7%. Data Ini mengindikasikan lahan yang dibiarkan “tidur” sebelum tambang adalah seluas 35,18% dan setelah tambang meningkat menjadi 40,3% dari total luas lahan yang dikuasai pada saat itu.

Pada musim kematau, yaitu pada musim tanam kedua (MT-II) dan pada musim tanam ketiga (MT-III) intensitas pemanfaatan lahan atau intensitas tanam setelah tambang semakin meningkat. Sebelum tambang, intensitas tanam pada MT-II adalah sebesar 25,9%; dan pada MT-III sebesar 1,8%. Setelah tambang, intensitas tanam pada MT-II meningkat menjadi 29,7% dan pada MT-III meningkat menjadi 6,4%. Peningkatan intensitas tanam pada MT-II dan MT-III, menyebabkan intensitas tanam tahunan setelah tambang sedikit lebih tinggi daripada sebelum

tambang; yaitu dari 92,4% menjadi 92,8% pertahun. Peningkatan intensitas tanam pada MT-II dan MT-III tersebut menandakan semakin besarnya peranan peralatan mekanisasi, seperti hand-tractor, mesin air dan sumur pompa dalam kegiatan usahatani masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan responden serta dari hasil analisis data sekunder, dapat dikemukakan beberapa hal yang dinilai sebagai faktor penyebab rendahnya intensitas pemanfaatan lahan atau luasnya lahan tidur di kawasan penambangan, yaitu :

- Rata-rata lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani di kawasan penambangan relatif luas, sementara kegiatan usahatannya berlangsung dalam waktu sangat sempit pada musim penghujan, sehingga lahan yang dimiliki tidak mampu dikelola seluruhnya menjadi lahan usahatani karena keterbatasan waktu, tenaga kerja dan biaya.
- Peralatan mekanisasi seperti hand-tractor yang diharapkan dapat memecahkan masalah ketergantungan usahatani dari kelangkaan tenaga kerja pada saat pengolahan tanah dinilai kurang mencukupi dibandingkan luas lahan yang ada;
- Adanya peluang kerja dan kesempatan berusaha yang lebih menguntungkan di luar kegiatan usahatani, sehingga sebagian anggota masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani

meninggalkan lahan usahatannya yang berakibat terhadap semakin meningkatnya proporsi lahan tidur setelah tambang.

- Beberapa orang petani yang sudah mengembangkan usahatani sayur dan buah semusim, juga sebagian meninggalkan lahan usahatannya yang lain karena terkonsentrasi pada usahatani sayur dan buah yang sangat padat modal dan tenaga kerja.

Selanjutnya dari data tentang intensitas tanam di atas, dapat diketahui perkembangan pola tanam tahunan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum tambang, proporsi luas lahan yang dapat dimanfaatkan sepanjang tahun atau tiga kali musim tanam adalah sebanyak 1,8%; yang dapat dimanfaatkan dua kali musim tanam sebanyak 24,1% dan hanya dimanfaatkan sekali musim tanam adalah sebanyak 38,92%. Setelah tambang, proporsi luas lahan yang dimanfaatkan sepanjang tahun meningkat menjadi 6,4%, dimanfaatkan dua kali musim tanam 23,3%; dan hanya dimanfaatkan sekali musim tanam dalam setahun sebanyak 30%.

Pada musim MT-I (musim penghujan) sebagian besar masyarakat yang menguasai lahan sawah menanam padi sawah dan yang menguasai lahan kering (tegal dan ladang) sebagian menanam padi ladang dan sebagian yang lain menanam palawija. Pada musim tanam kedua (MT-II) rata-rata masyarakat menanam palawija dan sebagian kecil

menanam sayuran. Pada musim tanam ketiga (MT-III) rata-rata masyarakat menanam tanaman sayuran dan sedikit tanaman buah semusim yang umumnya sudah berlangsung sejak MT-I dan MT-II, terutama setelah tambang beroperasi. Secara umum, pola tanam tahunan yang diterapkan oleh masyarakat sebelum tambang bervariasi dari: (a) padi/palawija-bero-bero; (b) padi-palawija-bero; dan sedikit (d) padi/palawija—palawija--sayur atau palawija—sayur--sayur. Setelah tambang, pola tanam yang diterapkan oleh masyarakat semakin beragam, yaitu mulai dari yang paling dominan adalah : (a) padi/palawija—bero--bero; (b) padi-palawija-bero; (c) palawija-palawija-bero; (d) padi/palawija—sayur/buah—sayur/buah; dan ada pula (e) sayur/buah--sayur/buah--sayur/buah sepanjang tahun.

Sebagai konsekuensi dari semakin berkembangnya pola usahatani dan jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat adalah biaya usahatani semakin tinggi. Kalau sebelum tambang biaya usahatani yang paling menonjol adalah biaya tenaga kerja untuk persiapan dan pengolahan tanah. Biaya sarana produksi seperti benih masih disiapkan sendiri. Biaya sarana produksi lain, seperti pupuk dan obat-obatan masih kecil, karena hanya dilakukan pada padi sawah. Biaya pemeliharaan seperti penyiangan boleh dikatakan tidak ada, karena masyarakat jarang melakukan kegiatan tersebut. Pemungutan hasil yang menggunakan tenaga luar diupah dalam bentuk hasil (natura) yang diambilkan

dari hasil panen. Karena itu pada masa sebelum tambang modal usahatani tidak terlalu besar dan masih bersumber dari modal sendiri dan modal bantuan keluarga.

Sedangkan setelah tambang, selain biaya tenaga kerja atau sewa hand-tractor untuk pengolahan tanah, juga biaya sarana produksi mulai dari benih, pupuk dan obat-obatan harus dibeli di pasar. Khusus untuk usahatani sayur dan buah, biaya usahatani bertambah besar lagi dengan adanya pembuatan bedeng, pengajiran, penyiangan yang selain menggunakan tenaga kerja sendiri juga menggunakan tenaga luar yang diupah dengan uang. Oleh karena itu modal usahatani yang harus disiapkan untuk kegiatan ini relatif tinggi daripada tanaman padi dan palawija. Untuk mengatasi biaya usahatani yang semakin besar tersebut, selain menggunakan modal sendiri dan bantuan keluarga, sebagian dari masyarakat juga ada yang memperoleh bantuan modal usahatani dari proyek penambangan, dan ada pula yang sudah mulai menggunakan pinjaman bank. Oleh karena itu, meskipun total luas tanam yang diusahakan sebelum tambang (seluas 323,66ha) lebih tinggi dibandingkan setelah tambang (seluas 251,83 ha), namun karena pola dan jenis tanaman yang diusahakan setelah tambang semakin berkembang dan berorientasi pasar, menyebabkan biaya yang dikeluarkan juga akan bertambah tinggi. Sebagai imbalan dari pengorbanan biaya yang dikeluarkan akan tanpak pada pendapatan yang diperoleh.

Dilihat dari produktivitas tanaman konvensional yang sudah biasa diusahakan sejak sebelum tambang sebenarnya tidak menunjukkan perubahan yang mencolok. Ada tanaman yang semakin meningkat produktivitasnya dan ada pula tanaman yang semakin menurun produktivitasnya. Seperti padi, pada tahun 1995 produktivitasnya adalah sebesar 4,57 ton/ha kemudian pada tahun 2001 menurun menjadi 4,23 ton/ha. Demikian juga tanaman kacang tanah, menurun dari 1,54 ton menjadi 1,06 ton/ha; dan ubi jalar menurun dari 14,02 ton menjadi 14 ton/ha. Jenis tanaman yang meningkat produktivitasnya setelah tambang, adalah tanaman jagung yaitu dari 2,16 ton/ha menjadi 3,60 ton/ha; kedele dari 1,20 ton/ha menjadi 1,60 ton/ha. Kacang hijau meningkat dari 0,40 ton/ha menjadi 0,63 ton/ha. Produktivitas ubi kayu juga meningkat dari 10,07 ton menjadi 10,93 ton/ha.

Selain tanaman semusim, beberapa rumahtangga setelah tambang juga memperoleh penghasilan dari tanaman tahunan, seperti dari tanaman mangga, kelapa, pisang dan ada pula yang sudah memperoleh penghasilan dari tanaman jeruk. Setelah ada kegiatan tambang, masyarakat juga semakin giat mengembangkan tanaman tahunan tersebut. Jenis tanaman tahunan yang sudah mulai diusahakan secara komersial adalah mangga, jambu mete dan tanaman jeruk. Untuk mengembangkan beberapa jenis tanaman tahunan tersebut, PT. NNT melalui Yayasan Olat Parigi telah memberikan

bantuan bibit jambu mete pada masyarakat sebanyak 1200 pohon pada tahun 2000. Pada tahun yang sama juga telah diberikan bibit mangga sebanyak 7.550 pohon dan pada tahun 2001 sebanyak 5.425 pohon. Jenis dan jumlah bantuan PT.NNT kepada masyarakat desa lingkaran tambang melalui Yayasan Olat Parigi (YOP) sejak tahun 1999-2001 disampaikan melalui implementasi program pengembangan masyarakat.

Pengembangan tanaman tahunan ini dinilai cukup tepat mengingat luasnya lahan yang masih berstatus lahan tidur. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembakan lahan kering yang berstatus lahan tidur tersebut adalah :

- Aspek teknis, jenis tanaman dan teknologi usahatani yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi alam dan keterampilan masyarakat setempat yang akan mengembangkan usahatani tersebut.
- Aspek ekonomi: jenis dan komposisi tanaman yang akan dikembangkan harus mempertimbangkan pasarnya ke depan, jangan sampai pada saat panen, justru hasilnya melimpah tapi harganya rendah. Hal ini sering menjadi faktor penyebab kegagalan berbagai proyek pertanian, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- Aspek sosial budaya : jenis tanaman dan pola usahatani yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan masyarakat, supaya masyarakat

termotivasi untuk mengembangkan dan memeliharanya.

- Aspek lingkungan: pola dan sistem usahatani yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip konservasi yang mendukung pertanian berkelanjutan. Hal ini sangat penting, mengingat lahan kering sangat riskan terhadap bahaya erosi.
- Aspek Wilayah : Jenis tanaman yang dikembangkan disesuaikan dengan kebijakan wilayah, yaitu meningkatkan pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan.

b. Usaha Peternakan

Salah satu ciri dari pertanian lahan kering adalah adanya kombinasi pengusahaan tanaman dengan ternak. Bagi masyarakat Sumbawa, termasuk masyarakat di kawasan penambangan; pemilikan ternak merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rumahtangga. Menurut informasi dari tokoh masyarakat di wilayah studi, pemeliharaan khewan ternak di kawasan penambangan merupakan usaha yang sudah sejak lama dilakukan secara turun temurun; bahkan lebih lama dari sistem pertanian yang dikenal sekarang. Khewan ternak diwarisi dari generasi ke generasi, sehingga hampir setiap keluarga memiliki minimal tiga ekor ternak. Jumlah minimal ini pada umumnya tetap dipertahankan, karena dalam setiap 3 ekor ternak diharapkan akan lahir minimal satu ekor anak ternak. Sehingga bila dijual satu ekor

setiap tahun, khewan ternak yang dimiliki tidak akan berkurang. Dari hasil ternak inilah masyarakat memperoleh penghasilan yang bisa diandalkan untuk biaya sekolah dan kebutuhan mendadak lainnya. Setelah tambang, jumlah ternak yang dimiliki masyarakat semakin berkurang, sehingga penghasilan masyarakat dari hasil ternak semakin berkurang diganti oleh sumber penghasilan lain di luar usaha ternak.

Dari hasil penelitian, diketahui bahawa selama periode 1995–2002, jumlah khewan ternak yang dimiliki oleh rumahtangga sampel mengalami penurunan. Dalam tenggang waktu tersebut, ternak kuda yang dimiliki oleh rumahtangga berkurang sebanyak 80,89% (123 ekor), kerbau 62,18% (268 ekor), kambing 271 ekor (51,82%) dan sapi 30,14% (132 ekor) (lihat *Tabel 12*).

Tabel 12. Perubahan Jumlah Pemilikan Khewan Ternak Oleh Rumahtangga Sampel Sebelum dan Setelah Tambang, 1995-2002.

No	Jenis Khewan Ternak	Jumlah Ternak (ekor)*		Perubahan	
		1995	2002	(ekor)	%
1	Kuda	157	34	-123	-80,89
2	Kerbau	431	163	-268	-62,18
3	Sapi	438	306	-132	-30,14
4	Kambing	523	252	-271	-51,82

Keterangan:*Tidak termasuk ternak yang berstatus bantuan/pemberian PT.NNT

Sumber : Rekapitulasi Data Rumahtangga.

Beberapa hal yang dianggap oleh masyarakat sebagai faktor penyebab berkurangnya jumlah khewan

ternak di kawasan penambangan, yaitu : (a) Semakin terbatasnya ruang pengembalaan ternak secara bebas; (b) Maraknya pencurian ternak pada sekitar tahun 1995/1996 yang berimplikasi sampai masa operasi tambang; (c) Adanya upaya pengalihan asset ternak menjadi modal usaha; (d) Berkurangnya tenaga kerja pemelihara ternak sebagai akibat berkembangnya kesempatan berusaha lain yang lebih produktif setelah tambang; dan (e) Dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang dinilai semakin meningkat setelah tambang, seperti untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pesta, pembangunan rumah dan kebutuhan komsuntif lain.

Mengantisipasi penurunan khewan ternak tersebut dan menyadari peran khewan ternak bagi perekonomian masyarakat di kawasan penambangan, maka PT.NNT telah melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Pada awalnya, PT.NNT melakukan pembinaan pada usaha ternak ayam potong, kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan ternak sapi, ternak kambing, ayam pedaging/ayam petelur dan itik yang jumlahnya cukup banyak. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa sampai tahun 2002 PT.NNT melalui Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat (YPESB) dan Comdev telah memberikan bantuan khewan ternak sapi varietas unggul sebanyak 373 ekor yang diberikan kepada masyarakat Desa Aik Kangkung (SP-1) dan Desa Tatar (SP-II). Selain itu, melalui Yayasan Olat Parigi (YOP), PT.NNT selama tahun

1999-2002 juga telah memberikan bantuan ternak kambing sebanyak 1.848 ekor, bibit ayam 6.350 ekor dan itik sebanyak 4.345 ekor. Sistem bantuan yang diberikan adalah bergulir (*revolving*), dimana sebagian dari hasil ternak dikembalikan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat lain yang belum memperoleh bantuan.

Dengan adanya bantuan dari PT.NNT tersebut, maka di kalangan masyarakat sekarang; ternak yang dikuasi tidak hanya bersumber dari miliknya sendiri sebagaimana sebelum tambang, tapi juga bersumber dari perusahaan tambang (PT.NNT). Sebelum tambang, modal usaha ternak yang berasal dari bantuan hanya diperoleh masyarakat yang ada di Desa Aik Kangkung dan Desa Tatar, karena pada saat itu masyarakat di kedua desa ini masih di bawah pengawasan dan pembinaan dari Departemen Transmigrasi.

Sistem pemeliharaan ternak, terutama ternak besar dan ternak kecil belum banyak berubah. Pemeliharaan ternak masih dengan sistem lepas, penggembalaan dan pengandangan dengan kandang pribadi. Para peternak jarang memberikan pakan tambahan pada ternak-ternak mereka. Ternak tetap dibiarkan mencari makanan sendiri, meskipun pada musim kering atau kemarau. Khewan ternak yang sudah dipelihara secara intensif masih terbatas pada ayam ras pedaging dan petelur. Sedangkan ayam buras (ayam kampung) dan itik tetap dibiarkan

berkelieran, dan kadangkala diberikan makan tambahan dari sisa-sisa makanan atau dedak.

Sistem pemeliharaan ternak seperti ini, dari aspek biaya tentu sangat efisien; bahkan boleh dikatakan tanpa biaya, karena tidak memerlukan pakan tambahan yang harus dibeli di pasar atau menggunakan tenaga kerja luar yang harus diupah dengan uang. Pemeliharaan ternak masih menggunakan tenaga kerja keluarga, tenaga anak-anak, dan ibu rumahtangga sambil memanfaatkan waktu luangnya. Karena tidak membutuhkan banyak biaya dan tidak banyak menyita waktu produktif inilah menyebabkan usaha ternak ini paling diminati dibandingkan usaha pertanian lain.

c. Usaha Perikanan

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat, usaha perikanan laut, darat dan air payau dan usaha budidaya perikanan memegang peranan penting sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Di kawasan penambangan usaha perikanan masih terbatas pada penangkapan ikan di laut. Sementara untuk perikanan darat, air payau (tambak) atau usaha budidaya perikanan sangat terbatas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelum kegiatan tambang dimulai usaha perikanan darat hanya dilakukan di perairan umum, yaitu penangkapan ikan di kali untuk tujuan konsumsi sendiri. Pemeliharaan ikan di kolam atau di sawah, dari sejak semula memang tidak ada karena

keterbatasan air. Untuk perikanan air payau (tambak), sebelum tambang hanya ditemukan di desa Goa, dengan luas lahan tambak 0,65 hektar. Setelah tambang, ada upaya dari masyarakat untuk membuka tambak baru, yaitu di desa Goa dan Tongo. Luas areal tambak yang ditemukan pada rumahtangga sampel setelah tambang adalah seluas 1,15 hektar.

Usaha penangkapan ikan di laut sudah dimulai sejak tambang belum beroperasi. Para nelayan umumnya berasal dari Pulau Lombok yang tinggal menetap di sepanjang pantai kawasan penambangan, yaitu di pantai Jelenge (Beru), Benete (Belo), Pantai Maluk, Pasir Putih (Goa), pantai Lawar (Sekongkang Bawah), Pemalang, sejong (Tongo), pantai senutuk, Aik Kangkung (SP-1), dan di sepanjang pantai Desa Tatar (SP-2).

Jenis perahu dan alat tangkap yang dipakai pada awalnya masih sangat sederhana, yaitu perahu sampan tanpa mesin, jaring dan pancing. Penggunaan mesin ketinting (mesin tempel) mulai ada menjelang kegiatan tambang dilakukan. Menjelang ada tambang (1995) jumlah perahu bermesin (perahu tempel) masih sebanyak 5 unit, kemudian setelah tambang meningkat menjadi 20 unit. Sebaliknya perahu sampan jumlahnya semakin berkurang, dari 17 unit menjadi 5 unit. Mesin ketinting yang dipakai sebelum tambang mempunyai kekuatan antara 3,5 sampai 5,5 PK; setelah tambang mesin ketintingnya memiliki kekuatan yang semakin bervariasi, yaitu dari

3,5 PK sampai 10 PK.. Alat tangkap berupa jaring meningkat dari 47 unit menjadi 67 unit. Begitu juga alat tangkap lain, seperti pancing, panah dan poked semakin meningkat dari 68 unit menjadi 90 unit (lihat Tabel 13).

Peningkatan jumlah dan kualitas perahu dan alat tangkap ini tidak terlepas dari adanya bantuan PT.NNT. Bantuan perahu, mesin tempel dan alat tangkap kepada nelayan sudah di mulai sejak tahun 1998. Pada tahun 1999-2001, PT. NNT melalui Yayasan Olat Parigi memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan di kawasan penambangan, yaitu berupa mesin ketinting sebanyak 7 unit, perahu sebanyak 2 unit dan jaring 9 unit. Bantuan ini tidak termasuk yang diberikan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Taliwang dan Seteluk.

Tabel 13. Perubahan Jumlah Pemilikan/Penguasaan Alat Tangkap Perikanan Laut Oleh Rumahtangga Sampel Sebelum dan Setelah Tambang, 1995-2002.

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (Unit)		Perubahan	
		1995	2002	(unit)	%
1	Perahu Bermesin	5	20	15	300,00
2	Sampan	17	5	-12	-70,59
3	Jaring	47	67	20	42,55
4	Alat Tangkap lain*	68	90	-22	32,35

Keterangan : * Pancing, panah dan poked

Sumber : Rekapitulasi Data Rumahtangga.

Berdasarkan hasil sensus perikanan yang dilakukan oleh PPLH Unram (2001) dan (2002), menunjukkan bahwa selama tahun 2001-2002 jumlah nelayan yang tinggal di kawasan tambang menurun

dari 141 menjadi 132 rumahtangga. Hal ini disebabkan karena sebagian nelayan yang tinggal di Kecamatan Sekongkang ada yang pindah ke SP-III di luar kawasan tambang dan pindah pekerjaan. Namun demikian jumlah perahu dan peralatan penangkapan ikan yang dimiliki atau dikuasai oleh keseluruhan nelayan di daerah tersebut mengalami peningkatan yang cukup mencolok, yaitu perahu meningkat dari 42 unit menjadi 57 unit, mesin ketinting meningkat dari 28 unit menjadi 41 unit, dan alat tangkap ikan yang terdiri dari jaring tasik, jaring bendera, rawi, rintak, ulur/ladung, jala nilon, panah meningkat dari 218 unit menjadi 225 unit.

Peningkatan jumlah perahu dan peralatan penangkapan ikan tersebut berdampak positif terhadap produksi ikan di kawasan tambang. Pada tahun 2001 produksi ikan yang dihasilkan oleh nelayan setiap bulan rata-rata sebanyak 5.459 kg, kemudian meningkat menjadi 8.014 kg tahun 2002. Hasil tangkapan setiap nelayan juga semakin meningkat dari 39 kg menjadi 61 kg perbulan. Pendapatan bersih yang diterima juga meningkat dari Rp. 231.896 menjadi Rp. 281.733 (PPLH Unram, 2001 dan 2002).

Hasil survei terhadap 350 rumahtangga lokal yang dijadikan sampel dalam penelitian juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Jumlah rumah-tangga lokal yang memiliki pekerjaan pokok sebagai nelayan sedikit meningkat dari 24

rumahtangga sebelum tambang (1995) menjadi 27 rumahtangga setelah tambang (2002) (lihat *Tabel 9*); tetapi yang menjadikan kegiatan ini sebagai pekerjaan sampingan menurun secara drastis dari 30 rumahtangga menjadi 15 rumahtangga. Keterlibatan anggota rumahtangga seperti wanita dan anak-anak juga semakin menurun (lihat *Tabel 6*). Sehingga secara totalitas jumlah rumahtangga dan individu masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan kenelayan semakin menurun setelah tambang beroperasi.

Bila data hasil survei tersebut dikaitkan dengan hasil sensus di atas, maka jelas bahwa pengurangan jumlah rumahtangga nelayan di kawasan tambang selain disebabkan oleh adanya nelayan yang pindah tempat tinggal di luar kawasan tambang juga karena adanya nelayan yang pindah pekerjaan di luar kegiatan kenelayan, terutama rumahtangga-rumahtangga lokal yang sebelumnya menjadikan kegiatan kenelayan sebagai pekerjaan sampingan. Beberapa orang informan dan responden menjelaskan bahwa selama kegiatan tambang berlangsung, banyak nelayan-nelayan pendatang yang menetap di kawasan tambang, namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah rumahtangga nelayan yang pindah tempat tinggal dan pindah pekerjaan. Hal terakhir ini menunjukkan adanya pekerjaan substitusi atau pekerjaan saingan yang lebih menguntungkan dari pekerjaan sampingan sebagai nelayan setelah tambang beroperasi. Karena itu meskipun tanpak

produksi ikan yang dihasilkan oleh nelayan lokal semakin menurun, tapi produksi dan pendapatan setiap rumahtangga yang mempunyai pekerjaan pokok sebagai nelayan semakin meningkat, lebih-lebih setelah tambang beroperasi harga ikan meningkat tajam.

d. Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat, sektor industri kecil dan kerajinan rumahtangga mengalami peningkatan yang berarti bersamaan dengan peningkatan sektor pariwisata. Di kawasan penambangan, sektor ini juga mengalami peningkatan setelah ada aktivitas tambang; dan rumahtangga yang melakukan aktivitas ini juga semakin banyak. Sebelum tambang (1995), jumlah rumahtangga yang terlibat pada sektor ini adalah sebanyak 88 KK dari 1.992 KK yang ada (BPS, 1995). Menjelang masuk masa konstruksi (1997), jumlah rumahtangga yang bekerja pada sektor ini meningkat menjadi 182 KK dengan melibatkan 280 orang tenaga kerja. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan pada saat itu meliputi : industri gula aren atau gula semut, industri meubel, anyaman lontar, anyaman pandan, industri batu-bata, industri kapur, dan pengolahan batu (Kandep Indag Kabupaten Sumbawa, 1997).

Setelah tambang beroperasi, kegiatan usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga tersebut

semakin meningkat; dan bersamaan dengan itu muncul beberapa usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga baru, seperti industri tahu-tempe dan industri batako. Industri minyak Jereweh, pandai besi, kerajinan rotan dan beberapa industri kecil dan kerajinan rumahtangga lain yang sebelumnya tidak tampak, setelah tambang mulai menunjukkan eksistensinya. Meskipun secara keseluruhan jumlah rumahtangga yang terlibat dalam kegiatan ini tidak diketahui, namun dari hasil survei menunjukkan ada peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat pada sektor ini. Sebelum tambang, jumlah kepala rumahtangga yang ditemukan melakukan aktivitas ini sebagai pekerjaan pokok adalah sebanyak 5 orang, dan setelah tambang meningkat menjadi 27 orang (lihat *Tabel 9.*); dan yang menempatkannya sebagai pekerjaan sampingan meningkat dari 8 orang menjadi 12 orang (*lihat Tabel 10*).

Rendahnya aktivitas masyarakat dalam bidang industri kecil dan kerajinan rumahtangga sebelum tambang berkait dengan masalah pasar. Menurut informasi dari para perajin, sebelum tambang dimulai usaha kerajinan mendapat kesulitan dalam penjualan hasil. Konsumen dari hasil kerajinan dan industri rumahtangga pada awalnya dominan dari penduduk lokal yang mempunyai kebutuhan dan daya beli masih terbatas. Para pedagang pengumpul yang ada biasanya membeli dengan harga relatif murah dengan sistem pembayaran yang kadangkala di belakang hari. Sedangkan setelah tambang, aktivitas usaha

kerajinan dan industri rumahtangga ini semakin meningkat. Pemasaran beberapa hasil kerajinan, tidak mengalami banyak kesulitan, karena konsumennya tidak lagi terbatas pada penduduk lokal; tapi sudah meluas ke berbagai segmen pasar. Beberapa dari hasil industri kecil dan kerajinan rumahtangga ini juga dimanfaatkan oleh perusahaan penambangan. Modal atau Skala usaha dari kegiatan kerajinan dan industri kecil mengalami peningkatan yang cukup berarti, seperti kerajinan bata, sebelum tambang skala usahanya maksimum Rp. 0,5 juta,- setelah tambang meningkat menjadi Rp. 11 juta; industri kapur dari Rp. 6 juta meningkat menjadi Rp. 12 juta; demikian juga usaha kerajinan dan industri rumahtangga lainnya. Peningkatan skala usaha tanpaknya hanya karena semakin meningkatnya pasar di dalam kawasan. Tidak diperoleh informasi pengusaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga yang memasarkan hasil industri dan kerajinannya sampai ke luar kawasan, sebagaimana yang dilakukan oleh industri kapur sebelum tambang yang memasarkan hasilnya sampai Kecamatan Alas.

Usaha industri dan kerajinan rumahtangga ini juga tidak terlepas dari perhatian PT. NNT. Menurut data dari Yayasan Olat Parigi, jenis kerajinan dan industri rumahtangga yang sudah mulai dibina oleh PT.NNT adalah kerajinan meubel, pandai besi, gula aren, dan industri kecil minyak Jereweh. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya dibatasi pada masyarakat kawasan penambangan; tapi sudah merambah ke

daerah sekitar, seperti Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Seteluk.

Perkembangan usaha dan nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat, khususnya rumahtangga sampel dari usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga memang sangat dipengaruhi oleh model pengembangan masyarakat yang diintrodusir kepada masyarakat di daerah lingkaran tambang.

e. Usaha Perdagangan dan Jasa

Keberadaan usaha perdagangan dan jasa dalam suatu wilayah dapat menjadi indikator perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Sebagai kawasan yang pada awalnya merupakan kawasan yang terisolir, maka kegiatan usaha perdagangan dan jasa masih sangat terbatas. Pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat desa hanya ada di Desa Beru yang mulai beroperasi secara aktif pada tahun 1994. Pada saat itu sampai menjelang dimulainya kegiatan penambangan, kegiatan usaha perdagangan masih didominasi oleh usaha kios-kios kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari; dan usaha perdagangan hasil usahatani, hasil hutan, ternak dan hasil perikanan. Para pedagang hasil bumi ini biasanya bertindak sebagai pedagang pengumpul atau pedagang perantara yang tidak memerlukan tempat khusus.

Kondisi yang sama juga terjadi pada usaha jasa, yaitu sebelum tambang jenis usaha jasa yang ada masih terbatas pada jasa angkutan pedesaan sebagai pedati, supir atau kernek truk dan ojek. Beberapa

orang membuka jasa perbengkelan dan press ban skala kecil, tukang jahit dan tukang bangunan.

Setelah tambang beroperasi, kegiatan pada bidang perdagangan dan jasa meningkat pesat bersamaan dengan semakin berkembangnya penduduk dan kegiatan ekonomi lainnya. Berbagai usaha perdagangan dan jasa mulai bermunculan. Penduduk yang sudah bekerja sebagai pedagang dan penjaja jasa semakin memperluas jenis dan volume usahanya. Bersamaan dengan itu muncul pedagang dan penjaja jasa baru yang berasal dari penduduk lokal maupun penduduk pendatang. Beberapa jenis usaha dagang dan jasa juga memperoleh pembinaan dari PT.NNT. Jenis usaha yang diketahui mendapat pembinaan dari PT.NNT adalah usaha kios, pedagang bakulan, waserda, jasa angkutan (ojek) dan jasa komunikasi (Yantel).

Jenis usaha dagang yang paling banyak ditekuni rumahtangga sampel dan paling menonjol perkembangannya setelah tambang adalah usaha dagang dalam bentuk kios, yaitu dari 46 unit berkembang menjadi 81 unit. Modal usahanya meningkat dari Rp. 92,45 juta menjadi Rp. 913,4 juta. Dalam bidang jasa, yang paling pesat perkembangan setelah tambang adalah jasa angkutan, yaitu dari 4 unit berkembang menjadi 33 unit. Modal usahanya meningkat dari Rp. 9,7 juta menjadi Rp. 1.442,3 juta. Bidang usaha perdagangangan yang semakin berkurang perkembangannya setelah tambang, adalah

bidang usaha hasil bumi. Kalau sebelum tambang, jumlah rumatangga yang menekuni kegiatan ini sebagai pekerjaan pokok adalah sebanyak 4 keluarga; setelah tambang berkurang menjadi 2 keluarga. Secara keseluruhan, modal usaha yang diinvestasikan oleh rumahtangga dalam bidang usaha dagang dan jasa ini adalah sebesar Rp. 217,7 juta sebelum tambang menjadi Rp. 3.158,8 juta setelah tambang.

Dengan meningkatnya skala usaha ini, maka jaringan usahanya juga semakin meluas. Kalau sebelum tambang, jaringan usaha masih terbatas di daerah lingkaran tambang dan paling jauh sampai Kecamatan Taliwang. Tapi setelah tambang, jaringan usaha sudah sampai Mataram, bahkan ada yang sudah sampai Surabaya. Bentuk jaringan usaha yang dimaksud adalah kerjasama dengan supplier barang dari luar kawasan. Bentuk jaringan kerjasama seperti ini, tidak hanya terjadi pada pedagang besar seperti toko, tapi juga pada pedagang-pedagang kecil. Perbedaannya untuk pedagang kecil adalah dengan membuat jaringan kerjasama dengan mobil-mobil box dari Mataram, Cakranegara atau dari Sumbawa Besar yang membawa barang dagangan ke kawasan penambangan. Dengan adanya jaringan kerjasama seperti ini, maka para pedagang lokal tidak mengalami kesulitan untuk pengadaan modal usaha maupun barang dagangan, karena pembayaran dilakukan dibelakang hari, yaitu sekitar satu minggu sampai

satu bulan sejak barang diserahkan atau pada saat penyerahan barang berikutnya.

Dengan semakin berkembangnya skala usaha dan jaringan kerjasama ini tentu berdampak positif terhadap penghasilan yang diperoleh. Menurut beberapa orang pedagang di Maluk dan Sekongkang, rata-rata mereka memungut keuntungan sekitar 10% dari harga belinya.

f. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Pertanian ekstraktif selain menangkap ikan di laut adalah memungut hasil hutan, baik berupa rotan, kayu bahan bangunan, kayu bakar, lebah madu, bahan baku gula aren, atau khewan buruan. Sebelum kegiatan tambang, kegiatan memanfaatkan hasil hutan merupakan pekerjaan sampingan yang sangat penting bagi masyarakat di kawasan penambangan, karena dianggap dapat menopang ekonomi rumahtangga. Kegiatan ini terutama dilakukan setelah selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pertanian di sawah atau di ladang.

Dalam setiap tahun, rata-rata anggota rumahtangga melakukan kegiatan ini 1-7 kali dalam setahun; dan setiap kali membutuhkan waktu 1-15 hari, tergantung dari jenis dan jauhnya lokasi pencarian hasil hutan. Dalam setiap kali pencarian, para pencari hasil hutan membawa bekal berupa beras dan bumbu-bumbuan dengan jumlah tergantung dari perkiraan waktu menetap di dalam hutan. Dari jumlah bekal yang di bawa, anggota

rumahtangga yang tinggal di rumah (istri), dapat memperkirakan kapan para pencari hasil hutan kembali ke rumah. Untuk menjual hasil hutan ini, tidak mengalami kesulitan, karena di setiap desa terdapat pedagang pengumpul.

Setelah tambang beroperasi, beberapa rumahtangga yang biasa mencari hasil hutan menghentikan kegiatannya; dan beberapa rumahtangga lainnya masih tetap mencari meskipun dengan frekuensi yang semakin jarang (1-4 kali/tahun) dan lama menetap di hutan juga semakin pendek, yaitu antara 1-7 hari. Dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat diperoleh informasi bahwa, penurunan aktivitas pencaharian hasil hutan ini disebabkan oleh :

- semakin terbatasnya ruang gerak, sebagai konsekuensi dari adanya kegiatan penambangan;
- Hasil hutan yang mempunyai nilai ekonomi semakin berkurang, karena semakin banyaknya pencari hasil hutan dari luar;
- Semakin ketatnya pengawasan pengambilan hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang; dan
- Semakin terbukanya lapangan kerja dan lapangan usaha setelah tambang mulai beroperasi.

g. Usaha Pertambangan Skala Kecil

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat diperoleh informasi bahwa jenis usaha yang berkaitan dengan dengan sektor pertambangan

skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan penambangan, tidak banyak mengalami perubahan. Jenis usaha yang dilakukan hanya meliputi penambangan batu kapur, penambangan pasir, dan penambangan batu untuk pembangunan jalan, jembatan, kantor/rumah dan prasarana irigasi. Sementara untuk penambangan emas atau logam lainnya tidak diperoleh informasi kalau ada masyarakat yang pernah melakukannya; meskipun masyarakat ada yang sudah menduga akan keberadaan logam mulia tersebut di lokasi penambangan sekarang ini; namun mereka tidak ada yang pernah mencari, karena letaknya yang relatif jauh dan dikelilingi oleh hutan belukar yang lebat..

Sementara aktivitas masyarakat dalam melakukan penambangan pasir, batu kapur dan batu gunung, sebelum tambang intensitasnya relatif jarang, karena pada saat itu pembangunan yang memanfaatkan hasil tambang tersebut masih relatif terbatas, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum tambang, masyarakat lokal hampir semuanya menggunakan rumah panggung yang tidak banyak membutuhkan barang-barang tambang tersebut. Oleh karena itu, tidak ditemukan masyarakat lokal yang menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan pokok ataupun pekerjaan sampingan.

Setelah tambang mulai beroperasi, maka kebutuhan akan barang-barang tambang tersebut

meningkat pesat. sehingga masyarakat yang sejak semula sudah mengerjakan pekerjaan ini, semakin meningkatkan intensitas kegiatannya. Bersamaan dengan itu pula, muncul penambang-penambang baru yang berasal dari berbagai daerah, namun tetap jarang yang berasal dari penduduk lokal. Penduduk lokal yang melakukan kegiatan ini setelah tambang hanya dijumpai pada penduduk Desa Maluku.

Kelangkaan penduduk lokal melakukan aktivitas penambangan skala kecil ini, menurut informasi yang diperoleh karena sifat dari pekerjaan ini yang lebih tepat dimasukkan sebagai buruh kasar yang jarang mau ditekuni oleh penduduk lokal.

3. Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga

Untuk membandingkan penghasilan dan pengeluaran rumahtangga sebelum dan setelah tambang; dapat dilakukan dengan beberapa alternatif,. Masing-masing alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Alternatif *pertama* adalah berdasarkan harga berlaku pada saat sebelum tambang (1995) dan pada saat setelah tambang (2002). Alternatif *kedua* adalah berdasarkan harga konversi dari sebelum tambang ke setelah tambang atau sebaliknya; dan alternatif *ketiga* adalah dengan mendeflasi atau menginflasi harga barang dan jasa yang dihasilkan dan yang dibutuhkan oleh rumahtangga berdasarkan harga yang umum berlaku pada wilayah yang lebih luas dengan menggunakan

data sekunder atau dengan melihat tingkat inflasi yang berlaku umum di daerah tersebut.

Alternatif pertama mempunyai keunggulan pada hasil perhitungannya yang lebih kongkrit berdasarkan harga yang diterima atau yang dikeluarkan oleh rumah tangga tersebut, namun mempunyai kelemahan karena nilai atau daya beli rupiah pada saat sebelum tambang berbeda dengan setelah tambang. Dalam hal ini alternatif kedua mempunyai keunggulan, karena menyamakan nilai barang dan jasa baik yang dihasilkan maupun yang dibutuhkan oleh rumah tangga tersebut. Tapi mempunyai kelemahan dalam hal tingkat kemudahan atau kesukaran barang dan jasa diperoleh pada saat sebelum tambang atau setelah tambang. Selain itu, sebelum tambang tidak semua barang dan jasa yang dihasilkan dan dibutuhkan ditransaksi lewat pasar. Masyarakat masih ada yang menerapkan sistem barter atau saling memberi. Sedangkan setelah tambang umumnya semua barang dan jasa yang dihasilkan maupun dibutuhkan ditransaksi lewat pasar, dalam arti di nilai dengan uang. Sedangkan alternatif ketiga, merupakan alternatif terakhir yang bisa menjembatani kelemahan alternatif pertama dan kedua, yaitu dengan cara melihat tingkat inflasi selama periode penelitian, yaitu sejak tahun 1995-2002. Kelemahannya adalah perhitungan tingkat inflasi tidak hanya didasarkan atas barang dan jasa yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh masyarakat lokal, tapi juga barang dan jasa lain. Di samping itu juga,

perhitungan tingkat inflasi tidak ada yang bersifat lokal kawasan, minimal tingkat kabupaten atau bahkan tingkat propinsi.

Memperhatikan keunggulan dan kelemahan ketiga alternatif tersebut, maka untuk memulai pembahasan akan mengacu pada alternatif pertama dengan tetap membandingkannya dengan hasil analisis alternatif kedua dan ketiga.

a. Pendapatan Rumah tangga

Perhitungan pendapatan rumah tangga didasarkan atas pendapatan yang dapat dibelanjakan, yang dalam istilah ekonomi makro "*disposable income*" atau dalam istilah ekonomi mikro atau ekonomi ketenagakerjaan adalah "*take home pay*". Berdasarkan konsep ini, berarti pendapatan rumah tangga bukan hanya berasal dari hasil kerja (*labor income*), tapi juga dari luar hasil kerja (*non-labor income*). Pendapatan dari luar hasil kerja bisa diperoleh dari penyewaan asset, bunga modal atau uang, tunjangan, santunan, pemberian atau kiriman keluarga yang bekerja di luar negeri.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan harga berlaku diketahui bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga sebelum ada kegiatan tambang (1995) adalah sebesar Rp. 155.369 setiap bulan. Angka ini tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian PPLH Unram (2001) sebesar Rp. 159.768 perbulan. Angka pendapatan rumah tangga tersebut terkesan sangat kecil pada saat sekarang ini, karena pada saat itu

harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumahtangga di kawasan itu masih lebih rendah daripada kawasan lain sebagai akibat dari letak daerah tersebut yang masih terpencil. Tapi berbeda dengan kondisi sekarang (2002), dimana barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di daerah tersebut relatif lebih tinggi daripada daerah lain, yang terlihat dari aliran barang dan jasa yang masuk ke daerah tersebut. Karena itu bila pendapatan rumahtangga sebelum tambang tersebut dikonversi atau dinilai dengan harga sekarang (2002), maka pendapatan rumahtangga tersebut menjadi rata-rata sebesar Rp. 515.324 perbulan.

Selanjutnya bila barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumahtangga sebelum tambang tersebut dinilai berdasarkan perkembangan tingkat inflasi di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram selama kurun waktu 1995-2002, yaitu sekitar 150%; maka pendapatan rumahtangga tersebut akan menjadi sebesar Rp. 388.422 perbulan.

Mengingat nilai uang yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu, sementara kebutuhan pokok masyarakat relatif tetap, maka Sayogyo (1982) membuat ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan standar beras. Menurut kriteria Sayogyo (1982), batas garis kemiskinan untuk masyarakat pedesaan adalah setara dengan 480 kg beras per kapita pertahun atau setara dengan 40 kg/kapita/bulan atau bila diperhitungkan dengan

harga beras pada saat itu sebesar Rp. 900 perkilogram, maka standar garis kemiskinan tersebut adalah sebesar Rp 36.000/kapita/bulan. Bila standar garis kemiskinan tersebut dihadapkan dengan pendapatan rumahtangga sebelum tambang sebesar Rp. 155.369 perumahtangga atau sebesar Rp.36.368 perkapita/bulan, maka berarti pendapatan rumahtangga sebelum ada aktivitas tambang berada sedikit di atas garis kemiskinan atau termasuk dalam katagori hampir miskin. Dengan demikian hasil studi ini selaras dengan hasil studi Bappeda Tingkat I NTB dan P3P Unram (1995/1996) yang menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di desa tertinggal Kecamatan Jereweh (dan Kecamatan Sekongkang) termasuk dalam katagori hampir miskin. Katagori hampir miskin ini menandakan bahwa masyarakat berada dalam kondisi yang sangat riskan (labil), karena sedikit saja terjadi gangguan, seperti kondisi iklim yang kurang menguntungkan akan menyebabkan masyarakat tersebut berada pada kondisi miskin (di bawah garis kemiskinan).

Bila dilihat dari asset lahan maupun asset ternak yang dimiliki oleh masyarakat di kawasan tambang, maka terkesan bahwa masyarakat di kawasan itu sulit dikatagorikan miskin atau hampir miskin, karena setiap rumahtangga rata-rata memiliki lahan di atas satu hektar dan hampir semua rumahtangga sebelum tambang memiliki asset ternak. Kemiskinan yang dialami sebelum ada kegiatan tambang ini disebabkan karena potensi lahan yang dimiliki sulit ditingkatkan

produktivitasnya, mengingat kondisi pengairan dan agroklimat yang kurang mendukung untuk mengembangkan kegiatan usahatani secara lebih produktif. Sementara kegiatan lain di luar sektor pertanian juga sulit dikembangkan karena letak kawasan yang terisolir. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kegagalan dalam kegiatan usahatani, maka salah satu alternatif yang diusahakan oleh masyarakat adalah dengan memelihara ternak; namun hal ini belum mampu mengangkat mereka pada tingkat yang lebih sejahtera.

Setelah masuk kegiatan tambang, pendapatan masyarakat meningkat cukup tajam, yaitu pada masa operasi tambang tahun 2002 rata-rata pendapatan rumahtangga adalah sebesar Rp. 1.097.306 setiap bulan. Sehingga bila pendapatan ini dibandingkan dengan pendapatan sebelum tambang (1995), meskipun setelah dikonversi ke nilai sekarang, pendapatan rumahtangga setelah tambang tersebut masih jauh lebih tinggi.

Peningkatan pendapatan setelah tambang ini disebabkan karena kawasan yang pada mulanya terisolir, sudah berkembang menjadi kawasan yang terbuka dengan berbagai aktivitas ekonomi. Peluang kerja dan kesempatan berusaha masyarakat semakin luas. Sehingga sumber pendapatan masyarakat tidak lagi tergantung atau didominasi oleh pendapatan dari sektor pertanian. Pada *Tabel 14* ditunjukkan bahwa sebelum tambang, pendapatan rumahtangga masih

sebagian besar berasal dari kegiatan usahatani dan ternak (32,94%). Setelah tambang, dominasi usahatani dan ternak tersebut diganti oleh usaha dagang dan jasa (24,60%); dan usaha sebagai karyawan swasta (21,53%). Pada saat ini pendapatan dari usahatani dan ternak menempati posisi yang ketiga (16,40%). Sumber pendapatan lain yang cukup besar kontribusinya setelah tambang adalah dari luar hasil kerja (10,64%). Pendapatan ini juga banyak disumbangkan oleh adanya perusahaan tambang, melalui pemberian beasiswa dan bantuan keluarga yang bekerja pada perusahaan tambang.

Tabel 14. Perubahan Rata-Rata Pendapatan Rumahtangga Berdasarkan Harga Berlaku Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 –2002.

No	Sumber Pendapatan	Sebelum Tambang		Setelah Tambang	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Usahatani/Ternak	51.172	32,94	179.999	16,40
2	Usaha Perikanan	10.189	6,56	49.368	4,50
3	Usaha Kehutanan	9.107	5,86	4.255	0,39
4	Usaha dagang/jasa	31.296	20,14	269.939	24,60
5	Industri Kecil/ Kerj.RT	3.668	2,36	32.248	2,94
6	Pegawai Pemerintah	30.095	19,37	179.877	16,39
7	Karyawan Swasta	10.654	6,86	236.298	21,53
8.	Buruh Harian	4.322	2,78	28.580	2,60
9.	Non-Labor Income	4.865	3,13	116.743	10,64
	Jumlah	155.369	100,00	1.097.306	100,00

Sumber : Rekapitulasi Data Rumahtangga.

Pergeseran komposisi sumber pendapatan rumahtangga di atas disebabkan oleh adanya transformasi pekerjaan anggota rumahtangga dari

usahatani dan ternak ke usaha-usaha di luar pertanian. Bagi rumahtangga yang berdomisili di pusat-pusat kegiatan ekonomi, peningkatan pendapatannya cenderung lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan desa-desa lain yang agak jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Kalau sebelum tambang, aktivitas ekonomi banyak terdapat di desa yang agak luar dengan lingkaran tambang, yaitu di Desa Goa, Belo dan Beru. Dan pada saat itu pendapatan rumahtangga di desa-desa ini relatif lebih tinggi dibandingkan desa-desa lainnya yang dekat dengan lingkaran tambang. Tapi setelah tambang, pusat aktivitas ekonomi banyak terjadi di desa dalam lingkaran tambang, yaitu di Maluku; dan ternyata pendapatan rumahtangga di desa ini paling tinggi dibandingkan desa-desa lain. Sementara di desa yang letaknya masih terpencil seperti Aik Kangkung, Tatar termasuk Tongo, peningkatan pendapatan rumahtangganya relatif lebih lambat dibandingkan rumahtangga di desa yang mempunyai aksesibilitas baik dan lancar. Hal ini mengindikasikan peningkatan aksesibilitas di dalam kawasan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Pengeluaran Rumahtangga

Pengeluaran rumahtangga umumnya ditentukan oleh pendapatan rumah-tangga. Semakin besar pendapatannya, cenderung semakin besar pula pengeluarannya. Pengeluaran rumahtangga yang diperhitungkan dalam studi ini adalah pengeluaran

yang habis terpakai. Tidak termasuk pengeluaran untuk membangun rumah baru, menunaikan ibadah haji, pesta, membeli perabot rumahtangga atau untuk kepentingan investasi (tabungan). Secara garis besar pengeluaran rumahtangga dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (a) pengeluaran untuk bahan makanan/minuman; dan (b) pengeluaran untuk kebutuhan di luar makanan/minuman.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan harga berlaku diketahui bahwa pengeluaran rumahtangga sebelum tambang adalah rata-rata sebesar Rp. 142.762 pebulan. Bila pengeluaran tersebut diperhitungkan berdasarkan harga konversi pada saat operasi tambang (2002), maka nilai pengeluaran rumahtangga tersebut menjadi rata-rata sebesar Rp. 506.413 perbulan; dan bila diperhitungkan berdasarkan tingkat inflasi kumulatif selama periode 1995-2002, maka nilai pengeluarannya menjadi rata-rata sebesar Rp. 356.905 perbulan.

Sebelum ada aktivitas tambang (1995), proporsi pengeluaran rumahtangga masih sangat dominan pada kelompok bahan makanan/minuman (72,54%); dan hanya sedikit yang disisakan untuk kelompok luar makanan/minuman (27,46%). Prioritas pengeluaran pada kelompok bahan makanan/minuman sebagian besar masih untuk beras, yaitu mencapai 38,66% dari total pengeluaran rumahtangga. Setelah itu baru untuk

ikan/daging/telur (9,52%) dan untuk sayur dan bumbu-bumbuan (7,89%). Jenis pengeluaran yang cukup besar adalah untuk kopi dan the (4,32%) dan untuk rokok/tembakau dan sirih (3,56%). Pengeluaran untuk buah-buahan, biji-bijian, makanan dan minuman tambahan proporsinya masih sangat kecil. Di luar makanan/minuman, prioritas pengeluaran rumahtangga masih terbatas untuk pakaian (8,13%) dan pendidikan (7,45%) (lihat *Tabel 15*).

Setelah masuk kegiatan tambang (2002), nilai pengeluaran rumahtangga meningkat secara signifikan, sejalan dengan peningkatan pendapatan rumahtangga, yaitu rata-rata sebesar Rp. 1.027.644 perbulan. Pada saat ini proporsi pengeluaran untuk kelompok bahan makanan dan minuman semakin menurun (62,60%), sebaliknya untuk kelompok luar makanan/minuman semakin meningkat (37,40%). Jenis pengeluaran yang menurun drastis pada kelompok bahan makanan/minuman adalah beras, yaitu dari 38,66% menjadi 17,00%, sedangkan yang lain cenderung semakin meningkat terutama pengeluaran untuk makanan tambahan, rokok, ikan/daging/telur, dan termasuk juga untuk sayur dan bumbu-bumbuan.

Di luar makanan, prioritas pengeluaran rumahtangga semakin meningkat, yaitu selain untuk pakaian dan pendidikan juga untuk perumahan (lihat *Tabel 15*). Dengan semakin meningkatnya proporsi

dan prioritas pengeluaran di luar makanan ini menunjukkan bahwa setelah tambang masyarakat semakin mampu memenuhi kebutuhannya akan pangan, sandang dan papannya. Bahkan juga pendidikan, penerangan, dan perawatan kesehatan anggota rumahtangganya.

Tabel 15. Rata-Rata Pengeluaran Rumahtangga Sebelum Tambang (1995) dan Setelah Tambang (2002) Berdasarkan Harga Berlaku.

No	Sumber Pengeluaran	Sebelum Tambang		Setelah Tambang	
		Rp.	%	Rp.	%
A.	Bahan Makanan/Minuman				
1.	Beras	55.195	38,66	174.676	17.00
2.	Sayuran dan Bumbuan	11.267	7,89	85.772	8.35
3.	Bijian dan Umbian	2.091	1,47	17.545	1.71
4.	Bua-Buahan	2.476	1,73	17.637	1.72
5.	Daging/Ikan/Telur	13.583	9,52	128.434	12.50
6.	Minyak Goreng	3.813	2,67	28.473	2.77
7.	Kopi/The/Susu	6.741	4,72	33.814	3.29
8.	Makan/Minuman Tambahan	3.304	2,31	88.782	8,64
9.	Tembakau/Rokok/Sirih	5.086	3,56	68.203	6.64
	Total A.	103.556	72,54	643.337	62.60
B.	Luar Makanan/Minuman				
1.	Pakaian	11.610	8,13	88.160	8.58
2.	Pendidikan	10.632	7,45	84.343	8.21
3.	Pemeliharaan Rumah	2.310	1.62	65.139	6.34
4.	Penerangan	2.031	1,42	27.390	2.67
	Bahan Bakar	2.070	1,45	23.874	2.32
5.	Kesehatan	2.616	1,83	19.872	1.93
6.	Transportasi dan Rekreasi	2.817	1,97	20.287	1.97

7	Partisipasi Sosial	2.685	1,88	16.462	1.60
8	Pajak Dll	2.434	1,70	38.781	3.77
	Total B.	39.205	27,46	384.307	37,40
	Total A + B	294.170	100,00	1.027.644	100.00

Sumber : Rekapitulasi Data Rumahtangga.

Menurut Hukum Engel (*Engel's Law*), semakin rendah penghasilan suatu keluarga (rumahtangga), maka semakin besar persentase penghasilan tersebut di belanjakan dalam bentuk bahan makanan. Maka dengan melihat penghasilan (pendapatan) dan pola pengeluaran rumahtangga di atas, jelas bahwa kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setelah tambang lebih baik daripada sebelum tambang.

Akan tetapi bila pengeluaran rumahtangga yang bersifat habis pakai tersebut (*Tabel 15*) dihadapkan dengan pendapatannya (*Tabel 14*), maka sisa pendapatan setelah tambang tidak berbeda jauh dengan sebelum tambang. Kalau sebelum tambang, sisa pendapatan rumahtangga berdasarkan harga berlaku adalah rata-rata sebesar Rp.12.607 perbulan atau sekitar 8,11% dari pendapatannya. Setelah tambang, sisa pendapatannya adalah rata-rata sebesar Rp. 69.662 perbulan atau sekitar 6,35% dari pendapatannya. Dengan demikian, meskipun setelah tambang pendapatan rumahtangga semakin meningkat, tapi peningkatan pendapatan tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa habis pakai yang cenderung semakin banyak dan semakin berkualitas, sesuai tuntutan

perkembangan kawasan yang semakin terbuka dan semakin modern.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tahan lama atau bernilai besar tentu sulit diharapkan dapat dipenuhi dari sisa pendapatan yang masih relatif kecil. Sebagaimana sebelum tambang, sisa pendapatan rumahtangga biasanya dipakai untuk membeli perabotan rumahtangga, disimpan untuk membeli sarana produksi, perhiasan atau diinvestasikan dalam bentuk khewan ternak. Sedangkan untuk pembangunan rumah, menunaikan Ibadah Haji, pesta atau kebutuhan-kebutuhan mendadak yang nilainya cukup besar biasanya dipenuhi dengan cara penjualan asset-asset rumahtangga, seperti ternak atau lahan pertanian.

4. Dasar Perekonomian Lokal

Munculnya pusat kegiatan ekonomi dalam suatu kawasan dapat berpengaruh terhadap dasar perekonomian lokal masyarakat. Kehadiran PT. NNT dengan usaha tambang tembaga dan emas memunculkan berbagai ragam kegiatan ekonomi sebagai efek ganda dari kegiatan penambangan. Lebih lanjut, hal ini diduga berdampak terhadap perkembangan perekonomian lokal. Untuk mengetahui lebih jauh dampak dari kehadiran PT. NNT terhadap dasar perekonomian lokal masyarakat, maka dilakukan penelitian pada dengan indikator : perkembangan usaha ekonomi lokal, sarana prasarana ekonomi lokal, dan perilaku ekonomi lokal.

a. Perkembangan Usaha Perekonomian Lokal

Sebelum masuknya PT. NNT (1995), masyarakat lokal diketahui telah menggeluti berbagai usaha sebagai bagian mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa bentuk usaha lokal masyarakat yang dominan sebelum masuknya PT. NNT antara lain : (a) usahatani tanaman pangan pola subsisten di sawah dan ladang, (b) usaha peternakan (kambing, sapi, dan kerbau), (c) usaha penangkapan ikan di laut; (d) usaha pencari hasil hutan (rotan, madu, bambu, dan aren), (e) usaha pengolahan gula aren; (f) usaha perdagangan skala kecil. (g) Usaha industri pembuatan kapur

Untuk kegiatan usaha industri rumah tangga lain dan jasa meskipun disinyalir ada, tetapi skalanya sangat terbatas sehingga tidak dinilai sebagai usaha dominan. Hasil penelitian tidak menemukan adanya usaha lokal yang berskala sedang dan besar bila dilihat dari jaringan usaha yang dilakukan. Hampir semua kegiatan usaha lokal tersebut (kecuali industri kapur) dilakukan pada skala rumah tangga yang cenderung subsisten. Orientasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, sehingga kurang dikelola dengan manajemen yang baik. Sebagian besar pengelolaan usaha lokal menggunakan teknologi desa atau teknologi tradisional. Untuk usaha pertanian tanaman pangan di persawahan penggunaan teknologi pertanian (intensifikasi pertanian) dilakukan secara sederhana

mulai sekitar tahun 1985. Kurangnya adopsi teknologi pada berbagai kegiatan usaha lokal antara lain karena lokasi kawasan yang cukup terpencil dan aksesibilitasnya rendah.

Dilihat dari segi permodalan usaha, diketahui bahwa sebagian besar modal usaha untuk berbagai jenis usaha tersebut sepenuhnya menggunakan modal sendiri (swadaya). Dijelaskan pula bahwa ada kalanya para petani dan pengusaha lokal menggunakan modal pinjaman biasanya dari tetangga atau pemilik modal (rentenir). Penggunaan modal dari orang lain itu terjadi apabila pelaku usaha sanggup mengembalikan dalam jumlah (bunga) yang cukup besar yang diperhitungkan dengan natura setelah panen. Penggunaan modal pinjaman dari lembaga keuangan formal (Bank) sangat jarang dijumpai mengingat skala usaha yang dibangun adalah skala rumah tangga yang distribusinya disekitar desa atau sekitar kecamatan.

Setelah masuknya PT. NNT yang berimplikasi pada meningkatnya dinamika perekonomian kawasan, maka usaha lokal masyarakat juga mengalami perubahan. Pada masa konstruksi yang ditandai banyaknya serapan tenaga kerja di luar sektor primer pedesaan menyebabkan kegiatan usaha lokal terutama pertanian dan peternakan mengalami kemunduran. Banyak pelaku dan pekerja pada usaha pertanian lokal yang pindah ke pekerjaan lain, seperti menjadi karyawan perusahaan, penjaja jasa, pedagang

dan sebagainya. Selain itu, kurang tersedianya tenaga kerja untuk mengelola lahan dan ternak tampaknya merupakan alasan utama sehingga usaha lokal dibidang pertanian merosot intensitasnya. Upah tenaga kerja pertanian meningkat cukup signifikan karena ketersediaannya terbatas, sehingga tingkat keuntungan relatif usahatani terhadap usaha lain jauh lebih rendah. Pada kegiatan usahatani tersebut juga ada perubahan secara horizontal, dimana ditemukan cukup banyak petani yang mulai mengusahakan tanaman sayur dan buah sebagai bentuk pencaharian baru di bidang pertanian. Usahatani sayur dan buah tersebut tidak pernah dilakukan sebelum masuknya PT. NNT. Usaha lokal dibidang peternakan juga cenderung berkurang perkembangannya setelah mulai beroperasinya tambang. Berkurangnya pemeliharaan ternak ini terkait dengan kurangnya kesempatan warga untuk memelihara, disamping mulai berkurangnya kawasan untuk padang penggembalaan (*rantok*). Pada beberapa rumah tangga, berkurangnya minat mengusahakan ternak dalam jumlah besar disebabkan karena maraknya pencurian ternak sekitar tahun 1995.

Usaha lokal yang lebih bersifat mata pencaharian tradisional seperti pencari rotan, madu, bambu dan aren (*nira*) yang sebelum masuknya PT. NNT banyak dilakukan oleh masyarakat dari Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah dan Tongo Sejong menjadi sangat berkurang sejak masuknya PT. NNT. Hasil

wawancara mendalam menemukan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena sejumlah kawasan hutan yang sebelumnya dijadikan lokasi pengambilan hasil hutan menjadi tertutup mengingat kawasan tersebut bagian dari kawasan tambang.

Perkembangan usaha lokal lain seperti perdagangan lokal tampak cukup berkembang sejalan dengan berkembangnya dinamika perdagangan akibat meningkatnya berbagai bentuk transaksi di sekitar kawasan tambang.

Memasuki masa produksi yang ditandai mulai berkurangnya lagi pergerakan ekonomi masyarakat, menurut informan kunci dan hasil identifikasi pada responden diketahui bahwa sektor usaha lokal belum pulih sebagaimana mestinya. Pada masa ini ada upaya pihak PT. NNT untuk mengembangkan sektor usaha lokal sebagai basis ekonomi lokal. Langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan bantuan modal dan pembinaan kepada petani, peternak, pedagang kecil dan perajin rumah tangga. Akan tetapi sejumlah informan menuturkan bahwa hal tersebut sulit berkembang karena keterbatasan kemampuan pemasaran hasil produksi, disamping karena adanya pesaing atau penyalur sayur dan buah dari daerah lain. Proses tersebut berlangsung sejak mulai adanya rekrutmen tenaga kerja untuk berbagai pekerjaan di perusahaan PT. NNT dan sub kontrakstor lainnya.

b. Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Lokal.

Secara umum diperoleh informasi dimana ketersediaan sarana prasarana usaha ekonomi lokal sangat terbatas pada masa sebelum masuknya PT. NNT. Prasarana usaha yang ada di sektor usaha pertanian hanya berupa peralatan pertanian konvensional, sedikit saluran irigasi, dan mesin pengolahan hasil (*rice milling unit*) di Jereweh dan Sekongkang Atas. Untuk keperluan distribusi dan pengadaan sarana produksi di Jereweh telah ada sebuah Koperasi Unit Desa (KUD Tiu Bekemah). Untuk usaha peternakan tradisional terdapat beberapa kawasan *Rantok (Lar)* yakni semacam padang penggembalaan bersama. Selebihnya tidak diketahui macam prasarana untuk usaha peternakan tersebut.

Usaha ekonomi lokal di bidang perdagangan pada masa sebelum masuknya NNT ada beberapa buah toko permanen dan sejumlah kios. Sedangkan untuk tempat transaksi umum sehari-hari menggunakan *Tenten* (pasar alamiah di pinggir jalan) seperti di Sekongkang atas, Sekongkang Bawah, Tongo dan Benete. Sedangkan di Goa, Beru dan Belo transaksi berlangsung di pasar umum yang terletak di Desa Beru.

Untuk usaha penangkapan ikan di laut (nelayan) umumnya menggunakan perahu biasa dan perahu tempel dengan dilengkapi perlengkapan jaring sederhana. Tidak ada informasi mengenai nelayan

yang menggunakan perahu motor berkekuatan besar dengan jaring oros dan jaring besar lainnya. Sarana perdagangan ikan dilakukan langsung di pantai, biasanya diambil oleh pedagang ikan keliling, atau oleh pedagang pengecer di pasar rakyat (*tenten*) dan di pasar umum lain. Pedagang ikan keliling tersebut biasanya menggunakan sepeda pancal dan biasanya sudah memiliki pelanggan tetap di kampung-kampung tertentu.

Berdasarkan penuturan informan kunci, untuk industri pengolahan gula aren di Tongo Sejong sebelum masuknya PT. NNT juga merupakan usaha rumah tangga, sehingga sarana pendukungnya sangat sederhana, yakni perlengkapan olah dengan tungku, wajan dan wadah sederhana. Mengingat pada masa lalu intensitas keluar masuknya kendaraan umum sangat kurang, maka proses distribusinya juga sekitar desa dan beberapa kali dalam satu bulan di pasarkan oleh pengumpul ke Jereweh dan tempat lainnya. Demikian juga halnya dengan usaha industri kapur, masih dengan teknologi tradisional pedesaan, yakni sistem tungku pembakaran dengan bahan bakar kayu. Bahan baku kapur diambil dari bukit atau gunung kapur sekitarnya dan kebanyakan dibeli dari penduduk lokal yang berperan sebagai pengambil atau penggali batu kapur.

Berdasarkan informasi dari responden, untuk usaha ekonomi lokal tersebut tidak berkembang mencolok setelah masa produksi tambang PT. NNT.

Artinya, usaha –usaha lokal tersebut seolah berlangsung lagi tanpa perkembangan yang berarti. Khusus untuk usaha tani di sawah, pengolahan tanah sudah mulai menggunakan *hand tractor* sejak masa konstruksi, yang sebelumnya kebanyakan menggunakan tenaga ternak dan manusia. Disamping itu telah banyak petani memanfaatkan mesin pompa air untuk membantu pengairan tanaman di lahannya pada musim kemarau (untuk palawija).

c. Perilaku Usaha Ekonomi Lokal

Pada masa sebelum masuknya PT. NNT etika usaha yang dibangun oleh para pelaku usaha ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai sosial setempat. Dalam usaha perdagangan dikenal istilah *nempil*, yaitu membeli dalam jumlah kecil sesuatu barang dan umumnya dilakukan di rumah pedagang. Istilah *nempil* ini juga berlaku bila seseorang membutuhkan barang milik orang lain yang tidak pedagang atau barang itu tersebut tidak untuk dijual. Dalam etika dagang setempat berlaku juga sistem bon yang dikenal dengan istilah *ngutang*, khususnya diberikan kepada pelanggan atas dasar rasa kepercayaan semata. Dalam proses transaksi jual beli tersebut selalu didahului oleh proses tawar menawar atau dalam istilah setempat disebut “*barega*”.

Berdasar pada hasil wawancara mendalam, bahwa untuk pengadaan barang dagangan di desa setempat, umumnya para pedagang tersebut membeli

ke pasar umum yang ada di Jereweh dan Taliwang sekali seminggu untuk barang tahan simpan. Sedangkan untuk barang kebutuhan pokok harian, biasanya para pedagang memperolehnya dari produsen atau dari rumah tangga tertentu. Sedangkan untuk pola distribusi yang berlaku adalah jual setempat (di pasar atau tenten), dihutangkan, di *tempil*, dan di tempat tertentu masih ada sistem tukar natura (barter). Etika usaha tersebut berlaku pada sebagian besar mata usaha lokal yang ada kecuali usaha pertanian tanaman pangan.

Di sektor usaha tani, pengadaan sarana produksi seperti bibit biasanya disediakan sendiri dengan menyimpan sejumlah tertentu pada musim panen. Bila bibit tidak cukup baru mereka membeli atau meminta di tetangga. Pupuk dan sarana lain biasanya diperoleh di kios sarana produksi atau KUD yang ada di Jereweh atau Taliwang. Untuk distribusi (pasar), pelaku usaha tani di sekitar daerah tambang lebih mementingkan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya, mereka akan menyimpan hasil panen dan bila diperkirakan ada kelebihan baru dijual atau digunakan untuk keperluan lain (subsisten).

Setelah masuknya PT. NNT dan sejumlah sub kontraktor pada masa konstruksi tambang, pola pengadaan dan distribusi produk usaha lokal sedikit mengalami perubahan. Menurut tokoh masyarakat dan beberapa pelaku usaha sejak saat itu jarang terjadi distribusi melalui cara *nempil* dan *barter*. Etika

sosial yang mendasari sistem usaha lokal tersebut terkesan makin longgar. Jarang sekali barang dan jasa dinilai berdasarkan pola-pola kekerabatan sosial seperti sebelumnya, tapi sebagian besar ditentukan oleh uang. Siapa saja yang sanggup membeli dengan sejumlah uang, maka dialah yang berhak atas barang yang ditawarkan. Ironisnya, untuk beberapa jenis komoditas, seperti ikan laut, telur ayam kampung harganya cukup tinggi, sehingga bila masyarakat lokal membeli dengan terlebih dahulu barega (menawar) biasanya langsung ditolak. Dalam konteks ini ada statemen pedagang lokal, yaitu “ *mana nomubeli ing kauq, nengka bueq ienteq in tau nyumon*” (meskipun kamu tidak membeli dagangan ini, nanti akan habis dibeli oleh orang Newmont).

Perilaku para pengusaha lokal terhadap usaha baru yang dilakukan oleh para pendatang tampaknya cukup baik. Semua informan kunci menyebutkan bahwa pedagang lokal tidak merasa tersaingi dengan munculnya pedagang dari luar selama pedagang tersebut tidak memonopoli semua akses ke konsumen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama ini (sejak masa konstruksi sampai masa produksi tambang) hampir tidak pernah terjadi konflik antara pedagang lokal dengan pedagang dari luar. Konflik yang pernah terjadi adalah antara para petani produsen sayur dan buah yang dibina PT. NNT dengan suplayer sayur dan buah dari luar yang hendak mensuplay barangnya ke PBU. Konflik tersebut muncul karena mereka tidak dapat memasukkan

produk dalam jumlah yang lebih banyak bahkan sering ditolak, sementara suplayer luar tidak mengalami masalah. Dari hal tersebut mereka menangkap indikasi adanya kerjasama menyimpang antara suplayer dengan oknum tertentu di PT. PBU. Adapun bentuk reaksi mereka adalah dengan melakukan penghadangan terhadap truk yang membawa sayur dan buah dari daerah lain.

5. Perbankan dan Jasa Kredit

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa beberapa desa lingkaran tambang berkembang sejumlah lembaga perbankan, baik milik pemerintah maupun di kelola swasta. Di Desa Maluk sebagai pusat kegiatan ekonomi kawasan, sejak tahun 1999 telah beroperasi dua bank pemerintah, yakni Bank BNI dan BRI. Selain itu telah beroperasi satu bank swasta, yakni bank syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan tambang dengan efek ganda ekonomi yang cukup luas telah memngsng perkembangan lembaga perbankan. Dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, maka hal ini dinilai sangat positif. Sebagai perbandingan, kondisi sebelum masuknya tambang, yang didominasi oleh ekonomi tradisional hanya terdapat satu lembaga perbankan yang beroperasi, yakni Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) yang dikelola Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dari hasil investigasi dan keterangan responden diketahui bahwa cakupan wilayah operasional LKP tersebut

masih terbatas dan belum menjangkau desa yang cukup jauh, seperti Tongo, Ai Kangkung dan Tatar.

Keberadaan bank pemerintah dan swasta yang terpusat di Desa Maluk sangat direspon positif oleh masyarakat desa lingkaran tambang. Dari pengakuan responden diketahui sekitar 54 persen telah memanfaatkan jasa perbankan, baik kaitannya dengan aktivitas usaha maupun aktivitas lainnya. Beberapa bentuk pemanfaatan lembaga perbankan oleh masyarakat lokal adalah :

- Sebagai tempat mentransfer kiriman uang, terutama bagi rumah tangga yang mempunyai keluarga bekerja di luar daerah.
- Sebagai tempat menyimpan (menabung) kelebihan pendapatan yang diperoleh secara terstruktur maupun insidental.
- Sebagai tempat memperoleh kredit atau pinjaman dalam berbagai skim kredit yang ditawarkan oleh pihak perbankan.
- Sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan melalui sistem transfer dengan pihak lain, baik perorangan maupun lembaga.

Hasil studi juga menemukan bahwa cakupan pelayanan lembaga perbankan yang ada cukup luas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya responden di Desa Tatar dan Ai Kangkung yang pernah memanfaatkan lembaga perbankan tersebut. Selain itu, sejumlah pelaku perdagangan dan jasa pernah mengajukan usulan pinjaman kepada lembaga keuangan yang ada

terutama ke BRI. Ditemukan pula bahwa sejumlah petani yang mengembangkan usaha tani sayur-sayura dan buah dan petani lain yang memasarkan produknya ke PT. PBU yang dikoordinasikan oleh YPESB memanfaatkan lembaga perbankan tersebut sebagai tempat transfer pembayaran produnya.

Bila dibandingkan dengan kondisi sebelum masuknya perusahaan tambang, maka jelas bahwa pada saat ini keberadaan perbankan sangat membantu perekonomian masyarakat. Diakui oleh sejumlah informan kunci bahwa sejak kehadiran sejumlah Bank di Maluku, ada indikasi perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola dan menyimpan uang mereka. Kebiasaan menabung sudah makin baik, bahkan sejumlah pengiriman uang ke orang lain seperti kepada keluarga yang sekolah di daerah lain sudah ditransfer melalui jasa perbankan tersebut.

6. Pariwisata dan Rekreasi

Kecamatan Jereweh dan Sekongkang sesungguhnya memiliki sejumlah potensi obyek wisata, seperti : pantai Jelenga, pantai Sekongkang , pantai Tongo dan kawasan hutan lindung yang terletak diantara Sekongkang dengan Tongo Sejorong. Sebelum masuknya PT. NNT, tidak ada potensi wisata tersebut di atas yang berkembang menjadi obyek wisata yang memadai. Keberadaan pantai dan lokasi lain itu lebih sebagai lokasi rekreasi masyarakat lokal sekitar Jereweh dan Sekongkang. Pada masa sebelum masuknya PT. NNT tidak tersedia prasarana

penunjang seperti hotel, restoran, home stay atau bungalow. Dengan demikian kegiatan kepariwisataan pada masa itu tidak berkembang.

Dengan mulainya kegiatan penambangan PT. NNT di beberapa tempat seperti Maluk, Sekongkang Bawah dan di Jelenge Desa Beru dibangun hotel dan restoran serta home stay. Sampai pada masa produksi saat ini keberadaan hotel restoran dan sejumlah home stay tersebut tidak berpengaruh kuat terhadap perkembangan pariwisata. Penginapan yang ada lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang bukan bertujuan wisata. Dari hasil observasi diketahui bahwa prospek pengembangan pariwisata yang cukup menjanjikan adalah pantai Jelenge yang sejak beberapa tahun terakhir dijadikan lokasi selancar (*surfing*). Banyak wisatawan mancanegara datang dengan menggunakan kapal pesiar dan kadang kala tinggal menginap di home stay yang ada di pantai Jelenga.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan PT. NNT tidak mempengaruhi arus kedatangan wisatawan, khususnya wisatawan manca negara ke lokasi potensial wisata di Kecamatan Jereweh dan Sekongkang.

7. Pembayaran PT.NNT Kepada Pemerintah

Berdasarkan kontrak karya Pasal 13 Generasi IV tahun 1986 PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) selaku perusahaan penambangan mempunyai kewajiban kepada pemerintah Indonesia untuk

melakukan pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak karya tersebut. Pembayaran dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan jenis kewajibannya. Sampai tahun 2002, PT. NNT telah melakukan pembayaran kepada pemerintah Indonesia uang sebesar: Rp. 1.865.032.757.243,- (*satu triliun delapan ratus enam puluh lima milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*). Dari jumlah tersebut yang dibayarkan kepada pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 11.734.282.564; kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 43.708.890.780; kabupaten lain Rp. 1.677.534.640. Sedangkan yang dibayarkan kepada pemerintah pusat adalah melalui Kas Negara sebesar Rp. 1.320.305.355.170; melalui Menteri Keuangan sebesar Rp. 476.123.907.650 dan melalui Menteri Kehutanan sebesar Rp. 11.482.786.439.

Pembayaran PT.NNT kepada pemerintah pusat dan daerah tersebut ternyata sudah diketahui oleh masyarakat banyak di kawasan penambangan, meskipun angkanya secara pasti mereka tidak mengetahuinya. Hal yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat di kawasan penambangan adalah menyangkut berapa besar dana yang dibayarkan kepada pemerintah daerah tersebut dialokasikan kembali untuk kepentingan pembangunan masyarakat di dalam kawasan. Karena yang sering di dengar justru penggunaan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat di luar kawasan. Dugaan ini

merupakan awal munculnya ungkapan “*Ayam bertelur di atas tumpukan padi, mati kelaparan; itik berenang di atas air mati kehausan*”. Oleh sebab itu, aspek yang terpenting berkaitan dengan pembayaran PT.NNT kepada pemerintah bukan saja pada nilainya, tetapi lebih pada pengalokasiannya kepada pembangunan masyarakat di kawasan tambang yang umumnya menerima dampak langsung dari kegiatan tambang. Transparansi menyangkut pengalokasian dana yang diberikan melalui pemerintah daerah ini dinilai sangat diperlukan agar masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah maupun terhadap PT.NNT yang dapat berakibat terhadap instabilitas di kawasan penambangan.

C. Transformasi Sosial Budaya pada Awal Masa Produksi

Penelitian aspek sosial budaya ini berkaitan dengan beberapa variabel sosial budaya yang tertuang dalam dokumen Amdal. Secara umum hasil studi menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial budaya pada beberapa aspek dibandingkan dengan sebelum tambang, maupun dengan kondisi tahun 2001, meskipun terdapat beberapa aspek yang belum menunjukkan perbaikan. Berikut disajikan hasil penelitian pada setiap variabel yang diteliti.

1. Perubahan pada aspek gaya hidup

Untuk mengetahui perubahan gaya hidup masyarakat desa lingkar tambang PT. NNT dilakukan

pengkajian terhadap 4 (empat) indikator, yakni : (1) Pola konsumsi makanan, (2) pola pengeluaran, (3) prioritas pengeluaran, dan (4) penguasaan asset / barang manufaktur. Secara umum hasil penelitian di sepuluh desa lingkaran tambang menunjukkan adanya perkembangan gaya hidup masyarakat dengan cukup signifikan setelah periode berlangsungnya penambangan. Berikut disajikan hasil penelitian pada masing-masing indikator.

a. Perubahan Pola Konsumsi Makanan

Vago (1990) menyatakan bahwa perubahan pada pola makanan dalam suatu komunitas mencerminkan perubahan dalam gaya hidupnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa apabila pendapatan keluarga meningkat, maka akan bergeser proporsi pengeluaran dengan menambah proporsi pengeluaran pada bukan makanan, dan hal ini mencerminkan gaya hidup masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa sebelum mulainya aktivitas penambangan, frekuensi makan untuk jenis makanan pokok dan makanan penunjang lebih sedikit dibandingkan dengan setelah mulainya kegiatan penambangan sampai saat produksi tambang berlangsung. Disamping perubahan pada frekuensi tersebut, terjadi juga perubahan pada pola makanan. Kecenderungan perubahan tersebut terjadi pada semua kelompok sampel (kelompok masyarakat) di semua desa penelitian.

Pola konsumsi makanan pokok sehari-hari masyarakat di desa lingkaran tambang sedikit mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah memasuki masa kegiatan penambangan. Hasil studi menemukan bahwa sebanyak 37,5 persen responden mengakui komposisi makanan pokok lebih bervariasi setelah masuknya PT. NNT, terutama sekali pada masa konstruksi. Selebihnya, yakni sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pola dan variasi makanannya sehari-hari tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelum mulainya kegiatan tambang. Adapun pola konsumsi yang lazim terjadi pada masyarakat desa lingkaran tambang sebelum kegiatan tambang adalah : nasi (beras) – lauk pauk dan ikan laut. Lauk pauk tambahan seperti : daging, telur dan makanan siap saji dikonsumsi secara temporer sehingga tidak terpolakan dalam kebiasaan mereka. Setelah masuknya kegiatan tambang variasi makanan pokok meningkat antara lain : nasi – lauk pauk – daging dan telur. Variasi tersebut ditunjukkan dengan frekuensi konsumsi lauk pauk (yang dikonsumsi temporer) tersebut cenderung meningkat setelah kegiatan tambang berlangsung.

Perubahan pola konsumsi lebih tampak dengan meningkatnya frekuensi konsumsi makanan atau minuman tambahan, seperti : makanan siap saji (fast food), minuman segar (soft drink) dan makanan sejenis jajanan (kudapan).

Pada masa sebelum masuknya aktivitas tambang, konsumsi makanan tambahan seperti *fast food* dan *soft drink* sangat jarang. Hal tersebut disebabkan karena bahan makanan tersebut tidak tersedia dan kemampuan daya beli masyarakat sangat terbatas. Pada masa sebelum tambang, jenis barang atau bahan makanan siap saji itu tersedia di beberapa pusat desa seperti Jereweh, Sekongkang. Sedangkan di lokasi lain jumlah dan ketersediaannya sangat terbatas.

Perubahan konsumsi masyarakat juga ditunjukkan dengan peningkatan frekuensi konsumsi makanan pokok sehari-hari. Dari hasil studi diketahui bahwa terdapat sebanyak 13, 7 persen responden yang menyatakan frekuensi konsumsi makanan pokok (nasi dan lauk pauk sehari-hari) berubah dari 2 kali menjadi 3 kali setiap hari.

Terjadinya peningkatan frekuensi dan ragam konsumsi makanan masyarakat setelah masuknya tambang tampaknya berhubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan barang (produk) yang dibutuhkan. Bahwa pada masa sebelum tambang (sekitar tahun 1995) ketersediaan warung, toko dan kios penjual produk makanan sangat kurang, kecuali di Desa Beru dan Belo Jereweh. Rendahnya aksesibilitas wilayah dan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi pada masa itu dipandang sebagai salah satu faktor penyebab kurang dinamisnya kegiatan perekonomian

masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah satu efek ganda (*multiplier effect*) kegiatan penambangan. Peningkatan pendapatan tersebut memungkinkan dengan semakin tersedianya kesempatan kerja dan peluang berusaha. Selain itu, di awal masa persiapan tambang banyak warga yang memperoleh kelebihan pendapatan dari hasil pengalihan hak atas berbagai asset terutama lahan yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan proyek yang terkait dengan penambangan.

b. Pola Pengeluaran/Konsumsi Non Makanan

Kecenderungan perubahan gaya hidup masyarakat desa lingkaran tambang juga ditunjukkan dengan perubahan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan non makanan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan cenderung meningkat (Angel's, 1970). Konsep tersebut tampaknya terjadi pada masyarakat lingkaran tambang, yakni ditunjukkan oleh meningkatnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non pangan, seperti untuk pakaian, perhiasan/aksesoris, perabot rumah tangga, biaya pendidikan, hiburan, modal usaha, dan partisipasi sosial. Disamping itu seringkali tambahan pengeluaran non makanan berupa sumbangan sukarela atau sumbangan sebagai suatu keharusan dalam lingkungan sosial. Nilai pengeluaran untuk partisipasi sosial tersebut kadang kala cukup banyak, namun sulit untuk ditentukan

nilainya secara pasti. Pengeluaran untuk partisipasi sosial terkesan meningkat sejak masuknya PT. NNT atau sejak banyak warga setempat bekerja sebagai karyawan perusahaan. Sejumlah responden dan informan kunci membenarkan bahwa akhir-akhir ini warga masyarakat sudah terbiasa memberikan sumbangan berupa uang, dan berkurang sumbangan yang berupa natura atau tenaga sebagaimana yang banyak dilakukan pada masa sebelum masuknya PT. NNT.

Perubahan dalam pola partisipasi sosial tersebut juga mencerminkan gaya hidup yang sudah mulai mengurangi ikatan sosial dan lebih memperhitungkan nilai-nilai ekonomi.

Proporsi (persentase) pengeluaran maupun nilai riil pengeluaran untuk non makanan meningkat cukup signifikan setelah masa produksi dibandingkan sebelum penambangan. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan taraf ekonomi masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap gaya hidupnya dalam mengalokasi pengeluaran rumah tangga.

Selain disebabkan oleh penambahan pendapatan rumah tangga secara komulatif, meningkatnya proporsi pengeluaran non makanan antara lain disebabkan juga oleh tersedianya penawaran akan barang dan jasa yang diperlukan dan terbentuknya iklim sosial sebagai dampak interaksi dengan masyarakat luar.

Diantara desa lingkaran tambang yang menunjukkan perubahan mencolok dalam alokasi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan adalah Desa Beru, Benete, maluk, Sekongkang Atas dan Sekongkang Bawah. Tampaknya hal ini terjadi sebagai dampak pesatnya dinamika ekonomi dan pekerjaan masyarakat di desa-desa tersebut yang merupakan pengaruh aglomerasi wilayah menjadi pusat aktivitas penunjang penambangan.

c. Prioritas Pengeluaran

Gaya hidup anggota masyarakat juga ditunjukkan dengan penetapan prioritas pengeluaran rumah tangga setelah kebutuhan pokok makanan terpenuhi. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjadikan prioritas pengeluaran pada perabotan rumah tangga, biaya pendidikan dan kesehatan. Sebagian lainnya adalah pada : pakaian, dan modal usaha.

Pada masa sebelum mulainya penambangan, di sebagian besar desa-desa yang ada masih mencirikan masyarakat agraris yang subsisten. Dengan demikian, pola atau struktur pengeluaran rumah tangga sangat sederhana, yakni sebatas untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, perawatan rumah dan untuk modal usaha lanjutan. Selain itu, proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk kebutuhan pokok non makanan relatif kecil dan jauh lebih rendah dibandingkan setelah adanya kegiatan penambangan. Gaya hidup

masyarakat dari aspek konsumsi / pengeluaran masih sangat sederhana. Sebagaimana yang dituturkan oleh sejumlah informan kunci, bahwa pada masa sebelum penambangan masyarakat hidup dari usaha tani, ternak, pencari hasil hutan, dan sebagian kecil dari perdagangan dan jasa. Pola makan masyarakat juga sangat sederhana, yaitu yang penting ada nasi dan lauk pauk. Apabila terdapat kelebihan pendapatan pada musim panen, biasanya dialokasikan untuk penambahan modal pada usaha yang sama atau disimpan dalam bentuk perhiasan dan ternak. Diakui bahwa karakter kehidupan sosial masyarakat pada masa itu adalah karakter petani dan mencerminkan desa pertanian.

Tampilan gaya hidup yang sangat sederhana dan cenderung dipengaruhi oleh alam disebabkan oleh kedekatan masyarakat terhadap alam sekitarnya sebagai lingkungan bekerja. Kurangnya interaksi dengan masyarakat dan daerah lain akibat rendahnya daya jangkau desa (aksesibilitas) menyebabkan kesan kehidupan yang cenderung lokalit dan kurang dinamis. Perilaku ini tentunya mempengaruhi gaya hidup dalam mengalokasikan pengeluaran. Secara fisik, ekspresi kesederhanaan terlihat dari tampilan perumahan dan lingkungannya. Dominasi perumahan penduduk adalah rumah panggung dari bahan kayu lokal, dan sebagian kecil dari bahan bambu. Ketersediaan rumah permanen (rumah batu) sangat kurang, dan umumnya dijumpai dipusat-pusat desa, seperti Belo dan desa Beru.

Alokasi pengeluaran dengan proporsi cukup besar untuk perumahan dan perabotannya mulai terjadi setelah mulainya persiapan penambangan yang ditandai dengan tahap konstruksi berbagai fasilitas penunjang penambangan. Bertambahnya sumber dan jumlah pendapatan rumah tangga di sebagian besar desa lingkaran tambang menimbulkan pengaruh langsung terhadap pola pengeluaran. Sebagaimana tersaji pada Tabel di atas, prioritas pengeluaran sebagian besar responden (42%) adalah untuk perumahan dan perabotnya. Sejak masa persiapan tambang sampai berlangsungnya produksi tambang sebagian besar responden (76 %) mengakui sudah melakukan perbaikan perumahan dengan nilai yang cukup besar yang tidak pernah dilakukan selama ini. Wujud perkembangan tersebut sangat tampak dari perubahan gaya fisik rumah, dimana jumlah rumah permanen dengan kondisi baik meningkat pesat setelah masa penambangan. Perbaikan bentuk dan kualitas rumah tentunya membawa konsekuensi penyesuaian pada perabotnya. Hal inilah yang disebutkan oleh responden sebagai penyebab besarnya proporsi atau alokasi pengeluaran rumah tangga untuk pengadaan perabot rumah tangga dibandingkan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya.

Berasarkan hasil studi pada aspek pengeluaran non makanan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perilaku atau gaya hidup masyarakat mengalami perubahan kearah yang lebih moderen yang

mengedepankan penampilan fisik dan kepuasan psikis.

d. Kepemilikan/penguasaan asset (barang prestise)

Secara visual, perubahan gaya hidup anggota masyarakat antara lain terlihat dari penguasaan atau kepemilikan barang / benda yang bernilai dan dipandang sebagai lambang prestise sosial. Untuk saat ini, barang prestise dimaksud masih melekat pada barang-barang manufaktur atau hasil industri, seperti barang elektronik dan asesoris rumah tangga lainnya.

Hasil studi menunjukkan bahwa setelah dimulainya usaha penambangan persentase penduduk yang memiliki atau menguasai barang yang dinilai prestisius tersebut meningkat secara mencolok. Selain peningkatan jumlah pemilik, terjadi juga penambahan ragam barang yang dimiliki oleh suatu rumah tangga.

Berdasarkan penuturan sejumlah tokoh masyarakat di Benete, Sekongkang Atas, dan desa lainnya disebutkan bahwa terdapat kebiasaan masyarakat Samawa termasuk di Jereweh dan Sekongkang untuk cenderung memperlihatkan kepemilikan tersebut kepada orang lain. Hal ini terlihat dari berbagai aksesoris atau perabot rumah tangga yang selalu ditempatkan di ruang tamu atau beranda depan rumah. Adanya kebiasaan masyarakat sejak masa lalu sebagaimana disebutkan di atas tampaknya menjadi faktor pendorong tingginya hasrat

masyarakat untuk senantiasa memiliki barang-barang prestisius. Meskipun setelah mulainya masa penambangan dan terjadi pembauran sosial budaya serta semakin terbukanya aksesibilitas masyarakat lokal namun aspek prestisius tersebut tidak berkurang. Bahkan kecenderungan kepemilikan barangnya mengarah ke produk yang lebih moderen dan prestisius.

Tabel 16. Sebaran Responden Berdasarkan Pemilikan Barang Prestisius Sebelum dan Sesudah tambang, 1995-2002.

No	Jenis Barang prestise utama yang dimiliki	Persentase (%) Responden	
		Sebelum Tambang	Setelah Tambang
1	Televisi	12,0	49,1
2	Radio / tape recorder	19,4	58,2
3	VCD player	4,0	9,1
4	Receiver / parabola	1,4	2,5
5	Refrigator / kulkas	3,7	13,7
6	Mesin Cuci	-	0,8
7	Kompore gas	-	1,7
8	Dispenser	-	3,1
9	Kendaraan motor Roda 2	2,0	13,7
10	Kendaraan motor roda 4	-	0,3

Data di atas menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam hal ke-pemilikan berbagai jenis barang rumah tangga produk industri berteknologi tinggi. Hal ini berarti bahwa gaya hidup masyarakat cenderung berubah ke arah yang lebih konsumtif dan demonstratif setelah adanya kegiatan tambang. Selain itu, berbagai jenis barang yang termasuk katagori mewah tersebut diperoleh dengan cara membeli di berbagai kota yang ada di Lombok dan Sumbawa. Hasil studi menunjukkan sekitar 32 persen responden

mengakui membeli barang elektronik, kulkas dan perlengkapan dapur lain langsung di Kota Mataram. Ada semacam kepuasan dan kebanggaan bila memperoleh barang dari daerah lain dibandingkan bila diperoleh di sekitar kabupaten setempat. Adanya kebiasaan untuk memperoleh barang keperluan hidup dari kota besar di luar Kabupaten setempat juga mencerminkan gaya hidup masyarakat karena didalam hal tersebut terselip harapan atas prestise sosialnya.

Sesungguhnya sangatlah logis apabila terjadi peningkatan pendapatan akan dialokasikan untuk pemenuhan barang pemuas psikologis selama kebutuhan fisik minimum terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan berbagai temuan yang telah diuraikan di atas dapat ditegaskan bahwa masyarakat di desa lingkaran tambang termasuk masyarakat yang cukup responsif terhadap modernisasi. Dengan kata lain, masyarakat desa lingkaran tambang mengalami perkembangan gaya hidup setelah mulainya aktivitas penambangan Batu Hijau. Dengan perkembangan gaya hidup yang cenderung ke arah modernisasi tersebut memberikan makna bahwa sesungguhnya telah terjadi perubahan eskalasi budaya masyarakat desa lingkaran tambang setelah mulai beroperasinya tambang PT. NNT. Secara teoritis, eskalasi budaya yang telah mulai berubah relatif sulit untuk berubah mundur kepada kondisi semula meskipun faktor-faktor sosio ekonomi berubah. Dengan demikian,

kehadiran PT, NNT secara langsung dan tidak langsung telah berpengaruh terhadap orientasi nilai budaya masyarakat desa lingkaran tambang terutama dilihat dari perubahan gaya hidupnya.

e. Norma Sosial

Berkaitan dengan norma dan nilai sosial, hasil studi menunjukkan keragaman, yakni ada unsur norma dan nilai yang berubah dan ada unsur yang tidak mengalami perubahan. Corak norma dan nilai sosial pada umumnya tidak mengalami perubahan, tetapi implementasinya oleh masyarakat banyak yang mengalami perubahan setelah masuknya kegiatan penambangan batu Hijau oleh PT. NNT. Berikut ini diuraikan hasil studi menyangkut beberapa parameter dari aspek norma dan nilai sosial di desa lingkaran tambang sebelum dan saat penambangan berlangsung.

f. Ikatan Adat dan Kebiasaan

Adat istiadat merupakan acuan berperilaku dalam suatu sistem sosial yang dibangun dan dikembangkan oleh suatu masyarakat. Adat istiadat secara sosial dapat menjadi penciri suatu kelompok sosial atau masyarakat. Dengan demikian pengingkaran atau pelanggaran dalam pengetrapan adat istiadat tersebut dapat menghilangkan ciri dasar suatu masyarakat yang berdampak pada berkurangnya kohesivitas masyarakat.

Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa setelah mulainya kegiatan PT. NNT ikatan adat istiadat masyarakat desa lingkaran tambang cenderung mengalami kelonggaran terutama pada aspek : 1) adat pergaulan sehari-hari, 2) adat dalam penentuan rumah, dan 3) ikatan adat dalam hal pembagian kerja dalam berbagai usaha. Pada aspek lainnya ikatan adat relatif masih kuat dalam arti masih dipertahankan oleh anggota masyarakat, seperti : 1) ikatan adat dalam hal hal pewarisan dan sejenisnya, 2) hal yang terkait dengan upacara adat, dan 3) adat yang terkait dengan kegiatan usaha (mata pencaharian penduduk). Longgarnya ikatan adat istiadat masyarakat juga ditandai dengan makin berkurangnya peran tokoh-tokoh adat, dimana pada masa sebelum dimulainya aktivitas yang terkait penambangan Batu Hijau keberadaan tokoh adat serta kelembagaannya cukup dirasakan.

1) Adat/Kebiasaan yang berkaitan dengan Pergaulan hidup

Hasil wawancara dengan responden ditemukan bahwa sebanyak 59 persen yang menyatakan bahwa mereka tidak terikat oleh aturan adat dalam perilaku pergaulan kesehariannya. Tetapi mereka mengakui bahwa pada masa sebelum masuknya perusahaan penambangan ikatan adat dalam perilaku pergaulan sehari-hari cukup kuat. Kuatnya ikatan adat dalam pergaulan keseharian pada masa sebelum tambang antara lain ditunjukkan dengan : kuatnya kedudukan sanksi sosial dalam masyarakat, berperannya

kelembagaan adat, berperannya tokoh-tokoh adat setempat dan lain sebagainya. Dalam implementasinya, kuatnya ikatan adat dapat ditunjukkan dengan : kuatnya penghormatan kaum muda terhadap orang tua, adanya batasan waktu untuk pergaulan muda mudi, dan berkembangnya gotong royong dan tolong menolong atas dasar adat setempat. Pengetrapan ketentuan adat yang umumnya masih kental berlaku pada masyarakat adalah dalam hal upacara perkawinan.

Setelah mulainya aktivitas tambang sampai masa produksi saat ini, sangat dirasakan semacam kebebasan sejumlah anggota masyarakat dalam kehidupan keseharian. Dengan masuknya masyarakat dari daerah lain yang sangat beragam etnis dan agamanya menyebabkan kurangnya kontrol sosial dari lembaga adat yang ada. Sebagai akibatnya adalah longgarnya berbagai pengetrapan adat setempat, terutama yang terkait dengan pergaulan hidup keseharian.

Dalam kaitannya dengan perilaku dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagian responden dan tokoh kunci berpendapat bahwa hal ini mulai terasa sekali sejak masa konstruksi yang ditandai banyaknya ragam pekerjaan, pekerja pendatang dan banyaknya penghasilan pekerja. Indikasi yang menunjukkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari ini adalah : pola hubungan orang tua - anak, hubungan suami - Istri, pola pengambilan keputusan

dalam keluarga, hubungan antar individu dalam masyarakat, pola hubungan remaja (muda – mudi) bentuk ikatan dalam keluarga, dan pandangan terhadap moral serta etika kemasyarakatan.

Dengan diperkuat oleh penegasan informan kunci diketahui bahwa pola hubungan orang tua dengan anak pada semua desa studi tidak lagi seperti pada masa sebelum masuknya PT. NNT. Pada masa lampau, hubungan ditandai dengan kuatnya pengaruh orang tua terhadap anak dan kepatuhan anak kepada orang tua, tetapi saat ini (masa produksi tambang) anak-anak cenderung bebas menentukan dan mengambil keputusan terutama menyangkut pekerjaan dan jodoh. Terjadi kelonggaran nilai tersebut tampaknya disebabkan oleh makin adanya rasa kemandirian atau kemampuan diri anak terutama secara ekonomis. Banyak anak-anak muda yang telah mampu menghasilkan uang sendiri dan bahkan telah mampu membantu ekonomi keluarga. Dengan demikian, kemampuan anak menghasilkan uang melalui berbagai pekerjaan telah mampu menggeser otoritas orang tua dalam menentukan berbagai hal dalam rumah tangga. Akibat lebih jauh dan masih kental dirasakan sampai saat ini adalah orang tua tidak lagi memaksakan kehendak pada anak-anak mereka. Bahkan pola hubungan yang dalam konsep Sumbawa disebut “*tau lokaq tu salokaq, tau ode tu sangode*” sudah cenderung hilang dalam tata pergaulan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan keluarga, seperti antara suami – istri juga terdapat perubahan antara masa sebelum dengan setelah adanya PT. NNT. Setelah masuknya PT. NNT pola hubungan lebih mengarah kepada sifat-sifat egaliter, demokratis dan kemitraan. Secara umum akhir-akhir ini terjadi hubungan timbal balik yang seimbang antara suami dengan istri menyangkut hak dan kewajiban dalam mengelola rumah tangga. Mereka sama-sama bekerja untuk menghidupkan rumah tangga. Hal ini berbeda dengan kondisi masa lampau yang sifat masyarakatnya masih tertutup karena rendahnya aksesibilitas kawasan. Umumnya pada masa lalu, para istri lebih banyak tinggal di rumah mengurus anak dan urusan rutin rumah tangga dan sepenuhnya tunduk kepada suami. Saat ini sebagian besar pengambilan keputusan rumah tangga dilakukan bersama hampir pada semua bidang kehidupan rumah tangga. Bahkan yang lebih menarik adalah kecenderungan dominannya peran anggota keluarga (apakah anak, suami atau istri) yang mampu menghasilkan pendapatan keluarga lebih banyak untuk menentukan keputusan rumah tangga. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari peran senioritas (Paternalistik) ke peran ekonomis dalam keluarga terutama untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil-hasil studi di atas dapat ditegaskan bahwa kehadiran PT. NNT berpengaruh terhadap perubahan nilai adat dalam masyarakat

pada tatanan kehidupan sehari-hari. Pola perubahan tersebut melalui proses :

- Kehadiran PT. NNT telah meningkatkan aksesibilitas kawasan yang memungkinkan masyarakat lokal lebih intensif berinteraksi dengan masyarakat dan budaya luar.
- Selain meningkatnya aksesibilitas kawasan, juga terjadi peningkatan keterdedahan (kontaminasi) masyarakat melalui sistem informasi, baik media elektronik maupun media cetak. Meningkatnya keterdedahan informasi masyarakat tersebut didukung oleh meningkatnya status ekonomi keluarga.
- Kehadiran PT. NNT menyebabkan dinamika ekonomi masyarakat meningkat, sehingga terjadi peningkatan pendapatan keluarga yang berpengaruh pada meningkatnya daya beli keluarga
- Adanya kontaminasi dengan masyarakat luar dan didukung oleh peningkatan pendapatan serta meningkatnya ragam penawaran barang dan jasa menyebabkan masyarakat lokal. Lebih lanjut hal ini menimbulkan perubahan pada standar hidup sehari-hari. Perubahan standar hidup tersebut menyebabkan perubahan orientasi nilai masyarakat yang implikasinya adalah perubahan pada nilai sosial seperti adat dan kebiasaan sehari-hari.
- Meningkatnya akses informasi dengan dunia luar tentunya memperluas khazanah wawasan dan

pengetahuan masyarakat. Oleh karena iklim nasional saat ini diwarnai iklim egaliter dan demokratis maka dengan mudah diikuti oleh masyarakat di desa lingkaran tambang.

2) Adat/Kebiasaan yang berkaitan dengan bangunan rumah

Tokoh masyarakat atau tokoh adat di semua desa lingkaran menuturkan bahwa sejak banyaknya berdatangan pekerja tambang dan pekerja pada sub kontraktor yang ada tampak terjadi pembauran adat dan budaya di sejumlah lokasi. Ekspresinya adalah semakin melonggarnya ikatan adat istiadat yang sebelumnya dianut kuat oleh penduduk lokal. Sebagai contoh, dalam hal model bangunan rumah banyak diantara penduduk lokal merubah rumahnya cenderung ke model yang umum di tempat lain, yakni rumah permanen (rumah batu). Seperti diketahui sebelumnya bahwa masyarakat lokal di desa lingkaran tambang memiliki rumah adat dengan model rumah panggung dari bahan kayu dan sejenisnya. Semakin besar rumah atau semakin banyak tiang rumah panggungnya mencirikan status sosial ekonomi pemiliknya relatif lebih baik dibandingkan warga lainnya.

Perubahan selera masyarakat atas model rumah juga dirangsang oleh harapan yaitu untuk dijadikan rumah sewa kepada para pendatang. Tentunya secara ekonomis hal ini cukup menguntungkan, tetapi telah melonggarkan pertalian sosial yang diatur dalam adat dan kebiasaan masyarakat.

Perubahan model rumah sebagian penduduk, terutama yang memiliki kemampuan ekonomi mencerminkan perubahan gaya hidup. Pada model rumah asli yang dibangun atas spirit adat setempat relatif lebih sederhana baik dari segi kualitas, model, dan fungsinya. Sebelum masuknya pekerja luar atau sebelum mulainya penambangan sangat sedikit rumah penduduk yang dilengkapi dengan kamar mandi atau MCK yang memadai. Dari pandangan kesehatan pola perumahan tersebut sesungguhnya kurang memenuhi persyaratan.

Banyaknya jumlah pekerja tambang atau pekerja pada perusahaan sub kontraktor PT. NNT yang hendak berdomisili di desa lokasi penambangan menyebabkan tingginya permintaan atas rumah sewa (kontrakan). Perkembangan tersebut direspon oleh penduduk lokal dengan menyediakan rumah sewaan dan banyak diantara penduduk yang membangun rumah baru atau merenovasi rumahnya dengan model yang dinilai lebih representatif untuk disewakan kepada penduduk pendatang. Pembuatan rumah baru atau renovasi rumah lama umumnya mengacu pada selera konsumen, yakni model rumah biasa (bukan rumah panggung). Dalam hal ini penduduk lokal tidak lagi merasa terikat oleh adat kebiasaan menyangkut model rumah yang dikembangkan.

Tokoh masyarakat di Sekongkang Atas dan Sekongkang Bawah serta di Benete mengungkapkan bahwa keleluasaan penduduk memilih model

bangunan rumah memang memungkinkan mengingat tidak ada sangsi adat atau sangsi sosial berkaitan dengan masalah perumahan tersebut. Konsekwensi bagi penduduk yang tidak membangun rumah panggung adalah tidak adanya anggota masyarakat yang bergotong royong membangun rumah sebagaimana lazimnya bila membangun rumah dengan model panggung. Ditegaskan pula bahwa walaupun yang dibangun adalah rumah panggung hasrat bergotong royong anggota masyarakat juga telah berkurang.

3) Kebiasaan dalam pembagian kerja

Masyarakat desa lingkaran tambang sebelum adanya aktivitas penambangan adalah masyarakat dengan pola kerjasama yang cukup kuat dalam berbagai pekerjaan. Disadari bahwa ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian kurang proporsional, maka atas spirit adat setempat mereka menciptakan kelembagaan kerja yang disebut “*basiru*”. Pola *siru* ini adalah semacam arisan pekerjaan. Dalam suatu kelompok petani, terutama atas dasar domisili mereka mengerjakan lahan secara bersama-sama tanpa upah. Pekerjaan di lahan tersebut terus berlanjut secara bergiliran sampai semua anggota *siru* selesai mempersiapkan lahannya. Dalam bidang peternakan, pada sejumlah padang penggembalaan ternak para pemilik ternak yang ada di *Lar* saling kerjasama dalam mengawasi dan mengelola *Lar* yang ada. Semuanya didasarkan atas sistem kerjasama saling menguntungkan berdasarkan kaidah-kaidah

tradisional yang sesungguhnya telah merupakan harmoni dalam masyarakat.

Dimulainya masa persiapan dan konstruksi penambangan sampai tahap produksi saat ini, masyarakat lokal telah banyak mengalami perkembangan informasi, deversifikasi usaha, dan perubahan orientasi nilai budaya. Ternyata perubahan mendasar tersebut secara langsung berdampak pada adat kebiasaan dalam pembagian atau pengaturan kerja dalam bidang usaha masyarakat. Pembagian kerja dengan sistem *basiru* diakui telah berkurang secara drastis. Pengelolaan *Lar* atau padang penggembalaan bersama juga telah berkurang, dan sejumlah penduduk lebih berorientasi ekonomi atau keuntungan. Artinya, setiap pencurahan tenaga kerja harus diimbangi dengan sejumlah upah yang disepakati.

Bagi masyarakat yang sebelumnya menjadi peladang di sejumlah kawasan ladang, hutan dan tegal mengenal aturan adat atau aturan komunal mereka, bahwa setiap suatu kawasan yang telah diberi tanda batas tertentu pantang ada yang menyerobot untuk menggarapnya. Tetapi pada beberapa tahun terakhir, terutama setelah meningkatnya harga tanah sebagai akibat adanya penambangan, cara dan kebiasaan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Masyarakat peladang secara perlahan mulai meninggalkan kebiasaan tersebut dan mulai menyetapkan aturan formal yang ada. Kepastian hak

secara administratif menjadi hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan penguasaan lahan, meskipun lahan kering yang tidak produktif. Upaya ke arah pemastian hak-hak atas tanah menurut informan kunci, mulai marak sejak adanya informasi pembebasan tanah oleh perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas tambang yakni pada awal masa persiapan. Diakui pula bahwa akibat adanya informasi pembebasan tanah tersebut sudah mulai ada konflik antar masyarakat menyangkut hak atas sebidang tanah tertentu. Disamping itu, persoalan penetapan harga juga tidak jarang menjadi perselisihan, namun hal ini tidak sampai pada terjadinya konflik terbuka.

4) Adat/kebiasaan dalam hal Upacara Tradisi

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan upacara adat, tampaknya tidak terdapat perubahan yang mencolok. Sebagian besar responden (87.5 %) menyatakan sangat terikat dengan adat istiadat dalam pelaksanaan upacara tradisi, seperti proses dan upacara perkawinan, kematian, upacara yang berkaitan dengan siklus hidup manusia. Diakui bahwa tingkat keterikatannya tidak jauh berbeda dengan masa sebelum masuknya PT. NNT ke Jereweh.

Perubahan perubahan kecil yang dilaksanakan oleh penduduk lokal dalam upacara tradisi tersebut lebih disebabkan faktor kemampuan ekonomi. Perubahan dimaksud berupa tambahan dan jarang terjadi pengurangan muatan adat. Salah satu

contohnya adalah dalam pelaksanaan upacara perkawinan, dimana dalam kebiasaan setempat selalu ada kesenian tradisional yang disebut “*Sekeco*” (*gendang dua*) yang mengiringi perhelatan. Akan tetapi bila keluarga yang merayakan tersebut mampu secara finansial, maka mereka bisa saja menambah hiburan dengan kesenian lain, seperti orkes dan sejenisnya.

Untuk kegiatan upacara lainnya yang terkait dengan adat kebiasaan tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan keluarga yang memiliki hajatan.

Pelaksanaan upacara tradisi yang cenderung mulai berkurang adalah upacara yang terkait dengan aktivitas usaha (mata pencaharian). Seperti di bidang pertanian, dulu banyak dikenal rangkaian upacara dalam hal bercocok tanam mulai dari upacara penanaman (*Nyemulak*) sampai upacara simpan padi. Aktivitas masyarakat semacam tersebut kian berkurang terlebih-lebih setelah banyaknya aktivitas masyarakat dengan adanya kegiatan penambangan. Namun berkurangnya kegiatan upacara adat dan ritual pada bidang pertanian ini tidak semata-mata akibat kehadiran perusahaan tambang. Menurut penuturan tokoh masyarakat setempat (Informan kunci) berkurangnya upacara tradisi tersebut terjadi sejak diintroduksinya teknologi pertanian, seperti bibit unggul, pemupukan, mesin penggiling padi (*huller*) dan sebagainya. Dengan masuknya perusahaan tambang, dimana aktivitas masyarakat banyak beralih

dari pertanian ke sektor pekerjaan lain justru menjadi semakin ditinggalkan-nya berbagai macam upacara adat dan ritual tersebut.

5) Adat dalam hal perkawinan

Tidak terjadi perubahan dalam hal keterikatan masyarakat lokal terhadap adat istiadat dalam perkawinan. Semua responden (100%) yang terdiri dari masyarakat lokal serta tokoh masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tetap terikat dengan aturan adat setempat dalam pelaksanaan perkawinan. Kegiatan melamar, mengantar bawaan (semacam menghantar mahar), *barodak* (rapancar) yang disertai dengan berbagai upacara, tampaknya masih taat dilakoni oleh masyarakat lokal di desa lingkaran tambang. Meskipun mereka telah mengenal ragam adat perkawinan dari daerah lain, seperti adat merarik dari Lombok, namun masyarakat setempat (lokal) tetap mengacu pada aturan adat *Samawa* dalam hal perkawinan.

Warna adat istiadat dalam perkawinan masyarakat lokal tidak mengalami perubahan berarti. Perubahan yang ada tampaknya hanya sebatas variasi, yakni yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara yang biasanya disertai dengan hiburan kesenian. Pada jenis kesenian inilah terjadi variasi dengan ditambah sentuhan kesenian (musik) moderen bagi warga yang mampu. Hal-hal yang prinsip atau sakral dalam adat perkawinan tidak mengalami perubahan dengan adanya pembauran masyarakat.

Oleh sebab itu keberadaan PT. NNT dan berbagai perusahaan penunjang lainnya tampaknya tidak menimbulkan dampak kurang baik terhadap keberadaan lembaga adat perkawinan tersebut.

g. Budaya/Pengetahuan Tradisional (Indigenous Knowledge).

Budaya dan pengetahuan tradisional merupakan salah satu kearifan lokal yang dapat membentuk harmoni sosial pada masyarakat pedesaan. Berbagai macam kegiatan yang hendak dilakukan anggota masyarakat diputuskan dengan mengacu pada kearifan lokal atau pengetahuan tradisional. Berkembangnya sistem pengetahuan tradisional masyarakat desa lingkaran tambang pada berbagai bidang kehidupan ditunjang oleh sistem kepercayaan setempat. Pada masa sebelum kegiatan penambangan dimulai, keyakinan masyarakat terhadap ketentuan waktu tradisional (*Pranata Mangsa*) cukup kuat, seperti untuk menentukan saat mulai tanam di ladang, menentukan kapan musim hujan tiba, tanda-tanda alam untuk suatu kejadian penting, cara-cara menghindar atau mengantisipasi marabahaya dan sebagainya. Peran Dukun (*Sandro*) yang dipandang sebagai orang pintar cukup besar dan karena itu para *Sandro* sangat disegani oleh penduduk lokal.

Hasil studi menunjukkan bahwa saat ini (setelah adanya kegiatan penambang-an) oleh PT. NNT sejumlah kearifan budaya lokal, termasuk keberadaan *Sandro* terkesan mengalami kemunduran. Dengan

kata lain, sudah banyak anggota masyarakat (ditunjukkan dengan sebanyak 69 % responden) yang kurang meyakini dan mematuhi berbagai pengetahuan tradisional yang pernah dijadikan acuan pada masa-masa sebelumnya. Selebihnya, yaitu sekitar 31 % responden mengakui masih percaya dan sering memanfaatkan pengetahuan tradisional (kearifan budaya lokal) dalam kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Umumnya mereka yang kepercayaan dan pengamalannya cukup baik adalah masyarakat yang tinggal dalam wilayah yang corak agrarisnya masih sangat kuat. Pada masyarakat bercorak pedesaan dengan aksesibilitas ke pusat pertumbuhan relatif terbatas, memang masih banyak mengacu kepada ketentuan tradisional yang kejelasannya bersumber dari para *Sandro*. Dari kajian ini nampak jelas bahwa bergesernya tingkat keyakinan masyarakat terhadap berbagai kearifan lokal juga disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman rasional masyarakat. Meningkatnya status pendidikan, makin luasnya pengalaman, meningkatnya intensitas interaksi dengan masyarakat luar, meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan unsur-unsur perubahan sosial lainnya merupakan penyebab berkurangnya keterikatan masyarakat terhadap acuan-acuan tradisional. Salah satu faktor pelancar terjadinya perubahan sosial di desa lingkaran tambang adalah kehadiran perusahaan tambang itu sendiri.

Meskipun kepercayaan masyarakat terhadap pengetahuan tradisional cenderung berkurang, namun keberadaan para *sandro* (dukun) tetap ada dan diakui oleh masyarakat.

h. Moral dan Etika (Perilaku) Masyarakat

Dalam pandangan masyarakat lokal di desa lingkaran tambang saat ini telah terjadi perubahan aspek moral dan etika sosial. Perubahan tersebut cenderung ke arah yang menyimpang dari tatanan sosial yang berkembang sebelum adanya kegiatan penambangan. Moral dan etika dimaksud adalah suatu sprit perilaku yang ditentukan atas dasar kaidah-kaidah sosial yang berlaku yang tercermin dalam perilaku seseorang. Dengan demikian moral dan etik tersebut senantiasa dijadikan kontrol terhadap perilaku dalam suatu sistem sosial. Konsepsi moral dan etik tersebut cenderung lebih bersifat universal dibandingkan dengan norma dan adat istiadat.

Hasil studi pada sepuluh desa lingkaran tambang menunjukkan bahwa secara umum ada pergeseran ke arah semakin lemahnya ikatan moral dan etik masyarakat dalam berperilaku dengan mulainya kegiatan penambangan oleh PT. NNT. Adanya kecenderungan pergeseran tersebut tampak pada beberapa aspek moral dan etik yang dikaji. Indikasinya secara kuantitatif adalah seperti tersaji pada Tabel 17.:

Perilaku umum pemuda dalam pergaulan keseharian dinilai menunjukkan kemunduran bila ditinjau dari persepsi moral dan etik masyarakat lokal disekitarnya. Sebanyak 71 persen responden menilai bahwa perilaku sejumlah pemuda semakin mengabaikan spirit moral dan etika terutama pada pergaulan umum setelah masuknya kegiatan tambang. Selebihnya (29 %) menilai tidak ada perubahan perilaku pemuda dari pandangan moral dan etika. Diakui pula bahwa tampilan perilaku yang cenderung berubah masih cukup mencolok terutama di Desa Maluk. Sedangkan di Desa lainnya hampir tidak menunjukkan distorsi dengan perilaku umum masyarakat lokal. Itulah sebabnya, maka pada masa produksi tahun 2002 tidak terjadi konflik yang disebabkan benturan pada perilaku masyarakat tersebut. Dengan kata lain, keadaan perilaku masyarakat cenderung semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya, terlebih-lebih dibandingkan dengan masa konstruksi.

Tabel 17. Proporsi Responden Berdasarkan Penilaiannya Terhadap Prilaku dan Hal-Hal yang Terkait Dengan Moral/Etika Sosial Setelah Tambang, Tahun 2002.

No	Aspek Cerminan Moral dan Etika Sosial	Proporsi responden (%) berdasarkan penilaiannya terhadap Moral dan Etika Sosial		
		Meningkat	Tetap	Berkurang
1.	Perilaku umum pemuda	-	29	71
2.	Respek pada tokoh	3,5	43,1	53,4
3.	Prostitusi	86,0	14,0	-
4.	Pergaulan bebas	56,2	43,8	-
5.	Miras dan psikotropika	54,0	10,0	36,0
6.	Perjudian	42,0	25,4	58,6
7.	Perkelahian warga	42,0	42,0	16,0
8.	Pencurian	42,8	8,0	41,2

Adanya kecenderungan penurunan sikap dan perilaku di beberapa tempat tersebut antara lain disebabkan karena sebagian pemuda setempat mengenal berbagai variasi budaya luar yang dibawa oleh para pekerja pendatang. Selain itu, adanya budaya baru yang masuk secara drastis ke desa lingkar tambang menyebabkan sebagian kalangan muda seolah-olah mengalami *anomali*, dimana mereka telah meninggalkan budaya lokal, tetapi belum siap dengan budaya baru yang harus diikuti.

Timbulnya keberanian sejumlah pemuda mengganggu ketertiban umum pada saat tertentu dan terlibatnya mereka dalam berbagai kegiatan hiburan merupakan beberapa contoh perbuatan yang disebutkan responden. Tampilan perilaku yang demikian paling mencolok terjadi pada masa

konstruksi dan cenderung berkurang memasuki masa produksi saat ini.

Aspek lain sebagai dasar kajian moral dan etika ini adalah tingkat respek atau penghormatan masyarakat terhadap para tokoh, baik tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Tabel 17 di atas menunjukkan sekitar 53 persen responden menyatakan bahwa saat sekarang ini telah terjadi penurunan rasa hormat anggota masyarakat terutama kalangan muda terhadap para tokoh. Kejadian ini dinilai berbeda dengan masa sebelum kegiatan penambangan, dimana pada masa tersebut peran dan keberadaan tokoh masyarakat sangat menentukan tindakan umum masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat (key informan) mengakui adanya degradasi moral dan etika perilaku masyarakat yang tercermin pada tingkat respek tersebut. Para tokoh masyarakat menilai bahwa faktor penyebabnya adalah semakin meningkatnya kemampuan anggota masyarakat untuk memecahkan masalah sendiri dan merasa tidak perlu lagi terikat oleh batasan-batasan lokal yang pernah ada. Hal ini memungkinkan mengingat makin tingginya aksesibilitas wilayah dan terjadinya kontaminasi budaya yang cukup variatif.

Untuk aspek lain, seperti prostitusi, kenakalan remaja, perjudian, pergaulan bebas dan sejenisnya memang diakui meningkat kejadiannya pada masa konstruksi dan terdapat penduduk lokal yang terlibat dalam pelanggaran moral etika tersebut. Diakui oleh

semua informan kunci bahwa persoalan pelanggaran etika dan moral sosial ini sangat merisaukan masyarakat pada masa konstruksi berlangsung. Tidak adanya kesiapan sistem sosial lokal untuk menghambat terjadinya pelanggaran etika dan moral tersebut serta ketidak mampuan dalam memberikan sanksi dan sebagainya menyebabkan berkembangnya hal-hal negatif tersebut pada masa konstruksi.

Setelah berkurangnya jumlah pendatang yang berdomisili di dalam desa sekitar lingkaran tambang dan secara berangsur-angsur aktivitas ekonomi masyarakat berkurang, maka kejadian pelanggaran kaidah moral dan etika pergaulan berkurang secara drastis. Gerakan moral dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda lokal dengan berbagai sikap ketidak puasan yang disampaikan langsung maupun tidak langsung kepada pihak pemerintah dan perusahaan telah membuahkan hasil. Berbagai gerakan moral masyarakat untuk membasmi pelanggaran moral dan etik didukung oleh perusahaan dan pemerintah setempat. Akibatnya memasuki masa produksi hingga saat ini hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran etika dan moral jarang terjadi secara terbuka.

Meskipun demikian hal ini merupakan sesuatu yang laten dan tidak tertutup kemungkinan untuk dapat terjadi apabila peluang atau kesempatan untuk itu tersedia. Oleh sebab itu langkah paling arif adalah dengan menutup setiap kesempatan untuk terjadinya

tindakan yang mengarah kepada pelanggaran moral dan etika sosial.

2. Nilai Sosial

a. Sistem Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat pedesaan pada umumnya cukup kuat memegang sistem kepercayaan yang tidak saja terkait dengan Tuhan, tetapi juga kepercayaan ke bendaan dan supranatural yang terkait dengan alam sekitarnya. Hasil studi menunjukkan bahwa selain kepercayaan yang bermakna keimanan kepada Tuhan ternyata masyarakat desa lingkaran tambang memiliki keragaman kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kepercayaan tradisional tersebut cukup berkembang sebelum adanya kegiatan penambangan, seperti kepercayaan terhadap gejala alam, gejala pada flora dan fauna yang diyakini berhubungan dengan kejadian yang akan dihadapi manusia, atau kejadian alam tertentu. Dengan intensifnya interaksi dengan komunitas lain dan semakin rasionalnya pola pikir dan perilaku masyarakat terutama setelah mulainya kegiatan tambang menyebabkan sistem kepercayaan tersebut kurang diaplikasikan oleh masyarakat lokal. Kepercayaan mereka terhadap berbagai gejala alam, gejala pada flora dan fauna itu memang masih kuat, tetapi mulai berkurang dalam implementasinya. Hal ini diduga karena semakin banyaknya alternatif pilihan tindakan serta menyebarnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Perubahan kondisi kultural dan struktural masyarakat lokal memungkinkan

mereka untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan efisien.

Untuk mengetahui secara terperinci tentang hasil studi yang berkaitan dengan sistem kepercayaan tersebut, berikut ini disajikan aspek-aspek kepercayaan yang dikaji tersebut.

1) Pelaksanaan Ibadah dan Peran Tokoh Agama

Masyarakat asli di desa-desa lingkaran tambang umumnya masyarakat beragama Islam yang cukup patuh menjalankan ritual agamanya. Di setiap desa studi terdapat sejumlah tokoh agama yang menjadi panutan anggota masyarakat. Ditinjau dari pelaksanaan ibadah tampak bahwa sistem kepercayaan masyarakat masih kuat dan cenderung semakin baik setelah operasi penambangan berlangsung.

Pada masa sebelum masuknya perusahaan tambang, aktivitas ibadah ditempat ibadah umum (Masjid dan Surau) kurang begitu semarak. Masjid yang ada dimanfaatkan oleh sebagian kecil warga desa untuk melaksanakan ibadah utama (Sholat lima waktu) dan sholat Jum'at.

Kegiatan penanaman nilai-nilai dan akhlak yang masih nampak berlangsung sampai saat ini adalah pengajaran agama (pengajian) kepada anak-anak. Pengajaran tersebut sebagian berlangsung di Masjid-Masjid dan Musholla yang ada. Taman Pengajian Alqur'an (TPA) diakui semakin berkembang, demikian juga dengan kegiatan Majelis Ta'lim di setiap Desa.

Peraan tokoh agama sesungguhnya kurang begitu menonjol dalam komunitas yang ada di desa lingkar tambang, baik sebelum maupun sesudah masuknya perusahaan penambangan. Ketokohan para pemuka agama tidak terlalu signifikan seperti yang ada pada masyarakat di pulau Lombok. Hasil studi menunjukkan bahwa peran tokoh agama masih sebatas pada peran rutin seperti menjadi imam, khatib, dan pemimpin dalam upacara agama di masyarakatnya sendiri. Tidak diperoleh informasi tentang adanya tokoh agama yang memiliki pengaruh besar terhadap warga atau jamaahnya, sebagaimana lazimnya tokoh agama di daerah lain.

Dengan membandingkan antara kondisi sebelum penambangan dengan masa produksi tambang saat ini, secara kuantitatif menunjukkan sebanyak 54 persen responden menyatakan bahwa peran dan pengaruh para tokoh agama biasa-biasa saja, sekitar 27 persen menyatakan perannya cukup kuat, dan sisanya sekitar 19 persen menyatakan peran tokoh agama masih lemah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. NNT tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem kepercayaan masyarakat bila ditinjau dari peran para tokoh agama.

2) Kepercayaan masyarakat berkaitan dengan gejala alam

Kepercayaan berdasarkan gejala alam umumnya dikaitkan dengan kepentingan-an masyarakat dibidang mata pencaharian, seperti pertanian, kelautan /

nelayan dan sebagainya. Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat di Tongo, Sekongkang dan Goa diketahui ada beberapa gejala alam yang dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat setempat, yaitu : jenis dan posisi bintang, gempa bumi, dan gerhana.

Kepercayaan masyarakat sebagai suatu bentuk kearifan lokal ternyata tidak berkurang dengan hadirnya perusahaan tambang. Persoalannya adalah tidak pada kepercayaannya, tetapi lebih pada implementasinya dalam kehidupan. Diakui bahwa ada kecenderungan makin berkurangnya masyarakat lokal menggunakan kepercayaan tradisional tersebut untuk menentukan keputusan atau kegiatannya.

Secara kuantitatif, ditemukan bahwa dari sekitar 350 orang responden anggota masyarakat, terdapat sebanyak 73 persen menyatakan sistem kepercayaan berdasarkan gejala alam masih tetap ada dan dipanuti oleh masyarakat sejak masa lampau hingga beroperasinya tambang Batu Hijau saat ini. Selebihnya, yaitu sekitar 27 persen menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat berkurang pada saat ini.

Pada masa lampau sebelum masuknya perusahaan tambang memang para peladang, pencari hasil hutan, pemburu hewan dan nelayan senantiasa mengacu pada prakiraan berdasarkan gejala alam. Untuk menentukan kapan mulai merintis lahan atau menanam dan sebagainya penduduk lokal berpatokan pada keadaan alam terutama posisi bintang, yakni

bintang *nggala* (semacam gugus bintang orion) yang diamati posisinya sekitar pukul 19'00 sampai 20'00. Apabila bintang tersebut sudah sangat condong di arah barat berarti musim hujan akan segera datang. Penggunaan yang lebih lazim adalah di bidang kelautan atau kenelayanan, dimana setiap mereka melaut selalu mengamati posisi bintang tertentu.

Pada saat ini (setelah beroperasinya tambang) memang keyakinan tersebut tetap melekat kuat terutama pada kalangan orang tua, akan tetapi dalam penerapan usahanya lebih ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dikatakan bawa tidak dampak yang signifikan dari kegiatan penambangan terhadap perubahan sistem kepercayaan masyarakat setempat.

b. Upacara Adat dan Ritual

Kekayaan khasanah budaya pada masyarakat pedesaan salah satunya dapat terlihat dari aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan berbagai upacara adat dan ritual (acara seremonial). Hasil penelitian pada desa-desa lingkaran tambang menunjukkan dinamika pelaksanaan upacara adat dan ritual sedikit mengalami perubahan setelah berlangsungnya kegiatan penambangan. Diakui oleh sejumlah responden bahwa pelaksanaan berbagai upacara tersebut ditentukan oleh faktor kemampuan, kesempatan, dan perubahan orientasi nilai masyarakat lokal.

Dengan adanya kegiatan penambangan yang berdampak pada perubahan struktural dan kultural masyarakat tentunya berpengaruh terhadap orientasi nilai budaya masyarakat setempat. Meskipun demikian ternyata perkembangan orientasi nilai tersebut tidak berpengaruh luas pada nilai sosial dalam hal pelaksanaan upacara adat dan ritual masyarakat.

Pelaksanaan upacara adat dan ritual yang langsung terkait dengan obyek manusia masih tetap dilakukan sebagaimana kebiasaan sejak masa lalu, namun ada aspek-aspek yang dirasakan mulai berkurang.

Perubahan nilai berkaitan dengan upacara adat dan ritual ini adalah berkurangnya penyelenggaraan beberapa jenis upacara tersebut, seperti dalam kegiatan perkawinan dan khitanan. Bentuk acara seperti *Barodak*, *rapancar* dalam rangkaian perkawinan semakin jarang dilakukan. Acara *turun berang* yaitu acara pembersihan alat kelamin anak laki-laki yang baru selesai dikhitan dengan mengoles bulu ayam pada kelamin di air sungai yang mengalir (*bagogas*) sudah jarang ditemukan lagi karena khitanan sudah dilakukan oleh tenaga medis. Demikian juga dengan acara turun tanah (*turin tanaq*) untuk anak-anak yang baru mulai belajar berjalan sudah jarang dilakukan.

Berdasarkan hasil studi diketahui sebanyak 82 persen responden mengakui bahwa pelaksanaan

upacara adat ritual tersebut sudah sangat jarang, selebihnya (18 %) menyebutkan kadang-kadang masih dilakukan tergantung kepercayaan para orang tua.

Berkurangnya pelaksanaan beberapa upacara adat dan ritual tersebut menurut pengakuan sejumlah informan kunci tidak disebabkan oleh kehadiran PT. NNT, karena kecenderungan berkurang tersebut mulai sebelum masuknya PT. NNT. Berkurangnya pelaksanaan upacara seperti disebutkan di atas lebih disebabkan faktor perkembangan orintasi masyarakat sebagai akibat banyaknya penduduk lokal yang telah memiliki pendidikan cukup memadai dan telah terbukanya interaksi dengan daerah lain yang lebih maju. Kegiatan upacara ritual lain yang sudah jarang dilakukan oleh masyarakat adalah upacara *tulak bala*, yakni upacara yang ditujukan untuk menghilangkan atau menjauhkan diri dari kemungkinan mara bahaya yang diperkirakan akan terjadi. Upacara ini dilakukan dengan membakar garam disertai dengan menyoraki burung gagak yang berbunyi pada sore hari atau malam hari. Hal ini dilakukan karena menurut kepercayaan setempat apabila ada burung gagak berbunyi pada sore atau malam hari pertanda akan datangnya malapetaka atau musibah pada masyarakat setempat. Hilangnya nilai budaya ini tampaknya sejalan dengan makin langkanya burung gagak sebagai akibat perubahan habitat hidup dan ekosistem disekitar kawasan. Rusaknya hutan akibat penebangan hutan dan perladangan berpindah diduga

sebagai penyebab berubahnya ekosistem yang menyebabkan langkanya jenis burung gagak tersebut.

Diantara upacara yang lazim dan terkait dengan obyek manusia dan masih berlangsung sampai saat ini adalah : upacara perkawinan, upacara kematian, dan upacara pada daur kehidupan dan perkembangan manusia seperti potong rambut (*gunting bulu*), cuci perut (*biso tian*) pada masa kehamilam pertama, dan upacara khitanan., acara *turin tanaq* (turun tanah) dan sejenisnya.

Upacara adat dan ritual lainnya, seperti selamatn turun tanam, selamatn panen, selamatn ternak, usaha, selamatn rumah dan sebagainya memang diakui semakin berkurang, akan tetapi faktor penyebabnya adalah perkembangan dibidang teknologi usaha hususnya teknologi pertanian yang dikenal dan diadopsi sejak dua dekade terahir. Artinya, berkurangnya penyelenggaraan upacara selamatn tersebut tidak semata-mata pengaruh masuknya perusahaan tambang, tetapi karena berkembangnya orientasi masyarakat ke arah yang lebih rasional.

3. Pembauran Sosial

Kehadiran perusahaan tambang skala besar (PT. NNT) tentunya berimplikasi terhadap dinamika dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah karena datangnya para pencari dan pekerja tambang ke kawasan pertumbuhan (kawasan penambangan). Dengan datangnya para pekerja dari berbagai daerah akan terjadi pembauran

sosial dalam komunitas masyarakat lokal. Mengacu pada pendapat *Soedarsono N, (1999)*, dalam konteks pembauran biasanya pada masyarakat lokal akan terjadi tiga kemungkinan, yaitu: asimilasi dan akulturasi budaya (adaptif), anomali (orientasi mengambang) dan alienasi (keterasingan).

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pembauran sosial tersebut maka dalam studi ini dilakukan penilain terhadap aspek interaksi sosial, perilaku sosial yang diadopsi dan ditolak, serta persepsi / sikap terhadap masyarakat pendatang. Terhadap semua parameter tersebut secara umum menunjukkan variasi respon masyarakat lokal terhadap pembaurann dengan pekerja pendatang dari berbagai daerah di luar Kabupaten Sumbawa. Berikut disajikan hasil penelitian untuk parameter tersebut.

a. Interaksi dengan etnis lain

Sebelum masuknya perusahaan tambang ke Jereweh intensitas inter-aksi masyarakat lokal dengan masyarakat lain sangat rendah. Oleh sebab itu, sebagian besar responden tidak punya pengalaman inter-aktif dalam suatu sistem sosial dengan komunitas lain. Dengan adanya kegiatan tambang yang secara langsung memancing kehadiran tenaga kerja dari berbagai daerah asal dengan jumlah yang cukup besar dan tinggal dalam lingkungan masyarakat lokal, maka interaksi sosialnya menjadi intensif.

Intensitas dan variasi interaksi sosial yang paling tinggi terjadi antara tahun 1997 sampai tahun 2000, yakni selama masa konstruksi berlangsung. Berdasarkan pengalaman interaksi tersebut ternyata masyarakat lokal memiliki respek yang berbeda terhadap masyarakat pendatang berdasarkan daerah asalnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (lebih dari 60%) masyarakat lokal memiliki respek dan penilaian yang cukup baik terhadap pekerja pendatang dari daerah Jawa Barat, Jawa, Kalimantan dan Lombok.

Timbulnya respek yang cukup baik terhadap pekerja pendatang dari suku Jawa, Sunda, Kalimantan dan Lombok (Sasak) antara lain karena cenderung menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat lokal. Selain itu, faktor ketaatan beribadah, perilaku sopan santun dan keuletan bekerja merupakan aspek yang menimbulkan respek positif tersebut.

Tingginya intensitas interaksi mempercepat terjadinya pembauran sosial. Sebagian besar responden menyatakan bahwa keeluasaan dalam berbaur dalam satu sistem sosial lebih mudah dengan pekerja dari Lombok (Sasak). Banyak diantara pekerja dari Lombok tersebut dilibatkan dalam pekerjaan milik masyarakat lokal, seperti dibidang pertanian, dan pekerjaan fisik lainnya. Demikian juga penilainnya terhadap pekerja dari jawa dan Sunda

yang dipandang mudah diajak kerjasama dan sangat kreatif dalam berbagai hal. Implikasinya adalah banyaknya masyarakat lokal yang merasa termotivasi berperilaku sebagaimana perilaku pendatang dari Jawa dan Sunda.

Pembauran sosial di desa-desa lingkaran tambang sejak mulainya masa konstruksi hingga masa produksi saat ini terjadi dalam bentuk asimilasi dan akulturasi budaya. Pekerja pendatang dinilai oleh masyarakat lokal banyak yang larut dalam budaya masyarakat lokal, dan banyak pula anggota masyarakat lokal yang mencotoh pada budaya para pekerja pendatang tersebut. Berdasarkan uraian ini, maka dapat ditegaskan bahwa interaksi sosial di desa lingkaran tambang berlangsung cukup baik sehingga tidak menimbulkan distorsi sosial dalam proses pembaurannya.

Timbulnya intrik dan konflik-konflik kecil secara insidental, banyak disebabkan karena faktor kesempatan terserap pada lapangan kerja yang tersedia di perusahaan (PT.NNT) dan perusahaan penunjang lainnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat (responden) yang menyatakan bahwa pekerja pendatang lebih diutamakan menjadi pekerja di perusahaan dibandingkan warga setempat meskipun tingkat pengetahuan dan ketrampilan mereka tidak jauh berbeda.

Tingkat interaksi yang paling lemah dan cenderung saling asing adalah antara masyarakat lokal dengan pekerja pendatang dari daerah Sulawesi Utara, Madura dan Sumatera Utara. Karakter mereka dinilai keras dan kurang menghargai kearifan perilaku dan budaya masyarakat lokal. Kesan bahwa mereka lebih cenderung bebas dan kurang memperhatikan norma dan nilai-nilai sosial juga dipandang sebagai penyebab lambannya pembauran antara masyarakat lokal dengan pendatang dari Sulawesi dan Sumatera Utara tersebut. Kejadian sosial seperti disebutkan di atas sangat terasa pada masa-masa konstruksi dan cenderung mengalami penurunan drastis setelah kegiatan konstruksi berakhir.

b. Perilaku Positif dan negatif (ditolak) dari Masyarakat lain (Pendatang)

Dari hasil penelitian teridentifikasi beberapa perilaku masyarakat dari daerah lain (pekerja pendatang) yang dinilai positif dan ingin di adopsi oleh masyarakat lokal, yaitu :

- Semangat dan ketekunan bekerja (etos kerja)
- Keragaman keahlian/keterampilan
- Kreativitas dalam berusaha
- Kesederhanaan/hemat dan penuh perhitungan
- Ketaatan beribadah
- Keramahmataman (sopan dan respek)

Dalam pandangan masyarakat lokal, pekerja pendatang dari suku Jawa dan Sunda memiliki kelebihan-kelebihan, seperti semangat dan ketekunan bekerja serta kreativitas yang tinggi. Selain itu, mereka juga terkesan dengan sifat kesederhanaan, hemat, dan keramahtamahan yang umumnya banyak terdapat pada masyarakat dari Jawa, Jawa Barat, dan Lombok.

Selain perilaku yang ingin ditiru tersebut ada juga perilaku pekerja pendatang yang tidak disukai oleh kalangan tua masyarakat lokal. Diantara perilaku yang ditolak tersebut adalah :

- Kebiasaan minum minuman keras
- Kecenderungan pada pergaulan bebas (kurang memperhitungkan etika kesusilaan)
- Mengekspresikan perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan agama masyarakat lokal.
- Kurang menunjukkan nilai-nilai kesopnan dan keramahtamahan dalam komunitas baru.

c. Sikap terhadap Masyarakat Pendatang

Dari hasil studi diketahui bahwa persepsi dan sikap masyarakat lokal di desa lingkaran tambang terhadap masyarakat pendatang, terutama yang datang sebagai pekerja. Berikut disajikan sebaran responden berdasarkan sikap masyarakat lokal terhadap masyarakat pendatang.

Tabel 18. Sebaran Responden Berdasarkan Sikapnya Terhadap Masyarakat Pendatang Menurut Daerah Asalnya, 2002.

No	Etnis/ daerah asal	Obyek Sikap (berdasarkan tempat kerja)								
		Karyawan NNT			Karyawan Non NNT			Pekerja Lepas		
		S	N	TS	S	N	TS	S	N	TS
1	J a w a	33,2	13,4	53,4	54,5	29,2	16,3	58,3	28	13,7
2	Sunda / Jabar	37,2	29,1	33,7	61,1	9,7	29,2	63,1	19,4	17,5
3	Sumatera (Batak)	15,4	23,5	61,1	18,5	21,5	60,0	23,1	28,8	48,1
4	Sumatera lain	28,0	56,8	15,2	34,9	28,8	36,3	58,5	25,1	16,4
5	Kalimantan	28,8	40,0	31,2	34,5	31,4	34,1	51,7	24,0	24,3
6	Sulawesi	27,1	44,0	28,9	30,2	30,5	39,3	49,7	40,2	10,1
7	Mahuku dan Irian	22,2	28,2	49,6	34,9	28,8	36,3	45,1	42,0	13,9
8	Nusa Teng. Timur	19,4	27,7	52,9	30,2	30,5	39,3	49,7	40,2	10,1
9	Lombok / NTB	66,0	15,4	18,6	54,5	29,2	16,3	82,5	13,7	3,8

Keterangan : S = Setuju N = Netral TS = Tidak Setuju

Masyarakat lokal secara umum kurang setuju dengan hadirnya pekerja dari luar terutama untuk bekerja sebagai karyawan pada perusahaan tambang. Untuk pekerjaan sebagai karyawan tambang (PT. NNT) sebagian besar responden menunjukkan ketidaksetujuannya. Daerah asal pekerja yang lebih disetujui keberadaannya bekerja di PT. NNT adalah pekerja / karyawan dari Lombok dan sekitarnya, juga pekerja yang berasal dari Jawa dan Sunda. Masyarakat akan lebih setuju apabila pekerja pendatang bekerja di sektor pekerjaan yang bukan sebagai pekerja atau karyawan di perusahaan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa perusahaan PT. NNT senantiasa memberikan upah yang cukup besar kepada karyawannya, sementara masyarakat lokal merasa bahwa wilayah mereka yang dieksploitasi,

maka mereka yang lebih berhak atas berbagai efek ekonomi akibat eksplorasi tambang tersebut.

Kesetujuan dan ketidak setujuan masyarakat terhadap pendatang sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas juga sangat ditentukan oleh perilaku, tingkat asimilasi dan proses sosialisasi dari pekerja / karyawan pendatang tersebut. Masyarakat luar yang cukup baik keberterimaannya adalah pekerja dari Lombok , Jawa barat (Sunda) dan dari Jawa. Selain itu para karyawan dari Sumatera yang bukan dari Batak cukup bisa diterima.

4. Tataan Sosial Budaya

Untuk mengetahui perubahan tataan sosial budaya pada masyarakat di desa lingkaran tambang setelah beroperasinya tambang dilakukan pengukuran terhadap beberapa parameter, yakni : sistem gotong royong, sistem pelapisan sosial, kelembagaan sosial budaya, dan golongan masyarakat dan suku. Berikut disajikan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan informan kunci.

a. Sistem Gotong Royong

Pada masa lalu (sebelum masuknya perusahaan tambang PT. NNT) tataan sosial budaya yang cukup berkembang adalah Gotong royong dan tolong meneolong. Gotong royong dipandang sebagai salah satu bentuk interaksi antar warga. Kegiatan gotong royong tersebut berlangsung untuk berbagai aspek kehidupan, seperti : bercocok tanam, membangun

rumah, melaksanakan upacara adat dan ritual (perkawinan, kematian, dan upacara selamatan lainnya), membersihkan kampung, membangun fasilitas umum (masyarakat) dan sebagainya.

Terhadap aspek gotong royong ini, sebanyak 64 % responden menyatakan sangat berkembang sebelum adanya PT. NNT dan cenderung berkurang setelah masuknya PT. NNT. Selebihnya yakni 20 % menyatakan bahwa gotong royong tersebut tetap berkembang tapi bentuknya mengalami penyesuaian, sedangkan sisanya 16 % menyatakan bahwa gotong royong antar masyarakat tidak mengalami perubahan antara sebelum dengan setelah masuknya PT. NNT.

Menurunnya perkembangan kegiatan gotong royong pada berbagai aspek kehidupan masyarakat disebabkan oleh meningkatnya kesibukan warga dengan pekerjaan sehari-hari dan bergesernya orientasi mereka kearah yang lebih mandiri dan rasional. Selain itu, ada beberapa obyek yang dulunya bisa digotong royongkan tapi pada saat ini sudah kurang memungkinkan karena dianggap tidak efektif.

Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat (informan kunci) di Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Benete, Tiongo Sejorong diketahui bahwa pola interaksi kelompok sebagai basis gotong royong, seperti *bawa penulung* (membawa bahan makanan untuk membantu pesta perkawinan), *bawa perenok / ngenong* (membawa bahan makanan pada keluarga yang mengalami musibah kematian umumnya masih

tetap ada namun kadang-kadang divariasikan dengan mengganti barang bawaan tersebut dengan uang.

Sedangkan gotong royong dalam membangun rumah (*Basanata*) yang dahulu paling lazim dan tampak pelaksanaannya, setelah masuknya perusahaan menjadi sangat jarang dilakukan kecuali oleh masyarakat desa di perkampungan yang agak jauh dari pusat desa. Lebih lanjut, sejumlah informan kunci menambahkan bahwa untuk *Basanata* jika yang dibangun adalah rumah tradisional (rumah panggung) biasanya seluruh proses pembangunannya digotong royongkan. Tetapi jika yang dibangun adalah rumah batu, maka yang digotong royongkan adalah penyelesaian atapnya. Namun aktivitas gotong royong semacam ini sudah semakin jarang dilakukan saat ini.

Bentuk gotong royong yang juga sudah mulai berkurang adalah dibidang pertanian, seperti *Basiru* (mengerjakan sebidang lahan secara bersama-sama dan bergiliran antar penggarap lahan tanpa diupah). *Basiru* tersebut biasanya berlaku untuk pekerjaan pengolahan lahan, menanam, menyang sampai panen.

Berkurangnya gotong royong *Basiru* tersebut sesungguhnya disebabkan oleh diintrodusirnya paket teknologi pertanian (intensifikasi) seperti penggunaan benih unggul, dan peralatan mekanisasi pertanian. Praktik-praktik gotong royong tersebut semakin berkurang sejak dimulainya persiapan kegiatan penambangan oleh PT. NNT. Lebih dari 75%

responden mengakui hal tersebut berdasarkan berbagai alasan :

- Beroperasinya PT. NNT menimbulkan kurang tersedianya tenaga kerja sektor pertanian, karena tergiring ke lapangan kerja di perusahaan dan lapangan kerja ikutan lainnya di sekitar kawasan tambang.
- Terjadinya peningkatan pendapatan penduduk dan terbiasanya pekerja dengan sistem upah pada sektor usaha profesional yang ada terutama pada masa konstruksi.

Pada masa setelah mulainya aktivitas penambangan bentuk gotong royong dalam arti sumbangan tenaga secara sukarela banyak diganti dengan bantuan berupa materi atau uang. Keberhasilan sebagian besar penduduk bekerja di PT. NNT dan perusahaan lainnya menyebabkan sebagian besar waktu digunakan untuk bekerja sehingga tidak banyak waktu untuk kegiatan yang kurang produktif. Pada masa konstruksi masih berlangsung, pekerjaan gotong royong seperti disebutkan di atas oleh generasi muda justru dipandang sebagai kontra produktif. Kenyataan ini menggambarkan perubahan orientasi masyarakat dari spirit sosial ke arah yang dilandasi oleh materi (ekonomis). Rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam gotong royong untuk pengadaan pasilitas umum, seperti membangun prasarana ibadah, kebersihan lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan sebagainya antara lain karena

ada upaya dari pihak perusahaan (PT. NNT) untuk pengadaan berbagai fasilitas sosial tersebut secara terprogram. Artinya, PT.NNT membangun fasilitas dengan nilai tertentu yang dikerjakan oleh tenaga upahan baik dari penduduk lokal maupun pekerja dari daerah lain. Disisi lain, masyarakat lokal menilai bahwa pengadaan berbagai fasilitas dan bantuan kepada masyarakat adalah wujud dari kewajiban moral dan sosial terhadap masyarakat di lingkaran tambang. Implikasinya adalah masyarakat kurang bersedia berpartisipasi secara material dan fisik. Dampak lanjutannya adalah berkurangnya fungsi-fungsi lembaga gotong royong yang ada sebelumnya, yakni ketika masih tumbuhnya prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Dari pandangan akademis, sesungguhnya inilah aspek sosial yang kurang diperhitungkan dalam sistem pengembangan masyarakat PT. NNT.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kehadiran PT. NNT telah menyebabkan berkurangnya kegiatan gotong royong pada masyarakat di desa lingkaran tambang. Namun demikian, hal ini haruslah dicermati sebagai suatu eksese dari perubahan sosial yang sulit dihindari dalam masyarakat yang berubah dari pola pertanian subsisten ke arah usaha - usaha komersial yang berorientasi pasar (masyarakat pra industri).

b. Pelapisan Sosial.

Pelapisan sosial merupakan gejala umum dalam struktur masyarakat terlebih-lebih di pedesaan. Pelapisan sosial dapat dipandang sebagai potensi interaksi dalam suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui sesungguhnya pelapisan sosial dalam masyarakat desa lingkaran tambang kurang kentara, baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya kegiatan tambang PT. NNT. Lapisan sosial dalam bentuk Patron dan Klien sangat jarang dijumpai sejak masa lalu. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk asli di desa lingkaran tambang adalah masyarakat subsisten dengan level yang tidak jauh berbeda (seperti petani sawah dan peladang, serta sebagian kecil adalah nelayan). Pelapisan sosial berdasarkan ekonomi, berdasarkan asal keturunan dan lapisan berdasarkan status lainnya disebutkan kurang menonjol sejak dahulu. Perbedaan status sosial masyarakat yang ada sebatas kelas sosial yang dapat ditentukan atas dasar jenis pekerjaan dan status ekonomi. Dalam kelas sosial tersebut dikenal ada para pamong (pegawai, guru dan lainnya) dan bukan pamong. Selain itu dari status ekonomi dikenal adanya kalangan atau keturunan orang kaya dan orang biasa. Ditempat-tempat tertentu (Benete, Maluku, Tongo Sejong) sejak masa sebelum masuknya PT. NNT dikenal juga kelas sosial berdasarkan kependudukannya, yakni masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Kenyataan adanya kelas-kelas sosial tersebut tampaknya tidak berubah

setelah masuknya PT. NNT, bahkan dari hasil pengamatan diketahui bahwa kelas sosial berdasarkan daerah asal tersebut cenderung semakin kentara. Hal ini memungkinkan mengingat dalam penyerapan tenaga kerja pada perusahaan sejak masa konstruksi, isu-isu daerah asal ini cukup menonjol dan senantiasa menjadi sorotan khalayak sampai saat ini.

Hadirnya PT. NNT dan perusahaan pendukungnya sejak masa konstruksi menurut responden dan informan kunci dinilai telah membentuk kelas –kelas baru dalam struktur masyarakat desa-desa lingkaran tambang. Kelas sosial yang baru tersebut adalah kelompok mereka yang bekerja di PT. NNT dan perusahaan pendukungnya. Dalam kenyataannya, para pekerja (karyawan) perusahaan tersebut telah memiliki status sosial cukup tinggi dalam struktur sosial saat ini. Hal ini merupakan salah satu motivasi kuat masyarakat setempat untuk bisa bekerja di perusahaan. Implikasinya adalah banyak anggota masyarakat lokal yang sebelumnya telah memiliki pekerjaan tetap rela meninggalkan pekerjaannya untuk bekerja di perusahaan. Meningkatnya status sosial karyawan perusahaan di desa lingkaran tambang terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Indikasi ini mendukung pernyataan sebelumnya, bahwa orientasi masyarakat di desa lingkaran tambang telah bergeser dari spirit sosial kekerabatan menjadi spirit materialistik.

c. Kelembagaan Sosial Budaya

Hasil penelitian terhadap aspek kelembagaan menunjukkan adanya pengaruh dari keberadaan perusahaan terhadap ragam serta peran dan fungsi kelembagaan sosial budaya di desa-desa lingkaran tambang. Identifikasi keberadaan kelembagaan sosial di desa penelitian antara sebelum dan setelah mulainya kegiatan tambang (PT. NNT) disajikan pada Tabel 19 berikut :

Tabel 19. Keberadaan Lembaga Sosial Budaya Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002

No	Nama / Bentuk Lembaga	Keberadaan / Jumlah	
		Sebelum Tambang	Masa Produksi
1	Karang Taruna	6	7
2	PKK	6	7
3	Majelis Ta'lim	6	13
4	Kelompok Arisan	6	7
5	Gotong Royong	6	7
6	Perk. Olah raga	69	88
7	Perk. Kesenian	2	4
8	Pam swakarsa	-	4

d. Golongan Masyarakat dan Suku

Pada masa sebelum mulai masuknya perusahaan tambang (PT. NNT), penggolongan masyarakat dan suku kurang begitu menonjol. Penggolongan masyarakat umumnya atas dasar pekerjaannya. Struktur masyarakat pada masa itu cukup sederhana, yakni masyarakat pedesaan dengan corak subsisten. Penduduk di desa-desa lingkaran tambang dulunya didominasi oleh orang Samawa dan sebagian kecil

orang dari Lombok (terutama di Maluku, Mekarsari, Tatar, Beru / Jelenge). Penggolongan masyarakat dari aspek lain tidak menonjol karena sebagian besar penduduk sepuluh desa lingkaran tambang pada masa itu beragama Islam. Penggolongan yang ada, tapi tidak terlalu tampak adalah berdasarkan kelompok-kelompok keagamaan yang bernuansa politis, yakni kelompok Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lainnya. Khusus masyarakat di Desa Tongo Sejong sejak dahulu ada kesan penggolongan masyarakat, yakni penduduk dari Tongo Loka' dan asli Sejong.

Demikian juga halnya di Benete dan Maluku ada kesan sejak dahulu potensi penggolongan penduduk berdasarkan keaslian asal usulnya. Penduduk asli Benete kadangkala tidak mau menyebut penduduk di Dusun Tatar dan Singa sebagai orang Benete. Artinya terdapat penggolongan masyarakat Benete berdasarkan keasliannya, yakni penduduk asli Benete (yang berasal dari Jereweh) dan penduduk asli pendatang dari Tatar dan Singa yang mulai masuk sekitar tahun 1975 dengan suatu program Resettlement Departemen Sosial.

Sejak mulainya pekerjaan konstruksi penambangan (1997) golongan masyarakat dan suku menjadi lebih kentara. Persaingan dalam perebutan lapangan kerja, persaingan dalam peran dan fungsi sosial dan formal dinilai sebagai akselerator penggolongan masyarakat tersebut. Daerah asal dan keaslian status kependudukan sering menjadi isu dan

sumber konflik berkaitan dengan kesempatan memasuki lapangan kerja pada perusahaan yang ada. Pada masa konstruksi, kelompok suku sangat beragam, dimana hampir semua suku dominan di Indonesia ini dapat dijumpai orangnya pada masa konstruksi tersebut. Penggolongan masyarakat juga terasa berdasarkan pekerjaan dan status pekerjaannya pada perusahaan. Pekerja Newmont dan bukan Newmont, atau pekerja perusahaan dan bukan pekerja perusahaan dinilai sangat terasa pada masa konstruksi. Pada masa itu, selain menjadi motivasi pengembangan etos, tidak jarang penggolongan masyarakat tersebut menjadi potensi konflik terutama kaitannya dengan perebutan akses ke sumber-sumber ekonomi produktif.

Sejalan dengan berkurangnya aktivitas ekonomi di desa lingkaran tambang sejak mulai masa produksi, maka penggolongan masyarakat dan suku yang sempat merebak mulai berkurang. Masyarakat desa lingkaran kembali kepada komunitas awal dengan penggolongan masyarakat yang sederhana. Adanya kebijakan konsentrasi karyawan di Townsite dan Benete oleh PT. NNT sejak masa produksi menyebabkan kurangnya disparitas sosial dan penggolongan masyarakat maupun suku kurang begitu jelas. Menurut pendapat sejumlah pejabat formal di Kecamatan Jereweh, penggolongan masyarakat dan suku pada tahap produksi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pada masa sebelum masuknya PT. NNT. Lebih lanjut ditegaskan bahwa

hasil penelitian tidak menemukan implikasi yang signifikan atas pergeseran sosial sebagai akibat difreniasi masyarakat yang terjadi pada masa konstruksi.

5. Keamanan dan Ketertiban Sosial

Terjadinya pertumbuhan dan dinamika ekonomi pada suatu kawasan umumnya menimbulkan eksese sosial diantaranya adalah masalah keamanan dan ketertiban. Terjadinya aglomerasi penduduk pada kawasan pertumbuhan ekonomi menyebabkan munculnya kelompok-kelompok kepentingan dengan orientasi yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi dan kondisi keamanan ketertiban sosial semakin buruk setelah masuknya PT. NNT, tetapi dapat ditangani secara baik memasuki masa produksi, sehingga pada tahun 2002 gangguan keamanan dan ketertiban menurun drastis. Secara kuantitatif dapat ditunjukkan dengan sebanyak 77 persen responden menyatakan keamanan dan ketertiban sosial terganggu, namun kian berkurang pada saat produksi (tahun 2002). 15 persen menyatakan biasa-biasa saja, dan 8 persen menyatakan sangat terganggu (sangat meningkat gangguan keamanan dan ketertiban sosial) Indikasi meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban tersebut antara lain: 1) meningkatnya kriminalitas (perkelahian, pencurian, perjudian, prostitusi), 2) meningkatnya kenakalan remaja, dan 3) meningkatnya konflik sosial antar dan inter

komunitas. Gangguan keamanan dan ketertiban umumnya masih terjadi di desa Maluku, sedangkan desa lainnya relatif stabil. Terjadinya gangguan kamtibmas di Desa Maluku disebabkan karena Maluku sebagai pusat aktifitas ekonomi masyarakat dan komposisi penduduk yang berdomosili sangat heterogen. Nunculnya berbagai pusat pelayanan masyarakat, termasuk layanan hiburan dan keramaian menjadi faktor pendukung munculnya gangguan keamanan di Desa Maluku.

a. Tingkat Kriminalitas

Jenis-jenis tindak kriminal yang dinilai dominan oleh masyarakat lokal setelah masuknya PT. NNT adalah: perkelahian dan penganiayaan, pencurian, pengrusakan fasilitas dan ancaman lain. Penilaian masyarakat terhadap kejadian kriminal (perkelahian, penganiayaan, pencurian, dan ancaman sejenis) memang meningkat terutama pada masa konstruksi, tetapi berangsur-angsur berkurang memasuki masa produksi. Menurut pengakuan informan kunci dan aparat pemerintahan setempat, tindakan kriminalitas masih terjadi pada masa produksi tahun 2002 yakni di Desa Maluku. Tindakan kriminalitas tersebut umumnya pada tingkat biasa dan terjadi pada kalangan pemuda dalam pergaulan sehari-hari. Kriminalitas dengan kekerasan dan pemberatan diakui tidak terjadi pada masa produksi tahun 2002.

Tabel 20. Jenis dan Intensitas Kriminalitas Sebelum dan Sesudah Tambang, 1995 - 2002

No	Jenis Tindakan Kriminal	Frekuensi Sebelum tambang	Frekuensi di masa produksi tambang
1	Pencurian	6	16
2	Perampokan	-	-
3	Pelanggaran / kejahatan	2	7
4	Perkelahian	-	-

Hasil penggalian pendapat pada informan kunci didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kriminal pada masa konstruksi, yaitu :

- Keberadaan masyarakat/penduduk dari berbagai ragam daerah dan suku dengan karakter yang berbeda-beda, disertai spirit persaingan yang kental.
- Tersedianya sarana prasarana yang berfungsi sebagai media konflik, seperti Bar dan sejenisnya.
- Adanya oknum (perorangan atau kelompok) yang kurang puas atas situasi riil yang ada
- Terbukanya peluang (adanya faktor penarik) sebagai akibat lemahnya kontrol sosial dan kurangnya upaya kamtibmas.
- Tidak adanya sistem filter sosial berkaitan dengan kebebasan orang dengan status, identitas dan tujuan yang tidak jelas memasuki kawasan (desa lingkaran tambang).
- Terjadinya pergeseran orientasi masyarakat ke arah yang lebih bersifat materialistik.

Dengan adanya pengurangan lapangan kerja memasuki masa produksi yang diikuti dengan berkurangnya jumlah pekerja di berbagai perusahaan menyebabkan dinamika ekonomi secara umum mulai berkurang. Sejalan dengan itu, pada masyarakat lokal timbul kesadaran kritis yang konstruktif yang ditunjukkan dengan upaya / gerakan moral sosial mengurangi hal-hal negatif dalam lingkungan sosialnya. Menjelang akhir masa konstruksi muncul organisasi masyarakat yang anti minuman keras, anti prostitusi, anti pencurian dan anti kekacauan sosial. Tampaknya hal ini didukung oleh PT. NNT sehingga situasi keamanan dan ketertiban semakin kondusif dan tingkat kriminalitas dapat ditekan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa secara insidental terjadi tindak kriminal (anarkis) yang disinyalir sebagai akibat banyaknya pekerja yang sudah habis masa kontrak kerjanya pada berbagai perusahaan konstruksi dan PT. NNT. Kriminalitas yang terjadi pada masa produksi tersebut dinilai sebagai ungkapan kekecewaan sejumlah orang karena tidak dapat bertahan pada posisi pekerjaan yang ada atau pernah dimasukinya. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa terjadi proses *anomali* dalam sebagian masyarakat lokal, yaitu mereka telah meninggalkan budaya dan kebiasaan komunal/tradisional, sementara mereka juga belum mampu memasuki sistem budaya moderen yang dihadapinya.

b. Kerawanan Sosial dan Kenakalan Remaja

Tingkat kerawanan sosial dirasakan meningkat drastis setelah masuknya PT. NNT. Sebagian besar responden (87 %) mengungkapkan bahwa berbagai masalah sosial atau kerawanan bermunculan sejak tahap persiapan penambangan, pada masa konstruksi sampai pada masa produksi saat ini. Intensitas tertinggi terjadi pada masa konstruksi sebagaimana kejadian-kejadian lainnya. Beberapa bentuk kerawanan sosial yang dinilai meningkat selain pencurian adalah : konsumsi minuman keras (mabuk-mabukan), pergaulan bebas, prostitusi, perjudian, konflik terbuka dan konflik tertutup dalam masyarakat.

Kerawanan sosial seperti tersebut di atas cenderung menurun ragam dan intensitasnya setelah memasuki masa produksi. Menurut informan kunci, pada saat ini suasana ketertiban sosial telah pulih meskipun ada beberapa kasus kecil tapi dapat diatasi oleh masyarakat setempat. Praktik-praktik prostitusi, pergaulan bebas, minuman keras, perjudian dan sejenisnya dirasakan telah berkurang, meski tidak tertutup kemungkinan masih terjadi secara tertutup dan tidak mampu diidentifikasi oleh masyarakat.

Kenakalan remaja yang terjadi selama ini dinilai oleh masyarakat sebagai dampak minuman keras. Oleh sebab itu sejak berkurangnya ketersediaan minuman keras dan berkurangnya daya beli mereka maka aktivitas kenakalan remaja juga cenderung

berkurang pada masa produksi sekarang ini. Salah satu hikmah yang dapat dipetik oleh masyarakat lokal dari berbagai kerawanan sosial pada masa konstruksi adalah meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap pengaruh luar. Dari pengalaman tersebut ada hasrat dari tokoh dan kelembagaan sosial yang ada untuk segera melakukan restrukturisasi sistem sosial sesuai dengan kondisi setempat. Harapan yang muncul dari para tokoh masyarakat adalah menumbuhkan perangkat aturan setempat seperti awig-awig desa, kelompok pengamanan swakarsa dan sebagainya.

c. Konflik Sosial

Berdasarkan hasil penelitian teridentifikasi beberapa kecenderungan terjadinya konflik sosial. Konflik yang terjadi di desa lingkar tambang terutama pada masa konstruksi terjadi sebagai akibat benturan kepentingan sosial ekonomi dalam sistem hubungan kemasyarakatan. Dari hasil wawancara mendalam diketahui model konflik yang terjadi bersifat horizontal (antar masyarakat) dan konflik vertikal (konflik dalam struktur sosial yang ada).

Konflik horizontal yang terjadi selama ini dapat diklasifikasi dalam dua bentuk, yaitu : 1) konflik antar masyarakat lokal, dan 2) konflik masyarakat asli dengan pendatang, dan 3) konflik antar masyarakat pendatang. Sedangkan konflik vertikal yang relatif banyak terjadi adalah : 1) konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah, 2) konflik masyarakat

dengan pihak perusahaan (PT. NNT dan sub kontraktornya), dan 3) konflik karyawan perusahaan dengan manajemen perusahaan.

1) Konflik antar masyarakat lokal

Dari berbagai penuturan responden dan informan konci diketahui bahwa konflik antar masyarakat lokal terjadi sejak tahap persiapan konstruksi penambangan PT. NNT. Konflik antar masyarakat berawal dari merenggangnya hubungan antar anggota masyarakat akibat perbedaan kemampuan dan kepentingan dalam mengakses diri pada PT. NNT. Dari perbedaan kemampuan mengakses tersebut sering kelompok masyarakat tertentu menilai PT. NNT diskriminatif. Contoh kejadian yang terjadi di awal kegiatan tambang adalah perebutan penawaran tanah kepada PT. NNT dan perusahaan sub kontraktor lainnya. Potensi konflik tetap ada setelah kegiatan konstruksi berlangsung. Inipun terjadi sebagai akibat perbedaan kemampuan dalam mengakses diri ke PT. NNT dan perusahaan lainnya. Kalau ada penduduk setempat yang mampu mengakses perusahaan, seperti menjadi suplier barang atau jasa akan dinilai oleh warga setempat sebagai penghianat. Kalau ada warga masyarakat asli (lokal) yang sudah menduduki posisi cukup baik di perusahaan dan pada saat yang sama ada sebagian lain pelamar kerja lokal yang tertolak, maka karyawan tersebut juga dicaci sebagai penghianat yakni warga yang lupa dan tidak tahu diri. Konflik lain namun beskala kecil terjadi antar warga dalam persaingannya

merebut pasar / konsumen. Contoh kasusnya adalah konflik antar warga yang memiliki rumah sewaan, tetapi yang satu laris dan nilai sewa diperoleh tinggi, sedang yang lain tidak laku maka akan terjadi konflik antar warga. Konflik horizontal antar warga juga kadang terjadi karena perbedaan layanan yang diterima dari perusahaan, baik layanan langsung maupun melalui Yayasan yang ditetapkan PT. NNT sebagai penghubungnya dengan masyarakat dalam kerangka pengembangan masyarakat. Misalnya dalam satu dusun ada yang mendapatkan bantuan ternak dan ada yang tidak mendapat bantuan, maka hal ini menimbulkan konflik internal warga setempat. Akan tetapi konflik tersebut lebih bersifat tertutup sehingga jarang sekali muncul sebagai konflik terbuka yang dapat berpengaruh buruh pada sistem ketertiban masyarakat.

Intesitas konflik antar warga tersebut berkurang setelah konstruksi berakhir. Kalaupun terjadi konflik biasanya terkait dengan rasa ketidakadilan dalam menerima pelayanan dari PT. NNT. Hal ini disebabkan karena PT.NNT yang mulai produksi tidak membuka akses bagi kepentingan ekonomi tertentu. Langkah kebijakan dengan memberikan kepercayaan kepada Lembaga lokal untuk menghubungkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan PT. NNT dimaksudkan untuk mengurangi konflik vertikal. Namun dalam berbagai kasus yang terjadi justru potensi konflik horizontal yang muncul dari rasa ketidak adilan akibat sistem kerja Lembaga lokal yang diberi

kepercayaan. Sebagai contoh, dalam beberapa realisasi bantuan melalui YOP dinilai diskriminatif, karena ada warga yang menerima dan ada yang tidak menerima. Konflik yang ada pada masa produksi inipun jarang yang muncul menjadi konflik terbuka yang mengganggu ketertiban masyarakat. Namun sebagai bagian dari proses perubahan sosial, hal ini sangat perlu diantisipasi agar tidak terjadi akumulasi yang memicu timbulnya konflik terbuka yang dapat berdampak buruk pada ketertiban masyarakat.

2) Konflik masyarakat lokal dengan pendatang dan perusahaan.

Konflik masyarakat lokal dengan pendatang banyak terjadi pada masa konstruksi, sedangkan pada saat ini (masa produksi) relatif kurang. Persoalan dasar sebagai pemicu timbulnya konflik adalah masalah peluang dan kesempatan kerja pada perusahaan (PT. NNT dan sub kontraktornya). Faktor penyebab lain adalah persoalan remaja dan perbedaan sosio kultural antara masyarakat lokal dengan oknum anggota masyarakat dari etnis lain.

Hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci menyebutkan bahwa konflik masyarakat lokal dengan pendatang setelah memasuki masa produksi memang masih terjadi. Penghentian sejumlah pekerja pada perusahaan PT NNT senantiasa dicermati oleh pekerja atau mantan pekerja dari penduduk lokal. Bagi pekerja yang kecewa karena masa kontraknya dengan perusahaan berakhir terkadang melakukan advokasi dan propokasi bahwa

seolah-olah yang diputuskan masa kontraknya sebagian besar pekerja lokal. Sesungguhnya hal ini merupakan potensi konflik dan tidak jarang justru terbukanya konflik tersebut dalam bentuk reaksi ketidakpuasan masyarakat terutama mantan pekerja terhadap perusahaan yang masih beroperasi.

Beberapa isu yang bernuansa konflik terselubung pada masa produksi dari hasil studi mendalam adalah :

- Masyarakat lokal memperoleh informasi bahwa PT. NNT berupaya mempercepat eksplorasi tambang hingga dapat tercapai target sebelum masa kontrak karya berakhir.
- Berkembangnya isu bahwa aktivitas penambangan telah menimbulkan kerusakan kawasan hutan yang cukup luas dan akan mengganggu ekosistem kawasan yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitarnya.
- Berkembangnya isu bahwa dengan beroperasinya tambang terjadi pencemaran kawasan pesisir pantai dan laut (limbah tiling) yang berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan.
- Bahwa aktivitas penambangan telah menyebabkan rusaknya sistem hidrologis hutan yang menyebabkan berkurangnya debit air sungai dan air tanah. Disamping itu telah terjadi penurunan kualitas air sungai yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk berbagai aktivitas kehidupannya.

- Dengan berkurangnya serapan tenaga kerja di perusahaan, maka bagi masyarakat lokal relatif sulit kembali menekuni pekerjaan (mata pencaharian) tradisional, seperti mencari rotan, madu, berburu dan mencari hasil hutan lainnya.
- Meningkatnya arus lalu lintas keluar masuk desa-desa lingkar tambang diketahui dapat menyebabkan polusi udara yang berdampak pada makin rentannya masyarakat terhadap penyakit saluran pernafasan (ISPA).
- Bahwa selama ini masyarakat tidak banyak mengetahui sejauhmana kontribusi kongkrit dari adanya pembayaran royalti PT. NNT yang disalurkan melalui pemerintah. Masyarakat lokal tidak mau apabila mereka yang terkena dampak tetapi masyarakat atau daerah lain atau oknum tertentu yang banyak menikmati manfaat royalti tersebut.
- Kehadiran PT. NNT dan sub kontraktor lain sejak masa konstruksi dinilai telah menyebabkan harga kebutuhan pokok dan harga barang lainnya meningkat secara mencolok, sementara pendapatan masyarakat di masa produksi saat ini tidak mengalami peningkatan.
- Perubahan eskalasi / orientasi budaya masyarakat lokal menyebabkan berubahnya keseimbangan ekonomi masyarakat (rumah tangga) dan keseimbangan tersebut sulit diarahkan kepada kondisi keseimbangan awal.

- Ada persepsi yang berkembang pada anggota masyarakat bahwa kelak apabila eksplorasi tambang selesai akan tersisa lubang galian besar dan akan menjadi kubangan besar dari bekas penambangan.
- Ada penilaian dari sejumlah petani produsen sayur dan buah lokal bahwa mereka tidak mendapatkan dispensasi / prioritas pemasaran ke PT. PBU yang merupakan kontraktor katering PT. NNT disebabkan adanya kerjasama PBU dengan suplayer sayur dan buah dari daerah lain seperti dari Jawa, Bali dan Lombok.
- Dengan sistem konsentrasi akomodasi karyawan PT. NNT di Townsite dan Benete dinilai sebagai sikap eksklusive (sikap meisahkan diri dari lingkungan sosial masyarakat lokal) terlebih-lebih dengan pengamanan yang sangat ketat memasuki kawasan pemukiman di Townsite dan Benete.
- Kredibilitas dan kinerja Yayasan Olat Parigi (YOP) sebagai suatu lembaga lokal yang membantu PT. NNT dalam rangka pengembangan masyarakat dinilai tidak baik (tidak memuaskan masyarakat sasaran).
- Berkembangnya isu bahwa banyak anggota masyarakat yang terkena dampak kontaminasi arsenik yang diketahui dari beberapa jenis keluhan penyakit.

Isu atau problematika sebagaimana hasil studi yang disebutkan di atas menggambarkan persepsi sebagian masyarakat. Dipandangny hal tersebut

sebagai potensi konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan karena hal-hal (isu) tersebut dianggap sebagai pembenaran bahwa kehadiran PT. NNT merugikan kepentingan masyarakat lokal, terutama mereka yang terbatas kemampuannya membuka akses dengan perusahaan.

Dalam pandangan sebagian informan kunci yang diwawancarai secara mendalam bahwa isu-isu tersebut sering menjadi bahan pemberitaan dalam media cetak dan elektronik sehingga dianggap tingkat kebenarannya cukup tinggi.

6. Infrastruktur Sosial Budaya

Ketersediaan infrastruktur sosial budaya di desa-desa lingkar tambang setelah masuknya PT. NNT cukup berkembang. Hal ini sejalan dengan dengan perkembangan budaya dan kebutuhan masyarakat terutama guna mengeliminir sekecil mungkin dampak negatif yang terjadi akibat beroperasinya tambang PT. NNT. Diakui oleh semua tokoh formal dan informal bahwa sarana prasarana (infrastruktur) sosial budaya meningkat terutama dalam hal : jenis dan jumlahnya, keadaan / kualitas infrastruktur dan kelengkapan penunjangnya. Selain itu diakui pula bahwa pemanfaatan infrastruktur tersebut juga meningkat sampai pada masa produksi saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan meluasnya fungsi dan intensitas pemanfaatan prasarana peribadatan, prasarana olah raga, prasarana kesehatan, prasarana olah raga,

keamanan lingkungan dan prasarana pelayanan umum lainnya.

a. Ketersediaan Infrastruktur Sosial Budaya

Memasuki masa produksi yakni sekitar tahun 2000 ketersediaan berbagai prasarana umum meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di sejumlah desa pemekaran baru seperti Benete, maluk, Tongo Sejong, Aik Kangkung (SP 1) dan Tatar (SP 2) dilakukan pembangunan baru dan atau renovasi sejumlah prasarana peribadatan terutama Masjid desa. Di desa lama (Beru, Belo, Sekongkang Atas dan Sekongkang Bawah) dilakukan perluasan dan renovasi. Tentunya hal ini sesuai dengan berkembangnya kebutuhan prasarana ibadah tersebut yang peningkatan kebutuhan mulai dirasakan pada masa konstruksi.

Sebelum masuknya PT. NNT prasarana ibadah yang tersedia di tiap desa berupa Masjid dan Langgar (Musholla). Kondisi fisik sejumlah prasarana ibadah tersebut relatif baik namun masih dalam katagori sederhana, sebagaimana yang ada di Desa Goa, Beru, Belo, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah dan Tongo. Prasarana peribadatan bagi pemeluk agama / kepercayaan lain tidak tersedia sama sekali.

Pada masa produksi saat ini (2002) sejumlah masjid telah selesai di bangun seperti Masjid Maluk. Selain pembangunan baru, hampir semua masjid di desa lingkaran tambang direnovasi untuk meningkatkan kapasitas tampung jamaah. Masjid yang telah dibantu

renovasinya antara lain Masjid Belo, Masjid Beru, Masjid Jelenga, Masjid Benete, Masjid Sekongkang Atas, Masjid Sekongkang Atas, dan Masjid Tongo Sejorong.

Tabel 17. Jenis dan Jumlah Prasarana Sosial Budaya di Desa Lingkar Tambang Sebelum dan Sesudah Tambang, 1995 - 2002

No	Jenis Infrastruktur Sosbud	Jumlah Sebelum tambang	Jumlah Sesudah Tambang
1	Taman Kanak-Kanak	2	8
2	Sekolah Dasar	13	13
3	SLTP	1	4
5	Madrasah/ Sekolah Agama	1	1
6	Masjid	13	19
7	Langgar	6	11
8	Lapangan Sepak Bola	9	11
9	Lapangan Bola Voli	19	22
10	Lapangan Badminton	12	10
11	Lapangan Sepak Takraw	15	17
13	Puskesmas	1	3
14	Puskesmas Pembantu	1	5
15	Posyandu	6	21
16	Tempat praktik Dokter	1	3
17	Kantor Polisi	1	2

Renovasi tersebut selain mempertimbangkan kapasitas tampung jamaah juga menjadikan tampilan bangunan lebih indah dan representatif untuk ibadah masal. Selain pengembangan prasarana ibadah berupa masjid, PT. NNT juga membantu pembangunan dan penambahan fasilitas pada madrasah di Tongo Sejorong.

Selain pengembangan fisik, juga dilakukan penambahan sejumlah alat dan kelengkapan masjid seperti pengeras suara, fasilitas air bersih dan bantuan bagi da'ī yang memberikan pengajaran agama kepada masyarakat. Dengan demikian TPA dan Majelis Ta'lim serta aspek kemakmuran masjid juga semakin berkembang di beberapa desa lingkaran tambang pada masa produksi tersebut. Sejumlah informan kunci menuturkan bahwa saat sekarang warga masyarakat dapat mendengar kumandang azan setiap masuk waktu Sholat. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum masuknya tambang, dimana kumandang azan terdengar sewaktu-waktu tertentu.

Selain prasarana ibadah terjadi juga perkembangan pada prasarana pendidikan dan sosial. Sebagian besar Sekolah dasar (SD) telah mengalami perbaikan dan penambahan perlengkapan proses belajar mengajar atas bantuan PT. NNT. Selain bangunan sekolah, diberikan juga bantuan perbaikan perumahan guru. Selain Sekolah dasar, Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) di SP-1 direnovasi dan dilakukan penambahan ruang kelas. Kebutuhan pengadaan dan peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana diuraikan di atas dinilai sebagai suatu kebutuhan riil masyarakat. Harapan masyarakat untuk terus meningkatkan sumberdaya manusia tampaknya relevan dengan program perbaikan dan pengadaan prasarana pendidikan tersebut.

b. Pemanfaatan Infrastruktur Sosial Budaya

Pemanfaatan infrastruktur sosial budaya dinilai meningkat pesat setelah mulai beroperasinya tambang. Beberapa event/kegiatan sosial budaya yang merupakan basis tradisi masyarakat lokal lebih sering dipentaskan dan dipertandingkan. Keterlibatan masyarakat juga dinilai masih tinggi dalam berbagai kegiatan sosial budaya.

Ditinjau dari pemanfaatan infrastruktur sosial budaya secara umum diketahui bahwa terjadi peningkatan secara mencolok. Semua informan kunci menyatakan pemanfaatan sejumlah prasarana sosial budaya semakin meningkat terutama setelah mulai beroperasinya perusahaan tambang. Beberapa alasan yang disebutkan tokoh masyarakat dalam menggambarkan peningkatan pemanfaatan prasarana sosial budaya tersebut adalah :

- 1) Semakin meningkatnya minat sekolah terutama anak-anak usia sekolah sejalan dengan bertambahnya prasarana sekolah.
- 2) Adanya berbagai bantuan perusahaan pada sekolah untuk perlengkapan dan perbaikan proses belajar mengajar. Termasuk yang disebutkan adalah sejumlah bea siswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa khususnya yang berasal dari desa lingkar tambang.
- 3) Semakin makmurnya kegiatan ibadah rutin di seluruh Masjid sejalan dengan makin baiknya fasilitas ibadah didukung dengan perlengkapan

masjid, seperti pengeras suara, fasilitas tempat berwudhu, serta pengurus masjid.

- 4) Semakin meningkatnya berbagai kegiatan olah raga di setiap desa lingkar tambang. Hal ini dapat terjadi sejalan dengan terorganisirnya sejumlah klub olah raga terutama klub sepak bola.
- 5) Semakin sadar dan meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang memanfaatkan Puskesmas, dan praktik dokter sebagai tempat berobat. Hal ini sejalan dengan makin lengkapnya perlengkapan, makin membaiknya sistem pelayanan di setiap Puskesmas.

Berdasarkan penilaian sejumlah tokoh masyarakat didukung oleh hasil observasi di sejumlah sarana prasarana sosial budaya yang ada, maka dapat ditegaskan bahwa keberadaan perusahaan tambang telah membantu meningkatkan ketersediaan prasarana disertai sarana pendukungnya. Dengan demikian, maka tingkat pemanfaatan prasarana sosial budaya oleh masyarakat juga meningkat dengan pesat.

D. Perkembangan Kesehatan Masyarakat pada Awal Masa Produksi

Dinamika kehidupan masyarakat menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu meningkatkan produktifitas demi kelangsungan kehidupannya. Salah satu aspek yang menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah menyangkut aspek kesehatannya. Masyarakat yang

berada di sekitar lingkaran tambang PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) khususnya yang berada di Kecamatan Jereweh dan Sekongkang telah mengalami perubahan dalam hal kesehatan masyarakatnya. Berbagai hal yang menyangkut aspek kesehatan masyarakat di sekitar lingkaran tambang akan dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kesehatan masyarakat.

1. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan berbagai hal baik itu menyangkut tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta unsur penunjang lainnya.

a. Prasarana Kesehatan

Pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan sebelum dimulainya kegiatan eksplorasi tambang PT. NNT hanya dilayani oleh Puskesmas Jereweh yang terletak di Desa Beru Kecamatan Jereweh. Setelah mulai tambang berproduksi seiring dengan pemekaran wilayah menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang maka di Desa Maluk telah dibangun pula sebuah Puskesmas.

Puskesmas Maluk melayani masyarakat pada Tujuh Desa yaitu Desa Benete, Maluk, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Tongo Sejong, SP-1 Aik Kangkung, dan SP-2 Tatar.

Untuk memperlancar fungsi pelayanan kesehatan masyarakat maka baik pada Puskesmas Jereweh maupun Puskesmas Maluku mengadakan Puskesmas Pembantu (Pustu) masing-masing satu di Jereweh dan tiga di Maluku, demikian pula halnya dengan Poliklinik Desa dan Posyandu.

Diharapkan dengan adanya Pustu, Polindes, Posyandu dan rumah pondokan bidan maka kecepatan penanganan pasien lebih terjamin. Jika pada tingkat pelayanan ini belum dapat ditangani, maka pasien akan di rujuk ke Puskesmas, dan seterusnya ke RSUD Kabupaten Sumbawa maupun ke RSUD Mataram.

b. Tenaga Kesehatan

Peranan tenaga kesehatan baik medis maupun non medis merupakan salah satu faktor utama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tenaga kesehatan yang ada pada Puskesmas hanya 20 orang yang melayani penduduk sebanyak 10.699 jiwa. Dari 20 orang tersebut hanya 18 orang tenaga medis yang berarti bahwa rasio antara penduduk dan tenaga medis adalah 1 : 594 yang artinya bahwa setiap tenaga medis melayani 594 orang penduduk. Kondisi ini tentu sangat kurang kondusif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, apalagi jarak desa terjauh sekitar 40 kilometer yaitu di Desa SP I dan SP II Tongo.

Meskipun demikian, kondisi tenaga kesehatan ini cukup terbantu dengan keberadaan dukun bersalin

berjumlah 45 orang yang tersebar di semua desa di Kecamatan Jereweh, sehingga masalah persalinan relatif dapat tertangani. Disamping itu Puskesmas sering juga memberikan penyuluhan terhadap para dukun bersalin tersebut.

Sejak tahun 2001 seiring dengan pemekaran wilayah Kecamatan Jereweh menjadi Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang, maka Puskesmas bertambah satu yaitu Puskesmas Maluk yang terletak di Desa Maluk Kecamatan Sekongkang. Dengan bertambahnya satu Puskesmas maka pelayanan kesehatan masyarakat semakin luas jangkauannya. Puskesmas Jereweh tinggal melayani tiga desa sedangkan Puskesmas Maluk melayani tujuh desa. Adapun kondisi tenaga kesehatan baik sebelum tambang maupun setelah tambang berproduksi dapat dilihat pada *Tabel 22*.

Dibanding dengan rasio antara tenaga kesehatan dan penduduk tahun 1996 yaitu 1 : 594, maka pada tahun 2001 di Puskesmas Jereweh hanya mengalami penurunan yang relatif sedikit yaitu menjadi 1 : 569. Artinya setiap tenaga medis pada tahun 2001 di Puskesmas Jereweh melayani sekitar 569 orang penduduk, sementara di Puskesmas Maluk hanya melayani 269 orang penduduk setiap tenaga medis.

Tabel 22. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan dengan Penduduk di Puskesmas Jereweh dan Puskesmas Maluk Tahun 2001.

No	Tenaga Kesehatan	Sebelum Tambang (1996)	Setelah Tambang Berproduksi	
			Puskesmas Jereweh	Puskesmas Maluk
1.	Dokter Umum	2	1	1
2.	Dokter Gigi	-	-	1
3.	Bidan Desa	6	11	6
4.	Sanitarian	-	1	1
5.	Perawat	10	11	6
6.	Pembantu Ahli Gizi	-	-	1
7.	Analist Kesehatan	-	-	1
8.	Administrasi	2	2	6
Jumlah		20	26	24
Jumlah Penduduk		10.699	13.665	4.849
Rasio Tenaga Kesehatan dengan Penduduk		1 : 594	1 : 569	1 : 269

Sumber : Laporan Kegiatan Puskesmas tahunan Maluk dan Jereweh Tahun 2001

Kondisi ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Demikian pula dengan ragam tenaga medis yang melayani, dimana sebelum dimulainya eksploirasi tambang PT. NNT hanya dilayani oleh Dokter umum, Perawat dan Bidan. Tetapi setelah tambang berproduksi keragaman tenaga medis menjadi banyak antara lain dengan penambahan dokter gigi, sanitarian, dan analist kesehatan. Sehingga layanan kesehatannya terhadap masyarakat semakin meningkat kualitasnya.

Hampir semua desa terdapat seorang petugas bidan desa, kecuali di Desa SP-2 Tatar bidannya

jarang datang ke desa tersebut sehingga jika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan mereka berobat ke Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa SP-1 Aik Kangkung yang jaraknya cukup jauh sehingga memakan waktu yang relatif lama.

Keberadaan dukun bersalin di desa sangat membantu pelayanan kesehatan terutama untuk persalian, di wilayah Kecamatan Sekongkang terdapat 24 dukun yang terdiri dari terlatih 8 orang dan yang belum terlatih sebanyak 16 orang. Sementara di Kecamatan Jereweh terdapat 24 dukun yang terdiri dari terlatih 11 orang dan yang belum terlatih sebanyak 13 orang.

Eksistensi dukun ini cukup diperlukan oleh sebagian masyarakat terutama untuk persalinan karena mereka masih percaya terhadap kemampuan dukun tersebut. Disamping itu untuk melahirkan bayi sebagian juga masih menggunakan jasa dukun disamping karena murah biayanya juga lebih dekat dengan tempat pemukiman penduduk. Meskipun demikian khusus untuk dukun bersalin beberapa diantaranya telah dilatih oleh para bidan desa, sehingga kemampuannya juga semakin membaik. Jika dengan jasa dukun keadaan kesehatannya belum baik barulah mereka pergi ke bidan atau mantri kesehatan setempat.

Ada keluhan masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Maluk, dimana dokter yang bertugas pada pagi hari juga membuka praktek di Puskesmas

dengan biaya yang relatif mahal, sementara masyarakat jika ingin berobat ditanya dulu apakah berobat Puskesmas atau dokter. Jika berobat Puskesmas maka pelayanannya menggunakan obat-obatan yang terbatas tetapi jika dengan dokter pelayanannya menggunakan obat-obatan yang patent.

2. Perkembangan Penyakit

Perkembangan penyakit dimasyarakat dari tahun ketahun pada umumnya memiliki pola penyebaran yang sama, kecuali jika sewaktu-waktu ada wabah penyakit yang menyerang. Berikut ini akan dijelaskan perkembangan jenis penyakit yang sering diderita oleh masyarakat lingkaran tambang baik sebelum mulainya beroperasi PT. NNT maupun setelah berproduksinya PT. NNT.

a. Jenis Penyakit Utama

Berdasarkan data yang diterbitkan BPS Sumbawa yang bersumber dari Puskesmas Jereweh pada tahun 1996, maka diperoleh informasi bahwa urutan jenis penyakit yang paling sering diderita mulai dari yang paling banyak kasusnya adalah *ISPA, Malaria, penyakit kulit, Conjunctivitas, Diare, TB Klinis, Tukak Lambung, Gigi/Mulut, Kecelakaan, dan Asma*.

Tidak diperoleh data mengenai jumlah penderita masing-masing jenis penyakit tersebut. Namun ini dapat menggambarkan bahwa penyakit utama yang sering diderita oleh masyarakat sekitar lingkaran tambang sebelum mulainya beroperasi PT. NNT adalah

penyakit Inferksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) kemudian malaria dan penyakit kulit.

Sementara itu setelah berproduksinya PT. NNT, baik di Puskesmas Jereweh maupun Puskesmas Maluk jenis penyakit utama yang paling banyak penderitanya adalah penyakit ISPA. Kondisi ini menggambarkan bahwa baik sebelum maupun setelah berproduksi penyakit ISPA masih mendominasi penyakit utama yang diderita masyarakat di sekitar lingkaran tambang, dan untuk jelasnya dapat dilihat pada *Tabel 23*.

Penyakit malaria yang sebelum tambang (1996) menempati urutan kedua turun menjadi urutan keempat di Puskesmas Jereweh dan urutan kelima di Puskesmas Maluk. Penurunan peringkat penderita penyakit malaria ini disebabkan oleh program kegiatan penyemprotan oleh PT. NNT yang melakukan penyemprotan secara berkala di semua wilayah di sekitar lingkaran tambang, sehingga nyamuk dapat ditekan populasinya.

Sementara itu penyakit kulit pada Puskesmas Jereweh urutannya turun menjadi kelima tetapi di Puskesmas Maluk meningkat menjadi urutan kedua. Berdasarkan informasi dari bidan Desa Sekongkang Atas bahwa pada tahun 1998 (saat konstruksi) banyak terjadi kasus penyakit kelamin dengan intensitas rata-rata 2-3 kasus/minggu, sebagian besar penderita penyakit kelamin adalah karyawan yang berasal dari luar Sumbawa. Namun sekarang sudah tidak ada lagi

seiring dengan berkurangnya karyawan dari para kontraktor PT.NNT.

Tabel 23.. Sepuluh Jenis Penyakit Utama Yang Sering Diderita Oleh Masyarakat Sekitar Lingkar Tambang, Tahun 2001.

No.	Jenis Penyakit Utama	Puskesmas Jereweh	No .	Jenis Penyakit Utama	Puskesmas Maluk
1.	ISPA	2.467	1.	ISPA	602
2.	Penyakit lain-lain	1.332	2.	Kulit Infeksi	541
3.	Penyakit Sistem Otot dan Jaringan	1.182	3.	ISPB	411
4.	Malaria	899	4.	Sistim Otot, Jaringan Pengikat	390
5.	Penyakit Kulit Alergi	349	5.	Malaria Klinis	284
6.	Diare	531	6.	Kulit Alergi	257
7.	Kecelakaan	471	7.	Mata	49
8.	Sakit Mata	307	8.	Tonsilitis	36
9.	Asma	133	9.	Asma	24
10.	Disentri	132	10	Infeksi Telinga Tengah	21
Jumlah		7.803	Jumlah		2.615

Sumber : Laporan Kegiatan Puskesmas Jereweh dan Maluk Tahun 2001.

b. Tempat berobat

Jika ada anggota keluarga yang sakit, maka ada empat alternatif tempat berobat yaitu ke Dokter Praktek, Puskesmas, Bidan, dan Dukun. Keputusan penentuan tempat berobat sangat dipengaruhi oleh penghasilan keluarga, jarak tempat berobat, dan derajat kegentingannya. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi perubahan tempat berobat dimana sebelum tambang terdapat 2,87 % yang berobat ke dokter

praktek (dokter Puskesmas yang berpraktek sore hari) meningkat menjadi 18,05 % setelah tambang. Demikian pula yang berobat ke bidan meningkat dari 0,57 % sebelum tambang menjadi 8,02 % setelah tambang berproduksi. Namun sebaliknya yang berobat ke dukun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 34,67 % sebelum tambang menjadi hanya 10,03 % setelah tambang berproduksi.

Tabel 24. Tempat Berobat Masyarakat Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.

No	Desa	Tempat Berobat							
		Sebelum Tambang				Setelah Berproduksi			
		DP	P	B	D	DP	P	B	D
1.	Benete	1	14	0	20	8	25	2	1
2.	Maluk	0	39	0	28	18	40	1	6
3.	Sekongkan g Atas	1	36	0	13	10	20	14	6
4.	Sekongkan g Bawah	0	4	0	15	5	8	3	3
5.	Tongo Sejorong	1	11	1	11	3	14	6	1
6.	Aik Kangkung	0	21	0	4	1	21	1	2
7.	Tatar	0	19	0	6	3	21	0	1
8.	Goa	4	19	1	14	8	19	1	11
9.	Beru	3	25	0	5	4	25	0	4
10	Belo	0	28	0	5	3	30	0	0
Jumlah		10	216	2	121	63	223	28	35

Catatan : DP= Dokter Praktek P = Puskesmas B = Bidan D = Dukun

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatannya sudah mengalami peningkatan karena sudah

mempertimbangkan segi kualitas pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dalam hal keputusan untuk menentukan tempat berobat, maka sebagian besar ditentukan secara bersama-sama atau musyawarah antara Bapak dan Ibu, kemudian oleh Bapak dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

c. Kunjungan Pasien

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspek kesehatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini terlihat dari jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas. Pada tahun 1996 jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas sebanyak 7.247 orang kemudian meningkat menjadi 15.681 pasien (Puskesmas Jereweh 9.456 orang dan Puskesmas Maluk 6.225 orang) pada tahun 2001 atau mengalami peningkatan sebesar 116,38 %. Artinya dalam kurun waktu lima tahun jumlah pengunjung Puskesmas meningkat lebih dari dua kali lipat..

Tabel 25. Jumlah Kunjungan Pasien Puskesmas Sebelum dan Setelah Tambang, 1996 - 2001.

No	Jenis Kunjungan	Sebelum Tambang (Puskesmas Jereweh)	Setelah Tambang	
			Puskesmas Maluk	Puskesmas Jereweh
1.	Umum/Bayar	3.581	9.049	5.082
2.	Askes/PHB	1.175	204	734
3.	Non Kartu Sehat	-	93	101
4.	Kartu Sehat	2.491	110	308
	Jumlah	7.247	9.456	6.225

Sumber : Kec.Jereweh Dalam Angka, 1996 ; Laporan Puskesmas Maluk dan Jereweh, 2001.

Pada tabel tampak bahwa peningkatan kunjungan pasien umum atau yang membayar sangat signifikan peningkatannya, sementara yang menggunakan askes/PHB menurun jumlahnya demikian pula yang menggunakan kartu sehat atau yang tidak bayar. Peningkatan jumlah kunjungan pasien ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran untuk biaya kesehatan, tingkat kesadaran kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta lancarnya transportasi.

d. Program Kesehatan

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa penyakit malaria merupakan penyakit utama setelah ISPA yang paling banyak diderita saat sebelum tambang berproduksi, sehingga PT.NNT telah berupaya menekan populasi nyamuk malaria dengan cara melakukan penyemprotan secara berkala. Pada awal-awal konstruksi frekuensi penyemprotannya rata-rata sekali seminggu, yang hasilnya cukup signifikan menekan populasi nyamuk. Akan tetapi saat ini frekuensi penyemprotan hanya sekali sebulan bahkan beberapa dusun menyatakan kadang-kadang dua sampai tiga bulan sekali.

Selain penyemprotan, PT. NNT secara aktif juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap perkembangan penyakit malaria dengan programnya yang dikenal dengan *malaria control*. Melalui kegiatan ini secara berkala dan sistimatis PT. NNT melakukan

pemantauan langsung dengan mengambil sample darah bagi para penderita yang diduga mengidap penyakit malaria untuk dilakukan uji laboratorium. Setelah diketahui hasilnya maka dilakukan tindakan kuratif dan preventif untuk mencegah meluasnya penyakit malaria ini. PT. NNT juga melakukan program kelambunisasi dengan cara memberikan bantuan cuma-cuma kelambu kepada masyarakat sekitar lingkaran tambang

Untuk kesehatan ibu dan anak, PT.NNT dengan bekerjasama dengan Yayasan Keluarga Sejahtera Seluruh Indonesia (YKSSI) melakukan penyuluhan kesehatan, pemberian makanan tambahan lewat posyandu, dan pembentukan Kelompok Pemerhati Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA). Secara berkala para bidan dan puskesmas melayani imunisasi TT, dan polio bagi kesehatan ibu dan anak serta pemberian vitamin A setiap tahunnya. Demikian pula dengan program Keluarga Berencana (KB) para bidan melayani baik dengan berbagai alat kontrasepsi.

3. Standar Kualitas Hidup

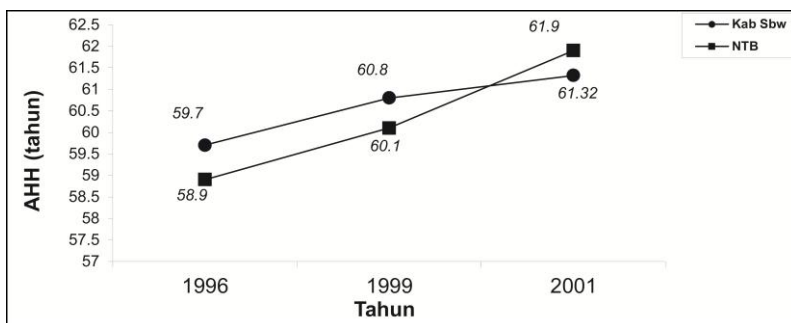
Standar/kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah pada suatu waktu tertentu dapat diukur dari sejauhmana tingkat pemenuhan kebutuhan dasar telah tercapai, yaitu kebutuhan akan makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Perkembangan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar ini tercermin dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Melek Huruf.

Namun demikian, perkembangan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak bisa dijelaskan/disajikan sampai ke tingkat kecamatan (kawasan), melainkan hanya di tingkat kabupaten. Hal ini disebabkan karena: (1) secara metodologis, jumlah sampel untuk menghitung indikator ini minimum sebanyak 3.000 responden, padahal dalam penelitian ini jumlah responden masih jauh dari mencukupi, sehingga secara teoritis kurang representatif untuk menghitung indikator dimaksud, dan (2) data sekunder yang tersedia sangat terbatas dan hanya sampai level kabupaten (tidak tersedia data sampai tingkat kecamatan).

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu upaya pemerintah (khususnya Kabupaten Sumbawa dan umumnya Propinsi NTB) dalam meningkatkan kelangusngan hidup generasi yang lebih baik di masa mendatang telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan



Gambar 2b. Perkembangan AHH Penduduk Kabupaten Sumbawa dan NTB, Tahun 1996 - 2001

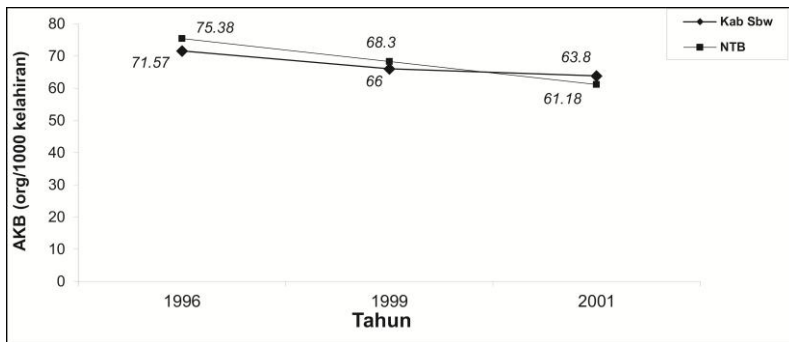
oleh semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat yang antara lain tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup (AHH) penduduk. Berdasarkan data dari Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) NTB (2001) diperoleh gambaran bahwa rata-rata Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Sumbawa maupun NTB secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Rata-rata Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2001 mencapai 61,32 tahun (lebih rendah dari rata-rata penduduk NTB yang mencapai 61,90 tahun). Meski demikian, seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat, angka harapann hidup ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Selengkapnya mengenai perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumbawa dan NTB dapat dilihat pada gambar berikut.

Dari gambar di atas terlihat bahwa hingga tahun 1999, rata-rata angka harapan hidup pendusuk di Kabupaten Sumbawa berada di atas rata-rata penduduk NTB. Namun setelah tahun 1999, peningkatan angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Sumbawa lebih lamban dibandingkan penduduk NTB secara keseluruhan. Gambaran ini memberikan indikasi bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa relatif lamban dibandingkan dengan Propinsi NTB secara keseluruhan. Karena itu, meski derajat kesehatan masyarakat cenderung semakin membaik sebagi akibat kondisi sosial ekonomi masyarakat serta

ketersediaan dan dukungan berbagai sarana prasarana pelayanan kesehatan yang hingga saat ini cukup memadai (termasuk masyarakat di Kawasan Penambangan PT NNT), namun pembangunan bidang kesehatan perlu terus digalakkan dan ditingkatkan kualitasnya.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator sosial yang sangat penting



Gambar 3. Perkembangan Angka Kematian Bayi Penduduk di Kabupaten Sumbawa dan NTB, tahun 1996 – 2001.

untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan berbagai sebab kematian. Berbagai program dan kegiatan telah digalakkan oleh pemerintah (baik Propinsi NTB maupun Kabupaten Sumbawa) untuk menekan angka kematian bayi tersebut, baik melalui dinas/instansi pemerintah maupun swasta. Upaya-upaya ini nampaknya telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, terbukti dengan keberhasilan menekan angka

kematian bayi yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

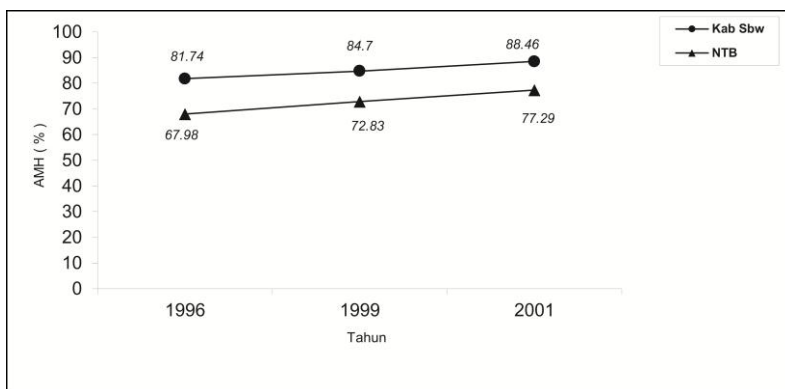
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB (gambar di atas), dalam kurun waktu 1996 – 2001, angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Sumbawa berhasil ditekan dari 71,57 menjadi 63,80 (menurun 10,86 %). Dalam kurun waktu yang sama, rata-rata AKB NTB secara keseluruhan berhasil diterunkan dari 75,38 menjadi 61,18 (menurun 18,84 %). Jika ditelaah secara lebih seksama, nampak bahwa setelah tahun 1999, kecenderungan penurunan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Sumbawa lebih lamban dibandingkan dengan rata-rata Propinsi NTB (identik dengan peningkatan angka harapan hidup). Realita ini mengisyaratkan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa (setelah tahun 1999) secara relatif lebih lamban dibandingkan daerah lainnya sehingga derajat kesehatan penduduknya (keadaan tahun 2001) berada di bawah rata-rata penduduk NTB secara keseluruhan.

c. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Bersekolah

Kemampuan baca tulis dipandang sebagai modal dasar minimal yang harus dimiliki setiap individu; agar paling tidak mempunyai peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum

yang dimiliki oleh penduduk secara agregat dapat digambarkan melalui rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan data dari BPS NTB (2001), Angka Melek Huruf penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2001 telah mencapai 88,46 %. Artinya, dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 88 – 89 orang telah mampu membaca dan menulis latin. Angka ini jauh di atas rata-rata Propinsi NTB yang baru mencapai 77,29 %. Begitu pula halnya dengan rata-rata lama sekolah (tahun) berada diatas rata-rata propinsi. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sumbawa meningkat dari 5,3 tahun (1996) menjadi 6 tahun (1999). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia kerja (tenaga kerja) di daerah ini (Kabupaten Sumbawa) telah menamatkan sekolah dasar (bersekolah selama 6 tahun). Pada waktu yang sama, rata-rata pendidikan tenaga kerja (penduduk usia kerja) di Propinsi NTB baru mencapai 5,3 tahun (rata-rata kelas 5 SD).



Gambar 4. Perkembangan Angka Melek Hurup Penduduk di Kabupaten Sumbawa dan NTB, tahun 1996 – 2001.

Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa, dari segi pendidikan, kualitas tenaga kerja (penduduk usia kerja) di Kabupaten Sumbawa secara relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata NTB. Begitu pula dengan kesadaran penduduk Kabupaten Sumbawa akan pentingnya pendidikan relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk NTB secara keseluruhan, terutama sekali jika dibandingkan dengan penduduk di Pulau Lombok. Lebih baiknya Angka Melek Huruf dan lama bersekolah ini menjadikan Indeks Pendidikan masyarakat di Kabupaten Sumbawa relatif lebih baik dibandingkan masyarakat NTB secara umum.

4. Air Bersih

Penggunaan sumber air bersih untuk masak dan minum yang berasal dari air ledeng (PDAM) telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu meningkat dari 5,16 % sebelum tambang menjadi 17,48 % setelah tambang berproduksi. Tetapi pelayanan PDAM hanya mencakup tiga desa yaitu Goa, Beru dan Belo sebelum tambang dan ditambah dengan Desa Tongo Sejorong setelah tambang berproduksi. Hal ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih cukup baik. Masyarakat mengharapkan agar jangkauan pelayanan air PDAM semakin diperluas sehingga bisa melayani kebutuhan air di seluruh desa baik yang berada di Kecamatan Jereweh maupun yang berada di Kecamatan Sekongkang.

Sebelum tambang berproduksi kondisi air sungai masih memungkinkan penduduk untuk melakukan aktifitas mandi dan cuci di sungai tetapi setelah tambang berproduksi sudah berkurang karena debit air sungai sudah semakin berkurang.

Adapun kondisi sumber air bersih masyarakat sekitar lingkaran tambang baik sebelum maupun setelah tambang berproduksi dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Sumber Air Bersih Masyarakat Sebelum dan Setelah Tambang Berproduksi, 1995 - 2002.

No	Desa	Sumber Air Untuk Masak dan Minum							
		Sebelum Tambang				Setelah Tambang			
		AL	SR	SI	L	AL	SR	SI	L
1.	Benete	0	27	3	5	0	30	0	5
2.	Maluk	0	64	0	2	0	59	0	7
3.	Sekongkang Atas	0	34	8	8	0	42	0	8
4.	Sekongkang Bawah	0	14	5	0	0	17	1	1
5.	Tongo Sejong	0	2	20	2	19	3	1	1
6.	Aik Kangkung	0	5	3	17	0	17	2	6
7.	Tatar	0	6	6	13	0	17	3	5
8.	Goa	3	29	6	1	14	22	3	0
9.	Beru	6	19	3	5	17	14	0	2
10.	Belo	9	12	3	9	11	19	0	3
Jumlah		18	212	57	62	61	240	10	38

Catatan : AL= Air Ledeng (PDAM) SR = Sumur SI = Sungai L = Lainnya

Tetapi yang menggunakan sungai atau kali untuk air bersih minum dan masak mengalami penurunan dari 16,33 % sebelum tambang menjadi hanya 2,87 % setelah tambang berproduksi. Salah satu penyebab menurunnya penggunaan sungai atau kali karena volume airnya telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bahkan di beberapa

sungai pada musim kemarau sama sekali tidak terdapat air. Sementara itu di Desa Aik Kangkung (SP-1) dan Desa Tatar (SP-2) telah dibangun pompa air air dengan menggunakan tenaga kincir angin yang merupakan sumbangan dari PT. NNT, sehingga diharapkan kebutuhan air bersih di kedua desa tersebut sebagian dapat terpenuhi.

5. Kondisi Perumahan dan Listrik

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari keadaan perubahan berikut lingkungan sekitarnya. Selain sebagai tempat tinggal dan melindungi penghuninya dari berbagai gangguan seperti panas matahari, angin, dan hujan serta gangguan keamanan lainnya, rumah juga seringkali dijadikan sebagai simbol status sosial masyarakat. Karena itu keberadaan rumah menjadi sangat penting bahkan menjadi prioritas utama bagi sebagian besar masyarakat. Bahkan dalam pembahasan mengenai pengeluaran rumahtangga, pengeluaran rumahtangga mengalami peningkatan yang sangat signifikan antara sebelum tambang hingga setelah tambang berproduksi.

Berikut ini disajikan beberapa hal yang menyangkut kondisi perumahan masyarakat sekitar tambang, baik sebelum tambang maupun setelah tambang berproduksi.

a. Luas bangunan rumah

Meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong mereka untuk meningkatkan pengeluarannya untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Rata-rata luas bangunan rumah mengalami peningkatan dari 49,5 m² pada masa sebelum tambang menjadi 56,3 m² pada masa setelah berproduksi atau mengalami peningkatan sebesar 13,74%. Adapun luas bangunan rumah penduduk baik sebelum maupun setelah tambang berproduksi dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Luas Bangunan Rumah Sebelum dan Setelah Tambang Berproduksi, 1995 - 2002.

No	Desa	Luas Bangunan Rumah (m ²)	
		Sebelum Tambang	Setelah Tambang
1.	Benete	47	62
2.	Maluk	39	51
3.	Sekongkang Atas	50	54
4.	Sekongkang Bawah	53	61
5.	Tongo Sejong	47	52
6.	Aik Kangkung	34	41
7.	Tatar	37	38
8.	Goa	69	72
9.	Beru	60	65
10	Belo	59	67
	Rata-rata	49,5	56,3

Peningkatan luas bangunan rumah ini menyebar secara merata disemua desa, terutama yang terletak di desa Benete dan Maluk serta di Desa Belo. Hal ini sejalan pula dengan semakin meningkatnya

pengeluaran rumahtangga untuk perbaikan perumahan penduduk.

b. Jenis atap rumah

Seiring dengan peningkatan luas bangunan rumah penduduk, jenis atap rumahnya juga mengalami perubahan. Perkembangan jenis atap rumah penduduk yang terbuat dari genteng mengalami peningkatan dari 55,30 % sebelum masa tambang menjadi 67,34 % setelah tambang berproduksi atau meningkat sebesar 12,04 % dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Sebaliknya penggunaan atap yang terbuat dari alang-alang mengalami penurunan dari 16,05 % sebelum masa tambang menjadi hanya 4,30 % setelah masa berproduksi atau turun sekitar 11,75 %, demikian pula halnya dengan penggunaan atap seng. Sebagian besar penurunan penggunaan atap alang-alang diganti dengan menggunakan atap yang terbuat dari genteng dan sebagian kecil dengan asbes. Berikut ini gambaran tentang jenis atap rumah penduduk baik sebelum maupun setelah tambang berproduksi.

Tabel 28. Jenis Atap Rumah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang Berproduksi, 1995 - 2002.

No	Desa	Jenis Atap Rumah							
		Sebelum Tambang				Setelah Tambang			
		G	S	AL	AS	G	S	AL	AS
1.	Benete	23	3	9	0	25	3	4	3
2.	Maluk	16	33	16	1	32	33	0	1
3.	Sekongkan g Atas	42	8	0	0	46	4	0	0
4.	Sekongkang Bawah	13	2	4	0	17	1	1	0
5.	Tongo Sejorong	11	1	9	3	17	2	0	5
6.	Aik Kangkung	0	0	5	20	0	0	4	21
7.	Tatar	1	3	0	21	1	4	0	20
8.	Goa	33	4	2	0	38	1	0	0
9.	Beru	27	1	5	0	27	1	5	0
10	Belo	27	0	6	0	32	0	1	0
Jumlah		193	55	56	45	235	49	15	50

Catatan : G = Genteng S = Seng AL = Alang-alang AS = Asbes

Perubahan jenis atap rumah ini dimungkinkan disamping karena kemampuan ekonominya juga karena ketersediaan bahan baku yang cukup memadai di sekitar tempat tinggalnya.

c. Dinding Rumah

Penggunaan jenis dinding rumah yang terbuat dari tembok mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari hanya 24,36 % sebelum tambang menjadi 43,84 % setelah tambang berproduksi. Peningkatan ini meyebar secara merata di semua desa kecuali di Desa Aik Kangkung SP-1 dan Desa Tatar SP-2 perkembangannya relatif tidak ada.

Tabel 29. Jenis Dinding Rumah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.

No	Desa	Jenis Dinding Rumah							
		Sebelum Tambang				Setelah Tambang			
		TB	P	B	TR	TB	P	B	TR
1.	Benete	4	5	26	0	13	4	14	4
2.	Maluk	21	0	32	13	28	0	22	16
3.	Sekongka ng Atas	13	19	18	0	21	17	11	1
4.	Sekongan g Bawah	1	9	7	2	8	7	3	1
5.	Tongo Sejorong	1	10	12	1	3	12	7	2
6.	Aik kangkung	2	20	3	0	4	18	2	1
7.	Tatar	4	21	0	0	6	18	1	0
8.	Goa	16	11	12	0	25	8	3	3
9.	Beru	12	9	12	0	21	4	8	0
10.	Belo	11	13	9	0	24	5	4	0
Jumlah		85	117	131	16	153	93	75	28

Catatan : TB = Tembok P = Papan B = Bambu TR = Tripleks

Sementara itu penggunaan dinding yang terbuat dari papan mengalami penurunan dari 33,52 % sebelum tambang menjadi 26,65 % setelah tambang berproduksi, demikian pula dengan dinding bambu mengalami penurunan dari 36,54 % sebelum tambang menjadi hanya 21,49 % setelah tambang berproduksi. Tetapi penggunaan dinding yang terbuat dari ripleks mengalami peningkatan dari 4,58 % sebelum tambang menjadi 8,02 % setelah tambang berproduksi atau meningkat sebesar 3,44 %.

Adapun kondisi dinding rumah baik sebelum maupun setelah tambang berproduksi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perubahan jenis dinding rumah ini juga disebabkan oleh karena meningkatnya

pendapatan mereka serta banyaknya toko bangunan yang menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan dinding tersebut.

d. Bahan lantai

Tabel 30. Jenis Lantai Rumah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.

No	Desa	Jenis Lantai Rumah							
		Sebelum Tambang				Setelah Tambang			
		P	T	S	B	P	T	S	B
1.	Benete	17	1	3	14	13	4	15	3
2.	Maluk	7	1	43	15	5	18	33	10
3.	Sekongka ng Atas	34	0	13	3	24	6	19	1 *)
4.	Sekongkan g Bawah	12	0	2	5 *)	12	4	3	0
5.	Tongo Sejorong	12	0	3	9	20	2	2	0
6.	Aik Kangkung	3	0	2	20 *)	3	0	14	8 *)
7.	Tatar	1	0	3	21 *)	0	0	8	17 *)
8.	Goa	21	1	17	0	13	4	22	0
9.	Beru	8	1	16	8	4	11	12	6
10	Belo	15	0	14	4	5	7	21	0
Jumlah		130	4	116	99	99	56	149	45

Catatan : P = Papan T = Tegel/keramik S = Semen B = Bambu *) = Tanah

Bahan lantai rumah yang terbuat dari papan mengalami penurunan dari 37,24% sebelum tambang menjadi 28,37% setelah tambang berproduksi, sementara itu penggunaan Tegel/keramik mengalami peningkatan dari hanya 1,15 % sebelum tambang menjadi 16,05 % setelah tambang berproduksi, demikian pula dengan lantai semen mengalami peningkatan dari 33,24 % sebelum

tambang menjadi 42,69 % setelah tambang berproduksi.

Meskipun demikian khusus di Desa Aik Kangkung SP-1 dan Desa Tatar SP-2 sebagian besar rumahnya masing dengan menggunakan tanah, itupun sudah mengalami penurunan dari tahun ketahun.

e. Penerangan

Salah satu daya tarik kondisi perumahan terletak pada jenis penerangan yang digunakan. Penggunaan penerangan dengan listrik dapat mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penghuninya relatif lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, jenis penerangan rumah yang menggunakan listrik meningkat dari 39,26 % sebelum tambang menjadi 82,23 % setelah tambang berproduksi, peningkatan yang sangat signifikan ini terutama terdapat di Desa Maluk, Benet dan Sekongkang Atas. Sementara penggunaan petromaks mengalami penurunan dari 12,32 % sebelum tambang menjadi hanya 3,72 % setelah tambang berproduksi, demikian pula dengan penggunaan lampu templek mengalami penurunan yang cukup drastis dari 48,42 % sebelum tambang menjadi 14,04 % setelah tambang berproduksi.

Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat di sekitrar lingkaran tambang sebagian besar sudah menikmati penerangan listrik PLN. Sesuai dengan hasil kajian tentang pengeluaran rumahtangga,

pengeluaran untuk penerangan rumah meningkat cukup signifikan dari masa sebelum sampai setelah tambang berproduksi. Artinya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan penerangan yang berasal dari PLN semakin meningkat.

Khusus di Desa Aik Kangkung SP-1 dan Desa Tatar SP-2 belum ada jaringan PLN tetapi sebagian masyarakat sudah menggunakan genset dan digunakan oleh sebagian tetangganya dengan sistim bayar bulanan yang besarnya antara Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000 perbulan. Tetapi sekarang ini di Desa Aik Kangkung SP-1 Genset yang ada sudah tidak berfungsi lagi.

Berikut ini disajikan informasi tentang kondisi penerangan rumah penduduk baik sebelum tambang maupun setelah tambang berproduksi.

Meskipun demikian masih sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir yang dimasyarakat dikenal dengan istilah “*satu-lima*” yang artinya satu hari mati lima hari menyala, hal ini cukup mengganggu berbagai aktifitas masyarakat. Bahkan di Desa Belo- Beru dan Goa pemadaman listrik berlangsung setiap dua hari atau istilah masyarakat “*satu-dua*”.

Tabel 31. Jenis Penerangan Rumah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.

No	Desa	Jenis Penerangan Rumah					
		Sebelum Tambang			Setelah Tambang		
		LIS	PET	TEM	LIS	PET	TEM
1.	Benete	2	8	25	29	3	3
2.	Maluk	7	10	49	59	5	2
3.	Sekongkang Atas	28	14	8	50	0	0
4.	Sekongkang Bawah	8	4	7	18	1	0
5.	Tongo Sejorong	0	0	24	23	0	1
6.	SP-1	0	1	24	1 *)	2	22
7.	SP-2	4 *)	0	21	7 *)	0	18
8.	Goa	33	0	6	39	0	0
9.	Beru	27	6	0	32	1	0
10	Belo	28	0	5	29	1	3
Jumlah		137	43	169	287	13	49

Catatan : LIS = Listrik PET = Lampu Petromaks TEM = Lampu Templek *) Genset

f. Tempat Pembuangan Sampah

Semakin membaiknya kondisi fisik bangunan rumah penduduk, juga diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam menangani sampah rumahtangga. Sebagian besar penduduk sudah tidak lagi membuang sampahnya ke dalam sungai atau kali yang berada di lingkungannya tetapi sudah mulai ada penanganan-penanganan apakah itu dengan membakar atautkah dengan memasukkan kedalam lubang yang telah dipersiapkan.

Menurut hasil penelitian, masyarakat yang membuang sampah di sungai/kali mengalami penurunan yang relatif kecil dari 24,39 % sebelum

tambang menjadi 20,63 % setelah tambang berproduksi. Sedangkan yang membuang sembarangan juga menurun dari 10,03 % sebelum tambang menjadi 8,31 % setelah tambang berproduksi. Prilaku masyarakat dalam mengelola sampahnya relatif mengalami perubahan baik sebelum tambang maupun setelah tambang berproduksi.

Tabel 32. Tempat Pembuangan Sampah Penduduk Sebelum dan Setelah Tambang, 1995 - 2002.

No	Desa	Tempat Pembuangan Sampah							
		Sebelum Tambang				Setelah Tambang			
		S/K	B	L	S	S/K	B	L	S
1.	Benete	17	13	1	4	15	13	4	3
2.	Maluk	0	42	12	12	0	41	15	10
3.	Sekongkang Atas	28	5	12	5	23	8	13	6
4.	Sekongkang Bawah	3	9	3	4	3	5	8	3
5.	Tongo Sejorong	3	18	2	1	2	19	2	1
6.	Aik Kangkung	0	22	0	3	0	22	0	3
7.	Tatar	0	24	1	0	0	23	2	0
8.	Goa	10	16	10	3	6	18	13	2
9.	Beru	15	8	8	2	13	12	8	0
10.	Belo	11	9	12	1	10	6	16	1
	Jumlah	87	166	61	35	72	167	81	29

Catatan : S/K = Sungai/Kali B = Dibakar L = Lubang S = Sembarangan

Khusus di Desa Maluk pada setiap jalan-jalan terdapat sebuah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang secara berkala akan diambil dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berada di pinggiran desa tersebut. Pada saat kegiatan konstruksi, di Desa Maluk terdapat pengusaha yang mengumpulkan sampah berupa plastik, botol, dan besi bekas. Tetapi saat ini usaha tersebut telah berhenti beroperasi karena semakin berkurangnya jenis sampah tersebut.

BAB IV

TRANSFORMASI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA AKHIR DEKADE PERTAMA PRODUKSI TAMBANG BATU HIJAU

A. Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Hal-hal yang ditelaah meliputi perkembangan bidang ekonomi yang terjadi sebagai dampak aktivitas produksi pertambangan Batu Hijau di Sumbawa Barat. Secara faktual, memang sejak berlangsungnya masa produksi secara berangsur angsur terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja yang masuk ke daerah lingkaran tambang Batu Hijau. Pekerjaan-pekerjaan bidang konstruksi yang sangat banyak menyerap tenaga kerja baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar daerah berkurang secara gradual.

1. Perkembangan Ketenagakerjaan

Sejak hadirnya perusahaan tambang PT. Newmon Nusa Tenggara (PT.NNT) di kawasan tambang Batu Hijau, persoalan tenaga kerja, kesempatan kerja dan peluang berusaha merupakan merupakan masalah yang krusial dan sangat diperebutkan sehingga berimplikasi terhadap proses sosial ekonomi khususnya di daerah lingkaran tambang Batu Hijau. Berikut disajikan hasil studi terkait perkembangan masalah ketenagakerjaan di daerah lingkaran tambang Batu Hijau setelah sekitar satu dekade aktivitas produksi tambang Batu Hijau berlangsung.

a. Kondisi Ketenagakerjaan Masyarakat Lokal

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan di Indonesia, struktur penduduk cenderung didominasi oleh kaum wanita. Kondisi yang relatif sama juga dijumpai pada masyarakat lokal di kawasan tambang PT.NNT di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun 2010, sekitar 50.27% (922 orang) anggota rumahtangga masyarakat lokal terdiri dari kaum wanita, dan sebanyak 49,73% (912 orang) terdiri dari kaum pria. Namun demikian bila dilihat dari jumlah anggota rumahtangga yang masuk usia kerja atau tergolong tenaga kerja (≥ 15 tahun) sebagian besar terdiri dari kaum pria; begitu juga yang masuk pasar kerja atau yang menjadi angkatan kerja, sebagian besar terdiri dari kaum pria (lihat Tabel 33). Ini artinya dalam 15 tahun terakhir anak-anak yang dilahirkan sebagian besar berjenis kelamin wanita, tetapi pada

tahun-tahun sebelumnya sebagian besar berjenis kelamin pria. Dengan demikian berarti, meskipun dalam 15 tahun terakhir sebagian besar tenaga kerja pria mendominasi kegiatan ekonomi rumahtangga, tapi dimasa yang akan datang akan didominasi oleh tenaga kerja wanita.

Bila data pada Tabel 33 dihitung, maka akan ditemukan proporsi tenaga kerja dan angkatan kerja pria adalah masing-masing sebanyak 50,53% dan sebanyak 51,41%; lebih banyak dibandingkan tenaga kerja dan angkatan kerja wanita, yaitu masing-masing sebanyak 49,47% dan 48,59%. Begitu pula bila dilihat dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja, pria cenderung lebih tinggi, yaitu 77,52% sedangkan wanita adalah sebanyak 77,35%; dan secara rata-rata adalah sebanyak 77,44%.

Tabel 33. Struktur Anggota 405 Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.

No	Komponen (Item)	Jumlah (orang)		
		Pria	Wanita	Total
1	Jumlah Anggota Rumahtangga	912	922	1,834
2	Jumlah Tenaga Kerja	663	649	1,312
3	Jumlah Angkatan Kerja	514	502	1,016
4	Jumlah Angkatan Kerja Bekerja	485	462	947
5	Jumlah Pencari Kerja/Penganggur	29	40	69
6	Tingkat Pencari Kerja/Penganggur* (%)	5,64	7,97	6,79

Keterangan : *persentase pencari kerja terhadap angkatan kerja

Angkatan kerja merupakan tenaga kerja yang masuk pasar kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih menganggur; tapi tidak termasuk tenaga kerja yang masih sekolah, tenaga kerja yang sakit, pensiunan atau istri yang hanya mengurus rumahtangga. Karena itu TPAK menggambarkan proporsi tenaga kerja yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi rumahtangga. Karena itu tidak mengherankan bila di suatu daerah TPAK pria lebih tinggi dibandingkan wanita; karena pria lah yang seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap ekonomi rumahtangga. Namun bila ditelusuri pada rumahtangga masyarakat lokal, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, bahkan pada waktu-waktu tertentu justru wanita yang memiliki TPAK yang lebih besar. Seperti sebelum masuk proyek tambang tahun 1995, TPAK wanita sedikit lebih tinggi dari pria, karena pada waktu itu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, lebih diprioritaskan pada pria, sehingga meskipun sudah masuk usia kerja, tapi karena masih melanjutkan pendidikan maka tidak termasuk angkatan kerja. Tetapi setelah masuk proyek tambang, TPAK pria dan wanita keduanya meningkat pesat, tapi TPAK pria meningkat lebih tajam, sehingga TPAK pria relatif sama dengan wanita, bahkan cenderung lebih tinggi.

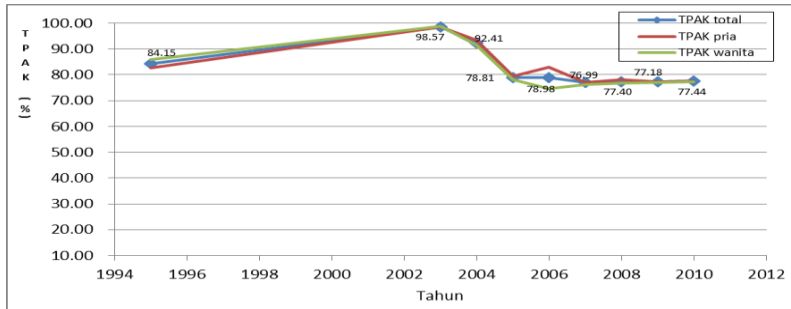
Peningkatan yang pesat TPAK pria dan wanita tersebut, terutama terjadi pada awal-awal pelaksanaan tambang antara tahun 1997-2004, setelah itu mengalami penurunan dan cenderung

stabil sampai tahun 2010, yaitu sekitar 77% (lihat Gambar 1). Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut, bila tidak ada gejolak, kebijakan atau kegiatan pembangunan yang dapat menyebabkan penurunan ataupun peningkatan TPAK secara drastis, seperti yang terjadi pada awal masa tambang, dimana kesempatan kerja bagi masyarakat lokal banyak tersedia.

Namun bila dibandingkan antara TPAK masyarakat lokal kawasan tambang dengan TPAK Kabupaten Sumbawa Barat secara umum, tampaknya TPAK masyarakat lokal di kawasan tambang masih lebih tinggi. Misalnya pada tahun 2010, TPAK masyarakat lokal adalah sebesar 77,44%, sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 66,44%. Berarti TPAK masyarakat lokal di kawasan tambang PT.NNT lebih tinggi 11% dibandingkan Kabupaten Sumbawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tarik ekonomi di kawasan tambang masih lebih tinggi dibandingkan kawasan lain di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga tenaga kerjanya lebih banyak yang masuk pasar kerja dibandingkan yang melanjutkan pendidikan atau lainnya.

Akan tetapi bila dilihat dari tingkat penyerapan angkatan kerja, ternyata tidak semua tenaga kerja yang masuk pasar kerja tersebut bekerja; bahkan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi pada masyarakat lokal di kawasan tambang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sumbawa Barat. Misalnya

pada tahun 2010, di Kabupaten Sumbawa Barat, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebanyak 6,54%; sedangkan pada masyarakat lokal di kawasan tambang ditemukan sebanyak 6,79%.

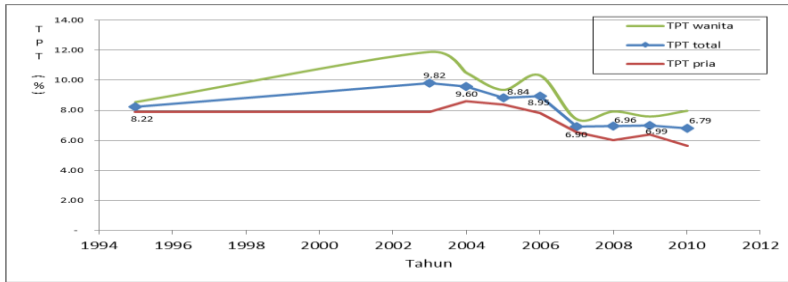


Gambar 4. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995, 2003-2010.

Angkatan kerja yang banyak menganggur secara terbuka adalah angkatan kerja wanita. Pada tahun 2010, ditemukan 7,97% angkatan kerja wanita mengalami pengangguran secara terbuka, sedangkan angkatan kerja pria adalah 5,64%. Data ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja yang berkembang di kawasan tambang adalah jenis pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja pria, seperti pekerjaan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana gedung perkantoran, perumahan, jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan sejenisnya. Sementara yang berkembang dan banyak ditekuni oleh angkatan kerja wanita masih terbatas pada usaha dagang, sedikit jasa (seperti konveksi), usaha kerajinan atau industri kecil.

Penyerapan angkatan kerja wanita yang lebih rendah dibanding pria tidak hanya terjadi di kawasan tambang, tapi terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Kabuapten Sumbawa Barat; dan hal tersebut sudah terjadi sejak sebelum tambang. Pada Gambar 2 ditunjukkan perbedaan tingkat pengangguran angkatan kerja pria dan wanita masyarakat lokal di kawasan tambang PT.NNT sebelum tambang tahun 1995 dan setelah masuk proyek tambang tahun 2003-2010.

Dalam masyarakat konsep pengangguran sering diperdebatkan. Batasan pengangguran terbuka yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan batasan yang dipergunakan oleh BPS, yaitu bila seseorang (angkatan kerja) bekerja untuk memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan paling tidak 1 jam perminggu secara terus menerus. Bila tidak bekerja atau bekerja kurang 1 jam perminggu dianggap sebagai penganggur terbuka. Di masyarakat, meskipun angkatan kerja bekerja lebih dari 1 jam, tapi kalau sifatnya membantu keluarganya untuk memperoleh pendapatan seperti dalam kegiatan usahatani, usaha dagang atau pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan angkatan kerja tersebut atau keluarganya, maka dikatakan masih menganggur.

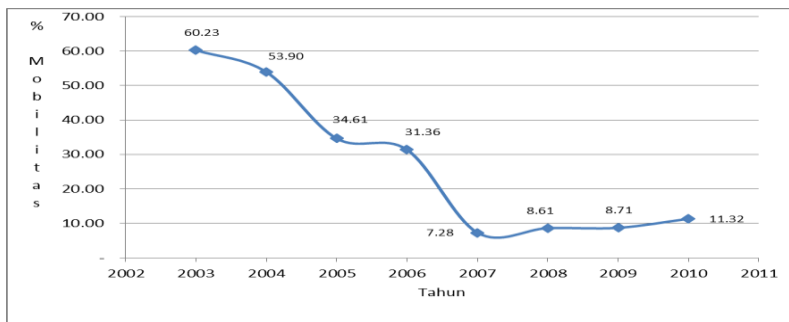


Gambar 5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995 dan Tahun 2003-2010.

Karena itu di masyarakat, angka pengangguran selalu dikatakan lebih tinggi dari angka yang dipublikasikan oleh BPS atau dari hasil penelitian ini. Pengangguran terbuka yang terjadi pada masyarakat lokal di kawasan tambang sebagian besar merupakan pengangguran friksionis yang dihadapi oleh angkatan kerja muda yang sedang menunggu kesempatan kerja yang lebih baik, seperti menunggu kesempatan kerja menjadi karyawan swasta dan menjadi pegawai negeri, sehingga meskipun angkatan kerja ini sudah bekerja pada tempat lain, selalu mengatakan dirinya masih menganggur. Sementara bila dilihat dari peluang kerja dan peluang berusaha di kawasan tambang, relatif lebih tersedia dibandingkan kawasan lain, tapi karena fokus perhatiannya pada kedua jenis pekerjaan di atas, maka pekerjaan pada bidang lain dianggap tidak ada atau bila dilakukan dianggap sebagai pekerjaan sementara yang kurang diseriuskan.

b. Mobilitas Ekonomi Angkatan Kerja

Mobilitas ekonomi angkatan kerja rumahtangga masyarakat lokal dalam 4 tahun terakhir (2007-2010) relatif stabil dan rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi bila dibandingkan antar tahun selama 4 tahun terakhir ada kecenderungan semakin meningkat. Pada tahun 2007 tingkat mobilitas angkatan kerja adalah sebanyak 7,28%, tahun 2008 sebanyak 8,61%, tahun 2009 sebanyak 8,71% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 11,32% (Gambar 6).



Gambar 6. Perkembangan Mobilitas Angkatan Kerja Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2003-2010.

Peningkatan mobilitas yang terjadi selama 4 tahun terakhir tersebut terutama terjadi antara kecamatan satu dengan kecamatan lain di dalam kawasan tambang, sedangkan ke luar kawasan tambang cenderung menurun, termasuk ke luar negeri, kecuali pada tahun 2010 mobilitas keluar negeri sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009. Mobilitas di dalam kawasan tambang,

meningkat dari 6,03% menjadi 9,45%, dan mobilitas ke luar negeri meningkat dari 0,10% pada tahun 2009 menjadi 0,39% pada tahun 2010. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tipe mobilitas yang mengalami peningkatan adalah yang bersifat sirkuler, yaitu dari 6,99% menjadi 10,48% dan mobilitas yang bersifat permanen dari 0,19% menjadi 0,39%; sedangkan mobilitas yang bersifat semi permanen mengalami penurunan dari 1,55% menjadi 0,58%. Sementara bila ditinjau dari arah atau tujuan mobilitas ekonominya, peningkatan mobilitas yang terjadi adalah di dalam kawasan tambang dan mobilitas ke luar negeri. Mobilitas ekonomi masyarakat lokal yang terjadi pada tahun 2010, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Daerah Tujuan dan Tipe Mobilitas Ekonomi Angkatan Kerja Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010

Daerah Tujuan	Type Mobilitas							
	Sirkuler		Semi permanen		Permanen		Total	
	Jiwa	%*	Jiwa	%*	Jiwa	%*	Jiwa	%*
Dalam Kawasan	96	9.45	1	-	-	-	96	9.45
Luar Kawasan	8	0.79	1	0.10	-	-	9	0.89
Luar NTB	1	0.25	5	0.48	-	-	6	0.59
Luar Negeri	-	-	-	-	4	0.39	4	0.39
Total	105	10.48	7	0.58	4	0.39	115	11.32

Catatan: * = Persentase dari jumlah Angkatan kerja, baik yang bekerja maupun menganggur sebanyak 1045 orang

Data di atas meskipun tidak berbeda secara signifikan dengan data yang ditemukan pada tahun 2009, namun kecenderungan yang terjadi sedikit memberi gambaran bahwa daya tarik ekonomi di dalam kawasan tambang masih lebih tinggi dibandingkan di luar kawasan tambang dalam wilayah

NTB maupun di luar wilayah NTB. Tapi kecenderungan semakin meningkatnya mobilitas ekonomi keluar negeri dari 0,10% pada tahun 2009 menjadi 0,39% pada tahun 2010, menandakan ada kemungkinan kejenuhan kesempatan kerja di dalam kawasan tambang, sehingga sebagian angkatan kerjanya memilih bekerja ke luar negeri, terutama dari daerah-daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi seperti dari Dusun Jelenge Desa Beru.

c. Struktur Pekerjaan Anggota Rumahtangga

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan proyek tambang telah menyebabkan semakin beragamnya pekerjaan masyarakat lokal. Kalau sebelum ada proyek pertambangan, kegiatan ekonomi masyarakat banyak bertumpu pada sektor pertanian lahan kering (tanaman dan ternak), maka setelah masuk proyek tambang, kegiatan dan pilihan pekerjaan masyarakat semakin banyak dan beragam. Pekerjaan dan mata pencaharian pokok masyarakat lokal banyak yang berubah dari usaha pertanian ke usaha-usaha di luar pertanian. Pada tahun 2010, jumlah masyarakat lokal sampel yang masih memiliki pekerjaan pokok sebagai petani ditemukan sebanyak 33,37%, kemudian menyusul usaha dagang 14,78%, karyawan swasta 11,93% dan pegawai pemerintah 11,40%. Pekerjaan lain yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai pekerjaan pokoknya adalah usaha industri kerajinan rumahtangga 8,76%, usaha jasa 8,34% dan buruh harian 6,65%. Sedangkan

pekerjaan pokok sebagai nelayan relatif tetap, yaitu hanya 3,80% dan sebagai peternak 0,95%. Sementara sebagai pencari hasil hutan tidak ditemukan lagi ada masyarakat lokal yang menjadikannya sebagai pekerjaan pokok (lihat Tabel 35)

Tabel 35. Struktur Pekerjaan Pokok dan Pekerjaan Sampingan Anggota Rumah-tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.

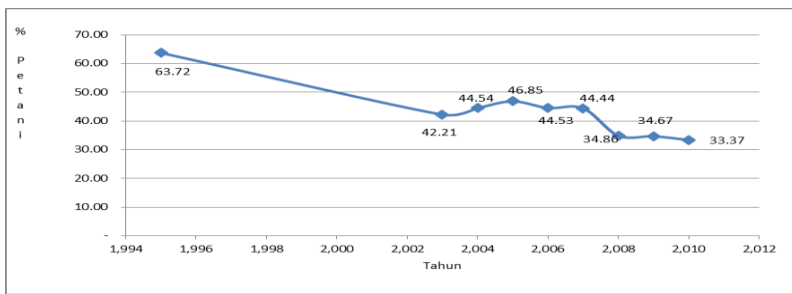
Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama (Pokok)		Pekerjaan Kedua (Sampingan)	
	Jiwa	%*	Jiwa	%*
1. Usaha Tani	316	33.37	231	24.39
2. Usaha Ternak	9	0.95	122	12.88
3. Nelayan	36	3.80	16	1.69
4. Industri kerajinan	83	8.76	14	1.48
5. Usaha Dagang	140	14.78	30	3.17
6. Usaha Jasa	79	8.34	59	6.23
7. Pencari Hasil Hutan	-	0.00	8	0.84
8. Buruh Harian	63	6.65	84	8.87
9. Pegawai Pemerintah	108	11.40	3	0.32
10. Karyawan Swasta	113	11.93	6	0.63
Total	947	100.00	573	60.51

Keterangan : * Persentase dari jumlah angkatan kerja yang bekerja (947 orang)

Selain pekerjaan pokok, sekitar 60,51% masyarakat lokal pada tahun 2010 juga memiliki pekerjaan kedua atau pekerjaan sampingan. Jenis pekerjaan sampingan yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal pada tahun 2010 juga masih pada kegiatan usahatani (24,39%) dan usaha ternak (11,88%). Ini artinya meskipun sebagian masyarakat lokal tidak melakukan kegiatan usahatani dan ternak

sebagai pekerjaan pokoknya, tapi sebagian besar diantara mereka masih memilihnya menjadi pekerjaan sampingan. Pekerjaan lain yang dipilih menjadi pekerjaan sampingan adalah sebagai buruh harian (8,87%), usaha jasa (6,23%) dan usaha dagang (3,17%), sementara kegiatan lain agak jarang dilakukan sebagai pekerjaan sampingan (lihat Tabel 35).

Meskipun usaha pertanian masih mendominasi pekerjaan sebagian besar masyarakat lokal; namun bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, lebih-lebih bila dibandingkan dengan kondisi sebelum masuk proyek tambang, ada kecenderungan jumlah masyarakat lokal yang menempatkan usaha pertanian sebagai pekerjaan pokok semakin menurun. Ada gejala terjadi transformasi pekerjaan masyarakat lokal dari sektor pertanian ke usaha perdagangan, jasa dan industri kerajinan rumahtangga; dan pada tahun-tahun terakhir pada pekerjaan sebagai buruh luar pertanian. Pada Gambar 4 ditunjukkan bahwa sebelum tambang pada tahun 1995, persentase anggota rumahtangga sampel yang menempatkan usahatani sebagai pekerjaan pokok adalah sebanyak 63,72% kemudian setelah tambang tahun 2003-2007 menurun menjadi sekitar 42-46%; dan pada tahun 2008-2010 menurun lagi menjadi sekitar 33-35%.



Gambar 7. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Masyarakat Lokal Yang Memiliki Pekerjaan Pokok Sebagai Petani di Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995 dan Tahun 2003-2010.

Pekerjaan yang sebenarnya cukup banyak dijadikan pekerjaan pokok masyarakat lokal adalah menjadi karyawan swasta dan menjadi pegawai pemerintah, masing-masing menyerap lebih 11% angkatan kerja masyarakat lokal. Kedua jenis pekerjaan ini menjadi idaman masyarakat lokal, khususnya menjadi karyawan perusahaan tambang dan subkontraktornya atau menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Polisi; karena itu segala upaya dilakukan untuk bisa memperoleh kedua jenis pekerjaan tersebut. Tapi karena daya serapnya terbatas, dan membutuhkan spesifikasi tertentu yang tidak banyak dimiliki oleh masyarakat lokal, maka sebagian masyarakat lokal mengalami kesulitan untuk memasukinya. Namun demikian, masyarakat senantiasa menunggu kesempatan untuk bisa memasuki kedua jenis pekerjaan tersebut; bahkan banyak generasi muda yang sudah bekerja ditempat lain, masih menganggap dirinya menganggur, karena belum memperoleh pekerjaan untuk menjadi

karyawan tambang atau menjadi pegawai negeri sipil atau polisi. Karena harapan masyarakat yang demikian besar, maka setiap ada kesempatan atau pembukaan peluang kerja, semua masyarakat menyorotinya dan memperebutkannya. Bila ada hal-hal yang dinilai kurang baik dalam proses perekrutan, maka akan cepat ditanggapi oleh masyarakat, bahkan tidak jarang direspon secara anarkis oleh masyarakat, bila merasa diperlakukan kurang adil.

2. Perkembangan Usaha Masyarakat Lokal

Proyek pertambangan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat telah berlangsung sekitar 15 tahun sejak tahun 1997 sampai sekarang. Berbagai perubahan telah terjadi pada masyarakat lokal, baik sebagai akibat adanya proyek tambang ataupun sebagai akibat perkembangan wilayah atau pembangunan lainnya. Berikut ini merupakan gambaran singkat dari perubahan masyarakat lokal tersebut, terutama menyangkut perubahan kegiatan ekonomi mereka, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

a. Usaha Pertanian

Meskipun usaha di bidang pertanian semakin ditinggalkan oleh masyarakat lokal, namun sampai saat ini (tahun 2010), usaha ini masih memegang peranan penting sebagai sumber pencarian masyarakat lokal. Basis ekonomi masyarakat lokal ini

mendapat tantangan dengan munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih produktif dan lebih menguntungkan baik secara ekonomi maupun sosial (prestise). Pemerintah daerah maupun perusahaan tambang sangat menyadari bahwa usaha pertanian sangat penting artinya dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat dan ekonomi wilayah, baik pada masa tambang maupun nanti setelah berakhir masa tambang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peranan usaha pertanian tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk oleh perusahaan tambang, mulai dari pembangunan prasarana dan sarana irigasi (dam dan saluran irigasinya), pengadaan peralatan-peralatan pertanian (hand tractor, mesin air, handsprayer dll), pengembangan teknologi dan kelembagaan petani (kelompok tani, P3A dan Pembangunan Balai Pertemuan), bantuan sarana produksi, pendampingan dan berbagai kegiatan lain yang mendukung, sehingga dapat dikatakan hampir semua pendekatan sudah dilakukan untuk meningkatkan basis ekonomi masyarakat lokal tersebut.

Pada tahun 2010, meskipun tidak ada kegiatan pembangunan dam dan saluran primer, tapi pembangunan jaringan sekunder, tersier dan saluran cacing yang masuk ke lahan petani semakin gencar dilakukan, baik yang dilakukan oleh perusahaan tambang, Pemda KSB, Dinas PU dan pemerintah pusat melalui program PNPM, sehingga pembangunan dam dan saluran primer yang sudah dilakukan

beberapa tahun yang lalu sudah menunjukkan hasilnya, yang ditunjukkan oleh semakin tersedianya air irigasi pada pada musim penghujan maupun pada musim kemara. Pembangunan prasarana irigasi tersebut diikuti oleh pembangunan jalan usahatani di beberapa tempat, sehingga pengangkutan saprotan (sarana produksi dan peralatan pertanian) dan hasil-hasil pertanian semakin mudah dilakukan oleh masyarakat. Percetakan sawah baru juga sudah banyak dilakukan, pada tahun 2010 tercatat seluas 38 ha di Desa Beru dan 100 hektar di Desa Aik Kangkung. Sawah-sawah yang dicetak pada tahun-tahun sebelumnya sebagian besar sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani.

Namun demikian bila dibandingkan antara upaya yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai tampaknya belum menunjukkan hasil yang memadai. Intensitas tanam meskipun cenderung semakin meningkat pada musim penghujan maupun pada musim kemarau, tapi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian masih cukup luas. Pada Tabel 4 ditunjukkan bahwa pada tahun 2010 lahan pertanian yang dikuasai oleh 405 rumahtangga masyarakat lokal adalah seluas 37.707 are, sedangkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani baru seluas 29.509 are, berarti terdapat seluas 8.198 are lahan pertanian tidak dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani atau masih berstatus sebagai lahan tidur. Pada musim kemarau pertama luas lahan pertanian yang digarap adalah seluas

23.653 are dan pada musim kemarau dua seluas 14.380 are. Kalau diperhitungkan intensitas tanamnya, berarti intensitas tanam pada musim penghujan baru mencapai 78,04%, musim kemarau satu 62,56%, musim kemarau kedua 38,03%, dan intensitas tanamnya sepanjang tahun 2010 baru mencapai 178%. Bila dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2010 sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2009, intensitas tanam tahunannya adalah 168,30%, pada musim penghujan 77,81%, musim kemarau satu 54,87% dan pada musim kemarau dua 35,62%. Berarti peningkatan intensitas tanam pada tahun 2010 banyak terjadi pada musim kemarau, yang menunjukkan bahwa prasarana dan sarana irigasi yang dibangun seperti dam dan saluran-saluran irigasinya semakin menunjukkan hasilnya.

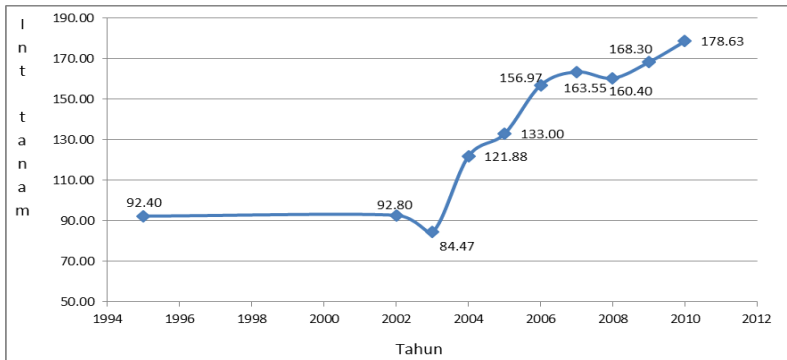
Tabel 36. Luas dan Intensitas Tanam Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Tahun 2010.

No	Jenis Tanaman dan Intensitas Tanam	Luas Tanam Per Musim (are)			Total
		MH '10	MK-I '10	MK-II '10	
1.	Jenis Tanaman :				
	a.Padi	14,912	4,478	72	19,462
	b.Palawija	640	4,985	230	5,855
	c.Hortikultura	36	99	87	222
	d.Tan.Semusim lain	-	170	70	240
	e.Tanaman Tahunan	13,921	13,921	13,921	41,763
2.	Total Luas Tanam (Are)	29,509	23,653	14,380	67,542
3.	Total Luas Lahan (Are)	37,811	37,811	37,811	37,811
4.	Intensitas tanam (%)*	78.04	62.56	38.03	178.63

Catatan : *Intensitas tanam = (total luas tanam : total luas lahan) x 100 %.

Meskipun pemanfaatan lahan pertanian oleh masyarakat lokal di kawasan tambang belum maksimal, tapi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung semakin meningkat. Pada Gambar 5 ditunjukkan sebelum masuk proyek tambang tahun 1995, intensitas tanam tahunan di kawasan tambang baru mencapai 92,40% memasuki masa produksi tambang tahun 2002 tidak banyak berubah mencapai 92,80%; pada tahun 2003 menurun menjadi 84,47%, karena masyarakat banyak disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan lain di luar kegiatan usahatani. Setelah itu intensitas tanam terus meningkat dari 121,88% pada tahun 2004, meningkat menjadi 133% tahun 2005, dan pada tahun 2006 meningkat lagi lebih tajam menjadi 156,97%. Setelah

itu intensitas tanam masih tetap meningkat, tapi peningkatannya relatif lamban.



Gambar 8. Perkembangan Intensitas Tanam Tahunan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT. Tahun 1995, 2002-2010

Jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat lokal juga tidak banyak berubah; masih sebagaimana sebelum masuk proyek tambang, yaitu padi dan palawija. Sedang jenis tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi, seperti tanaman hortikultura yang pernah dibina oleh perusahaan tambang pada masa konstruksi tahun 1997-2000 tampaknya semakin ditinggalkan oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal lebih memilih jenis tanaman yang tidak padat modal dan tidak padat tenaga kerja; dan tingkat resiko gagalannya rendah seperti padi dan palawija. Sedangkan tanaman hortikultura (sayuran dan buah semusim) dinilai sangat padat modal dan padat tenaga kerja; disamping memiliki resiko kegagalan yang sangat tinggi. Karena itu Koperasi Tunas Baru yang dibentuk oleh masyarakat lokal untuk menyalurkan produk tanaman hortikultura

petani ke perusahaan catering PT,NNT lebih banyak membeli produk hortikultura dari luar dibandingkan dari produk petani sendiri.

Tingkat produksi dari tanaman-tanaman yang diusahakan masyarakat tersebut juga masih tergolong rendah (lihat Tabel 37), dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan melalui sentuhan teknologi. Pengalaman dalam penerapan teknologi pada tanaman hortikultura menunjukkan bahwa teknologi baru yang padat modal dan padat tenaga kerja sulit diterima oleh masyarakat lokal. Begitu juga penerapan teknologi SRI (*System Rice Intensification*) pada usahatani padi, meskipun diakui oleh masyarakat dapat meningkatkan produksi secara nyata, tapi karena padat tenaga kerja dan dinilai rumit, maka masyarakat jarang mau menerapkannya secara konsisten.

Tanaman-tanaman hortikultura semusim yang pernah diperkenalkan dan dibina pengembangannya oleh perusahaan tambang antara lain adalah melon, semangka biji dan non biji, cabe kecil, cabe besar, gambas, paria, mentimun, terung, tomat, sawi hijau, kubis, sawi putih, jagung manis dan berbagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Tapi karena jenis tanaman ini sangat padat modal dan tenaga kerja, maka usaha ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat lokal; dan mereka rata-rata kembali ke tanaman semula, yaitu padi dan palawija. Dalam beberapa tahun terakhir, juga diperkenalkan beberapa

jenis tanaman baru, seperti lidah buaya oleh perusahaan tambang melibatkan 3 orang petani. Buah naga, anggur hijau dan merah diperkenalkan oleh perusahaan tropi dan tanaman sisal (sejenis pandan) dibina oleh Sumbawa Agro, melibatkan cukup banyak tenaga kerja di Desa Aik Kangkung. Pengusahaan tanaman-tanaman tersebut belum dilakukan secara mandiri oleh masyarakat lokal.

Tabel 37. Luas Tanam, Produksi dan Nilai Produksi Beberapa Tanaman Semusim yang Diusahakan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010

Jenis tanaman	Luas Tanam (are)	Rata-2 Produksi (Kg/Are)	Produksi (kg)	Nilai Prod (Rp.000)
1. Padi	19.462	34,340	668.325	1.672.122
2. Kedelai	3.476	11,415	39.680	176.680
3. Kacang Hijau	1.487	13,063	19.424	112.754
4. Jagung	760	15,539	11.810	27.480
5. Kacang Tanah	132	5,833	770	5.495
6. Kacang Panjang	32	27,188	870	3.480
7. Cabe	89	14,607	1.300	22.750
8. Bayam Cabut	6	23,33	140	560
9. Tembakau	185	8,08	1.495	51.575
Total Nilai Produksi				2.72.896

Tanaman yang cukup diminati dan sudah mulai dikembangkan oleh masyarakat lokal adalah tanaman tahunan, seperti tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan dan tanaman kayu-kayuan. Beberapa jenis tanaman tahunan yang diusahakan dan sudah memberikan penghasilan kepada masyarakat dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Luas Tanam, Produksi dan Nilai Produksi Beberapa Tanaman Tahunan yang Diusahakan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.

Jenis Tanaman	Jumlah Pelaku	Luas Tanam (are)	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp.000)
Mangga	46	794	10.464	29.508
Pisang	23	428	10.374	62.763
Nangka	19	184	2.780	5.847
Jambu Mete	12	426	2.498	11.240
Kelapa	27	512	16.242	29.984
Total Nilai Produksi (Rp.000)				139.342

Tanaman tahunan lain yang sudah diusahakan, tapi belum memberikan penghasilan kepada masyarakat adalah: jati super, jati putih, mahoni, bajor, sengon dan beberapa jenis tanaman kayu-kayuan yang diperkirakan bernilai ekonomi tinggi. Tanaman kayu-kayuan ini sampai saat ini sangat diminati oleh masyarakat, karena dipandang paling sesuai dengan kondisi alam kawasan; tapi karena masyarakat tidak bebas menjualnya (minimal harus ada ijin atau surat keterangan dari desa), menyebabkan sebagian masyarakat ragu-ragu untuk mengusahakannya.

b. Usaha Peternakan

Salah satu ciri pertanian lahan kering adalah adanya ternak yang dipelihara bersama tanaman. Usaha peternakan, meskipun sampai saat ini masih dipandang sebagai usaha sampingan oleh sebagian besar masyarakat, tapi masih tetap diakui merupakan bidang usaha yang sangat potensial untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi masyarakat, terutama

pada saat-saat mendesak, dimana pendapatan dari sumber lain tidak tersedia dengan cepat. Bahkan saat ini usaha ternak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, tapi juga oleh masyarakat pendatang, termasuk oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan pokok di luar pertanian dan peternakan; bahkan tampak sekali di kawasan tambang akhir-akhir ini usaha ternak khususnya ternak sapi semakin merata di setiap desa. Tapi bila dilihat dari perkembangan jumlah ternak yang dimiliki oleh masyarakat lokal, tidak banyak mengalami perubahan, bahkan pada tahun 2010 jumlah ternak sapi yang biasanya selalu meningkat dimiliki oleh masyarakat lokal cenderung semakin menurun dibandingkan tahun 2009.

Kondisi yang lebih drastis adalah pemilikan terhadap ternak kuda dan kerbau, populasinya hampir habis di kawasan tambang. Dari hasil survai terhadap 405 rumahtangga masyarakat lokal, pada tahun 2010 hanya dijumpai 1 rumahtangga yang memiliki ternak kerbau dengan jumlah 3 ekor; dan 3 rumahtangga yang memiliki ternak kuda dengan jumlah 5 ekor. Sedangkan yang memiliki ternak sapi adalah sebanyak 54 rumahtangga dengan jumlah 503 ekor dan ternak kambing sebanyak 39 rumahtangga dengan jumlah 309 ekor (lihat Tabel 39).

Tabel 39. Jumlah Ternak Yang Dimiliki dan Dijual oleh Rumahtangga Masyarakat Lokal di Kawasan Lingkar Tambang Tahun 2010.

Jenis Ternak	Jumlah Peternak	Musim Penghujan 2010			Musim Kemarau 2010		
		Dimiliki	Dijual	Nilai Jual	Dimiliki	Dijual	Nilai Jual
Sapi	54	503	56	260.747	423	55	245.549
Kuda	4	5	-	-	6	1	-
Kambing	39	309	46	26.950	270	55	30.950
Unggas	40	1.614	276	11.233	1.250	290	15.850
Total Nilai (Rp.000)		-	-	298.930	-	-	292.349

Bila dibandingkan dengan tahun 2009, semua jenis ternak tersebut jumlahnya mengalami penurunan, tapi jumlah ternak yang dijual semakin meningkat. Ini artinya jumlah ternak yang dilahirkan dengan yang dijual tidak seimbang. Pada ternak sapi misalnya, dari 503 jumlah populasi ternak sapi, yang dijual dalam satu tahun mencapai 111 ekor; dan pada ternak kambing, dari 309 populasinya yang dijual adalah 101 ekor. Bila penjualan ternak tersebut tidak diimbangi dengan investasi atau pembelian ternak baru, maka populasi ternak yang dimiliki masyarakat lokal akan semakin menurun.

Pada Gambar 6 ditunjukkan bahwa sebelum masuk proyek tambang tahun 1995, jumlah ternak yang dimiliki masyarakat dari semua jenis cukup banyak, kemudian setelah masuk proyek tambang semua jenis mengalami penurunan secara bersamaan. Jenis ternak yang paling tajam penurunannya adalah kerbau dan kuda. Sedangkan ternak sapi, meskipun mengalami penurunan, tapi kemudian meningkat kembali, sehingga pada tahun 2005 jumlahnya melampaui jumlah yang sudah dimiliki oleh masyarakat lokal pada masa sebelum tambang.

Sementara ternak kerbau yang sebelum tambang jumlahnya sama seperti ternak sapi, setelah tambang jumlahnya semakin menurun sebagaimana ternak kuda yang memang dari sejak awal jumlahnya relatif sedikit. Kedua jenis ternak ini diperkirakan akan menghilang, bila tidak ada hal-hal istimewa yang mendorong masyarakat untuk memeliharanya kembali; dan cenderung akan digantikan oleh ternak sapi atau kambing.

Kurang minatnya masyarakat terhadap ternak kerbau disebabkan karena agak sulit dijual dan harganya lebih murah dibanding sapi. Selain itu ternak kerbau juga mudah dicuri karena sifatnya sangat jinak. Sedangkan kuda kurang diminati karena harga jualnya rendah (sekitar Rp. 3 juta perekor) dan fungsinya sebagai sarana transportasi juga sudah banyak berkurang, digantikan oleh sarana transportasi lain yang lebih praktis dan modern. Sementara ternak sapi sangat diminati oleh masyarakat karena dianggap paling sesuai dengan kondisi kawasan, cepat berkembang biak, mudah pemeliharaannya dan mudah dijual dengan harga yang relatif tinggi dibandingkan ternak lainnya. Minat yang mendekati ternak sapi adalah ternak kambing, hanya saja akhir-akhir ini peternak kambing sering mengeluh, karena ternaknya diserang atau digigit oleh anjing yang banyak berkeliaran di sekitar desa.

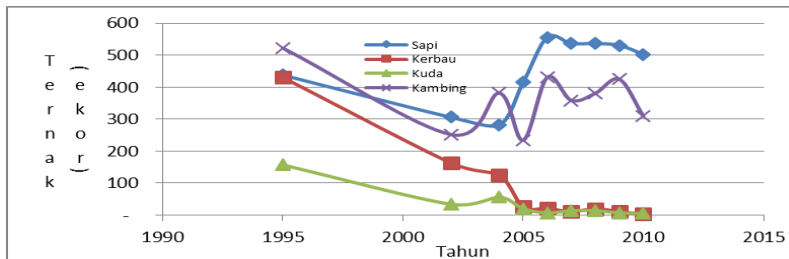
Untuk mengembangkan minat masyarakat ini, perusahaan tambang beberapa tahun yang lalu telah

memberikan banyak bantuan ternak sapi dan kambing pada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, melalui Departemen Pengembangan Masyarakat perusahaan tambang mendirikan Bank Kambing di Desa Sekongkang Atas dengan maksud untuk memberikan contoh cara pemeliharaan kambing pada masyarakat, karena selama ini bantuan ternak kambing yang diberikan oleh perusahaan tambang tidak banyak berkembang. Melalui bank kambing, masyarakat dapat menitipkan kambingnya dengan sistem bagi hasil.

Program dibidang peternakan juga dilaksanakan oleh Pemda KSB dengan memberikan bantuan ternak sapi kepada kelompok yang berada di beberapa desa di Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Selain itu bantuan ternak sapi juga diberikan melalui Universitas Mataram kepada kelompok yang berada di desa Tongo, Aik Kangkung dan Desa Tatar. Selain itu, dalam masyarakat juga terdapat kerjasama dalam pemeliharaan ternak, yaitu dengan sistem ngadas. Sistem ngadas merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik ternak dan pengadas. Jika mengadaskan ternak jantan untuk penggemukan maka hasil penjualannya dibagi dua setelah dikurangi modal. Jika ternak betina (untuk dikembang biakkan) maka anak pertama diberikan kepada pengadas dan anak kedua untuk pemilik ternak atau sebaliknya sesuai kesepakatan.

Bila dilihat dari minat dan perkembangan ternak sapi di kawasan tambang, maka sangat mendukung program pemerintah daerah untuk mewujudkan NTB sebagai Bumi Sejuta Sapi (Program BSS), meskipun sampai tahun 2010 masyarakat sendiri belum banyak tahu tentang program pemerintah daerah tersebut, terutama tentang implementasinya. Alasan masyarakat memilih ternak sapi, hanya karena dipandang pemeliharaannya lebih gampang, lebih menguntungkan dan lebih aman dari pencurian dibandingkan ternak kerbau. Namun demikian, masalah keamanan (pencurian) ini tetap dipandang sebagai penghambat dan ancaman utama masyarakat dalam memelihara ternak.

Gambar 9. Perkembangan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) dan Ternak Kecil (Kambing) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995, 2002-2010



Catatan: Data tahun 1995, 2002 s.d 2007 didasar atas hasil survei terhadap 350 rumah-tangga masyarakat lokal. Sedangkan data tahun 2008-2010 didasarkan hasil survei terhadap 405 rumahtangga masyarakat lokal.

c. Usaha Perikanan

Jumlah masyarakat lokal yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan tidak banyak mengalami perubahan, begitu juga peralatan yang digunakan.

Alat tangkap masih seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu berupa perahu/sampan, mesin ketinting, jaring dan pancing. Hanya di Desa Tatar, sepeda motor sudah mulai dianggap sebagai bagian dari alat tangkap karena digunakan sebagai sarana transportasi utama untuk pergi menjaring dan memancing ke beberapa tempat tertentu yang dapat memberikan hasil lebih banyak atau untuk mendapatkan jenis ikan tertentu, seperti lobster.

Usaha penangkapan ikan di laut sangat dipengaruhi oleh iklim atau oleh musim. Menurut informasi dari nelayan, setiap musim (musim penghujan atau musim kemarau) terdapat musim peralihan atau musim pancaroba. Musim hujan yang berlangsung pada bulan Oktober, Nopember, Desember, Januari, Februari dan Maret, musim peralihannya biasanya terjadi pada Desember dan Januari, dan pada bulan-bulan inilah ikan langka dan harganya lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lain. Musim kemarau berlangsung pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September; musim peralihannya biasanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus, dan pada bulan itu harga ikan dan langka pada musim kemarau. Musim peralihan tersebut ditandai dengan angin dan gelombang laut yang tinggi, sehingga nelayan hanya mampu menangkap ikan di sekitar pesisir pantai dengan durasi sekitar 2-5 jam/trip. Bila pergi melaut ke luar desa, misalnya ke wilayah Telonang, maka para nelayan yang berasal dari Aik Kangkung, Benete, Maluk atau Jelenge akan

menginap di Desa Telonang beberapa hari sampai angin dan gelombang laut mereda, tidak jarang sampai 10 hari baru kembali ke desa asalnya. Selama bepergian, hasil tangkapannya ditaruh dalam box pendingin yang diisikan es.

Pada bulan-bulan biasa di luar musim peralihan, kegiatan menangkap dilakukan lebih sering dengan durasi yang lebih lama, antara 5-12 jam/trip. Bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau secara rata-rata, intensitas dan durasi melaut pada musim kemarau sedikit lebih sering dan lebih lama dibandingkan musim penghujan. Begitu juga produksi dan pendapatan yang diperoleh nelayan (lihat Tabel 40).

Tabel 40. Aktivitas dan Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Laut, Tahun 2010

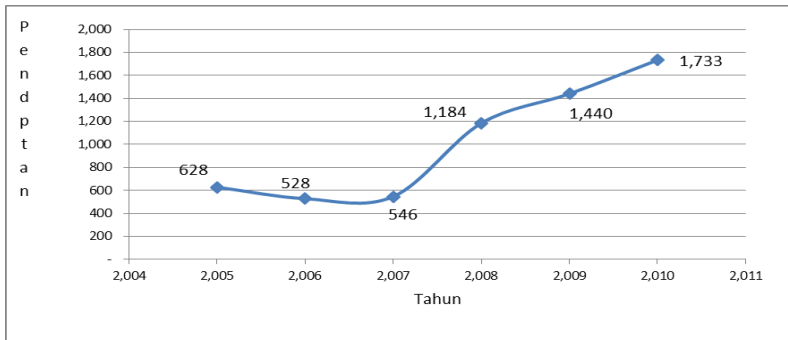
Uraian	Musim Hujan	Musim Kemarau	Agregat Tahun 2010
1. Jumlah Pelaku (RTn)	30	29	30
2. Nilai Investasi/RTn (Rp.000)	90.675	90.675	90.675
3. Jumlah Trip/Bulan	17	19	18
4. Jumlah jam/trip	6,97	7,22	7,10
5. Hasil tangkapan/trip (Kg)	5,75	6,87	6,31
6. Harga (Rp/Kg)	17.717	17.229	17.473
7. Nilai hasil/trip (Rp.000)	101.917	118.429	110.173
8. Biaya operasional/trip (Rp.000)	15.321	16.698	16.009
9. Pendapatan/trip (Rp.000/RTn)	86.596	101.731	
10. Pendapatan /Bulan (Rp.000)	1.499	1.967	1.733

Pada musim penghujan intensitas melautnya rata-rata 17 trip/bulan dengan durasi rata-rata 6,97 jam/trip, sedang pada musim kemarau intensitas melautnya adalah rata-rata 19 trip/bulan dengan durasi rata-rata 7,22 jam/trip. Karena itu pula maka hasil tangkapan dan pendapatan yang diperoleh nelayan pada musim penghujan lebih rendah daripada musim kemarau. Namun bila dilihat dari harga jual ikan, tampak bahwa harga ikan pada musim kemarau relatif lebih rendah dibandingkan musim penghujan, yaitu pada musim kemarau berkisar Rp. 15.000-20.000/kg; sedangkan pada musim penghujan berkisar Rp. 17.000- 28.000 perkilogram; bahkan pada musim peralihan mencapai Rp.30.000-50.000 perkilogram. Perbedaan harga ini bukan saja disebabkan oleh jumlah ikan yang ditawarkan pada musim kemarau lebih banyak, tapi juga disebabkan oleh jenis ikan yang ditangkap pada musim penghujan lebih berkualitas dibandingkan musim kemarau.

Aktivitas nelayan dalam usaha penangkapan ikan selama periode 2005-2010 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dilihat dari intensitas melaut maupun dari hasil tangkapannya setiap trip. Selama tahun 2005-2007, aktivitas nelayan melaut setiap bulannya berkisar 10-16 kali dengan hasil tangkapan setiap trip berkisar 5-6 kilogram. Kemudian pada tahun 2008-2010, intensitas melaut meningkat menjadi 19-20 kali perbulan dengan hasil tangkapan rata-rata 7 kg/trip. Peningkatan intensitas dan hasil tangkapan ini

berdampak terhadap peningkatan pendapatan yang diperoleh setiap rumahtangga nelayan. Bila pada tahun 2005-2007 rata-rata pendapatan nelayan setiap bulan mengalami penurunan dari Rp.628.000 menjadi Rp.546.000, maka pada tahun 2008-2010 pendapatan nelayan terus mengalami peningkatan, dari Rp. 1,4 juta/bulan tahun 2009 menjadi Rp. 1,7 juta/bulan pada tahun 2010 (Lihat Gambar 10).

Gambar 10. Perkembangan Pendapatan Rumahtangga Nelayan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Laut, Tahun 2005-2010



Selain usaha penangkakan ikan dilaut, dalam beberapa tahun terakhir masyarakat lokal juga sudah mulai mencoba mengusahakan rumput laut, perikanan air payau dan perikanan air tawar. Namun demikian kegiatan budidaya rumput laut di desa Ai Kangkung dan desa Beru dusun Jelenga pada tahun 2010 sudah tidak dilakukan lagi, karena adanya serangan semacam lumpur berwarna hitam yang menyelimuti tanaman rumput laut yang menyebabkan tanaman rumput laut tidak dapat berkembang dan akhirnya mati. Di desa Ai Kangkung kegiatan

budidaya rumput laut sudah tidak lagi dilaksanakan sejak tahun 2009 karena selalu gagal akibat terlalu besarnya ombak. Sementara di Desa Tongo, pada tahun 2010 seorang petani mencoba menanam rumput laut seluas 2 are atas permintaan seorang pengusaha rumput laut, dan sudah di panen sebanyak 3 kali dengan produksi sekitar 100 kg kering/are dengan harga Rp 8.500,-/kg. Aktivitas dan pendapatan yang diperoleh dari rumput laut tersebut dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Aktivitas dan Rata-Rata Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Budidaya Rumput Laut, Tahun 2010

Uraian	Musim Hujan	Musim Kemarau	Agregat Tahun 2010
1. Jumlah Pelaku (RTn)	1	1	1
2. Rata-2 Nilai Investasi (Rp.000)	1,300	4,000	2,650
3. Jumlah rakit (unit/RTn)	4	2	3
4. Luas Tanam (m ²)	200	400	300
5. Proses Produksi (kali)	1	2	3
6. Hasil produksi kering (Kg)	600	300	900
7. Harga (Rp/Kg)	4,500	8,500	5.267
8. Nilai hasil (Rp.000)	2,700	2,040	4,740
9. Biaya operasional (Rp.000)	375	885	1,260
10. Pendapatan (Rp.000/RTn)	2,325	1,155	3,480
11. Rata-Rata Pendapatan/Bln (Rp.000)	388	193	290

Usaha budidaya ikan air tawar juga sudah dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa di

kawasan tambang, yaitu di Desa Goa, Beru, Aik Kangkung dan Desa Tatar. Jenis ikan yang di pelihara adalah nila, lele, mujair dan karper yang bibitnya dibeli dari Lombok Timur atau Lingsar. Di Desa Goa terdapat 2 orang yang memiliki kolam, di Beru 1 orang, di Desa Ai Kangkung 3 orang dan di Desa Tatar 1 orang dengan luas kolam rata-rata 20 are. Budidaya ikan air tawar yang dilakukan oleh masyarakat lokal ini belum intensif, karena menganggap bibit dan pakannya cukup mahal, dan pemasarannya masih terbatas. Pemasaran dilakukan di sekitar desa dan pada pedagang sayur keliling untuk dipasarkan lagi ke desa lain dengan harga sekitar Rp 20.000/Kg. Aktivitas dan pendapatan yang diperoleh dari budidaya ikan air tawar dapat disimak pada Tabel 42.

Tabel 42. Aktivitas dan Rata-Rata Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Darat, Tahun 2010

Uraian	Musim Hujan	Musim Kemarau	Agregat Tahun 2010
Jumlah Pelaku (RTn)	3	3	3
Nilai Investasi/RTn (Rp.000)	2.000	2.000	2.000
Jumlah Trip (kali)		7	7
Jumlah jam/trip	1	1	1
Hasil tangkapan/trip (Kg)	2	2	2
Harga (Rp.000/Kg)	20	20	20
Nilai hasil/trip (Rp.000)	40	40	40
Biaya operasional/trip (Rp.000)	5	5	5
Pendapatan/trip (Rp.000/RTn)	35	35	35
Total Pendapatan (Rp.000)	245	245	490
Pendapatan/Bulan (Rp.000)	41	41	41

Khusus tambak hanya ada di Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh dengan luas tambak lebih dari 25 ha dan jenis ikan yang diusahakan adalah bandeng dan sebagian kecil udang tapi kurang berhasil karena terbentur masalah biaya dan masalah teknologi budidaya yang kurang dikuasai. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Aktivitas dan Rata-Rata Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Air Payau, Tahun 2010.

Uraian	Musim Hujan	Musim Kemarau	Agregat Tahun 2010
1. Jumlah Pelaku (RTn)	1	1	1
2. Luas Tambak (ha)	25	25	25
3. Proses Produksi (kali)	1	1	2
4. Hasil produksi kering (Kg)	285	279	564
5. Harga (Rp.000/Kg)	25	25	25
6. Nilai hasil (Rp.000)	7.125	6.975	14.100
7. Biaya operasional (Rp.000)	1.050	1.050	2.100
8. Pendapatan (Rp.000/RTn)	6.075	5.925	12.000
9. Rata-Rata Pendapatan/Bln (Rp.000)	1.013	988	1.000

Untuk mendukung usaha masyarakat lokal dalam bidang perikanan, perusahaan tambang juga telah memberikan bantuan alat tangkap, berupa perahu, mesin ketinting jaring, pancing kepada nelayan sepanjang pantai kawasan tambang, mulai dari Dusun Jelenge Desa Beru, Desa Benete, Maluk, Pasir Putih, Ai Kangkung dan Desa Tatar. Pada tahun 2010, bersama Pemda KSB perusahaan tambang juga

masih memberikan bantuan alat tangkap seperti pancing dan jaring kepada nelayan. Di Desa Dasan Anyar bantuan yang diberikan kepada petani tambak adalah berupa bibit bandeng dan bibit udang.

d. Usaha Industri Kerajinan Rumahtangga

Pada tahun 2010 jumlah masyarakat lokal yang melakukan usaha industri kerajinan rumahtangga adalah sebanyak 54 rumahtangga atau sekitar 13,33% dari jumlah sampel rumahtangga masyarakat lokal. Jenis usaha industri kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat lokal tersebut sebanyak 14 jenis. Dari 14 jenis usaha tersebut yang paling berkembang dan perlakunya paling banyak adalah: industri kerajinan batu bata, industry tahu tempe, kerajinan meubel dan industry pembuatan kue dan makanan jadi (lihat Tabel 44). Jenis industry kerajinan lain yang ditemukan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu: industry kapur, anyaman jala, gula merah, minyak kelapa, minyak jereweh, pandai besi dan anyaman alang-alang, tapi jumlah masyarakat lokal yang melakukan semakin terbatas dan cenderung menghilang, seperti anyaman tikar pandan di Desa Benete dan Desa Tongo. Usaha industry batu kapur yang sebelumnya cukup banyak dilakukan oleh masyarakat lokal di Desa Beru dan Belo juga cenderung menghilang, karena batu kapur yang di tambang oleh masyarakat sudah dapat dijual langsung ke perusahaan pengolah tanpa melalui proses pengolahan sendiri oleh masyarakat. Pada

tahun 2010, hanya ditemukan 1 orang masyarakat lokal yang masih menambang dan mengolah sendiri batu kapurnya, tapi hanya dilakukan pada musim kemarau dengan jumlah yang terbatas.

Tabel 44. Jenis, Nilai Investasi dan Omset Usaha Industri Kerajinan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.

Jenis Industri Kerajinan RT	Jumlah RTi	Nilai Investasi (Rp.000/RTi)	Nilai Omzet (Rp.000/RTi)		
			M.Hujan	M.Kemarau	Tahun 2010
Bata	24	14.988	32.541	33.095	65.635
Kapur	1	1.500	-	12.000	12.000
Jala	2	625	2.813	2.813	5.625
Gula Merah	3	575	3.825	4.279	8.104
Meubel	5	24.854	59.974	63.871	123.845
Kue/makanan Jadi	4	2.417	14.508	17.010	31.518
Tahu	3	49.000	35.438	31.219	66.656
Tempe	5	23.760	130.500	130.500	261.000
Minyak Kelapa	1	1.000	8.640	10.800	19.440
Minyak Jereweh	1	150	6.750	9.750	16.500
Pandai Besi	2	11.050	31.875	33.750	65.625
Alang-Alang	2	750	22.950	28.290	51.240
Total	53	130.669	349.813	377.375	

Usaha industri pembuatan kue dan makanan jadi yang dilakukan oleh kaum ibu dan remaja putri, meskipun cukup banyak yang melakukannya, tapi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang. Karena sifatnya demikian, maka jumlah masyarakat

yang terlibat dalam kegiatan ini tidak menentu, kadang-kadang banyak dan kadang-kadang sedikit; dan orang-orangnya juga seringkali berubah-ubah. Padahal jenis pekerjaan ini pernah mendapat bantuan dari perusahaan tambang, berupa peralatan memasak, perlengkapan catering, alat pembuat kue dan kerepek serta peralatan-peralatan lainnya.

Berbeda dengan industri kerajinan meubel (kusen, pintu profil, jendela, meja kursi dan lemari) yang dilakukan oleh kaum pria, jenis pekerjaan ini membutuhkan keahlian dan peralatan khusus, sehingga masyarakat yang melakukan kegiatan ini relatif tetap, dan pekerjaan ini dianggap pekerjaan pokok oleh para pelakunya, karena permintaan masyarakat akan barang-barang ini semakin banyak dan semakin menguntungkan.

Jenis pekerjaan industri kerajinan yang paling banyak dan delematik di kawasan tambang adalah industri kerajinan batu bata. Jenis pekerjaan ini dianggap tidak membutuhkan keahlian khusus dan produknya paling laris di kawasan tambang, mengingat maraknya pembangunan rumah, gedung sekolah, kantor pemerintah, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Permintaan batu bata tidak hanya berasal dari dalam kawasan tambang, tapi juga dari luar kawasan tambang, sehingga harga batu bata di kawasan tambang semakin meningkat dari Rp.350.000 perseribu bata masak pada tahun 2009 menjadi Rp. 400-500 ribu perseribu bata masak pada

tahun 2010. Karena usaha ini tidak membutuhkan keahlian khusus dan bahan bakunya terdapat di sekitar masyarakat, maka mudah dimasuki untuk dijadikan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan oleh masyarakat lokal. Namun dengan semakin meningkatnya permintaan dan banyaknya masyarakat lokal yang mengusahakan batu bata ini, menyebabkan banyak lahan pertanian produktif diambil bagian atas tanahnya (*top soil*) untuk dijadikan bahan baku pembuatan batu bata. Hal ini tentu akan berakibat terhadap semakin rendahnya produk pertanian dan dampak lingkungan lainnya, karena pengambilan tanah untuk usaha ini juga tidak dilakukan dan direncanakan secara baik dan tanpa memperhatikan faktor lingkungan. Karena itu pemerintah daerah, terutama pemerintah desa perlu memberikan pengarahan kepada masyarakat agar pengusahaan industry batu bata ini dapat dilakukan secara baik dan benar, supaya tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang.

e. Usaha Dagang

Usaha dalam bidang perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang paling pesat perkembangannya dibandingkan jenis usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Pada tahun 2010, jumlah masyarakat lokal yang ditemukan melakukan usaha dagang adalah sebanyak 119 rumahtangga atau sekitar 29,38% dari 405 rumahtangga masyarakat lokal yang diteliti. Jenis

usaha yang paling banyak dilakukan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu usaha kios (18,77%);kemudian usaha bakulan (3,95%), usaha warung (2,47%), usaha pertokoan (2,22%). Usaha dagang yang lain kehadirannya tidak menentu, seperti pedagang telur asin, pedagang bunga, pedagang ikan, pedagang gorengan tidak ditemukan lagi dilakukan oleh masyarakat lokal, diganti dengan munculnya pedagang pasar (0,74%), pedagang kayu (0,49%), pedagang kain dan pakaian (0,74%) (lihat Tabel 45). Ini artinya usaha-usaha tersebut belum permanen dilakukan oleh masyarakat lokal, masih bersifat pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang atau untuk memanfaatkan peluang yang ada pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 45 Jenis, Investasi dan Omset Usaha Dagang Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.

Jenis Usaha dagang	Jumlah RTd	Nilai Investasi (Rp.000/RTd)	Nilai Omzet (Rp.000/ RTd/Bln)		
			M.Hujan	M.Kemara u	Rata-Rata
Toko	9	86.333	40.616	41.516	41.066
Kios	76	14.110	15.059	18.139	16.599
Warung	10	4.378	10.321	10.519	10.420
Bakulan	16	1.985	18.095	19.882	18.988
Pedagang Kayu	2	18.500	22.900	22.900	22.900
Pedagan g Pasar	3	3.933	1.370	1.375	1.373
Pedagan g kain/ pakaian	3	28.000	43.600	44.100	43.850
Total	119	157.240	151.960	158.431	155.196

Sementara usaha kios yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat lokal, keberadaannya sudah ada sejak sebelum tambang, tapi pada waktu itu jumlahnya masih terbatas. Sejak awal usaha ini biasa dilakukan disekitar rumah bahkan sebagian besar bersatu dengan rumah, dibuka mulai pagi hari sampai malam hari menjelang waktu tidur, karena usaha ini dapat dilakukan secara bergantian antar anggota rumahtangga, meskipun sebagian besar dilakukan oleh kaum ibu dan remaja putri. Karena itu pula usaha kios cepat berkembang, tidak mengenal musim hujan atau musim kemarau, karena bisa dilakukan sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan sambilan oleh segenap anggota rumahtangga.

Berbeda dengan usaha pertokoan yang umumnya terdapat dipinggir jalan besar dengan modal investasi yang cukup besar, sehingga agak jarang dilakukan oleh rumahtangga masyarakat lokal. Usaha pertokoan yng terdapat pada pusat pertumbuhan seperti Maluk sebagian besar dilakukan oleh penduduk pendatang yang sengaja berinvestasi pada bidang pertokoan. Begitu juga pada usaha warung, juga sebagian besar dilakukan oleh penduduk pendatang, hanya masyarakat lokal yang yang tinggal dipinggir jalan dan memiliki keahlian memasak yang membuka usaha warung di kawasan tambang.

Bila dibandingkan aktivitas usaha dagang yang ada pada tahun 2010, tampak jelas pada Tabel 45

bahwa usaha pertokoan memiliki nilai investasi dan omzet usaha bulanan paling tinggi, kemudian diikuti oleh usaha kain/pakaian dan usaha perkayuan. Usaha kios omzet usahanya justru kalah oleh pedagang bakulan meskipun nilai investasinya jauh lebih tinggi, hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan usaha warung yang memiliki nilai investasi yang lebih rendah. Ini artinya bahwa perkembangan yang pesat dari usaha kios bukan disebabkan oleh keuntungan usaha ini yang tinggi, tapi lebih disebabkan oleh kemudahan untuk memulai dan melaksanakan usaha ini. Berbeda dengan usaha bakulan, memerlukan keaktifan yang lebih agresif untuk mencari pembeli dan langganan, tidak bersifat menunggu seperti usaha kios. Pada usaha warung, meskipun bersifat pasif atau menunggu pembeli dan pelanggan, tapi usaha ini memerlukan keahlian yang tidak semua orang bisa melakukannya.

Perkembangan usaha dagang yang dilakukan oleh masyarakat lokal juga tidak terlepas dari bantuan perusahaan tambang. Program bantuan perusahaan tambang untuk usaha dagang masih diberikan sampai saat ini yang dilaksanakan oleh Yayasan Olat Parigi. Pada tahun-tahun terakhir ini usaha dagang juga mendapat bantuan dari Pemda KSB melalui Program KBRT (Koperasi Berbasis Rukun Tetangga). Karena itu ke depan diperkirakan usaha dagang yang dikakukan oleh masyarakat lokal akan berkembang terus, dilihat jumlah pelaku atau jenis usaha. Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam dari beberapa

tokoh masyarakat, diketahui beberapa jenis usaha baru sudah mulai dilakukan oleh masyarakat lokal, seperti toko dan kios alat-alat listrik, material dan peralatan bangunan, toko penjualan spare parts dan minyak pelumas kendaraan roda dua, toko atau kios obat-obatan (Apotik), dan beberapa usaha dagang lain yang umumnya dilakukan oleh keluarga muda yang tidak termasuk sampel dalam penelitian ini.

f. Usaha Jasa

Jenis usaha yang paling banyak jenis dan ragamnya yang dilakukan oleh masyarakat lokal di kawasan tambang adalah usaha jasa, mulai dari jasa yang berkaitan dengan transportasi sampai jasa yang berkaitan dengan pengobatan atau perdukunan (sandro). Bila diperhitungkan, jenis jasa yang pernah dan sedang dilakukan oleh masyarakat lokal, tidak kurang dari 20 jenis, tapi beberapa jenis usaha jasa ini ada yang tenggelam dan ada yang muncul belakangan. Pada tahun 2010, jenis usaha jasa yang dilakukan oleh masyarakat lokal sebanyak 17 jenis, dilakukan oleh 108 rumahtangga atau 26,67% dari jumlah rumahtangga masyarakat lokal yang menjadi sampel. Jenis usaha jasa yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat lokal masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu usaha jasa pada bidang transportasi, yaitu *jasa ojek* (9,63%) dan *jasa benhur* (3,70%). Kemudian diikuti oleh jasa pertukangan (2,96%), jasa bengkel/las dan jasa huller (masing-masing 1,73%), tukang jahit dan angkutan

truk (masing-masing 1,48 % dan 1,23%). Usaha jasa lain yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada tahun 2010 adalah jasa perdukunan/sandro, jasa penebangan dan pemecahan kayu (chainsaw), jasa penyewaan vidio dan sablon, penyewaan sound system, TV kabel, penyewaan traktor, konsultan bangunan, jasa pembuatan sumur bor, fotocopy dan jasa penangkapan ternak (lihat Tabel 46).

Jenis usaha jasa yang paling besar nilai investasinya adalah usaha jasa angkutan truk, yaitu rata-rata Rp. 175 juta dengan omzet setiap bulan rata-rata Rp. 11 juta. Usaha jasa yang ternyata cukup besar omzetnya setiap bulan meskipun modal investasinya tidak besar adalah jasa pembuatan sumur bor. Modal investasinya hanya Rp. 7,5 juta, tapi omzetnya setiap bulan sampai Rp. 6 juta. Ini disebabkan jenis usaha ini membutuhkan keahlian dan pengalaman, sehingga jumlah pelakunya masih terbatas. Jenis usaha jasa yang membutuhkan modal investasi lebih Rp. 20 juta, tapi omzet usahanya setiap bulan kurang Rp. 4 juta adalah jasa TV kabel dan jasa chainsaw. Jenis usaha jasa yang membutuhkan modal investasi antara Rp. 10-20 juta adalah photocopy, jasa penyewaan sound system, penyewaan video, penyewaan traktor, jasa huller, sewa traktor dan jasa ojek, nilai omzetnya kurang Rp. 4 juta setiap bulan. Jenis usaha jasa yang lain memiliki modal invesatsi yang relatif kecil (kurang Rp. 10 juta) dan omzet usahanya setiap bulan juga tidak terlalu besar. Jenis usaha jasa sebgaimana diketahui, modalnya sebagian

besar bukan modal material atau modal uang, tapi adalah modal keterampilan, pengalaman dan keahlian; dan hal ini menjadi karakteristik pekerjaan yang berkaitan dengan sektor jasa.

Bila dilihat perkembangan usaha jasa yang dilakukan oleh masyarakat lokal dari tahun ke tahun, dilihat dari jenisnya cenderung semakin meningkat, tapi bila dilihat dari omzet dan pendapatan yang diterima setiap bulan pada beberapa jenis usaha jasa cenderung semakin menurun. Bahkan secara umum, kontribusi usaha jasa pada pendapatan masyarakat lokal menurun dari rata-rata Rp. 358 ribu perbulan pada tahun 2009 menjadi Rp. 296 ribu perbulan pada tahun 2010 atau menurun dari 10% menjadi 6,90% terhadap total pendapatan rumahtangga setiap bulan pada tahun yang bersangkutan (lihat Tabel 52).

Tabel 46. Jenis, Nilai Investasi dan Omzet Usaha Jasa Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.

Jenis Usaha Jasa	Jumlah RTj	Investasi (Rp.000/RT)	Nilai Omzet (Rp.000/RT/Bln)		
			MH '10	MK '10	Agregat
Ojek	39	10.707	1.172	1.283	1.228
Tk Jahit	6	3.569	1.141	2.003	1.572
Tk. Bangunan	12	2.682	1.116	1.159	1.137
Sandro/Dukun	3	263	691	691	691
Bengkel/Las	7	6.000	1.237	1.318	1.278
Benhur	15	5.100	1.045	1.119	1.082
Tracktor	1	12.000	4.500	3.000	3.750
Truk	5	175.000	10.409	12.164	11.286
Sewa Video/Sablon	2	18.750	2.960	2.960	2.960
Huller (RMU)	7	12.907	1.388	1.443	1.416

Konsultan/Kontraktor	1	8.000	1.500	2.000	1.750
Sumur Bor	1	7.500	6.000	6.000	6.000
Foto Copy	1	20.000	3.000	3.000	3.000
Tangkap Ternak	1	200	2.000	3.000	2.500
Sewa Sound System	2	18.750	2.960	2.960	2.960
Chainsaw	3	21.250	3.738	3.900	3.819
TV Cable/Sewa PS	2	29.000	2.850	2.850	2.850
Agregat	108	16.617	13.906	2.256	2.234

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat lokal, diketahui bahwa penurunan kontribusi sektor jasa tersebut terutama terjadi pada usaha jasa transportasi ojek yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat lokal. Mudah dan semakin banyaknya masyarakat lokal yang memiliki sepeda motor, telah menyebabkan semakin menurunnya permintaan masyarakat akan jasa ojek. Hal ini berakibat terhadap semakin menurunnya nilai omzet dan pendapatan yang diterima setiap bulan oleh pengojek. Pada tahun 2009 nilai omzet yang diterima oleh pengojek rata-rata sebesar Rp. 1,4 juta setiap bulan, sedangkan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1,2 juta. Sehingga bila diperhitungkan pendapatan bersih yang diterima oleh pengojek tentu perbedaannya lebih lebar, karena biaya operasional yang dikeluarkan semakin tinggi. Kondisi yang sama juga terjadi pada usaha jasa penjahit, pertukangan, perbengkelan, jasa huller, konsultan bangunan, dan jasa photocopy; omzet usaha dan pendapatan para pelakunya juga mengalami penurunan.

g. Usaha Pencarian Hasil Hutan

Usaha ekonomi lokal yang tidak atau kurang didukung oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan tambang sampai saat ini adalah usaha pencaharian hasil hutan, karena usaha ini cenderung merusak bahkan memusnahkan sumberdaya hutan yang semestinya harus dilindungi. Sebelum tambang, sumberdaya hutan merupakan salah satu sumber pencarian masyarakat yang cukup berarti; yang berasal dari hasil penjualan kayu bangunan, rotan, gaharu, binatang buruan dan lebah madu. Pada waktu itu, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan ini untuk menambah penghasilan rumahtangganya. Setelah masuk tambang, dilakukan pengawasan dan pembatasan yang ketat terhadap pengambilan hasil hutan; dan pada waktu yang sama masyarakat juga banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, sehingga kegiatan pencarian hasil hutan secara drastis mengalami penurunan. Masyarakat yang masih melakukan kegiatan pencarian hasil hutan, bukan lagi disebabkan oleh adanya desakan ekonomi, tapi lebih untuk meneruskan hobi dan kebiasaan dalam memanfaatkan waktu luang. Karena itu jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan pencarian hasil hutan tidak banyak berubah, bahkan ada kecenderungannya semakin menurun. Bila pada tahun 2008 dan 2009 jumlah masyarakat lokal yang melakukan pencarian hasil hutan sebanyak 8 rumahtangga, maka pada tahun 2010 ditemukan

tinggal 4 rumahtangga. Jenis usaha pencaharian hasil hutan juga mengalami penurunan.

Pada tahun 2007, jenis usaha pencarian hasil hutan yang dilakukan masyarakat lokal sebanyak 4 jenis, yaitu: berburu binatang, berburu lebah madu, mengumpulkan kayu bakar dan mengumpulkan bambu hutan. Pada tahun 2008, tidak ditemukan masyarakat lokal mencari nafkah dengan mengumpulkan kayu bakar; kemudian pada tahun 2009 perburuan binatang juga sudah tidak lagi dilakukan oleh masyarakat lokal. Sehingga jenis usaha pencarian hasil hutan yang masih dilakukan oleh masyarakat lokal pada tahun 2009 tinggal dua jenis yaitu: pengumpulan bambu hutan dan perburuan lebah madu. Pada tahun 2010, masyarakat lokal (responden) yang melakukan pemburuan lebah madu untuk diperjual belikan tidak ditemukan (namun masyarakat non responden masih ada yang melakukan kegiatan ini), tapi yang ditemukan adalah yang berburu binatang dan mengumpulkan bambu hutan (lihat Tabel 47)

Tabel 47. Jenis dan Omset Usaha Pencarian Hasil Hutan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2010.

Jenis Usaha Hutan	Jumlah Pelaku (RTh)		Omzet/Bulan (Rp.000/RTh)		
	MH 10	MK 10	MH 10	MK 10	Rata- Rata
Berburu Binatang	2	2	1.359	1.414	1.388
Mengumpulkan Bambu	2	2	982	982	983
Mengumpulkan K. Bakar	-	-	-	-	-
Agregat	4	4	1.171	1.198	1.185

Muncul tenggelamnya rumahtangga masyarakat lokal yang melakukan pencaharian hasil hutan menandakan jenis pekerjaan pencaharian hasil hutan tersebut tidak permanen, hanya untuk mengisi waktu luang dan dianggap sebagai pekerjaan selingan.

h. Buruh Harian.

Pada tahun 2010, jumlah rumahtangga masyarakat lokal yang melakukan kegiatan sebagai buruh harian pada musim penghujan adalah sebanyak 84 rumahtangga, kemudian pada musim kemarau turun menjadi 72 rumahtangga atau masing-masing sebanyak 20,74% dan 17,78% dari total rumahtangga masyarakat lokal yang dijadikan sampel (lihat Tabel 48). Perbedaan ini menandakan bahwa kegiatan sebagai buruh harian di kawasan tambang dipengaruhi oleh musim.

Tabel 48. Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Berburuh Harian, Tahun 2010.

Jenis Pekerjaan Buruh Harian	Musim Hujan 2010			Musim Kemarau 2010		
	Jumlah Pelaku	Hari Kerja/Bln	Penghasilan Rp.000/bln	Jumlah Pelaku	Hari Kerja/Bln	Penghasilan Rp.000/bln
Buruh tani	49	14	589	32	12	542
Buruh bangunan	25	16	837	29	20	1.011
Buruh Cuci	8	20	588	9	20	590
Kondektur	1	16	960	1	16	960
Buruh Pasar	1	16	640	1	16	640
Total	84	14	602	72	14	624

Jenis kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan sangat dipengaruhi oleh musim adalah kegiatan sebagai buruh tani. Pada musim penghujan, kesempatan kerja sebagai buruh tani sangat banyak, karena pada waktu itu semua lahan pertanian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedang pada musim kemarau, jumlah lahan pertanian yang dapat diolah terbatas, yaitu hanya lahan-lahan pertanian yang dapat diairi oleh air irigasi dan oleh mesin air, sehingga jumlah tenaga kerja buruh tani yang dibutuhkan terbatas. Jumlah masyarakat lokal yang terlibat sebagai buruh tani pada musim hujan adalah sebanyak 49 rumahtangga dengan intensitas atau rata-rata hari kerja perbulan adalah sebanyak 14 hari. Sedang pada musim kemarau, jumlah rumahtangga yang terlibat sebagai buruh tani turun menjadi sebanyak 32 rumahtangga dengan rata-rata hari kerja perbulan sebanyak 12 hari.

Selain buruh tani, kegiatan sebagai buruh harian yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat lokal adalah sebagai buruh bangunan. Kegiatan ini sangat ditentukan oleh adanya permintaan tenaga kerja dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan tambang atau oleh pemerintah. Pada tahun 2010, perusahaan tambang bersama sub kontraktornya, Pemda KSB dan pemerintah pusat melalui Program PNPM MP melakukan berbagai proyek pembangunan yang menyerap cukup banyak tenaga kerja, diantaranya pembangunan saluran irigasi, saluran lingkungan/drainase, pembangunan dan perbaikan atau pengaspalan jalan, pembangunan jalan usaha tani, rabat jalan/gang di sekitar pemukiman, pembangunan atau rehabilitasi bangunan sekolah, kantor desa dan kantor pemerintah lainnya, pembangunan Pustu dan Puskesmas serta pembangunan beberapa jembatan di lintas Tatar - Talonang. Tenaga kerja yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan tersebut sebagian besar bersifat harian, artinya upahnya yang diterima ditentukan oleh hari kerjanya. Pada musim penghujan jumlah masyarakat lokal yang terlibat sebagai buruh bangunan sedikit lebih rendah dibandingkan musim kemarau, yaitu pada musim penghujan sebanyak 25 rumahtangga dengan intensitas 16 hari kerja perbulan, sedangkan pada musim kemarau adalah sebanyak 29 rumahtangga dengan intensitas 20 hari kerja perbulan.

Jenis pekerjaan berburuh harian selain buruh tani dan buruh bangunan yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada tahun 2010 adalah sebagai buruh cuci, buruh pasar dan sebagai kondektur. Namun jumlah masyarakat lokal yang terlibat dalam dua kegiatan terakhir masih sangat terbatas. Kedua jenis kegiatan tersebut lebih banyak dilakukan oleh masyarakat pendatang atau masyarakat dari luar kawasan. Sementara kegiatan sebagai buruh cuci yang dilakukan oleh kaum perempuan, semakin nyata keberadaannya, terutama di desa-desa yang banyak dihuni oleh penduduk pendatang yang bekerja pada perusahaan tambang atau pada sub kontraktornya, seperti di Desa Maluk dan sekitarnya.

i. Pertambangan Rakyat.

Dalam RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) usaha ekonomi lokal yang perlu dipantau adalah usaha pada bidang pertambangan skala kecil atau pertambangan rakyat, terutama pertambangan emas dan tembaga. Namun sampai tahun 2006/2007 menurut sumber informasi yang dipercaya usaha tersebut tidak pernah dilakukan oleh masyarakat lokal. Begitu juga dalam kegiatan pertambangan yang lain, seperti pertambangan batu galian C masyarakat lokal tidak ada yang melakukannya. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh masyarakat pendatang yang bekerja sebagai buruh bangunan. Hanya pertambangan batu kapur yang dilakukan oleh masyarakat lokal sejak sebelum tambang sampai saat

ini, namun akhir-akhir ini pertambangan batu kapur sebagian besar dilakukan oleh perusahaan swasta, sementara masyarakat lokal hanya sebagai pekerjanya. Karena itu pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan swasta tersebut.

Pertambangan rakayat yang muncul belakangan ini di Kecamatan Jereweh adalah penambangan batu mangan yang lokasinya di Lang Murus, berdekatan dengan Bendungan Murus di Desa Beru. Menurut informasi dari tokoh masyarakat lokal Desa Beru, penambangan batu mangan ini sudah dimulai sejak 3 tahun yang lalu (sekitar tahun 2008) di Lang Desa, tetapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi di lokasi tersebut, dan pindah ke Lang Murus. Penambangan di Lang Murus sudah dilakukan sejak hampir 2 tahun lalu (sekitar tahun 2009), merupakan tambang rakyat yang dilakukan oleh masyarakat dari desa-desa di Kecamatan Jereweh dan juga masyarakat dari luar seperti dari Alas, Lombok dan Jawa. Hasil penambangan batu mangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dijual kepada pengumpul seharga Rp 500,-/kg, kemudian pedagang pengumpul menjualnya ke sebuah perusahaan swasta yang berlokasi di Desa Benete. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dari kegiatan menambang batu mangan berkisar Rp 70.000 –120.000/orang/ hari. Berarti lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan sebagai buruh kasar lainnya. Karena itu, bila kegiatan ini tidak dibatasi dan dibiarkan, maka

diperkirakan akan banyak masyarakat berdatangan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut.

Meskipun dalam penelitian ini tidak ditemukan masyarakat lokal sampel yang melakukan kegiatan penambangan, namun informasi dari tokoh masyarakat di atas dapat dijadikan acuan untuk lebih mewaspadai dan memantau kegiatan penambangan tersebut, karena dari banyak kasus yang terjadi di beberapa kawasan penambangan rakyat di Propinsi Nusa Tenggara maupun propinsi lainnya, sering menimbulkan masalah lingkungan dan social budaya, bukan hanya di dalam wilayah penambangan saja, tapi merambah sampai di luar wilayah penambangan.

j. Kegiatan Sebagai Karyawan Swasta.

Karyawan swasta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga kerja masyarakat lokal yang bekerja pada perusahaan tambang, sub-kontraktor atau perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang memperoleh gaji tetap secara bulanan atau mingguan. Dari hasil studi terhadap 405 rumahtangga masyarakat lokal, pada tahun 2010 ditemukan 129 rumahtangga atau sekitar 31,85% rumahtangga masyarakat lokal memiliki anggota bekerja sebagai karyawan swasta; 62 rumahtangga (15,31%) diantaranya merupakan karyawan perusahaan tambang; 48 rumahtangga (11,85%) bekerja pada sub kontraktor perusahaan tambang dan

19 rumahtangga (4,69%) bekerja menjadi karyawan di perusahaan lain (Tabel 49).

Tabel 49. Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Sebagai Karyawan Swasta, Tahun 2010.

Jenis Pekerjaan karyawan	Musim Hujan 2010			Musim Kemarau 2010		
	Jumlah RT Pelaku	Hari Kerja/Bln	Penghasilan Rp.000/bln	Jumlah RT Pelaku	Hari Kerja/Bln	Penghasilan Rp.000/bln
Karyawan PT.NNT	62	18	9.857	62	18	9.797
Kontraktor PT.NNT	48	23	2.723	48	23	2.723
Perusahaan lain	19	26	1.418	19	26	1.418
Agregat	129	23	4.666	129	23	4.646

Jumlah rumahtangga yang memiliki anggota bekerja menjadi karyawan perusahaan swasta, khususnya karyawan PT.NNT relatif kecil dibandingkan dengan jumlah rumahtangga masyarakat lokal. Namun demikian kontribusinya terhadap penghasilan masyarakat lokal sangat besar; lebih besar dari sumber-sumber yang lain (lihat Tabel 52). Bagi rumahtangga yang memiliki anggota bekerja pada sektor swasta tersebut, pendapatan yang disumbangkan setiap bulan rata-rata mencapai Rp. 4,6 juta/bulan; bahkan bagi rumahtangga yang bekerja langsung sebagai karyawan perusahaan tambang, rata-rata pendapatan yang diterima setiap bulan mencapai Rp.9,8 juta. Tapi bagi yang bekerja pada perusahaan sub kontraktor, pendapatan yang

diperoleh rata-rata sebesar Rp. 2,7 juta; apalagi yang bekerja di perusahaan lain hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp. 1,4 juta setiap bulan. Sehingga dapat dikatakan, pendapatan masyarakat lokal dari kegiatan sebagai karyawan perusahaan tambang dengan perusahaan swasta lainnya sangat timpang. Perbedaan penghasilan tersebut tentu tidak hanya ditentukan oleh perusahaan tempat kerja, tapi juga oleh kualifikasi dari tenaga kerja masyarakat lokal itu sendiri. Namun karena perbedaan pendapatan yang demikian besar, maka tidak mengherankan bila semua tenaga kerja masyarakat lokal berkeinginan untuk menjadi karyawan perusahaan tambang.

k. Kegiatan Sebagai Pegawai Pemerintah

Setelah berdiri Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti oleh pemekaran wilayah kecamatan dan desa di Kawasan Tambang, maka jumlah masyarakat lokal yang menjadi pegawai pemerintah (PNS, Polisi, TNI dan tenaga-tenaga honorer) semakin meningkat. Dari hasil penelitian tahun 2010 terhadap 405 rumahtangga masyarakat lokal, ditemukan sebanyak 115 rumahtangga (28,40%) memiliki anggota bekerja sebagai pegawai pemerintah; 14,57% diantaranya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), 13,33% sebagai pegawai honorer yang sebagian besar dikaryakan menjadi staf kecamatan dan desa; dan hanya 0,5% rumahtangga yang memiliki anggota sebagai Polisi dan TNI (Tabel 50).

Tabel 50. Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Sebagai Pegawai Pemerintah, Tahun 2010.

Jenis Pekerjaan Pegawai Pemerintah	Musim Hujan 2010			Musim Kemarau 2010		
	Jumlah Pelaku	Hari Kerja/Bln	Penghasilan Rp.000 /bln	Jumlah Pelaku	Hari Kerja /Bln	Penghasilan Rp.000/bln
PNS	59	25	3.979	59	24	4.007
Polisi/TNI	2	26	3.900	2	26	3.900
Staf Desa/Kecamatan	54	24	933	55	25	936
Agregat	115	25	2.937	116	25	2.948

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah rumahtangga masyarakat lokal yang memiliki anggota bekerja di bidang pemerintahan, cenderung semakin banyak. Pada tahun 2009, jumlah rumahtangga yang memiliki anggota bekerja sebagai pegawai pemerintah adalah sebanyak 96 rumahtangga (23,70%) dengan penghasilan rata-rata setiap bulan adalah sebesar Rp. 1,9 juta; sedangkan pada tahun 2010 adalah 115 rumahtangga (28,40%) dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2,9 juta. Peningkatan jumlah pegawai pemerintah tersebut terutama karena adanya perekrutan pegawai honorer. Penghasilan yang diterima oleh seorang PNS dan seorang Polisi atau TNI relatif sama, tapi jauh lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang masih berstatus sebagai pegawai honorer (lihat Tabel 50).

1. Pendapatan dari Luar Hasil Kerja

Pendapatan masyarakat dari luar hasil kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) *transfer income*, seperti dari bantuan, pemberian atau subsidi pemerintah; dan (2) *property income*, seperti dari hasil

sewa kekayaan (tanah, rumah atau kekayaan lainnya). Setelah dihimpun, pendapatan 405 rumahtangga masyarakat lokal dari luar pencurahan tenaga kerja pada tahun 2010 pada musim penghujan adalah sebanyak Rp. 84.7 juta dan pada musim kemarau jauh lebih tinggi, yaitu sebanyak Rp. 455,9 juta. Sehingga bila diperhitungkan setiap bulan dan setiap rumahtangga, maka pendapatan yang diperoleh adalah rata-rata sebesar Rp. 116 ribu perbulan.

Pada Tabel 51 ditunjukkan bahwa jumlah masyarakat lokal yang memperoleh pendapatan dari luar curahan tenaga kerja pada musim penghujan adalah sebanyak 297 rumahtangga (73,33%), dan pada musim kemarau hampir semuanya, yaitu sebanyak 397 rumahtangga (98,02%). Pada tahun 2010 masyarakat lokal tidak lagi menerima subsidi pemerintah berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai), tapi sebanyak 181-182 rumahtangga atau sekitar 45% mengaku menerima bantuan Raskin (Beras Untuk Orang Miskin).

Banyaknya rumahtangga masyarakat lokal yang menerima raskin sering salah diartikan atau sering dijadikan indikator tentang banyaknya masyarakat miskin di kawasan tambang. Padahal bila ditelusuri, data tersebut muncul karena adanya kebijakan di tingkat masyarakat atau desa, beras raskin yang diterima dari pemerintah tersebut dibagikan secara merata kepada masyarakat, tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dari masyarakat desa bersangkutan

dengan maksud agar tidak menimbulkan rasa iri dan prasangka buruk ditengah masyarakat

Tabel 51. Sumber dan Pendapatan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Luar Pencurahan Tenaga Kerja, Tahun 2010.

Pendapatan dari Luar Curahan TK	Jumlah RT		Pendapatan (Rp.000/RT)		
	MH '10	MK '10	MH'10	MK '10	Total
Pemberian	44	45	23	2.095	1.059
Beasiswa	23	25	152	897	525
BLT	-	-	-	-	-
Raskin	181	182	27	176	101
Subsidi Pemerintah	2	2	73	438	256
Bantuan PT NNT	6	86	13	121	67
Sewa tanah	8	4	301	1.275	788
Sewa rumah	30	31	1.435	8.508	4.972
Sewa Asset lain	2	2	2.125	12.750	7.438
Jual Aset/Tanah dll	-	1	-	10.000	5.000
Pensiun	1	1	1.989	1.989	1.989
Total	297	379	6.139	38.249	22.194

Karena itu di beberapa desa, hanya masyarakat yang tidak mau menerima yang tidak mendapat beras raskin tersebut. Oleh karena itu, agar bantuan pemerintah tersebut tidak salah sasaran dan tidak salah diartikan, maka bantuan pemerintah dalam bentuk raskin juga perlu dipertimbangkan sebagaimana BLT, karena ternyata bantuan tersebut lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya.

3. Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga

a. Pendapatan Rumahtangga

Pada Tabel 52 ditampilkan rata-rata pendapatan rumahtangga masyarakat lokal setiap bulan dari hasil

kerja dan dari luar hasil kerja. Pendapatan dari hasil kerja dipilahkan menjadi 10 bidang pekerjaan, yaitu usaha pertanian, peternakan, perikanan, industry kerajinan, perdagangan, usaha jasa, kehutanan, buruh harian, pegawai pemerintah dan karyawan swasta. Sedangkan yang berasal dari luar hasil kerja, baik dari *transfer income* maupun dari *property income* digabung menjadi satu. Berdasarkan pemilahan tersebut, maka dapat diketahui struktur pendapatan rumahtangga masyarakat lokal pada musim hujan dan musim kemarau; dan rata-rata sepanjang tahun 2010.

Pada Tabel 52 jelas terlihat bahwa rata-rata pendapatan rumahtangga masyarakat lokal pada tahun 2010 adalah sekitar Rp. 4,3 juta perbulan. Pendapatan terbesar disumbangkan oleh masyarakat lokal yang bekerja menjadi karyawan swasta (39,68%), kemudian pedagang (14,18%), pegawai pemerintah (14,17%), industry kerajinan (7,09%), dan usaha jasa (6,90%). Sedangkan usaha pertanian yang menjadi pekerjaan pokok sebagian besar atau 33,37% tenaga kerja masyarakat lokal hanya menyumbangkan pendapatan sebesar 5,80%, kontribusinya lebih rendah dari usaha jasa dan industry kerajinan. Usaha peternakan menyumbangkan pendapatan hanya 2,82%, perikanan 3,36%, dan usaha kehutanan hanya 0,10%. Ketiga basis ekonomi masyarakat lokal tersebut kontribusinya lebih rendah daripada kegiatan sebagai buruh harian yang menyumbangkan pendapatan sebesar 3,18%.

Tabel 52. Struktur dan Rata-Rata Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Setiap Bulan, Tahun 2010.

No	Sumber Pendapatan	Musim Penghujan		Musim Kemarau		Rata-Rata 2010	
		Rp.000	%	Rp.000	%	Rp.000	%
1	Pertanian	334	8,08	163	3,68	249	5,80
2	Peternakan	131	3,16	111	2,51	121	2,82
3	Perikanan	117	2,82	171	3,86	144	3,36
4	Industri Kerajinan	268	6,48	340	7,66	304	7,09
5	Perdagangan	580	14,03	636	14,32	608	14,18
6	Usaha Jasa	278	6,71	314	7,08	296	6,90
7	Kehutanan	4	0,10	4	0,10	4	0,10
8	Buruh Harian	142	3,42	131	2,96	136	3,18
9	Pegawai Pemerintah	549	13,27	666	15,01	608	14,17
10	Karyawan Swasta	1.698	41,05	1.705	38,40	1.702	39,68
11	Luar Curahan TK	36	0,87	197	4,43	116	2,71
	Total	4.137	100,00	4.440	100,00	4.289	100,00

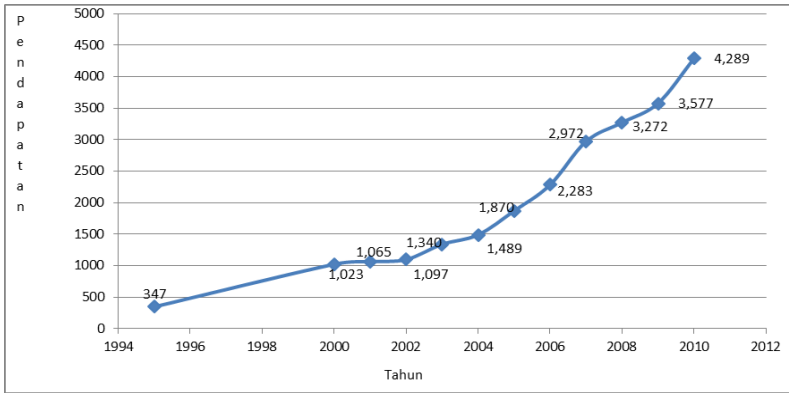
Data di atas semakin menunjukkan bahwa struktur perekonomian (pendapatan) masyarakat lokal mengalami transformasi yang demikian cepat dari struktur perekonomian yang berbasis pertanian ke struktur perekonomian yang berbasis industry dan jasa perdagangan. Kalau pada tahun 2009, kontribusi usaha pertanian masih di atas usaha industry dan jasa, maka pada tahun 2010 kontribusinya sudah berada dibawah kedua usaha tersebut.

Dilihat dari struktur atau pola pendapatan pada musim penghujan dan musim kemarau, juga menunjukkan pergeseran. Pada awalnya pendapatan

masyarakat lokal pada musim penghujan jauh lebih besar daripada musim kemarau, karena sumber pendapatan masyarakat pada waktu itu masih sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian lahan kering yang banyak diperoleh pada musim penghujan. Tapi dengan munculnya berbagai kegiatan ekonomi baru tersebut, maka pendapatan masyarakat lokal justru lebih tinggi pada musim kemarau, karena aktivitas ekonomi seperti usaha dagang, jasa dan industry lebih intensif dilakukan pada musim kemarau. Pada musim penghujan rata-rata pendapatan rumahtangga lokal adalah sebesar Rp. 4,1 juta setiap bulan, sedang pada musim kemarau adalah sebesar Rp. 4,4 juta setiap bulan.

Bila dilihat perkembangan pendapatan masyarakat lokal setiap tahun dari sejak sebelum tambang sampai masa tambang sekarang ini, maka secara nominal menunjukkan perkembangan yang cukup tajam. Sebelum tambang tahun 1995, pendapatan rumahtangga masyarakat lokal setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 155 ribu, kemudian meningkat menjadi Rp. 1,023 juta tahun 2000. Selama periode 2000-2003, peningkatan pendapatan masyarakat relatif lambat, kurang Rp. 100 ribu perbulan. Tapi setelah itu (periode 2003-2006), peningkatan pendapatan masyarakat semakin tajam, lebih Rp. 100 ribu/bulan bahkan antara tahun 2006-2010, meningkat rata-rata di atas Rp. 300 ribu per bulan, dan khusus dari tahun 2009 ke tahun 2010

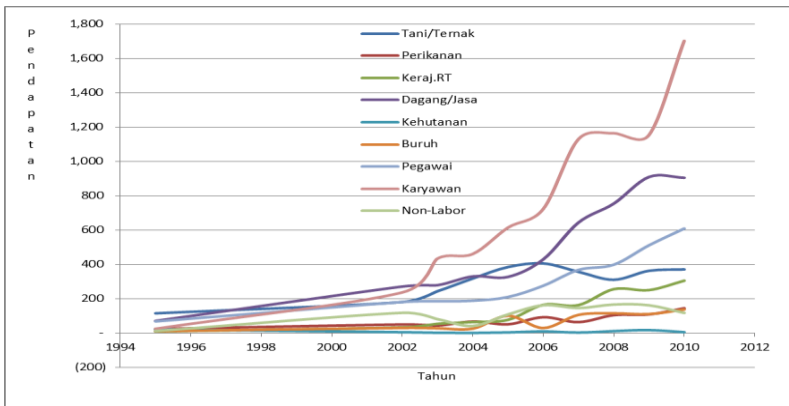
meningkat sangat tajam, yaitu lebih Rp. 700 ribu perbulan (lihat Gambar 8).



Gambar 11. Perkembangan Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/Bln), Tahun 1995, 2000-2010.

Peningkatan rata-rata pendapatan rumahtangga masyarakat lokal tersebut bila ditelaah berdasarkan jenis usaha, maka tampak bahwa jenis usaha yang mengalami peningkatan paling tajam adalah karyawan swasta, usaha dagang dan jasa, pegawai pemerintah dan industry kerajinan. Usaha pertanian bila digabung dengan usaha ternak juga mengalami peningkatan yang disumbangkan oleh usaha ternak, tapi peningkatannya tidak setajam bidang kegiatan yang lain. Sehingga bila pendapatan rumahtangga tersebut diperhitungkan berdasarkan harga konstan (bukan pendapatan nominal), maka pendapatan masyarakat dari usaha pertanian sebenarnya tidak mengalami perubahan, bahkan cenderung mengalami penurunan.

Sementara bila pendapatan nominal masyarakat lokal tersebut dikaitkan dengan indikator kesejahteraan masyarakat menurut standar PBB, yaitu 1 dollar AS perkapita perhari sebagai batas garis kemiskinan, maka secara rata-rata sebenarnya masyarakat lokal kawasan tambang sudah terbebas dari kemiskinan. Karena bila harga 1 dollar AS sebesar Rp. 9.500; maka tingkat pendapatan rumah tangga dengan anggota 4,5 orang sebagai batas garis kemiskinan adalah sebesar Rp. 1.282.500 setiap bulan. Tingkat pendapatan ini sudah dicapai sejak tahun 2003. Pada waktu itu rata-rata pendapatan masyarakat lokal adalah sebesar Rp. 1.340.000 dan terus meningkat sampai tahun 2010 (lihat Gambar 8). Tapi bila menggunakan standar 2 dollar AS untuk dinyatakan aman dari kemiskinan, maka garis kemiskinan adalah sebesar Rp. 2.565.000 perbulan. Tingkat pendapatan ini sudah dicapai pada tahun 2007. Pada tahun 2006 pendapatan masyarakat lokal baru mencapai Rp. 2,3 juta dan pada tahun Rp. 2007 sudah mencapai Rp. 3 juta perbulan.



Gambar 12. Perkembangan Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Berbagai Sumber (Rp.000/Bln), Tahun 1995, 2000-2010.

Akan tetapi bila ditelaah pada setiap rumahtangga, ditemukan indikasi dari kemiskinan tersebut pada beberapa rumahtangga, terutama pada rumahtangga yang masih memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan pokok pada kegiatan pertanian, perikanan, industri kerajinan rumahtangga dan buruh harian.

b. Pengeluaran Rumahtangga

Secara garis besar pengeluaran rumahtangga dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang bersifat konsumtif dan pengeluaran yang bersifat produktif. Pengeluaran yang bersifat konsumtif selanjutnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengeluaran konsumtif untuk bahan makanan dan minuman dan pengeluaran konsumtif di luar makanan dan minuman. Pengeluaran produktif yang dimaksud adalah pengeluaran untuk investasi,

termasuk untuk membeli bahan dan peralatan yang bermanfaat jangka panjang.

Ada suatu kecenderungan umum, khususnya pada masyarakat pedesaan bahwa semakin tinggi pendapatan rumahtangga, maka pengeluaran konsumtif rumahtangga semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 405 rumahtangga masyarakat lokal, pada tahun 2010 rata-rata pengeluaran konsumtif rumahtangga adalah sebesar Rp. 3,518 juta perbulan, sehingga bila dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pada tahun tersebut sebesar Rp. 4,289 juta, maka masih tersisa pendapatan rumahtangga sebesar Rp. 771 ribu perbulan yang bisa dimanfaatkan untuk pengeluaran yang bersifat produktif. Bila dilihat dari sisa pendapatannya, maka dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat lokal di kawasan tambang PT.NNT termasuk cukup sejahtera.

Selain dilihat dari sisa pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan produktif, kesejahteraan masyarakat lokal juga dapat dilihat dari proporsi pengeluaran konsumtif untuk bahan makanan dan minumannya yang lebih rendah daripada pengeluaran konsumtif di luar makanan dan minuman. Pada Tabel 53 tampak bahwa dari Rp. 3,518 juta pengeluaran konsumtif rumahtangga, sebesar Rp. 1,696 juta atau sekitar 48,20% dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman; dan sebesar Rp.

1,823 juta atau sekitar 51,80% untuk memenuhi kebutuhan konsumtif di luar makanan dan minuman.

Tabel 53. Struktur dan Rata-Rata Pengeluaran Konsumtif Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Setiap Bulan, Tahun 2010

No	Jenis Pengeluaran	Musim Hujan		Musim Kemarau		Rata-Rata 2010	
		Rp.000	%	Rp.000	%	Rp.000	%
<i>Bahan Makanan/Minuman</i>							
A							
1.	Beras & KH lain	294	8,69	311	8,53	303	8,61
2.	Daging & lauk pauk	375	11,08	412	11,29	394	11,19
3.	Savour & bumbu	240	7,09	239	6,56	240	6,82
4.	Minuman (kopi,teh)	120	3,55	122	3,34	121	3,44
5.	Buah-Buahan	75	2,22	66	1,80	70	2,00
6.	Makanan suplemen	249	7,34	256	7,02	252	7,18
7.	Minuman suplemen	101	2,98	100	2,75	101	2,86
8.	Rokok/Sirih	209	6,16	221	6,05	215	6,10
	Total A.	1.663	49,11	1.728	47,35	1.696	48,20
<i>Luar Makanan/Minuman</i>							
B							
1.	Pakaian	345	10,19	367	10,04	356	10,11
2.	Pendidikan	363	10,72	397	10,88	380	10,80
3.	Pemeliharaan rumah	263	7,77	297	8,13	280	7,96
4.	Kesehatan	213	6,29	236	6,46	224	6,38
5.	Transport&Kmnikasi	377	11,13	437	11,97	407	11,57
6.	Partisipasi Sosial	162	4,79	189	5,17	175	4,98
	Total B.	1.724	50,89	1.922	52,65	1.823	51,81
	Total A + B	3.387	100,00	3.650	100,00	3.518	100,00

Menurut Hukum Engels, dengan semakin besarnya proporsi pengeluaran konsumtif rumahtangga untuk keperluan di luar makanan/minuman, maka semakin sejahtera rumahtangga tersebut, karena semakin mampu rumahtangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya di luar makanan dan minuman. Ini berarti rumahtangga masyarakat lokal di kawasan tambang semakin sejahtera dibandingkan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2008 dan 2009 misalnya, proporsi pengeluaran konsumtif rumahtangga meskipun sudah diatas 50%, tapi masih dibawah proporsi yang dikeluarkan pada tahun 2010, yaitu masing-masing sebesar 51,43% dan 50,68%.

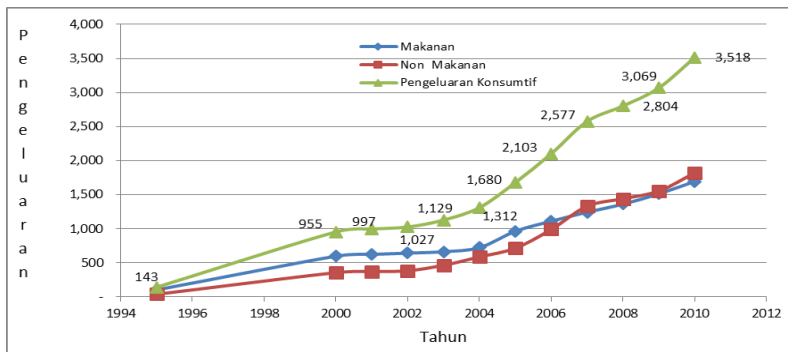
Meskipun demikian, perlu ditelaah struktur pengeluaran rumahtangga tersebut secara lebih detail.

Pada kelompok makanan dan minuman, proporsi pengeluaran yang besar adalah untuk daging dan lauk pauk (11,08%), kemudian beras dan sumber karbo hidrat lain (8,69%), makanan suplemen (7,34%), sayur dan bumbu-bumbuan (7,09%). Pengeluaran dalam kelompok makanan dan minuman yang cukup besar dan selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir adalah untuk rokok/tembakau/sirih dan perlengkapannya, proporsi pengeluarannya sampai 6,10% atau bila dinominalkan adalah sebesar Rp. 215 ribu setiap bulan. Padahal diketahui bahwa kelompok makanan ini tidak berfungsi sebagai makanan dan minuman, hanya sebagai perlengkapan yang disinyalir justru dapat mengganggu kesehatan atau menimbulkan berbagai penyakit.

Di luar makanan dan minuman, ternyata pengeluaran terbesar adalah untuk transportasi dan komunikasi (11,57%), Urutan berikutnya adalah pengeluaran untuk pendidikan (10,80%) dan untuk pakaian (10,11%). Selain itu adalah untuk pemeliharaan rumah (7,96%), pemeliharaan kesehatan (6,38%) dan untuk partisipasi social (4,98%). Memperhatikan struktur pengeluaran rumahtangga di luar makanan ini, menunjukkan ada pergeseran prioritas masyarakat lokal. Pada masa sebelum tambang, prioritas pertama adalah pakaian, kemudian pada masa awal tambang bergeser ke pendidikan dan dalam 3 tahun terakhir (2008-2010), prioritas pertamanya adalah transportasi dan

komunikasi. Perubahan ini menandakan ada perubahan gaya hidup dalam masyarakat lokal.

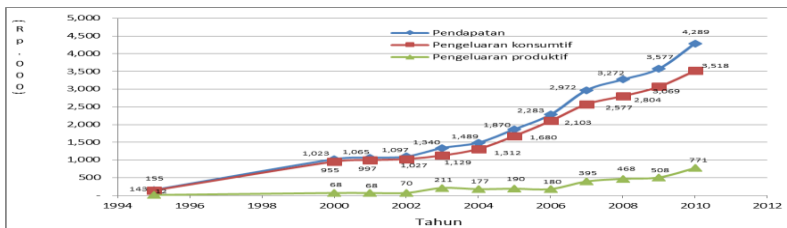
Pergeseran pola pengeluaran masyarakat ini akan terus berlanjut mengikuti perkembangan pendapatan dan kawasan. Pada Gambar 10. ditunjukkan perkembangan pengeluaran konsumtif masyarakat lokal sejak sebelum tambang tahun 1995 sampai masa produksi tambang tahun 2010.



Gambar 13. Perkembangan Pengeluaran Komsumtif Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/bln), Tahun 1995, 2000-2010.

Pada Gambar 10 jelas terlihat bahwa pengeluaran masyarakat lokal pada awal memasuki masa tambang (dari tahun 1995-2000) meningkat tajam, baik dilihat secara total maupun per kelompok pengeluaran. Kemudian dari tahun 2000 sampai 2003 meningkat agak pelan, setelah itu pengeluaran masyarakat meningkat lebih tajam. Peningkatan yang lebih tajam adalah dari kelompok pengeluaran di luar makanan dan minuman, terutama untuk biaya transportasi dan komunikasi.

Namun bila dibandingkan antara pengeluaran konsumtif secara umum dengan pendapatan rumahtangga dari sejak sebelum tambang tahun 1995 sampai masa tambang tahun 2010, selalu ada sisa pendapatan yang bisa dialokasikan untuk pengeluaran produktif. Artinya kebutuhan konsumtif rumahtangga selalu dapat dipenuhi dari pendapatan yang diperoleh, bahkan pendapatan yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat produktif cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, yaitu masih kurang Rp 1 juta perbulan (lihat Gambar 11).



Gambar 14. Perkembangan Pendapatan, Pengeluaran Konsumtif dan Pengeluaran Produktif Rumahtangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/bln), Tahun 1995, 2000-2010.

B. Perkembangan Sosial Budaya

Untuk memahami sejauhmana intervensi pembangunan dalam hal ini aktivitas penambangan skala besar berkaitan dengan mobilitas penduduk dan berdampak terhadap perubahan sosial budaya, maka dilakukan kajian terhadap beberapa elemen sosial budaya, yaitu : (1) Gaya Hidup, (2) Norma sosial, (3) Struktur dan nilai sosial, (4) Pembauran sosial, (5)

Kelembagaan dan tatanan sosial budaya, (6) Keamanan dan ketertiban sosial, (7) Infrastruktur sosial budaya.

Sejak lima tahun terakhir hingga tahun 2010, kondisi sosial budaya di daerah lingkaran tambang PT. NNT tidak mengalami perubahan atau perkembangan yang signifikan. Dinamika sosial budaya tersebut digambarkan oleh beberapa indikator, yaitu : 1). Perubahan gaya hidup, 2) perubahan sistem norma dan nilai sosial, 3) keamanan dan ketertiban sosial, 4) infrastruktur sosial budaya, dan 5) perkembangan pendidikan.

1. Perubahan gaya hidup

Perubahan gaya hidup menggambarkan proses adaptasi masyarakat di tengah lingkungan sosial yang sedang berubah. Untuk mendapatkan gambaran tentang perubahan gaya hidup masyarakat lokal di tengah lingkungan yang sedang berubah akibat aktivitas pertambangan PT.NNT, maka dilakukan pengukuran 4 (empat) indikator, yaitu : (1) pola konsumsi makanan, (2) pola pengeluaran dan prioritas pengeluaran, (3) penguasaan asset produktif, dan (4) Kondisi perumahan. Keragaan ke empat aspek yang diteliti tahun 2010 menunjukkan :

a. Pola Konsumsi Makanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan masyarakat lingkaran tambang PT. NNT pada tahun 2010 termasuk kategori baik. Semua

responden (100 %) mengemukakan bahwa pola makan sehari-hari sudah memenuhi standar kebutuhan hidup, dimana dalam komposisi makannya telah mencakup unsur karbohidrat, protein, vitamin dan mineral lainnya. Pola konsumsi makanan tersebut tidak berbeda jauh dengan pola konsumsi pada tahun 2009. Hal ini menggambarkan bahwa tidak terjadi perubahan gaya hidup ditinjau dari aspek pola makanan dalam satu tahun terakhir. Kestabilan perekonomian rumah tangga merupakan faktor utama stabilitas pola makan tersebut. Disamping itu, ketersediaan ragam kebutuhan pangan senantiasa tetap terjaga dalam beberapa tahun terakhir.

Perhitungan pola konsumsi makanan lazim diukur berdasarkan frekuensi makan dan komposisi jenis makanan yang dikonsumsi anggota keluarga dalam jangka satu minggu. Hasil penelitian pada 15 desa lingkaran tambang tahun 2010 tidak berbeda dengan kondisi tahun 2009. Adapun variasi pola konsumsi makanan yang teridentifikasi melalui survai terhadap rumah tangga masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT tahun 2010 meliputi :

- 1) nasi dan lauk pauk (sayur-sayuran),
- 2) nasi – lauk pauk – ikan / telur,
- 3) nasi – lauk pauk – ikan – daging,
- 4) nasi – lauk pauk – ikan – daging – susu atau minuman vitamin lainnya,
- 5) nasi – lauk pauk – ikan – daging – susu – buah segar.

Pada tahun 2010 masih terdapat sebagian kecil (7,41 %) responden masyarakat lokal yang mengakui pola konsumsinya sangat sederhana dan tidak berbeda jauh dengan kondisi sebelum masuknya tambang. Pola makan sederhana tersebut umumnya terdapat pada rumah tangga yang mata pencaharian pokoknya di sektor pertanian tradisional, terutama di sekitar desa Ai Kangkung, Tatar, Tongo dan Telonang. Hasil observasi langsung dan informasi dari informan, diketahui bahwa kebanyakan rumah tangga yang masih berpola konsumsi sangat sederhana terdapat pada kelompok rumah tangga petani dan nelayan atau rumah tangga yang mata pencahariannya masih bertumpu pada usaha di sektor primer (pertanian tradisional).

Adapun rumah tangga masyarakat lokal yang memiliki pola konsumsi baik dan sangat baik umumnya adalah rumah tangga yang ada anggota keluarganya bekerja di perusahaan atau sub kontraktor di lingkaran tambang, termasuk juga rumah tangga yang bermata pencaharian dagang, wiraswasta dan penjaja jasa lain. Ditinjau dari tempat domisilinya, ada kecenderungan bahwa rumah tangga masyarakat lokal yang berdomisili di Kecamatan Jereweh dan Maluk umumnya memiliki pola konsumsi yang termasuk katagori baik.

Persebaran responden menurut variasi pola makanan tersebut menunjukkan hasil seperti tersaji pada tabel 54 berikut :

Tabel 54 Sebaran Responden (Rumah Tangga Masyarakat Lokal) di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT Berdasarkan Pola Konsumsi Makanan Tahun 2010

No	Pola Konsumsi	Katagori	Jumlah Responden	(%)
1	Nasi – Lauk pauk	Sangat sederhana	30	7,41
2	Nasi – lauk pauk – Protein nabati	Sederhana	130	32,09
3	Nasi – Lauk pauk – Protein nabati – Daging / telur (protein hewani)	Cukup baik (berkualitas)	155	38,27
4	Nasi – Lauk pauk – Protein nabati – Protein hewani – Susu / minuman bervitamin	Baik (Berkualitas)	55	13,58
5	Nasi – Lauk pauk – Protein nabati – Protein hewani – Susu – buah segar.	Sangat baik (berkualitas)	35	8,65
Jumlah			405	100,0

Mengacu pada hasil survai tahun 2010 sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dengan kondisi pola konsumsi makanan rumah tangga tahun 2009. Hal ini berarti tidak terjadi perubahan yang mencolok pola konsumsi makanan rumah tangga masyarakat lokal di daerah lingkar tambang dalam dua tahun terakhir.

Secara komparatif, pola konsumsi makanan tahun 2010 sangat berbeda dengan pola konsumsi rumah tangga masyarakat lokal daerah lingkar tambang sebelum tambang (temuan penelitian pada

masa konstruksi dan fase awal masa produksi tambang). Pada masa sebelum tambang, sebagian besar rumah tangga masyarakat lokal memiliki pola konsumsi sangat sederhana. Kesederhanaan tersebut diunjukkan dengan frekuensi makan sebanyak 2 kali setiap hari dengan komposisi yang paling lazim adalah : nasi – lauk pauk atau nasi lauk pauk dan ikan laut. Hal ini hampir sama dengan pola konsumsi masyarakat tani / peladang umumnya hingga saat ini yang diakui sulit dirubah meskipun terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga dan ketersediaan barang konsumsi yang senantiasa terjamin.

Perkembangan pola konsumsi sebagaimana yang teramati tahun 2009 tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat lokal di sekitar daerah lingkaran tambang termasuk masyarakat yang memiliki orientasi gaya hidup terbuka dan mengarah ke tipe masyarakat moderen. Bila temuan penelitian tahun 2010 tersebut dikaitkan dengan proses adaptasi sosial pada lingkungan yang sedang berubah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok masyarakat lokal, yaitu : (1) Sebagian besar rumah tangga masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT telah mampu beradaptasi terhadap modernisasi, (2) sebagian kecil rumahtangga masyarakat lokal belum atau tidak mampu beradaptasi dalam lingkungan yang sedang berubah.

Upaya masyarakat lokal merubah kebiasaan pola konsumsinya dipacu oleh harapan adaptif di dalam lingkungan yang berubah. Harapan adaptif tersebut adalah dorongan kuat untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial yang berubah. Karena strategi adaptasi antara lain dengan melakukan pembaharuan dalam aspek konsumsi makanan, maka adaptasi yang demikian termasuk adaptasi yang inovatif. Menguatnya daya adaptasi inilah yang berimplikasi terhadap meningkatnya dinamika dan mobilitas ekonomi anggota keluarga, termasuk hasrat untuk mengakses dan memasuki lapangan kerja yang ada di daerah lingkaran tambang. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan yang lebih memadai guna mengimbangi pola konsumsi yang semakin berkualitas dan variatif.

Perkembangan pola konsumsi makanan juga menggambarkan perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat lokal. Sejak meluasnya dampak aktivitas penambangan oleh PT. NNT, masyarakat lokal tampaknya lebih mengetahui, menyadari dan bisa melakukan perbaikan kualitas makanan (gizi) keluarga. Kesadaran tersebut mendorong munculnya kesadaran baru yakni peningkatan kualitas pola makanan harus diimbangi oleh peningkatan pendapatan rumah tangga. Hal tersebut didasarkan pada fikiran sederhana yakni karena makanan yang berkualitas terlebih konsumsi yang prestisius harganya lebih mahal sehingga relatif sulit untuk mendapatkannya kecuali dengan

ketersediaan uang yang memadai. Dengan demikian, masyarakat akan tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga agar tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumsi makanan yang telah berkembang. Implikasi lebih lanjut atas fenomena tersebut adalah tetap menguatnya keinginan masyarakat untuk bisa bekerja di PT. NNT atau perusahaan sub kontraktor lainnya karena pendapatan yang diperoleh dinilai lebih besar dibandingkan dengan bekerja di sektor primer atau usaha ekonomi lokal yang ada.

b. Pola dan Proporsi Pengeluaran

Pola dan proporsi pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang mencerminkan gaya hidup masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, hasil penelitian tahun 2010 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan non makanan lebih besar dibandingkan untuk makanan. Fakta tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga. Hal ini mengacu kepada preposisi yang dikemukakan Angels (1982) yang mengemukakan bahwa "*peningkatan pendapatan rumah tangga akan diikuti dengan meningkatnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan*". Hasil penelitian tahun 2010 menunjukkan kisaran nilai pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan masyarakat lokal di

daerah lingkaran tambang sebagaimana tersaji pada tabel 55 berikut.

Mengacu pada hasil penelitian seperti tertera pada tabel 55 dapat dikatakan bahwa : sebagian besar rumah tangga masyarakat lokal memiliki kisaran pengeluaran antara 1 – 2 juta rupiah setiap bulan untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Selain itu, rumah tangga masyarakat lokal cukup banyak (26,0 %) yang menyatakan pengeluarannya untuk kebutuhan makanan lebih dari 2 juta rupiah perbulan dan sebanyak 42,2 % menyatakan pengeluarannya untuk kebutuhan non makanan. Sebagaimana hasil penelitian tahun 2009, pada tahun 2010 secara keseluruhan menunjukkan proporsi pengeluaran untuk non makanan lebih besar dibandingkan untuk kebutuhan makanan. Adapun pengeluaran non makanan yang cukup banyak adalah untuk biaya transportasi, pendidikan, perumahan, kesehatan dan pengembangan modal usaha rumah tangga.

Tabel 55 Sebaran Responden (Rumah Tangga Masyarakat Lokal) Berdasarkan Kisaran Nilai Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan dan Non Makanan Tahun 2010

No	Kisaran nilai Pengeluaran Per bulan	Persentase Responden Menurut Jenis Pengeluaran	
		Makanan	Non Makanan
1	< Rp. 1000.000	27 orang (6,6%)	25 orang (6,2 %)
2	Rp.1000.000 – Rp. 2000.000	273 orang (67,4 %)	209 orang (51,6 %)
3	> Rp. 2000.000	105 orang (26,0 %)	171 orang (42,2 %)
Jumlah		405 orang (100 %)	405 orang (100,0 %)

Adanya kecenderungan rumah tangga masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT mengalokasikan pendapatan yang diperoleh untuk pengeluaran non makanan menggambarkan telah terjadi perubahan orientasi sistem konsumsi. Lebih lanjut hal tersebut menggambarkan telah terjadi perubahan gaya hidup masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang. Perubahan gaya hidup masyarakat lokal lebih merupakan dorongan psikologis, artinya masyarakat lokal ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu masyarakat terbebani oleh hasrat untuk terus mempertahankan pola dan gaya hidup baru (termasuk pola konsumsi) yang telah terpolakan dan hal ini berimplikasi pada keharusan untuk memiliki pendapatan yang memadai dan berkelanjutan.

c. Prioritas dan Alokasi Pengeluaran

Alokasi dan prioritas pengeluaran rumah tangga juga menggambarkan gaya hidup masyarakat. Alokasi pengeluaran untuk tujuan produktif mencerminkan gaya hidup masyarakat maju. Hasil penelitian tahun 2010 dan didukung informasi sejumlah informan menunjukkan bahwa ada kecenderungan pengeluaran rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan psikologis (prestise sosial) meningkat. Alokasi pengeluaran rumah tangga meningkat untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga yang dinilai prestisius termasuk sarana transportasi (kendaraan bermotor roda dua atau roda empat).

Hasil penelitian tahun 2010 menunjukkan ranking prioritas pengeluaran rumah tangga masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT untuk pemenuhan kebutuhan non-makanan adalah:

- 1) Pengembangan modal usaha
- 2) Biaya pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan serta perabotan rumah.
- 3) Biaya pendidikan (sekolah),
- 4) Biaya transportasi dan partisipasi sosial, dan
- 5) Biaya perawatan kesehatan, termasuk pakaian.

Ranking prioritas pengeluaran di atas berbeda dengan temuan penelitian tahun 2009. Namun demikian motif dan orientasi pengeluaran rumah tangga tidak mengalami perubahan berarti dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil observasi diketahui terjadi peningkatan pengeluaran rumah tangga masyarakat lokal untuk pengadaan sarana transportasi (mobil dan sepeda motor).

Secara keseluruhan prioritas dan alokasi pengeluaran masyarakat lokal tahun 2010 masih cenderung diarahkan untuk investasi dan pengembangan modal usaha. Prioritas berikutnya adalah pengeluaran untuk pengembangan dan pengadaan perlengkapan serta perawatan perumahan. Ditinjau berdasarkan alokasi pengeluaran, ternyata pengeluaran untuk biaya pendidikan termasuk pada prioritas ketiga. Hal ini agak berbeda dengan temuan penelitian tahun 2009 yang menunjukkan pengeluaran untuk pendidikan termasuk prioritas

kedua. Menguatnya konsentrasi pemerintah daerah dan PT. NNT dalam meningkatkan pendidikan masyarakat lingkaran tambang dinilai sebagai penyebab rendahnya biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat. Selain itu, di sejumlah desa dalam lingkaran tambang dilakukan program peningkatan pendidikan melalui program PNPM.

Berikut disajikan data hasil penelitian prioritas pengeluaran rumah tangga pada 405 responden di 15 desa lingkaran tambang tahun 2010 (Tabel 56.)

Tabel.56 Sebaran Responden berdasarkan Alokasi dan Prioritas Pengeluaran untuk Kebutuhan Non Makanan Menurut Kelompok Pekerjaan Masyarakat Lokal di Daerah Lingkaran Tambang PT. NNT tahun 2010.

No	Kelompok Pekerjaan Responden	Sebaran Responden (%) Berdasarkan Prioritas Pengeluaran				
		Perumahan /perabot Rumah	Pendidikan /Peningkatan SDM	Kesehatan dan Pakaian	Transportasi & Partisipasi Sosial	Pengemb. Modal Usaha
1	Petani / Peternak	14 (3,5)	16 (3,9)	6 (1,5)	7 (1,7)	20 (4,9)
2	Nelayan	13 (3,2)	6 (1,5)	6 (1,5)	6 (1,5)	20 (4,9)
3	Pedagang	11 (2,7)	16 (3,9)	3 (0,7)	8 (1,9)	27 (6,6)
4	Perajin / Industri	10 (2,5)	6 (1,5)	7 (1,7)	8 (1,9)	22 (5,4)
5	Jasa	10 (2,5)	9 (2,2)	11 (2,7)	11 (2,7)	26 (6,4)
6	Karyawan (PNS)	12 (2,9)	13 (3,2)	7 (1,7)	12 (2,9)	7 (1,7)
7	Karyawan Swasta	14 (3,5)	15 (3,7)	10 (2,5)	16 (3,9)	3 (0,7)
Jumlah (%)		84 (20.8)	78 (19.8)	50 (12.3)	68 (16.5)	125 (30.6)

Keterangan : Angka dalam kurung adalah persentase (%).

Mengacu pada tabel 56 tersebut diketahui bahwa pada tahun 2010 sebagian besar rumah tangga masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT terutama kelompok petani, nelayan, pedagang, perajin dan usaha jasa memprioritaskan pengeluaran non makanan untuk pengembangan modal usaha. Kelompok rumah tangga PNS dan karyawan swasta sebagian besar memprioritaskan pengeluaran non

makanan untuk pengembangan pendidikan anggota keluarga dan sarana transportasi.

Besarnya proporsi kelompok usaha produksi memprioritaskan pengeluaran untuk pengembangan modal usaha disebabkan karena usaha yang dilakukan merupakan sumber utama pencaharian keluarga. Dengan demikian, upaya pengembangan modal usaha dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas usaha agar kontinuitas penghasilan dapat dipertahankan atau dikembangkan menjadi lebih baik. Bagi kelompok PNS dan karyawan swasta, tampaknya pendidikan dan transportasi dipandang sebagai investasi jangka panjang dan modal usaha. Kelompok rumah tangga ini sedikit sekali yang memiliki usaha sampingan dibidang produksi sehingga kurang perlu melakukan upaya pengembangan modal. Diakui oleh responden bahwa pengadaan sarana transportasi (kendaraan bermotor) selain sebagai modal/sarana usaha juga sebagai pemuasan psikologis dan prestise sosial.

Alokasi pengeluaran rumah tangga untuk pengembangan dan pemeliharaan perumahan tampak masih cukup mencolok pada tahun 2010. Perkembangan tata perumahan sangat nyata dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar perumahan masyarakat lokal (rumah tradisional) berupa rumah panggung berbahan kayu telah berubah menjadi rumah permanen dengan konstruksi dan arsitektur moderen. Hal ini diduga sebagai konsekwensi logis

terjadinya perubahan sosial yang multidimensional sehingga mendorong masyarakat untuk menunjukkan eksistensi sosial melalui tampilan perumahan. Disinilah tampak pergeseran secara nyata dibanding sebelum tambang. Sebagaimana dikemukakan pada hasil penelitian 2009 bahwa pada masa sebelum tambang, bila seseorang memiliki kemampuan ekonomi akan cenderung dimanfaatkan untuk menambah asset berupa ternak dan lahan. Namun pada masa-masa sekarang (setelah ada perusahaan PT. NNT), orientasi tersebut cenderung bergeser dari orientasi ekonomi lokal tradisional menjadi ekonomi pasar dengan mengedepankan potensi usaha yang disesuaikan dengan perkembangan pasar.

Melalui pendalaman informasi dengan wawancara mendalam dan FGD diketahui bahwa meningkatnya kecenderungan masyarakat mengalokasikan pengeluaran rumah tangga untuk perumahan awalnya didorong kepentingan ekonomi, seperti untuk rumah sewa (Kos atau kontrakan). Namun sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, motif tersebut bergeser ke motif sosial terutama menyangkut prestise dan eksistensi sosial masyarakat lokal.

Fenomena perubahan sosial ekonomi sebagaimana dipaparkan di atas diperkuat oleh hasil observasi (2010) dimana secara fisik sebagian besar rumah penduduk telah mengalami renovasi dari arsitektur tradisional dengan bahan kayu semi

permanen menjadi arsitektur moderen dengan bahan bangunan permanen. Rumah permanen di sekitar alur jalan raya sebagian besar telah dilengkapi dengan garasi kendaraan roda empat. Perubahan tipe bangunan dan tampilan rumah dengan sendirinya diikuti oleh hasrat pemilik untuk melengkapi perabot dan upaya pemeliharaan sesuai dengan kondisi perumahan yang permanen. Dengan demikian, secara umum gaya hidup masyarakat lokal secara nyata telah berkembang dari gaya hidup komunal tradisional ke gaya hidup terbuka yang cenderung mengikuti gaya hidup moderen.

Hasil penelitian yang juga terkait dengan perkembangan gaya hidup masyarakat adalah semakin meningkatnya jumlah kepemilikan atau penguasaan sarana transportasi berupa kendaraan roda dua dan roda empat. Hasil survai terhadap 405 rumah tangga ditemukan sebanyak 16,5 % rumah tangga menyatakan memprioritaskan pengeluaran non makanan untuk transportasi. Kelompok rumah tangga yang cukup banyak memprioritaskan pengeluaran non makanan untuk transportasi adalah mereka yang bekerja sebagai PNS dan karyawan swasta. Sebagai cerminan gaya hidup, kepemilikan kendaraan bermotor dinilai memiliki prestise sosial disamping peran fungsional untuk memperlancar tugas dan kegiatan dalam aktivitas masyarakat. Sejumlah penyelia pendapat dan informan kunci menyatakan bahwa kecenderungan kuat pemilikan kendaraan roda empat adalah para karyawan PT. NNT atau

karyawan dari sub kontraktor lainnya. Inilah salah satu fakta gaya hidup yang berkembang di daerah lingkaran tambang sejak beberapa tahun terakhir, yakni kecenderungan semakin kuat persaingan membangun eksistensi dan prestise sosial yang ditunjang oleh pengembangan potensi ekonomi rumah tangga masyarakat lokal. Adapun peragaan eksistensi sosial melalui peningkatan kapasitas atau prestasi (*achievement*) relatif kurang menonjol. Meskipun demikian diakui oleh semua informan kunci bahwa perhatian masyarakat lokal terhadap pendidikan saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan masa awal masuknya PT. NNT, terlebih-lebih pada masa sebelum masuknya PT. NNT.

d. Pemilikan aset (barang prestise)

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dalam situasi perubahan sosial setelah masuknya PT. NNT, masyarakat lokal juga berupaya membangun prestise dan eksistensi sosial melalui penguatan ekonomi rumah tangga. Pandangan tersebut diperkuat oleh adanya fenomena semakin meningkatnya kepemilikan barang-barang yang berkaitan dengan gaya hidup (barang prestisius). Sebagaimana kenyataan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2010 ini juga masih ditemukan bahwa perubahan gaya hidup masyarakat lokal diindikasikan dengan meningkatnya kepemilikan barang prestise seperti kendaraan bermotor dan peralatan elektronik dalam rumah tangga.

Dalam pandangan masyarakat lokal (responden dan informan kunci), semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor (kendaraan roda dua dan empat) dimaksudkan sebagai sarana penunjang transportasi kerja disamping sebagai investasi yang sewaktu-waktu bisa dijual. Namun demikian, diakui oleh sejumlah tokoh masyarakat (informan kunci) bahwa kepemilikan kendaraan roda empat mengandung makna prestise sosial, sebab kendaraan roda empat tergolong barang sangat mewah dan mahal.

Berikut ini disajikan hasil penelitian menyangkut pemilikan barang-barang prestisus pada rumah tangga masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT tahun 2009 dan tahun 2010.

Tabel.57. Sebaran Responden Berdasarkan Pemilikan Barang Prestisius Sebelum Tambang dan Setelah Produksi tambang (2009 dan 2010).

No	Jenis Barang prestise utama yang dimiliki	Persentase (%) Responden		
		Sebelum NNT (1995)	Masa Produksi (2009)	Masa Produksi (2010)
1	Lahan	NA	NA	76 (18,8 %)
2	Ternak	NA	NA	43 (10,6 %)
3	Alat mesin	NA	NA	35 (8,6 %)
4	Barang Elektronik	19,4 %	380 (93,8 %)	393 (97,1 %)
5	Emas / barang berharga	NA	NA	211 (52,1 %)
6	Sarana komunikasi	-	395 (97,5 %)	396 (97,7 %)
7	Kendaraan Roda 2	2,0 %	87 (21,5 %)	101 (24,9 %)
8	Kendaraan roda 4	-	30 (7,4 %)	30 (7,4 %)

Keterangan : NA (data tidak tersedia / tidak ada pendataan)

Pemilikan asset seperti tertuang pada tabel 57 di atas lebih dipicu oleh perubahan lingkungan dan orientasi masyarakat. Menguatnya orientasi ekonomi dan komersial menuntut adaptasi masyarakat dengan meningkatkan mobilitas ekonomi secara luas. Pemilikan alat komunikasi, dan sarana transportasi mengalami peningkatan cukup mencolok dimaksudkan untuk mendukung mobilitas ekonomi tersebut. Selain mobilitas ekonomi, ternyata mobilitas sosial juga menjadi orientasi masyarakat. Meskipun pada dasarnya kendaraan bermotor dan telepon seluler tersebut hanya sarana transportasi dan komunikasi, namun bagi masyarakat secara umum, pemilikan ini melekat prestise sosial pemiliknya. Inilah fenomena baru yang oleh tokoh masyarakat dipandang sebagai suatu perwujudan gaya hidup masyarakat maju yang terjadi dan berkembang pesat setelah terbukanya daerah lingkaran tambang akibat dilakukannya penambangan oleh PT. NNT. Namun demikian, berkembangnya dinamika ekonomi dan sosial pada masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang tidak serta merta mengurangi tatanan dan nilai-nilai sosial lokal yang telah dan masih berkembang hingga saat ini.

Meningkatnya pemilikan kendaraan roda dua (tabel 57), disebabkan karena pemanfaatannya sebagai sarana transportasi masyarakat yang dinilai paling praktis. Hampir setiap rumah tangga memiliki sepeda motor. Disamping itu pada kelompok rumah tangga pengusaha jasa, kepemilikan sepeda motor

dapat difungsikan untuk melayani jasa angkutan lokal. Sebagaimana hasil penelitian tahun sebelumnya, temuan penelitian tahun 2010 menggambarkan bahwa masyarakat di desa lingkartambang termasuk masyarakat yang cukup responsif terhadap modernisasi. Dengan perkembangan gaya hidup yang cenderung ke arah modernisasi tersebut memberikan makna bahwa sesungguhnya telah terjadi perubahan eskalasi budaya masyarakat desa lingkartambang setelah mulai beroperasinya tambang PT. NNT. Perubahan tersebut menyentuh langsung pada eksistensi masyarakat lokal yang terus beradaptasi dalam lingkungan yang sedang berubah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perubahan gaya hidup merupakan bentuk atau strategi adaptasi budaya masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan lingkungan yang mencakup dimensi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian aspek gaya hidup tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat lokal mampu melakukan adaptasi sosial dengan mengembangkan gaya hidup baru yang sejalan dengan perubahan lingkungan fisik dan non fisik yang terjadi di daerah lingkartambang PT. NNT.

2. Sistem Norma dan Nilai Sosial

Salah satu aspek sosial budaya yang sangat penting diperhitungkan untuk mengetahui perubahan sosial budaya pada suatu komunitas atau wilayah adalah sistem norma dan sistem nilai. Oleh sebab itu, untuk mengetahui sejauh mana implikasi keberadaan

PT. NNT terhadap aspek sosial budaya komunitas lokal antara lain dengan mengetahui perubahan sistem norma dan sistem nilai tersebut. Sistem norma merupakan sejumlah tata aturan yang terangkai dan berkaitan satu dengan lainnya. Norma norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada yang kuat, sangat kuat, longgar dan lemah. Atas dasar daya ikatnya tersebut maka dikenal istilah : kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat.

Norma sosial berubah karena berbagai faktor, salah satunya adalah terjadinya interaksi sosial dengan masyarakat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang sejatinya memiliki seperangkat sistem norma dan nilai yang telah lama berkembang. Semua unsur normatif tersebut terwadahi dalam suatu sistem budaya yakni budaya masyarakat samawa (*tau samawa*).

Hasil penelitian (2010) menunjukkan, secara kualitatif tidak terjadi perubahan pada aspek norma dan nilai sosial dari tahun 2009 hingga 2010 ini. Kondisi sosial budaya termasuk keterikatan masyarakat pada nilai-nilai lokal dalam lima tahun terakhir tidak dirasakan perubahannya. Telaah secara kualitatif lebih melihat bahwa terjadi perubahan sistem norma sosial namun tidak sampai menyentuh aspek fundamental dari sistem norma dan nilai sosial masyarakat lokal.

Semua informan dan responden mengakui bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam beberapa aspek sosial budaya masyarakat lokal daerah lingkaran tambang PT. NNT setelah masuknya perusahaan tambang PT. NNT. Perubahan mulai dirasakan terjadi sejak masa konstruksi tambang PT. NNT sekitar tahun 1997, dimana pada saat itu banyak berdatangan tenaga kerja yang berasal dari berbagai daerah bahkan negara lain dan tinggal berdomisili dalam waktu relatif lama. Dengan demikian, daerah lingkaran tambang muncul menjadi arena interaksi sosial yang sangat dinamis. Dinamika interaksi sosial tersebut berpengaruh langsung terhadap ketahanan sosial budaya masyarakat lokal.

Perubahan sosial berdimensi sosial budaya secara umum diawali oleh intensitas interaksi masyarakat dengan masyarakat luar dan berpengaruh terhadap pertukaran sistem budaya. Lebih lanjut, interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama berpengaruh terhadap sistem norma masyarakat lokal. Pihak – pihak yang terlibat dalam interaksi, baik interaksi antar individu, kelompok atau antar masyarakat masing-masing membawa sistem budaya dan sistem norma masing-masing, sehingga interaksi sosial tersebut pada hakekatnya adalah interaksi budaya yang secara aktual tercermin dalam pola-pola tingkah laku. Oleh sebab itu, pola-pola tingkah laku dimaksud dapat diamati pada berbagai domain kehidupan manusia, baik sebagai individu, kelompok, atau masyarakat.

Dinilai oleh semua informan bahwa saat ini terwujud sistem nilai baru yang dianut masyarakat lokal. Nilai-nilai sosial tersebut lebih mengarah kepada nilai individualitas dan materialistik. Terkait dengan hal ini, sejumlah informan berpendapat bahwa masyarakat lokal banyak yang larut dalam sistem budaya baru yang diadopsi dari budaya luar. Sementara sejumlah informan lainnya berpandangan bahwa, masyarakat lokal memang mengalami perubahan, tetapi aspek sosial budaya, terutama adat istiadat dan kepercayaan lainnya sesungguhnya tidak mengalami perubahan. Perubahan yang banyak terjadi lebih banyak menyangkut aspek perilaku, terutama perilaku ekonomi.

Berikut disajikan hasil penelitian menyangkut beberapa aspek sistem norma dan sistem nilai sosial pada komunitas masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang tahun 2010.

a. Sikap dan Keterikatan Masyarakat Lokal terhadap Norma dan nilai Sosial

Hasil studi tahun 2010 menunjukkan kecenderungan yang tidak jauh berbeda dengan fakta sosial yang terungkap pada hasil penelitian tahun 2009. Berikut ini disajikan temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari berbagai kelompok masyarakat menyangkut sikapnya terhadap norma sosial lokal (Tabel 58). Tabel 4.5 menunjukkan sebagian besar (36,5 %) responden rumah tangga masyarakat lokal menyatakan masih

terikat dengan norma (aturan, kebiasaan dan adat istiadat) setempat (lokal). Bahkan sekitar 11, 6 % menyatakan sangat terikat dan menegaskan bahwa mereka tidak bisa dipisahkan dengan adat setempat dalam berbagai aspek kehidupannya. Hasil studi sebelumnya mengungkapkan, masyarakat lokal daerah lingkaran tambang terdiri dari etnis dominan, yakni etnik Samawa dan Sasak.

Masyarakat sasak yang datang dari Pulau Lombok banyak berdomisili di sekitar pantai, seperti Jelenge, Maluk dan Benete. Termasuk diantaranya adalah masyarakat yang sekarang termasuk Desa Aik Kangkung kebanyakan adalah transmigran yang berasal dari pulau Lombok. Antara masyarakat Samawa dan sasak sebenarnya memiliki sistem norma yang tidak jauh berbeda.

Tabel 58 Sebaran Rersponden Masyarakat Lokal Berdasarkan Sikap (Keterikatannya) terhadap Norma Sosial Tahun 2010.

No	Elemen Norma Sosial	Sebaran Responden (%) Berdasarkan Tingkat Keterikatannya pada Norma Sosial Lokal				
		Sangat Longgar	Longgar	Biasa (Sedang)	Terikat	Sangat Terikat
1	Norma pergaulan	5 (1,2)	30 (7,4)	119 (29,4)	201 (49,6)	50 (12,3)
2	Kepatuhan pada Norma Keluarga	5 (1,2)	65 (16,0)	186 (45,9)	84 (20,8)	65 (16,0)
3	Adat seputar kelahiran ¹⁾	3 (0,74)	77 (19,0)	97 (23,9)	188 (46,5)	40 (9,8)
4	Adat seputar Perkawinan.	10 (2,5)	30 (7,4)	107 (26,4)	204 (50,3)	49 (12,1)
5	Adat seputar kematian	0 (0,0)	12 (2,9)	82 (20,2)	230(56,3)	81(19,7)
6	Kebiasaan sekitar Produksi / Distribusi	33 (8,1)	48 (11,8)	151(37,3)	145 (35,8)	28 (6,9)
7	Kebiasaan pembagian kerja	17 (4,2)	75 (18,5)	145 (35,8)	119(29,4)	49 (12,09)
8	Kebiasaan membangun rumah	42 (10,4)	167 (41,2)	173 (42,7)	12 (2,9)	11 (2,7)
	Rataan	14 (3,5)	63 (15,5)	133 (32,8)	148 (36,5)	47 (11,6)

Secara umum, hasil penelitian tahun 2010 menggambarkan bahwa masyarakat lokal masih kuat memegang prinsip normatif yang dimiliki sehingga norma sosial secara umum tidak banyak mengalami perubahan daya ikat dan daya aturnya setelah beroperasinya tambang. Indikasinya, masyarakat lingkaran tambang (masyarakat lokal) masih terikat dengan norma-norma setempat dalam tata perilaku sosial, ekonomi dan budaya. Hasil penelitian juga menunjukkan sekitar 3,5 % anggota masyarakat lokal menyatakan sangat longgar terhadap ikatan norma lokal. Artinya mereka merasa sangat tidak terikat oleh norma dan nilai yang dianut masyarakat lokal selama ini. Tidak bisa terungkap dengan jelas aspek yang melatarbelakangi sikap yang demikian tersebut. Dari pendapat sejumlah informan kunci dikatakan bahwa munculnya sikap tidak terikat oleh norma lokal umumnya banyak terjadi pada kalangan keluarga muda yang saat ini sangat bangga dengan budaya luar

dan menilai budaya lokal membatasi produktivitas ekonomis masyarakat.

1) Tataan Pergaulan dan Norma Keluarga

Hasil penelitian tahun 2010 menunjukkan sebagian besar masyarakat menyatakan masih terikat dengan norma setempat dalam tata laku pergaulan hidup sehari-hari. Sebagian besar lainnya menilai biasa-biasa saja, artinya ada saatnya terikat ada saatnya merasa tidak perlu terikat oleh aturan norma tata laku kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian tahun 2010 ini tidak berbeda jauh dengan kondisi tataan pergaulan tahun 2009. Hal ini bermakna bahwa kondisi sistem norma kehidupan sehari – hari relatif sama (tidak berubah) dalam dua tahun terakhir. Sangat sulit melihat perubahan terkait dengan norma dan sistem nilai dalam waktu singkat sementara faktor eksternal yang mungkin berpengaruh kondisinya relatif stabil (tetap).

Namun demikian termasuk masih cukup banyak (sekitar 7 persen) anggota masyarakat lokal yang merasa tidak terikat atau menilai anggota masyarakat tidak terikat oleh tataan pergaulan masyarakat setempat yang telah ada sebelumnya. Hal ini menggambarkan masih terdapat warga masyarakat lokal yang tidak terikat atau sangat tidak terikat oleh ketentuan normatif dalam tataan pergaulan masyarakat lokal. Informasi tersebut sejalan dengan pendapat sejumlah tokoh masyarakat di semua desa penelitian, bahwa setelah mulainya tambang, banyak

sekali kalangan anggota masyarakat yang tidak menghiraukan tata aturan lokal (adat samawa) dalam pergaulan hidup. Salah satu hal yang dinilai sebagai faktor penyebabnya adalah semakin luasnya interaksi sosial, terutama kalangan pemuda sejak masa konstruksi.

Kuatnya ikatan norma sosial dalam proses sosial pada masa sebelum beroperasinya tambang PT. NNT antara lain ditunjukkan dengan: kuatnya sangsi sosial dalam masyarakat, berperannya kelembagaan adat, dan berperannya tokoh-tokoh adat setempat, baik tokoh formal maupun tokoh informal. Perubahan sosial multidimensional sejak masuknya tambang, menggiring orientasi dan tata nilai masyarakat dan salah satunya diaktualisasikan dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Secara teoritis, sebagaimana diungkapkan oleh Koesnadi (1990), Vago (1985), Sandrerson (2000) sangat kecil kemungkinan sistem budaya lokal mampu bertahan dalam arus perubahan sosial yang dipicu oleh transformasi ekonomi, terlebih-lebih bila infrastruktur pembangunan (komunikasi dan transportasi) cukup menunjang berlangsungnya interaksi sosial dengan daerah lain. Dengan demikian, perubahan sesungguhnya adalah suatu keniscayaan dan dalam hal ini kehadiran perusahaan tambang hanyalah sebagai titik masuk berlangsungnya proses perubahan tersebut. Persoalan mendasar yang harus diperhatikan oleh masyarakat lokal adalah menyangkut bagaimana sistem budaya lokal mampu berfungsi sebagai penyaring masuknya budaya luar

yang dinilai menyimpang dari prinsip budaya lokal. Eksistensi kelembagaan lokal merupakan suatu elemen penting ketahanan sosial budaya masyarakat yang berfungsi juga sebagai wahana transformasi perubahan sosial masyarakat lokal.

Dalam pandangan atau pendapat masyarakat yang lain, berkurangnya kualitas perilaku dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal juga disebabkan oleh perubahan pola pikir masyarakat lokal. Perubahan tersebut terdorong oleh peningkatan kesejahteraan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dari analisis informasi secara tematik terungkap bahwa terjadinya penurunan tingkat keterikatan masyarakat terhadap norma atau adat istiadat tersebut adalah karena semakin terbukanya pola hubungan sosial yang dibangun masyarakat lokal. Di samping itu, orientasi kehidupan yang cenderung ditentukan oleh nilai-nilai ekonomi setelah masuknya PT. NNT. Artinya, banyak penduduk usia muda yang telah mampu menghasilkan uang, barang atau jasa dari hasil kerjanya, sehingga mereka merasa telah memiliki eksistensi sendiri dalam keluarga dan akhirnya kurang menerima intervensi normatif yang dinilai sebagai produk sosial masa lalu dan tidak adaptif pada masa sekarang.

Terjadinya transformasi sosial juga terlihat dalam lingkup keluarga, seperti peran dan fungsi anggota keluarga dan sistem pengambilan keputusan. Sebagaimana hasil penelitian tahun 2009, hasil

penelitian tahun 2010 ini juga menunjukkan berkembangnya pola hubungan dalam rumah tangga ke arah yang lebih egaliter, demokratis dan kemitraan. Informasi dari tokoh masyarakat setempat dijelaskan bahwa hal yang cukup mencolok adalah adanya perubahan dalam status peran dan fungsi kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sebelum tambang, kaum ibu rumah tangga umumnya hanya berkiprah di sektor domestik (rumah tangga) dan sebagai pendukung usaha suami di sektor primer (usaha tani). Saat ini, kaum perempuan mulai banyak berkiprah di sektor publik, seperti berdagang, usaha jasa bahkan kaum perempuan terdidik bekerja di perusahaan tambang dan sub-sub kontraktor yang ada di sekitar daerah lingkaran tambang.

Terkait dengan tata laku dalam hubungan intra keluarga ternyata setelah masuknya PT. NNT, banyak rumah tangga yang menunjukkan hubungan peran dan fungsi secara timbal balik dan seimbang antara suami dengan istri. Menurut sejumlah responden dan informan kunci, saat ini sebagian besar pengambilan keputusan rumah tangga dilakukan bersama hampir pada semua bidang kehidupan rumah tangga. Perkembangan yang juga menarik adalah kecenderungan dominannya peran anggota keluarga yang mampu menghasilkan pendapatan keluarga lebih banyak untuk menentukan keputusan rumah tangga. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari peran senioritas (Paternalistik) ke peran ekonomis terutama untuk pengambilan keputusan dalam keluarga.

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Karyadi, LW (2007) bahwa kalangan pemuda yang menjadi TKI dan bisa memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga di daerah asal cenderung memiliki posisi semakin kuat dalam pengambilan keputusan strategis dalam keluarga.

2) Tradisi seputar kelahiran, perkawinan dan kematian

Tampak pada tabel 58 bahwa cukup banyak (lebih 50 %) responden masyarakat lokal yang mengaku masih terikat oleh aturan norma yang berkembang pada masyarakat lokal. Dengan kata lain masyarakat masih memegang teguh prinsip norma atau adat istiadat setempat dalam melakukan berbagai upacara tradisi, baik menyangkut upacara kelahiran, perkawinan dan kematian. Meskipun demikian, masih dijumpai sejumlah responden yang menyatakan tidak terikat oleh aturan adat setempat dalam melakukan kegiatan upacara tradisi tersebut.

Secara umum, responden dan informan kunci yang diwawancarai berpendapat, memang terjadi perkembangan atau penyesuaian oleh masing-masing orang (warga masyarakat) dalam hal melaksanakan upacara adat, namun perubahan tersebut tidak terletak pada nilai dasar adat yang bersifat sakral. Penyesuaian dalam pelaksanaan upacara adat atau tradisi tersebut lebih disebabkan faktor perubahan kesejahteraan dan perilaku ekonomi masyarakat. Penyesuaian dimaksud berupa tambahan atau pengurangan kegiatan dalam tata cara pelaksanaan

adat atau tradisi yang dianut masyarakat setempat. Fenomena sosial semacam ini juga ditemukan pada penelitian tahun 2009.

Dalam upacara seputar kelahiran misalnya, tetap ada upacara pemberian nama (*peda api*) dan *nguris* namun tidak lagi disertai dengan kelengkapan simbol adat seperti *kepeng bolong*, dan perangkat adat lainnya yang bernuansa ritual dan mistis sebagaimana banyak dilakukan pada masa lalu.

Sebagian besar responden dan semua informan kunci menyatakan tetap terikat dengan aturan adat Samawa dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu yang masih mencolok dan tidak berubah misalnya adalah : kegiatan melamar, mengantar bawaan (semacam menghantar mahar), *barodak* (rapancar) yang disertai dengan berbagai upacara, masih taat dilakonkan oleh masyarakat lokal di desa lingkartambang. Dari berbagai informasi terkait pelaksanaan upacara adat tersebut, diketahui sesungguhnya masyarakat Samawa khususnya di desa lingkartambang memandang ritual perkawinan sebagai sesuatu yang sakral sehingga tidak mudah terpengaruh oleh sistem nilai yang berasal dari daerah lain.

Pada pelaksanaan upacara perkawinan, yang dalam kebiasaan setempat selalu ada kesenian tradisional seperti *sekeco* atau *gendang dua* dan sejenis *rebana* untuk mengiringi dan menjadi kelengkapan upacara. Akan tetapi bila keluarga yang

merayakan tersebut mampu secara finansial, maka mereka bisa saja menambah hiburan dengan kesenian lain, seperti orkes dan sejenisnya yang bernuansa kesenian moderen. Bahkan, bagi masyarakat asli yang kondisi ekonominya cukup baik ada kecenderungan penambahan dalam tata cara pelaksanaan adat tersebut dikaitkan dengan prestise sosial, karena masyarakat menilai bahwa warga yang mampu mendatangkan kesenian moderen sebagai hiburan dalam upacara adat melambangkan kemampuan ekonomi masyarakat tersebut. Tampaknya hal inilah yang mendorong terjadinya modifikasi dalam pelaksanaan adat atau upacara-upacara adat setempat.

Faktor kemampuan ekonomi merupakan faktor dominan yang dirasakan sangat menentukan corak penyelenggaraan upacara perkawinan dan upacara adat ritual lainnya. Corak adat istiadat dalam perkawinan masyarakat lokal sesungguhnya tidak mengalami perubahan berarti. Perubahan yang ada tampaknya hanya sebatas variasi, yakni yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara yang biasanya disertai dengan hiburan kesenian.

Tata kehidupan dan adat istiadat yang juga tidak mengalami perubahan adalah upacara terkait kematian. Semua rangkaian prosesi sebagaimana dalam tuntunan sareat islam tetap dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan sejak masa lalu. Penyesuaian yang dilakukan masyarakat adalah

terletak pada sarana pelengkap upacara. Bila pada masa lalu, wujud kepedulian masyarakat adalah dengan membawa *langaran* (bawaan tanda duka cita) umumnya berupa natura, seperti beras, gula, kelapa dan lainnya, maka pada saat ini banyak yang menyesuaikan secara praktis dengan memeberikan dalam bentuk uang tunai. Namun demikian, sesungguhnya esensi normatif yang terkandung dalam upacara tersebut tidak mengalami perubahan mendasar. Esensi normatif yang tetap tumbuh dan berkembang dalam upacara adat atau ritual adalah nilai kebersamaan, kepedulian dan kehendak untuk berbagi antar sesama.

3) Norma dalam Sistim Produksi/Distribusi dan Pembagian Kerja

Masyarakat lokal di daerah lingkur tambang awalnya memiliki sejumlah kearifan lokal yang mengatur tatanan masyarakat dalam proses produksi dan pembagian hasil (distribusi). Proses produksi yang dimaksud adalah proses produksi pertanian dan peternakan, karena pada masa lalu sebagian besar masyarakat lokal memiliki mata pencaharian sebagai petani ladang dan peternak. Terungkap dari hasil pendalaman informasi bahwa pada masa lalu, kegiatan dibidang pertanian dan proses produksi lainnya banyak bersandar pada nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sejumlah kelembagaan lokal terkait tenaga kerja berkembang, seperti Besiru dan nyantek.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi saat ini menunjukkan sebagian nilai kebersamaan dan kepedulian tersebut semakin diabaikan oleh masyarakat lokal. Perubahan tersebut berawal dari banyaknya warga pendatang yang ikut bekerja pada sektor produksi dan distribusi terutama mulai tahap konstruksi tambang. Perkembangan pada sistem produksi dan distribusi tersebut berdampak terhadap perubahan pada kebiasaan masyarakat dalam sistem pembagian kerja. Sistem pembagian kerja tidak lagi dilandasi oleh nilai dan norma lokal (kebersamaan dan kepedulian), tapi berubah menjadi hubungan ekonomis komersial. Prinsip saling berbagi, senasib sepenanggungan, gotong royong, hak-hak komunal dalam sistem pembagian kerja dan distribusi tampaknya sudah mulai punah. Semua partisipasi sosial dan kekeluargaan lebih banyak dinilai dan tergantikan oleh fungsi uang dan materi lainnya.

Sistem kerja dibidang proses produksi pertanian yang berkembang saat ini semakin menggeser norma-norma atau kebiasaan lama masyarakat lokal dalam sistem pengelolaan tenaga kerja. Sistem *besiru* (berbagi dan bersama) yang sebelum masuknya perusahaan tambang banyak berkembang, kini hampir tidak ditemukan lagi dalam kegiatan usahatani, baik di lahan sawah maupun ladang atau tegalan. Berdasarkan hasil studi seperti dijelaskan di atas, dapat ditegaskan bahwa komponen yang berubah terletak pada dasar nilai berperilaku ekonomi secara keseluruhan. Nilai lokal yang mengalami

pemudaran adalah nilai kebersamaan dan kepedulian (senasib sepenanggungan), termasuk nilai berbagi antar sesama (*tanggung renteng*). Pada saat sekarang ini, pola dan kegiatan usaha ditentukan berdasarkan analisis peluang usaha dan peluang pasar. Sistem jual beli berlaku dengan sistem moderen yakni transaksi formal (finansial). Pola ini menggeser nilai lama seperti *barter* dan sejenisnya yang berpangkal pada prinsip kepercayaan, kebersamaan dan saling berbagi antar sesama. Semua tokoh masyarakat lokal yang awalnya adalah petani peladang dan peternak sepakat dengan rangkuman hasil diskusi kelompok terpusat (FGD) yang merumuskan pernyataan :

Pada masa lalu kebersamaan dan kepedulian antar warga masyarakat sangat kuat. Persatuan dan persaudaraan menjadi landasan bertindak dalam setiap proses produksi. Hasil produksipun tidak jarang berbagi karena semua dikerjakan secara kekeluargaan. Hasil panen sekali setahun dirasakan cukup untuk bekal hidup dan persiapan proses produksi berikutnya. Kondisi saat ini telah berubah, warga masyarakat lokal sedikit yang berminat bekerja di pertanian (ladang) dan sulit mengarpakan gotong royong dan saling berbagi dengan masyarakat. Semua selalu dinilai dengan uang dan sejumlah waktu yang dikorbankan dalam bekerja. Namun hal demikian dapat dimaklumi sekarang ini karena masyarakat lokal juga mengikuti pola kerja moderen dan tenaga kerja menjadi mahal karena

mendapatkan uang juga tidak sesulit seperti masa lalu.

Tidak jauh berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya, pada tahun 2010 ini juga ditemukan bahwa persoalan krusial dalam bidang proses produksi adalah keterbatasan dan mahalannya ongkos tenaga kerja. Pada saat ini, setiap curahan tenaga kerja yang menjadi faktor produksi harus dinilai dengan sejumlah materi (uang). Berkaitan dengan hal ini, sejumlah petani lokal mengungkapkan sulitnya mendapat tenaga kerja pertanian dari penduduk lokal. Kalaupun ada yang bersedia, upah yang diminta sangat tinggi, yakni sekitar Rp 50.000 per orang perhari dengan jam kerja sekitar 7 jam perhari. Pendapatan tersebut dinilai relatif kecil bila dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari bekerja di bidang lain di daerah lingkaran tambang. Oleh sebab itu penduduk lokal lebih tertarik bekerja dibidang non pertanian seperti tenaga kontrak di perusahaan atau sub kontraktor yang beroperasi di sekitar daerah tambang.

Semua responden dan informan mengakui bahwa kendala penyediaan tenaga kerja tersebut berdampak pada sistem kelembagaan, pembagian kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Itulah sebabnya, pelaku produksi diberbagai bidang usaha (pertanian, kerajinan, pertukangan dan bahkan nelayan) cenderung menggunakan tenaga kerja upahan dari luar daerah, terutama sekali pendatang

dari pulau Lombok. Disisi lain, anggota rumah tangga kurang tertarik bekerja di sektor primer dan lebih memburu usaha di sektor sekunder, terutama jasa dan perdagangan. Berkurangnya ketersediaan tenaga kerja rumah tangga berdampak pada ketersediaan tenaga kerja lokal di tingkat desa dan seterusnya. Hal ini menuntut pemilik proses produksi untuk memanfaatkan tenaga kerja dari luar daerah dengan sistem pembagian kerja baru yang disepakati bersama. Dengan kata lain, pada masyarakat telah berkembang kelembagaan baru dalam hal pemanfaatan tenaga kerja untuk proses produksi dan distribusi.

Selain karena perubahan orientasi kehidupan ekonomi masyarakat lokal, perubahan nilai masyarakat juga disebabkan oleh berkembangnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam aktivitas dan perkembangan perekonomian secara umum. Peningkatan pengetahuan tersebut disebabkan oleh meningkatnya intensitas interaksi masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang yang membawa nilai-nilai baru dalam aspek ekonomi. Di sinilah aspek-aspek positif yang terjadi dari proses akulturasi, dimana masyarakat lokal mampu mengadopsi inovasi yang dibawa oleh tenaga kerja yang datang dari luar daerah Sumbawa. Perspektif perubahan tampak cukup kuat pada sebagian besar masyarakat lokal. Mereka memandang bahwa kehidupan memang harus berubah sehingga perubahan yang dialami saat harus disyukuri dan dijaga agar tidak menimbulkan hal-hal

yang buruk pada sistem budaya dan integritas masyarakat lokal yang bertumpu pada sistem nilai dan norma masyarakat Samawa. Berikut adalah pandangan Bapak Hasan di Desa Beru Jereweh (kutipan in depth interview) :

Kita memang senang bisa berubah, tidak terus menerus tertinggal. Dahulu anak-anak kita jarang bisa sekolah, tapi kini semua lancar. Yang menjadi masalah adalah berubahnya ikatan kebersamaan masyarakat karena sekarang ini lebih banyak kita memikirkan diri dan keluarga sendiri. Untuk membantu orang lain sekarang jarang karena semua sepertinya bersaing mencari keuntungan sendiri-sendiri. Tidak ada besiru atau nyantek seperti dahulu.. bekerja apa saja harus jelas upahnya terlebih dahulu”.

Pola pengelolaan tenaga kerja dinidang pertanian tidak berbeda antara tahu 2009 dengan tahun 2010 ini. Fenomena yang terjadi menggambarkan : setelah berlangsungnya kegiatan tambang, terjadi perubahan struktur pekerjaan masyarakat, dan hal ini berpengaruh terhadap pola penggunaan faktor produksi, khususnya tenaga kerja. Ada kecenderungan bahwa masyarakat lokal jarang yang mau bekerja sebagai buruh tani atau sebagai tenaga kerja upahan di sektor primer (pertanian). Oleh sebab itu, kebanyakan tenaga kerja kasar didatangkan dari daerah lain, terutama dari pulau Lombok. Hal inilah yang menjadi penyebab berubahnya sistem dalam

pemanfaatan tenaga kerja yang juga ditunjukkan dengan tingginya upah tenaga kerja. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran dalam hal kebiasaan pengelolaan faktor produksi tenaga kerja dari pola-pola kekerabatan dan gotong royong menjadi pola-pola komersial. Dengan kata lain, sebagian besar transaksi dan sharing sumberdaya berlangsung dengan sistem pasar dan telah menggeser model pertukaran yang bertumpu pada entitas dan komunitas setempat.

Pergeseran sosial seperti yang tergambar pada perubahan dari sistem keluarga tanpa upah menjadi tenaga kerja upahan menggambarkan telah terjadinya perubahan mendasar pada nilai hidup dan etos kerja masyarakat. Nilai-nilai moderen, seperti efisiensi, profesionalitas, produktivitas, dan efektivitas telah dijadikan acuan dan tujuan dalam melakukan proses produksi. Sedangkan nilai-nilai sosial berupa kebersamaan, kepedulian dan berbagi antar sesama mengalami marginalisasi secara sistematis. Berdasarkan hal ini dapat ditegaskan bahwa kehadiran perusahaan tambang memicu perubahan orientasi masyarakat ke arah yang lebih maju berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi kerja. Berlangsungnya perubahan normatif tersebut diawali oleh terbukanya kawasan atas pendatang pekerja dari luar ke daerah lingkaran tambang, terbangunnya jaringan transportasi dari dan ke kawasan yang sangat memadai. Di samping itu, perubahan didukung oleh program intensifikasi pertanian pada lapisan

masyarakat petani maju dan secara simultan diterima dan diadopsi oleh petani lainnya. Cepatnya alur perubahan tersebut ditunjang oleh pekerja pendatang yang melakukan proses produksi diberbagai bidang mata pencaharian dengan menggunakan faktor produksi secara komersial. Inovasi atau teknologi yang datang dari luar dan diprogramkan oleh pemerintah setempat memperlancar terbentuknya budaya baru dalam bidang proses produksi. Budaya baru tersebut lebih mengarah kepada prinsip modernisasi dan berorientasi pasar.

Dari rangkuma wawancara mendalam diketahui bahwa perubahan pada aspek sistem produksi dan pembagian kerja dalam masyarakat lokal tidak menyentuh nilai-nilai adat, namun telah terjadi kebiasaan baru dan mengalami proses internalisasi (pelembagaan) sejalan dengan perkembangan waktu. Kebiasaan dan norma baru yang telah terinternalisasi tersebut akan menjadi tatanan kehidupan masyarakat dalam hal pemanfaatan tenaga kerja dimasa mendatang. Orientasi perubahan perilaku yang demikian secara umum menggambarkan perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, upaya mengangkat daya adaptasi masyarakat lokal atas perubahan yang terjadi disekitar lingkungan mereka akibat aktivitas tambang adalah dengan cara menguatkan kemampuan inovatif produktif masyarakat lokal melalui transfer pengetahuan dan teknologi secara simultan. Disamping itu, ketahanan sosial masyarakat lokal akan semakin baik bila ditunjang dengan

keberadaan kelembagaan asli yang berbasis kearifan lokal yang akan mengakomodir nilai dan norma lokal yang dipandang masih adaptif pada era perubahan sekarang ini.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat ditegaskan bahwa beberapa faktor pelancar perubahan dibidang proses produksi di daerah lingkar tambang antara lain : (1) Sistem upahan dinilai lebih menguntungkan dan merangsang minat tenaga kerja, (2) produktivitas dinilai menjadi lebih tinggi, (3) cara baru dalam menggunakan tenaga kerja tidak sulit diterapkan dan sesuai dengan harapan masyarakat, dan (4) pengusaha atau petani lebih mudah melakukan perencanaan biaya usaha dan sejenisnya.

4) Kebiasaan terkait dengan Perumahan.

Tabel 58 menunjukkan lebih dari 60 persen responden berpandangan bahwa tatanan normatif yang paling longgar (tidak mengikat) adalah yang terkait dengan pembangunan rumah. Bila pada masa sebelum masuknya PT. NNT seolah-olah masyarakat lokal terikat oleh kebiasaan untuk senantiasa membangun rumah dengan arsitektur tradisional (rumah adat samawa). Hasil observasi tahun 2010 menunjukkan sangat sedikit rumah penduduk lokal yang mencerminkan rumah tradisional. Masyarakat lokal daerah lingkar tambang sudah jarang yang memperhatikan aspek normatif tradisional dalam pembangunan perumahan saat ini. Secara visual hal tersebut dapat terlihat dari semakin banyaknya

perumahan dengan arsitektur moderen dari waktu ke waktu. Sejak masa konstruksi tambang telah banyak masyarakat lokal yang melakukan renovasi rumah menjadi arsitektur moderen dan permanen. Awalnya, renovasi rumah ditujukan untuk fungsi ekonomi semata yakni sebagai rumah kontrakan kepada karyawan PT. NNT atau sub kontraktor lainnya. Tetapi saat ini renovasi berkembang kearah fungsi sosio psikologis (keamanan, kenyamanan, kesehatan dan prestise sosial).

Selain itu, pada tahun 2010 juga masih ada indikasi longgarnya implementasi beberapa tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tidak berbeda dalam dua tahun terakhir namun berbeda mencolok dengan kondisi sebelum tambang. Sebelum beroperasinya tambang, keterikatan normatif masyarakat lokal cukup kuat (Mahsun, 1998). Keteraturan masyarakat sangat dirasakan karena diatur oleh sistem norma yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

Fenomena perubahan model perumahan warga masyarakat (terutama masyarakat lokal) menggambarkan juga perubahan yang terjadi pada sistem norma masyarakat setempat. Penelitian tahun 2010 ini menunjukkan dinamisnya pembangunan atau renovasi perumahan masyarakat dari rumah tradisional menjadi rumah permanen dengan arsitektur moderen. Dengan kata lain, model perumahan yang dibangun tidak lagi hanya bercorak

rumah adat samawa sebagaimana bangunan tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan dan perkembangan lain yang cukup mencolok adalah orientasi kesehatan masyarakat terkait perumahan. Sebelum masuknya pekerja luar atau sebelum mulainya penambangan sangat sedikit rumah penduduk yang dilengkapi dengan kamar mandi atau MCK yang memadai. Dari pandangan kesehatan pola perumahan tersebut sesungguhnya kurang memenuhi persyaratan. Menyadari adanya kekurangan ini dan dalam perspektif ekonomi hal ini kurang menguntungkan, sehingga banyak warga yang merubah gaya rumah dengan gaya permanen dan meninggalkan spirit adat lokal dalam membangun perumahan.

Satu-satunya cerminan nilai-nilai sosial yang masih melekat dalam bangunan rumah baru masyarakat lokal terletak pada bentuk atap rumah. Fenomena semacam ini masih terlihat kental pada tahun 2009 juga 2010. Inilah satu-satunya ciri-ciri atau simbol-simbol nilai adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat lokal. Sebagian besar rumah batu permanen yang dibuat setelah dimulainya aktivitas tambang, atapnya tetap mencirikan rumah khas samawa, seperti bentuk kanopi dan kongsol rumah yang bersusun. Berkembangnya prinsip dan perspektif ekonomi dalam tata bangunan perumahan tersebut merupakan cerminan makin longgarnya pertalian norma atau adat istiadat pada masyarakat

lokal setelah masuknya kegiatan tambang. Berubahnya kebiasaan masyarakat setempat dalam membangun rumah menyebabkan longgarnya pertalian sosial yang selama ini diatur dalam tatanan atau spirit adat dan kebiasaan masyarakat. Pembangunan rumah moderen yang permanen memerlukan pekerja profesional yang diupah. Artinya, sistem ini memperkecil peluang gotong royong dan tolong menolong sebagaimana yang lazim berkembang sebelum diadopsinya sistem perumahan moderen. Namun demikian, sebagai suatu proses perubahan perkembangan perumahan yang ada sekarang ini merupakan salah petunjuk meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal di daerah tambang. Dalam tinjauan perubahan sosial, apa yang ditampilkan masyarakat lokal dalam model perumahannya saat ini merupakan suatu implementasi proses adaptasi sosial ditengah lingkungan yang sedang berubah. Selama proses adaptasi tersebut bisa dilakukan dengan potensi yang dimiliki tentu tidak akan menyebabkan konflik. Tetapi bila masyarakat lokal tidak mampu lagi beradaptasi akibat kemampuannya yang terbatas bisa jadi terjadi mal adaptasi yang bila terakumulasi dapat menimbulkan konflik sosial yang serius. Untuk itu, PT.NNT sebagai agen perubah di daerah lingkaran tambang harus memperhatikan kecenderungan perubahan masyarakat lokal seperti ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi distorsi sosial yang mengarah pada terjadinya konflik sosial.

b. Sistem Nilai dan Kepercayaan

Secara umum, dengan beroperasinya perusahaan tambang PT. NNT, maka sejak masa konstruksi hingga saat ini (tahun 2010) solidaritas masyarakat telah bergeser dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Nilai-nilai komunal juga berkembang menjadi nilai-nilai individual. Salah satu aspek yang menggambarkan pergeseran tersebut adalah fenomena sistem nilai dan kepercayaan yang dianut masyarakat lokal. Sistem nilai dan kepercayaan sangat ditentukan oleh pola interaksi sosial dan interaksi masyarakat dengan alam sekitarnya. Secara umum, sistem nilai dan kepercayaan masyarakat lokal telah banyak mengalami perkembangan setelah masuknya kegiatan tambang. Nilai-nilai lokal tradisional yang sebelumnya mengikat solidaritas sosial berangsur-angsur mengalami pelonggaran dan perapuhan secara fundamental setelah berlangsungnya kegiatan tambang. Tidak ada perbedaan yang ditemukan antara tahun 2009 dengan tahun 2010 terkait dengan indikator sosial tersebut.

Hasil penelitian berikut mengungkap fakta sosial yang ada disekitar daerah lingkaran tambang sesuai temuan penelitian tahun 2010 berikut ini.

1) Nilai Kebersamaan (Gotong Royong dan Tolong Menolong)

Modal sosial (*social capital*) dalam bentuk kearifan lokal merupakan suatu pranata sosial yang mampu mengikat dan menguatkan solidaritas sosial

dan mampu membangun harmoni masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Nilai kebersamaan masyarakat lokal banyak diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan tolong menolong. Hasil penelitian tahun 2010 ini mengungkapkan bahwa gotong royong dan tolong menolong sebagai suatu pranata lokal mengalami transformasi sehingga praktik dan sifat gotong royong tidak lagi sebagaimana kondisi pada masa sebelum masuknya tambang. Kelembagaan gotong royong dan tolong menolong masih berkembang di masyarakat lokal, hanya saja substansi strukturalnya telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan elemen sosial lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian terdahulu, masyarakat desa lingkaran tambang pada awalnya merupakan masyarakat tradisional dengan basis kehidupan di sektor pertanian rakyat. Dengan demikian, sebagai ciri komunitas agraris tradisional, pada masa lalu (sebelum masuknya perusahaan tambang PT. NNT) tatanan sosial budaya yang cukup berkembang adalah Gotong royong dan tolong menolong. Gotong royong dipandang sebagai salah satu bentuk interaksi antar warga. Kegiatan gotong royong tersebut berlangsung untuk berbagai aspek kehidupan, seperti: bercocok tanam, membangun rumah, melaksanakan upacara adat dan ritual (perkawinan, kematian, dan upacara selamatan lainnya), membersihkan kampung, membangun fasilitas umum (masyarakat) dan sebagainya.

Temuan penelitian tahun 2010 ini menunjukkan, dari 405 responden, semuanya (100 %) menyatakan nilai-nilai kebersamaan antar masyarakat lokal (gotong royong dan tolong menolong) semakin berkurang (luntur) setelah beroperasinya tambang. Namun demikian, diantara itu terdapat respponden dan informan kunci yang menilai bahwa gotong royong dan tolong menolong tetap berkembang namun pola dan intensitasnya mengalami perubahan. Perkembangan akhir-akhir ini, setidaknya sejak tahun 1998 hingga saat ini perkembangan kegiatan gotong royong dalam maknanya yang asli jarang dijumpai lagi, kecuali pada aspek kehidupan yang terkait dengan adat istiadat masyarakat lokal. Berkurangnya gotong royong pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada awalnya disebabkan oleh meningkatnya kesibukan warga dengan pekerjaan sehari-hari dan bergesernya orientasi mereka kearah yang lebih mandiri dan rasional. Selain itu, ada beberapa obyek yang dulunya bisa digotong royongkan tapi pada saat ini sudah kurang memungkinkan karena dianggap tidak efektif.

Berdasarkan ungkapan responden dan informan kunci, nilai-nilai kekerabatan masyarakat lokal semakin longgar, bahkan secara kasuistik ada rasa persaingan di antara masyarakat lokal sendiri terutama berkaitan dengan kemampuan mereka mengakses perusahaan PT. NNT. Aktivitas gotong royong dan tolong-menolong saat ini telah mengalami transformasi. Berdasarkan penuturan tokoh

masyarakat (informan kunci) di desa-desa penelitian diketahui bahwa pola interaksi kelompok sebagai basis gotong royong, seperti *bawa penulung* (membawa bahan makanan untuk membantu pesta perkawinan), bawa *perenok/ngenong* (membawa bahan makanan pada keluarga yang mengalami musibah kematian) umumnya masih tetap ada namun kadang-kadang divariasikan dengan mengganti barang bawaan tersebut dengan uang.

Semua informan kunci menjelaskan bahwa kebiasaan memberikan pertolongan atau partisipasi sosial dengan uang berkembang setelah masuknya perusahaan tambang PT. NNT dan terus berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesibukan anggota masyarakat dengan pekerjaan produktif pada masa konstruksi. Kesibukan di sektor pekerjaan tidak memberi peluang yang banyak untuk partisipasi sosial dalam bentuk kegiatan padat karya sebagaimana yang berkembang sebelum tambang. Prinsip sosial dan kebersamaan nampaknya tetap berlangsung tapi tergantikan oleh bentuk lain, terutama uang (dalam istilah masyarakat “amplop”).

Implementasi nilai kebersamaan sosial seperti dalam kegiatan gotong royong membangun rumah (*Basantek*) yang dahulu paling lazim, setelah masuknya perusahaan menjadi sangat jarang dilakukan kecuali oleh masyarakat desa di perkampungan yang agak jauh dari pusat desa. Sejumlah informan kunci menambahkan bahwa

untuk *Basantek* jika yang dibangun adalah rumah tradisional (rumah panggung) biasanya seluruh proses pembangunannya digotongroyongkan. Namun sekarang ini, meskipun membangun rumah panggung gotong royong semakin berkurang sehingga sebagian besar mesti diupahkan. Selain itu jika yang dibangun adalah rumah batu (rumah permanen), maka yang digotong royongkan adalah penyelesaian atapnya. Namun aktivitas gotong royong semacam ini sudah semakin jarang dilakukan saat ini. Masuknya tenaga kerja seperti tukang dan buruh bangunan terutama dari pulau Lombok setelah adanya PT. NNT dinilai memperlancar transformasi gotong royong tersebut. Masyarakat lokal dalam beberapa tahun terakhir telah memperhitungkan selera dan kualitas dalam membangun rumah. Oleh sebab itu pembangunan rumah diserahkan kepada tukang agar selera dan kualitas tersebut dapat terpenuhi. Akibatnya, pembangunan perumahan dengan sistem gotong royong berangsur-angsur ditinggalkan oleh masyarakat pedesaan.

Nilai kebersamaan masyarakat lokal yang lebih hakiki diwujudkan dalam kegiatan pertanian, seperti *Besiru* (mengerjakan sebidang lahan secara bersama-sama dan bergiliran antar penggarap lahan tanpa diupah). *Besiru* tersebut biasanya berlaku untuk pekerjaan pengolahan lahan, menanam, menyangi sampai panen. Dalam satu dekade terakhir, kegiatan besiru bales diakui oleh semua responden semakin berkurang. Berkurangnya aktivitas *Besiru* tersebut

dalam pandangan masyarakat lebih disebabkan oleh diintrodukirnya paket teknologi pertanian (intensifikasi) seperti penggunaan benih unggul, dan peralatan mekanisasi pertanian. Praktik-praktik gotong royong tersebut semakin berkurang sejak dimulainya persiapan kegiatan penambangan oleh PT. NNT. Pada masa setelah mulainya aktivitas penambangan, bentuk gotong royong dalam arti sumbangan tenaga secara sukarela banyak diganti dengan bantuan berupa materi atau uang.

Kesan semakin berkurangnya nilai kebersamaan dalam berbagai bentuk didorong oleh perkembangan sosial ekonomi masyarakat lokal. Keberhasilan sebagian besar penduduk bekerja di PT. NNT dan perusahaan lainnya menyebabkan sebagian besar waktu digunakan untuk bekerja sehingga tidak banyak waktu untuk kegiatan yang kurang produktif. Pada masa konstruksi masih berlangsung, pekerjaan gotong royong seperti disebutkan di atas oleh generasi muda justru dipandang sebagai kontra produktif. Nilai atau spirit kebersamaan yang bernuansa sosial dalam kenyataannya telah berkembang menjadi nilai-nilai parsial yang lebih dilandasi pada kebutuhan hidup terutama hasrat untuk mendapatkan penghasilan atas korbanan waktu yang tersedia.

Hasil wawancara mendalam terhadap informan kunci tahun 2010 dikemukakan : kebersamaan dalam bentuk gotong royong untuk pengadaan fasilitas umum, seperti membangun prasarana ibadah,

kebersihan lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan sebagainya kadang masih ada, namun yang pasti semuanya mengalami penurunan drastis setelah kehadiran perusahaan tambang. Hal tersebut antara lain karena ada upaya dari pihak perusahaan untuk pengadaan berbagai fasilitas sosial tersebut melalui program community development PT. NNT. Artinya, PT. NNT membangun fasilitas dengan nilai tertentu yang dikerjakan oleh tenaga upahan baik dari penduduk lokal maupun pekerja dari daerah lain. Faktor-faktor intervensi program yang langsung menyentuh eksistensi masyarakat ini memang dinilai baik dan menguntungkan bagi masyarakat, akan tetapi disisi lain hal tersebut mengurangi partisipasi mereka yang pada gilirannya mengurangi peran dan fungsi pranata lokal yang terbentuk dari kearifan lokal masyarakat setempat.

2) Nilai Spiritual/Religi (Kepercayaan terhadap Tuhan)

Selain norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam bergubungan dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, ada juga norma dan nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Norma tersebut terangkum dalam sistem kepercayaan yang umumnya dimiliki oleh setiap komunitas. Temuan penelitian tahun 2010 menunjukkan adanya perkembangan signifikan pada sistem kepercayaan masyarakat bila dibandingkan dengan kondisi awal sebelum masuknya PT. NNT.

Temuan penelitian tahun 2010 terhadap indikator nilai spiritual (kepercayaan kepada Tuhan) terlihat kuatnya indikasi perkembangan atau perubahan dimensi keyakinan masyarakat lokal. Secara kuantitatif, ditemukan sistem kepercayaan terhadap Tuhan (ibadah) mengalami perkembangan positif. Artinya, pelaksanaan ibadah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Dari 405 responden dan informan kunci, sebanyak 366 orang (90,37 %) menyatakan aktivitas peribadatan meningkat dan semakin baik setelah terbukanya tambang. Sebagian lainnya, yakni 38 orang (9,34 %) berpendapat aspek kepercayaan kepada Tuhan semakin berkurang. Sebagian besar responden yang menilai terjadi peningkatan tersebut mengemukakan kehidupan keagamaan (spiritual) semakin semarak setelah masa konstruksi tambang dan berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dalam diskusi kelompok terpusat (FGD) yang dihadiri tokoh masyarakat formal dan informal diketahui bahwa berkembangnya implementasi ibadah kepada Tuhan didukung oleh perkembangan infrastruktur peribadatan sejak masuknya PT. NNT. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ibadah dan semakin meningkatnya kesadaran spiritual warga masyarakat merupakan faktor pendorong meningkatnya aktivitas peribadatan masyarakat, khususnya warga masyarakat lokal yang beragama Islam. Adapun sistem kepercayaan lain (nilai-nilai

ritual) yang sebelum tambang cukup berkembang pada masyarakat lokal, sekarang ini dinilai semakin berkurang. Berbagai ritus tradisional yang diungkap dan berkembang pada masa sebelum tambang kini jarang dijumpai atau dilakukan oleh masyarakat lokal.

Selain itu dalam studi 2010 ini terungkap kesan bahwa masyarakat lokal dinilai memiliki toleransi yang cukup baik terhadap warga (warga pendatang) yang menganut kepercayaan yang berbeda. Semua informan mengakui hal tersebut dan mengemukakan bahwa sejak beroperasinya tambang, tidak pernah terjadi konflik yang disebabkan perbedaan agama di daerah lingkaran tambang. Warga masyarakat lokal hanya tidak bisa menerima pelaksanaan ibadah agama lain dalam komunitas mereka yang sepenuhnya penganut Islam. Dengan kata lain, warga masyarakat lokal kurang menerima adanya kelompok agama lain melakukan kegiatan peribadatan secara terbuka di sekitar kampung mereka.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh masyarakat diperoleh konfirmasi bahwa masyarakat lokal tidak menginginkan atau tidak mendukung pembangunan prasarana ibadah agama lain di sekitar kawasan pemukiman masyarakat lokal yang umumnya beragama Islam. Untuk itu, diharapkan kegiatan agama lain secara terbuka dilakukan di kawasan khusus yang tidak didominasi oleh warga masyarakat yang beragama Islam. Penjelasan hasil penelitian ini lebih

mempertegas hasil penelitian sebelumnya, dimana masyarakat lokal memiliki batasan tersendiri menyangkut nilai-nilai toleransi agama.

Semua informan mengakui adanya perkembangan dan menguatnya nilai-nilai spiritualitas dalam bentuk peribadatan tersebut. Indikasinya (sebagaimana penjelasan dalam hasil penelitian tahun 2009), semakin ramainya jamaah sholat pada setiap waktu, dan meningkatnya semangat masyarakat dalam membangun prasarana ibadah. Selain itu, tingkat keswadayaan masyarakat untuk membangun tempat ibadah juga cenderung meningkat. Untuk dukungan terhadap perubahan masyarakat tersebut diakui bahwa PT NNT banyak berkontribusi dalam pembangunan prasarana ibadah dan mendukung pemakmuran kegiatan ibadah di semua daerah lingkaran tambang. PT. NNT juga ikut serta mengembangkan sistem kelembagaan masyarakat dalam hal tata beribadah atau yang terkait dengan ritual lainnya.

Aspek lain yang juga dikaji menyangkut norma kepercayaan tersebut adalah esensi dan keberadaan tokoh agama, hasil studi menunjukkan bahwa peran tokoh agama masih sebatas pada peran rutin seperti menjadi imam, khatib, dan pemimpin dalam upacara agama di masyarakatnya sendiri. Kehadiran warga pendatang yang tampak memiliki komitmen keagamaan cukup kuat sangat diterima oleh masyarakat lokal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

peran warga pendatang untuk memerankan pemimpin agama, seperti menjadi imam, khatib dan guru mengaji di sejumlah desa di daerah lingkaran tambang. Hal demikian diakui sangat berpengaruh positif terhadap perubahan perilaku dalam pengamalan nilai-nilai spiritual masyarakat lokal.

3) Kepercayaan terhadap Alam dan Pengetahuan Tradisional

Latar belakang sosial masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang adalah masyarakat agraris tradisional yang mengandalkan kehidupan/mata pencaharian dari mengolah hasil alam, terutama pertanian. Dengan setting sosial tersebut, masyarakat lokal pada awalnya sangat banyak memiliki kearifan lokal yang menata kehidupannya dalam berhubungan dengan alam dan lingkungannya. Hasil penelitian awal telah mengemukakan bahwa masyarakat lokal memiliki seperangkat kepercayaan terhadap kekuatan alam yang diwujudkan dalam norma sosial. Kekuatan alam awalnya banyak diyakini berpengaruh terhadap kehidupan dan kelangsungan mata pencaharian masyarakat lokal. Sejumlah tanda-tanda alam yang dijadikan patokan berperilaku dalam hubungannya dengan alam antara lain : kenampakan dan perubahan pada flora (tumbuh-tumbuhan), fauna (hewan), tanda alam (angin, hujan, matahari, bintang, gempa bumi, gerhana, dan lain-lain). Selain itu ada juga keyakinan terhadap kaidah hari, bulan dan tahun dalam perhitungan lokal. Diakui oleh sebagian besar responden dan informan bahwa pada masa lalu

sebelum masuknya perusahaan PT. NNT sebagian masyarakat petani, peternak dan nelayan serta pemburu hasil hutan senantiasa mengacu pada kearifan lokal tersebut dalam berperilaku terkait dengan kehidupan dan mata pencahariaannya. Kepercayaan berdasarkan gejala alam umumnya dikaitkan dengan kepentingan masyarakat di bidang mata pencaharian, seperti pertanian, kelautan / nelayan dan sebagainya. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa keyakinan tersebut tetap melekat terutama pada kalangan orang tua, akan tetapi dalam penerapan usahanya lebih ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia.

Saat ini dimana interaksi dengan komunitas lain semakin intensif dan semakin rasionalnya pola fikir dan perilaku masyarakat terutama setelah mulainya kegiatan tambang menyebabkan sistem kepercayaan lokal tradisioanal kurang diaplikasikan oleh masyarakat lokal. Kepercayaan mereka terhadap berbagai gejala alam, gejala pada flora dan fauna tersebut diakui masih ada, tetapi mulai berkurang dalam corak dan implementasinya. Hal ini diduga karena semakin banyaknya alternatif pilihan tindakan serta menyebarnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Penjelasan ini mempertegas kembali indikasi yang ditemukan pada hasil penelitian 2009 yang tidak berbeda dengan saat ini.

Dari 405 responden terdapat 314 orang (77,5 %) menyatakan bahwa sekarang ini kepercayaan lokal

berkurang drastis dibandingkann sebelum tambang. Selebihnya, yaitu sebanyak 91 orang (22,5 %) menyatakan tidak banyak mengalami perubahan. Perbedaan pandangan tersebut diduga terjadi karena perbedaan pengalaman dan pengetahuan responden menyangkut pengamalan kepercayaan ritual di masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai tradisional pada masa lampau. Sebanyak 22 persen responden tersebut menyatakan masih mengakui keberadaan kelembagaan lokal yang ada seperti *Sandro* (Dukun) dan mengakui masih banyak masyarakat terutama petani, peternak dan nelayan yang mengacu kepada nilai-nilai atau kepercayaan lokal dalam hal-hal tertentu.

Berdasarkan penjelasan responden dan informan kunci pada penelitian tahun 2010 ini menunjukkan bahwa kearifan lokal pada masyarakat bercorak pedesaan, kelompok rumah tangga petani dan nelayan, memang masih banyak mengacu kepada ketentuan tradisional yang kejelasannya bersumber dari para *Sandro*. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan inovasi baru yang menyentuh semua lapisan masyarakat, terus berpengaruh terhadap pergeseran tingkat keyakinan masyarakat terhadap kearifan lokal dan modal sosial tersebut. Meningkatnya intensitas interaksi dengan masyarakat luar, meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai

turut memperlancar penurunan sistem kepercayaan masyarakat lokal tersebut.

Perubahan atau pergeseran orientasi masyarakat seperti temuan penelitian tersebut menggambarkan terjadinya transformasi nilai budaya masyarakat lokal. Transformasi nilai dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif, namun dari perspektif penguatan sosial hal ini menggambarkan semakin berkurangnya pranata lokal yang pada gilirannya berimplikasi pada melemahnya kekompakan dan solidaritas sosial. Sebab umumnya masyarakat tradisional banyak diikat atau disatukan oleh nilai-nilai lokal sebagai bentuk ketahanan sosialnya. Sebagaimana diungkap sebelumnya, bahwa pada masa sebelum tambang, pranata lokal dalam berbagai tinjauan justru dijadikan sarana oleh masyarakat lokal untuk menjaga keharmonisan hidup, terutama menjamin keselarasan hidupnya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Munculnya rasa kesetaraan (*equity*), rasa saling berbagi (*reciprocity*) dan nilai kepercayaan (*trust*) antar sesama justru banyak diilhami oleh nilai – nilai intuitif seperti diungkapkan di atas.

Berdasarkan gambaran secara kualitatif tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan dari kegiatan penambangan terhadap perubahan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Artinya, semakin terbuka dan meluas daya fikir seseorang dan didukung dengan pengalaman yang

memadai, maka tingkat kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan mistik (termasuk gejala alam) semakin berkurang. Itulah sebabnya terjadi peningkatan proporsi anggota masyarakat (responden) yang menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang didasarkan gerak intuitif, termasuk perubahan gejala alam (flora, fauna, dan perubahan alam lainnya) semakin berkurang.

3. Keamanan dan Ketertiban Sosial

Persoalan keamanan dan ketertiban sosial merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa berkembang dalam suatu lingkungan sosial yang sedang berkembang. Berdasarkan studi terdahulu, rona awal daerah lingkaran tambang berupa kawasan agraris yang relatif terisolir dan aksesibilitas kawasan sangat terbatas. Disamping itu, kehidupan sosial sangat bersahaja dan harmonis. Dengan demikian, gangguan keamanan dan ketertiban sangat jarang terjadi. Setelah mulai beroperasinya perusahaan tambang PT.NNT, dinamika dan tatanan sosial berkembang dengan pesat dan masalah keamanan dan ketertiban muncul menjadi persoalan baru dalam komunitas masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT. Berikut dipaparkan secara kualitatif gambaran kondisi keamanan dan ketertiban di daerah lingkaran tambang PT. NNT pada tahun 2010.

a. Ketertiban Umum (Nilai Moral dan Etika Masyarakat)

Secara umum gangguan ketertiban masyarakat tahun 2010 yang terkait dengan penegakan nilai moral dan etika cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2009. Hal tersebut didasarkan pada semakin meningkatnya proporsi responden yang menyatakan ketertiban umum sering terganggu karena adanya tempat hiburan malam terutama di kawasan Maluku (Pasir Putih).

Untuk mengetahui sejauh mana gangguan ketertiban umum dalam pandangan masyarakat lokal maka dilakukan penilaian dan pendapat atau pandangan masyarakat terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan penegakan atau pelanggaran nilai moral dan etika masyarakat. Aspek yang dinilai meliputi :

- 1) perilaku warga / generasi muda,
- 2) pergaulan bebas,
- 3) perkelahian dan perjudian dan konflik terbatas,
- 4) pencurian dan tindak kriminalitas,
- 5) konflik masyarakat yang terbuka.

Berikut disajikan hasil penilaian responden mengenai ke lima aspek moral dan etika di daerah lingkaran tambang PT. NNT tahun 2010 :

Tabel 59. Sebaran Responden Berdasarkan Penilaiannya terhadap Aspek Moral dan Etika Masyarakat Lokal di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT Tahun 2010.

No	Obyek penilaian moral dan etika	Sebaran Responden (%) Berdasarkan Penilaiannya terhadap Aspek Moral dan Etika				
		Sangat Tinggi	Tinggi/Banyak	Biasa (Sedang)	Rendah/Kurang	Sangat Rendah
1	Kenakalan remaja	28 (6,9)	90 (22,2)	228 (56,3)	59 (14,6)	0 (0,0)
2	Prostitusi / Asusila	20 (4,9)	123 (30,4)	160 (39,5)	93 (22,9)	9 (2,2)
3	Perjudian dan perkelahian	35 (8,6)	60 (14,8)	196 (48,4)	107(26,4)	7 (1,7)
4	Pencurian dan kriminalitas	21 (5,2)	81 (20,0)	167 (41,2)	70 (17,3)	66 (16,3)
5	Konflik antar warga	22 (5,4)	57 (14,1)	193 (47,6)	111 (27,4)	22 (5,4)
	Rataan	25 (6,2)	82 (20,4)	189 (46,6)	88 (21,7)	21 (5,1)

Keterangan : angka dalam kurung adalah persentase (%).

Data tabel 59 di atas menunjukkan sebagian besar proporsi responden (46,6 %) menilai gangguan ketertiban akibat pelanggaran moral dan etik termasuk katagori biasa atau sedang. Sebagian besar lainnya (21,7%) menilai gangguan ketertiban termasuk katagori rendah, dalam arti jumlah kejadiannya dirasakan makin berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu terdapat sekitar 20,4 persen yang menilai gangguan ketertiban semakin banyak (tinggi) bahkan sekitar 6,2 persen menilai sangat tinggi. Perbedaan penilain tersebut tampaknya disebabkan perbedaan tempat domisili. Responden yang menilai perkembangan gangguan ketertiban umum tidak mengalami perkembangan (biasa saja) antara lain karena domisili mereka jauh dari lokasi atau pusat hiburan dan keramaian yang berpeluang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Masyarakat lokal yang berdomisili di sekitar kawasan Maluk dan Sekongkang kebanyakan menilai bahwa

dari waktu ke waktu gangguan ketertiban masyarakat semakin tinggi.

Pengembangan penelusuran informasi dalam penelitian ini menemukan indikasi bahwa sejumlah parameter gangguan ketertiban yang diajukan lebih banyak dirasakan dan dikeluhkan oleh responden di Maluku dan Sekongkang. Keberadaan kawasan wisata Pasir Putih khususnya mengembangkan lokalisasi hiburan seperti diskotik disinyalir menjadi titik awal gangguan ketertiban. Mereka berpandangan bahwa diskotik dan jenis hiburan malam tersebut menjadi ladang prostitusi, perjudian, miras dan sejenisnya yang berimplikasi juga pada kejadian perkelahian, kenakalan remaja, pencurian dan konflik antar warga.

Beberapa informan kunci sangat mengkhawatirkan perkembangan tempat hiburan malam yang dinilai semakin meluas. Berkembangnya berbagai bentuk pelanggaran moral dan etika (menurut responden dan informan kunci) antara lain karena adanya pengakuan dan dorongan dari pemerintah untuk mengembangkan kawasan wisata tanpa memikirkan efek langsungnya pada masyarakat lokal. Selain itu, kontrol sosial masyarakat setempat sangat terbatas dan kurang berpengaruh terhadap eskalasi kejadian. Adanya legalitas formal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengizinkan pantai Maluku sebagai kawasan wisata ternyata dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengembangkan bisnis yang dari perspektif moral

kurang sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat lokal.

Masyarakat lokal di sekitar kawasan Maluku juga mensinyalir bahwa prostitusi dan hiburan malam lainnya semakin berkembang karena banyak wanita penghibur atau pekerja malam yang datang dari Sumbawa (dekat pelabuhan Badas Sumbawa) pindah ke kawasan Maluku. Namun diakui pula bahwa para penikmat hiburan malam tersebut banyak berasal dari daerah lingkaran tambang.

Sebagaimana temuan penelitian tahun 2009, pada tahun 2010 juga terungkap kekhawatiran masyarakat akan berkembangnya gangguan ketertiban umum. Salah satu masalah sosial yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, khususnya di sekitar Maluku adalah kemungkinan berkembangnya HIV-AIDS. Kekhawatiran tersebut bermula dari berkembangnya informasi dari aparat kesehatan setempat mengenai adanya warga yang terjangkit HIV-AIDS. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumbawa Barat, pada tahun 2009 ditemukan sebanyak 24 kasus HIV dan AIDS yang terdiri atas 9 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Bahkan ekspose dari Dinas Kesehatan menyebutkan terjadi peningkatan menjadi 27 orang penderita pada akhir tahun 2009. Hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya kasus HIV/AIDS dimana pada tahun 2008 terdapat 22 kasus meningkat menjadi 24 kasus pada tahun 2010.

Latar belakang pekerjaan penderita HIV dan AIDS adalah kalangan wiraswasta (37,5 %) dan WPS/PPS (33,33 %), selebihnya adalah ibu rumah tangga dan eks TKW. Karena masyarakat mengetahui bahwa populasi kunci HIV dan AIDS kemungkinan berada di sekitar Maluku, maka harapan masyarakat adalah agar pemerintah mampu mengontrol persebarannya. Perlu diupayakan sosialisasi secara intensif menyangkut fakta, cara pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas pada masyarakat sekitar di lingkaran tambang. Oleh sebab itu banyak tokoh masyarakat yang menyarankan agar lokalisasi tempat-tempat prostitusi lebih jauh dari lingkungan tempat tinggal masyarakat dan perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif bagi para pelaku atau *stakeholders* bisnis pariwisata.

Dengan ditunjang hasil pendalaman masalah yang dilakukan serta ungkapan warga masyarakat Pasir Putih terungkap bahwa tempat-tempat hiburan malam yang ada kadang berkembang menjadi tempat bisnis prostitusi dan perjudian yang terselubung, bahkan kemungkinan juga penggunaan dan transaksi narkoba.

Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS Sumbawa Barat, jumlah pekerja seks laki-laki sekitar 146 orang, pekerja seks perempuan sebanyak 193 orang dan waria sebanyak 13 Orang. Populasi kunci pekerja seks tersebut berada di Kecamatan

Maluk dan Kecamatan Sekongkang. Sedangkan di Kecamatan lain tidak ditemukan atau tidak ada informasi / data menyangkut PSK tersebut.

Sejauh ini, masyarakat lokal yang paling banyak menerima dampak psikologis adalah masyarakat sekitar kawasan operasi, yakni antara lain masyarakat desa Pasir Putih, kawasan sekitar Tropis dan tempat lainnya. Hal ini disebabkan karena lokasi pemukiman mereka sangat dekat dengan kawasan tersebut. Meskipun ada sejumlah warga masyarakat lokal yang menyatakan tidak ada masalah dan sudah terbiasa dengan fenomena sosial semacam itu, namun cukup banyak warga masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan semakin legalnya usaha-usaha yang bernuansa asusila dan amoral tersebut.

b. Kriminalitas

Tindak kriminal memang diakui cukup terasa dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan sebelum masuknya PT. NNT atau masa awal kegiatan penambangan. Kebanyakan tindak kriminal tersebut termasuk kriminal ringan seperti perkelahian, tindakan anarkis dalam unjuk rasa / demonstrasi dan bentuk-bentuk ancaman terhadap kelompok-kelompok tertentu (terutama perusahaan tambang). Pada tahun 2010, kejadian kriminalitas (pencurian, perkelahian, anarkisme dan jenis ancaman lain) cenderung meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kebanyakan tindak kriminalitas dipicu oleh ketidak puasan warga masyarakat terhadap

kesempatan kerja dan peliang kerja di PT. NNT dan sub kontraktor yang ada. Masyarakat lokal masih menilai PT. NNT diskriminatif terhadap warga lokal dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, ada kecurigaan masyarakat yakni adanya kepentingan terselubung dan intrik internal terkait penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan peluang berusaha di sekitar PT. NNT. Disamping itu, gangguan ketertiban umum yang dirasakan meningkat adalah gangguan lalu lintas, yakni banyaknya pengendara bermotor terutama anak muda yang tidak memperhatikan aturan berlalu lintas dan selalu menimbulkan keresahan di jalan raya. Keresahan sosial akibat perilaku berlalu lintas ini cenderung semakin meningkat tahun 2010. Salah satu faktor penyebabnya adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beraktivitas di daerah lingkaran tambang.

Berangkat dari uraian hasil penelitian di atas dan penelusuran pendapat secara mendalam maka dapat dirumuskan sejumlah masalah terkait dengan ketertiban umum terutama menyangkut potensi kriminalitas, yaitu :

- (1) Perkembangan tindakan asusila, perjudian, kenakalan remaja, perkelahian dan sejenisnya masih berlangsung karena tersedianya sarana prasarana pendukung, seperti Bar dan sejenisnya, seperti yang telah beroperasi di sekitar pantai Desa sekongkang Bawah dan kawasan wisata Maluk.

- (2) Keberadaan kelembagaan masyarakat relatif kurang dan kurang berfungsi sebagai filter pengaruh budaya luar dan lembaga kontrol sosial yang bisa memberikan sanksi normatif atas penyimpangan atau gangguan ketertiban dan kriminalitas yang dilakukan khususnya oleh masyarakat lokal.
- (3) Adanya kecemburuan sosial dan kesan tidak adil PT. NNT terkait dengan pengembangan kesempatan kerja dan peluang berusaha dalam perusahaan dan sub kontraktor lainnya.
- (4) Adanya indikasi mulai berkembangnya penyakit akibat pola hidup bebas, yaitu HIV AIDS. Meski masih terbatas namun kerisauan warga masyarakat sudah mulai dirasakan.
- (5) Kebebasan warga keluar dan masuk kawasan wisata dan tempat hiburan disekitarnya mulai menimbulkan keresahan warga masyarakat disekitarnya.

c. Konflik Sosial

Pada masa konstruksi hingga masa awal kegiatan produksi banyak muncul konflik sosial baik yang bersifat horizontal maupun konflik vertikal. Salah satu pemicu konflik adalah perbedaan akses masyarakat terhadap perusahaan PT. NNT, terutama menyangkut kesempatan kerja dan distribusi bantuan pengembangan masyarakat PT. NNT. Sejalan dengan semakin kontinyunya kegiatan produksi dan

masyarakat telah mampu beradaptasi secara baik, konflik-konflik sosial juga semakin jarang terjadi.

Tidak jauh berbeda dengan hasil studi tahun 2009, studi tahun 2010 menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi lebih berupa aksi protes atau unjuk rasa warga masyarakat terhadap PT NNT terutama terkait kesempatan kerja dan peluang berusaha. Rekrutmen karyawan PT. NNT dan sub kontraktor yang diadakan pada waktu tertentu senantiasa menjadi potensi konflik dalam masyarakat. Tingginya keinginan masyarakat, khususnya warga lingkaran tambang atau masyarakat lokal untuk menjadi karyawan di PT NNT menyebabkan persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan peluang kerja tersebut. Karena kuatnya persaingan inilah yang senantiasa menjadi potensi konflik dan mendapat perhatian serius dari semua lapisan masyarakat.

Konflik terbuka yang terjadi selama 2010, walaupun ada cakupannya sangat terbatas dan tidak menimbulkan dampak kepada aspek sosial lainnya. Konflik sosial yang masih terjadi berkisar pada masalah kebutuhan masyarakat terhadap prasarana dan pelayanan lain yang diharapkan dapat diadakan oleh PT. NNT. Menurut keterangan sejumlah aparat pemerintah kecamatan dan desa, konflik terbuka hampir tidak terjadi pada tahun 2010, namun demikian potensi konflik tetap saja ada seperti kecemburuan sosial masyarakat non karyawan terhadap karyawan PT. NNT dan sub kontraktornya.

Konflik horizontal antar warga kadang terjadi karena perbedaan layanan yang diterima dari perusahaan melalui program Comdev. Akan tetapi konflik tersebut lebih bersifat tertutup sehingga jarang sekali muncul sebagai konflik terbuka yang dapat berpengaruh buruk pada sistem ketertiban masyarakat. Selain itu, indikasi potensi konflik yang mulai mengemuka sejak tahun 2008 adalah menyangkut alokasi dana pengembangan masyarakat (*Comdev*) dan alokasi dana royalti yang diberikan PT. NNT kepada pemerintah. Tokoh masyarakat dari luar 3 kecamatan lingkaran tambang selama ini (Jereweh, Maluk dan Sekongkang) sangat berharap agar wilayah mereka dimasukkan juga sebagai kawasan lingkaran tambang, dengan harapan bisa mendapatkan layanan CSR PT. NNT sebagaimana 3 kecamatan lingkaran tambang yang ada selama ini. Persoalan layanan kawasan lingkaran tambang ini nampaknya menjadi potensi konflik karena sebagian besar masyarakat di daerah luar lingkaran tambang saat ini ingin dimasukkan sebagai kawasan lingkaran tambang. Konsep atau batasan daerah lingkaran tambang juga diminta untuk ditinjau kembali. Harapannya adalah agar wilayah kecamatan dan desa dalam wilayah Sumbawa Barat yang selama ini tidak banyak menikmati bantuan pengembangan masyarakat PT. NNT agar dimasukkan sebagai daerah lingkaran tambang. Sejauh ini distorsi persepsi tersebut belum menimbulkan konflik sosial terbuka, namun perlu

dianalisis untuk mengantisipasi terbukanya konflik antar masyarakat.

Berdasarkan hasil FGD di tiga kecamatan dapat dihimpun berbagai persoalan yang dinilai mengandung nuansa konflik terselubung pada masa produksi dan masih dirasakan tahun 2010 antara lain :

- (1) Masyarakat lokal khususnya angkatan kerja merasa belum diperlakukan secara adil dan PT. NNT belum memenuhi perjanjian terkait dengan rekrutmen karyawan di PT. NNT. Sebagian besar pemuda angkatan kerja tetap menuntut bagian atau proporsi kesempatan kerja yang lebih besar di PT. NNT maupun sub kontraktornya.
- (2) Masyarakat menilai, PT. NNT cenderung eksklusif dengan adanya kekhususan kawasan pemukiman karyawan di Town Site. Kawasan Town Site yang cenderung tertutup dinilai sebagai bentuk ketertutupan sosial dengan masyarakat lingkaran tambang lainnya.
- (3) Isu semakin berkurangnya debit mata air dan menurunnya kualitas air bersih. Hal ini disinyalir akibat kegiatan eksploitasi tambang yang telah merambah sejumlah sumber atau mata air. Hal ini belum dapat disimpulkan secara pasti mengingat data obyektif atas persoalan ini belum diperoleh.
- (4) Masih berkembangnya isu bahwa aktivitas penambangan telah menimbulkan kerusakan kawasan hutan yang cukup luas dan akan mengganggu ekosistem kawasan yang berdampak

pada kehidupan masyarakat sekitarnya. Berkembangnya isu bahwa dengan beroperasinya tambang terjadi pencemaran kawasan pesisir pantai dan laut (limbah tiling) yang berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan.

- (5) Masih berkembangnya isu dan persepsi masyarakat bahwa aktivitas penambangan telah menyebabkan rusaknya sistem hidrologis hutan yang menyebabkan berkurangnya debit air sungai dan air tanah. Disamping itu telah terjadi penurunan kualitas air sungai, air tanah dan air PAM yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk berbagai aktivitas kehidupannya.
- (6) Dengan berkurangnya serapan tenaga kerja di perusahaan, maka bagi masyarakat lokal relatif sulit kembali menekuni pekerjaan (mata pencaharian tradisional, seperti mencari rotan, madu, berburu dan mencari hasil hutan lainnya).
- (7) Keberadaan kawasan wisata Maluk disinyalir sebagai legitimasi tindakan yang tidak sesuai dengan moral dan etika masyarakat, terutama dengan banyak dibukanya bar dan sejenisnya yang dinilai melakukan fungsi terselubung, yakni sebagai tempat transaksi bisnis prostitusi.

d. Pembauran Sosial

Tidak ada perbedaan prinsipil menyangkut pembauran sosial masyarakat lokal antara tahun 2009 dengan tahun 2010. Tidak kejadian signifikan

terkait pembauran sosial warga masyarakat lokal dengan warga pendatang dalam dua tahun terakhir. Sebagaimana kenyataan pada tahun 2009, pada tahun 2010 juga menunjukkan semua responden dan informan kunci (100 %) mengakui pembauran sosial tidak ada hambatan dan berlangsung dengan baik. Saat ini, masyarakat lokal menerima siapa saja warga pendatang dari daerah lain, selama tidak dinilai mendapatkan hak-hak istimewa dari perusahaan tambang atau tidak dinilai sebagai kompetitor yang merugikan kepentingan ekonomi masyarakat lokal. Dengan selesainya masa konstruksi yang disertai dengan pengurangan tenaga kerja hampir pada semua perusahaan yang beroperasi di lingkaran tambang menyebabkan berkurangnya penduduk pendatang yang tinggal berdomisili di sekitar lingkaran tambang. Akibat lebih lanjut adalah berkurangnya intensitas interaksi masyarakat lokal dengan pendatang dari daerah lain.

Terkait dengan keberadaan warga pendatang, masyarakat lokal terutama tokoh masyarakat menyayangkan adanya sebagian karyawan PT. NNT yang harus kembali ke tempat asal setiap minggu sebagai konsekuensi sistem pembagian hari kerja yang diterapkan oleh PT. NNT. Hal ini dipandang merugikan daerah lingkaran tambang. Harapannya adalah mereka tetap beraktivitas dan membelanjakan pendapatannya di daerah lingkaran tambang agar bisa memicu efek ganda (*multiplier effect*) dan memacu roda

perekonomian lingkaran tambang, dan terutama bagi masyarakat lokal.

Pengamatan pada tahun 2010 menunjukkan anggota masyarakat yang masih berinteraksi intensif dengan masyarakat dari daerah lain adalah para pekerja perusahaan dan para pedagang di sekitar desa. Masyarakat umum lainnya pada saat ini memang kurang berinteraksi karena pekerja pendatang relatif sedikit tinggal berdomisili di dalam desa. Berdasarkan penuturan sejumlah responden yang selama ini aktif berinteraksi dengan pekerja pendatang dari daerah lain, diketahui bahwa mereka banyak yang larut dalam budaya masyarakat lokal, dan banyak pula anggota masyarakat lokal yang mencontoh budaya para pekerja pendatang tersebut. Berdasarkan uraian ini, maka dapat ditegaskan bahwa interaksi sosial di desa lingkaran tambang berlangsung cukup baik sehingga tidak menimbulkan distorsi sosial dalam proses pembaurannya. Aspek yang perlu dikembangkan adalah peningkatan rasa toleransi warga pendatang terhadap masyarakat lokal dan tidak mendiskreditkan / diskriminasi warga masyarakat lokal terkait dengan akses terhadap perusahaan (PT. NNT) dan sub kontraktor yang beroperasi di daerah lingkaran tambang.

Penelitian tahun 2010 ini juga menangkap indikasi bahwa masjid masih berperan nyata dalam membangun pembauran sosial antara masyarakat lokal dengan pendatang. Keaktifan para pendatang

dalam majlis taklim dan kegiatan ibadah rutin di masjid-masjid dalam desa semakin mempercepat penerimaan masyarakat lokal terhadap pendatang. Interaksi sosial yang berawal dari masjid ini dinilai sangat mampu melekatkan hubungan sosial pendatang dengan masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa masyarakat lokal lingkaran tambang sangat menghargai, menghormati dan terbuka dengan masyarakat pendatang yang dinilai taat dalam menjalankan ibadah. Munculnya konflik-konflik kecil secara insidental selama ini, lebih disebabkan karena faktor persaingan dan perbedaan kemampuan masyarakat mengkases perusahaan terutama yang terkait dengan pekerjaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat (responden) yang menyatakan bahwa pekerja pendatang lebih diutamakan menjadi pekerja di perusahaan dibandingkan warga setempat meskipun tingkat pengetahuan dan ketrampilan mereka tidak jauh berbeda. Persepsi yang kurang baik tersebut seringkali menyebabkan sikap kurang positif terhadap pekerja pendatang, bahkan banyak diantara masyarakat lokal yang bersikap skeptis, terutama mereka yang pernah gagal memasuki lapangan kerja yang tersedia di perusahaan.

Tahun 2010 ini juga menemukan kuatnya hasrat masyarakat lokal berinteraksi dengan warga pendatang dalam hubungan kerja dan sosial yang saling menguntungkan. Warga pendatang yang menyewa rumah pada warga setempat, atau tenaga

kerja luar yang bekerja di usahatani masyarakat lokal, sejumlah kegiatan sosial yang bisa diikuti warga pendatang dipandang sebagai wahana pembauran sosial yang semakin lama semakin baik. Dalam persepsi tokoh masyarakat lokal, seyogyanya beberapa pekerjaan (terutama yang tidak langsung berkaitan dengan bidang keahlian tambang) seperti di departemen hubungan masyarakat, pengembangan masyarakat dan pekerjaan teknis non mining di lapangan lebih banyak diberikan kesempatan kepada masyarakat lokal. Sejumlah program pengembangan masyarakat untuk mengurangi distorsi sosial ternyata belum mampu merekatkan hubungan sosial secara total antara masyarakat lokal dengan pekerja pendatang yang berdomisili di daerah lingkaran tambang.

4. Infrastruktur Sosial Budaya

a. Lembaga/Organisasi Sosial

Perkembangan infrastruktur sosial budaya tahun 2010 tidak banyak mengalami perubahan dari keadaan tahun 2009. Hal ini dilihat berdasarkan perkembangan jumlah, peran dan fungsi lembaga sosial budaya dalam mendukung pelayanan kehidupan masyarakat di daerah lingkaran tambang. Secara terperinci hasil pendataan langsung mengenai ketersediaan lembaga sosial pada 15 desa dalam lingkaran tambang tahun 2010 disajikan pada tabel 60 berikut.

Tabel 60. Keberadaan Lembaga Sosial Budaya sebelum tambang (1995) dan setelah masa produksi tambang (2007 – 2010) pada 15 Desa Lingkar Tambang PT. NNT.

No	Jenis Lembaga	Sebelum Tambang (1995)	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Karang Taruna	6	10	13	13	13
2	PKK	6	10	15	15	15
3	Majelis Ta'lim	6	10	12	12	12
4	Kelompok Arisan	6	10	15	15	15
5	Kel. Gotong Royong	6	0	1	1	1
6	Perkump. Olah raga	9	21	23	23	23
7	Perkump. Kesenian	2	2	2	2	2
8	Pam Swakarsa	-	-	-	-	-
9	Dasa wisma	114	131	136	136	136
10	Remaja Masjid	-	8	12	12	12
11	KSM	-	-	-	-	-
12	Posyandu	3	-	24	24	24

Sumber : monografi desa dan hasil observasi

Keberadaan kelembagaan formal cenderung meningkat sejalan dengan makin beragamnya aktivitas masyarakat di bidang sosial budaya. Pembangunan gedung serba guna terus berlangsung dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial, keagamaan, olah raga dan kesenian.

Sementara itu esensi dan eksistensi kelembagaan tradisional semakin berkurang di tengah masyarakat lingkar tambang. Kelompok-kelompok olah raga dan

kesenian cukup berkembang dalam tiga tahun terakhir. Sebagaimana dituturkan oleh sejumlah responden, bahwa adanya inisiatif PT.NNT dan pemerintah desa setempat mengadakan pertandingan atau perlombaan kesenian dan olah raga dalam even-even tertentu ternyata dapat membangkitkan semangat masyarakat lokal untuk menghidupkan kembali kelembagaan yang pernah ada dan membentuk kelembagaan baru dalam bentuk kelompok-kelompok seni dan olah raga di setiap desa.

Dengan beroperasinya sejumlah gedung serba guna maka konsentrasi kegiatan masyarakat dibidang sosial budaya semakin berkembang. Dengan demikian kelompok-kelompok seni dan olah raga juga berkembang sejalan dengan perkembangan ketersediaan infrastruktur sosial budaya di daerah lingkaran tangbang.

b. Infrastruktur Sosial Budaya

Infrastruktur sosial budaya yang berkembang cukup mencolok tahun 2010 adalah terbangunnya sejumlah gedung serbaguna yang mampu mengakomodir berbagai aktivitas masyarakat dibidang sosial, agama, budaya, olah raga dan seni. Infrastruktur lainnya tampaknya tidak menunjukkan perkembangan signifikan pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan infrastruktur sosial budaya termasuk cukup baik dengan keberadaan PT. NNT. Seluruh responden dan informan menyatakan bahwa keberadaan PT. NNT

telah mampu mengembangkan infrastruktur sosial budaya, terutama pendidikan, prasarana ibadah, olah raga, kesenian, kesehatan dan fasilitas publik lainnya. Secara kuantitatif jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Gambaran jumlah infrastruktur sosial budaya yang ada di tiga kecamatan daerah lingkaran tambang PT. NNT pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Tabel.61 Ketersediaan infrastruktur sosial budaya di tiga Kecamatan Lingkaran tambang tahun 2010

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah ketersediaan di tiga Kecamatan daerah lingkaran tambang		
		Jereweh	Maluk	Sekongkang
1	SD /MI/SDLB	6	5	8
2	SLTP/M.Ts	3	2	6
3	SLTA/MA	1	0	2
4	Taman Kanak	8	7	8
5	PAUD	6	1	3
6	Sanggar Hiburan	3	1	2
7	Klp. Kesenian	4	-	3
8	Lap. Olah raga	4	2	7
9	Fasl. Olah raga	1	-	1
10	Masjid	6	4	7
11	Musholla	6	6	11
12	TPA/TPQ	9	6	7
13	Gereja	-	-	-
14	Pura	-	-	-
15	Wihara	-	-	-

Sumber : Dinas Dikpora Sumbawa Barat dan Monografi Desa

Ketersediaan prasarana sosial budaya, seperti tempat peribadatan, gedung sekolah dan fasilitas pelayanan sosial budaya lainnya diakui terus meningkat oleh seluruh masyarakat. Sebelum masuknya PT. NNT prasarana ibadah yang tersedia di tiap desa berupa Masjid dan Langgar (Musholla).

Kondisi fisik sejumlah prasarana ibadah masih sederhana, sebagaimana yang ada di Desa Goa, Beru, Belo, Benete, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Tongo Sejorong, dan Aik kangkung dan desa pemekaran baru lainnya. Prasarana peribadatan bagi pemeluk agama / kepercayaan lain tidak tersedia sama sekali.

Upaya pengembangan masyarakat yang sangat mendapat perhatian Comdev PT. NNT adalah pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Berbagai program diluncurkan, seperti pembangunan sekolah baru, renovasi bangunan, pengadaan sarana belajar, peningkatan kapasitas pendidik hingga program beasiswa yang sangat membantu masyarakat lingkaran tambang. Prasarana sosial budaya yang juga meningkat ketersediaannya setelah masuknya tambang adalah prasarana ibadah bagi umat Islam dan infrastruktur sosial budaya lainnya seperti masjid dan musholla. Hasil pengamatan pada tahun 2010 memperlihatkan sebagian besar infrastruktur sosial budaya, terutama pendidikan, kesehatan dan keagamaan telah berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan penilaian masyarakat (responden dan informan) pembangunan bidang pendidikan sangat maju sehingga jarang sekali anak usia sekolah dari masyarakat lokal yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Meskipun demikian, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk sarana ibadah diharapkan terus diperhatikan agar masyarakat lokal lingkaran tambang mampu bersaing dengan peserta

didik dari daerah lain yang lebih maju. Untuk itu harapan warga masyarakat pemerhati pendidikan adalah agar PT. NNT memberikan bantuan untuk peningkatan mutu pengajaran para guru, mulai dari tingkat SD hingga SLTA. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya prakarsa PT. NNT untuk membuka dan memfasilitasi pengembangan Sekolah kejuruan di bidang teknik pertambangan dan sekolah dibidang teknologi permesinan (school of engineering) sebagaimana orientasi kebutuhan lapangan kerja di daerah lingkaran tambang dimasa akan datang.

5. Perkembangan Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan salah satu yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat di daerah lingkaran tambang. Sebagian besar warga masyarakat lokal berpandangan bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus dilakukan melalui peningkatan pendidikan. Untuk itu, kiprah PT. NNT dalam mendukung perkembangan pendidikan selama ini sangat mendapat respon dari semua lapisan masyarakat. Berikut digambarkan kondisi pendidikan di daerah lingkaran tambang pada tahun 2010.

a. Keadaan Guru dan Siswa

Hasil observasi lapangan menunjukkan perkembangan / keadaan pendidikan yang cukup baik di tiga kecamatan dalam lingkaran tambang. Hal tersebut antara lain dapat diketahui dari rasio guru dengan siswa, besaran rombongan belajar, dan angka

partisipasi kasar (APK) dan partisipasi murni (APM) pada semua tingkat / jenjang pendidikan. Tabel 62 berikut menunjukkan bahwa APK dan APM yang relatif rendah (kurang dari 50 %) terdapat pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK/RA) di Kecamatan Maluk. Rendahnya APK dan APM tersebut menggambarkan masih banyaknya anak usia dini yang belum terserap pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak(TK/RA) yang ada di sekitar wilayah kecamatan Maluk. Untuk jenjang pendidikan SD sampai SLTA tampaknya APK dan APM cukup tinggi yang berarti bahwa sebagian besar anak usia sekolah yang ada di tiga kecamatan lingkaran tambang tersebut telah terserap pada pendidikan formal yang ada. Dengan kata lain, ketersediaan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan cukup memadai. Data selengkapnya disajikan pada tabel 62 berikut :

Tabel 62 juga menunjukkan APK yang tinggi (lebih dari 100 %) pada jenjang pendidikan SD di tiga Kecamatan daerah lingkaran tambang. Hal ini menggambarkan semua anak usia SD sudah bersekolah, bahkan ada indikasi adanya siswa SD yang memiliki umur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Selain itu ada kemungkinan siswa yang belajar di SD pada tiga Kecamatan lingkaran tambang berasal dari luar wilayah tiga kecamatan lingkaran tambang tersebut. APK dan APM yang juga sangat tinggi terjadi pada jenjang pendidikan SLTA (SMA/MA) di Kecamatan Jereweh.

Tabel 62. Perkembangan Pendidikan Formal di Tiga Kecamatan Lingkar Tambang Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Keadaan di tiga Kecamatan Lingkar Tambang		
		Jereweh	Maluk	Sekongkang
1	TK / RA			
	Jumlah Siswa	426	478	394
	Jumlah Pengajar / Guru	24	30	25
	Rombongan Belajar	16	19	16
	Angka Partisipasi Kasar (%)	63,96	36,43	56,77
	Angka partisipasi Murni (%)	53,30	23,78	56,05
	Rasio Guru : Siswa	1 : 18	1 : 16	1 : 16
	Jumlah Siswa/ Romb. Belajar	27	25	25
2	SD / MI / SDLB			
	Jumlah Siswa	966	1.341	1.043
	Jumlah Pengajar / Guru	66	50	79
	Rombongan Belajar	37	39	48
	Angka Partisipasi Kasar (%)	101,90	108,61	108,53
	Angka partisipasi Murni (%)	93,99	100	97,09
	Rasio Guru : Siswa	1 : 15	1 : 27	1 : 13
	Jumlah Siswa/ Romb. Belajar	26	34	22
3	SLTP / M.Ts			
	Jumlah Siswa	333	291	401
	Jumlah Pengajar / Guru	51	31	69
	Rombongan Belajar	16	13	20
	Angka Partisipasi Kasar (%)	93,28	80,39	99,26

	Angka partisipasi Murni (%)	73,95	53,87	78,96
	Rasio Guru : Siswa	1 : 7	1 : 9	1 : 6
	Jumlah Siswa/ Romb. Belajar	21	22	20
4	SLTA / MA			
	Jumlah Siswa	504	0	274
	Jumlah Pengajar / Guru	31	0	39
	Rombongan Belajar	14	0	10
	Angka Partisipasi Kasar (%)	161,23	0	99,05
	Angka partisipasi Murni (%)	151,87	0	90,74
	Rasio Guru : Siswa	1 : 16	0	1 : 7
	Jumlah Siswa/ Romb. Belajar	36	0	27

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga KSB 2008/2009 (Diolah).

Tingginya APK dan APM tersebut menunjukkan tingginya keterlibatan anak usia remaja untuk memasuki pendidikan lanjutan atas (SMA/MA). Bahkan cukup banyak siswa SMA /MA yang ada di Jereweh berasal dari Kecamatan lain. Diperkirakan sebagian (sekitar sepertiga) jumlah siswa SMA Jereweh berasal dari Kecamatan Maluk, karena hingga saat ini di Maluk belum tersedia sekolah setingkat SMA/MA.

Ditinjau berdasarkan rasio guru terhadap siswa, tampaknya pada sebagian besar jenjang pendidikan termasuk cukup besar. Rasio ideal (sangat memadai) terjadi pada jenjang pendidikan SMP/M.Ts dimana

rasio berkisar antara 1 : 6 hingga 1 : 9. Rasio Guru terhadap Siswa yang cukup ideal juga dijumpai pada jenjang SMA/MA di Kecamatan Sekongkang (rasio 1 : 7). Adapun rasio yang cukup besar terjadi pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar /MI. Hal tersebut menunjukkan jumlah guru yang ada pada jenjang pendidikan dini dan pendidikan dasar tersebut masih kurang, terutama guru tetap berstatus pegawai negeri.

Bertitik tolak dari data tabel 4.10 di atas dapat ditegaskan bahwa perkembangan pendidikan dasar dan menengah di tiga kecamatan lingkaran tambang cukup baik, namun masih terkesan beberapa ketimpangan distributif menyangkut sebaran guru, murid dan sarana pendidikan. Berangkat dari masalah yang ada dan didukung oleh harapan warga masyarakat, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan guna pengembangan pendidikan lebih lanjut adalah :

- (1) Mengingat tingginya APK dan APM pada jenjang pendidikan SMA/MA yang ada sekarang ini, dipandang perlu pengadaan Sekolah Menengah Atas (SMA / sederajat) di Kecamatan Maluk, untuk menampung lulusan SLTP yang ada dari kawasan sekitarnya.
- (2) Mengingat masih tingginya rasio Guru : Siswa untuk jenjang pendidikan dini (TK/RA) dan Sekolah Dasar, maka diperlukan program penambahan Guru TK dan SD di tiga kecamatan

- lingkar tambang (Jereweh, Maluk dan Sekongkang).
- (3) Mengingat belum tersedianya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah lingkar tambang, maka untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia sangat perlu diupayakan pengadaan SMK yang sesuai dengan harapan pasar dan pemangku amanat (*stakeholders*) lainnya.
 - (4) Karena sebagian dari guru yang ada pada jenjang pendidikan dini dan pendidikan dasar (SD) adalah guru bantu (honorar) atau guru tidak tetap, maka masyarakat mengharapkan untuk dilakukan peningkatan status kepegawaian guru bantu honorar dan guru tidak tetap menjadi guru tetap pegawai negeri. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas lulusan (khususnya tingkat SMA), sebagian besar tokoh pendidikan mengharapkan program peningkatan kapasitas atau kompetensi bagi para guru (terutama guru non pegawai negeri).

b. Perlengkapan Kegiatan Belajar Mengajar

Kualitas hasil pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan perlengkapan proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi dan berangkat dari data sekunder yang ada dapat dikatakan bahwa perlengkapan kegiatan belajar mengajar yang ada pada sebagian besar sekolah di tiga kecamatan lingkar tambang termasuk cukup memadai. Pendapat

tersebut didasarkan pada jenis dan jumlah ketersediaan perlengkapan belajar mengajar yang ada di sejumlah sekolah, mulai tingkat SD / MI sampai SMA / MA. PT. NNT memiliki kontribusi cukup besar dalam membantu pengadaan berbagai perlengkapan belajar mengajar tersebut disamping program beasiswa yang disediakan untuk siswa dan mahasiswa dari daerah lingkaran tambang atau dari daerah lainnya. Mengacu pada data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbawa Barat (2008), dapat diketahui keadaan perlengkapan kegiatan belajar mengajar, terutama pada jenjang SLTP/MTs dan SMA/MA yang ada di tiga kecamatan dalam lingkaran tambang. Data selengkapnya disajikan pada tabel 63 berikut :

Tabel 63. Keadaan Sarana dan Perlengkapan Kegiatan Belajar Mengajar pada SLTP/MTs dan SMA/MA di tiga Kecamatan dalam Lingkaran Tambang PT. NNT Tahun 2009.

No	Perlengkapan PBM	Tingkat SLTP / Kecamatan			Tingkat SMA / Kecamatan		
		Jereweh	Maluk	Sekong-kang	Jereweh	Maluk	Sekong-kang
1	Komputer	9	12	52	15	0	13
2	Printer	0	1	7	1	0	2
3	LCD /In Focus	1	0	4	1	0	1
4	Almari	1	0	7	0	0	0
5	TV / Audio	5	3	5	1	0	1
6	Meja Siswa	279	95	384	295	0	170
7	Kursi Siswa	279	185	600	295	0	170
8	Meja Guru	41	18	67	30	0	15
9	Kursi Guru	45	18	67	30	0	12
10	Ruang Kelas	14	7	21	11	0	7
11	Perpustakaan	2	1	2	1	0	1
12	Laboratorium	1	1	6	0	0	1

Sumber : Dinas Dikpora KSB, 2008

Tabel 63 tersebut menunjukkan keadaan perlengkapan belajar mengajar yang lebih memadai adalah SLTP dan SMA/MA yang ada di Kecamatan

Sekongkang. Diakui oleh tokoh masyarakat bahwa pengadaan perlengkapan pembelajaran khususnya perlengkapan elektronik (seperti komputer, LCD dan audio visual) banyak didukung oleh PT. NNT. Letak kecamatan Sekongkang yang berada pada kawasan inti lingkaran tambang disinyalir sebagai faktor pertimbangan mengapa sekolah di Kecamatan Sekongkang lebih banyak mendapatkan bantuan dari PT. NNT dibandingkan sekolah di kecamatan lainnya.

Dibandingkan perlengkapan belajar mengajar antara SLTP/MTs dengan SMA/MA tampak bahwa perlengkapan yang ada di SLTP lebih memadai dibanding SMA/MA. Menurut beberapa informan kunci, kejadian tersebut disebabkan karena jumlah sekolah jenjang SLTP lebih banyak dibanding SMA. Disamping itu, keberadaan SLTP/MTs di tiga kecamatan tersebut jauh lebih awal dibandingkan dengan SMA/MA. Adapun fasilitas belajar mengajar yang dinilai masih sangat kurang adalah laboratorium untuk tingkat SMA/MA. Dari 3 SMA/MA yang ada baru tersedia 1 unit laboratorium yakni di SMA Sekongkang, sedangkan SMA lainnya belum memiliki fasilitas laboratorium yang memadai.

C. Perkembangan Aspek Kesehatan Masyarakat

1. Layanan Kesehatan Masyarakat

Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat yaitu :

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dimana pada tahun 2009 menunjukkan bahwa AKB sebesar 14,57 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2010 menunjukkan penurunan menjadi 6,67 per 1000 kelahiran hidup.
- b. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur 0-4 tahun per 1000 kelahiran hidup. Akaba di kabupaten Sumbawa barat pada tahun 2009 sebesar 1,1 per 1000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan menjadi 2,2 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Kondisi ini menggambarkan perinatal yang tidak sehat yang dialami oleh para ibu atau merupakan akibat dari faktor lingkungan yang buruk pada awal usia anak.
- c. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Di Kab. Sumbawa Barat pada tahun 2009 menunjukkan angka AKI sebanyak 149 per 100.000 kelahiran hidup (4 dari 2677 kelahiran hidup), sementara pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 111 per 100.000 kelahiran hidup (3 dari 2699 kelahiran hidup). Khusus di wilayah lingkaran tambang (Kec. Jereweh, Maluk, dan Sekongkang) pada tahun 2010 tidak terdapat kasus AKI.

Khusus tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dari tingkat

kunjungan pada Puskesmas. Di daerah lingkaran tambang terdapat 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Jereweh, Maluk, dan Sekongkang dengan jumlah kunjungan pada tahun 2010 sebanyak 23.329 kunjungan yang terdiri dari rawat inap sebanyak 1.385 dan 21.944 yang melakukan rawat jalan. Kunjungan terbanyak terdapat di Puskesmas Maluk kemudian Jereweh dan Sekongkang. Dengan memperhatikan jumlah penduduk di ketiga kecamatan lingkaran tambang tersebut sebanyak 28.453 jiwa, maka terdapat 81,99 % penduduk yang melakukan kunjungan ke Puskesmas. Kondisi ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat akan dimensi kesehatan dalam perilaku hidup sehat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, disamping itu makin banyak pula masyarakat yang berobat ke tempat-tempat dokter praktek.

Peningkatan jumlah kunjungan tidak terlepas dari meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berada di daerah lingkaran tambang. Selain terdapat Puskesmas di masing-masing kecamatan, juga ditunjang oleh Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 8 dengan rincian di Sekongkang terdapat 6 Pustu dan masing-masing satu Pustu di Jereweh dan Maluk. Demikian pula dengan Polindes terdapat 15 Polindes yang tersebar di Sekongkang sebanyak 6 polindes, di Jereweh 4 Polindes dan 5 polindes yang terdapat di maluk. Kondisi ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada, sehingga tingkat pelayanan kesehatan

masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabelakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 64 Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan masyarakat di daerah lingkaran tambang, Tahun 2004,2007, dan 2009 (unit).

Kecamatan	Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Polindes		
	2004	2007	2009	2004	2007	2009	2004	2007	2009
Sekongkang	1	1	1	5	5	6	5	5	6
Jereweh	2	1	1	2	1	1	2	2	4
Maluk	0	1	1	0	1	1	0	0	5
Jumlah	3	3	3	7	7	8	7	7	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat, 2010.

Fasilitas kesehatan tersebut masih ditunjang lagi oleh Posyandu sebanyak 47 pos yang tersebar di Jereweh sebanyak 17 pos, maluk 14 pos, dan 16 pos di sekongkang. Setiap fasilitas kesehatan dalam melaksanakan kegiatannya dilengkapi oleh tenaga kesehatan baik tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga non paramedis serta tenaga kesehatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 65 Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan masyarakat di Daerah Lingkaran Tambang tahun 2005-2009.

Kategori	2005	2006	2007	2008	2009
Dokter Spesialis	0	0	0	0	0
Dokter Umum	9	10	13	17	15
Dokter Gigi	2	4	9	10	10
Tenaga Kesehatan lainnya	0	0	0	0	67
Perawat	65	80	104	110	144
Bidan	26	35	52	58	70
Jumlah	102	129	178	219	305

Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan aspek kesehatan masyarakat sekitar lingkaran tambang PT. NNT, secara umum menunjukkan kecenderungan yang positif dimana kondisi kesehatan masyarakat mengarah menjadi lebih baik atau lebih sehat. Kondisi kesehatan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang sakit menurut jenis penyakit yang semakin menurun dan meningkatnya jumlah tenaga medis yang melayani Puskesmas atau Pustu maupun Posyandu yang tersebar merata di setiap desa lingkaran tambang. Puskesmas yang berada di tiga kecamatan sekitar lingkaran tambang sekarang ini telah beroperasi secara penuh dengan berbagai fasilitas penunjang medis yang memadai serta didukung oleh tenaga medis yang memadai pula, telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Secara lengkap tentang perubahan kondisi kesehatan masyarakat pada tahun 2010 dapat dilihat pada uraian berikut ini:

2. Perkembangan Penyakit

Perkembangan penyakit dimasyarakat dari tahun ketahun pada umumnya memiliki pola penyebaran yang sama, kecuali jika sewaktu-waktu ada wabah penyakit yang menyerang. Berikut ini akan dijelaskan perkembangan jenis penyakit yang sering diderita oleh masyarakat lingkaran tambang. Data dari Puskesmas Jereweh, Maluk, dan Sekongkang pada tahun 2010, diperoleh informasi bahwa urutan (ranking) jenis penyakit yang paling sering diderita mulai dari yang

paling banyak kasusnya yakni *ISPA dan penyakit lainnya*, sementara yang paling sedikit adalah Malaria di Kecamatan Jereweh dan Ginguitis di Puskesmas Maluk.

Penyakit malaria yang sebelum tambang menempati urutan kedua, pada beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan peringkat. Sehingga penyakit malaria ini menjadi peringkat ke sepuluh di Puskesmas Jereweh dan menjadi urutan ke lima di Puskesmas Maluk. Penurunan peringkat penderita penyakit malaria ini disebabkan antara lain oleh berbagai program yang diintrodusir oleh PT. NNT antara lain program penyemprotan nyamuk yang dilakukan secara berkala di semua wilayah di sekitar lingkaran tambang, sehingga nyamuk dapat ditekan populasinya. Disamping itu tingkat kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi perkembangan nyamuk juga mulai meningkat, hal ini ditunjukkan melalui kesadaran kebersihan lingkungan masyarakat.

Khusus penyakit infeksi kulit baik pada Puskesmas Jereweh maupun pada Puskesmas Maluk tidak mengalami perubahan peringkat yang berarti namun jumlah penderitanya mengalami penurunan. Demikian pula halnya dengan penyakit diare di Puskesmas Jereweh yang meskipun peringkatnya naik, akan tetapi jumlah penderitanya turun secara signifikan.

Penurunan jumlah penduduk yang mengeluh sakit di beberapa wilayah tersebut tidak terlepas dari kemajuan fasilitas kesehatan dan meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan setelah adanya PT. NNT. Disamping itu, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan sangat membantu menekan perkembangan penyakit. Peningkatan fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan secara langsung akan meningkatkan pula kualitas pelayanan. Disamping itu akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan yang semakin mudah yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan tingkat kesakitan masyarakat secara keseluruhan (morbiditas rate).

Dengan beroperasinya secara penuh ketiga Puskesmas di wilayah sekitar lingkaran tambang maka pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat pula baik kuantitas maupun kualitas pelayanannya. Kondisi ini secara keseluruhan pada gilirannya akan meningkatkan pula derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada umumnya. Kondisi ini akan semakin membaik dengan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang dibangun oleh PT. NNT pada setiap Kecamatan yang berada di wilayah lingkaran tambang sehingga masalah sampah dapat teratasi dengan baik.

Gambaran sepuluh jenis penyakit utama pada tahun 2010 di Puskesmas Jereweh dan Maluk serta Sekongkang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 66. Sepuluh Jenis Penyakit Utama Yang Sering Diderita Oleh Masyarakat Sekitar Lingkar Tambang, Tahun 2010.

Puskesmas Jereweh			Puskesmas Maluku		
No.	Jenis Penyakit Utama	Jumlah Penderita	No.	Jenis Penyakit Utama	Jumlah Penderita
1.	ISPA	311	1.	Penyakit Lainnya	1468
2.	Penyakit Pulpa & Jar. Periatikal	152	2.	Malaria Klinis	599
3.	Demam	122	3.	ISPA	534
4.	Batuk	116	4.	Kecelakaan	431
5.	Hipertensi Primer	113	5.	Diare	431
6.	Diare	92	6.	Rheumatik	418
7.	Gastritis	91	7.	Scabies	345
8.	Influenza	88	8.	Penyakit Kulit Alergi	338
9.	Gangguan Pert. Gigi dan Erupsi	85	9.	Mata Lainnya	275
10.	Rheumatoid Arthritis	34	10.	Infeksi kulit	205
Jumlah		1204	Jumlah		2079
2010		7.423			11.729

Sumber : Laporan Kegiatan Puskesmas Jereweh dan Maluku Tahun 2010.

Puskesmas Sekongkang		
No.	Jenis Penyakit Utama	Jumlah Penderita
1.	ISPA	1043
2.	Malaria Klinis	488
3.	Penyakit Lainnya	470
4.	Gastritis	398
5.	Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik	363
6.	Demam	352
7.	Nasopharingitis Akuta (Common Cold)	334
8.	Penyakit Pulpa & jaringan Periapikal	300
9.	Rheumatoid Arthritis lain	223
10.	Kecelakaan	196
Jumlah 2009		4.135
Tahun 2010		4.167

Sumber : Laporan Kegiatan Puskesmas Sekongkang, Tahun 2010.

Dengan beroperasinya secara penuh ketiga Puskesmas di wilayah sekitar lingkaran tambang maka pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat pula baik kuantitas maupun kualitas pelayanannya. Kondisi ini secara keseluruhan pada gilirannya akan meningkatkan pula derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada umumnya. Kondisi ini akan semakin membaik dengan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang dibangun oleh PT. NNT pada setiap Kecamatan yang berada di wilayah lingkaran tambang sehingga masalah sampah dapat teratasi dengan baik.

Hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya kasus HIV/AIDS dimana pada tahun 2008 terdapat 22 kasus meningkat menjadi 24 kasus pada tahun 2010. Hal ini dimungkinkan karena aktifitas hiburan malam khususnya di Maluku cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Jumlah Tenaga Medis di Puskesmas

Peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat sekitar tambang PT. NNT, ternyata berkorelasi dengan ketersediaan tenaga medis di wilayah tersebut. Tenaga dokter yang ada sebanyak dua belas orang pada tiga puskesmas cukup mendukung kinerja puskesmas maupun pustu secara keseluruhan. Peranan tenaga kesehatan baik medis maupun non media merupakan salah satu faktor utama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Peranan dukun bersalin yang berjumlah sekitar 45 orang dan tersebar di semua desa di Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang cukup membantu masyarakat dalam hal persalinan, sehingga masalah persalinan relatif dapat tertangani. Hal ini ditunjang pula oleh program Puskesmas dan Pustu yang sering memberikan penyuluhan dan bantuan peralatan terhadap para dukun bersalin tersebut.

Keberadaan dukun bersalin di desa sangat membantu pelayanan kesehatan terutama untuk persalian, di wilayah Kecamatan Sekongkang terdapat 24 dukun yang terdiri dari terlatih 8 orang dan yang belum terlatih sebanyak 16 orang. Sementara di Kecamatan Jereweh terdapat 24 dukun yang terdiri dari terlatih 11 orang dan yang belum terlatih sebanyak 13 orang. Demikian pula di Kecamatan Maluk terdapat 8 orang dukun bersalin yang tersebar merata di semua desa dan telah mendapat pelatihan oleh petugas puskesmas.

Eksistensi dukun ini cukup diperlukan oleh sebagian masyarakat terutama untuk persalinan karena mereka masih percaya terhadap kemampuan dukun tersebut. Disamping itu untuk melahirkan bayi sebagian juga masih menggunakan jasa dukun disamping karena murah biayanya juga lebih dekat dengan tempat pemukiman penduduk. Meskipun demikian khusus untuk dukun bersalin beberapa diantaranya telah dilatih oleh para bidan desa,

sehingga kemampuannya juga semakin membaik. Jika dengan jasa dukun keadaan kesehatannya belum baik barulah mereka pergi ke bidan atau mantri kesehatan setempat.

Sejak tahun 2005 seiring dengan pemekaran wilayah Kecamatan Jereweh menjadi Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang, maka Puskesmas bertambah satu sehingga menjadi tiga yaitu Puskesmas Jereweh, Puskesmas Maluk dan yang baru terbentuk yaitu Puskesmas Sekongkang yang terletak di Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang. Dengan bertambahnya satu Puskesmas maka pelayanan kesehatan masyarakat semakin luas jangkauannya. Puskesmas Jereweh tinggal melayani tiga desa sedangkan Puskesmas Maluk melayani dua desa dan Puskesmas Sekongkang melayani lima desa.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Demikian pula dengan ragam tenaga medis yang melayani, dimana sebelum dimulainya eksploitasi tambang PT. NNT hanya dilayani oleh Dokter umum, Perawat dan Bidan. Tetapi sekarang keragaman tenaga medis menjadi banyak antara lain dengan penambahan dokter gigi, sanitarian, dan analist kesehatan. Sehingga layanan kesehatannya terhadap masyarakat semakin meningkat kualitasnya.

Di luar jam kerja terdapat banyak dokter praktek yang mulai melayani pasien dari jam 17.00 sampai

dengan jam 21.00 masih terkonsentrasi di Desa Pasir Putih, Desa Benete, dan Desa Bukit Damai masing sebanyak satu dokter praktek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan secara signifikan terhadap ketersediaan tenaga medis di tiga wilayah lingkaran tambang PT. NNT, yang menyebabkan kemajuan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini sangat mungkin hanya dapat dicapai dengan tingkat kinerja yang baik dan berkualitas serta didukung oleh kemampuan profesional dan dedikasi yang tinggi dari para tenaga medis yang ada. Program pelatihan peningkatan kualitas dan stimulasi yang berupa reward dan dukungan peralatan kepada tenaga medis yang disediakan oleh PT. NNT sangat dipercaya mampu mendukung semua pencapaian tersebut.

Pada tahun 2006 rasio tenaga kesehatan dengan penduduk di daerah lingkaran tambang adalah 1 : 43 artinya seorang tenaga kesehatan melayani sebanyak 43 Keluarga. Sementara itu itu rasio tenaga kesehatan penduduk di Kabupaten Sumbawa barat (KSB) adalah 1 : 103, artinya seorang tenaga kesehatan melayani 103 KK. Kondisi ini menggambarkan bahwa rasio di daerah lingkaran tambang lebih baik dibandingkan dengan rasio tingkat kabupaten, artinya jumlah tenaga kesehatan di daerah lingkaran tambang lebih memadai dibanding ditingkat Kabupaten Sumbawa barat. Namun secara keseluruhan rasio tenaga kesehatan dari tahun ke

tahun terus mengalami peningkatan yang cukup memadai.

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Seiring dengan pemekaran Kabupaten Sumbawa menjadi Sumbawa dan Sumbawa Barat, maka Ibukota Kabupaten Sumbawa yang terletak di Kecamatan Taliwang telah memiliki Rumah Sakit Umum yang merupakan pengembangan Puskesmas Taliwang. Meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki relatif masih terbatas. PT. NNT telah memberikan banyak bantuan pada RSUD tersebut, mulai dari peralatan medis hingga bantuan dua unit mobil ambulance.

Salah satu aspek yang menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah menyangkut aspek kesehatannya. Masyarakat yang berada di sekitar lingkaran tambang PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) khususnya yang berada di Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang telah mengalami perubahan dalam hal kesehatan masyarakatnya. Berbagai hal yang menyangkut aspek kesehatan masyarakat di sekitar lingkaran tambang akan dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kesehatan masyarakat setempat. Untuk menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan berbagai hal baik itu menyangkut tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta unsur penunjang lainnya.

a. Prasarana Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat sebelum dimulainya kegiatan eksplorasi tambang PT. NNT hanya dilayani oleh Puskesmas Jereweh yang terletak di Desa Beru Kecamatan Jereweh. Setelah mulai tambang berproduksi seiring dengan pemekaran wilayah menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang maka di Desa Maluk telah dibangun pula sebuah Puskesmas. Pada tahun 2003 telah dibangun pula sebuah Puskesmas yang terletak di Desa Sekongkang Bawah dan beroperasi mulai pada tahun 2004.

Sementara ini Puskesmas Maluk melayani masyarakat pada Tujuh Desa yaitu Desa Benete, Maluk, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Tongo Sejong, SP-1 Aik Kangkung, dan SP-2 Tatar. Tetapi setelah Puskesmas Sekongkang telah beroperasi maka akan melayani masyarakat di Sekitar Desa Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Tongo, Aik Kangkung dan Tatar.

Untuk memperlancar fungsi pelayanan kesehatan masyarakat maka baik pada Puskesmas Jereweh maupun Puskesmas Maluk mengadakan Puskesmas Pembantu (Pustu) masing-masing satu di Jereweh, tiga di Maluk, dan satu di Sekongkang Atas, demikian pula halnya dengan Poliklinik Desa dan Posyandu.

Diharapkan dengan adanya Pustu, Polindes, Posyandu dan rumah pondokan bidan maka

kecepatan penanganan pasien lebih terjamin. Jika pada tingkat pelayanan ini belum dapat ditangani, maka pasien akan di rujuk ke Puskesmas, dan seterusnya ke RSUD Kabupaten Sumbawa Barat maupun ke RSUD Mataram.

b. Tempat berobat

Keragaman tempat berobat masyarakat di daerah lingkaran tambang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Jika ada anggota keluarga yang sakit, maka ada empat alternatif tempat berobat yaitu ke Dokter Praktek, Puskesmas, Bidan, Mantri dan Dukun. Keputusan penentuan tempat berobat sangat dipengaruhi oleh penghasilan keluarga, jarak tempat berobat, dan derajat kegentingannya. Berikut gambaran pilihan tempat berobat yang dipilih masyarakat di daerah lingkaran tambang saat mereka sakit dan perlu dilakukan tindakan medis adalah :

Tabel 67. Sebaran Responden Menurut Tempat Berobat Di Daerah Lingkaran Tambang Tahun 2010.

No	Desa	Tempat Berobat						
		DP	P	B	D	OS	TB	M
1.	Goa	11	19	0	2	3	0	4
2.	Beru	7	25	0	2	9	0	4
3.	Belo	10	23	0	0	7	0	0
4	Dasan Anyar	5	15	0	0	7	0	2
5.	Benete	11	24	0	1	5	0	1
6.	Bukit Damai	7	15	0	1	2	0	0
7.	Mantun	6	16	0	1	4	0	0
8.	Maluk	6	24	0	0	7	0	0
9.	Pasir Putih	5	19	0	1	6	0	2
10.	Sekongkang Atas	12	23	0	2	6	0	3
11.	Sekongkang	14	21	0	2	13	0	1

1.	Bawah							
1	Tongo	5	24	0	0	3	0	1
2.								
1	Aik Kangkung	3	17	0	2	7	0	3
3.								
1	Tatar	2	22	0	2	6	0	1
4.								
1	Telonang Baru	0	9	0	3	4	1	12
5.								
	Jumlah tahun 2010	264	82	34	3	22	0	23
	Jumlah Tahun 2009							
	Jumlah Tahun 2008	104	296	0	19	89	1	34
	Jumlah Tahun 2007	112	228	24	6	20	0	18
	Jumlah Tahun 2006	98	226	22	6	28	0	25
	Jumlah tahun 2005	83	227	23	5	10	2	0
	Persentase (%) tahun 2005	23,7	64,9	6,6	1,4	2,8	0,6	0
	Persentase (%) tahun 2006	24,2	55,8	5,4	1,4	6,9	0	6,1
	Persentase (%) tahun 2007	32,0	65,1	6,85	1,4	5,71	0	5,14
	Persentase (%) tahun 2008	25,7	73,1	0	4,7	21,2	0,2	8,4
	Persentase (%) tahun 2009							
	Persentase (%) tahun 2010							

Catatan : DP=Dokter Praktek P=Puskesmas/Pustu
 B=Bidan D=Dukun OS=Obat Sendiri
 TB=Tidak Berobat M= Mantri

Berdasarkan hasil penelitian, terjadi perubahan tempat berobat dimana pada tahun 2005 terdapat 23,7 % yang berobat ke dokter praktek (dokter Puskesmas yang berpraktek sore hari) meningkat menjadi 24,2% pada tahun 2006, dan patahun 2007 terjadi lagi peningkatan menjadi 32 %.Namun yang berobat ke bidan menurun dari 6,6 % pada tahun 2005 menjadi 5,4 % pada tahun 2006 akan tetapi pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 6,85 %.

Sementara yang berobat ke Mantri meningkat sangat signifikan dimana pada tahun 2005 tidak ada meningkat menjadi 6,1 % pada tahun 2006, kemudian turun lagi menjadi 5,14 % pada tahun 2007. Sementara itu yang tidak berobat pada tahun 2006 dan tahun 2007 tidak satupun yang tidak berobat jika sakit. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya berobat jika sakit dari tahun ke tahun terus meningkat kesadarannya.

Pilihan berobat secara medis dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, khususnya tempat berobat ke Puskesmas yang pada tahun 2003 sebanyak 62,28 % meningkat menjadi 64,85 % pada tahun 2004 serta meningkat sedikit menjadi 64,9 % pada tahun 2006 yang kemudian pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 65,14 %. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatannya sudah mengalami peningkatan karena sudah mempertimbangkan segi kualitas pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dalam hal keputusan untuk menentukan tempat berobat, maka sebagian besar ditentukan secara bersama-sama atau musyawarah antara Bapak dan Ibu, kemudian oleh Bapak dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain tingkat pendapatan, jarak, dan kelengkapan peralatan serta ketersediaan tenaga medis. Hal ini juga tidak terlepas dari semakin membaiknya sarana dan prasarana

kesehatan yang ada di sekitar wilayah lingkaran tambang.

5. Program Kesehatan

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa penyakit malaria merupakan penyebab utama setelah ISPA yang paling banyak diderita saat sebelum tambang berproduksi, sehingga PT. NNT telah berupaya menekan populasi nyamuk malaria dengan cara melakukan penyemprotan secara berkala. Pada awal-awal konstruksi frekuensi penyemprotannya rata-rata sekali seminggu, yang hasilnya cukup signifikan menekan populasi nyamuk. Akan tetapi saat ini frekuensi penyemprotan hanya sekali sebulan bahkan beberapa dusun menyatakan kadang-kadang dua sampai tiga bulan sekali. Selain penyemprotan, PT. NNT secara aktif juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap perkembangan penyakit malaria dengan programnya yang dikenal dengan *malaria control*. Melalui kegiatan ini secara berkala dan sistematis PT. NNT melakukan pemantauan langsung dengan mengambil sample darah bagi para penderita yang diduga mengidap penyakit malaria untuk dilakukan uji laboratorium. Setelah diketahui hasilnya maka dilakukan tindakan kuratif dan preventif untuk mencegah meluasnya penyakit malaria ini. PT. NNT juga melakukan program kelambunisasi dengan cara memberikan bantuan cuma-cuma kelambu kepada masyarakat sekitar lingkaran tambang.

Untuk kesehatan ibu dan anak , PT. NNT dengan bekerjasama dengan Yayasan Keluarga Sejahtera Seluruh Indonesia (YKSSI) melakukan penyuluhan kesehatan, pemberian makanan tambahan lewat posyandu, dan pembentukan Kelompok Pemerhati Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA). Secara berkala para bidan dan puskesmas melayani imunisasi TT, dan polio bagi kesehatan ibu dan anak serta pemberian vitamin A setiap tahunnya. Demikian pula dengan program Keluarga Berencana (KB) para bidan melayani baik dengan berbagai alat kontrasepsi. Peningkatan jumlah Puskesmas beserta tenaga medis dan para medisnya serta meningkatnya perhatian dan bantuan dari PT. NNT dari tahun ketahun telah berdampak positif bagi masyarakat sekitar lingkaran tambang. Namun khusus di Desa Aik Kangkung dan Desa Tatar kondisi ini belum terlalu dinikmati masyarakat yang disebabkan rusaknya jalan yang menghubungkan kedua desa tersebut dengan pusat Kecamatan Sekongkang, sehingga diperlukan waktu yang lama serta transportasi yang terbatas dan memakan waktu lama jika mereka ingin memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih memadai.

6. Air Bersih

Kebutuhan masyarakat terhadap air bersih khususnya untuk masak dan minum yang berasal dari air ledeng (PDAM) telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 8,8 % pada tahun 2004 meningkat menjadi 17,1 % pada tahun 2005. Pada

tahun 2006 penggunaan air ledeng mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 28,0 %, sementara pada tahun 2007 mengalami peningkatan lagi menjadi 33,58 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang berasal dari PDAM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Meskipun pada tahun 2003 terjadi penurunan yang disebabkan karena sering macetnya distribusi air, akan tetapi dengan berbagai perbaikan dan sambungan baru telah meningkatkan kembali penggunaan air ledeng tersebut. Sekarang ini layanan PDAM sudah mencakup 8 desa kecuali Aik Kangkung dan Tatar. Hal ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih cukup baik.

Masyarakat mengharapkan agar jangkauan pelayan air PDAM semakin diperluas sehingga bisa melayani kebutuhan air di seluruh desa baik yang berada di Kecamatan Jereweh maupun yang berada di Kecamatan Sekongkang. Pola penggunaan air bersih baik pada musim kemarau maupun musim penghujan tidak mengalami perubahan yang signifikan, artinya musim tersebut sama sekali tidak mempengaruhi pola konsumsi air bersih karena relatif tersedia. Kecuali penggunaan air sungai yang lebih banyak sedikit pada musim hujan, itupun hanya dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kali atau sungai. Jika yang pemukimannya jauh dari sungai mereka lebih memilih menggunakan sumur, karena pada musim hujan air sumur mereka relatif

meningkat jumlahnya. Adapun gambaran kondisi penggunaan sumber air bersih masyarakat di daerah lingkaran tambang pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 68. Sebaran Responden Berdasarkan Sumber Air Bersih Penduduk Daerah Lingkaran Tambang Tahun 2010.

No	Desa	Sumber Air Untuk Masak dan Minum							
		Tahun 2009				Tahun 2010			
		AL	SR	SI	G	AL	SR	SI	G
1.	Benete	6	18	1	5	4	13		
2.	Maluk	1	18	0	8	0	19		
3.	Sekongkang Atas	4	21	0	5	9	18		
4.	Sekongkang Bawah	24	8	0	3	22	4		
5.	Tongo Sejorong	3	7	0	5	6	5		
6.	Aik Kangkung	1	18	0	2	1	15		
7.	Tatar	3	9	0	3	12	4		
8.	Goa	4	26	0	8	2	24		
9.	Beru	10	18	0	3	7	22		
10.	Belo	0	24	0	12	3	19		
11.	Dasan Anyar	1	17	0	3	1	15		
12.	Bukit Damai	1	14	0	7	1	6		
13.	Mantun	2	13	0	2	1	9		
14.	Pasir Putih	0	15	0	10	0	15		
15.	Telonang Baru	0	20	0	0	0	12		
2009—2010		64	285	1	76	69	200	22	26
Persentase (%)		33,58	57,03	0,2	9,38	15,8	61,23	0,2	18,8

Catatan : AL= Air Ledeng (PDAM) SR = Sumur SI = Sungai G = Galon

Hal yang cukup berarti adalah bahwa penggunaan sumur mengalami penurunan dari 80,85 % pada tahun 2003 menjadi 64,8 % pada tahun 2004 dan turun lagi menjadi 56,6 % pada tahun 2006.

Tetapi pada tahun 2007 penggunaan sumur sebagai sumber air bersih masyarakat mengalami peningkatan lagi menjadi 57,03 %. Masyarakat beralih menggunakan air ledeng dan air galon yang telah cukup tersedia di pasar-pasar lokal. Khusus penggunaan air galon mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari hanya 7,71 % pada tahun 2005 meningkat menjadi 16,5 % pada tahun 2006 tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan lagi hingga menjadi 9,38 %. Beberapa penduduk yang keluarganya bekerja di PT. NNT bahkan memperolehnya secara gratis. Sementara itu di Desa Aik Kangkung dan Desa Tatar telah dibangun pompa air dengan menggunakan tenaga kincir angin yang merupakan sumbangan dari PT. NNT, sehingga diharapkan kebutuhan air bersih di kedua desa tersebut sebagian besar dapat terpenuhi.



Gambar 15 : Sumur Pompa tenaga kincir angin sebagai sumber air bersih masyarakat

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum dapat disimpulkan hal-hal terkait dengan Kesehatan Masyarakat di daerah lingkaran tambang PT. NNT sebagai berikut :

1. Keberadaan perusahaan tambang (PT.NNT) pada masa produksi berpengaruh terhadap kondisi Kesehatan Masyarakat desa lingkaran tambang dengan indikasi:
 - a. Sarana dan prasarana kesehatan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2003 hanya dilayani oleh dua Puskesmas, sekarang (pada tahun 2007) ini sudah ada tiga Puskesmas yaitu Puskesmas Jereweh, Maluk, dan Sekongkang Atas. Demikian pula dengan tenaga kesehatan (medis dan para medis) yang meningkat jumlah dan keragaman kemampuannya.
 - b. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan juga meningkat, hal ini diindikasikan oleh meningkatnya masyarakat yang berobat ke dokter praktek maupun Puskesmas. Sementara yang berobat ke dukun semakin berkurang atau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berbagai program kesehatan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh PT. NNT telah banyak membantu masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya.
 - c. Terjadi perubahan penggunaan air bersih terutama di Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang, dimana terjadi peningkatan penggunaan air ledeng (PDAM) dan penurunan penggunaan sungai atau kali untuk air bersih.
 - d. Sebagai akibat dari peningkatan pendapatan masyarakat, maka kondisi perumahan penduduk juga mengalami peningkatan yang

- cukup berarti. Beberapa Indikator seperti luas bangunan, jenis atap, jenis dinding rumah, bahan lantai serta penerangan rumah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan ke arah yang lebih baik kualitasnya.
- e. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan semakin meningkat pula secara signifikan. Kondisi ini terjadi karena peran PT. NNT yang membangun fasilitas tempat pembuangan sampah, mulai dari pembangunan TPA, pengadaan TPS dan bantuan tempat sampah rumah tangga.
2. Kondisi kesehatan masyarakat saat ini pada umumnya lebih baik dibanding sebelumnya terutama sebelum masuknya PT NNT, khususnya penyakit malaria sudah jauh berkurang karena control dari petugas S.O.S terhadap perkembangan nyamuk malaria dan nyamuk penyebab demam berdarah sangat ketat dan juga dilakukan penyemprotan (Voging) serta pembagian abate secara rutin kepada masyarakat.
 3. Adanya pembangunan fasilitas kesehatan puskesmas/pustu dan polindes dan tersedianya tenaga medis, memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat lingkaran tambang, terlebih lagi pelayanan kesehatan yang diberikan tidak dipungut biaya atau gratis sehingga kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.
 4. Keadaan air sungai, sumur dan PAM saat ini pada dasarnya hampir sama seperti sebelum adanya PT NNT, keadaan air sungai dan air sumur masih baik dan masih teredia pada musim kemarau meskipun saat ini ketersediaannya menjadi 3lebih kecil dan di beberapa sungai menjadi kering. Selain itu banyak sungai menjadi lebih dangkal dari sebelumnya dan pada saat musim hujan air sungai menjadi lebih keruh.
 5. Sebelum adanya PT NNT Kondisi perumahan masyarakat pada umumnya masih berupa rumah

biasa dan rumah panggung yang terbuat dari bahan kayu dan papan. Saat ini kondisi sebagian besar perumahan masyarakat di lingkaran tambang mengalami perubahan yang sangat besar, dari rumah kayu/panggung menjadi rumah batu permanen yang dibangun dengan gaya/arsitektur modern dengan penataan ruang keluarga dan fasilitas rumah tangga standar seperti beberapa kamar tidur, ruang keluarga, dapur, kamar mandi/WC, serta perabotan rumah tangga yang lebih modern dan bervariasi dari sebelumnya. Perubahan ini sebagian besar terjadi di hampir semua desa di lingkaran tambang kecuali desa Ai Kangkung, desa Tatar dan desa Talonang Baru tidak begitu nampak perubahannya.

BAB V

TRANSFORMASI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAERAH LINGKAR TAMBANG MENJELANG AKHIR BEROPERASINYA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

A. Transformasi Ekonomi Masyarakat

Kegiatan ekonomi masyarakat lokal di kawasan tambang PT.NNT selalu berubah setiap tahun, baik secara alamiah maupun karena adanya kebijakan dari pemerintah atau perusahaan tambang. Survai pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan tambang untuk menghentikan sementara operasi tambang tahun 2014 berdampak terhadap penurunan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pada usaha dagang, usaha jasa, industry kerajinan, termasuk pada kegiatan berburuh di luar pertanian. Pada tahun tersebut pengangguran semakin meningkat, dari 7,43 persen tahun 2013 menjadi 7,61 persen tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2015 perusahaan tambang beroperasi kembali, diikuti oleh pemanggilan tenaga kerja yang diberhentikan sementara oleh perusahaan tambang dan sub-kontraktornya untuk bekerja kembali pada perusahaan-perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan hasil survai tahun 2016 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat lokal pada tahun 2015 beserta perubahan yang terjadi ditinjau dari aspek perubahan struktur ketenagakerjaan, perubahan usaha ekonomi beserta perubahan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

1. Perubahan Struktur Ketenagakerjaan

a. Struktur Anggota dan Tenaga Kerja Rumah tangga Masyarakat

Pada tahun 2015 struktur anggota rumah tangga masyarakat lokal di Kawasan Tambang PT.NNT masih tetap lebih banyak kaum wanita, termasuk anggota rumah tangga yang tergolong usia kerja atau yang termasuk tenaga kerja (berusia ≥ 15 tahun). Tetapi anggota rumah tangga yang termasuk angkatan kerja dan yang bekerja lebih banyak kaum pria, sementara yang menganggur atau yang mencarai kerja secara kuantitatif jumlahnya sama, tetapi secara proporsional lebih banyak penganggur terbuka pada tenaga kerja wanita dibandingkan tenaga kerja pria (lihat Tabel 69).

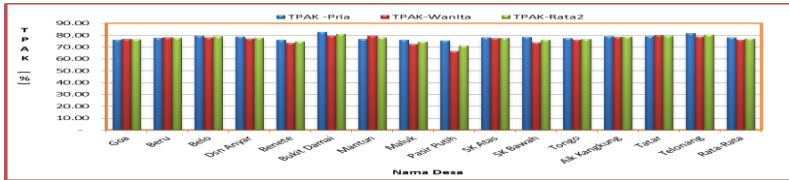
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) cenderung lebih tinggi tenaga kerja pria (78,05%)

dibandingkan tenaga kerja wanita (76,21%). Ini artinya bahwa anggota rumah tangga pria yang berusia kerja lebih banyak yang masuk pasar kerja dibandingkan tenaga kerja wanita. Secara rata-rata TPAK masyarakat lokal pada tahun 2015 adalah sebesar 77,13 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja antar desa tidak terlalu bervariasi, yaitu berada pada kisaran 70-80 persen. Tapi jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum, tampaknya TPAK di kawasan tambang masih lebih tinggi. TPAK Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 71,66 persen (NTB Dalam Angka, 2015).

Tabel 69. Struktur Anggota Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.

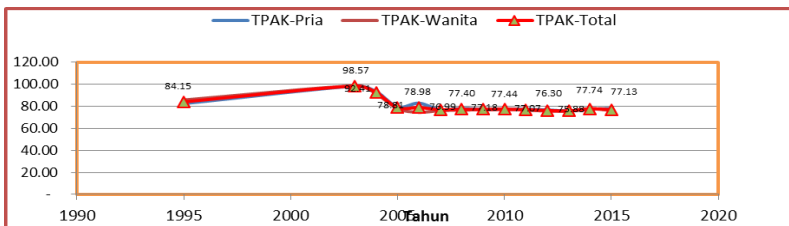
No	Komponen (Item)	Jumlah (orang)		
		Pria	Wanita	Total
1	Jumlah Anggota Rumah tangga	898	907	1,805
2	Jumlah Tenaga Kerja	615	618	1,233
3	Jumlah Angkatan Kerja	480	471	951
4	Jumlah Angkatan Kerja Bekerja	445	436	881
5	Jumlah Pencari Kerja/Penganggur	35	35	70
6	Tingkat Pencari Kerja/Penganggur* (%)	7.29	7.43	7.36

Keterangan : *persentase pencari kerja terhadap angkatan kerja.

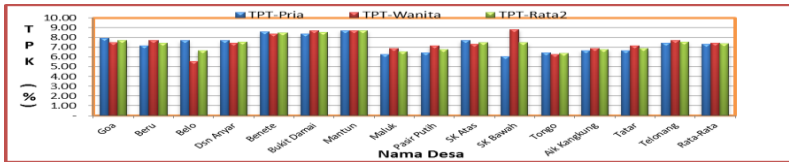


Gambar 16. TPAK Rumah tangga Masyarakat Lokal di Setiap Desa Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015

Perkembangan TPAK masyarakat lokal dalam 10 tahun terakhir cenderung stabil dan sedikit menurun, hanya pada tahun 2014 sedikit meningkat dan menurun kembali pada tahun 2015. Sementara dilihat dari tingkat pencari kerja atau tingkat penganggur terbuka antar desa atau antar waktu sedikit bervariasi. Secara rata-rata tingkat pengangguran tenaga kerja masyarakat lokal pada tahun 2015 adalah sebesar 7,36 persen, lebih tinggi dari rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum sebesar 5,69 persen (NTB dalam Angka, 2016). Tingkat pengangguran yang cukup tinggi terjadi di Desa Benete, Bukit Damai dan Desa Mantun. Ketiga desa tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Maluk.



Gambar 17. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995, 2003-2015.



Gambar 18. Tingkat Pengangguran Masyarakat Lokal di Setiap Desa Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.

Sebelum tahun 1995 dan pada masa tambang tahun 1997-2006 tingkat pengangguran terbuka masyarakat lokal di kawasan tambang masih di atas 8 persen, kemudian menurun cukup tajam di bawah 7 persen pada tahun 2007-2010, setelah itu (2011-2015) pengangguran terbuka masyarakat lokal cenderung meningkat kembali di atas 7 persen; peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2014 mencapai 7,61 persen, kemudian menurun kembali menjadi 7,36 persen pada tahun 2015 (Gambar 19).

Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja masyarakat lokal pada tahun 2015 mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi di kawasan tambang sudah mulai kembali seperti sebelum kebijakan penghentian operasi tambang tahun 2014. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat lokal di kawasan tambang masih sangat tergantung pada keberadaan perusahaan tambang, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha perdagangan, jasa, industri kerajinan serta kegiatan-kegiatan lain di luar sektor pertanian.



Gambar 19. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995 dan Tahun 2003-2015.

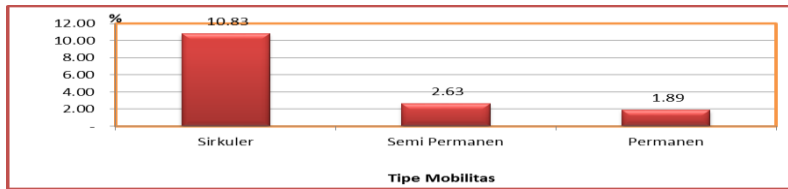
b. Mobilitas Ekonomi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan atau perubahan ekonomi suatu wilayah adalah mobilitas ekonomi masyarakatnya. Semakin mobil masyarakat suatu daerah maka dikatakan semakin berkembang atau semakin maju daerah tersebut. Pada tahun 2015 tingkat mobilitas angkatan kerja masyarakat lokal di kawasan tambang adalah sebesar 15,36 persen. Artinya sebanyak 15,36 persen angkatan kerja masyarakat lokal mencari dan melakukan pekerjaan di luar kawasan kecamatan tempat tinggalnya. Tapi mobilitas yang dilakukan masih sebagian besar antar kecamatan dalam kawasan tambang (9,88%), kemudian di luar kawasan tambang dalam wilayah NTB (3,68%), di luar wilayah NTB (1,16%) dan di luar negeri (0,63%) (Tabel 70).

Tabel 70. Daerah Tujuan dan Tipe Mobilitas Ekonomi Angkatan Kerja Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2016

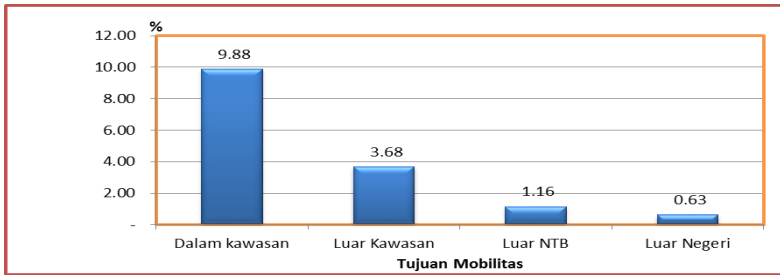
Daerah Tujuan	Type Mobilitas							
	Sirkuler		Semi permanen		Permanen		Total	
	Jiwa	%*	Jiwa	%*	Jiwa	%*	Jiwa	%*
Dalam Kawasan	88	9,25	2	0,21	4	0,42	94	9,88
Luar Kawasan	13	1,37	22	2,31	-	-	35	3,68
Luar NTB	2	0,21	1	0,11	8	0,84	11	1,16
Luar Negeri	-	-	-	-	6	0,63	6	0,63
Total	103	10,83	25	2,63	18	1,89	146	15,35

Catatan: * = Persentase dari jumlah Angkatan kerja sebanyak 985 orang.



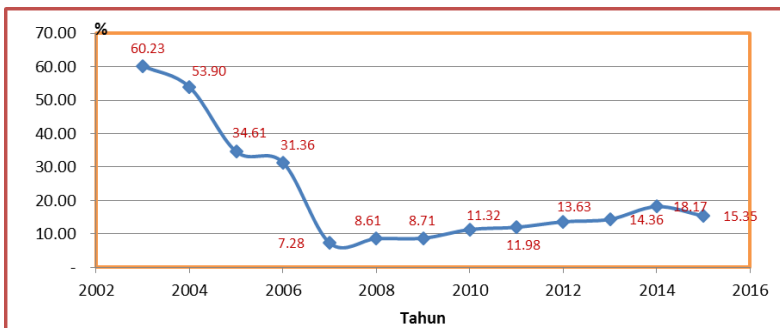
Gambar 20. Tipe Mobilitas Ekonomi Tenaga Kerja Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2016.

Tipe mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal juga masih sebagian besar bersifat sirkuler atau ulang alik (10,83%), kemudian tinggal semi permanen di tempat kerjanya (2,63%) dan selebihnya (1,89%) tinggal secara permanen. Tipe dan daerah tujuan mobilitas masyarakat lokal pada tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 20 dan Gambar 21. Sedangkan desa asal angkatan kerja yang melakukan mobilitas adalah dari daerah sekitar lingkaran tambang.



Gambar 21. Daerah Tujuan Mobilitas Ekonomi Tenaga Kerja Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2016.

Selama 9 tahun terakhir (2007-2014) mobilitas ekonomi masyarakat lokal mengalami peningkatan secara konsisten, namun peningkatannya berlangsung secara lamban (alamiah) mengikuti perkembangan masyarakat dan kawasan, yaitu dari 7,28% pada tahun 2007, meningkat menjadi 8,61% tahun 2008 dan terus meningkat setiap tahun, dan pada tahun 2014 meningkat cukup tajam menjadi 18,17 persen, tapi pada tahun 2015 menurun menjadi 15,35 persen (Gambar 22).



Gambar 22. Perkembangan Mobilitas Angkatan Kerja Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2003-2016.

Peningkatan mobilitas tenaga kerja pada tahun 2014 menunjukkan adanya respon masyarakat

terhadap penghentian operasi tambang tahun 2014, terutama dari tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan. Meskipun penghentian tersebut bersifat sementara, tapi ada sebagian tenaga kerja yang tidak tahan menunggu, diantara mereka ada yang mencari kerja ke Pulau Kalimantan bahkan menurut beberapa informasi ada yang mencari kerja ke luar negeri seperti ke Abudabi. Kemudian pada tahun 2015, mobilitas tenaga kerja masyarakat lokal kembali menurun, karena sebagian tenaga yang bekerja di luar kecamatan dan luar kawasan tambang kembali bekerja di dalam kawasan tambang. Mobiltas tenaga kerja yang masih berlangsung bersifat alamiah sebagaimana sebelum tahun 2015.

c. Struktur Pekerjaan Anggota Rumah Tangga

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya setelah beroperasi tambang, struktur pekerjaan masyarakat lokal cukup beragam meskipun masih tetap dominan pada sektor pertanian. Pada tahun 2015, persentase tenaga kerja masyarakat lokal yang menjadikan kegiatan usahatani sebagai pekerjaan pokok adalah sebanyak 37,23 persen dan yang menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan 27,13 persen. Ini berarti sekitar 64,36 persen tenaga kerja masyarakat lokal, sumber pencaharian dan pendapatannya berasal dari kegiatan usahatani.

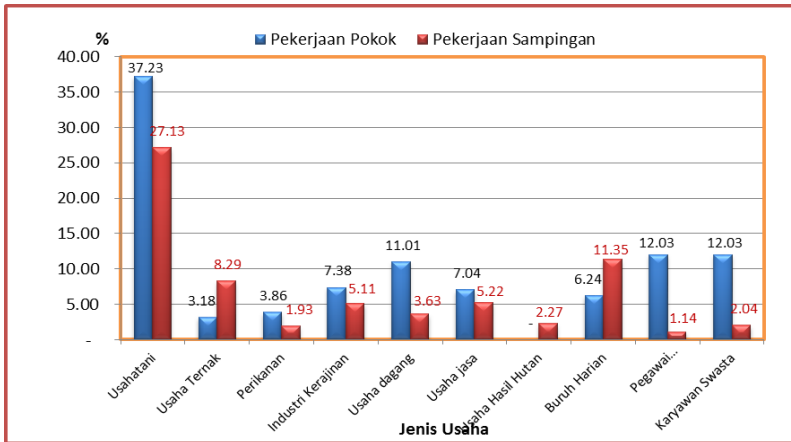
Selebihnya berasal dari kegiatan sebagai buruh harian baik sebagai buruh tani ataupun sebagai buruh di luar usahatani (17,59%), kemudian usaha

dagang (14,64%), sebagai karyawan swasta (14,07%), pegawai pemerintah (13,17%), usaha industry kerajinan (12,49%), usaha jasa (12,26%), usaha ternak (11,47%) dan yang paling sedikit adalah sebagai pencari hasil hutan (2,27%). Pekerjaan sebagai buruh harian dan usaha ternak sebagian besar dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, bahkan pekerjaan sebagai pencarian hasil hutan sepenuhnya merupakan pekerjaan sampingan (lihat Tabel 71 dan Gambar 23). Sedangkan jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan masyarakat lokal di setiap desa dapat dilihat pada data lebih lanjut.

Tabel 71. Struktur Pekerjaan Pokok dan Pekerjaan Sampingan Anggota Rumah-tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2016.

Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Utama (Pokok)		Pekerjaan Kedua (Sampingan)	
	Jiwa	%*	Jiwa	%*
1. Usaha Tani	328	37,23	239	27,13
2. Usaha Ternak	28	3,18	73	8,29
3. Nelayan	34	3,86	17	1,93
4. Industri kerajinan	65	7,38	45	5,11
5. Usaha Dagang	97	11,01	32	3,63
6. Usaha Jasa	62	7,04	46	5,22
7. Pencari Hasil Hutan	-	0,00	20	2,27
8. Buruh Harian	55	6,24	100	11,35
9. Pegawai Pemerintah	106	12,03	10	1,14
10. Karyawan Swasta	106	12,03	18	2,04
Total	881	100,00	600	68,10

Keterangan : * Persentase dari jumlah angkatan kerja yang bekerja (881 orang).



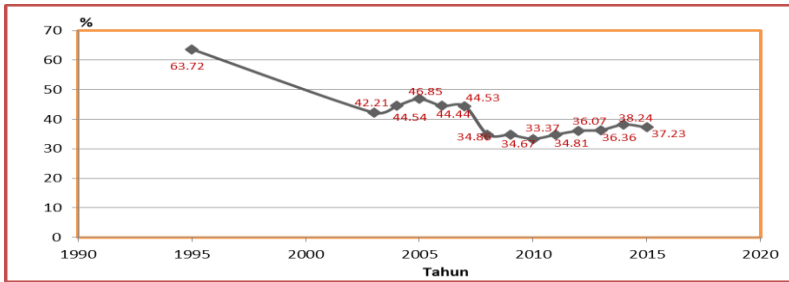
Gambar 23. Jenis Pekerjaan Pokok dan Pekerjaan Sampingan Angkatan Kerja Masyarakat Lokal di Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.

Meskipun usaha pertanian masih mendominasi pekerjaan sebagian besar masyarakat lokal; namun bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, lebih-lebih bila dibandingkan dengan kondisi sebelum masuk proyek tambang, jumlah masyarakat lokal yang menempatkan usaha pertanian sebagai pekerjaan pokok masih lebih rendah (lihat Gambar 24). Hal tersebut menandakan telah terjadi transformasi pekerjaan sebagian masyarakat lokal dari sektor pertanian ke luar sektor pertanian, khususnya menjadi karyawan swasta termasuk ke usaha perdagangan, jasa dan industri kerajinan rumah tangga.

Akan tetapi dalam 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2010 ada kecenderungan jumlah tenaga kerja masyarakat lokal yang menjadikan usaha tani sebagai pekerjaan pokok semakin meningkat, yaitu dari

33,37% tahun 2010 meningkat menjadi 34,81% tahun 2011, 36,07% tahun 2012, 36,36% tahun 2013 dan pada waktu penghentian sementara operasi tambang tahun 2014 tenaga kerja masyarakat lokal yang menjadikan usahatani sebagai pekerjaan pokok meningkat lebih tajam menjadi 38,24%. Akan Tapi setelah tambang beroperasi kembali tahun 2015, jumlah masyarakat lokal yang bekerja pada kegiatan usahatani menurun kembali menjadi 37,23% (Gambar 9).

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan usahatani dan kegiatan tradisional lainnya seperti usaha perikanan, peternakan dan kehutanan pada masa penghentian operasi tambang tahun 2014, kemudian menurun setelah tambang beroperasi kembali tahun 2015 menunjukkan bahwa, pada masa krisis kegiatan usahatani dan kegiatan-kegiatan tradisional lainnya sangat berperan dalam menopang ekonomi masyarakat lokal, sementara sektor modern seperti perdagangan dan jasa sangat rentan dengan perubahan kebijakan dari perusahaan tambang ataupun dari pemerintah.



Gambar 24. Perkembangan Angkatan Kerja Masyarakat Lokal Yang Memiliki Pekerjaan Pokok Sebagai Petani di Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995 dan Tahun 2003-2015.

2. Perkembangan Usaha Masyarakat Lokal

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih lengkap tentang kegiatan ekonomi masyarakat lokal pada tahun 2015 dan perkembangan yang terjadi, berikut ini akan diuraikan satu persatu mulai dari kegiatan usaha pertanian, peternakan, perikanan, industri kerajinan, usaha dagang, jasa, usaha pencaharian hasil hutan, kegiatan berburuh, serta kegiatan sebagai pegawai pemerintah dan karyawan swasta. Selain itu juga akan diinformasikan tentang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya lokal seperti usaha pertambangan rakyat, pariwisata dan agroindustri; serta sumber pendapatan masyarakat yang berasal dari luar hasil kerja.

a. Usaha Pertanian

Usaha di bidang pertanian sebagaimana diuraikan di atas merupakan pekerjaan utama dan menjadi sumber pendapatan pokok bagi sebagian besar masyarakat lokal, baik pada masa sebelum

tambang maupun pada masa produksi tambang sekarang ini. Pemerintah daerah maupun perusahaan tambang juga menyadari bahwa usaha pertanian sangat penting artinya dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat dan ekonomi wilayah, baik pada masa tambang maupun nanti setelah berakhir masa tambang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peranan usaha pertanian tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk oleh perusahaan tambang, mulai dari perعتakan sawah baru, pembangunan prasarana dan sarana irigasi (dam dan saluran irigasinya), pengadaan peralatan-peralatan pertanian (hand tractor, mesin air, handsprayer dll), pengembangan teknologi dan kelembagaan petani (kelompok tani, P3A dan Pembangunan Balai Pertemuan), bantuan sarana produksi, pendampingan dan berbagai kegiatan lain yang mendukung, sehingga dapat dikatakan hampir semua pendekatan sudah dilakukan untuk meningkatkan basis ekonomi masyarakat lokal tersebut.

Meskipun pada lima tahun terakhir (2011-2015) kegiatan pembangunan dam dan saluran primer semakin terbatas atau tidak dilakukan lagi, tapi pembangunan jaringan sekunder, tersier dan saluran cacing yang masuk ke lahan petani tetap dilakukan, baik yang dilakukan oleh perusahaan tambang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, atau Dinas Pekerjaan Umum, sehingga pembangunan dam dan saluran primer yang sudah dilakukan beberapa

tahun yang lalu semakin menunjukkan hasilnya, yang ditunjukkan oleh semakin tersedianya air irigasi pada musim penghujan maupun pada musim kemarau. Pembangunan prasarana irigasi tersebut diikuti oleh pembangunan jalan usahatani di beberapa tempat, sehingga pengangkutan saprotan (sarana produksi dan peralatan pertanian) dan hasil-hasil pertanian semakin mudah dilakukan oleh masyarakat. Sawah-sawah yang dicetak pada tahun-tahun sebelumnya sebagian besar sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani.

Namun demikian bila dibandingkan antara upaya yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai tampaknya belum menunjukkan hasil yang memadai. Intensitas tanam meskipun cenderung semakin meningkat, tapi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian masih cukup luas. Pada Tabel 4 ditunjukkan bahwa pada tahun 2015 lahan pertanian yang dikuasai oleh 405 rumah tangga masyarakat lokal adalah seluas 37.207 are (372,07 hektar), sedangkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani pada musim penghujan seluas 35.145 are, berarti terdapat sekitar 2.062 are atau 20,62 hektar lahan pertanian yang dikuasai oleh 405 rumahtangga masyarakat lokal tersebut tidak dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani atau masih berstatus sebagai lahan tidur. Pada musim kemarau pertama luas lahan pertanian yang diusahakan seluas 23.374 are dan pada musim kemarau kedua seluas 17.583 are. Kalau diperhitungkan intensitas

tanamnya, maka intensitas tanam pada musim penghujan adalah sebesar 94,46 %, musim kemarau satu 62,82% dan musim kemarau kedua 47,26%. Berarti intensitas tanam tahunan pada tahun 2015 mencapai 204,54% (Tabel 72).

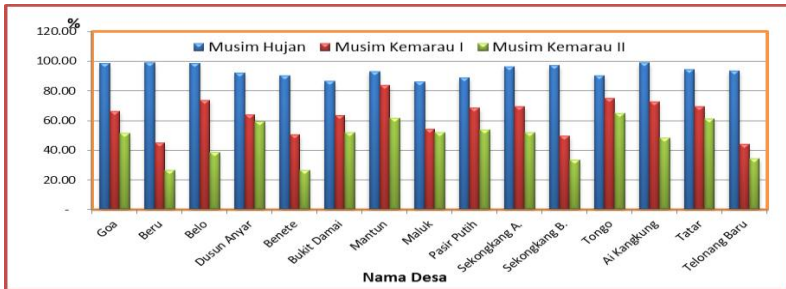
Tabel 72. Luas dan Intensitas Tanam Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Tahun 2015.

No	Jenis Tanaman dan Intensitas Tanam	Luas Tanam Per Musim (are)			Total
		M.Hujan	MK-1	MK-II	
1.	Jenis Tanaman :				
	a. Padi	12.896	1.712	-	14.608
	b. Palawija	4.833	4.115	352	9.300
	c. Hortikultura	240	201	-	441
	d. Tanaman Semusim lain	45	215	100	360
	e. Tanaman Tahunan	17.131	17.131	17.131	51.393
2.	Total Luas Tanam (Are)	35.145	23.374	17.583	76.102
3.	Total Luas Lahan (Are)	37.207	37.207	37.207	37.207
4.	Intensitas tanam (%)*	94,46	62,82	47,26	204,54

Catatan : *Intensitas tanam = (total luas tanam : total luas lahan) x 100 %.

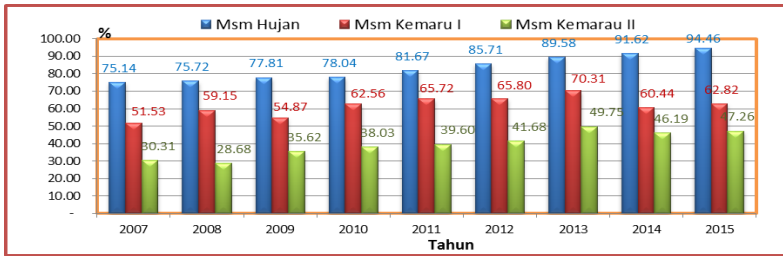
Intensitas tanam di setiap desa pada musim penghujan tidak terlalu bervariasi; sedang pada musim kemarau satu maupun musim kemarau kedua antar desa cukup bervariasi.

Variasi intensitas tanam tersebut sangat ditentukan oleh ketersediaan air pengairan di setiap desa (lihat Gambar 25).



Gambar 25. Intensitas Tanam Musiman di Setiap Desa Kawasan Tambang PT.NNT. Tahun 2015.

Pada Gambar 10 ditunjukkan bahwa intensitas tanam terendah pada musim penghujan terjadi di desa-desa Kecamatan Maluk, seperti Desa Benete, Bukit Damai, Maluk dan Pasir Putih. Sedang intensitas tertinggi terjadi di Desa Aik Kangkung, Desa Goa, Desa Beru dan Desa Belo. Sedangkan pada musim kemarau pertama, intensitas tanam terendah terjadi di Desa Talonang Baru, Sekongkang Bawah, Desa Benete dan Desa Beru; tertinggi di Desa Mantun, Tongo, Aik Kangkung dan Desa Belo. Pada musim kemarau kedua, intensitas tanam terendah terjadi di Desa Sekongkang Bawah, Telonang, Desa Benete dan Desa Beru; dan tertinggi di Desa Tongo. Variasi intensitas tanam musiman dan tahunan di setiap desa tersebut disebabkan perbedaan kondisi lahan dan ketersediaan air, serta ketekunan petani dalam melakukan kegiatan usahatani.



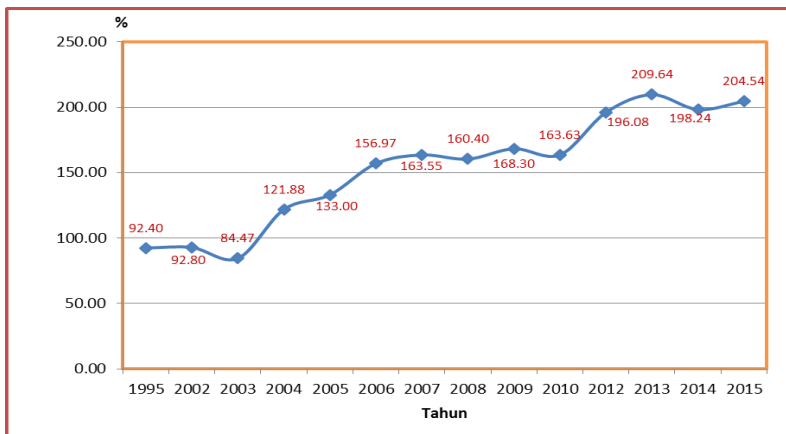
Gambar 26. Perkembangan Intensitas Tanam Musiman di Kawasan Tambang PT.NNT.Tahun 2007-2015.

Selama 9 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2007 sampai tahun 2015 intensitas tanam tahunan secara konsisten terus meningkat yang disebabkan oleh semakin meningkatnya intensitas tanam pada musim penghujan. Sedangkan intensitas tanam pada musim kemarau satu dan musim kemarau dua, pada dua tahun terakhir (2014-2015) cenderung lebih rendah dibandingkan tiga tahun sebelumnya (2011-2013) (lihat Gambar 26).

Kecenderungan penurunan intensitas tanam musim kemarau satu dan dua pada tahun 2014-2015 dibandingkan tahun 2011-2013 disebabkan karena mulai tanam pada musim hujan tahun 2014-2015 agak terlambat, yaitu sekitar bulan Januari, sehingga berdampak terhadap terbatasnya air hujan dan air pengairan pada musim kemarau satu dan musim kemarau dua. Namun demikian intensitas tanam pada musim hujan tahun 2014-2015 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan intensitas tanam pada tahun 2015 terutama disebabkan semakin gencarnya penanaman tanaman jagung oleh masyarakat lokal yang

dilaksanakan melalui program GPPTT (Gerakan Pengembangan Pertanian Tanaman Terpadu) atau program lainnya seperti program Pajale (Padi, Jagung, Kedele) yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang didukung oleh perusahaan tambang, sehingga lahan-lahan yang sebelumnya tidak ditanam atau merupakan lahan tidur ditanami jagung oleh masyarakat. Sementara tanaman-tanaman padi dan tanaman kedele yang terdapat dalam program Pejale, tidak banyak meningkatkan intensitas tanam. Bahkan tanaman kedele cenderung luas tanamnya semakin menyempit, kalah bersaing dibandingkan tanaman jagung dan tanaman kacang hijau. Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang perkembangan intensitas tanam di Kawasan Tambang dapat disimak pada Gambar 27.



Gambar 27. Perkembangan Intensitas Tanam Tahunan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995. 2002-2015

Tabel 72. Luas Tanam, Produksi dan Nilai Produksi Beberapa Tanaman Semusim yang Diusahakan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015

Jenis Tanaman	Luas Tanam (are)	Produksi (Kg)	Rata-2 Produksi (kg/are)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Produksi (Rp.000)
1. Padi	14.608	618.269	42,32	3.723	2.301.986
2. Kedelai	431	3.475	8,06	6.204	21.560
3. Kacang Hijau	3.359	27.137	8,08	12.082	327.862
4. Jagung	5.510	294.670	53,48	2.299	677.428
5. Kacang Tanah	250	3.650	14,60	7.603	27.750
6. Kacang Panjang	5	800	160,00	5.000	4.000
7. Cabe	42	1.530	36,43	5.471	8.370
8. Tomat	5	1.200	240,00	750	900
9. Mentimun	3	800	266,67	2.500	2.000
10. Wijen	100	810	8,10	15.000	12.150
11. Semangka	386	41.100	106,48	2.529	103.930
12. Ubi Jalar	150	3.705	24,70	2.190	8.115
13. Tembakau	110	860	7,82	43.721	37.600
Total Nilai Produksi					3.533.651

Jenis-jenis tanaman semusim yang diusahakan oleh masyarakat lokal sampel tidak banyak berubah dari tahun ketahun; pada tahun 2015 paling banyak dan luas adalah tanaman padi, kemudian jagung, kacang hijau, kedelai, semangka dan kacang tanah. Selain itu, sebagian kecil masyarakat juga ada yang menanam ubi jalar, tembakau, wijen, cabe, mentimum, kacang pajang dan tomat. Di luar petani sampel, juga dijumpai beberapa masyarakat lokal

yang menanam tanaman semusim lain seperti sawi, bayam dan melon.

Tanaman semusim yang pemasarannya sudah ke luar kawasan tambang, bahkan sampai Kota Mataram adalah semangka non-biji. Para pedagang dari Mataram biasanya membayar terlebih dahulu semangka-semangka petani, sehingga Koperasi Tunas Baru yang bergabung ke dalam Forum Komunikasi Koperasi Tani dan Kelompok Tani Lingkar Tambang (FK3LT) yang menyalurkan produk pertanian ke perusahaan catering PT.NNT seringkali tidak dapat membeli produk semangka petani, karena tidak mampu membayar langsung atau membayar lunas produk petani. Mereka baru bisa membayar setelah mendapat pembayaran dari perusahaan catering PT.NNT, tidak jarang sampai 1 bulan bahkan 2 bulan; disebabkan karena permodalannya yang terbatas.

Dalam beberapa tahun terakhir, juga diperkenalkan beberapa jenis tanaman baru, seperti lidah buaya oleh perusahaan tambang; buah naga, anggur hijau dan merah diperkenalkan oleh perusahaan Tropi dan tanaman sisal (sejenis pandan) dibina oleh PT. Sumbawa Agro. Pengembangan tanaman sisal dilakukan di Desa Aik Kankung, Desa Tatar dan Desa Tongo. Pada awalnya pengembangan tanaman sisal disambut baik oleh pemerintah desa dan masyarakat, tapi karena hasilnya tidak cepat dilihat (minimal 4 tahun), maka sebagian masyarakat yang lahannya ditanami tanaman sisal meminta

perusahaan untuk menggusur atau membersihkan lahannya dari tanaman sisal, sehingga luas tanam tanaman sisalnya yang sebelumnya lebih dari 100 hektar, pada tahun 2015 sudah jauh berkurang. Sebagian masyarakat lokal yang bertahan, mulai memanen tanamannya pada bulan Agustus-Nopember 2015 dengan tingkat produksi sekitar 64 ton/hektar dengan harga jual Rp. 300 - 360/kg kepada perusahaan pembina. Tingkat produksi tersebut dikatakan masih rendah, karena produktivitas normalnya adalah sekitar 90 ton/hektar. Rendahnya produktivitas sisal petani tersebut, selain merupakan hasil panen tahun pertama, juga disebabkan banyak tanaman petani yang rusak mendapat serangan hama babi dan ternak sapi. Karena setelah petani mengambil alih secara penuh pengelolaan tanaman sisal yang ada pada lahan usahatannya, maka pemeliharaan dan perawatan tanaman sangat kurang, jika dibandingkan dengan semasa masih dikelola dengan perjanjian sitem bagi hasil dengan perusahaan sisal.

Setelah ada petani yang panen dan menerima hasil penjualan, barulah masyarakat menyadari nilai ekonomi dari tanaman sisal; dan hal ini memotivasi petani untuk memelihara tanaman sisalnya yang masih tersisa; bahkan ada sebagian petani yang ingin menanam kembali. Pihak perusahaan juga masih terus memberikan pembinaan dan bantuan permodalan untuk biaya pemeliharaan berupa pupuk yang dibayar nanti pada saat panen. Pada tahun

2016, pihak perusahaan juga sedang melakukan pengembangan tanaman sisal di Desa Telonang Baru dengan menggunakan lahan konversi HPL (Hak Pengelolaan), tapi dalam prosesnya mendapat hambatan karena tanah tersebut diakui oleh masyarakat Telonang sebagai tanah adat.

Tabel 73. Luas Tanam, Produksi dan Nilai Produksi Beberapa Tanaman Tahunan yang Diusahakan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.

Jenis Tanaman	Jumlah Pelaku	Luas Tanam (are)	Jumlah Pohon / Rumpun	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp.000)
Kelapa	27	691	664	18.763	42.749
Mangga	49	1.141	1.035	14.610	57.440
Pisang	31	607	1.062	30.393	218.887
Nangka	7	62	65	300	300
Jambu Mete	10	443	582	950	5.900
Sawo	4	17	21	528	4.080
Kelengkeng	1	23	16	120	3.000
Alpukat	1	2	9	75	1.125
Sisal	6	480	5.353	81.000	28.740
Srikaya	1	20	5	-	*/
Jeruk	2	8	16	-	*/
Jati	28	2.472	15.052	-	*/
Mahoni	9	1.682	1.990	-	*/
Sisal	3	1.250	9.200	-	*/
Asam	2	200	1.800	-	*/
Kemiri	1	3	3	-	*/
Total Nilai Produksi (Rp.000)					362.221

Selain tanaman sisal, tanaman tahunan lain yang cukup diminati dan sudah mulai dikembangkan oleh masyarakat lokal adalah tanaman buah-buahan seperti mangga, pisang, nangka, jambu mete, sawo, jeruk, kelengkeng, kemudian tanaman perkebunan seperti kelapa, asam, kemiri; tanaman kayu-kayuan, seperti kayu jati dan kayu mahoni. Jenis tanaman tahunan yang sudah memberikan hasil dan yang

masih dalam proses pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 73.

Tanaman tahunan lain yang sudah diusahakan, tapi belum memberikan penghasilan kepada masyarakat sebenarnya cukup banyak, termasuk tanaman sengon dan tanaman kayu-kayuan yang lain. Tanaman kayu-kayuan cukup diminati oleh masyarakat, karena dipandang paling sesuai dengan kondisi alam kawasan; tapi karena masyarakat khawatir tidak bebas menjualnya (karena harus mendapat ijin atau surat keterangan minimal dari desa), menyebabkan sebagian masyarakat masih ragu untuk mengusahakannya.

b. Usaha Peternakan

Meskipun sampai saat ini usaha peternakan masih dipandang sebagai usaha sampingan oleh sebagian besar masyarakat lokal, tapi usaha ini tetap diakui merupakan bidang usaha yang sangat membantu dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat lokal, terutama pada saat-saat mendesak, dimana pendapatan dari sumber lain sulit didapat dan tidak tersedia dengan cepat. Berkurangnya pendapatan masyarakat lokal yang disebabkan oleh berhentinya operasi tambang tahun 2014 juga banyak terbantu dengan adanya usaha ternak yang dilakukan oleh masyarakat. Nilai penjualan ternak yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat lokal sampel pada tahun 2014

mencapai Rp. 1,142 milyar; dan setelah kegiatan tambang beroperasi kembali tahun 2015, ternak yang dijual berkurang dengan nilai penjualan sekitar Rp. 978 juta.

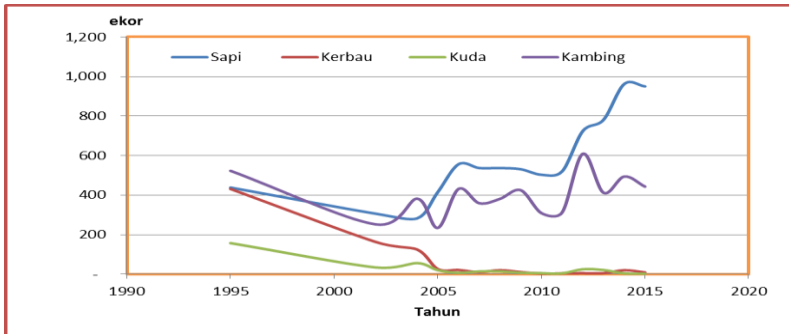
Kesadaran akan pentingnya usaha ternak sebagai penopang kehidupan ekonomi masyarakat, terlihat dari semakin banyaknya masyarakat lokal yang menginvestasikan kelebihan penghasilannya pada usaha ternak. Misalnya pada tahun 2014, dari 405 rumahtangga sampel, ditemukan 121 rumah tangga mengusahakan ternak sapi, 1 rumah tangga mengusahakan ternak kerbau, 3 rumah tangga ternak kuda, 47 rumah tangga ternak kambing /domba dan 22 rumah tangga ternak unggas. Kemudian pada tahun 2015, jumlah peternak sapi semakin meningkat menjadi sebanyak 133 rumah tangga, ternak kerbau tetap 1 rumah tangga, ternak kuda berkurang menjadi 1 rumah tangga dan ternak unggas meningkat menjadi 33 rumahtangga (lihat Tabel 74).

Tabel 74. Jumlah Ternak Yang Dimiliki dan Dijual oleh Rumah Tangga Masyarakat Lokal di Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.

Jenis Ternak	Jumlah Peternak	Musim Penghujan			Musim Kemarau		
		Dimiliki	Dijual	Nilai Jual	Dimiliki	Dijual	Nilai Jual
1. Sapi	133	950	55	290.800	837	117	592.700
2. Kerbau	1	9	2	6.000	10	2	7.000
3. Kuda	1	2	-	-	2	-	-
4. Kambing	50	443	7	6.550	508	40	39.850
5. Unggas	33	1.490	305	20.710	1.264	158	14.325
Total Nilai (Rp.000)				324.060			653.875

Meskipun jumlah peternak sapi dan kambing semakin meningkat pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, tapi jumlah sapi dan kambing yang dimiliki cenderung semakin berkurang. Ini disebabkan banyak ternak sapi dan kambing yang dijual pada masa berhentinya operasi tambang tahun 2014, sehingga berdampak terhadap pemilikan ternak pada tahun 2015. Akan tetapi setelah tambang beroperasi kembali tahun 2015, muncul peternak-peternak baru, sehingga jumlah peternak pada tahun 2015 lebih banyak daripada tahun 2014.

Pada Gambar 28 ditunjukkan perkembangan jumlah ternak yang dimiliki oleh rumah tangga masyarakat lokal sampel dari sejak sebelum tambang sampai tahun 2015.



Catatan: Data tahun 1995, 2002 s.d 2007 didasar atas hasil survai terhadap 350 rumah-tangga masyarakat lokal. Sedangkan data tahun 2008-2015 didasarkan hasil survai terhadap 405 rumah tangga masyarakat lokal.

Gambar 28. Perkembangan Jumlah Ternak Yang Dimilik Oleh Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 1995, 2002-2015.

Pada Gambar 28 di atas jelas terlihat bahwa sebelum tambang, ternak kambing paling banyak dimiliki oleh masyarakat lokal, sedangkan ternak sapi dan kerbau jumlahnya berimbang, berikutnya adalah ternak kuda. Pada masa itu ternak kuda jumlahnya cukup banyak, karena digunakan untuk sarana pengangkutan. Begitu masuk proyek tambang tahun 1997 yang diikuti dengan semakin tersedianya prasarana dan sarana transportasi (seperti sepeda motor, cidomo, truk dan mobil angkutan lain), berangsur-angsur ternak kuda semakin berkurang. Hal yang sama terjadi pada ternak kerbau, jumlahnya juga semakin berkurang, karena dianggap rawan dicuri dan nilai ekonominya dianggap lebih rendah daripada ternak sapi yang dalam beberapa tahun terakhir mendapat dukungan pengembangannya oleh pemerintah daerah melalui program BSS (Bumi Sejuta

Sapi). Sejak tahun 2005, populasi ternak sapi yang dimiliki oleh rumahtangga sampel selalu lebih banyak daripada ternak-ternak lain, termasuk ternak kambing/domba yang sebelum operasi tambang lebih banyak; dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun sampai tahun 2014 dan sedikit menurun tahun 2015. Berbeda dengan ternak kambing, jumlahnya cenderung berfluktuasi setiap tahun, karena jenis ternak ini cepat berkembang, tapi seringkali dijadikan hewan kurban, mudah dijual, rawan hama penyakit. Dalam beberapa tahun terakhir, hama yang paling banyak menyerang ternak kambing adalah anjing liar. Namun masalah utama yang dipandang paling menghambat pengembangan usaha ternak di kawasan tambang adalah masalah keamanan (pencurian). Banyak masyarakat yang menjual ternaknya, karena takut kecurian; dan masyarakat yang sudah kecurian, jarang yang mau kembali memelihara ternak.

c. Usaha Perikanan

Jumlah rumah tangga masyarakat lokal yang melakukan usaha di bidang perikanan tidak banyak terpengaruh dengan adanya perusahaan tambang. Jumlah masyarakat lokal yang melakukan kegiatan ini tidak banyak mengalami perubahan, termasuk peralatan-peralatan yang digunakan. Alat tangkap masih seperti tahun-tahun sebelumnya. yaitu berupa perahu/sampan, mesin ketinting, jaring dan pancing.

Jenis usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada tahun 2015 terdiri dari usaha perikanan laut, usaha perikanan air payau dan usaha perikanan air tawar, tapi jumlah masyarakat lokal yang melakukan usaha perikanan air payau dan perikanan air tawar terbatas; bahkan usaha budidaya rumput dalam 5 tahun terakhir tidak dilakukan lagi oleh masyarakat lokal di Kawasan Tambang.

Usaha penangkapan ikan laut dilakukan oleh masyarakat lokal yang tinggal di sepanjang pantai Jelenge, Benete, Pasir Putih, Sekongkang, Sejong, Senutuk, Pantai Tatar dan Telonang. Jumlah masyarakat lokal yang terlibat dalam usaha penangkapan ikan di laut pada tahun 2015 sebanyak 37 rumah tangga sama seperti tahun sebelumnya. Akan tetapi jumlah trip penangkapan ikan semakin meningkat dari rata-rata 9 kali setiap bulan menjadi rata-rata 15 kali setiap bulan. Intensitas nelayan melaut pada tahun 2015 juga lebih sering dibandingkan tahun 2013 yang rata-rata 13 kali setiap bulan. Peningkatan intensitas melaut nelayan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa nelayan sudah mulai menekuni kegiatan melaut. Pada tahun 2014, selain melakukan kegiatan melaut, para nelayan juga banyak yang melakukan pencarian batu akik yang sedang booming pada waktu itu. Setelah tidak banyak memberikan hasil dan booming batu akik mulai mereda, para nelayan kembali menekuni usaha penangkapan ikan secara lebih intensif.

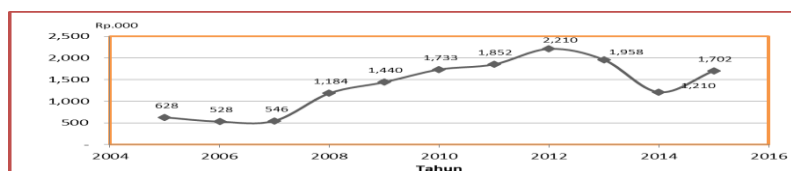
Lama penangkapan dan jumlah tangkapan setiap trip tidak berubah yaitu rata-rata 7 jam setiap hari dengan hasil rata-rata 8 kg; akan tetapi harga tangkapan meningkat cukup tajam dari rata-rata Rp. 26 ribu/ kg menjadi rata-rata Rp. 35 ribu/kg, sedikit lebih tinggi dari harga ikan tahun 2013 yaitu rata-rata Rp. 33 ribu/kg. Dari data harga ini jelas menunjukkan bahwa keberadaan atau beroperasinya perusahaan tambang menyebabkan harga komoditi pertanian, khususnya ikan semakin meningkat; dan hal inilah yang menjadi salah satu sebab pendapatan rumah tangga nelayan pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 selain intensitas melautnya yang lebih intensif. Pada tahun 2015, rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan setiap bulan adalah sebesar Rp. 1,702 juta; pada musim penghujan rata-rata sebesar Rp. 1,859 juta, lebih tinggi dibandingkan musim kemarau sebesar Rp. 1,566 juta setiap bulan (Tabel 75)

Penurunan pendapatan nelayan tersebut jelas bukan disebabkan penurunan harga ikan, tapi lebih disebabkan penurunan aktivitas dan jumlah hasil tangkapan nelayan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kegiatan penangkapan ikan sebagai kegiatan sampingan bahkan kegiatan marginal, sehingga bila ada kesempatan lain yang memberikan harapan penghasilan yang lebih tinggi, maka kegiatan sebagai nelayan akan ditinggalkan, sebagaimana yang terjadi pada masa boming batu akik tahun 2014.

Tabel 75. Aktivitas dan Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Laut. Tahun 2015

Uraian	Musim Hujan (musim Barat)	Musim Kemarau (Musim Timur)	Agregat Tahun 2015
1. Jumlah Pelaku (RTn)	37	37	37
2. Nilai Investasi/RTn (Rp.000)	16.392	16.395	16.394
3. Jumlah Trip/Bulan	15	14	15
4. Jumlah jam/trip	7	8	7
5. Hasil tangkapan/trip (Kg)	8	8	8
6. Harga (Rp/Kg)	35	34	35
7. Nilai hasil/trip (Rp.000)	234	227	231
8. Biaya operasional/trip (Rp.000)	84	81	83
9. Pendapatan/trip (Rp.000/RTn)	150	146	148
10. Pendapatan /Bulan (Rp.000)	1.839	1.566	1.702

Jika pendapatan nelayan tahun tahun 2015 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tampak lebih rendah dibandingkan pendapatan nelayan tahun 2013 lebih-lebih tahun 2012 yang mencapai rata-rata sebesar Rp. 2,21 juta setiap bulan setiap rumah tangga nelayan (lihat Gambar 29).



Gambar 29. Perkembangan Pendapatan Rumah tangga Nelayan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Laut, Tahun 2005-2015

Selain usaha pengangkapan ikan di laut, pada tahun 2015 ditemukan 4 rumah tangga yang melakukan usaha perikanan air payau, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 2 rumah tangga. Usaha perikanan air payau tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal Desa Anyar Kecamatan Jereweh. Rata-rata pendapatan rumah tangga dari usaha perikanan air payau adalah sebesar Rp. 909 ribu setiap bulan, pada musim penghujan rata-rata sebesar Rp. 1,15 juta dan pada musim kemarau rata-rata sebesar Rp. 663 ribu perbulan. Aktivitas dan pendapatan nelayan air payau terdapat pada Tabel 76.

Tabel 76. Aktivitas dan Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Air Payau, Tahun 2015

Uraian	Musim Hujan (musim Barat)	Musim Kemarau (Musim Timur)	Agregat Tahun 2015
1. Jumlah Pelaku (RTn)	4	1	3
2. Luas Tambak (Are)	86	75	81
3. Proses Produksi (Kali/musim)	2	1	2
4. Produksi (Kg)	185	162	174
5. Harga (Rp/Kg)	30	30	30
6. Nilai hasil/Proses (Rp.000)	18.050	16.950	17.500
7. Biaya operasional/Proses (Rp.000)	11.120	12.973	12.046
8. Pendapatan/Proses (Rp.000/RTn)	6.930	3.978	5.454
9. Pendapatan /Musim (Rp.000)	6.930	3.978	5.454
10. Pendapatan/Bln (Rp.000)	1.150	663	909

Sementara jumlah rumah tangga masyarakat lokal yang melakukan usaha perikanan air tawar pada tahun 2015 adalah sebanyak 2 rumah tangga, pada tahun 2014 ditemukan hanya 1 rumah tangga. Kegiatan ini juga dilakukan oleh masyarakat lokal Desa Dasan Anyar. Rata-rata pendapatan rumah tangga dari usaha perikanan air tawar adalah sekitar Rp. 665 ribu setiap bulan, pada musim penghujan sekitar Rp. 430 ribu dan pada musim kemarau sekitar Rp.900 ribu perbulan. Aktivitas dan pendapatan rumah tangga masyarakat lokal dari usaha perikanan air tawar terdapat pada Tabel 77.

Tabel 77. Aktivitas dan Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Usaha Perikanan Air Tawar, Tahun 2015

Uraian	Musim Hujan (musim Barat)	Musim Kemarau (Musim Timur)	Agregat Tahun 2015
1. Jumlah Pelaku (RTn)	2	2	2
2. Nilai Investasi (Rp.000)	550	550	550
3. Jumlah Trip/Musim	10	12	11
4. Jumlah jam/trip	5	6	5
5. Hasil tangkap/trip (Kg)	3	4	3
6. Harga (Rp/Kg)	25	25	25
7. Nilai hasil/trip (Rp.000)	63	99	81
8. Biaya operasional/trip (Rp.000)	20	24	22
9. Pendapatan/Proses (Rp.000/RTn)	43	75	59
10. Pendapatan /Musim (Rp.000)	2.580	5.400	3.990
11. Pendapatan/Bln (Rp.000)	430	900	665

d. Usaha Industri Kerajinan Rumah tangga

Usaha industry kerajinan mulai berkembang sejak masuknya proyek tambang, yang didukung dengan berkembangnya sektor pariwisata. Sebelumnya, usaha ini merupakan usaha sampingan yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat ekonomi lemah. Setelah masuk proyek tambang, usaha ini berkembang pesat tidak hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan masyarakat ekonomi lemah, tapi juga sudah menjadi pekerjaan pokok sebagian masyarakat lokal. Paling tidak terdapat 17 jenis usaha industry kerajinan yang pernah dilakukan oleh masyarakat lokal, tapi yang bertahan dan muncul pada tahun 2015 adalah sebanyak 13 jenis dan pada tahun 2014 adalah sebanyak 12 jenis. Jenis industry kerajinan yang tidak dilakukan lagi oleh masyarakat lokal pada tahun 2015 adalah industry kapur, industry sandal, alang-alang dan telur asin; dan yang masih bertahan adalah industry batu bata, industry jala, gula merah, meubel, makanan jadi, tahu, tempe, minyak jereweh, pandai besi dan industry beton; dan yang baru muncul tahun 2014 sampai tahun 2015 adalah pengolahan logam mulia dan kerajinan anyaman; dan baru muncul kembali pada tahun 2015 adalah industry minyak kelapa. Total nilai investasi yang dikeluarkan oleh rumah tangga sampel untuk usaha industry kerajinan mencapai Rp. 920 juta dengan jumlah pelaku sebanyak 46 rumah tangga perajin atau sekitar 11,36 persen dari 405 rumah tangga sampel. Total nilai omzet selama tahun 2015

mencapai lebih Rp. 5,6 milyar; pada musim penghujan sekitar Rp. 2,7 milyar dan pada musim kemarau sekitar Rp. 2,9 milyar.

Tabel 78. Jenis, Nilai Investasi dan Omset Usaha Industri Kerajinan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.

Jenis Industri Kerajinan RT	Jumlah RTi	Total Investasi (Rp.000)	Total Omzet (Rp.000)		
			M.Hujan	M.Kemarau	Tahun 2015
1. Industri Bata	18	765.647	1.582.950	1.885.519	3.468.469
2. Jala	2	1.125	24.050	22.275	46.325
3. Gula Merah	2	2.340	27.000	29.000	56.000
4. Meubel	5	265.500	730.300	838.200	1.568.500
5. Kue/mkn Jadi	4	20.587	126.420	153.013	279.433
6. Tahu	3	202.500	722.873	722.873	1.445.745
7. Tempe	4	77.500	584.460	484.758	1.069.218
8. Minyak Kelapa	1	25.000	60	3	63
9. Minyak Jereweh	1	500	3.000	5.700	8.700
10. Pandai Besi	2	13.220	54.375	67.425	121.800
11. Ind. Beton	2	11.500	78.375	90.750	169.125
12. Pengolahan Logam Mulia	1	31.840	25.603	25.603	51.206
13. Pengolahan Emas	1	1.000	1.260	10.880	12.140
Total 2015	46	920.319	2.740.547	2.900.486	5.641.033
Tahun 2014	50	634.699	2.423.795	2.856.505	5.280.300
Tahun 2013	44	653.800	1.763.046	2.043.810	3.806.856

Industri kerajinan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat lokal adalah industry batu bata, yaitu sebanyak 18 rumah tangga (39,13%) dengan total investasi sebesar Rp. 766 juta dan total omzet sekitar Rp.3,5 milyar. Kemudian industry permeubelan sebanyak 5 rumah tangga (10,87%) dengan total investasi sekitar Rp. 266 juta dan total

omzet sekitar Rp. 1,6 milyar. Selanjutnya adalah pada kegiatan agroindustri, yaitu agroindustri makanan jadi sebanyak 4 rumah tangga (8,70%) dengan total investasi sekitar Rp. 21 juta dan nilai omzet sekitar Rp. 279 juta. Agroindustri tempe 4 rumah tangga (8,70%) dengan investasi sekitar Rp. 78 juta dan total omzetnya mencapai sekitar Rp. 1,1 milyar; agroindustri tahu 3 rumah tangga (6,52%) dengan total investasi Rp. 203 juta dan total omzet sekitar Rp. 1,4 milyar. Sementara agroindustri lokal, seperti minyak jerekeh, minyak kelapa dan gula aren, kerepek pisang, kerepek ubi yang banyak mendapat dukungan dari perusahaan tambang tidak banyak berkembang, karena kalah bersaing dengan produk sejenis dari luar kawasan yang tidak bisa dibendung kehadirannya di kawasan tambang.

e. Usaha Dagang

Pada tahun 2015 usaha dagang yang dilakukan oleh rumah tangga sampel masyarakat lokal adalah sebanyak 11 jenis; yang paling banyak adalah usaha dagang dalam bentuk kios sebanyak 62 rumah tangga (51,67%), kemudian warung 20 rumah tangga (16,67%), pertokoan dan pedagang bakulan masing-masing 15 rumah tangga (12,50%) dan usaha kantin 2 rumah tangga (10%). Sedangkan usaha dagang yang lain seperti pedagang gorengan, pedagang ayam potong, pedagang barang bekas, pedagang hasil pertanian, pedagang pakaian, dan pedagang pasir masing-masing hanya 1 rumah tangga. Omzet usaha

yang paling besar berasal dari usaha dagang dalam bentuk kios, kemudian usaha pertokoan, warung, bakulan dan usaha hasil pertanian. Sementara usaha dagang yang lain omzetnya kurang Rp. 100 juta. Secara keseluruhan nilai omzet dari usaha dagang pada tahun 2015 setiap bulan rata-rata sekitar Rp. 3,04 milyar dengan jumlah pelaku sebanyak 120 rumah tangga (lihat Tabel 79).

Tabel 79. Jenis. Investasi dan Omset Usaha Dagang Masyarakat Lokal Tambang PT.NNT, Tahun 2015.

Jenis Usaha Dagang	Jumlah RTd	Total Investasi (Rp.000)	Nilai Omzet (Rp.000/Bln)		
			M.Hujan	M.Kemarau	Rata-Rata
Toko	15	1.196.050	729.572	852.335	790.954
Kios	62	1.522.479	1.244.620	1.389.788	1.317.204
Warung	20	230.050	313.501	363.206	338.354
Bakulan	15	50.431	235.374	260.670	248.022
P. Gorengan	1	1.500	4.810	4.810	4.810
P. ayam potong	1	35.000	46.550	57.600	52.075
P. Barang Bekas	1	5.000	3.900	3.900	3.900
P. Pakaian	1	25.000	33.000	39.470	36.235
P. Hsl Pertanian	1	225.000	213.600	213.600	213.600
P.Pasir	1	17.500	25.600	-	12.800
P.Kantin	2	1.200	17.550	17.550	17.550
Total 2015	120	3.309.209	2.868.077	3.202.930	3.035.504
Tahun 2014	113	2.269.744	3.098.856	3.486.106	3.292.481
Tahun 2013	114	3.690.750	3.168.630	3.562.044	3.365.337

Jika dibandingkan dengan kondisi dua tahun sebelumnya, jenis dan jumlah pelaku usaha dagang pada tahun 2015 semakin meningkat, tapi omzet usaha semakin menurun. Pada tahun 2013, jenis

usaha dagang yang dilakukan oleh masyarakat lokal sampel adalah sebanyak 7 jenis, pelakunya sebanyak 114 rumah tangga dengan total omzet sekitar Rp. 3,4 milyar. Pada tahun 2014 jenis usaha yang dilakukan semakin meningkat menjadi 9 jenis, tetapi pelakunya menurun menjadi 113 rumah tangga, begitu juga nilai omzetnya menurun menjadi sekitar Rp. 3,3 milyar (lihat Tabel 79).

Penurunan nilai omzet perdagangan di kawasan tambang tahun 2015, menurut informasi dari beberapa tokoh kunci di Kecamatan Maluk disebabkan adanya kebijakan penghentian sementara operasi tambang pada akhir tahun 2014 yang berdampak sampai tahun 2015; dan adanya kebijakan perusahaan tambang yang menerapkan sistem kerja 3-4 dan 4-4, menyebabkan para karyawan perusahaan tambang jarang berbelanja di kawasan tambang. Hal ini juga diperkirakan sebagai salah satu sebab beberapa toko tutup beroperasi, dan beralih pada usaha dagang yang lain. Masyarakat lokal yang melakukan usaha dagang tersebut sebagian besar terdapat di Kecamatan Maluk dan beberapa di Kecamatan Sekongkang dan Kecamatan Jereweh (lihat Lampiran 10).

f. Usaha Jasa

Jenis usaha yang paling banyak dilakukan masyarakat lokal di kawasan tambang PT.NNT adalah usaha jasa. Paling tidak terdapat 29 jenis usaha jasa yang pernah dan sedang dilakukan oleh masyarakat

lokal, beberapa jenis menghilang dan beberapa jenis muncul belakangan. Pada tahun 2015, jenis usaha jasa yang dilakukan oleh masyarakat lokal sampel adalah sebanyak 21 jenis. Jenis usaha jasa yang tidak dilakukan lagi pada tahun 2015 adalah penyewaan video dan jasa sablon, jasa pembuatan sumur bor, chainsaw, penyewaan speed boat, laundry, les privat, jasa pijat dan jasa arsitektur.

Jenis usaha jasa yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal adalah jasa di bidang transportasi (angkutan ojek, bekhur dan angkutan barang atau truk), jasa pertukangan (tukang bangunan dan tukang jahit), jasa pengolahan hasil pertanian (huller), jasa perbengkelan/las dan jasa penyewaan handtractor; sedangkan jenis jasa lainnya hanya dilakukan oleh 1-2 rumah tangga. Secara keseluruhan jumlah masyarakat lokal yang terlibat dalam bidang jasa adalah sebanyak 81 rumah tangga dengan total nilai omzet setiap bulan rata-rata sekitar Rp. 187 juta (Tabel 80).

Usaha ekonomi masyarakat dalam bidang jasa cukup terpengaruh dengan kebijakan penghentian sementara operasi tambang tahun 2014. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam usaha jasa menurun dari 87 rumah tangga (21,48%) tahun 2013 menjadi 75 rumah tangga (18,52%) tahun 2014. Setelah tambang beroperasi kembali tahun 2015, jumlah pelaku usaha jasa meningkat kembali menjadi 81 rumah tangga (20%). Hal yang sama juga terjadi pada

omzet usahanya, setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 248 juta tahun 2013, menurun menjadi Rp. 119 juta tahun 2014 dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi sekitar Rp. 187 juta. Sebagaimana usaha dagang, penurunan omzet usaha jasa tahun 2014 dan tahun 2015 adalah merupakan dampak kebijakan penghentian sementara operasi tambang pada akhir tahun 2014, dan karena adanya kebijakan penerapan sistem kerja 4-4 karyawan tambang.

Tabel 80. Jenis, Nilai Investasi dan Omzet Usaha Jasa Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.

Jenis Usaha Jasa	Jumlah RTj	Total Investasi (Rp.000)	Nilai Omzet (Rp.000/Bln)		
			M.Hujan	M.Kemarau	Agregat
Ojek	26	333.060	27.749	30.157	28.953
Tk Jahit (konveksi)	3	8.650	7.505	8.032	7.768
Tk. Bangunan	10	25.214	16.072	18.136	17.104
Sandro/Dukun	2	500	1.425	5.700	3.563
Bengkel/Las	5	11.850	7.728	6.790	7.259
Benhur	8	87.867	12.047	14.888	13.468
Traktor	4	62.000	9.515	994	5.254
Angk. Truk	3	760.000	29.600	29.900	29.750
Hueller	7	146.090	21.212	22.920	22.066
Foto Copy	1	10.000	6.000	6.000	6.000
Sound System	1	35.000	14.000	14.000	14.000
Tangkap Ternak	1	-	150	150	150
TV cable/sewa PS	1	15.000	1.040	1.400	1.220
Instalator Listrik	1	300	450	900	675
Barang Bekas	1	5.000	1.200	1.200	1.200
P Wisata	1	-	1.250	1.250	1.250
J Warnet	1	25.000	1.050	1.050	1.050
Rent Mobil/Motor	2	444.000	11.050	12.350	11.700

Servis Komputer	1	87.500	3.750	3.750	3.750
Sewa Planter	1	2.500	2.500	-	1.250
G Logam Mulia	1	45.000	9.600	9.600	9.600
Total 2015	81	2.104.531	184.893	189.167	187.030
Tahun 2014	75	2.250.150	181.725	176.850	179.288
Tahun 2013	87	2.982.969	239.685	248.994	244.340

Masyarakat lokal yang melakukan usaha jasa tersebut, tersebar di semua desa di kawasan tambang mulai dari Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh sampai Desa Telonang Baru Kecamatan Sekongkang; paling banyak terdapat di Kecamatan Maluk.

g. Usaha Pencarian Hasil Hutan

Pada tahun 2015, usaha pencaharian hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal sampel meliputi usaha berburu binatang, berburu madu, mengumpulkan bambu dan mengumpulkan kayu bakar; sedangkan pengumpulan rotan yang biasa dilakukan sebelum masuk proyek tambang, sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat lokal. Diperkirakan tanaman rotan sudah jarang atau tidak ada lagi di kawasan tambang, sebagaimana kayu gaharu.

Kegiatan usaha pencaharian hasil hutan merupakan pekerjaan sampingan masyarakat lokal, sebagian besar dilakukan pada musim kemarau pada saat kegiatan di lahan sawah mulai berkurang. Pada tahun 2015, jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan pencaharian hasil hutan sebanyak 6 rumah

tangga pada musim penghujan dan 10 rumah tangga musim kemarau. Hasil penjualan atau omzet usaha pencaharian hasil hutan selama tahun 2015 adalah sekitar Rp. 89 juta; paling banyak diperoleh dari hasil pengumpulan bambu, kemudian hasil pengumpulan kayu bakar; sedangkan dari hasil pemburuan madu dan binatang hanya menghasilkan masing-masing sekitar Rp. 8,1 juta dan 4,8 juta (Tabel 81).

Tabel 81. Jenis dan Omset Usaha Pencarian Hasil Hutan Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.

Jenis Usaha Hutan	Jumlah Pelaku(RTh)		Total Omzet (Rp.000)		
	M.Hujan	M.Kemarau	M.Hujan	M.Kemarau	Total
1. Berburu Binatang	-	1	-	4.800	4.800
2. Berburu Madu	1	3	1.800	6.300	8.100
3. Mengumpulkan Bambu	3	4	21.267	42.500	63.767
4. Mengumpulkan K. Bakar	2	2	5.520	6.440	11.960
Total 2015	6	10	28.587	60.040	88.627
Tahun 2014	11	7	27.533	20.461	47.994
Tahun 2013	2	3	2.408	4.875	7.283

Masyarakat lokal yang melakukan pencarian hasil hutan berasal dari Desa Belo, Benete, Mantun, Maluk, Sekongkang Atas, Tongo dan Desa Telonang Baru. Khusus kegiatan berburu dilakukan oleh masyarakat lokal Desa Telonang, Pencarian lebah madu oleh masyarakat Desa Benete, Sekongkang Atas dan Desa Tongo; pengumpulan bambu hutan dan kayu bakar oleh masyarakat Desa Benete, Mantun dan Maluk. Aktivitas dan pendapatan masyarakat lokal yang berasal dari pencarian hasil hutan tidak

terlalu dianggap sebagai pekerjaan seperti sebelumnya.

Perkembangan usaha pencaharian hasil hutan tidak menentu dan sulit diramalkan, karena usaha ini tidak hanya bermotif ekonomi, tapi lebih bermotif rekreasi dan melanjutkan hobi. Pada tahun 2013 ditemukan 2 rumah tangga yang melakukan kegiatan ini pada musim penghujan dan 3 rumah tangga pada musim kemarau dengan total hasil penjualan atau omzet usaha sebesar Rp. 7,28 juta. Pada tahun 2014 jumlah pencari hasil hutan meningkat menjadi 11 rumah tangga pada musim penghujan dan 7 rumahtangga pada musim kemarau dengan omzet usaha sebesar Rp. 43,46 juta; dan pada tahun 2015 sedikit menurun, tapi dengan omzet usaha yang semakin meningkat menjadi Rp. 88,63 juta.

Usaha pencaharian hasil hutan tidak banyak terpengaruh dengan kebijakan perusahaan tambang yang menghentikan operasi tambang maupun kebijakan pengaturan jadwal kerja para karyawannya.

h. Buruh Harian.

Masyarakat lokal yang melakukan kegiatan berburuh harian pada tahun 2015 adalah sebanyak 98 rumah tangga atau sekitar 24,20 persen dari 405 rumah tangga sampel; paling banyak pada kegiatan berburuh tani sebanyak 65 KK (66,33%), kemudian berburuh bangunan 20 KK (20,41%), buruh cuci 6 KK (6,12%) dan buruh tali serabut kelapa 3 KK (3,06%). Selain itu juga ada yang melakukan kegiatan buruh

shift down, kondektur dan buruh angkutan barang, tapi hanya dilakukan oleh 1 dan 2 anggota rumah tangga. Pada musim penghujan, jumlah masyarakat lokal yang menjadi buruh harian semakin berkurang, karena semakin terbatasnya kegiatan berburuh pada sektor pertanian. Total penghasilan masyarakat setiap bulan juga semakin berkurang dari Rp. 75,9 juta pada musim penghujan menjadi Rp. 65,3 juta pada musim kemarau (lihat Tabel 82)

Masyarakat lokal yang melakukan kegiatan berburuh harian terdapat di semua desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berburuh tidak lagi menjadi pekerjaan tabu bagi masyarakat lokal, sebagaimana sebelum tambang; akan tetapi kegiatan ini baru dilakukan bila pekerjaan lain yang lebih menguntungkan tidak tersedia.

Kegiatan berburuh harian juga tampaknya terpengaruh dengan kebijakan perusahaan tambang yang menghentikan sementara operasi tambang pada tahun 2014. Pada tahun 2013 jumlah masyarakat lokal yang melakukan kegiatan berburuh sebanyak 83 KK (20,49%), kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 105 KK (25,93%) dan setelah tambang beroperasi kembali tahun 2015, jumlah masyarakat lokal yang melakukan pekerjaan berburuh harian menurun kembali menjadi 98 KK (24,20%). Menurut tokoh masyarakat yang menjadi informan kunci di Kecamatan Maluk, bahwa kebijakan perusahaan

tambang yang menghentikan sementara operasi tambang tersebut,

Tabel 82. Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Berburuh Harian, Tahun 2015.

Jenis Pekerjaan Buruh Harian	Musim Hujan			Musim Kemarau		
	Jumlah Pelaku	Hari Kerja/Bulan	Penghasilan Rp.000/bulan	Jumlah Pelaku	Hari Kerja/Bulan	Penghasilan Rp.000/bulan
1. Buruh tani	65	13	45.823	55	11	33.950
2. Buruh bangunan	20	12	19.721	20	13	21.183
3. Buruh Cuci	6	23	6.008	6	23	6.008
4. Kondaktur	1	5	500	1	7	700
5. Buruh Tali Serabut Kelapa	3	25	2.625	3	25	2.625
6. Buruh Shift Down	2	3	1.034	2	2	700
7. Buruh angkut barang	1	7	175	1	7	175
Total 2015	98	13	75.886	88	13	65.342
Tahun 2014	105	18	78.120	79	21	63.990
Tahun 2013	83	13	66.732	81	14	71.118

menyebabkan banyak usaha masyarakat lokal yang mengalami kerugian, terutama usaha dagang dan usaha jasa, sehingga banyak diantara mereka yang terpaksa menutup usahanya dan melakukan pekerjaan lain, meskipun jadi buruh harian dengan upah yang rendah. Hal inilah yang diperkirakan sebagai faktor penyebab meningkatnya jumlah buruh harian pada tahun 2014 dan masih berlanjut sampai tahun 2015 meskipun ada kecenderungannya semakin menurun. Tapi di lain pihak rata-rata penghasilan masyarakat setiap bulan dan setiap keluarga buruh harian semakin menurun, yaitu dari

Rp. 841 ribu tahun 2013 turun menjadi Rp. 777 ribu tahun 2014 dan turun lagi menjadi 758 ribu tahun 2015.

Secara teoritis meningkatnya jumlah masyarakat lokal bekerja sebagai buruh harian umumnya disebabkan karena permintaan akan tenaga buruh yang semakin meningkat, atau upah buruh yang semakin meningkat, sehingga mendorong angkatan kerja masyarakat lokal untuk bekerja sebagai buruh harian. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah rumah tangga masyarakat lokal yang bekerja sebagai buruh harian pada tahun 2014 disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi, sehingga mereka bersedia melakukan pekerjaan sebagai buruh harian meskipun dengan upah yang lebih rendah. Ini artinya kebijakan pemberhentian sementara operasi tambang tahun 2014 menyebabkan meningkatnya jumlah rumah tangga masyarakat lokal menjadi buruh harian.

Kegiatan yang cukup banyak menyerap tenagakerja buruh, terutama buruh perempuan adalah industri pembulatan tali serabut kelapa (coconet) yang terdapat di Kecamatan Maluk. Jumlah masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan tersebut pada awal perekrutan mencapai 60 KK (3 KK diantaranya menjadi sampel dalam penelitian ini). Namun sayangnya bahan baku dari usaha ini, yaitu berupa serabut kelapa masih didatangkan dari luar,

yaitu dari Kabupaten Lombok Utara, sehingga tidak memiliki efek yang menguntungkan bagi petani kelapa yang cukup banyak jumlahnya di kawasan tambang.

i. Kegiatan Sebagai Karyawan Swasta.

Masyarakat lokal sampel yang bekerja sebagai karyawan swasta pada tahun 2015 adalah sebanyak 135 orang atau sekitar 33,33% dari rumah tangga sampel; sebanyak 64 orang atau sekitar 15,80% diantaranya bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang PT.NNT, 34 orang atau 8,40% bekerja pada perusahaan sub-kontraktor PT.NNT dan 37 orang atau 9,14% sisanya bekerja pada perusahaan lainnya. Total penghasilan masyarakat lokal yang diperoleh dari kegiatan sebagai karyawan swasta setiap bulan mencapai Rp. 981,3 juta pada musim penghujan dan 1,015 milyar pada musim kemarau atau rata-rata sebesar Rp. 998,10 juta setiap bulan (lihat Tabel 83).

Bila penghasilan dari sektor swasta ini diperhitungkan setiap tenaga kerja, maka penghasilan sebagai karyawan perusahaan tambang adalah sekitar Rp. 12,5 juta/bulan; jauh lebih besar dibandingkan penghasilan sebagai karyawan sub-kontraktor perusahaan tambang, yaitu sekitar Rp. 8,3 juta/bulan; lebih-lebih bila dibandingkan dengan penghasilan perusahaan swasta lain yang hanya sekitar Rp. 2 juta setiap bulan. Sementara jika dibandingkan hari kerjanya, maka yang paling lama adalah perusahaan swasta lain yang tidak terkait dengan perusahaan tambang, yaitu rata-rata selama

19 hari; sedangkan perusahaan tambang adalah rata-rata 18 hari dan perusahaan subkontraktor tambang rata-rata 15 hari setiap bulan.

Tabel 83. Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Sebagai Karyawan Swasta, Tahun 2015.

Jenis Pekerjaan karyawan	Musim Hujan			Musim Kemarau		
	Jumlah Pelaku	Hari Kerja /Bln	Penghsln Rp.000	Jumlah Pelaku	Hari Kerja/Bl n	Penghsln Rp.000
Karyawan PT.NNT	64	18	784.460	64	18	818.029
Sub Kontraktor PT.NNT	34	15	125.165	34	15	125.165
Perusahaan lain	36	19	71.673	37	19	71.716
Total 2015	134	17	981.298	135	17	1.014.910
Tahun 2014	140	20	768.880	140	20	768.180
Tahun 2013	137	20	798.025	137	20	801.039

Jika dibandingkan dengan kondisi 2 tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja masyarakat lokal yang bekerja pada perusahaan swasta mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 139 orang atau sekitar 34,32%, yaitu pada perusahaan tambang 75 orang (18,52%), sub kontraktor tambang 28 orang (6,91%) dan perusahaan lain 36 orang (8,89%); pada tahun 2014 sebanyak 140 orang atau sekitar 34,57%, yaitu pada perusahaan tambang 63 orang (15,56%), sub kontraktor tambang 27 orang (6,67%) dan perusahaan lain 50 orang (12,35%). Sedangkan pada tahun 2015 adalah sebanyak 135 orang atau sekitar 33,33%, yaitu perusahaan tambang

64 orang (15,80%), sub kontraktor tambang 34 orang (9,14%) dan perusahaan lain 37 orang (9,14%).

Dari data di atas jelas menunjukkan bahwa masyarakat lokal yang menjadi karyawan perusahaan tambang menurun pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini merupakan dampak kebijakan perusahaan tambang yang menghentikan sementara operasi tambang pada tahun 2014, yang diikuti dengan kebijakan memberhentikan secara permanen atau sementara sebagian karyawannya. Meskipun para karyawan yang diberhentikan secara permanen diberikan pesangon yang cukup besar atau diberikan gaji pokok bagi karyawan yang diberhentikan sementara, tapi kebijakan tersebut memberikan pelajaran dan kesadaran tersendiri bagi masyarakat lokal bahwa menjadi karyawan perusahaan tambang adalah bersifat sementara, yaitu selama operasi tambang berlangsung. Karena itu menurut informasi dari tokoh masyarakat setempat, setelah di keluarkan kebijaksanaan tersebut, masyarakat lokal yang menjadi karyawan perusahaan tambang yang masih aktif maupun yang sudah berhenti secara permanen atau sementara kembali menekuni pekerjaan semula atau merintis pekerjaan baru di luar kegiatan tambang.

j. Kegiatan Sebagai Pegawai Pemerintah

Pekerjaan yang cukup banyak dilakukan oleh anggota rumah tangga masyarakat lokal sampai tahun 2015 adalah pekerjaan sebagai pegawai pemerintah,

baik sebagai pegawai negeri, pegawai honor, Polisi atau ABRI. Hal ini dampak dari pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat yang sebelum tahun 2003 masih bergabung dengan Kabupaten Sumbawa. Dari 405 rumah tangga sampel, dijumpai sebanyak 97 rumah tangga (23,95%) masyarakat lokal memiliki anggota bekerja sebagai pegawai pemerintah, yaitu 51 rumah tangga (12,59%) sebagai pegawai negeri, 46 rumah tangga (11,36%) sebagai pegawai honorer dan 1 rumah tangga (2,47%) sebagai Polisi/TNI (Tabel 84).

Tabel 84. Jenis dan Penghasilan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Kegiatan Sebagai Pegawai Pemerintah, Tahun 2015.

Jenis Pekerjaan Pegawai Pemerintah	Musim Hujan			Musim Kemarau		
	Jumlah Pelaku	Hari Kerja /Bln	Penghsln Rp.000/bl n	Juml ah Pelaku	Hari Kerja /Bln	Penghsln Rp.000/bl n
PNS	51	25	353.870	51	25	397.681
Polisi/TNI	1	24	2.700	1	24	2.700
Honorer	45	22	42.534	46	22	45.615
Total 2015	97	24	399.104	98	24	445.996
Tahun 2014	97	24	391.007	97	24	391.007
Tahun 2013	96	25	438.240	96	25	453.312

Hari kerja setiap bulan antar pegawai pemerintah relatif sama, tetapi penghasilan yang diperoleh sangat berbeda, khususnya antara pegawai negeri, polisi/TNI dengan pegawai honorer. Tapi perbedaan ini biasanya bersifat sementara, karena menjadi pegawai honorer sering merupakan langkah awal untuk menjadi pegawai negeri atau menjadi Polisi dan TNI. Seperti yang ditemukan pada tahun 2013-2015, sebagian

pegawai negeri yang ditemukan berasal dari pegawai honorer.

Jumlah rumah tangga masyarakat lokal yang memiliki anggota sebagai pegawai pemerintah selama tahun 2013-2015 hanya bertambah 1 rumah tangga setiap tahun, yaitu 96 orang (23,70%) tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 97 orang (23,95%) tahun 2014 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 98 orang (24,20%) .

Dampak kebijakan penghentian sementara operasi tambang, tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap pekerjaan rumah tangga sebagai pegawai pemerintah. Hanya minat masyarakat untuk menjadi pegawai pemerintah, khususnya pegawai negeri atau polisi dan ABRI semakin meningkat. Pada awal operasi tambang tahun 1997 sampai awal tahun 2014 minat masyarakat untuk menjadi karyawan perusahaan tambang sangat dominan, tetapi setelah adanya kebijakan penghentian sementara operasi tambang pada akhir tahun 2014, minat masyarakat untuk menjadi karyawan tambang tidak terlalu dominan, sebagian masyarakat lebih memilih anggota rumah tangganya untuk menjadi pegawai negeri atau polisi/ABRI karena dianggap pekerjaan tersebut lebih stabil.

k. Usaha Ekonomi Lokal Lain

Usaha ekonomi lokal yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan tambang PT.NNT selain kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sektor

pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan), juga ada usaha ekonomi lokal yang memanfaatkan hasil usaha pertanian tersebut sebagai bahan baku yang dikenal dengan usaha agroindustri; dan usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya lokal yang lain seperti usaha pertambangan skala kecil yang dikenal dengan pertambangan rakyat dan usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Berikut ini uraian tentang kondisi dan perkembangan ketiga usaha ekonomi lokal dimaksud yang terdapat di kawasan tambang PT.NNT.

1) Usaha Agroindustri

Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku. Kegiatan ini termasuk usaha industry kerajinan rumah tangga yang sudah dijelaskan sebelumnya. Usaha agroindustri sangat diharapkan perkembangannya oleh pemerintah maupun oleh perusahaan tambang, karena selain akan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi masyarakat lokal, juga dapat mengurangi pengangguran di pedesaan. Berbagai pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan tambang untuk mengembangkan usaha tersebut, mulai dari pembinaan teknis, pembinaan permodalan sampai pembinaan pemasaran, namun usaha ini sulit berkembang karena kalah bersaing dengan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan atau kalah bersaing

dengan produk sejenis yang berasal dari luar kawasan tambang.

Jenis usaha agroindustri yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada masa sebelum masuk proyek tambang meliputi agroindustri gula aren atau gula merah, minyak kelapa, minyak jereweh, anyaman pandan, anyaman alang-alang, agroindustri makanan jadi, kemudian setelah masuk proyek tambang muncul agroindustri kerepek pisang, kerepek ubi, telur asin, agroindustri tahu dan tempe, minuman segar lidah buaya, dan terakhir adalah agroindustri tali ijok dan tali serabut kelapa (coconet). Semua jenis usaha agroindustri tersebut pernah mendapat pembinaan dari perusahaan tambang dan atau dari pemerintah daerah; beberapa diantaranya masih tetap bertahan dan berkembang, tapi sebagian lainnya menghilang, seperti agroindustri anyaman pandan dan alang-alang, termasuk agroindustri minuman segar lidah buaya yang dibina secara intensif oleh perusahaan tambang. Semenantara agroindustri gula merah, minyak kelapa, minyak jereweh, kerepek pisang, kerepek ubi atau talas, telur asin keberadaannya tidak menentu, kadang muncul kadang menghilang; dan para pelakunya hanya beberapa rumah tangga saja. Jenis usaha agroindustri yang cukup berkembang adalah agroindustri makanan jadi, seperti kue nagasari dan kue-kue lokal lainnya yang menjadi makanan suplemen dan makanan pesta masyarakat lokal. Usaha agroindustri yang muncul dan paling berkembang setelah masuk

proyek tambang adalah agroindustri tahu dan tempe. Namun kedua jenis usaha yang bahan bakunya dari kedele ini, para pelakunya sebagian besar penduduk pendatang, dan konsumen pada umumnya juga masyarakat pendatang dan para karyawan perusahaan tambang dan sub-sub kontraktornya yang berasal dari luar kawasan tambang, karena masyarakat lokal jarang atau belum terbiasa mengkonsumsi tahu dan tempe. Karena itu eksistensi dari usaha ini masih ditentukan oleh keberlangsungan perusahaan tambang.

Sebagai gambaran pada Tabel 85 ditunjukkan perkembangan usaha agroindustri yang dilakukan oleh masyarakat lokal sampel selama tahun 2013-2015. Pada Tabel tersebut jelas terlihat bahwa pelaku usaha agroindustri tidak banyak dan cenderung menurun. Pada tahun 2013, jumlah masyarakat lokal yang melakukan usaha ini sebanyak 28 rumah tangga atau sekitar 6,91 persen dari 405 rumah tangga sampel, kemudian pada tahun 2014 turun menjadi sebanyak 16 rumah tangga atau 3,95 persen dan tahun 2015 sebanyak 15 rumah tangga atau sekitar 3,70 persen. Penurunan tersebut terutama terjadi pada pengusaha agroindustri tahu dan tempe, karena setelah banyak tenaga kerja yang berhenti secara permanen atau sementara sebagai akibat kebijakan penghentian operasi tambang tahun 2014, maka permintaan akan tahu dan tempe menurun. Akibatnya usaha tahu dan tempe banyak yang tutup dan menjual peralatan yang dimiliki, terutama pengusaha

tahu tempe yang berasal dari luar kawasan tambang atau Pulau Lombok; sehingga pada tahun 2014 nilai investasi menurun drastis.

Setelah tambang beroperasi kembali pada akhir tahun 2014, pengusaha tahu dan tempe lokal yang masih bertahan, meningkatkan investasi dan kegiatan usahanya, dengan mengisi pasar tahu tempe yang sebelumnya banyak dikuasai oleh pengusaha tahu dan tempe yang berasal dari luar kawasan tambang. Sehingga meskipun jumlah pengusaha agroindustri pada tahun 2015 berkurang, namun omzet usahanya meningkat drastis, terutama berasal dari omzet usaha tahu dan tempe.

Pada tahun 2013, muncul agroindustri tali serabut kelapa (coconet) yang dibina oleh PT.Ridho Utama. Pada awalnya membina 60 orang tenaga kerja di Desa Maluk, dominan tenaga kerja wanita. Pada tahun 2015, tenaga kerja yang masih bekerja sebanyak 40 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok, kelompok pertama beranggotakan 22 orang; kelompok kedua dan ketiga masing-masing beranggotakan sebanyak 9 orang. Kegiatan ini cukup diminati dan banyak membantu pengurangan pengangguran di Desa Maluk; namun sayangnya bahan baku dari usaha agroindustri ini berupa serabut kelapa masih didatangkan dari luar kawasan tambang, yaitu Kabupaten Lombok Utara, sehingga tidak memiliki efek yang menguntungkan bagi petani kelapa yang banyak terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat,

termasuk di Kawasan Tambang. Selain itu, akhir-akhir ini muncul agroindustri anyaman dari bahan ijuk yang berasal dari pohon are. Anyaman dari ijuk ini dipergunakan sebagai penahan longsor oleh perusahaan tambang. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok (6 kelompok) oleh tenaga kerja wanita. Kegiatan ini juga cukup banyak menyerap tenaga kerja wanita. Akan tetapi masyarakat lokal yang bekerja pada kedua jenis usaha agroindustri tersebut, lebih banyak bersifat sebagai tenaga kerja upahan dibandingkan sebagai pengusaha agroindustri, karena itu tidak dimasukkan sebagai pelaku usaha agroindustri tetapi dimasukkan sebagai tenaga kerja buruh upahan.

Jenis usaha agroindustri yang banyak mendapat bantuan dan pembinaan dari perusahaan tambang adalah agroindustri makanan jadi, kerepek pisang dan kerepek singkong. Sebagai contoh sekitar tahun 2010, Kelompok Wanita Tani Mekar mendapat bantuan peralatan dan modal kerja dari perusahaan tambang dengan nilai puluhan juta rupiah untuk mengembangkan usaha kerepek pisang di Kecamatan Jereweh. Pada saat survai tahun 2015 dan tahun 2016 sekarang ini, sudah tidak ditemukan lagi keberadaan usaha ini. Menurut informasi dari tokoh setempat usaha tersebut hanya berjalan sekitar dua tahun, kemudian tutup karena produk yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk sejenis yang berasal dari luar kawasan. Sementara pembinaan dan bantuan kepada pengusaha agroindustri makan jadi

dan catering, cukup berhasil dan sering mendapat pesanan dari luar kawasan.

Tabel 85. Perkembangan Jenis, Nilai Investasi dan Omset Usaha Agroindustri Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2013-2015.

Jenis Usaha Agroindustri	Jumlah RTi	Total Investasi (Rp.000)	Total Omzet (Rp.000)		
			M.Huian	M.Kemarau	Total 1 Tahun
Tahun 2013					
1. Gula merah	4	313	8.404	10.936	19.340
2. Makanan Jadi	8	726.667	239.432	225.360	464.792
3. Tahu	6	49.750	105.300	105.300	210.600
4. Tempe	8	27.883	536.624	536.624	1.073.248
5. Minyak Kelapa	-	-	-	-	-
6. Minyak Jereweh	1	5.000	9.450	9.450	18.900
7. Alang-Alang	1	300	6.250	6.250	12.500
8. Anvaman Tali	-	-	-	-	-
Total 2013	28	809.913	905.460	893.920	1.799.380
Tahun 2014					
1. Gula Merah	3	9.365	24.225	26.775	51.000
2. Kue/mkn Jadi	5	29.611	174.800	145.427	320.227
3. Tahu	2	15.500	91.000	91.000	182.000
4. Tempe	4	37.150	420.875	419.256	840.131
5. Minyak Kelapa	-	-	-	-	-
6. Minyak Jereweh	1	3.000	9.600	14.400	24.000
7. Alang-Alang	-	-	-	-	-
8. Anvaman Tali	1	25	432	432	864
Total 2014	16	94.651	720.932	697.290	1.418.222
Tahun 2015					
1. Gula Merah	2	2.340	27.000	29.000	56.000
2. Makanan Jadi	4	20.587	126.420	153.013	279.433
3. Tahu	3	202.500	722.873	722.873	1.445.745
4. Tempe	4	77.500	584.460	484.758	1.069.218
5. Minyak Kelapa	1	25.000	60	3	63
6. Minyak Jereweh	1	500	3.000	5.700	8.700
7. Alang-Alang	0	0	0	0	0
8. Anvaman Tali	0	0	0	0	0
Total 2015	15	328.427	1.463.813	1.395.347	2.859.159

Berdasarkan informasi dan perkembangan di atas, berarti untuk meningkatkan usaha agroindustri tidak cukup hanya melihat potensi bahan baku saja, tapi yang lebih penting adalah potensi pasarnya; atau paling tidak harus mampu menciptakan pasar atau permintaan dari produk yang dihasilkan dengan mengarahkan selera konsumen ke produk yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan produk yang khas yang dapat membangkitkan selera konsumen; yang dapat

dipromosikan melalui iklan atau pameran-pameran atau melalui kantor-kantor pemerintah ataupun kantor-kantor swasta.

2) Usaha Pariwisata

Kawasan tambang PT.NNT di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi wisata yang sangat banyak, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner maupun wisata spiritual. Potensi wisata tersebut ditunjang dengan semakin tersedianya prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi; serta sarana penginapan berupa hotel, bungalow atau villa.

Potensi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh turis domestik dan manca Negara adalah wisata alam, terutama wisata bahari mulai dari pantai Jelenge Desa Beru Kecamatan Jereweh yang berpasir putih dengan ombak yang menantang para pencinta selancar, kemudian pantai Benete dan pantai Maluk di Kecamatan Maluk selain sebagai tempat selancar juga sebagai tempat wisata kuliner khas Sumbawa Barat dan daerah lainnya. Selanjutnya di Kecamatan Sekongkang, tepatnya Desa Sekongkang Bawah terdapat pantai yang memiliki pasir putih halus, terbentang panjang dari pantai Lawar, pantai Rantung hingga pantai Pesin. Lokasi wisata ini dilengkapi oleh berbagai hotel, awalnya adalah hotel Rantung, Tropical Beach Club, Spa Resort dan Yoyo's Hotel. Pada tahun 2015 mulai beroperasi hotel baru, yaitu Jepun Sunset Hotel, Singkenken Beach House and

Bungalow, Villa Surga dan Santai Hotel. Pembangunan berbagai hotel tersebut mengindikasikan bahwa kawasan wisata ini sudah cukup terkenal di dunia, khususnya sebagai tempat selancar bagi peselancar dunia. Pantai di pesisir Sekongkang, bersama pantai Maluk dan Pantai Jelenge dikatakan sebagai *golden triangle* oleh peselancar dunia.

Selain menyuguhkan wisata bahari, di desa Sekongkang juga terdapat Hutan Wisata Lawar yang dikelola oleh YPESB dengan luas kurang lebih 13 Ha. Sebelumnya lokasi ini diperuntukkan sebagai sarana wisata edukasi dengan menanam berbagai tanaman buah-buahan organik tetapi karena banyaknya hama kera dan babi sehingga dirasa sulit mengembangkan tanaman buah-buahan tersebut. Karena itu fungsinya dialihkan sebagai Hutan Wisata dengan menanam tanaman kayu seperti kayu binong, mahoni dan jenis kayu-kayuan lokal seperti kayu mindi/kayu dingin. Di dalam kawasan hutan wisata Lawar terdapat fasilitas bermain outbond berupa jembatan gantung, spider net, spider bridge, jembatan keseimbangan dan flying fox yang dapat dinikmati oleh wisatawan lokal, domestik ataupun wisatawan mancanegara.

Selain wisata bahari dan wisata hutan, di Kecamatan Sekongkang juga terdapat air terjun, flora dan fauna langka dan perkampungan nelayan tradisional. Bagi wisatawan yang suka bertualang, dapat menelusuri hutan sambil melihat fauna dan flora berbagai jenis; bertualang jalan kaki menelusuri

bukit dan ngarai menuju air terjun; serta melihat perkampungan nelayan tradisional di Pantai Senutuk.

Di Kecamatan Jereweh, yaitu di Desa Belo terdapat objek wisata spiritual Liang Sarunga. Biasanya masyarakat yang berkunjung ke tempat tersebut adalah untuk bayar niat (bayar nazar). Sebelum kesana wisatawan harus menemui atau meminta izin dulu ke agen atau orang yang dianggap sebagai pemilik liang (gua) yang diwariskan secara turun temurun. Setelah itu barulah mereka diantar kesana dengan panduan dari agen tersebut. Menurut sebagian masyarakat setempat, jika tidak meminta izin ke pemiliknya (agen), maka wisatawan tidak akan menemukan pintu dari gua yang dimaksud. Objek wisata ini sekitar tahun 2012, pernah mendapat batuan berupa pembangunan berugak dan penataan lingkungan dari pemerintah provinsi. Akan tetapi hasil pantauan surveyor tahun 2015 menunjukkan bahwa objek wisata ini lokasinya cukup jauh dan jalannya masih belum baik, terkesan kurang terawat, sehingga tidak mencirikannya sebagai objek wisata.

Secara keseluruhan, obyek wisata dan fasilitas pendukung pengembangan pariwisata di kawasan tambang PT.NNT cukup memadai, akan tetapi kurang terawat dan terkesan kumuh. Seperti di Maluk, pantainya sangat kotor dari limbah hempasan ombak, tanpa ada yang membersihkannya; ditambah lagi dengan banyaknya bekas café-café yang terlantar menjadikan kawasan wisata ini kumuh kurang

terawat. Kondisi yang relatif sama juga terjadi di Pantai Jelenge, Benete, Sekongkang sampai Pantai Senutuk. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan sektor pariwisata ini masih sangat kurang. Tempat penginapan, seperti hotel, bungalow dan villa yang menunjang pariwisata tidak satupun dimiliki oleh masyarakat lokal. Pemilik penginapan dan lahan-lahan yang terdapat di pinggir pantai justru sebagian pemiliknya berasal dari luar negeri, meskipun secara formal masih dimiliki oleh penduduk setempat. Keterlibatan masyarakat lokal hanya sebatas tenaga kerja kasar, yaitu sebagai penunggu lahan yang masih belum dibangun atau sebagai satpam. Karyawan yang bekerja di dalam, sebagian besar dari luar kawasan, hanya ditemui 1-2 orang karyawan berasal dari masyarakat lokal. Kebutuhan hotel juga masih sebagian besar didatangkan dari luar kawasan, paling tidak dari Mataram. Karena itu multiplier efek dari pembangunan sektor pariwisata di kawasan tambang belum banyak dinikmati oleh masyarakat lokal.

Untuk menunjang keberadaan obyek-obyek wisata yang ada, khususnya obyek wisata bahari, maka program pantai bersih yang pernah digagas oleh perusahaan tambang kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar tahun 2000an perlu dihidupkan kembali dan lebih diintensifkan, untuk meningkatkan daya tarik dari obyek-obyek wisata yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu harus diikuti dengan pembangunan dan

perbaikan prasarana transportasi dan komunikasi pada tempat-tempat yang kurang memadai, disertai dengan penyediaan pos pemantau keamanan pantai dan fasilitas-fasilitas umum lainnya secara terpadu. Kegiatan-kegiatan tersebut harus melibatkan masyarakat lokal agar mereka merasa memiliki dan dapat memanfaatkan perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan obyek wisata tersebut.

3) Pertambangan Rakyat.

Survai terhadap keberadaan pertambangan rakyat selalu dilakukan setiap tahun bersamaan dengan survai sosial ekonomi lainnya. Menurut informasi dari tokoh masyarakat lokal Kecamatan Jereweh, bahwa penambangan emas rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat sudah dimulai sekitar tahun 1990an di Lamuntet Kecamatan Brang Rea, kemudian menyebar ke Bakat Munte dan Seloto yang pada mulanya dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari Tasik Malaya Jawa Barat; akan tetapi kegiatan ini tidak banyak terekspos ke luar kawasan, karena masyarakat lokal sendiri jarang yang mau melakukan kegiatan penambangan tersebut. Informasi tentang kegiatan tambang rakyat tersebut semakin menghilang dengan muncul dan beroperasinya proyek pertambangan yang dilakukan oleh PT.NNT.

Informasi tentang keberadaan pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat muncul kembali sekitar tahun 2007 setelah ada survey lokasi yang

dilakukan PT.Indotan. Hasil survey itu terdengar sampai ke luar Pulau Sumbawa; bahkan sebagian besar masyarakat lokal mendengar keberadaan tambang emas rakyat tersebut dari orang Jawa, Ambon, Kalimantan. Berawal dari informasi tersebut, kemudian banyak masyarakat lokal yang mencoba untuk mencari emas di beberapa lokasi, termasuk dalam wilayah lingkaran tambang PT.NNT (Kecamatan Jereweh, Maluku dan Kecamatan Sekongkang).

Kegiatan tambang rakyat tersebut masih berlangsung sampai sekarang dengan sistem tambang terbuka. Masyarakat lokal biasanya melakukan kegiatan tambang setelah musim panen; tapi beberapa orang masyarakat lokal ada yang melakukan sepanjang tahun; bahkan ada yang mempekerjakan tenaga orang lain. Misalnya di Desa Belo Kecamatan Jereweh ditemukan satu orang masyarakat lokal memiliki lubang penggalian (ladang tambang emas) dengan mempekerjakan sekitar 25-30 orang tenaga kerja masyarakat lokal dan tenaga kerja dari luar untuk melakukan penggalian, pengangkutan sampai pemrosesan. Dari informasi yang diperoleh terdapat 2 orang masyarakat lokal Desa Belo yang memiliki lubang penggalian dan gelondong (alat pemroses batu emas sebanyak 4 set, dan tiap set terdiri dari 12-14 mata (unit)).

Selain tambang emas rakyat, sejak tahun 2008 masyarakat lokal di Kecamatan Jereweh juga ada yang ikut melakukan pertambangan batu mangan, yaitu di

Lang Desa dan Lang Murus (berdekatan dengan Bendungan Murus di Desa Beru). Namun akhir-akhir ini masyarakat lokal yang melakukan penggalian batu mangan semakin berkurang, bahkan menurut informasi pada tahun 2015 penambangan batu mangan sudah tidak dilakukan lagi, karena para penambang menganggap harga jual yang diterima sangat rendah, tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Sebelumnya para penambang menjual hasil tambang mangannya ke pedagang pengumpul seharga Rp 500.-/kg. kemudian pedagang pengumpul menjualnya ke PT. Century atau PT. Indotan Cilegon yang berlokasi di Desa Benete.

Di Kecamatan Sekongkang, lokasi penambangan emas rakyat berada di Desa Tatar, yaitu di bukit Tabeso dan bukit Puna. Tapi lokasi penambangan rakyat yang berada di bukit Tabeso sejak tahun 2014 sudah sepi dan tidak lagi dilakukan penambangan karena tingkat kesulitan medannya tinggi dan batuanya sangat keras sehingga sulit di tambang oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Karena itu, meskipun kandungan emasnya relatif lebih tinggi dibandingkan di bukit Puna, masyarakat lebih suka menambang emas di bukit Puna.

Penambangan emas di bukit Puna dilakukan secara berkelompok dan perorangan. Penambang yang berkelompok beranggota 5-6 orang dengan membuat lubang penggalian. Sedangkan penambang perorangan

tidak membuat lubang tapi hanya menggali timbunan tanah bekas longsor yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, jumlah kelompok yang melakukan penambangan di bukit Puna sebanyak 15 kelompok, yang berarti paling tidak terdapat sekitar 15 lubang penggalian tambang dengan kedalaman sekitar 40 – 50 meter, sedangkan penambang perorangan berjumlah 6 orang. Sebagian besar penambang yang berkelompok berasal dari luar Desa Tatar, yaitu dari Desa Aik Kangkung, Desa Talonang, Desa Maluk, Seteluk dan dari pulau Lombok sedangkan penambang perorangan berasal dari desa setempat (DesaTatar).

Peralatan yang digunakan berupa linggis, sekop, betel, martil, karung, tali dan peralatan mesin berupa mesin blower, mesin gelondong dan jack hammer (mesin penghancur batu). Batu yang berasal dari lubang kemudian dimasukkan kedalam karung dan diangkut ke atas untuk di hancurkan dengan jack hammer kemudian dimasukkan kedalam mesin gelondong yang berada di lokasi penambangan. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah mesin gelondong di bukit Puna tetapi setidaknya setiap kelompok memiliki mesin gelondong sendiri-sendiri. Biasanya dari setiap dua karung batuan yang kemudian diolah menjadi emas dapat diperoleh emas *pen* 14 atau *pen* 15 sebanyak 0,25 – 1 gram emas. Hampir semua kelompok pernah menemukan emas dalam jumlah lebih besar yaitu dalam 1 karung dapat mengandung emas 50 – 100 gram emas dan

dikalangan penambang hal ini biasa disebut “*cair/lubangnya cair*”. (Istilah *pen* dalam kelompok penambangan menunjukkan kadar emas, tapi tidak diketahui secara pasti apakah istilah *pen* sama dengan *karat* yang menunjukkan kadar emas yang terdapat didalamnya).

Hasil emas yang diperoleh para penambang kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan kelompok yang pada umumnya semua kelompok memiliki kesepakatan yang hampir sama yaitu: terlebih dahulu hasil yang diperoleh dikurangi semua biaya operasional selama penambangan (misalnya biaya minyak/solar untuk mesin, makan dll) kemudian sisanya dibagi antara pekerja, pemilik lubang dan mesin. Perhitungannya 1 bagian untuk pemilik lubang, 1 bagian untuk pemilik mesin gelondong, 1 bagian untuk pemilik mesin jack hammer dan masing-masing 1 bagian untuk pekerja (mesin blower tidak diperhitungkan). Biasanya pemilik lubang merupakan pimpinan didalam kelompoknya (biasa dikenal dengan istilah bos) dan biasanya pemilik lubang adalah pemilik semua peralatan kerja yang dibutuhkan dari linggis, sekop, betel, hammer blower, mesin gelondong, jack hammer dan lain-lain; sedangkan pekerja tidak membawa peralatan apapun sehingga pemilik meskipun tidak ikut bekerja dapat menerima 3 bagian dari hasil pembagian.

Tidak setiap saat penambang mendapatkan emas bahkan seringkali tidak mendapat emas atau hanya

sedikit sekali misalnya masing-masing pekerja hanya mendapat 200 – 300 mg emas selama beberapa minggu bekerja tetapi karena tidak ada pekerjaan lain yang lebih menguntungkan atau karena sama sekali tidak ada pekerjaan di lahan pertanian karena musim kemarau sehingga satu-satunya pilihan adalah menjadi pekerja penambang emas. Para pekerja tambang emas selalu berfikir dan mempunyai harapan bahwa suatu saat pasti lubangnya akan cair lagi. Hal inilah yang menyebabkan mereka selalu berharap dan enggan beralih pekerjaan bahkan sekalipun di bukit puna sudah tidak ada emasnya lagi, mereka akan pindah dan mencari lokasi lain yang diperkirakan ada emasnya. Lain halnya dengan penambang perorangan yang berasal dari desa Tatar, biasanya mereka mencari emas untuk mengisi waktu atau mencari tambahan penghasilan karena pada musim kemarau tidak ada kegiatan pertanian yang dapat dilakukan.

Kegiatan tambang rakyat yang pernah dilakukan masyarakat lokal di Kecamatan Sekongkang adalah penambangan batu akik dan batu permata, berlokasi di Monek Desa Telonang Baru. Kegiatan tambang batu mulia ini banyak dilakukan pada awal tahun 2014, kemudian tidak sampai satu tahun berjalan informasi tentang penambangan batu mulia ini mulai menghilang bersamaan dengan menghilangnya “boming” batu akik. Karena itu dapat dikatakan bahwa kegiatan tambang rakyat yang masih berlangsung di kawasan tambang PT.NNT adalah tambang batu galian C dan penambangan emas,

sementara penambangan batu mulia termasuk tambang batu kapur sudah tidak lagi dilakukan oleh masyarakat lokal. Penambangan batu kapur dilakukan oleh perusahaan swasta, masyarakat lokal hanya bertindak sebagai buruh kasar atau buruh harian). Tentang jumlah dan alamat masyarakat lokal sampel yang melakukan kegiatan penambangan rakyat, serta aktivitas yang dilakukan dapat diperiksa pada kegiatan usaha jasa, industri kerajinan atau buruh harian pada Lampiran.

1. Pendapatan dari Luar Hasil Kerja

Selain dari hasil kerja, hampir semua masyarakat lokal yang ada di kawasan tambang PT.NNT pada tahun 2015 menerima penghasilan dari luar hasil kerja, yaitu dari pemberian atau subsidi (*transfer income*) dan atau dari penghasilan kekayaan (*property income*). Paling banyak berasal dari subsidi pemerintah dalam bentuk raskin sebanyak 219 KK (54,07%), kemudian dari pemberian atau kiriman keluarga 68 KK (16,79%), subsidi dalam bentuk PKH/BLM/BALSM sebanyak 50 KK (12,35%), kemudian dari *property income* dalam bentuk hasil penyewaan rumah/ kamar sebanyak 31 KK (7,65%) dan dari pemberian beasiswa sebanyak 11 KK (2,72%). Selain itu, ada sebagian kecil masyarakat lokal menerima penghasilan dari luar hasil kerja dalam bentuk hasil penyewaan tanah, bantuan PT.NNT, pensiunan dan hasil penyewaan asset lain.

Tabel 86. Sumber dan Total Pendapatan Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT dari Luar Pencurahan Tenaga Kerja, Tahun 2015.

Pendapatan dari Luar Curahan TK	Jumlah RT		Pendapatan (Rp.000)		
	M.Hujan	M.Kemarau	M.Hujan	M.Kemarau	Total
1. Pemberian	68	77	45.747	47.309	93.057
2. Beasiswa	11	15	5.350	11.283	16.633
3. PKH/BLM/BALSM	50	50	7.462	8.634	16.096
4. Subsidi: Raskin	219	217	3.503	3.090	6.593
5. Subsidi lain	7	5	1.411	12.583	13.994
6. Bantuan PT NNT	4	83	7.225	6.005	13.230
7. Sewa tanah	7	8	39.968	40.034	80.002
8. Sewa rumah/kamar	31	30	63.314	65.388	128.703
9. Sewa Asset lain	2	-	96.000	138.700	234.700
10. Pensiun	4	4	35.100	35.100	70.200
Total 2015	403	489	305.080	368.127	673.208
Tahun 2014	376	525	276.986	355.397	632.383
Tahun 2013	387	476	232.858	238.725	471.583

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, maka jumlah masyarakat lokal yang menerima penghasilan dari luar hasil kerja semakin meningkat; pada tahun 2013 adalah sebanyak 387 KK atau 95,56% dan pada tahun 2014 adalah sebanyak 376 KK atau 92,84 persen. Total penerimaan yang diperoleh juga semakin meningkat, yaitu pada tahun 2013 sekitar Rp. 472 juta; pada tahun 2014 sekitar Rp. 673 juta; dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 673 juta pertahun.

Masyarakat lokal yang menerima penghasilan dari luar hasil kerja menyebar di seluruh desa kawasan tambang dan penerimaan paling banyak adalah berasal dari subsidi dalam bentuk raskin. Banyaknya masyarakat lokal yang menerima raskin,

tidak mencerminkan bahwa semua penerima adalah masyarakat miskin, karena sejak pendistribusian raskin oleh pemerintah, pemerintah desa mengambil kebijakan untuk mendistribusikan kepada semua warga tanpa mempertimbangkan apakah warga desa tersebut miskin atau tidak, kecuali warga tersebut tidak mau menerimanya. Menurut tokoh-tokoh formal desa, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan antar warga, sehingga keamanan dan rasa kebersamaan tetap terpelihara.

3. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah tangga

a. Pendapatan Rumah tangga

Pendapatan rumah tangga menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pendapatan rumah tangga tersebut dapat berasal dari hasil kerja (*labor income*) dan dari luar hasil kerja (*non-labor income*). Pada tahun 2015, pendapatan rumah tangga masyarakat lokal setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 6,1 juta; sebagian besar pendapatan rumah tangga tersebut berasal dari hasil kerja (97,76%); selebihnya (2,24%) berasal dari luar hasil kerja. Sumber pendapatan terbesar berasal dari hasil kerja sebagai karyawan swasta (38,10%), kemudian sebagai pegawai pemerintah (15,92%), pedagang (12,72%), petani (9,26%), perajin (7,26%). Sumber pendapatan berikutnya adalah sebagai pengusaha jasa (5,16%), peternak (3,42%), buruh harian (3,31%), nelayan atau perikanan (2,46%); dan

paling rendah berasal dari hasil sebagai pencari hasil hutan (0,14%) (lihat Tabel 87).

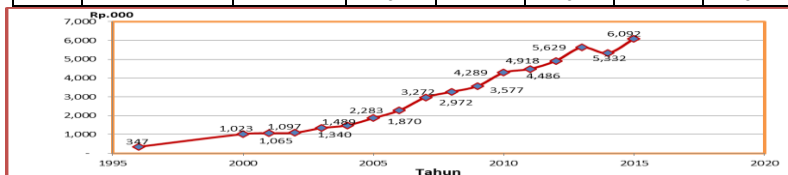
Selama masa tambang, yaitu sejak kontruksi tambang tahun 1997-1999 sampai masa produksi tambang tahun 2000-2013, pendapatan masyarakat lokal selalu meningkat setiap tahun secara konsisten, tapi pada tahun 2014 pendapatan masyarakat lokal mengalami penurunan, yaitu dari Rp. 5,6 juta tahun 2013 menjadi Rp. 5,3 juta tahun 2014 atau menurun sekitar Rp. 300 ribu; tapi pada tahun 2015 pendapatan masyarakat lokal tersebut meningkat cukup tajam menjadi sekitar Rp. 6,1 juta atau meningkat sekitar Rp.800 ribu setiap bulan (lihat Gambar 30).

Peningkatan pendapatan rumah tangga pada tahun 2015, bila ditelaah berdasarkan jenis usaha, maka jenis usaha yang mengalami peningkatan secara nominal dan proporsional adalah usaha sebagai karyawan swasta, yaitu dari rata-rata Rp. 1,8 juta tahun 2014 menjadi sekitar Rp. 2,3 juta tahun 2015.

Tabel 87. Struktur dan Rata-Rata Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Setiap Bulan, Tahun 2015.

No	Sumber Pendapatan	Musim Penghujan		Musim Kemarau		Rata-Rata 2015	
		Rp.000	%	Rp.000	%	Rp.000	%
1	Pertanian	849	13,90	280	4,60	564	9,26
2	Peternakan	135	2,21	282	4,64	208	3,42
3	Perikanan	130	2,14	169	2,78	150	2,46

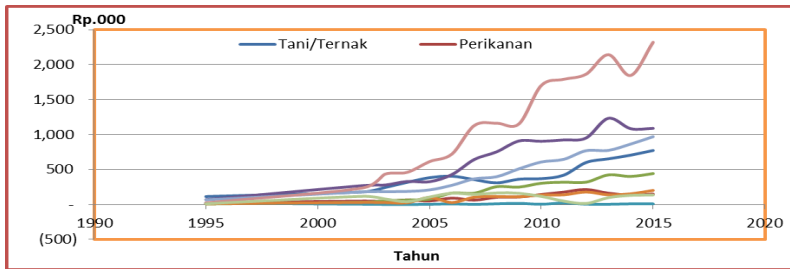
4	Industri Kerajinan	403	6,60	482	7,93	442	7,26
5	Perdagangan	719	11,78	831	13,67	775	12,72
6	Usaha Jasa	312	5,12	317	5,21	314	5,16
7	Kehutanan	4	0,06	14	0,22	9	0,14
8	Buruh Harian	212	3,48	191	3,14	201	3,31
9	Pegawai Pemerintah	932	15,26	1.008	16,58	970	15,92
10	Karyawan Swasta	2.284	37,42	2.358	38,79	2321	38,10
11	Luar Curahan TK	124	2,03	149	2,45	137	2,24
	Total	6.104	100,00	6.080	100,00	6.092	100,00



Gambar 30. Perkembangan Pendapatan Rumah tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/Bln). Tahun 1995. 2000-2015.

Kemudian usaha di bidang pertanian, dari Rp. 468 ribu menjadi Rp. 564 ribu, usaha sebagai penjaja jasa dari Rp. 220 ribu menjadi Rp. 314 ribu dan kegiatan sebagai buruh harian meningkat dari Rp.153 ribu menjadi Rp. 201 ribu; sedangkan yang meningkat hanya secara nominal adalah usaha sebagai pegawai pemerintah dari Rp. 865 ribu menjadi Rp. 970 ribu; dan usaha di bidang industry kerajinan dari Rp. 402 ribu menjadi Rp. 442 ribu dan usaha di bidang perikanan dari Rp. 135 ribu menjadi Rp. 150 ribu. Sementara usaha-usaha lainnya kontribusi tetap atau mengalami penurunan, seperti usaha dagang menurun dari Rp. 864 ribu menjadi Rp. 775 ribu;

usaha di bidang peternakan turun dari Rp. 238 ribu menjadi Rp. 208 dan usaha di bidang kehutanan tidak berubah rata-rata sebesar Rp. 9 ribu per bulan per rumah tangga (lihat Gambar 31).



Gambar 31. Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga dari Berbagai Sumber Perbulan, Tahun 1995, Tahun 2000-2015.

Peningkatan kontribusi usaha di bidang pertanian terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat lokal tidak terlepas dari keberhasilan pengembangan tanaman jagung di kawasan tambang, yang telah menyumbangkan pendapatan terbesar kedua setelah tanaman padi. Sedangkan peningkatan kontribusi pekerjaan sebagai karyawan swasta, usaha jasa dan buruh harian secara signifikan mengindikasikan bahwa kebijakan pengoperasian kembali produksi tambang pada akhir tahun 2014 mulai menunjukkan hasilnya pada kegiatan-kegiatan tersebut; diikuti oleh kegiatan-kegiatan lain seperti usaha industry kerajinan. Usaha masyarakat yang belum pulih seperti sebelum tahun 2014 adalah usaha dagang, karena dengan berhentinya operasi tambang banyak usaha masyarakat mengalami

kerugian yang akhirnya tutup seperti usaha pertokoan.

Selanjutnya bila rata-rata nilai nominal pendapatan masyarakat lokal di atas, dikaitkan dengan indikator kesejahteraan masyarakat menurut standar PBB, yaitu \$1 AS perkapita perhari sebagai batas garis kemiskinan absolut dan \$2 AS perkapita perhari sebagai garis kemiskinan menengah, maka bila 1 dollar AS tahun 2015 dinilai Rp. 13.000 dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,5 orang; maka rata-rata pendapatan rumah tangga yang bertepatan dengan garis kemiskinan absolut adalah sebesar Rp. 1.755.000 setiap bulan dan pendapatan rumah tangga yang bertepatan dengan garis kemiskinan menengah adalah Rp. 3.510.000,-. Dengan demikian berarti kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat lokal di kawasan tambang PT.NNT pada tahun 2015, pendapatannya secara rata-rata berada di atas garis kemiskinan absolute dan garis kemiskinan menengah, karena rata-rata pendapatannya setiap bulan adalah sebesar Rp. 6,1 juta/bulan/KK. Akan tetapi bila ditelaah pada setiap rumah tangga, ditemukan indikasi dari kemiskinan menengah pada beberapa rumah tangga, terutama pada rumah tangga yang memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan pokok pada kegiatan sebagai penjaja jasa, usahatani, perikanan, industri kerajinan dan buruh harian.

(2). Pengeluaran Rumah tangga

Pada tahun 2015, pengeluaran konsumtif rumah tangga masyarakat lokal setiap bulan adalah rata-rata sebesar Rp. 5,4 juta; yaitu untuk bahan makanan dan minuman sekitar Rp. 2,6 juta (48,13%) dan untuk bahan konsumsi di luar makanan dan minuman sekitar Rp. 2,8 juta (51,87%). Jenis pengeluaran yang paling besar pada kelompok makanan dan minuman adalah pengeluaran untuk daging dan lauk pauk (10,39%), kemudian untuk sayur dan bumbu-bumbuan (8,46%). Sedangkan pengeluaran untuk beras sebagai makanan pokok menempati urutan ketiga (7,49%), berikutnya adalah makanan suplemen (6,35%), minuman suplemen (5,30%), rokok dan sirih (4,03%), minuman kopi dan teh (3,75%) dan paling kecil pengeluaran untuk buah-buahan (2,36%). Pada kelompok pengeluaran konsumtif di luar makanan dan minuman yang terbesar adalah untuk pendidikan (13,16%), transportasi dan komunikasi (9,81%), pemeliharaan rumah (8,69%), kesehatan (8,17%) dan yang paling kecil adalah pengeluaran untuk partisipasi sosial (4,30%), seperti iuran kampung, iuran keamanan atau iuran kematian.

Namun demikian pola pengeluaran konsumtif masyarakat lokal dari sejak tahun 2007 sampai tahun 2015 sekarang ini tidak mengalami perubahan, yaitu pengeluaran konsumtif di luar makanan dan minuman porsinya masih tetap lebih besar daripada pengeluaran konsumtif untuk makanan dan minuman (lihat Gambar 17). Struktur pengeluaran rumah tangga seperti ini mengindikasikan bahwa rumah

tangga masyarakat lokal masih tergolong sejahtera, termasuk pada tahun 2014, karena sudah dapat memenuhi kebutuhan primernya, khususnya pengeluaran untuk bahan makanan dan minuman.

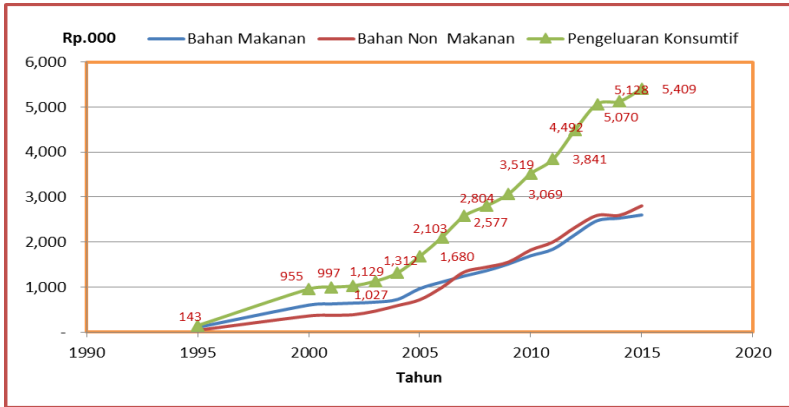
Pengeluaran konsumtif rumah tangga masyarakat lokal, sangat ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh. Di desa-desa yang memiliki pendapatan rumah tangga lebih tinggi, pengeluaran rumah tangganya juga lebih tinggi, seperti rumah tangga di Desa Sekongkang Atas dan Goa yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan desa-desa lainnya, pengeluaran konsumtif rumah tangganya juga lebih tinggi. Sedangkan untuk pengeluaran produktif besarnya tidak menentu, tidak hanya ditentukan oleh pendapatan rumah tangga, tetapi juga oleh faktor lain. Dalam penelitian ini ditemukan rumah tangga di Desa Dasan Anyar memiliki pengeluaran investasi paling tinggi dibandingkan rumah tangga desa lainnya, meskipun rumah tangga di desa ini memiliki pendapatan yang tidak sebesar rumah tangga di Desa Goa, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah dan Desa Benete (lihat Gambar 18).

Pengeluaran konsumtif rumah tangga masyarakat lokal, sangat ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh. Di desa-desa yang memiliki pendapatan rumah tangga lebih tinggi, pengeluaran rumah tangganya juga lebih tinggi, seperti rumah tangga di Desa Sekongkang Atas dan

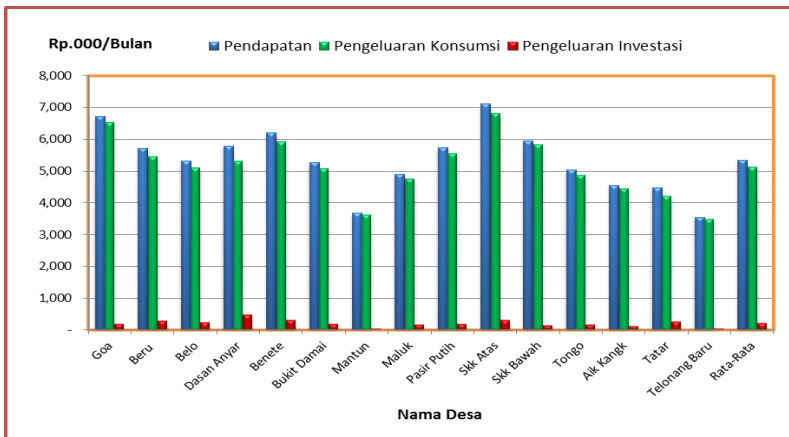
Goa yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan desa-desa lainnya, pengeluaran konsumtif rumah tangganya juga lebih tinggi. Sedangkan untuk pengeluaran produktif besarnya tidak menentu, tidak hanya ditentukan oleh pendapatan rumah tangga, tetapi juga oleh faktor lain. Dalam penelitian ini ditemukan rumah tangga di Desa Dasan Anyar memiliki pengeluaran investasi paling tinggi dibandingkan rumah tangga desa lainnya, meskipun rumah tangga di desa ini memiliki pendapatan yang tidak sebesar rumah tangga di Desa Goa, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah dan Desa Benete (lihat Gambar 18).

Tabel 88. Struktur dan Rata-Rata Pengeluaran Konsumtif Rumah Tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT Setiap Bulan. Tahun 2015

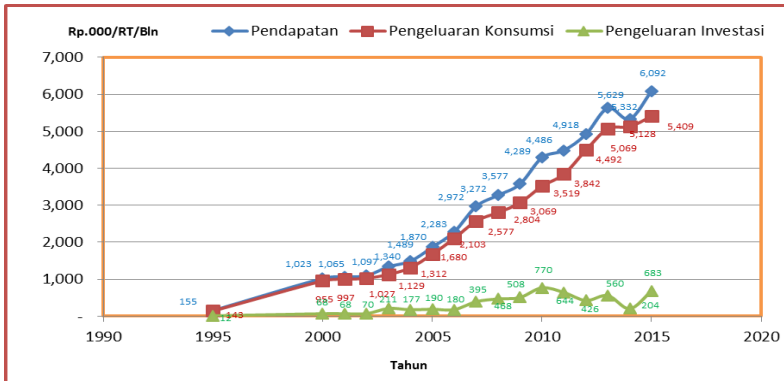
No	Jenis Pengeluaran	Musim Hujan		Musim Kemarau		Rata-Rata 2015	
		Rp.000	%	Rp.000	%	Rp.000	%
<i>Bahan Makanan/ Minuman</i>							
1.	Beras & KH lain	404	7.59	406	7.38	405	7.49
2.	Daging & lauk pauk	539	10.13	585	10.64	562	10.39
3.	Savur & bumbu	460	8.64	455	8.28	457	8.46
4.	Minuman (kopi,teh)	200	3.76	206	3.75	203	3.75
5.	Buah-Buahan	130	2.43	126	2.29	128	2.36
6.	Makanan suplemen	341	6.41	346	6.30	344	6.35
7.	Minuman suplemen	282	5.29	292	5.32	287	5.30
8.	Rokok/Sirih	223	4.19	213	3.87	218	4.03
	Total A.	2.579	48.45	2.627	47.82	2.603	48.13
<i>Luar Makanan/ Minuman</i>							
1.	Pakaian	425	7.99	413	7.52	419	7.75
2.	Pendidikan	656	12.32	768	13.97	712	13.16
3.	Pemeliharaan rumah	470	8.82	470	8.55	470	8.69
4.	Kesehatan	435	8.18	448	8.16	442	8.17
5.	Transport&Kmnikasi	523	9.82	538	9.79	530	9.81
6.	Partisipasi Sosial	235	4.42	230	4.19	233	4.30
	Total B.	2.744	51.56	2.867	52.18	2.806	51.87
	Total A + B	5.323	100,0 1	5.494	100,01	5.409	100,00



Gambar 32. Perkembangan Pengeluaran Komsumtif Rumah Tangga Masyarakat Lokal Kawasan Tambang PT.NNT (Rp.000/bln), Tahun 1995, 2000-2015.



Gambar 33. Rata-Rata Pendapatan, Pengeluaran Konsumtif dan Produktif Setiap Bulan Rumah tangga Di Tiap Desa Kawasan Tambang PT.NNT, Tahun 2015.



Gambar 34. Perkembangan Pendapatan, Pengeluaran Konsumtif dan Pengeluaran Produktif Rumah tangga Masyarakat Lokal, Tahun 1995, Tahun 2000-2015.

Akan tetapi bila dibandingkan antara pengeluaran konsumtif secara umum dengan pendapatan rumatangga dari sejak sebelum tambang tahun 1995 sampai masa tambang tahun 2015, selalu ada sisa pendapatan yang bisa dialokasikan untuk pengeluaran produktif. Ini artinya kebutuhan konsumtif rumah tangga masyarakat lokal selalu dapat dipenuhi dari pendapatan yang diperoleh, meskipun sisa pendapatan yang dapat diinvestasikan itu masih relatif kecil, yaitu masih di bawah Rp.1 juta/bulan; bahkan pada tahun 2014 hanya tersisa sebesar Rp. 204 ribu rata-rata setiap bulan (lihat Gambar 34).

Rendahnya sisa pendapatan yang dapat diinvestasikan di atas menunjukkan rendahnya kegiatan investasi masyarakat lokal. Karena itu sulit diharapkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal akan dapat meningkat dengan cepat; bila tidak ada

ikhtiar lebih untuk meningkatkannya. Secara matematis, ada dua cara untuk meningkatkan pengeluaran produktif atau investasi masyarakat tersebut, yaitu dengan meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran konsumtifnya atau melakukan keduanya secara bersamaan. Salah satu cara yang paling mungkin dan mudah dilakukan adalah dengan mengurangi pengeluaran konsumtif yang dianggap boros. Pada Tabel 20 ditunjukkan struktur pengeluaran konsumtif rumah tangga, ternyata pada kelompok makanan dan minuman terdapat pengeluaran masyarakat lokal yang sebenarnya dapat ditiadakan atau paling tidak dapat dikurangi, yaitu pengeluaran untuk makanan suplemen, minuman suplemen dan pengeluaran rumah tangga untuk rokok yang mencapai lebih 15,68 %; dan pengeluaran konsumtif di luar makanan dan minuman, yaitu pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi yang mencapai 9,81% dari total pengeluaran konsumtif rumah tangga. Bila pengeluaran-pengeluaran jenis tersebut dapat dihemat separuh saja, maka akan dapat meningkatkan pengeluaran produktif rumah tangga lebih sekitar Rp. 700 juta/bulan.

Dari aspek pendapatan, adalah dengan cara meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal pada kegiatan-kegiatan produktif, baik pada sektor pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), maupun pada kegiatan di luar pertanian, seperti usaha industry

kerajinan, usaha dagang maupun usaha jasa. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk itu adalah dengan meningkatkan dan mengaktifkan kembali program LBI (*Lokal Business Initiatives*) yang pernah dilakukan sebelumnya, serta Program OLA (*Outside Living Allowence*) yang diikuti oleh kebijakan pengaturan jadwal kerja para karyawan perusahaan tambang agar lebih lama tinggal di kawasan tambang, misalnya dengan merubah jadwal hari kerja dan libur dari 3-4 atau 4-4 ke jadwal kerja 5-2 atau paling tidak 4-3, sehingga gairah dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal, seperti usaha dagang, jasa, penyewaan rumah/kamar dan lainnya kembali meningkat.

B. Transformasi Sosial Budaya

1. Perubahan Gaya Hidup

Untuk mengetahui keragaan perubahan gaya hidup masyarakat di daerah lingkaran tambang NNT tahun 2015 dilakukan kajian terhadap tiga indikator, yaitu : (1) pola konsumsi makanan, (2) kisaran nilai pengeluaran untuk makanan dan non makanan, dan (3) Prioritas pengeluaran. Berikut disajikan deskripsi gaya hidup masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang tersebut.

b. Konsumsi Makanan

Konsumsi makanan rumah tangga masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang pada tahun 2015 termasuk katagori baik. Pada tabel 89 berikut

disajikan gambaran pola konsumsi makanan responden masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT tahun 2015 :

Tabel 89. Sebaran Responden (Rumah Tangga Masyarakat Lokal) Berdasarkan Pola Konsumsi Makanan Tahun 2015.

No	Pola Konsumsi	Kategori	Jumlah Responden	(%)
1	Nasi - lauk pauk - Protein	Sederhana	150	37,03
2	Nasi - Lauk pauk - Protein nabati - Daging / telur (protein hewani)	Cukup baik (berkualitas)	159	39,26
3	Nasi - Lauk pauk - Protein nabati - Protein hewani - tambahan lain	Baik (Berkualitas)	59	14,57
4	Nasi - Lauk pauk - Protein nabati - Protein hewani - Susu - buah segar.	Sangat baik (berkualitas)	37	9,14
Jumlah		-	405	100,00

Pola konsumsi sebagaimana yang teramati tahun 2015 tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat lokal di sekitar daerah lingkaran tambang mampu mempertahankan kualitas dan pola konsumsinya. Sebagian besar responden mengakui bahwa penghasilan rumah tangga yang diperoleh dari berbagai sektor pekerjaan diharapkan mampu memenuhi kualitas konsumsi yang sudah terbentuk atau terpola sejak berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat di daerah lingkaran tambang PT. NNT. Rangkuman hasil diskusi kelompok terfokus (FGD)

mempertegas bahwa ketahanan pola konsumsi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1) tersedianya barang / bahan konsumsi makanan yang variatif di sekitar domisili, dan (2) telah terbentuknya kebiasaan pola konsumsi yang sehat dan baik sejalan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga dibandingkan kondisi awal masyarakat lokal.

c. Kisaran Nilai Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan

Kisaran nilai pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang tahun 2015 berdasarkan data pada 405 responden disajikan pada tabel 90 berikut.

Tabel 90 menunjukkan, kisaran dan nilai pengeluaran rumah tangga untuk makanan cenderung lebih kecil dari pada pengeluaran non makanan. Kuatnya kecenderungan rumah tangga masyarakat lokal mengalokasikan proporsi yang lebih besar atas pendapatan yang diperoleh untuk pengeluaran non makanan menggambarkan telah terjadi perubahan orientasi sistem konsumsi yang berarti telah terjadi perubahan gaya hidup masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang. Perubahan gaya hidup masyarakat lokal lebih merupakan dorongan psikologis, artinya masyarakat lokal ingin mempertahankan pola dan perilaku konsumsi ditengah perkembangan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi dengan mengamati

langsung kondisi perumahan dan aspek-aspek konsumsi lainnya tampak jelas terjadinya perubahan masyarakat dari pola hidup agraris tradisional menjadi masyarakat terbuka yang adaptif terhadap perubahan lingkungan secara umum.

Tabel 90 Sebaran Responden Berdasarkan Kisaran Nilai Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan dan Non Makanan Tahun 2015

No	Kisaran nilai Pengeluaran Per bulan	Persentase Responden Menurut Jenis Pengeluaran	
		Makanan	Non Makanan
1	< Rp. 1000.000	11 orang (2,71 %)	3 orang (0,71 %)
2	Rp.1000.000–Rp. 2000.000	290 orang (71,60 %)	242 orang (59,75 %)
3	Rp. 2000.000–Rp. 3000.000	94 orang (23,21 %)	orang (32,09 %)
3	>Rp. 3000.000	10 orang (2,46 %)	30 orang (7,40 %)
Jumlah		405 orang (100,0 %)	405 orang (100,00 %)

d. Prioritas Pengeluaran

Terkait dengan prioritas pengeluaran rumah tangga, hasil penelitian tahun 2015 tidak berbeda mencolok dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan penggalian informasi dengan interview terstruktur dan diskusi kelompok terpumpun dirumuskan 5 (lima) kelompok pengeluaran prioritas, yaitu :

- (1) Investasi baru/pengembangan modal usaha
- (2) Biaya pendidikan (sekolah),
- (3) Biaya perumahan dan perabotan utama.
- (4) Transportasi, telekomunikasi dan partisipasi sosial, dan
- (5) Kesehatan, termasuk pakaian.

Jenis pengeluaran tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal umumnya tidak lagi terpaku

pada orientasi pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, pakaian dan tempat berlindung/perumahan) akan tetapi telah berkembang kepada pemenuhan kebutuhan penunjang seperti transportasi, komunikasi dan partisipasi sosial. Hasil penelitian secara rinci disajikan pada tabel 91.

Prioritas pengeluaran rumah tangga pada tahun 2015 tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya (2014). Tabel 91 menunjukkan prioritas pengeluaran non makanan rumah tangga masyarakat lokal terutama kelompok petani, nelayan, pedagang, perajin dan usaha jasa memprioritaskan pengeluaran non makanan untuk pengembangan modal usaha dan pendidikan. Khusus untuk rumah tangga petani, peningkatan modal usaha diperlukan terkait dengan makin berkembangnya intensifikasi pertanian (padi sawah) hampir di semua desa dalam lingkaran tambang (kecuali desa Telonang). Pembangunan dan pemanfaatan dam memberikan akses irigasi yang cukup baik bagi petani sehingga terjadi peningkatan luas tanam dan areal panen setiap musim tanam dibandingkan sebelum dibangunnya dam oleh PT. NNT. Dengan demikian, upaya pengembangan modal usaha dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas usaha agar kontinyuitas penghasilan dapat dipertahankan atau dikembangkan menjadi lebih baik.

Tabel 91 Alokasi dan Prioritas Pengeluaran untuk Kebutuhan Non Makanan Menurut Kelompok Pekerjaan Masyarakat Lokal di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT tahun 2015.

No	Kelompok Pekerjaan Responden	Sebaran Responden (%) Berdasarkan Prioritas Pengeluaran				
		Pendidikan	Pemeliharaan & Perabot Rumah	Kesehatan dan Pakaian	Transportasi & Partisipasi Sosial	Pengemb. Modal Usaha
1	Petani / Peternak	10 (22,5)	5 (11,1)	7 (15,5)	5 (11,1)	18 (40,0)
2	Pedagang	12 (20,0)	11 (18,3)	7 (11,7)	9 (15,0)	21 (35,0)
3	Nelayan	12 (21,8)	9 (16,4)	9 (16,4)	8 (14,5)	17 (30,9)
4	Perajin / Industri	17 (28,4)	15 (25,0)	7 (11,6)	6 (10,0)	15 (25,0)
5	Jasa	12 (20,0)	11 (18,3)	10 (16,7)	11 (18,3)	16 (26,7)
6	Karyawan (PNS)	20 (33,4)	11 (18,2)	8 (13,4)	12 (20,0)	9 (15,0)
7	Karyawan Swasta	19 (29,2)	16 (24,6)	7 (10,8)	15 (23,1)	8 (12,3)
	Jumlah (Rata-Rata %)	102 (25,18)	78 (19,2)	55 (13,6)	66 (16,3)	104 (25,7)

Keterangan : Angka dalam kurung adalah persentase (%).

Disamping untuk pengembangan modal usaha, rumah tangga petani/nelayan, dagang, perajin dan jasa mengalokasikan pengeluaran non makanan untuk bidang pendidikan. Semua responden menyatakan bahwa pendidikan anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan program yang banyak dikembangkan oleh PT. NNT yakni mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan pada berbagai satuan pendidikan di daerah lingkaran tambang PT. NNT.

2. Perubahan Sistem Norma dan Nilai Sosial

Studi menyangkut sistem norma masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT tahun 2015 ditekankan pada adat istiadat (custom). Dengan model triangulasi teknik pengumpulan data (wawancara, wawancara mendalam dan FGD) diketahui bahwa norma (adat istiadat) cenderung kembali ke suasana awal. Dengan kata lain, keterikatan masyarakat

terhadap norma adat istiadat menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Berikut diungkapkan secara rinci hasil penelitian tahun 2015 mencakup aspek norma sosial, norma agama dan sistem kepercayaan masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT.

a. Keterikatan pada Norma (Adat Istiadat)

Eksistensi dan perkembangan norma sosial dapat ditelaah dengan mengetahui sejauhmana daya ikat (keterikatan masyarakat) dan daya anut (kepatuhan/ketaatan masyarakat) terhadap norma sosial yang ada. Hasil penelitian tahun 2015 menggambarkan perkembangan norma sosial seperti yang tersaji pada tabel 85 berikut ini :

Tabel 92 Tingkat Keterikatan dan Kepatuhan Masyarakat Lokal terhadap Norma Sosial di Daerah Lingkaran Tambang PT. NNT Tahun 2015.

No	Norma Sosial	Sebaran Responden (%) Berdasarkan Tingkat Keterikatannya pada Norma Sosial Lokal				
		Sangat Longgar	Longgar	Biasa (Sedang)	Kuat	Sangat Kuat
1	Keterikatan pada Upacara adat seputar kelahiran".	20 (4,9)	45 (11,1)	150 (37,2)	167(41,2)	23 (5,6)
2	Keterikatan pada Upacara adat seputar Perkawinan.	11 (2,7)	30 (7,4)	103 (25,4)	203 (50,1)	58 (14,3)
3	Keterikatan pada Upacara adat seputar kematian	0 (0,0)	3 (0,7)	82 (20,2)	232 (57,3)	84 (20,7)
4	Keterikatan pada adat/ Kebiasaan dlm Produksi / Distribusi	20 (4,9)	76 (18,7)	83 (20,5)	187 (46,2)	39 (9,7)
5	Keterikatan pada adat/kebiasaan dlm pembagian kerja	27 (6,6)	78 (19,3)	142 (35,1)	113 (27,9)	45 (11,1)
6	Adat / Kebiasaan membaneun rumah	80 (19,7)	157 (38,7)	133 (32,8)	25 (6,1)	10 (2,4)

Keterangan : angka dalam kurung adalah persentase (%).

1) Keterikatan pada Tradisi Seputar Siklus Hidup (Kelahiran, Perkawinan dan Kematian).

Berdasarkan data sebagaimana tersaji pada tabel 92 di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal masih memegang teguh prinsip norma atau adat istiadat setempat dalam melakukan berbagai upacara tradisi, baik menyangkut upacara kelahiran, perkawinan dan kematian. Meskipun demikian, masih dijumpai sejumlah responden yang menyatakan tidak terikat oleh aturan adat setempat dalam melakukan kegiatan upacara tradisi tersebut. Secara umum, responden dan informan kunci berpendapat, memang terjadi perkembangan atau penyesuaian oleh masing-masing orang (warga masyarakat) dalam hal melaksanakan upacara adat, namun perubahan tersebut tidak terletak pada nilai dasar adat yang bersifat sakral. Penyesuaian dalam pelaksanaan upacara adat / tradisi tersebut lebih disebabkan faktor perubahan kesejahteraan dan perilaku ekonomi masyarakat. Penyesuaian dimaksud berupa tambahan atau pengurangan kegiatan dalam tata cara pelaksanaan adat atau tradisi yang dianut masyarakat setempat.

Dalam upacara seputar kelahiran misalnya, tetap ada upacara pemberian nama (*peda api*) dan *nguris* namun tidak lagi disertai dengan kelengkapan simbol adat seperti *kepeng bolong*, dan perangkat adat lainnya yang bernuansa ritual dan mistis sebagaimana banyak dilakukan pada masa lalu (sebelum mulainya tambang).

Hasil penelusuran informasi melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan di berbagai desa dirumuskan suatu pendapat umum sebagai berikut :

“Pada pelaksanaan upacara perkawinan, yang dalam kebiasaan setempat selalu ada kesenian tradisional seperti sekeco atau gendang dua dan sejenis rebana untuk mengiringi dan menjadi kelengkapan upacara. Akan tetapi bila keluarga yang merayakan tersebut mampu secara finansial, maka mereka bisa saja menambah hiburan dengan kesenian lain, seperti orkes dan sejenisnya yang bernuansa kesenian moderen. Bahkan, bagi masyarakat asli yang kondisi ekonominya cukup baik (dinilai orang berada) ada kecenderungan penambahan dalam tata cara pelaksanaan adat tersebut dikaitkan dengan prestise sosial, karena masyarakat menilai bahwa warga yang mampu mendatangkan kesenian moderen sebagai hiburan dalam upacara adat melambangkan kemampuan ekonomi masyarakat tersebut”. Tampaknya hal inilah yang mendorong terjadinya modifikasi dalam pelaksanaan adat atau upacara-upacara adat setempat.

Sebagian besar responden dan semua informan kunci menyatakan tetap terikat dengan aturan adat Samawa dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu yang masih mencolok dan tidak berubah misalnya adalah : kegiatan melamar, mengantar bawaan

(semacam menghantar mahar), *barodak* (rapancar) yang disertai dengan berbagai upacara, masih taat dilakoni oleh masyarakat lokal di desa lingkar tambang. Dari berbagai informasi terkait pelaksanaan upacara adat tersebut, diketahui sesungguhnya masyarakat Samawa khususnya di desa lingkar tambang memandang ritual perkawinan sebagai sesuatu yang sakral sehingga tidak mudah terpengaruh oleh sistem nilai yang berasal dari daerah lain. Masih kuat kebanggaan masyarakat lokal bila bisa melaksanakan upacara adat secara sempurna. Corak adat istiadat dalam perkawinan masyarakat lokal sesungguhnya tidak mengalami perubahan berarti. Perubahan yang ada tampaknya hanya sebatas variasi, yakni yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara yang biasanya disertai dengan hiburan kesenian.

Pada upacara terkait kematian, tetap dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan sejak masa lalu. Penyesuaian yang dilakukan masyarakat adalah terletak pada sarana pelengkap upacara. Bila pada masa lalu, wujud kepedulian masyarakat adalah dengan membawa *langaran* (bawaan tanda duka cita) umumnya berupa natura, seperti beras, gula, kelapa dan lainnya, maka pada saat ini banyak yang menyesuaikan secara praktis dengan memberikan dalam bentuk uang tunai. Namun demikian, sesungguhnya esensi normatif yang terkandung dalam upacara tersebut tidak mengalami perubahan mendasar. Esensi normatif yang tetap

tumbuh dan berkembang dalam upacara adat atau ritual adalah nilai kebersamaan, kepedulian dan kehendak untuk berbagi antar sesama. Meskipun demikian, banyak diakui bahwa rasa kebersamaan, kepedulian dan kehendak untuk berbagi antar sesama sudah mulai berkurang sejak masuknya perusahaan tambang.

2) Keterikatan pada Adat/Kebiasaan dalam Sistem Produksi dan Distribusi serta Pembagian Kerja

Tabel 92 secara implisit menggambarkan terjadinya transformasi keterikatan masyarakat lokal terhadap norma dalam pembagian dan distribusi kerja pada bidang produksi. Laporan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pada masa lalu (sebelum masuknya PT. NNT), kegiatan dibidang pertanian dan proses produksi lainnya banyak bersandar pada nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sejumlah kelembagaan lokal terkait tenaga kerja berkembang, seperti Besiru dan nyantek. Pada tahun 2015 saat ini, sebagian nilai kebersamaan dan kepedulian tersebut cenderung semakin diabaikan oleh masyarakat lokal. Perkembangan pada sistem produksi dan distribusi dalam kenyataannya berdampak terhadap perubahan pada kebiasaan masyarakat dalam sistem pembagian kerja. Sistem pembagian kerja tidak lagi dilandasi oleh nilai dan norma lokal (kebersamaan dan kepedulian), tapi berubah menjadi hubungan ekonomis komersial (dominasi kepentingan ekonomi).

Pola pembagian kerja dibidang proses produksi pertanian yang berkembang saat ini semakin menggeser norma-norma atau kebiasaan lama masyarakat lokal dalam sistem pengelolaan tenaga kerja. Sistem *besiru* (berbagi dan bersama) yang sebelum masuknya perusahaan tambang banyak berkembang, kini hampir tidak ditemukan lagi dalam kegiatan usahatani, baik di lahan sawah maupun ladang atau tegalan. Berdasarkan hasil wawancara yang ditunjang dengan validasi oleh masyarakat (*community validation*) ditegaskan bahwa komponen yang berubah terletak pada dasar nilai berperilaku dalam distribusi atau pembagian kerja. Sedangkan nilai yang cenderung mengalami pemudaran adalah nilai kebersamaan, gotong royong, kejujuran dan kepedulian antar sesama. Nilai-nilai modern, seperti efisiensi, profesionalitas, produktivitas, dan efektivitas telah dijadikan acuan dan tujuan dalam melakukan proses produksi. Sedangkan nilai-nilai sosial berupa kebersamaan, kepedulian dan berbagi antar sesama mengalami marginalisasi secara sistematis.

Melalui penelusuran secara mendalam, mengarahkan penilain dimana perubahan pada aspek sistem produksi dan pembagian kerja dalam masyarakat lokal tidak menyentuh nilai-nilai adat, namun telah terjadi kebiasaan baru dan mengalami proses internalisasi (pelembagaan) sejalan dengan perkembangan waktu. Kebiasaan dan norma baru yang telah terinternalisasi tersebut akan menjadi

tatanan kehidupan masyarakat dalam hal pemanfaatan tenaga kerja. Orientasi perubahan perilaku yang demikian secara umum menggambarkan perubahan yang lebih baik.

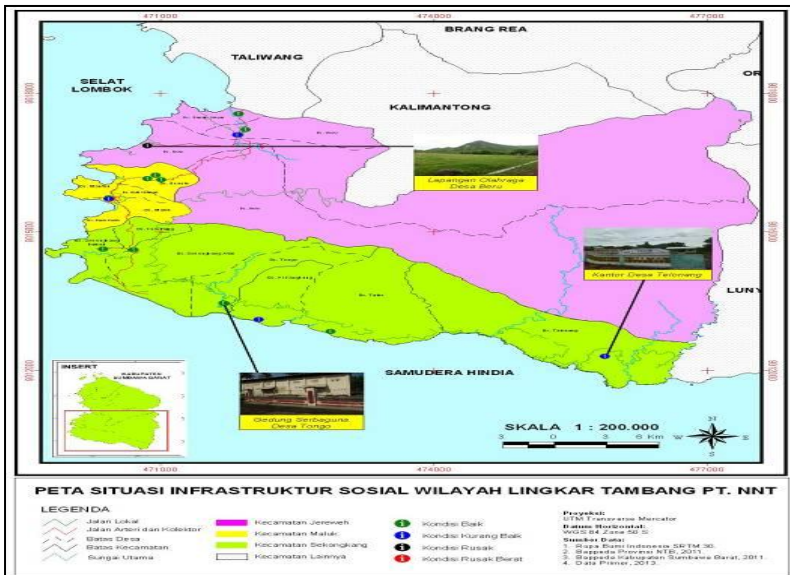
3) Adat/Kebiasaan Terkait Pembangunan Rumah

Aspek normatif yang paling banyak mengalami perubahan adalah anutan dalam membangun rumah saat ini. Kenyataan ini berbeda dengan kebiasaan sebelum masuknya tambang, di mana hampir semua masyarakat lokal mengikuti pola dan gaya perumahan adat Samawa, yakni rumah panggung dengan konstruksi yang sangat sederhana. Perubahan yang tergambar secara fisik dari kebiasaan masyarakat membangun perumahan menggambarkan juga perubahan yang terjadi pada sistem norma masyarakat setempat.

Penelitian tahun 2015 menunjukkan dinamisnya pembangunan atau renovasi perumahan masyarakat dari rumah tradisional menjadi rumah permanen dengan arsitektur moderen. Dengan kata lain, model perumahan yang dibangun tidak lagi hanya bercorak rumah adat samawa sebagaimana bangunan tahun-tahun sebelumnya. Satu-satunya cerminan nilai-nilai sosial yang masih melekat dalam bangunan rumah baru masyarakat lokal terletak pada bentuk atap rumah. Inilah satu-satunya ciri-ciri atau simbol-simbol nilai adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat lokal. Sebagian besar rumah batu permanen yang dibuat setelah dimulainya aktivitas

tambang, atapnya tetap mencirikan rumah khas samawa, seperti bentuk kanopi dan kongsol rumah yang bersusun. Berkembangnya prinsip dan perspektif ekonomi dalam tata bangunan perumahan tersebut merupakan cerminan makin longgarnya pertalian norma atau adat istiadat pada masyarakat lokal terkait dengan model bangunan rumah.

Berubahnya kebiasaan masyarakat setempat dalam membangun rumah menyebabkan longgarnya pertalian sosial yang selama ini diatur dalam tatanan atau spirit adat dan kebiasaan masyarakat. Pembangunan rumah moderen yang permanen memerlukan pekerja profesional yang diupah. Artinya, sistem ini memperkecil peluang gotong royong dan tolong menolong sebagaimana yang lazim berkembang sebelum diadopsinya sistem perumahan moderen. Dengan demikian kehadiran PT. NNT dengan operasi tambangnya mempengaruhi tatanan sosial masyarakat lokal terkait kebiasaan dalam membangun rumah. Perubahan ini tidak dapat dinilai negatif mengingat keputusan perubahan tersebut didasarkan telaah rasional masyarakat lokal dalam rangka beradaptasi terhadap perubahan sosial di daerah lingkaran tambang. Adaptasi pada lingkungan yang berubah tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan orientasi nilai masyarakat lokal yang mengekspresikan masyarakat yang lebih terbuka (kosmopolit).



Gambar 35. Peta Sebaran dan Situasi Infrastruktur Sosial Wilayah Lingkaran Tambang PT. NNT.

b. Perkembangan/Perubahan Norma Agama

Penelitian menyangkut perkembangan norma agama khususnya bagi masyarakat lokal dilakukan dengan interview terhadap responden dilengkapi dengan penggalian informasi kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Hal ini dilakukan untuk mengeliminir pengaruh faktor subyektivitas responden mengingat agama merupakan suatu sistem nilai (*keyakinan*) yang berlaku bagi masyarakat secara umum.

Masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang hampir seluruhnya menganut agama Islam. Untuk itu, perspektif normatif dalam penelitian ini lebih ditekankan pada norma dan nilai agama Islam. Terdapat empat aspek terkait norma agama yang

dipandang urgen dalam penelitian tahun 2015 ini yaitu :

- (1) Ketaatan ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan),
- (2) Norma agama terkait hubungan manusia dengan sesama manusia
- (3) Keberadaan / eksistensi tokoh Agama,
- (4) Toleransi beragama.

Berikut disajikan keterikatan masyarakat lokal terhadap empat indikator norma agama di daerah lingkaran tambang PT. NNT tahun 2015.

Tabel 93. Tingkat Keterikatan dan Kepatuhan Masyarakat Lokal terhadap Norma Agama di Daerah Lingkaran Tambang PT. NNT Tahun 2015.

No	Norma Agama	Sebaran Responden (%) Berdasarkan Tingkat Keterikatannya pada Norma Agama				
		Sangat Longgar	Longgar	Biasa (Sedang)	Kuat	Sangat Kuat
1	Peribadatan	0 (0,0)	28 (6,9)	106 (26,1)	223 (55,1)	48 (11,8)
2	Hubungan sesama manusia	0 (0,0)	22 (5,4)	128 (31,6)	232 (57,3)	23 (5,7)
3	kepatuhan terhadap tokoh Agama	11 (2,7)	39 (9,6)	94 (23,2)	198 (48,9)	63 (15,5)
4	Toleransi beragama	5 (1,4)	22 (5,4)	126 (31,0)	235 (58,1)	17 (4,1)

Keterangan : angka dalam kurung adalah persentase (%).

1) Pelaksanaan Ibadah (Hubungan manusia dengan Tuhan).

Secara kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap norma yang terkait pelaksanaan ibadah tetap mengalami perkembangan positif. Tabel 93 di atas menunjukkan sekitar 70

persen responden menyatakan masih terikat dan patuh dengan norma agama terutama dalam hal peribadatan (aturan ibadah). Sisanya menyatakan biasa saja dan adapula yang menyatakan kurang terikat. Dengan demikian, perubahan sosial dengan hadirnya perusahaan tambang PT. NNT tidak serta merta merapuhkan tatanan kehidupan peribadatan masyarakat lokal yang diduga terkena dampak secara langsung dari keberadaan PT. NNT. Bahkan semua tokoh kunci yang diwawancara secara mendalam mengungkapkan secara umum bahwa kehidupan keagamaan / peribadatan semakin baik setelah mulainya kegiatan tambang. Dengan semakin berkurangnya aktivitas masyarakat terkait dengan proses produksi PT. NNT dirasakan semakin menguatnya kehidupan keagamaan. Hasil observasi yang dilakukan di sejumlah tempat ibadah (masjid) menunjukkan keramaian (kemakmuran) masjid pada setiap waktu sholat cukup ramai. Fenomena ini jauh berbeda dengan kondisi sebelum masuknya PT. NNT. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PT. NNT sangat berpengaruh terhadap perkembangan aktualisasi peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

2) Hubungan sesama manusia

Terkait dengan norma agama dalam persoalan hubungan kemasyarakatan tampaknya tidak jauh berbeda dengan norma dalam peribadatan. Sebagian besar responden (lebih dari 60 persen) menyatakan masih terikat kuat dengan aturan atau norma

hubungan kemasyarakatan yang dilandasi aturan agama. Bahkan menurut penuturan informan kunci, masuknya pekerja pendatang dari daerah dan suku bangsa lain memberi dorongan pada masyarakat lokal untuk lebih menunjukkan sistem hubungan sosial berbasis agama yang memang merupakan norma yang dikembangkan sejak awal berkembangnya masyarakat samawa. Saat ini hampir disetiap dusun terdapat majelis ta'lim, kelompok pengajian, kelompok yasinan dan bentuk lain yang berkembang atas spirit agama dan adat istiadat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk aspek-aspek normatif keagamaan (agama Islam) cenderung semakin baik dan berkembang meskipun aktivitas proses produksi dan aktivitas sub kontraktor PT. NNT sudah sangat berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan norma agama diakui oleh responden dan informan mulai dirasakan menguat sejak mulai masa konstruksi yakni dengan terbuka hubungan interaksi dengan pekerja dari luar yang tinggal di sejumlah lokasi di daerah lingkaran tambang.

3) Kepatuhan terhadap Tokoh Agama

Hasil penelitian seperti tersaji pada tabel 93 di atas menggambarkan sebagian besar masyarakat lokal masih terikat bahkan sangat terikat dengan norma kepatutan terhadap tokoh agama. Namun demikian masih ada sebagian kecil yang menyatakan tidak terikat dengan norma hubungan penghormatan terhadap tokoh agama. Anggota masyarakat yang menyatakan kurang atau tidak terikat tersebut karena

adanya penilaian bahwa tokoh agama cenderung komersial dan berorientasi politis. Terkait dengan keberadaan tokoh agama, hasil studi menunjukkan bahwa peran tokoh agama masih sebatas pada peran rutin seperti menjadi imam, khatib, dan pemimpin dalam upacara agama di masyarakatnya sendiri. Kehadiran warga pendatang yang tampak memiliki komitmen keagamaan cukup kuat sangat diterima oleh masyarakat lokal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peran warga pendatang untuk memerankan pemimpin agama, seperti menjadi imam, khatib dan guru mengaji di sejumlah desa di daerah lingkaran tambang. Hal demikian diakui sangat berpengaruh positif terhadap perubahan perilaku dalam pengamalan nilai-nilai spiritual masyarakat lokal.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat ditegaskan bahwa dengan berkembangnya aktivitas tambang kepatuhan masyarakat lokal terhadap norma agama termasuk kepatuhan terhadap tokoh agama tidak mengalami perubahan. Bahkan ada indikasi tingkat kehidupan beragama dan pengamalan norma-norma agama tetap berkembang sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Tokoh masyarakat lokal mengakui bahwa syiar agama Islam dirasakan meningkat dan semakin membangkitkan kesadaran masyarakat untuk pengamalan nilai-nilai spiritual.

4) Toleransi beragama

Berdasarkan hasil penelitian, sejak masa konstruksi, masyarakat lokal memiliki toleransi yang

cukup baik terhadap warga (warga pendatang) yang menganut kepercayaan yang berbeda. Semua informan mengakui hal tersebut dan mengemukakan bahwa sejak beroperasinya tambang, tidak pernah terjadi konflik yang disebabkan perbedaan agama di daerah lingkaran tambang. Warga masyarakat lokal hanya tidak bisa menerima pelaksanaan ibadah agama lain dalam komunitas mereka yang sepenuhnya penganut Islam. Dengan kata lain, warga masyarakat lokal kurang menerima adanya kelompok agama lain melakukan kegiatan peribadatan secara terbuka di sekitar kampung mereka. Hasil penelitian tahun 2015 yang mencoba mengetahui sejauhmana keterikatan normatif masyarakat lokal terkait toleransi beragama menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tersebut termasuk kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh sebagian besar (lebih 50 persen) menyatakan terikat bahkan sangat terikat dengan norma agama dalam kaitannya dengan toleransi. Menurut responden, ada perbedaan dan batas-batas tertentu antara hubungan sosial kemasyarakatan dengan hubungan sosial keagamaan. Prinsip normatif keagamaan tetap perlu dikedepankan dalam rangka membangun hubungan sosial dengan penganut agama lain. Hal inilah yang menyebabkan meskipun arus tenaga kerja dari luar sejak masa konstruksi cukup besar tetapi hingga saat ini tidak ditemukan warga masyarakat lokal yang beralih agama akibat terjadinya interaksi sosial di daerah lingkaran tambang.

c. Sistem Nilai (Aktualisasi Nilai Sosial)

Aktualisasi nilai sosial pada masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT ditelusuri dengan pendekatan observasi terlibat di semua desa di wilayah lingkaran tambang. Ada 4 (empat) indikator sistem nilai masyarakat lokal yang dikaji dalam konteks perubahan sosial budaya daerah lingkaran tambang PT. NNT yaitu :

- (1) Kesetiakawanan (Tolong menolong)
- (2) Kebersamaan (Gotong royong)
- (3) Kejujuran dan Keadilan
- (4) Kepercayaan

Sebagaimana diungkapkan dalam sejumlah hasil penelitian sebelumnya, masyarakat lokal daerah lingkaran tambang merupakan komunitas agraris dengan tingkat kesetiakawanan, kebersamaan, keadilan dan kejujuran serta kepercayaan yang kuat. Tampaknya sejumlah nilai tersebut mengalami perubahan signifikan setelah beroperasinya tambang yang memberikan akses interaksi sosial yang semakin terbuka kepada masyarakat lokal. Masyarakat lokal saat ini berkembang menjadi masyarakat pra moderen yang terbuka dan adaptif terhadap perubahan.

1) Kesetiakawanan (Tolong menolong)

Berdasarkan hasil pengamatan terlibat dan didukung diskusi kelompok terfokus (FGD) serta wawancara mendalam dirumuskan bahwa rasa tolong-menolong saat ini telah mengalami transformasi. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pola

interaksi kelompok sebagai basis tolong menolong, seperti *bawa penulung* (membawa bahan makanan untuk membantu pesta perkawinan), *bawa perenok/ngenong* (membawa bahan makanan pada keluarga yang mengalami musibah kematian) umumnya masih tetap ada namun kadang-kadang divariasikan dengan mengganti barang bawaan tersebut dengan uang. Namun pada prinsipnya aktivitas tolong menolong masyarakat lokal masih berkembang. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan kondisi sebelum masuknya PT. NNT dimana masyarakat lokal hidup dalam komunitas agraris dengan corak subsisten dan mendasari kehidupannya atas rasa kesetiakawanan yang tinggi. Rasa senasib sepenanggungan menjadi landasan interaksi sosial pada masyarakat lokal masa lalu. Dengan demikian, kehadiran PT. NNT dengan operasi tambangnya telah membawa pengaruh kuat terhadap bergesernya kepatuhan masyarakat lokal terhadap nilai-nilai luhur yaitu rasa tolong menolong.

2) Kebersamaan (Gotong Royong)

Gotong royong merupakan salah satu perwujudan dan pengamalan nilai kebersamaan masyarakat lokal terutama di daerah pedesaan. Hasil penelitian tahun 2015 menemukan bahwa gotong royong sebagai suatu pranata lokal mengalami transformasi sehingga praktik dan sifat gotong royong tidak lagi sebagaimana kondisi pada masa sebelum masuknya tambang. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya masyarakat desa lingkaran tambang pada

awalnya merupakan masyarakat tradisional dengan basis kehidupan di sektor pertanian rakyat. Corak kehidupannya adalah agraris subsisten. Dengan demikian, sebagai ciri komunitas agraris subsisten, pada masa lalu (sebelum masuknya perusahaan tambang PT. NNT) tatanan sosial budaya yang cukup berkembang adalah Gotong royong terutama untuk aktivitas produksi pertanian. Gotong royong dipandang sebagai salah satu bentuk interaksi antar warga. Kegiatan gotong royong tersebut berlangsung untuk berbagai aspek kehidupan, seperti: bercocok tanam, membangun rumah, melaksanakan upacara adat dan ritual (perkawinan, kematian, dan upacara selamatan lainnya), membersihkan kampung, membangun fasilitas umum (masyarakat) dan sebagainya.

Perkembangan kegiatan gotong royong dalam maknanya yang asli jarang dijumpai lagi, kecuali pada aspek kehidupan yang terkait dengan adat istiadat masyarakat lokal. Berkurangnya gotong royong pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada awalnya disebabkan oleh meningkatnya kesibukan warga dengan pekerjaan sehari-hari dan bergesernya orientasi mereka kearah yang lebih mandiri dan rasional. Selain itu, ada beberapa obyek yang dulunya bisa digotong royongkan tapi pada saat ini sudah kurang memungkinkan karena dianggap tidak efektif. Berdasarkan ungkapan responden dan informan kunci, nilai-nilai kekerabatan masyarakat lokal semakin longgar, bahkan secara kasuistik ada rasa

persaingan di antara masyarakat lokal sendiri terutama berkaitan dengan kemampuan mereka mengakses perusahaan PT. NNT.

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian terdahulu, kebiasaan memberikan pertolongan atau partisipasi sosial dengan uang berkembang setelah masuknya perusahaan tambang PT. NNT dan terus berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesibukan anggota masyarakat dengan pekerjaan produktif pada masa konstruksi. Kesibukan di sektor pekerjaan tidak memberi peluang yang banyak untuk partisipasi sosial dalam bentuk kegiatan padat karya sebagaimana yang berkembang sebelum tambang. Prinsip sosial dan kebersamaan nampaknya tetap berlangsung tapi tergantikan oleh bentuk lain, terutama uang (dalam istilah masyarakat “amplop”).

Pada masa masa ketika corak kehidupan masyarakat didominasi kehidupan agraris tradisional, nilai kebersamaan masyarakat lokal yang lebih hakiki diwujudkan dalam kegiatan membangun rumah (*Besantek*) dan kegiatan pertanian, seperti *Besiru* (mengerjakan sebidang lahan secara bersama-sama dan bergiliran antar penggarap lahan tanpa diupah). *Besiru* tersebut biasanya berlaku untuk pekerjaan pengolahan lahan, menanam, menyang sampai panen. Dalam satu dekade terakhir, kegiatan *besiru* bales diakui oleh semua responden semakin berkurang. Berkurangnya aktivitas *Besiru* tersebut

dalam pandangan masyarakat lebih disebabkan oleh diintrodusirnya paket teknologi pertanian (intensifikasi) seperti penggunaan benih unggul, dan peralatan mekanisasi pertanian.

3) Nilai Keadilan dan Kejujuran

Nilai keadilan yang pernah secara utuh dimiliki masyarakat lokal di masa lalu adalah sama rata dan sama rasa. Sedangkan nilai kejujuran berkembang dari nilai-nilai agama Islam yang mereka anut secara turun temurun. Dengan masuknya modernisasi dan perubahan sosial diberbagai bidang, berangsur angsur nilai keadilan tersebut mengalami penipisan. Artinya, prinsip keadilan lebih dipertimbangkan pada faktor hak hak yang harus diterima oleh setiap orang. Tabel 93 menunjukkan sekitar 20 persen masyarakat lokal menilai rasa keadilan dan kejujuran tersebut dalam katagori buruk. Sekitar 31 persen menilai masih berkembang seperti biasa dan selebihnya menilai bahwa nilai keadilan dan kejujuran termasuk katagori baik.

Konfirmasi hasil FGD dan wawancara mendalam menyimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan yang pernah dimiliki masyarakat lokal cenderung berkurang saat ini. Masyarakat lokal ikut terlibat dalam berbagai persaingan perebutan sumberdaya ekonomi dan perburuan status sosial lainnya. Hal ini menurut tokoh masyarakat setempat menggiring masyarakat ke dalam perilaku persaingan antar sesama dalam berbagai hal. Munculnya rasa ketidakadilan justru

terjadi apabila ada anggota masyarakat yang merasa kurang berhasil dalam persaingan sumberdaya tersebut. Dengan demikian, keberadaan PT. NNT yang telah membuka akses pemanfaatan sumberdaya ekonomi dinilai menjadi pemicu munculnya sifat kompetitif dan berdampak pada berkurangnya perwujudan nilai-nilai keadila dan kejujuran.

4) Kepercayaan Tradisional

Dinamika interaksi masyarakat lokal dengan komunitas lain dan semakin rasionalnya pola pikir dan perilaku masyarakat terutama setelah mulainya kegiatan tambang menyebabkan sistem kepercayaan lokal tradisioanal tetap dipercayai esensinya namun kurang diaplikasikan oleh masyarakat lokal. Kepercayaan mereka terhadap berbagai gejala alam, gejala pada flora dan fauna itu memang masih ada, tetapi mulai berkurang dalam implementasinya. Hal ini diduga karena semakin banyaknya alternatif pilihan tindakan serta menyebarnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Berkembangnya berbagai perubahan setelah aktivitas tambang berlangsung ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem kepercayaan tradisional masyarakat lokal.

Hasil penelitian tahun 2015 menggambarkan sebagian tokoh masyarakat (Key informan) menyatakan masih kuat meyakini aspek-aspek kepercayaan tradisional yang berkembang sejak mereka berada di daerah lingkaran tambang. Hasil studi terdahulu mengemukakan bahwa masyarakat lokal

pada dasarnya memiliki nilai kepercayaan terhadap berbagai gejala alam, seperti posisi dan jenis bintang, gerhana, gempa bumi dan perubahan pada flora fauna yang ada disekitarnya. Kepercayaan berdasarkan gejala alam umumnya dikaitkan dengan kepentingan masyarakat di bidang mata pencaharian, seperti pertanian, kelautan / nelayan dan sebagainya. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa keyakinan tersebut tetap melekat terutama pada kalangan orang tua, akan tetapi dalam penerapan usahanya lebih ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia.

Studi tahun 2015 ini juga menunjukkan bahwa kearifan lokal pada masyarakat bercorak pedesaan, kelompok rumah tangga petani dan nelayan, memang masih banyak mengacu kepada ketentuan tradisional yang kejelasannya bersumber dari para *Sandro* (Dukun). Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan inovasi baru yang menyentuh semua lapisan masyarakat, terus berpengaruh terhadap pergeseran tingkat keyakinan masyarakat terhadap kearifan lokal dan modal sosial tersebut. Meningkatnya intensitas interaksi dengan masyarakat luar, meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai turut memperlancar penurunan sistem kepercayaan masyarakat lokal tersebut.

Terjadinya transformasi nilai dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif, namun dari perspektif

penguatan sosial hal ini menggambarkan semakin berkurangnya pranata lokal yang pada gilirannya berimplikasi pada melemahnya kekompakan dan solidaritas sosial. Sebab umumnya masyarakat tradisional banyak diikat atau disatukan oleh nilai-nilai lokal sebagai bentuk ketahanan sosialnya. Sebagaimana diungkap sebelumnya, bahwa pada masa sebelum tambang, pranata lokal dalam berbagai tinjauan justru dijadikan sarana oleh masyarakat lokal untuk menjaga keharmonisan hidup, terutama menjamin keselarasan hidupnya dengan sesama manusia dan lingkungannya.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dikatakan bawa tidak ada dampak yang signifikan dari kegiatan penambangan terhadap perubahan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Sebagaimana diungkap oleh tokoh masyarakat setempat, sesungguhnya pola kepercayaan banyak dipengaruhi oleh kemampuan berfikir dan pengalaman yang dimiliki. Artinya, semakin terbuka dan meluas daya pikir seseorang dan didukung dengan pengalaman yang memadai, maka tingkat kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan mistik (termasuk gejala alam) semakin berkurang.

3. Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Lokal

Terkait dengan perubahan sosial budaya pada masyarakat lokal dalam situasi lingkungan yang berubah, penelitian ini juga menggali bagaimana orientasi nilai budaya masyarakat lokal setelah lebih

dari satu dekade berkembangnya kegiatan produksi tambang PT. NNT. Kerangka konsep orientasi nilai budaya yang digunakan adalah orientasi nilai budaya menurut Kluckhon yang mencakup 5 indikator, yaitu : 1) hakekat hidup, 2) hakekat karya, 3) hakekat keberadaan dalam dimensi ruang dan waktu, 4) hakekat hubungan manusia dengan manusia dan 5) hakekat hubungan manusia dengan alam. Berikut disajikan hasil penelitian seperti tertera pada tabel 94 berikut.

Tabel 94. Sebaran Responden Berdasarkan Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Lokal di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT Tahun 2015.

No	Nilai Budaya	Sebaran Responden (%) Berdasarkan Orientasi Nilai Budaya		
		Orientasi masa lampau (Tradisional)	Orientasi saat ini (Transisi)	Orientasi masa depan (Moderen)
1	Hakekat Hidup	43 (10,6)	138 (34,1)	224 (55,3)
2	Hakekat Karya	88 (21,8)	121 (29,8)	196 (48,4)
3	Hakekat Keberadaan dalam Ruang dan waktu	22 (5,4)	166 (40,1)	217 (53,5)
4	Hakekat Hubungan Sesama manusia	40 (9,8)	143 (35,4)	222 (54,8)
5	Hakekat hubungan dengan alam	71 (17,6)	189 (46,6)	145 (35,8)

Keterangan : angka dalam kurung adalah persentase (%).

a. Hakekat Hidup Masyarakat Lokal

Tabel di atas menggambarkan bahwa orientasi nilai budaya dalam aspek memaknai hakekat hidup menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lokal (lebih dari 60 persen) memiliki orientasi hidup masa depan. Artinya, sebagian besar masyarakat lokal memandang bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sesuatu yang sulit dan berat namun diperlukan perjuangan (kerja keras) untuk memperbaikinya. Hidup adalah suatu takdir tetapi manusia berkewajiban untuk berikhtiar mencari takdirnya yang lebih baik.

Pada masa lalu, bagi masyarakat lokal hidup adalah sesuatu yang sulit dan manusia hanya menerimanya sebagai suatu nasib dan takdir yang tidak bisa berubah. Kehadiran PT. NNT yang telah membuka akses sumberdaya, ilmu pengetahuan dan iptek serta perilaku produktif lainnya secara sistematis telah menjadi awal perkembangan dan perubahan orientasi masyarakat lokal dalam memaknai arti hidup yang sebenarnya. Lebih lanjut, perubahan orientasi ini telah memperbaiki etos kerja masyarakat lokal secara umum. Hasil pengamatan tahun 2015 menemukan bahwa sebagian besar angkatan kerja warga masyarakat lokal menyatakan kesediaannya untuk bekerja pada bidang apapun yang tersedia di dalam maupun diluar daerah lingkaran tambang yang penting dapat menunjang

keberlanjutan kehidupan dan dapat beradaptasi ditengah perkembangan yang berlangsung.

b. Hakekat Karya (Bekerja) Masyarakat Lokal

Orientasi nilai masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang PT. NNT mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini diakui oleh semua responden dan informan kunci. Saat ini, bagi masyarakat lokal bekerja adalah hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk yang memang harus bekerja. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lokal memandang bahwa karya (bekerja) dilakukan untuk menghasilkan karya baru yang lebih baik. Inilah pola pikir yang dipandang sebagai pola orientasi yang mengarah kepada kemajuan. Meskipun demikian masih terdapat anggota masyarakat lokal yang termasuk katagori masyarakat transisi karena masih memandang bahwa karya (kerja) yang dilakukan untuk memperbaiki status dalam berbagai hal. Sebagian lainnya, yakni 21 persen termasuk katagori buruk karena memandang karya (kerja) dilakukan semata mata untuk mempertahankan hidup (survival).

Dibandingkan dengan kondisi sebelum masuknya PT. NNT, orientasi budaya (hakekat karya) tersebut mengalami perubahan cukup signifikan. Hal ini terkait dengan terjadinya transformasi sosial ekonomi dan budaya pada masyarakat lokal setelah berlangsungnya aktivitas tambang PT. NNT. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan PT. NNT

telah berkontribusi terhadap perbaikan dan perkembangan orientasi nilai budaya masyarakat lokal dalam aspek pandangannya terhadap hakekat karya. Hal inilah dinilai paling sejalan dengan peningkatan etos kerja dan produktivitas masyarakat khususnya masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang.

c. Hakekat Keberadaan dalam Dimensi Ruang dan Waktu

Sebelum masuknya PT NNT, sebagian besar masyarakat lokal termasuk masyarakat agraris tradisional yang cenderung tertutup. Kondisi geografis dan terbatasnya aksesibilitas kawasan menjadi faktor utama terbatasnya orientasi budaya masyarakat lokal. Dengan mulai dibukanya tambang PT. NNT maka sebagian besar akses masyarakat lokal juga terbuka dan lama kelamaan berpengaruh terhadap orientasi nilai budaya mereka.

Sebagaimana tercantum pada Tabel 94, hakekat keberadaan masyarakat lokal dalam dimensi ruang dan waktu juga termasuk kategori baik. Lebih dari 50 persen responden menilai bahwa hidup ini untuk masa depan dan bisa berkembang ditempat lain. Gambaran ini membenarkan bahwa masyarakat lokal telah berorientasi terbuka dalam segala segi kehidupan. Selain itu, sekitar 40 persen berorientasi pada kondisi saat dan di tempat semula (daerah asal), sebagian kecil saja yang masih berorientasi pada masa lampau di daerah sendiri. Data kuantitatif tersebut mengindikasikan bahwa saat ini terjadi perkembangan

orientasi masyarakat lokal yang lebih baik. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa keberadaan PT NNT berdampak positif terhadap orientasi nilai budaya masyarakat lokal pada aspek hakekat keberadaan manusia dalam dimensi ruang dan waktu.

d. Hakekat Hubungan Manusia dengan Sesama Manusia

Pada penelitian tahun 2015 ini ditemukan perkembangan yang cukup mencolok menyangkut orientasi nilai yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia dalam perspektif masyarakat lokal di daerah lingkaran tambang. Awalnya, masyarakat lokal terbangun dalam struktur sosial dengan solidaritas yang tinggi sebagaimana masyarakat agraris tradisional umumnya. Setelah masuknya PT. NNT yang disertai dengan berbagai intervensi perubahan maka orientasi nilai terkait dengan proses sosial dalam hubungan sesama manusia juga berkembang. Tabel 94 menunjukkan sebagian besar orientasi masyarakat lokal terkait hubungan antar manusia termasuk kategori baik. Artinya, sebagian besar masyarakat lokal saat ini tidak lagi bergantung kepada orang lain dalam aktivitas kehidupannya. Dengan kata lain, masyarakat lokal semakin berkembang menjadi lebih mandiri dan menilai bahwa problema dan dinamika kehidupan adalah dari diri, oleh diri dan untuk diri sendiri. Orientasi ini menggambarkan masyarakat dengan pola pikir maju dan terbuka. Selain itu, masyarakat lokal juga masih

cukup banyak yang berorientasi membangun kerja sama dengan orang lain, artinya mereka meyakini bahwa seseorang tetap harus membutuhkan orang lain dalam kehidupannya dalam berbagai aktivitas.

Sebagai suatu orientasi nilai tentu hal ini tidak lebih baik bila dibandingkan dengan prinsip dan orientasi kemandirian yang telah dimiliki sebagian besar masyarakat lokal lainnya. Hanya sebagian kecil saja (sekitar 9 persen) yang orientasinya termasuk kategori buruk dimana mereka menilai bahwa kehidupannya akan selalu tetap bergantung kepada orang lain. Berkurangnya orientasi ketergantungan tersebut menandakan bahwa sejak berkembangnya kegiatan tambang PT. NNT masyarakat lokal terus berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu kehadiran PT. NNT dengan berbagai perubahan yang ditimbulkan terhadap masyarakat lokal juga telah memberi pengaruh positif terhadap perubahan orientasi masyarakat yakni dari orientasi ketergantungan terhadap orang lain menjadi tidak tergantung pada orang lain (mandiri) bahkan perubahan dari orientasi domestik (rumah tangga) ke orientasi publik.

e. kekat hubungan Manusia dengan Alam

Berdasarkan gambaran hasil penelitian 2015 sebagaimana tersaji pada tabel 94 dapat ditegaskan bahwa kehadiran PT. NNT dengan aktivitas tambang telah memberikan pengaruh positif terhadap

perubahan orientasi budaya masyarakat lokal terkait dengan hakekat hubungan manusia dengan alam.

Pada masa sebelum tambang, masyarakat lokal diketahui sangat dekat dengan alam dan berpendapat bahwa alam harus dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Alam dengan segala isinya merupakan sumberdaya bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu manusia senantiasa berinteraksi dengan alam dalam rangka keberlangsungan hidupnya. Pada tahun 2015 seperti tampak pada tabel 94 terlihat sebagian besar masyarakat lokal yang memiliki orientasi masa kini dan masa depan. Mereka yang berorientasi masa kini menilai bahwa manusia harus tetap menjaga alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya. Sedangkan yang berorientasi moderen menyatakan bahwa manusia harus menjamin kelestarian dan keserasian lingkungan untuk kehidupan generasi yang akan datang. Hal ini menggambarkan bahwa sudah cukup banyak masyarakat yang berfikir bahwa untuk bisa berkembang hidup, manusia harus bisa memanfaatkan alam dan berfikir untuk membangun keserasian dengan alam.

4. Keamanan dan Ketertiban Sosial

Untuk menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, dilakukan kajian terhadap 4 (empat) indikator, yaitu : (1) konflik sara, (2) pencurian/perampokan (3) kenakalan remaja, miras, narkoba dan prostitusi, (4) Kriminal dan konflik sosial

lain. Hasil penelitian tahun 2015 selengkapnya disajikan pada tabel 95 berikut.

Tabel 95 Sebaran Responden Berdasarkan Penilaiannya terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Lokal di Daerah Lingkar Tambang PT. NNT tahun 2015.

No	Obyek Keamanan dan Ketertiban	Sebaran Responden (%) Berdasarkan Penilaiannya terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Biasa (Sedang)	Kurang	Sangat Kurang
1	Konflik Sara	0 (0,0)	0 (0,0)	54 (13,3)	226 (55,8)	125 (30,9)
2	Pencurian/Perampokan	26 (6,4)	164 (40,5)	98 (24,2)	89 (21,9)	28 (6,9)
3	Miras, Narkoba dan Prostitusi	112 (27,6)	159 (39,2)	97 (23,9)	25 (6,2)	12 (2,9)
4	Konflik Sosial lain	15 (3,7)	97 (23,9)	125 (30,8)	103 (25,5)	65 (16,1)

Keterangan : angka dalam kurung adalah persentase (%).

Hasil penelitian dengan observasi terlibat di semua desa dalam lingkaran tambang PT. NNT tahun 2015 menunjukkan bahwa keresahan sosial dan gangguan ketertiban umum ternyata tidak banyak terjadi. Berikut diuraikan pada masing-masing indikator ketertiban umum :

a. Konflik Sara

Memasuki tahun 2015, masyarakat di daerah lingkaran tambang PT, NNT telah menyadari bahwa eksistensi PT. NNT semakin berkurang. Sejumlah karyawan habis masa kontraknya dan banyak diantaranya yang mengajukan *resign*. Selain itu, sejumlah sub kontraktor tidak lagi beroperasi sehingga menyebabkan dinamika sosial ekonomi masyarakat lingkaran tambang juga mengalami penurunan. Situasi tersebut diperkirakan akan berdampak pada munculnya keresahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Keamanan dan ketertiban sosial merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa berkembang dalam suatu lingkungan sosial yang sedang berkembang. Berdasarkan studi terdahulu, rona awal daerah lingkaran tambang berupa kawasan agraris yang relatif terisolir dan aksesibilitas kawasan sangat terbatas. Disamping itu, kehidupan sosial sangat bersahaja dan harmonis. Gangguan keamanan dan ketertiban sangat jarang terjadi. Tahun 2015 konflik yang berbaur sara jarang terjadi di daerah lingkaran tambang yang melibatkan masyarakat lokal. Sebagian besar responden mengakui bahwa gangguan keamanan dan ketertiban karena konflik suku, ras dan agama sangat jarang terjadi meskipun operasi tambang melibatkan banyak pekerja dari luar daerah yang menetap di sekitar lingkaran tambang.

Melalui penelusuran mendalam terhadap sejumlah tokoh masyarakat dan hasil diskusi kelompok terarah (FGD) diketahui bahwa konflik terkait sara selama ini eskalsinya sangat kecil dan masih bersifat tertutup. Konflik tertutup tersebut lebih disebabkan ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap alokasi dan distribusi kesempatan kerja yang ada di PT. NNT dan sub kontraktornya. Masih dijumpai masyarakat lokal yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya atas keberadaan PT. NNT dan menilai bahwa kesempatan kerja dan peluang bersaha yang ada lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang dari suku dan daerah lain. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa keberadaan PT. NNT tidak

berpengaruh nyata terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan oleh sentimen suku, ras dan agama.

b. Pencurian / Perampokan

Tabel 95 menunjukkan bahwa masyarakat lokal menilai kejadian pencurian / perampokan cukup sering terjadi pada tahun 2015. Sekitar 40 persen responden menilai kejadian pencurian termasuk tinggi di daerah lingkaran tambang. Tampaknya penilaian tersebut berdasarkan apa yang dirasakan masyarakat lokal dibandingkan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Konfirmasi yang dilakukan dari aparat kepolisian Sektor Jereweh dan Maluku, diungkapkan : kriminalitas dan kejadian ikutan lainnya tidak mengalami perkembangan signifikan pada tahun 2015. Kecenderungannya justru terjadi penurunan dibandingkan lima tahun lalu.

Namun demikian, dalam pandangan masyarakat lokal, kejadian kriminalitas, terutama pencurian ternak masih terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai dalam kawasan lingkaran tambang. Tidak jauh berbeda dengan hasil studi tahun 2008, pada tahun 2009 juga terungkap adanya tindakan pencurian ternak yang diduga dilakukan melalui laut, dibawa dengan perahu dan diduga juga hasil curian dibawa ke pulau Lombok. Penjalan ini masih sejalan dengan temuan hasil penelitian tahun sebelumnya.

c. Kenakalan Remaja, Miras, Narkoba dan Prostitusi

Gangguan keamanan dan ketertiban yang dalam bentuk konsumsi miras, narkoba dan prostitusi dinilai masih tinggi. Sebanyak 39, 2 persen responden menilai kejadian tersebut masih tinggi dan sebanyak 27,6 persen menyatakan sangat tinggi. Penilaian ini menggambarkan bahwa masyarakat lokal merasakan gangguan keamanan dan ketertiban akibat masih banyak berkembang penikmat miras, narkoba dan prostitusi di daerah lingkaran tambang.

Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, bahwa frekuensi kejadian prostitusi dan keramaian di sekitar kawasan wisata Pasir Putih Maluk cenderung mengalami peningkatan antara tanggal 25 sampai tanggal 5 setiap bulannya, sementara tanggal lainnya frekuensinya cenderung menurun. Dijelaskan oleh masyarakat bahwa tanggal tanggal tersebut merupakan tanggal penggajian karyawan yang bekerja di PT. NNT atau sub kontraktornya. Berdasarkan keterangan ini maka keberadaan PT. NNT memberi dampak cukup besar terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di daerah lingkaran tambang.

Diakui oleh semua informan kunci bahwa persoalan gangguan keamanan dan ketertiban ini sangat merisaukan masyarakat. Oleh sebab itu sinyalemen masyarakat yang menyebutkan bahwa fasilitas hiburan yang bertambah mendorong

peningkatan pelanggaran moral saat ini dapat dibenarkan dalam perspektif ini. Namun bila dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun lalu, terutama pada masa konstruksi dan masa awal tahap produksi, kondisi keamanan dan ketertiban pada masa sekarang jauh lebih baik dan kondusif, baik kualitas maupun kuantitasnya.

d. Konflik Sosial Lainnya

Konflik sosial dan gangguan ketertiban umum seperti perkelahian dan perjudian dinilai sebagai penyimpangan sosial yang cukup berkembang beberapa tahun terakhir dan telah mengkontaminasi perilaku kehidupan masyarakat lokal, terutama kalangan pemuda. Dalam FGD masih terungkap dugaan bahwa kawasan wisata Maluku (Pasir Putih) yang dilengkapi sarana dan prasarana hiburan malam disinyalir sebagai tempat perjudian dan sering menjadi pemicu perkelahian. Namun demikian, penelitian ini tidak menggali secara kuantitatif seberapa jumlah atau proporsi warga masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas mengganggu ketertiban dan terlibat perjudian dan perkelahian yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Konfirmasi dari aparat keamanan yang ada di sektor Maluku maupun Jereweh menyatakan kondisi keamanan dan ketertiban cukup kondusif hingga tahun 2015. Tidak ada kejadian gangguan ketertiban yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Kalaupun ada, eskalasinya relatif kecil dan tidak berpengaruh

terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Gangguan ketertiban bersakal kecil yang terjadi berupa perkelahian pemuda, mabuk-mabukan dan sejenisnya yang tidak mengganggu ketertiban umum secara permanen.

Konflik horizontal antar warga kadang terjadi karena perbedaan layanan yang diterima dari perusahaan, baik layanan langsung maupun melalui Yayasan atau LSM lainnya yang ditetapkan PT. NNT sebagai penghubungnya dengan masyarakat dalam kerangka pengembangan masyarakat. Akan tetapi konflik tersebut lebih bersifat tertutup sehingga jarang sekali muncul sebagai konflik terbuka yang dapat berpengaruh buruk pada keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hingga memasuki tahun 2015 potensi konflik sosial masih dirasakan oleh masyarakat lokal. Pada masa konstruksi hingga masa awal kegiatan produksi banyak muncul konflik sosial baik yang bersifat horizontal maupun konflik vertikal. Salah satu pemicu konflik adalah perbedaan akses masyarakat terhadap perusahaan PT. NNT, terutama menyangkut kesempatan kerja dan distribusi bantuan pengembangan masyarakat PT. NNT. Sejalan dengan semakin kontinyunya kegiatan produksi dan masyarakat telah mampu beradaptasi secara baik, konflik-konflik sosial juga semakin jarang terjadi.

Tabel 95 menunjukkan bahwa sekitar 23,9 persen masyarakat lokal menilai konflik sosial masih

cukup tinggi pada tahun 2015. Tidak diperoleh informasi aktual mengenai konflik sosial yang lingkungannya cukup luas dan menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Gejalaan dengan hasil penelitian sebelumnya, Konflik yang terjadi selama tahun 2015 walaupun ada namun cakupannya sangat terbatas dan tidak menimbulkan dampak kepada aspek sosial lainnya. Konflik sosial yang masih terjadi berkisar pada masalah kebutuhan masyarakat terhadap prasarana dan pelayanan lain yang diharapkan dapat diadakan oleh PT. NNT. Menurut keterangan sejumlah aparat pemerintah kecamatan dan desa, konflik terbuka hampir tidak terjadi pada tahun 2015, namun demikian potensi konflik tetap saja ada seperti kecemburuan sosial masyarakat non karyawan terhadap karyawan PT. NNT dan sub kontraktornya.

5. Pembauran Sosial

Pembauran sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang di daerah lingkaran tambang PT. NNT berlangsung sangat baik. Tidak ada permasalahan atau konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pendatang. Hasil studi tahun 2015 juga menunjukkan semua responden dan informan kunci (100 %) mengakui pembauran sosial tidak ada hambatan dan berlangsung dengan baik. Saat ini, masyarakat lokal menerima siapa saja warga pendatang dari daerah lain, selama tidak dinilai mendapatkan hak-hak istimewa dari perusahaan

tambang atau tidak dinilai sebagai kompetitor yang merugikan kepentingan ekonomi masyarakat lokal. Meskipun dalam kenyataannya kaum pendatang secara langsung merupakan kompetitor ekonomi masyarakat lokal namun tidak ada satu orangpun masyarakat lokal yang menilai hal tersebut sebagai ancaman. Keberadaan kaum pendatang yang umumnya bekerja di perusahaan PT. NNT atau subkontraktornya maupun yang bekerja di sektor publik lainnya lebih diposisikan sebagai mitra dan menjadi pendorong membangun etos kerja.

Hal tersebut berarti sebagian besar masyarakat lokal dapat menerima interaksi sosial dengan warga pendatang dan membaur dalam satu sistem sosial yang sama. Dalam dua tahun terakhir diakui oleh responden bahwa intensitas kedatangan warga pendatang relatif kurang bahkan kecenderungan warga pendatang yang telah tinggal di sekitar lingkaran tambang kembali ke daerah asalnya.

Terkait dengan keberadaan warga pendatang, masyarakat lokal terutama tokoh masyarakat menyangkan adanya sebagian karyawan PT. NNT yang harus kembali ke tempat asal setiap minggu sebagai konsekwensi sistem pembagian hari kerja yang diterapkan oleh PT. NNT. Hal ini dipandang merugikan daerah lingkaran tambang. Harapannya adalah mereka tetap beraktivitas dan membelanjakan pendapatannya di daerah lingkaran tambang agar bisa memicu efek ganda (*multiplier effect*) dan memacu roda

perekonomian lingkaran tambang, dan terutama bagi masyarakat lokal.

Studi untuk tahun 2015 juga menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang masih berinteraksi intensif dengan masyarakat dari daerah lain adalah para pekerja perusahaan dan para pedagang di sekitar desa. Masyarakat umum lainnya pada saat ini memang kurang berinteraksi karena pekerja pendatang relatif sedikit tinggal berdomisili di dalam desa. Berdasarkan penuturan sejumlah responden yang selama ini aktif berinteraksi dengan pekerja pendatang dari daerah lain, diketahui bahwa mereka banyak yang larut dalam budaya masyarakat lokal, dan banyak pula anggota masyarakat lokal yang mencontoh budaya para pekerja pendatang tersebut.

Berdasarkan uraian ini, maka dapat ditegaskan bahwa interaksi sosial di desa lingkaran tambang berlangsung cukup baik sehingga tidak menimbulkan distorsi sosial dalam proses pembaurannya. Aspek yang perlu dikembangkan adalah peningkatan rasa toleransi warga pendatang terhadap masyarakat lokal dan tidak mendiskreditkan / diskriminasi warga masyarakat lokal terkait dengan akses terhadap perusahaan (PT. NNT) dan sub kontraktorserta sektor kerja ikutannya yang beroperasi di daerah lingkaran tambang.

Sebagaimana temuan penelitian sebelumnya, penelitian tahun 2015 ini juga menangkap indikasi bahwa masjid masih berperan nyata dalam

membangun pembauran sosial antara masyarakat lokal dengan pendatang. Keaktifan para pendatang dalam majlis taklim dan kegiatan ibadah rutin di masjid-masjid dalam desa semakin mempercepat penerimaan masyarakat lokal terhadap pendatang. Interaksi sosial yang berawal dari masjid ini dinilai sangat mampu melekatkan hubungan sosial pendatang dengan masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa masyarakat lokal lingkaran tambang sangat menghargai, menghormati dan terbuka dengan masyarakat pendatang yang dinilai taat dalam menjalankan ibadah. Selain itu, hasil observasi terlibat dalam kurun waktu cukup lama memastikan bahwa berbagai sarana berkembangnya pembauran sosial warga pendatang dengan masyarakat lokal adalah aktivitas ekonomi sehari-hari. Warga pendatang yang menyewa rumah pada warga setempat, atau tenaga kerja luar yang bekerja di usahatani masyarakat lokal, sejumlah kegiatan sosial yang bisa diikuti warga pendatang dipandang sebagai wahana pembauran sosial yang semakin lama semakin baik.

Munculnya konflik-konflik kecil secara insidental selama ini, lebih disebabkan karena faktor persaingan dan perbedaan kemampuan masyarakat mengakses perusahaan terutama yang terkait dengan pekerjaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat (responden) yang menyatakan bahwa pekerja pendatang lebih diutamakan menjadi pekerja di perusahaan dibandingkan warga setempat

meskipun tingkat pengetahuan dan ketrampilan mereka tidak jauh berbeda. Persepsi yang kurang baik tersebut seringkali menyebabkan sikap kurang positif terhadap pekerja pendatang, bahkan banyak diantara masyarakat lokal yang bersikap skeptis, terutama mereka yang pernah gagal memasuki lapangan kerja yang tersedia di perusahaan.

Dalam persepsi tokoh masyarakat lokal, seyogyanya beberapa pekerjaan (terutama yang tidak langsung berkaitan dengan bidang keahlian tambang) seperti di departemen hubungan masyarakat, pengembangan masyarakat dan pekerjaan teknis non mining di lapangan lebih banyak diberikan kesempatan kepada masyarakat lokal. Sejumlah program pengembangan masyarakat untuk mengurangi distorsi sosial ternyata belum mampu merekatkan hubungan sosial secara total antara masyarakat lokal dengan pekerja pendatang yang berdomisili di daerah lingkaran tambang.

6. Infrastruktur Sosial Budaya

Secara kuantitatif tidak ada perbedaan mencolok keadaan infrastruktur sosial budaya tahun 2015 dengan tahun sebelumnya. Hal ini dilihat berdasarkan perkembangan jumlah, peran dan fungsi lembaga sosial budaya dalam mendukung pelayanan kehidupan masyarakat di daerah lingkaran tambang.

Kelembagaan formal cenderung meningkat sejalan dengan makin beragamnya aktivitas masyarakat di bidang sosial budaya. Sementara

keberadaan kelembagaan tradisional semakin berkurang di tengah masyarakat lingkaran tambang. Kelompok-kelompok olah raga dan kesenian cukup berkembang dalam tiga tahun terakhir. Sebagaimana dituturkan oleh sejumlah responden, bahwa adanya inisiatif PT.NNT dan pemerintah desa setempat mengadakan pertandingan atau perlombaan kesenian dan olah raga dalam even-even tertentu ternyata dapat membangkitkan semangat masyarakat lokal untuk menghidupkan kembali kelembagaan yang pernah ada dan membentuk kelembagaan baru dalam bentuk kelompok-kelompok seni dan olah raga di setiap desa.

Infrastruktur sosial budaya juga tidak menunjukkan perkembangan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Perkembangan infrastruktur sosial budaya termasuk cukup baik dengan keberadaan PT. NNT. Seluruh responden dan informan menyatakan bahwa keberadaan PT. NNT telah mampu mengembangkan infrastruktur sosial budaya, terutama pendidikan, prasarana ibadah, olah raga, kesenian, kesehatan dan fasilitas publik lainnya. Secara kuantitatif jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu.

Gambaran jumlah infrastruktur sosial budaya yang ada di tiga kecamatan daerah lingkaran tambang PT. NNT pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel.96 Ketersediaan infrastruktur sosial budaya di tiga Kecamatan Lingkar tambang tahun 2015

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah ketersediaan di tiga Kecamatan daerah lingkar tambang		
		Jereweh	Maluk	Sekongkang
1	SD /MI/SDLB	7	6	8
2	SLTP/M.Ts	3	2	6
3	SLTA/MA	1	0	2
4	Taman Kanak	10	7	9
5	PAUD	8	2	5
6	Sanggar Hiburan	4	2	2
7	Klp. Kesenian	4	1	3
8	Lap. Olah raga	5	3	7
9	Fasl. Olah raga	1	1	1
10	Masjid	7	6	6
11	Musholla	9	8	11
12	TPA/TPQ	9	6	7
13	Gereja	-	-	-
14	Lain-Lain			

Sumber : Kantor Desa di Tiga Kecamatan

Sebelum masuknya PT. NNT prasarana ibadah yang tersedia di tiap desa berupa Masjid dan Langgar (Musholla). Kondisi fisik sejumlah prasarana ibadah masih sederhana, sebagaimana yang ada di Desa Goa, Beru, Belo, Benete, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Tongo Sejong, dan Aik kangkung dan desa pemekaran baru lainnya. Prasarana peribadatan bagi pemeluk agama / kepercayaan lain tidak tersedia sama sekali.

Upaya pengembangan masyarakat yang sangat mendapat perhatian Comdev PT. NNT adalah pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Berbagai program diluncurkan, seperti pembangunan sekolah baru, renovasi bangunan, pengadaan sarana

belajar, peningkatan kapasitas pendidik hingga program beasiswa yang sangat membantu masyarakat lingkaran tambang. Sebagaimana tersaji pada tabel 96 di atas, ketersediaan prasarana pendidikan meningkat pesat dibandingkan sebelum masuknya tambang. Selain aspek kuantitas, program pengembangan masyarakat PT. NNT juga banyak mengembangkan upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan pengadaan sarana belajar mengajar yang lebih memadai.

Ketersediaan prasarana sosial budaya, seperti tempat peribadatan, gedung sekolah dan fasilitas pelayanan sosial budaya lainnya diakui terus meningkat oleh seluruh masyarakat. Namun pada tahun 2015 tidak terjadi penambahan secara kuantitatif. Artinya, keberadaan, jumlah dan jenis infrastruktur sosial budaya yang ada tahun 2015 memang sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya.

Prasarana sosial budaya yang juga meningkatkan ketersediaannya setelah masuknya tambang adalah prasarana ibadah bagi umat Islam, yakni masjid dan musholla. Pada tahun 2015, sebagian besar infrastruktur sosial budaya, terutama pendidikan, kesehatan dan keagamaan telah berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan penilaian masyarakat (responden dan informan) pembangunan bidang pendidikan sangat maju sehingga jarang sekali anak usia sekolah dari masyarakat lokal yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Meskipun demikian,

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk sarana ibadah diharapkan terus diperhatikan agar masyarakat lokal lingkaran tambang mampu bersaing dengan peserta didik dari daerah lain yang lebih maju. Untuk itu harapan warga masyarakat pemerhati pendidikan adalah agar PT. NNT memberikan bantuan untuk peningkatan mutu pengajaran para guru, mulai dari tingkat SD hingga SLTA. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya prakarsa PT. NNT untuk membuka dan memfasilitasi pengembangan Sekolah kejuruan di bidang teknik pertambangan.

7. Perkembangan Pendidikan

Salah satu bidang yang perkembangannya sangat signifikan setelah beroperasinya tambang batu Hijau PT. NNT adalah pendidikan. Hal tersebut ditunjang oleh komitmen PT. NNT untuk senantiasa meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah lingkaran tambang. Tabel 96 menggambarkan jumlah atau ketersediaan sekolah di tiga kecamatan lingkaran tambang mulai tingkat taman kanak-kanak sampai SLTA/MA.

a. Keadaan Guru dan Siswa

Berdasarkan penelusuran data sekunder dan hasil observasi lapangan menunjukkan perkembangan / keadaan pendidikan yang cukup baik di tiga kecamatan dalam lingkaran tambang. Hal tersebut antara lain dapat diketahui dari rasio guru dengan siswa, besaran rombongan belajar, dan angka

partisipasi kasar (APK) dan partisipasi murni (APM) pada semua tingkat / jenjang pendidikan. Data selengkapnya disajikan pada tabel 97 berikut :

Tabel 97. Perkembangan Pendidikan Formal di Tiga Kecamatan Lingkar Tambang Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Keadaan di tiga Kecamatan Lingkar Tambang		
		Jereweh	Maluk	Sekongkang
1	TK / RA			
	Jumlah Siswa	426	478	394
	Jumlah Pengajar / Guru	24	30	25
	Rombongan Belajar	16	19	16
	Angka Partisipasi Kasar (%)	63,96	36,43	56,77
	Angka partisipasi Murni (%)	53,30	23,78	56,05
	Rasio Guru : Siswa	1 : 18	1 : 16	1 : 16
	Jumlah Siswa/ Romb. Belajar	27	25	25
2	SD / MI / SDLB			
	Jumlah Siswa	966	1.341	1.043
	Jumlah Pengajar / Guru	66	50	79
	Rombongan Belajar	37	39	48
	Angka Partisipasi Kasar (%)	101,90	108,61	108,53
	Angka partisipasi Murni (%)	93,99	100	97,09
	Rasio Guru : Siswa	1 : 15	1 : 27	1 : 13
	Jumlah Siswa/ Romb. Belajar	26	34	22
3	SLTP / M.Ts			
	Jumlah Siswa	333	291	401
	Jumlah Pengajar / Guru	51	31	69

	Rombongan Belajar	16	13	20
	Angka Partisipasi Kasar (%)	93,28	80,39	99,26
	Angka partisipasi Murni (%)	73,95	53,87	78,96
	Rasio Guru : Siswa	1 : 7	1 : 9	1 : 6
	Jumlah Siswa/ Romb. Belajar	21	22	20
4		SLTA / MA		
	Jumlah Siswa	504	0	274
	Jumlah Pengajar / Guru	31	0	39
	Rombongan Belajar	14	0	10
	Angka Partisipasi Kasar (%)	161,23	0	99,05
	Angka partisipasi Murni (%)	151,87	0	90,74
	Rasio Guru : Siswa	1 : 16	0	1 : 7
	Jumlah Siswa/ Romb. Belajar	36	0	27

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga KSB (Diolah).

Tabel 97 berikut menunjukkan bahwa APK dan APM yang relatif rendah (kurang dari 50 %) terdapat pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK/RA) di Kecamatan Maluk.

Rendahnya APK dan APM tersebut menggambarkan masih banyaknya anak usia dini yang belum terserap pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak(TK/RA) yang ada di sekitar wilayah kecamatan Maluk. Untuk jenjang pendidikan SD sampai SLTA tampaknya APK dan APM cukup tinggi yang berarti bahwa sebagian besar anak usia sekolah

yang ada di tiga kecamatan lingkaran tambang tersebut telah terserap pada pendidikan formal yang ada. Dengan kata lain, ketersediaan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan cukup memadai.

Tabel 97 juga menunjukkan APK yang tinggi (lebih dari 100 %) pada jenjang pendidikan SD di tiga Kecamatan daerah lingkaran tambang. Hal ini menggambarkan semua anak usia SD sudah bersekolah, bahkan ada indikasi adanya siswa SD yang memiliki umur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Selain itu ada kemungkinan siswa yang belajar di SD pada tiga Kecamatan lingkaran tambang berasal dari luar wilayah tiga kecamatan lingkaran tambang tersebut. APK dan APM yang juga sangat tinggi terjadi pada jenjang pendidikan SLTA (SMA / MA) di Kecamatan Jereweh. Tingginya APK dan APM tersebut menunjukkan tingginya keterlibatan anak usia remaja untuk memasuki pendidikan lanjutan atas (SMA/MA). Bahkan cukup banyak siswa SMA /MA yang ada di Jereweh berasal dari Kecamatan lain. Diperkirakan sebagian (sekitar sepertiga) jumlah siswa SMA Jereweh berasal dari Kecamatan Maluku, karena hingga saat ini di Maluku belum tersedia sekolah setingkat SMA/MA.

Ditinjau berdasarkan rasio guru terhadap siswa, tampaknya pada sebagian besar jenjang pendidikan termasuk cukup besar. Rasio ideal (sangat memadai) terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs dimana rasio berkisar antara 1 : 6 hingga 1 : 9. Rasio Guru

terhadap Siswa yang cukup ideal juga dijumpai pada jenjang SMA/MA di Kecamatan Sekongkang (rasio 1 : 7). Adapun rasio yang cukup besar terjadi pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar /MI. Hal tersebut menunjukkan jumlah guru yang ada pada jenjang pendidikan dini dan pendidikan dasar tersebut masih kurang, terutama guru tetap berstatus pegawai negeri.

Bertitik tolak dari data tabel 97 di atas dapat ditegaskan bahwa perkembangan pendidikan dasar dan menengah di tiga kecamatan lingkaran tambang cukup baik, namun masih terkesan beberapa ketimpangan distributif menyangkut sebaran guru, murid dan sarana pendidikan. Berangkat dari masalah yang ada dan didukung oleh harapan warga masyarakat, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan guna pengembangan pendidikan lebih lanjut adalah :

- (1) Mengingat tingginya APK dan APM pada jenjang pendidikan SMA/MA yang ada sekarang ini, dipandang perlu pengadaan Sekolah Menengah Atas (SMA / sederajat) di Kecamatan Maluk, untuk menampung lulusan SLTP yang ada dari kawasan sekitarnya.
- (2) Mengingat masih tingginya rasio Guru : Siswa untuk jenjang pendidikan dini (TK/RA) dan Sekolah Dasar, maka diperlukan program penambahan Guru TK dan SD di tiga kecamatan

- lingkar tambang (Jereweh, Maluk dan Sekongkang).
- (3) Mengingat belum tersedianya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah lingkar tambang, maka untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia sangat perlu diupayakan pengadaan SMK yang sesuai dengan harapan pasar dan pemangku amanat (stakeholders) lainnya.
 - (4) Karena sebagian dari guru yang ada pada jenjang pendidikan dini dan pendidikan dasar (SD) adalah guru bantu (honorar) atau guru tidak tetap, maka masyarakat mengharapkan untuk dilakukan peningkatan status kepegawaian guru bantu honorar dan guru tidak tetap menjadi guru tetap pegawai negeri. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas lulusan (khususnya tingkat SMA), sebagian besar tokoh pendidikan mengharapkan program peningkatan kapasitas atau kompetensi bagi para guru (terutama guru non pegawai negeri).

b. Perlengkapan Kegiatan Belajar Mengajar

Kualitas hasil pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan perlengkapan proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi dan berangkat dari data sekunder yang ada dapat dikatakan bahwa perlengkapan kegiatan belajar mengajar yang ada pada sebagian besar sekolah di tiga kecamatan lingkar tambang termasuk cukup memadai. Pendapat

tersebut didasarkan pada jenis dan jumlah ketersediaan perlengkapan belajar mengajar yang ada di sejumlah sekolah, mulai tingkat SD / MI sampai SMA / MA. PT. NNT memiliki kontribusi cukup besar dalam membantu pengadaan berbagai perlengkapan belajar mengajar tersebut disamping program beasiswa yang disediakan untuk siswa dan mahasiswa dari daerah lingkaran tambang atau dari daerah lainnya. Mengacu pada data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbawa Barat (2008), dapat diketahui keadaan perlengkapan kegiatan belajar mengajar, terutama pada jenjang SLTP/MTs dan SMA/MA yang ada di tiga kecamatan dalam lingkaran tambang.

Diakui oleh tokoh masyarakat bahwa pengadaan perlengkapan pembelajaran khususnya perlengkapan elektronik (seperti komputer, LCD dan audio visual) banyak didukung oleh PT. NNT. Letak kecamatan Sekongkang yang berada pada kawasan inti lingkaran tambang disinyalir sebagai faktor pertimbangan mengapa sekolah di Kecamatan Sekongkang lebih banyak mendapatkan bantuan dari PT. NNT dibandingkan sekolah di kecamatan lainnya.

Dibandingkan perlengkapan belajar mengajar antara SLTP/MTs dengan SMA/MA tampak bahwa perlengkapan yang ada di SLTP lebih memadai dibanding SMA/MA. Menurut beberapa informan kunci, kejadian tersebut disebabkan karena jumlah sekolah jenjang SLTP lebih banyak dibanding SMA .

Disamping itu, keberadaan SLTP/MTs di tiga kecamatan tersebut jauh lebih awal dibandingkan dengan SMA/MA. Adapun fasilitas belajar mengajar yang dinilai masih sangat kurang adalah laboratorium untuk tingkat SMA/MA. Dari 3 SMA/MA yang ada baru tersedia 1 unit laboratorium yakni di SMA Sekongkang, sedangkan SMA lainnya belum memiliki fasilitas laboratorium.

C. Perkembangan Kondisi Kesehatan Masyarakat

Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator-indikator tersebut pada umumnya tercemin dalam kondisi morbiditas, mortalitas, dan status gizi. Derajat kesehatan masyarakat Kab. Sumbawa Barat digambarkan melalui Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan angka morbiditas beberapa penyakit. Disamping itu, derajat kesehatan masyarakat pada umumnya tidak hanya dipengaruhi oleh sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan, SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana, akan tetapi juga dipengaruhi faktor lainnya seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan keturunan.

Tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat tercatat sebesar 67,85. jika dibandingkan dengan sembilan kabupaten kota lainnya di NTB, KSB menempati urutan ketiga setelah Kota Mataram dan Kota Bima. Angka IPM KSB juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Bila dilihat dari masing-masing komponen pembentuknya IPM KSB mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, Angka Harapan hidup meningkat dari 61,45 tahun pada 2011 menjadi 61,61 tahun pada 2012. Angka Melek huruf juga mengalami peningkatan dari 91,47 persen pada tahun 2011 menjadi 92,50 persen pada tahun 2012, demikian pula halnya dengan rata-rata lama sekolah dan pendapatan regional per kapita mengalami peningkatan dari 72.371.824,92 rupiah pada tahun 2012 dan 75.833.010,17 rupiah pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat Sumbawa Barat baik dari dimensi kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Nilai IPM KSB yang mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2010 IPM KSB 66,47 sedangkan IPM NTB 65,20, pada tahun 2011 IPM KSB 67,08 sedangkan IPM NTB 66,23, dan pada tahun 2012 IPM KSB mencapai 67,85 sedangkan IPM NTB sebesar 66,89. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu, kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian pada umumnya dihitung dengan melakukan berbagai survey dan penelitian. Khususnya pada dinas kesehatan terkait dan jaringannya di suatu wilayah

dapat diketahui dengan menghitung banyaknya kematian yang terjadi dalam kurun waktu setahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup atau jumlah persalinan.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (sat tahun) yang dinyatakan dalam 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun yang sama. AKB terkelompok dua jenis kelompok umur yaitu kematian pada kelompok neonatal (0-28 hari) dan kematian pada kelompok bayi (29 hari -11 bulan 29 hari).

Tahun 2011 tercatat jumlah kematian bayi di wilayah KSB adalah sebanyak 60 kasus yang tersebar di 9 Puskesmas dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 37 orang dan pada tahun 2013 terus mengalami penurunan menjadi 27 kasus. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepedulian masyarakat sekitar lingkaran tambang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari 60 kasus kematian bayi pada tahun 2011, 32 kasus terjadi pada kelompok umur neonatal dan sisanya 28 kasus terjadi pada kelompok bayi (1 bulan-11 bulan 29 hari). Pada tahun 2012 kematian neonatal sebanyak 21 orang dan post neonatal sebanyak 16 orang. Pada tahun 2013 perbandingan 27 kasus kematian ini dengan jumlah kelahiran hidup adalah 2.827 KH, sehingga didapat AKB sebanyak 13 per 1.000 KH. Lebih rendah dari AKB tahun 2011

sebesar 22 per 1.000 KH. Hal ini disebabkan karena terkait sosial budaya masyarakat di wilayah tertentu yaitu mengenai kesadaran masyarakatnya tentang cara pemberian makanan dan jenis makanan pada bayi. Hal ini didukung oleh salah satu penyebab terbanyak kematian bayi di KSB adalah respirasi.

Pada tahun 2014 tercatat 21 kematian bayi (17 dimasa neonatal usia 0-28 hari dan 4 di usia 29 hari-29 bulan). Jumlah kematian bayi di wilayah KSB terus menurun dari tahun sebelumnya yaitu adalah sebanyak 27 kasus tahun 2013 dan 37 kasus tahun 2012. Penurunan AKB di tahun 2014 ini salah satunya disebabkan karena semakin meningkatnya penanganan kasus neonatal risti oleh tenaga kesehatan. Disamping itu, kondisi ibu hamil yang anemi meningkat dari sebelumnya ikut berkontribusi secara tidak langsung pada kematian bayi di KSB.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dalam 1 tahun yang sama dan dinyatakan dalam 100.000 kelahiran hidup. AKI ini didapatkan dari rumusan total kejadian kematian ibu dibandingkan dengan total persalinan dalam 1 tahun yang sama dan dinyatakan dalam 100.000 KH.

Pada tahun 2011, tercatat jumlah kematian ibu secara keseluruhan di KSB adalah sebanyak 7 kematian dari 2.764 total persalinan (Seksi Kesga Dikes KSB, 2011). Sedangkan pada tahun 2012

menurun menjadi 6 kematian yang terdiri dari mati bersalin 4 orang dan mati nifas 2 orang. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi hanya tinggal 5 kematian yang terdapat di Kecamatan Jereweh sedangkan di tahun 2014 menurun menjadi 4 kasus. Jumlah persalinan ini diperoleh dari capaian persalinan secara keseluruhan baik yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan oleh dari waktu ke waktu jumlah penduduk bertambah sehingga angka persalinan pun turut bertambah.

3. Jumlah Kunjungan

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012 dapat dilihat dari tingkat kunjungan pada Puskesmas. Jumlah kunjungan puskesmas sebanyak 117.796 kunjungan yang terdiri dari rawat jalan 115.499 dan rawat inap sebanyak 2.297 orang. Sementara yang berobat di RSUD kabupaten sebanyak 22.071 orang yang terdiri dari rawat jalan 19.248 orang dan rawat inap sebanyak 2.823 orang. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan kunjungan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 160.300 yang terdiri dari rawat jalan 156.942 orang dan rawat inap sebanyak 3.358 orang. Sementara itu pada tahun 2014 jumlah kunjungan ke Puskesmas mengalami penurunan menjadi 123,932 kunjungan yang terdiri dari 121.159 rawat jalan dan 2.773 yang rawat inap. Sementara yang berobat di RSUD KSB

sebanyak 15.831 kunjungan yang terdiri dari 12.859 rawat inap dan 2.972 rawat jalan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat jika mengalami gangguan kesehatan cukup tinggi dan dengan penurunan jumlah kunjungan yang signifikan sebanyak 36.368 kunjungan.. Di wilayah lingkaran tambang terdapat 4 Puskesmas yaitu Puskesmas Jereweh, Maluk, Sekongkang dan Tongo dengan jumlah kunjungan pada tahun 2011 sebanyak 23.329 kunjungan kemudian meningkat menjadi 26.437 kunjungan pada tahun 2012. Selanjutnya kunjungan pasien mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2013 menjadi 40.290 kunjungan pasien yang terdiri dari 39.026 rawat jalan dan 1.264 rawat inap. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan mengalami penurunan yang cukup drastis dimana untuk keempat puskesmas tersebut jumlah kunjungan hanya sebanyak 16.237 kunjungan yang terdiri dari 15.216 rawat jalan dan 1.021 rawat inap. Kunjungan terbanyak terdapat di Puskesmas Jereweh kemudian Maluk dan Tongo serta Sekongkang, Sementara untuk rawat inap pasien terbanyak di Puskesmas Jereweh. Kondisi ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat akan dimensi kesehatan dalam perilaku hidup sehat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, disamping itu makin banyak pula masyarakat yang berobat ke tempat-tempat dokter praktek yang tersebar di wilayah lingkaran tambang khususnya di Maluk.

Peningkatan jumlah kunjungan tidak terlepas dari meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berada di daerah lingkaran tambang. Pada tahun 2014 terdapat Puskesmas di masing-masing kecamatan (khusus Kec. Sekongkang terdapat 2 Puskesmas yaitu di Sekongkang Bawah 1 unit dan Tongo 1 Unit), juga ditunjang oleh Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 8 unit, dengan rincian di Sekongkang terdapat 6 Pustu dan masing-masing satu Pustu di Jereweh dan Maluk. Demikian pula dengan Polindes terdapat 15 Polindes yang tersebar di Sekongkang sebanyak 7 polindes, di Jereweh 4 Polindes dan 5 polindes yang terdapat di Maluk. Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal, di Maluk terdapat satu unit Balai Kesehatan, disamping itu terdapat pula apotik di Sekongkang satu unit dan di Maluk terdapat 3 unit apotik yang siap melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan. Kondisi ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada, sehingga tingkat pelayanan kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dimana fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Tabel 98. Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan masyarakat di daerah lingkaran tambang, Tahun 2012, 2013, dan 2014 (unit)

Kecamatan	Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Polindes		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014

Sekongkang	2	2	2	6	6	6	6	6	7
Jereweh	1	1	1	1	1	1	4	4	4
Maluk	1	1	1	1	1	1	5	5	5
Jumlah	4	4	4	8	8	8	15	15	16

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Sumbawa Barat, 2015.

4. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Sarana atau fasilitas kesehatan tersebut masih ditunjang lagi oleh Posyandu pada tahun 2013 sebanyak 47 pos yang tersebar di Jereweh sebanyak 17 pos, Maluk 14 pos, dan 16 pos di Sekongkang. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 50 posyandu. Perubahan aspek kesehatan masyarakat sekitar lingkaran tambang PT. NNT, secara umum menunjukkan kecenderungan yang positif dimana kondisi kesehatan masyarakat mengarah menjadi lebih baik atau lebih sehat. Kondisi kesehatan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang sakit menurut jenis penyakit yang semakin menurun dan meningkatnya jumlah tenaga medis yang melayani Puskesmas atau Pustu maupun Posyandu yang tersebar merata di setiap desa lingkaran tambang. Puskesmas yang berada di tiga kecamatan sekitar lingkaran tambang sekarang ini telah beroperasi secara penuh dengan berbagai fasilitas penunjang medis yang memadai serta didukung oleh tenaga medis dan non medis yang memadai pula, telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

5. Perkembangan Penyakit

Isu-isu strategis kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat antara lain Terkait dengan pelayanan

kesehatan gratis melalui BPJS, masih ditemukan pemahaman yang salah ditingkat masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan tidak gratis, padahal yang sebenarnya terjadi adalah pelayanan berobat di puskesmas tetap dan pasti gratis akan tetapi ketika masyarakat berobat pada bidan yang membuka praktek di luar jam kerja puskesmas maka sudah sewajarnya masyarakat memberikan imbal jasa atas pelayanan tersebut. Terkait dengan jumlah tenaga kesehatan, kasus yang berkembang banyak tenaga kesehatan yang mengajukan pindah kerja atau mutasi keluar daerah dengan strategi menikah dengan orang yang berdomisili di luar KSB, sehingga KSB secara umum kekurangan tenaga kesehatan.

Perkembangan penyakit di masyarakat dari tahun ketahun pada umumnya memiliki pola penyebaran yang sama, kecuali jika sewaktu-waktu ada wabah penyakit yang menyerang atau pada musim hujan dan kemarau. Perkembangan jenis penyakit yang sering diderita oleh masyarakat lingkaran tambang. Data dari Puskesmas Jereweh, Maluk, dan Sekongkang, dan Tongo pada tahun 2014, diperoleh informasi bahwa urutan (ranking) jenis penyakit yang paling sering diderita mulai dari yang paling banyak kasusnya yakni ISPA sebanyak 7.399 kasus dan penyakit lainnya, sementara yang paling sedikit adalah Thypoid sebanyak 1.648 kasus.

ISPA adalah salah satu jenis penyakit infeksi yang paling sering menyerang kesehatan masyarakat dengan penularan yang sangat cepat. Penderita penyakit ISPA sebagian besar adalah bayi dan anak-anak baik dinegara miskin, berkembang maupun dinegara maju. Penyakit ISPA yang diderita pada masa bayi dan anak-anak yang tidak mendapatkan penanganan dengan tepat dapat mengakibatkan terhambatnya proses tumbuh kembang bahkan sampai menyebabkan kecacatan. Penyakit ISPA menjadi permasalahan kesehatan dengan efek negatif yang cukup luas dan beragam. karena itu harus mendapatkan perhatian seksama, terlebih penyakit ini masih menjadi penyebab kematian bayi dan balita dengan perbandingan yang cukup tinggi yaitu kira-kira 1 dari 4 atau sekitar 20 % -30 % dari kematian yang terjadi adalah disebabkan oleh penyakit ISPA.

Hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sumbawa Barat, dimana pada tahun 2008 terdapat 22 kasus meningkat menjadi 24 kasus pada tahun 2010 kemudian meningkat lagi menjadi 29 kasus pada tahun 2011. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 36 kasus yang terdiri dari 24 HIV dan 12 AIDS. Pada tahun 2014 ini mengalami penurunan yang sangat drastis tercatat hanya 5 kasus baru HIV dan 7 kasus syphilis. Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten/ Kota, mengadakan survei dengan pengambilan sampel darah terhadap kelompok resiko

tinggi untuk pemeriksaan HIV. Untuk Kabupaten Sumbawa Barat selama ini telah ditemukan kasus HIV/AIDS walaupun secara sembunyi-sembunyi pada tempat-tempat untuk menjajakan sex komersial.

Hal ini dimungkinkan karena aktifitas hiburan malam khususnya di Maluk cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini diperkuat dengan semakin meningkatnya angka pesakitan PMS (penyakit menular seksual) yang pada tahun 2014 ini sebanyak 187 kasus yang terdiri dari 91 kasus di Maluk, 51 di Jereweh, Sekongkang 10, Beru 9, Taliwang 24 dan Brang Ene 2 kasus. Artinya di daerah lingkaran sendiri terdapat 161 kasus atau 86 % dari total penderita PMS di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan bahwa program-program penanganan AIDS di KSB saat ini khususnya untuk program pencegahan melalui transmisi seksual dengan menggunakan kondom dianggap kontradiksi dengan kebijakan pemerintah daerah yang menyatakan membawa kondom sebagai salah satu indikator yang mengarah kepada perbuatan asusial. Untuk saat ini belum ditemukan strategi untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut. Adapun program-program pencegahan lainnya yang telah diinisiasi antara lain program A.B.A.T (Aku Bangga Aku Tahu) dengan target penduduk usia sekolah, dan rencana Program Pariwisata Sehat (No Alkohol No

Transaksional Sex) yang sejalan dengan visi pariwisata KSB.

Penanganan penderita AIDS dilakukan secara tertutup (menjaga kerahasiaan) walaupun banyak tuntutan dari kelompok masyarakat untuk mengungkapkan nama dan posisi (tempat tinggal) warga/pasien yang terindikasi mengidap penyakit AIDS. Jargon konseling yang dikembangkan bagi penderita AIDS adalah “INI HARUS BERHENTI DI SAYA”. Wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah dengan resiko tinggi ancaman HIV/AIDS adalah: (1) jalur transportasi dan distribusi barang; (2) wilayah-wilayah pertambangan; dan (3) Darmaga laut.

Pada tahun 2013 ini menunjukkan perkembangan yang meningkat untuk beban penyakit yang tidak menular khususnya pada karyawan PT. NNT seperti Stroke, Serangan Jantung, Diabetes, dan Hipertensi. Beban penyakit ini lebih disebabkan oleh pengaruh perubahan life style.

Penyakit malaria yang sebelum tambang menempati urutan kedua, pada beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan peringkat. Sehingga penyakit malaria ini menjadi peringkat ke sepuluh di Puskesmas Jereweh dan menjadi urutan ke lima di Puskesmas Maluk. Penurunan peringkat penderita penyakit malaria ini disebabkan antara lain oleh berbagai program yang diintrodusir oleh PT. NNT antara lain program penyemprotan nyamuk yang dilakukan secara berkala

di semua wilayah di sekitar lingkaran tambang, sehingga nyamuk dapat ditekan populasinya. Disamping itu tingkat kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi perkembangan nyamuk juga mulai meningkat, hal ini ditunjukkan melalui kesadaran kebersihan lingkungan masyarakat.

Kabupaten Sumbawa Barat dinyatakan Endemis karena 3 tahun berturut-turut terdapat kasus DBD. Berdasarkan data jumlah kasus Demam Berdarah dan Demam Dengue di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami fluktuasi dimana dimana tahun 2012 sebanyak 5 kasus meningkat tahun 2013 menjadi 53 kasus kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 19 kasus, yang meninggal tidak ada. Berdasarkan informasi dari Kepala Puskesmas Jereweh, sejak tahun 2013 kegiatan penyemprotan malaria yang biasa dilakukan oleh PT. NNT sudah tidak ada lagi. Dikhawatirkan kondisi ini akan menyebabkan ancaman terhadap penyakit malaria dimasa datang akan meningkat lagi.

Pada awal tahun 2013 di Puskesmas Tongo terjadi KLB Malaria yang menyebabkan sekitar 70 orang pasien yang menderita penyakit malaria. Karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, para penderita dirujuk ke Puskesmas Sekongkang sehingga memperoleh perawatan yang memadai.

Jumlah penderita penyakit malaria dapat dilihat berdasarkan angka positif malaria Annual Parasite Incidence (API). Besarnya API pada tahun 2014 adalah

4.01 permil, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 4.41 permil. Akan tetapi angka ini jika dilihat secara absolut masih tergolong tinggi karena belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Malaria Tahun 2014 yaitu < 3 permil. Dengan angka tersebut Kabupaten Sumbawa Barat berada pada strata Medium Case Incidence, sehingga masih diperlukan upaya-upaya yang intensif untuk menurunkan angka kesakitan malaria.

Annual Malaria Incidence (AMI) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 sebesar 33,4 permil, menurun dari Tahun 2013 sebesar 47,06 permil. Penurunan bukan menjadi suatu masalah selama tetap diikuti dengan pencapaian pemeriksaan sediaan darah 100%. Dengan angka tersebut Kabupaten Sumbawa Barat berada pada strata Medium Incidence Area.

Khusus penyakit infeksi kulit baik pada Puskesmas Jereweh maupun pada Puskesmas Maluk tidak mengalami perubahan peringkat yang berarti namun jumlah penderitanya mengalami penurunan. Demikian pula halnya dengan penyakit diare di Puskesmas Jereweh yang meskipun peringkatnya naik, akan tetapi jumlah penderitanya turun secara signifikan.

Penyakit Kusta merupakan salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis tetapi meluas sampai ke masalah sosial,

ekonomi dan budaya karena merupakan suatu kenyataan bahwa sebagian besar penderita kusta adalah dari golongan ekonomi lemah, yang selain membutuhkan penanganan secara medis juga memerlukan penanganan dari aspek sosial. Program pemberantasan penyakit kusta di Kabupaten Sumbawa Barat masih mengalami masalah di beberapa puskesmas khususnya dalam hal penemuan penderita baru secara dini dimana penderita baru yang ditemukan sudah mengalami kecacatan. Hal ini dimungkinkan karena seorang penderita kusta lebih cenderung menutup diri dan tidak bergaul dengan masyarakat. Disamping itu juga disebabkan karena masih adanya opini masyarakat bahwa penyakit kusta, terutama yang disertai adanya kecacatan disebabkan oleh kutukan, perbuatan sihir atau penyakit keturunan sehingga penderita lebih cenderung berobat ke dukun daripada ke puskesmas. Cakupan penderita kusta tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu 3 kasus PB dan 21 kasus MB sedangkan pada tahun 2013 hanya 2 kasus PB dan 13 kasus MB.

Hingga saat ini penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka kesakitan diare dari tahun ke tahun. Pembangunan pada sektor kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan salah satunya adalah diare, dimana penemuan kasus diare pada tahun 2010 sebanyak 7.339 kasus, tahun 2011

sebanyak 6.652 kasus, tahun 2012 sebanyak 5.412 kasus, tahun 2013 sebanyak 5.007 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 4.586 kasus. Adapun kebijakan pemberantasan penyakit diare dilaksanakan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait serta partisipasi aktif masyarakat secara luas antara lain organisasi profesi dan lembaga masyarakat di pusat maupun di daerah.

Surveilens AFP adalah penemuan kasus semua anak berusia <15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya Flaccid (Layuh) terjadi secara akut atau mendadak bukan disebabkan oleh ruda paksa. Merupakan komitmen global WHO menuju eradikasi Polio dan diperkirakan tahun 2009 dunia bebas Polio. Untuk menuju bebas Polio setiap negara diharuskan menemukan kasus lumpuh layuh mendadak/AFP minimal 1 setiap 100.000 anak umur <15 tahun. Pada Tahun 2014 ditemukan 3 kasus suspek AFP.

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai berhasil pencapaiannya dalam MDG's adalah status gizi balita. Status gizi balita diukur berdasarkan kategori umur (U), berat badan (BB), dan tinggi badan (TB). Variable BB dan TB ini disajikan dalam bentuk tiga indicator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Salah satu cara untuk mengukur

antropometri ini adalah dengan penimbangan. Penimbangan bayi dan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhannya setiap bulan. Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun di Posyandu, selanjutnya hasil penimbangan akan catat dibuku KIA (kesehatan ibu dan anak) atau KMS (kartu menuju sehat). Dari KMS akan terlihat apakah berat badan Bayi dan Balita itu naik, tetap atau turun. Capaian bayi baru lahir ditimbang pada tahun 2014 mencapai 99,1%. Artinya bayi yang baru lahir yaitu sebanyak 2.967 bayi sudah langsung ditimbang. Dari hasil penimbangan tersebut didapatkan sebanyak 114 bayi (3,8%) yang BBLR menurun dari tahun sebelumnya 120 bayi (4%) yang BBLR.

Penanganan yang lain adalah pada balita gizi buruk yaitu sudah mencapai 100%. Di mana ditemukan 2 kasus balita gizi buruk dan semuanya sudah mendapat perawatan. Jumlah ini berkurang dari tahun 2013 sebanyak 6 kasus yang juga semuanya sudah tertangani 100%. Penurunan jumlah penduduk yang mengeluh sakit dibeberapa wilayah tersebut tidak terlepas dari kemajuan fasilitas kesehatan dan meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan setelah adanya PT. NNT. Disamping itu, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan sangat membantu menekan perkembangan penyakit. Peningkatan fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan secara langsung akan meningkatkan pula

kualitas pelayanan. Disamping itu akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan yang semakin mudah yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan tingkat kesakitan masyarakat secara keseluruhan (*morbidity rate*).

Dengan beroperasinya secara penuh keempat Puskesmas di wilayah sekitar lingkaran tambang maka pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat pula baik kuantitas maupun kualitas pelayanannya. Kondisi ini secara keseluruhan pada gilirannya akan meningkatkan pula derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada umumnya. Kondisi ini akan semakin membaik dengan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang dibangun oleh PT. NNT pada setiap Kecamatan yang berada di wilayah lingkaran tambang sehingga masalah sampah dapat teratasi dengan baik.

6. Tenaga Kesehatan

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jenis tenaga kesehatan terdiri dari 7 jenis yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keteknisian medis dan tenaga keterampilan fisik.

Tenaga kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas, memegang peranan yang strategis untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat sekitar lingkaran tambang. Peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat sekitar tambang PT. NNT, ternyata berkorelasi dengan ketersediaan tenaga medis di wilayah tersebut. Pada tahun 2014 ini tenaga dokter yang ada sebanyak 10 orang (6 dokter umum dan 4 dokter gigi) pada empat puskesmas cukup mendukung kinerja puskesmas maupun pustu secara keseluruhan. Peranan tenaga kesehatan baik medis maupun non medis merupakan salah satu faktor utama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Tenaga medis merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mengambil peran penting dalam upaya pengobatan dan rehabilitasi. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi dan dokter spesialis. Peran tersebut menuntut pengambil kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dalam pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga

kesehatan medis untuk selalu menjadi perhatian utama. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut baik jumlah, spesifikasi pendidikan, kategorim profesi dan orientasi distribusi maka diselenggarakan pendidikan lanjutan bagi tenaga dokter dan dokter gigi ke tingkat spesialis dengan program PPDS.

Peranan dukun bersalin yang tersebar di semua desa di Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku dan Kecamatan Sekongkang cukup membantu masyarakat dalam hal persalinan, sehingga masalah persalinan relatif dapat tertangani. Hal ini ditunjang pula oleh program Puskesmas dan Pustu yang sering memberikan penyuluhan dan bantuan peralatan terhadap para dukun bersalin tersebut.

Eksistensi dukun cukup diperlukan oleh sebagian masyarakat terutama untuk persalinan karena mereka masih percaya terhadap kemampuan dukun tersebut. Disamping itu untuk melahirkan bayi sebagian masyarakat juga masih menggunakan jasa dukun disamping karena murah biayanya juga lebih dekat dengan tempat pemukiman penduduk. Meskipun demikian khusus untuk dukun bersalin beberapa diantaranya telah dilatih oleh para bidan desa, sehingga kemampuannya juga semakin membaik. Jika dengan jasa dukun keadaan kesehatannya belum baik barulah mereka pergi ke bidan atau mantri kesehatan setempat.

Bertambahnya satu Puskesmas maka pelayanan kesehatan masyarakat semakin luas jangkauannya.

Puskesmas Jereweh tinggal melayani tiga desa sedangkan Puskesmas Maluk melayani dua desa dan Puskesmas Sekongkang dan Tongo masing-masing melayani tiga dan empat desa.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Demikian pula dengan ragam tenaga medis yang melayani, dimana sebelum dimulainya eksploitasi tambang PT. NNT hanya dilayani oleh Dokter umum, Perawat dan Bidan. Tetapi sekarang keragaman tenaga medis menjadi banyak antara lain dengan penambahan dokter gigi, sanitarian, dan analist kesehatan. Sehingga layanan kesehatannya terhadap masyarakat semakin meningkat kualitasnya.

Di luar jam kerja terdapat banyak dokter praktek yang mulai melayani pasien dari jam 17.00 sampai dengan jam 21.00 masih terkonsentrasi di Desa Pasir Putih, Desa Benete, dan Desa Bukit Damai masing sebanyak satu dokter praktek. Di wilayah lingkaran tambang terdapat 11 dokter umum yang praktek yaitu di Sekongkang 3 orang dokter, Jereweh 3 orang dokter dan di Maluk ada 5 orang dokter praktek. Disamping itu terdapat 3 dokter gigi yang praktek yaitu masing-masing 1 orang di Sekongkang, Jereweh, dan Maluk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan secara signifikan terhadap ketersediaan tenaga medis di tiga wilayah lingkaran tambang PT. NNT, yang menyebabkan kemajuan dibidang pelayanan

kesehatan masyarakat. Hal ini sangat mungkin hanya dapat dicapai dengan tingkat kinerja yang baik dan berkualitas serta didukung oleh kemampuan profesional dan dedikasi yang tinggi dari para tenaga medis yang ada. Program pelatihan peningkatan kualitas dan stimulasi yang berupa reward dan dukungan peralatan kepada tenaga medis yang disediakan oleh PT. NNT sangat dipercaya mampu mendukung semua pencapaian tersebut.

Setiap fasilitas kesehatan dalam melaksanakan kegiatannya dilengkapi oleh tenaga kesehatan baik tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga non paramedis serta tenaga kesehatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 99. Jumlah dan sebaran Tenaga Kesehatan di Daerah Lingkar Tambang tahun 2014

No	Kategori	Tahun 2014				Jumlah (orang)
		Sekong kang	Jereweh	Maluk	Tongo	
1	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0
2	Dokter Umum	2	1	2	1	6
3	Dokter Gigi	1	1	1	1	4
4	Perawat	15	13	21	12	61
5	Bidan	11	17	19	11	58
6	Farmasi	1	1	1	1	4
	Jumlah	30	33	44	26	133

Sumber: *Profil Kesehatan KSB, 2015.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ini tiap Puskesmas dilayani oleh dokter umum dan dokter gigi. Dokter umum terbanyak di Puskesmas Maluk sedangkan di Tongo hanya dilayani

satu dokter umum, tergantung populasi penduduknya. Demikian pula halnya dengan dokter gigi yang tersebar merata di masing-masing puskesmas yang ada di lingkaran tambang.

Perawat yang melayani masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 61 orang dan bidan 58 serta tenaga farmasi sebanyak 4 orang. Jadi total tenaga medis yang melayani penduduk di lingkaran tambang sebanyak 133 orang, terbanyak di Maluku sebanyak 44 orang, kemudian Jereweh 33 orang dan Sekongkang sebanyak 30 orang serta di Tongo sebanyak 26 orang tenaga.

Tenaga keperawatan dibagi menjadi tiga kategori yakni perawat, bidan dan perawat gigi. Jumlah Tenaga Keperawatan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 masing-masing Bidan (228 orang), Perawat (330 orang) dan Perawat gigi (11 orang). Tenaga kefarmasian merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dengan dua kategori yakni tenaga teknis kefarmasian dan apoteker. Jumlah tenaga Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 adalah masing-masing 6 orang tenaga teknis kefarmasian dan 11 orang apoteker dan terdapat tenaga Kesehatan Masyarakat berjumlah 20 orang.

Tenaga Gizi terbagi menjadi dua kategori yakni Nutrisisionis dan Dietisien. Jumlah tenaga Nutrisisionis di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 adalah 24 orang. Tenaga Keterampilan Fisik terbagi menjadi Empat

kategori yaitu Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara dan Akupuntur. Adapun jumlah tenaga keterampilan fisik tahun 2014 adalah 5 orang.

- (1) Tenaga keteknisian medis terbagi menjadi Sepuluh kategori antara lain; Radiografer, Radioterapis, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, Analisis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Ortetik Prostetik, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Tranfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler. Adapun jumlah tenaga Keteknisian Medis tahun 2014 adalah 26 orang.
- (2) Keberadaan tenaga kesehatan di Puskesmas maupun yang praktek ditengah masyarakat sangat membantu pelayanan kesehatan masyarakat di lingkaran tambang. Selain itu peran PT. NNT dalam mendukung segala aspek kesehatan dari tahun ke tahun telah mendorong secara signifikan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat pada umumnya merasakan pelayanan kesehatan yang terus menerus mengalami peningkatan.

7. Sarana dan Prasarana Kesehatan

a. Sarana Kesehatan

Kabupaten Sumbawa Barat dengan Ibukotanya yang terletak di Kecamatan Taliwang telah memiliki Rumah Sakit Umum yang merupakan pengembangan Puskesmas Taliwang. Meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki relatif masih terbatas. PT. NNT telah memberikan banyak bantuan pada RSU tersebut,

mulai dari peralatan medis hingga bantuan dua unit mobil ambulance. Salah satu aspek yang menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah menyangkut aspek kesehatannya. Masyarakat yang berada di sekitar lingkaran tambang PT. NNT khususnya yang berada di Kecamatan Jereweh, Maluku dan Sekongkang telah mengalami perubahan dalam hal kesehatan masyarakatnya. Berbagai hal yang menyangkut aspek kesehatan masyarakat di sekitar lingkaran tambang akan dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kesehatan masyarakat setempat. Untuk menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan berbagai hal baik itu menyangkut tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta unsur penunjang lainnya.

b. Prasarana Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat sebelum dimulainya kegiatan eksplorasi tambang PT.NNT hanya dilayani oleh Puskesmas Jereweh yang terletak di Desa Beru Kecamatan Jereweh. Setelah tambang berproduksi dan seiring dengan pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang, maka di Desa Maluku dibangun pula sebuah Puskesmas. Pada tahun 2003 telah dibangun pula sebuah Puskesmas yang terletak di Desa Sekongkang Bawah dan beroperasi mulai pada tahun 2004. Sementara ini Puskesmas Maluku melayani masyarakat pada Tujuh Desa yaitu Desa Benete, Maluku, Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Tongo

Sejorong, SP-1 Aik Kangkung, dan SP-2 Tatar. Tetapi setelah Puskesmas Sekongkang beroperasi maka akan melayani masyarakat di Sekitar Desa Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Tongo, Aik Kangkung dan Tatar. Sekarang ini telah dibangun juga Puskesmas yang terletak di Tongo yang melayani 4 desa yaitu Tongo, SP 1, SP2, dan Telonang. Sehingga pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal dan lebih mudah dijangkau.

Untuk memperlancar fungsi pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas Jereweh, Puskesmas Maluku, Puskesmas Sekongkang dan Puskesmas Maluku, telah mengadakan Puskesmas Pembantu (Pustu) masing-masing satu di Jereweh, tiga di Maluku, dan satu di Sekongkang Atas, demikian pula halnya dengan Poliklinik Desa dan Posyandu. Diharapkan dengan adanya Pustu, Polindes, Posyandu dan rumah pondokan bidan maka kecepatan penanganan pasien lebih terjamin. Jika pada tingkat pelayanan ini belum dapat ditangani, maka pasien akan di rujuk ke Puskesmas, dan seterusnya ke RSU Kabupaten Sumbawa Barat maupun ke RSU Mataram.

c. Tempat Berobat

Tempat berobat masyarakat di daerah lingkaran tambang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Jika ada anggota keluarga yang sakit, maka ada lima alternatif tempat berobat yaitu ke Dokter Praktek, Puskesmas, Bidan, Mantri dan Dukun. Keputusan penentuan tempat berobat sangat dipengaruhi oleh

penghasilan keluarga, jarak tempat berobat, dan derajat kegentingannya. Dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat untuk berobat secara medis terus mengalami peningkatan, bahkan pada waktu tertentu masyarakat yang berobat secara medis bisa membuat ramai tempat berobat terutama Puskesmas dan dokter praktek. Demikian pula tempat berobat lainnya misalnya di Bidan-bidan yang keberadaannya berada langsung di tengah-tengah permukiman masyarakat sehingga lebih memudahkan memberikan pelayanan kesehatan. Berikut gambaran pilihan tempat berobat oleh masyarakat di daerah lingkaran tambang saat mereka sakit dan perlu dilakukan tindakan medis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan tempat berobat dimana pada tahun 2005 terdapat 23,7 % yang berobat ke dokter praktek (dokter Puskesmas yang berpraktek sore hari) meningkat menjadi 24,2% pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 terjadi lagi peningkatan menjadi 32 %. Pada tahun 2012 ini jumlah penduduk yang berobat ke dokter praktek semakin meningkat menjadi sekitar 50 %. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya 122 orang karena sudah semakin baiknya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya. Pada tahun 2014 masyarakat yang berobat ke dokter praktek meningkat signifikan menjadi 267 orang dibanding tahun 2013 yang lalu sementara yang berobat ke puskesmas mengalami penurunan yang

drastis menjadi 113 orang. Begitu pula dengan yang berobat sendiri juga mengalami penurunan drastis menjadi tinggal 27 orang saja.

Tempat berobat ke bidan menurun dari 6,6 % pada tahun 2005 menjadi 5,4 % pada tahun 2006 akan tetapi pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 6,85 %, namun sejak tahun 2010 sampai 2012 terus mengalami peningkatan tetapi menurun tinggal 19 orang pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 turun lagi menjadi 12 orang. Sementara yang berobat ke Mantri meningkat sangat signifikan dimana pada tahun 2005 tidak ada yang berobat meningkat menjadi 6,1 % pada tahun 2006, kemudian turun lagi menjadi 5,14 % pada tahun 2007 namun sejak tahun 2010 dan 2012 mengalami penurunan tetapi meningkat secara signifikan pada tahun 2013 menjadi 34 orang dan turun lagi menjadi 29 orang pada tahun 2014. Sementara itu yang tidak berobat pada tahun 2006 dan tahun 2007 sampai tahun 2012 tidak satupun yang tidak berobat jika sakit tetapi tahun 2013 ada 1 orang yang tidak berobat kemudian pada tahun 2014 turun lagi menjadi tidak ada orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya berobat jika sakit dari tahun ke tahun terus meningkat kesadarannya.

Tabel 100. Sebaran responden menurut tempat berobat di daerah lingkaran tambang tahun 2014.

No	Desa	Tempat Berobat						
		DP	P	B	D	OS	TB	M
1.	Goa	14	16	2	0	3	0	4
2.	Beru	9	21	2	0	9	0	4
3.	Belo	12	23	0	0	7	0	0
4.	Dasan Anyar	7	16	0	0	7	0	2
5.	Benete	13	21	1	0	5	0	1
6.	Bukit Damai	9	13	1	0	2	0	0
7.	Mantun	8	17	1	0	4	0	0
8.	Maluk	15	27	0	0	7	0	0
9.	Pasir Putih	6	22	1	0	6	0	2
10.	Sekongkang Atas	10	25	2	0	6	0	3
11.	Kemuning	3	4	0	0	2	0	2
12.	Sekongkang Bawah	10	20	2	0	13	0	1
13.	Tongo	4	21	0	0	3	0	1
14.	Aik Kangkung	3	16	2	0	7	0	3
15.	Tatar	2	21	2	0	6	0	1
16.	Telonang Baru	0	23	3	1	4	1	12
Jumlah	Tahun 2014	267	113	12	1	27	0	29
Jumlah	Tahun 2013	122	302	19	1	89	1	34
Jumlah	Tahun 2012	282	351	47	1	15	0	7
Jumlah	Tahun 2011	271	324	41	1	11	0	9
Jumlah	Tahun 2010	264	282	34	3	22	0	23
Jumlah	Tahun 2009	214	226	29	3	41	0	28
Jumlah	Tahun 2008	104	296	0	19	89	1	34

Jumlah Tahun	112	228	24	6	20	0	18
Jumlah Tahun	98	226	22	6	28	0	25
Jumlah Tahun	83	227	23	5	10	2	0

Catatan : DP=Dokter Praktek; P=Puskesmas/Pustu; B=Bidan; D=Dukun; OS=Obat Sendiri; TB=Tidak Berobat; M= Mantri

Pilihan berobat secara medis dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, khususnya tempat berobat ke Puskesmas yang pada tahun 2003 sebanyak 62,28 % meningkat menjadi 64,85 % pada tahun 2004 serta meningkat sedikit menjadi 64,9 % pada tahun 2006 yang kemudian pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 65,14 % tetapi tahun 2013 ini mengalami penurunan menjadi 302 orang kemudian pada tahun 2014 turun signifikan tinggal 113 orang. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatannya sudah mengalami peningkatan karena sudah mempertimbangkan segi kualitas pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dalam hal keputusan untuk menentukan tempat berobat, maka sebagian besar ditentukan secara bersama-sama atau musyawarah antara Bapak dan Ibu, kemudian oleh Bapak dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain tingkat pendapatan, jarak, dan kelengkapan peralatan serta ketersediaan tenaga medis. Hal ini juga tidak terlepas dari semakin membaiknya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di sekitar wilayah lingkaran tambang.

d. Program Kesehatan

Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa penyakit malaria merupakan penyakit utama setelah ISPA yang paling banyak diderita saat sebelum tambang berproduksi, sehingga PT. NNT telah berupaya menekan populasi nyamuk malaria dengan cara melakukan penyemprotan secara berkala. Pada awal-awal konstruksi frekuensi penyemprotannya rata-rata sekali seminggu, yang hasilnya cukup signifikan menekan populasi nyamuk. Akan tetapi saat ini frekuensi penyemprotan hanya sekali sebulan bahkan beberapa dusun menyatakan kadang-kadang dua sampai tiga bulan sekali. Selain penyemprotan, PT. NNT secara aktif juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap perkembangan penyakit malaria dengan programnya yang dikenal dengan *malaria control*. Melalui kegiatan ini secara berkala dan sistimatis PT. NNT melakukan pemantauan langsung dengan mengambil sample darah bagi para penderita yang diduga mengidap penyakit malaria untuk dilakukan uji laboratorium. Setelah diketahui hasilnya maka dilakukan tindakan kuratif dan preventif untuk mencegah meluasnya penyakit malaria ini. PT. NNT juga melakukan program kelambunisasi dengan cara memberikan bantuan cuma-cuma kelambu kepada masyarakat sekitar lingkaran tambang.

Untuk kesehatan ibu dan anak, PT. NNT dengan bekerjasama dengan Yayasan Keluarga Sejahtera Seluruh Indonesia (YKSSI) melakukan penyuluhan

kesehatan, pemberian makanan tambahan lewat posyandu, dan pembentukan Kelompok Pemerhati Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA). Secara berkala para bidan dan puskesmas melayani immunisasi TT, dan polio bagi kesehatan ibu dan anak serta pemberian vitamin A setiap tahunnya. Demikian pula dengan program Keluarga Berencana (KB) para bidan melayani baik dengan berbagai alat kontrasepsi. Peningkatan jumlah Puskesmas beserta tenaga medis dan para medisnya serta meningkatnya perhatian dan bantuan dari PT. NNT dari tahun ketahun telah berdampak positif bagi masyarakat sekitar lingkaran tambang. Namun khusus di Desa Aik Kangkung dan Desa Tatar kondisi ini belum terlalu dinikmati masyarakat yang disebabkan rusaknya jalan yang menghubungkan kedua desa tersebut dengan pusat Kecamatan Sekongkang, sehingga diperlukan waktu yang lama serta transportasi yang terbatas dan memakan waktu lama jika mereka ingin memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih memadai.

Berbagai program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PT. NNT secara umum telah berhasil meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kesehatan. Selanjutnya keberhasilan ini pada gilirannya telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan secara umum khususnya pada masyarakat di sekitar lingkaran tambang. Indikasinya adalah bahwa jika ada seorang anggota keluarga yang mengalami gejala suatu penyakit maka mereka akan segera melakukan

pengobatan pada berbagai fasilitas kesehatan yang ada tersedia sampai di tingkat dusun. Respon yang cepat dari segenap tenaga kesehatan baik yang dikelola oleh Pemda maupun dari PT. NNT telah membuat masyarakat memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di sekitar lingkaran tambang.

Definisi Operasional K1 : Cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Adapun cakupan Kabupaten untuk tahun 2014 mencapai 100,6% atau 3.324 ibu hamil. Capaian tahun 2014 ini meningkat 0,6% dibandingkan tahun 2013 yaitu 100% (3.14 ibu hamil) hal ini disebabkan karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pada awal kehamilan serta didukung oleh ketersediaan bidan-bidan di setiap desa serta fasilitas kesehatan yang mendukung. Tapi dilihat dari target sasarannya yaitu 100%, cakupan pelayanan K1 tahun 2014 mencapai target.

Definisi Operasional K4 : Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2 dan 2 kali pada trimester ke-3 disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Adapun cakupan kabupaten tahun 2014 mencapai 93,6% atau 3.093 ibu hamil. capaian tahun 2014 ini

meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu 98,61% (2.950 ibu hamil) hal ini dikarenakan sudah mulainya pengelolaan ibu hamil dan penggunaan kohort sebagai tools untuk memantau ibu hamil adapun capaian K4 lebih rendah dari K1 karena masih ada K1 akses dan kasus perdarahan hamil muda sehingga menyebabkan banyak K4 yang tidak tercapai. Dilihat dari target sarannya 100%, cakupan K4 belum mencapai target.

Definisi Operasional Maternal Komplikasi : Cakupan Ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani secara definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Adapun cakupan rata-rata kabupaten untuk tahun 2014 mencapai 101,9% atau 673 ibu hamil komplikasi. Dibanding dengan tahun 2013 angka ini mencapai penurunan yaitu 120,6% atau 746 ibu hamil komplikasi. Dilihat dari target sarannya yaitu 85%, capaian maternal komplikasi tertangani sudah memenuhi target.

Definisi Operasional : Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dan

ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar. Adapun cakupan rata-rata kabupaten untuk tahun 2014 mencapai 94,3% atau 2.974 ibu bersalin. Cakupan ini menurun sebesar 6% jika dibandingkan tahun 2013. mencapai 100,6% atau 2.968 ibu bersalin. Dilihat dari target sarasannya yaitu 90%, cakupan pelayanan persalinan tenaga kesehatan sudah mencapai target yang telah ditentukan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran Tabel 29.

Definisi Operasional : Ibu nifas paling sedikit mendapatkan 3x pelayanan kesehatan selama masa nifas, ini dilakukan untuk menilai keadaan ibu dan bayi baru lahir, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi. Adapun cakupan kabupaten untuk tahun 2014 mencapai 95,00% atau 2.996 ibu nifas. Cakupan pelayanan ibu nifas di tahun 2014 menurun sebesar 4% dibandingkan tahun 2013 yaitu 99,3% atau 2.930 ibu nifas. Dari target cakupan yaitu sebesar 95%, cakupan pelayanan ibu nifas ini sudah mencapai target yang ditentukan.

Definisi Operasional Neonatal Risti/Komplikasi : Cakupan neonatal komplikasi/resiko tinggi yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sasaran neonatal dengan resiko tinggi (15% dari total neonatal) di wilayah dalam kurun waktu tertentu. Adapun cakupan rata-rata Kabupaten untuk tahun 2014 mencapai 88,3% atau 398 neonatal komplikasi.

Cakupan ini meningkat sebesar sebesar 2,9% dibandingkan tahun 2013 yaitu 85,4% atau 360 neonatal komplikasi. Dilihat dari target cakupan yaitu 84%, pencapaian tahun ini sudah memenuhi target.

Definisi Operasional Bayi 4 : Prosentasi kunjungan yang keempat kalinya atau lebih pada bayi umur 10-12 bulan di sarana pelayanan kesehatan maupun rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya dibanding dengan jumlah seluruh sasaran bayi di wilayah dalam kurun waktu tertentu. Adapun cakupan rata-rata kabupaten untuk tahun 2014 mencapai 100,5% atau 3.020 bayi. Cakupan ini menurun sebesar 5% dibandingkan tahun 2013 yaitu mencapai 105,5% atau 2.967 bayi. Dilihat dari target sasarannya yaitu 94%, cakupan pelayanan Kunjungan Bayi 4 mencapai target.

Pada tahun 2014 terdapat 114 bayi BBLR atau 3,8% dari 2.995 bayi lahir hidup menurun dari tahun sebelumnya 2013 mencapai 120 bayi yang BBLR atau 4,0% dari 3.004 bayi lahir hidup. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran Tabel 37.

Definisi Operasional Balita 2 : Prosentasi anak balita (1-5 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar kedua kali sesuai kelompok umur oleh petugas kesehatan dibandingkan jumlah sasaran anak balita satu tahun. Adapun cakupan rata-rata kabupaten tahun 2014 mencapai 88,0% atau 10.573 balita. Capaian ini meningkat sebesar 8% dibandingkan tahun 2013 yaitu mencapai 80,0% atau

8.993 balita. Dilihat dari target sasarannya yaitu 75%, cakupan pelayanan Kunjungan Balita 2 sudah mencapai target.

Definisi Operasional pelayanan keluarga berencana (KB) : Adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alkon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan. Adapun cakupan rata-rata kabupaten tahun 2014 mencapai 86,8% atau 17.720 akseptor KB aktif. Cakupan ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 81,2% atau 16.378 akseptor KB aktif. Dari target sasaran yang telah ditentukan yaitu 75%, cakupan KB aktif ini mencapai target. Tercapainya target karena mulai tinginya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB.

Akseptor KB aktif ini terdiri dari beberapa jenis pemakaian alokon, antara lain: metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan non MKJP. Yang termasuk dalam MKJP adalah IUD, MOP, MOW dan Implant. Sedangkan jenis non MKJP adalah suntik, PIL, kondom, dan obat vagina.

Cakupan posyandu aktif ,diperoleh dari perhitungan persentase jumlah posyandu aktif di

suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh posyandu di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama.

Keberadaan posyandu merupakan salah satu indikator dalam pentahapan Desa dan Kelurahan Desa Siaga Aktif. Kegiatan pokok di posyandu adalah pelayanan KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare. Posyandu diselenggarakan oleh kader posyandu yang berasal dari masyarakat setempat dan tenaga kesehatan puskesmas. Berhasil tidaknya suatu posyandu dilihat dari peran serta masyarakat sebagai sasaran posyandu datang ke posyandu dan naik tidaknya berat badan bayi dan balita yang ditimbang di posyandu. Cakupan posyandu aktif tahun 2014 mencapai 98,56%, cakupan ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2013 hanya mencapai 69,05%.

e. Air Bersih dan Permukiman

Kebutuhan masyarakat terhadap air bersih khususnya untuk masak dan minum yang berasal dari air ledeng (PDAM) telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 8,8 % pada tahun 2004 meningkat menjadi 17,1 % pada tahun 2005. Pada tahun 2006 penggunaan air ledeng mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 28,0 %, sementara pada tahun 2013 mengalami peningkatan lagi menjadi 33,58 %. Pada tahun 2014 kondisi tidak berubah tetap sebanyak 57 KK yang menggunakan air

ledeng sebagai sumber air bersih untuk masak dan minum. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang berasal dari PDAM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Meskipun pada tahun 2003 terjadi penurunan yang disebabkan karena sering macetnya distribusi air, akan tetapi dengan berbagai perbaikan dan sambungan baru telah meningkatkan kembali penggunaan air tersebut. Sekarang ini layanan PDAM sudah mencakup 8 desa kecuali Aik Kangkung dan Tata dan Telonang Baru. Hal ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih cukup baik.

Masyarakat mengharapkan agar jangkauan pelayan air PDAM semakin diperluas sehingga bisa melayani kebutuhan air di seluruh desa baik yang berada di Kecamatan Jereweh maupun yang berada di Kecamatan Sekongkang. Pola penggunaan air bersih baik pada musim kemarau maupun musim penghujan tidak mengalami perubahan yang signifikan, artinya musim tersebut sama sekali tidak mempengaruhi pola konsumsi air bersih karena relatif tersedia. Kecuali penggunaan air sungai yang lebih banyak pada musim hujan, itupun hanya dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kali atau sungai. Jika yang pemukimannya jauh dari sungai mereka lebih memilih menggunakan sumur, karena pada musim hujan air sumur mereka relatif meningkat jumlahnya.

Hal yang cukup berarti adalah bahwa penggunaan sumur mengalami penurunan dari 80,85 % pada tahun 2003 menjadi 64,8 % pada tahun 2004 dan turun lagi menjadi 56,6 % pada tahun 2006 dan sisa 32 % pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan lagi menjadi 48,6. Tetapi pada tahun 2007 penggunaan sumur sebagai sumber air bersih masyarakat mengalami peningkatan lagi menjadi 57,03 % kemudian pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan yang signifikan sekitar 50 %. Masyarakat beralih menggunakan air ledeng dan air galon yang telah cukup tersedia di pasar-pasar lokal.

Khusus penggunaan air galon mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari hanya 7,71 % pada tahun 2005 meningkat menjadi 16,5 % pada tahun 2006 tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan lagi hingga menjadi 9,38 % namun sejak tahun 2010 dan 2013 mengalami peningkatan sekitar 30 % dari jumlah penduduk. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sedikit menjadi 26,2 %. Beberapa penduduk yang keluarganya bekerja di PT. NNT bahkan memperolehnya secara gratis. Sementara itu di Desa Aik Kangkung dan Desa Tatar telah dibangun pompa air dengan menggunakan tenaga kincir angin yang merupakan sumbangan dari PT. NNT, sehingga diharapkan kebutuhan air bersih di kedua desa tersebut sebagian besar dapat terpenuhi. Adapun gambaran kondisi penggunaan sumber air bersih masyarakat di daerah lingkaran tambang pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 101. Sebaran responden berdasarkan sumber air bersih penduduk daerah lingkaran tambang tahun 2014.

No	Desa	Sumber air untuk Masak dan Minum							
		Tahun 2013				Tahun 2014			
		AL	SR	SI	G	AL	SR	SI	G
1.	Benete	4	13	1	5	1	19	0	12
2.	Maluk	0	19	0	8	2	17	0	8
3.	Sekongkang Atas	9	18	0	5	15	15	0	6
4.	Sekongkang Bawah	22	4	0	3	16	7	0	11
5.	Tongo Sejorong	6	5	0	5	7	5	0	1
6.	Aik Kangkung	0	15	0	2	0	15	0	2
7.	Tatar	0	4	0	3	1	17	0	0
8.	Goa	2	25	0	8	3	20	0	12
9.	Beru	7	22	0	3	5	23	0	9
10	Belo	3	19	0	12	0	19	0	14
11	Dasan Anyar	1	15	0	3	3	12	0	11
12	Bukit Damai	1	6	0	7	1	10	0	7
13	Mantun	1	9	0	2	0	9	0	4
14	Pasir Putih	0	15	0	10	1	5	0	8
15	Telonang Baru	0	12	0	0	2	4	0	1
Jumlah		56	201	1	76	57	197	0	106

Catatan : AL= Air Ledeng (PDAM) SR = Sumur SI = Sungai G = Galon

Kabupaten Sumbawa Barat sudah mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang sudah ditetapkan yaitu 76%, Tahun 2014 mencapai 96,23% penduduk dan 95,28% Kepala Keluarga memiliki akses terhadap sarana air bersih. Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman telah dilaksanakan diseluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat meliputi : Pengawasan Lingkungan Permukiman, Pengawasan Sarana Pembuangan

Kotoran (Jamban), Pengawasan Pesticida dan Pengawasan Sampah.

Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) cakupan rumah sehat sebesar 69% dan di Kabupaten Sumbawa Barat sudah mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tahun 2014 mencapai 80,94% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2013 hanya mencapai 79,98%. Pada tahun 2014, Kepala Keluarga yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan 87,04% sudah mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (75%). Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) mencapai 84,48%, sudah diatas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan (76%). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada menggunakan system yaitu Open Dumping (2 buah memenuhi syarat) dan Control Landfil (1 buah memenuhi syarat) serta TPA yang menggunakan sistem lainnya ada 6 dan semuanya memenuhi syarat kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Francis M.,1982. Modern Sociological Theory, An Introduction. Oxford University Press. Bombay, Calcutta, Madras.
- Ananta, Aris, 1997. Revolusi Mobilitas Penduduk dan Integrasi Perekonomian Internasional. Warta Demografi, Tahun ke 27, Nomor 2. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Jakarta.
- Appelbaum Richard P., 1970. Theories of Social Change. Markham Publishing Company. Chicago.
- BPS, 1996-2001. Kabupaten Sumbawa Dalam Angka Tahun 1996-2001. Kantor BPS Kabupaten Sumbawa. Sumbawa Besar
- BPS, 1996-2001. Kecamatan Jereweh Dalam Angka Tahun 2000. Kantor BPS Kabupaten Sumbawa. Sumbawa Besar
- BPS, 1996-2001. Kecamatan Jereweh Dalam Angka Tahun 2000. Kantor BPS Kabupaten Sumbawa. Sumbawa Besar
- BPS, 1999. Laporan Pembangunan Manusia Propinsi Nusa Tenggara Barat 1999. Kerjasama BPS NTB dengan Bappeda NTB. Mataram.

- BPS, 2000. Statistik Harga Produsen dan Nilai Tukar Petani Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kantor BPS Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- BPS, 2001. Keadaan Angkatan Kerja Nusa Tenggara Barat Tahun 2001. Kantor BPS Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- BPS, 2001. Tinjauan Perekonomian Daerah Nusa Tenggara Barat. Kantor BPS NTB. Mataram.
- Cliggett, Lisa, 2000. Social Components of Migration : Experiences from Southern Province, Zambia. Human Organization, Journal of Society for Applied Anthropology Volume 59 No. 1.
- Conyers, Diane, (1984). Perencanaan Pembangunan di Dunia Ketiga. Diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- De Jong, Gordon F, and James T. Fawcett, 1981. Motivation for Migration. An Assessment and a Value-Expectancy Research Model, dalam Migration Decision Making, Multidisciplinary Approach to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries (De Jong and Robert W Gardner, ed). Pergamon Press, New York, Oxford, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt.
- De Jong, Gordon F., and Robert W. Gardner. 1981. Migration Decision Making, Multidisciplinary Approach to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries. Pergamon Press, New York, Oxford, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt.
- Dusseldorp, ?. The Participation in Development. Baltimore and London.
- Eicher Carl, K. And Staatz, 1990. Agricultural development in The Third World. Second Edition. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London.

- Faisal, Sanafiah, 2003. Pengumpulan dan Analisis data dalam Penelitian Kualitatif. dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Burhan Bungin, Ed). Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faperta Unram, 1997. Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama dengan Bappeda TK I NTB. Mataram.
- Faperta Unram, 2000. Proyek Pembinaan Petani dalam Usahatani Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa. Kerjasama dengan PT. NNT. Mataram
- Faperta Unram, 1998. Proyek Pembinaan Petani dalam Usahatani Sayur-Sayuran di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa. Kerjasama dengan PT. NNT. Mataram.
- Garcia Manuel B., 1985. Sociology of Development, Perspective and Issues. National Book Store Inc. Publishers Metro Manila Philippines.
- Garcia,Gill. 1982. Rural Development and The State Contradiction and Dilemas in Developing Countries. Matthius and Co. London.
- Gardner, Rober W., 1981. Macrolevel Influence on The Migration Decision Making, dalam Migration Decision Making, Multidiciplinary Approach to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries (De Jong and Robert W Gardner, ed), Pergamon Press, New York, Oxford, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt.
- Grieco Elizabeth M and Monica Boyd, 2002. Woman and Migration : Incorporating Gender into

- International Migration Theory. Florida State University, College of Social Sciences.
- Grusky Oscar and Miller Gerorge A., 1981. *The Sociology of Organizations, Basic Studies, Second Edition*. The Free Press, A Division of Macmillan Publishers, London.
- Hanafie, Sri Rahayu M.J., 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Migrasi dan Perilaku Pekerja Migran Internasional (Studi di Dua Daerah Perdesaan Tulung Agung)*. Ringkasan Disertasi. Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
- Hani, Evita S., 2006. *Implementasi Kebijakan Ekspor Jasa tenaga Kerja Indonesia di Jawa Timur*. Bahan Seminar Hasil Disertasi. Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Hayami, Yujiro and Vernon W. Ruttan, 1985. *Agricultural Development, An International Perspective*. The Johns Hopkins University Press – Baltimore and London.
- Hugo, Graeme J., 1981. *Village-Community Ties, Village Norms and Ethnic and Social Network : A Review of Evidence from The Third World, dalam Migration Decision Making, Multidiciplinary Approach to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries (De Jong and Robert W Gardner, ed)*, Pergamon Press, New York, Oxford, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt.
- Kanto, Sanggar, 2007. *Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Sosiologi Pembangunan Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya..

- Kartodirdjo Sartono, 1986. Metode Penggunaan Bahan Dokumen, dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Koentjaraningrat, ed). PT. Gramedia, Jakarta.
- Karyadi, Wiwesapta, 2002. Penguatan Basis ekonomi Masyarakat Pantai untuk Menanggulangi kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan Pantai. Laporan Riset Unggulan Terpadu. Kementerian Riset dan Teknologi RI- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Karyadi, Wiwesapta, 2003. Perilaku Petani terhadap Sistem Pengetahuan Tradisional (Pranata Mangsa) di Perdesaan Lombok Selatan. *Journal Agroteksos*. Volume 15 No. 1. Universitas Mataram.
- Karyadi,WS., 1998. Studi Masalah Kemiskinan di Pedesaan dan Penanggu-langannya. Lembaga Penelitian Unram, Mataram.
- Koentjaraningrat, 1985. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Krulfeld, R.M., 1976. *The Villages Economics of The sasak of Lombok. A Comparison of Three Indonesian Peasant Communities*, Yale University.
- Kurada,Y. and F. Yotopoulos, 1980. A Subjective Equilibrium Model of The Agriculture Household with Demographic Behaviour. Working Paper No.80-3. FAO/UNFPA.
- Lauer, Robert H., 1993. Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Terjemahan : Aliamdan) PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Lea, David AM. And D.P. Choudury, 1983. *Rural developmment and The State. Contradictions and Dilemas in Developing Countries*. Methuen & Co. Ltd. London and New York.

- Lee, Evert S., 1966. Suatu Teori Migrasi (Terjemahan oleh Hans Daeng, 1987). Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lemlit Unram, 1998. Identifikasi Potensi dan dan Prospek Usaha Mikro di Kawasan Penambangan PT. NNT (Makalah Seminar). Kerjasama dengan PT. NNT. Mataram.
- Lemlit Unram, 1998. Perubahan Perilaku Sosial Budaya dan Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Jereweh (Makalah Seminar). Kerjasama dengan PT. NNT. Mataram.
- Long, Nurman, 1987. Sosiologi Pembangunan Pedesaan (Terjemahan : Tim Penerjemah Bina Aksara) Bina Aksara, Jakarta.
- Mabogunye, Akin L., 1970. System Approach to Theory of Rural – Urban Migration. From Geographical Analysis, Volume 2, 1970. Copyright by The Ohio State University Press. Columbus.
- Osili, Una Ukonkwo, 2002. Remittances and Savings from International Migration : Theory and Evidence Using a Matched Sample. Departemen of Economics Indiana University-Purdue University, Indianapolis.
- P3P Unram, 1995. Evaluasi Kelompok Masyarakat Desa Tertinggal di Propinsi NTB. Kerjasama dengan Bappeda TK I NTB. Mataram.
- P3R Unram, 1998/1999. Studi Perluasan Pasar Sayur, Buah, Daging Ayam, Telur dan Ikan Laut di Wilayah Penambangan Batu Hijau Kabupaten Sumbawa. Kerjasama dengan PT. NNT. Matarm.
- Paloma, Margaret M., 2003. Sosiologi Kontemporer (Penerjemah : Tim Penerjemah Yosagama), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Parson, Tacott, 1985. Esei-esei Sosiologi (Alih Bahasa : S. Aji). Penerbit Aksara Persada Press, Jakarta.
- Pasaribu dan B. Simanjuntak, 1985. Sosiologi Pembangunan. Penerbit Tarsito, Bandung.
- PPLH Unram, 2001 dan 2002. Survei Perikanan di Desa-Desa Nelayan Kabupaten Sumbawa Bagian Barat dan kabupaten Lombok Timur Bagian Selatan. Kerjasama dengan PT.NNT. Mataram.
- PPLH Unram, 2001. Studi Dampak Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Kegiatan Penambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (Laporan Akhir). Kerjasama dengan PT. NNT. Mataram.
- PT.NNT, 1996. Studi Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Pertambangan Tembaga-Emas Di Batu Hijau Kecamatan Jereweh-Kabupaten Sumbawa (Laporan Utama). April 1996.
- Rahardjo Dawam, 1999. Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial. LP3ES – LSAF Jakarta.
- Raharto, Aswatini, 1997. Aspek-Aspek Sosio Demografi Migrasi Internasional dari Indonesia. Warta Demografi, Tahun ke 27, Nomor 2. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Jakarta.
- Rahman Bustami dan Harry Yuswadi, 2004. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Kompyawisda - LKPM Fisip UNEJ. Jember.
- Ritzer George and Douglas J. Goodman, 2003. Teori Sosiologi Moderen (Terjemahan : Alimandan), Fajar Interpretama Offset, Jakarta.
- Rodenburg, Janet, 1997. In The Shadow of Migration. Rural Woman and Their Houshold in North Tapanuli, Indonesia. Verhandelingen, Van Het

- Koninklijk Instituut, Voor Taal, Land-En Volkenkunde 174. KITLV Press, Leiden.
- Roucek, J.S., 1987. Pengendalian Sosial (Terjemahan : Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari), Rajawali Press. Jakarta.
- Sadikin, Amir, 1998. Mobilitas Penduduk dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Sektor Informal di Kota Makassar. Tesis Fakultas Pascasarjana IPB. Bogor.
- Salladien, 1999. Mobilitas Angkatan Kerja Indonesia. Kumpulan Materi Kuliah Kependudukan – Analisis Migrasi dan Ketenagakerjaan. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Sanderson Stephen K., 2003. Makrososiologi. Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial. Edisi II. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Scott, J.C., 1982. The Moral Economy of The Peasant. Rebellion on Subsistence in South East Asia, Yale University Press, New Haren and London.
- Siddik, Amri R., Karyadi, 2003. Studi Tingkat Keseimbangan Ekonomi Masyarakat Petani di Daerah Lingkar Tambang PT. Newmont Nusa Tenggara. Hasil Penelitian Dasar. Lembaga Penelitian Universitas Mataram. Mataram.
- Siddik, M. dkk, 1999. Studi Perubahan Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani di Kawasan Penambangan Batu Hijau Kabupaten Sumbawa. Fakultas Pertanian Unram. Mataram.
- Simanjuntak, P.J. Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soedarsono Nani, 2000. Pembangunan Berbasis Rakyat (Community Based Development), Melati Bhakti Pertiwi. Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Spaan, Ernest, 1994. *Taikong and Calos : The Role of Midlman and Brokers in Javanese International Migration dalam International Migration review* Vol. XXVIII Nomor 1.
- Stalker, 2004. [http/ ; production. Com/Migration/mg](http://www.com/migration/mg). Emigran. 1 htm.
- Stouffer, 2004. www.com/migration/mg theories 2. htm.
- Susanto, Astrid S., 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Bina Cipta, Jakarta.
- Vago, Staven, 1991. *The Dinamic of Planned Change*. Harcourt Brace and World Inc.
- Wiyono, Nur Hadi, 2003. *Migrasi Internasional tenaga Kerja*. *Warta Demografi*, Tahun ke 33, Nomor 4. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Jakarta.
- Zopf, Jr, Paul E., 1980. *Population : An Introduction to Social Demography*. Mayfield Publishing Co., California.

